BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 69a/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 69a/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 1

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 3

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 terdiri dari lima laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

a. Dasar Hukum atas Pemeriksaan, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;

b. Sistematika Pelaporan;

c. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;

d. Opini BPK atas LKPP Tahun 2013;

e. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2013;

f. Rekomendasi BPK;

g. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2009-2013; dan

h. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan

c. LKPP Tahun 2013.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

a. Resume Laporan atas SPI; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV memuat:

a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan

b. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2012.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

a. Kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah;

b. Keterbukaan proses penganggaran;

c. Ketersediaan informasi bagi publik; dan

d. Integritas data yang dilaporkan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 dan 05 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

03 Dalam Laporan BPK Nomor 45a/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 karena: (1) Pemerintah belum menghitung untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing; (2) kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yaitu kelemahan dalam pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),

penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan berindikasi merugikan keuangan negara, Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan Kementerian Negara/Lembaga (KL) tidak disetor ke Kas Negara, dan penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran; (3) Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys dan Daftar Nominatif Properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti Eks BPPN yang berasal dari kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA); dan (4) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL. Dalam Tahun 2013, Menteri Keuangan telah melakukan upaya perbaikan dengan: (1) menyempurnakan dan mengimplementasikan kebijakan perhitungan selisih kurs pada rekening BUN; (2) memperbaiki aplikasi pembayaran (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D) sehingga dapat mendeteksi pagu minus pada DIPA dan menolak penerbitan perintah pembayaran/SP2D yang pagunya minus; (3) melakukan penilaian sebagian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA; (4) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan sebagian dokumen Aset Kredit Eks BPPN; (5) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman uang dalam rangka *Treasury Single Account* pengeluaran dan kiriman uang dalam rangka pelimpahan Penerimaan Negara; (6) menerbitkan PMK Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL; dan (7) menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.05/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.12 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp147,71 triliun dan Rp120,93 triliun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 di antaranya merupakan Piutang *Over Lifting* dari kegiatan hulu migas sebesar Rp7,18 triliun, Piutang Penjualan Minyak dan Gas Bumi (Migas) bagian Negara sebesar Rp3,86 triliun, dan Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp66,01 triliun. Piutang Bukan Pajak masih mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) dari jumlah Piutang *Over Lifting* sebesar Rp7,18 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan KKKS terkait; (2) dari jumlah piutang penjualan migas bagian negara sebesar Rp3,86 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp2,46 triliun juga mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks BPPN yang disajikan sebesar Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp3,06

triliun yang belum selesai ditelusuri oleh Pemerintah; dan (4) terdapat saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali kepada Pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari Piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan Hak Pemerintah atas Piutang Bukan Pajak berupa tagihan *over lifting*, penjualan migas, Aset Kredit Eks BPPN dan saldo Dana Belanja Pensiun pada mitra bayar PT Taspen.

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,59 triliun. SAL per 31 Desember 2013 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp40,26 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp26,33 triliun. SAL per 31 Desember 2013 tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp2,26 miliar yang tidak dapat dijelaskan. Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) sebesar Rp140,40 miliar sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik SAL menunjukkan kelemahan-kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL sebesar Rp36,41 miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN sebesar Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang sebesar Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL.

06 Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai Piutang *Over Lifting* dan hasil penjualan gas bumi, Aset Kredit Eks BPPN, dan piutang saldo Dana Belanja Pensiun, serta menyelesaikan permasalahan SAL, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 dan 2012, realisasi anggaran dan arus kas serta CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

07 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 69b/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Nomor 69c/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANGGOTA II





Sapto Amal Damandari
Akuntan Register Negara No. D - 10153

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2013 dengan memperhatikan:

a. kesesuaian LKPP dengan SAP;

b. kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;

c. efektivitas SPI; dan

d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang meliputi LKKL, LKBUN, dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2013, LRA, LAK, dan CaLK yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada LRA, LAK, serta SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan menggunakan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan SAP; dan

b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2012.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 39/ST/I-IV/3/2014 tanggal 26 Maret 2014 dimulai 2 April 2014 s.d. 28 Mei 2014.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LK BUN Tahun 2013 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2013.

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL Tahun 2013 (termasuk BPK yang diperiksa oleh

Kantor Akuntan Publik), dan LK BUN, menunjukkan terdapat 65 KL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 19 KL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua KL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Satu entitas belum selesai pemeriksaannya yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pemeriksaan belum selesai karena LK *Unaudited* diserahkan kepada BPK tanggal 21 April 2014. Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LK BUN Tahun 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LK BUN
Tahun 2009-2013

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan Agung	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
21.	029	Kementerian Kehutanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP-DPP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
		Transaksi Keuangan					
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
58.	083	Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1)	WTP	WTP	WTP	WDP
75.	107	Badan SAR Nasional	1)	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1)	WTP	WDP	WTP	WTP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	4)	4)	WDP	WDP	WDP
78.	110	Ombudsman RI	4)	4)	WTP	WTP	WTP
79.	111	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	4)	4)	TMP	WDP	WDP
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	5)	5)	5)	TMP	7)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5)	5)	5)	WDP	WTP
82.	114	Sekretariat Kabinet	5)	5)	5)	WTP	WTP
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5)	5)	5)	WDP	WDP
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5)	5)	5)	WDP	WDP
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	5)	5)	5)	WDP	WDP
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5)	5)	5)	TMP	WDP
87.	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	6)
88.	999.02	Pengelolaan Hibah	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	6)
89.	999.03	Investasi Pemerintah	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	6)
90.	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	WDP	WTP	WTP	6)
91.	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	6)
92.	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	WDP	2)	2)	2)	6)
93.	999.07	Belanja Subsidi	1)	WDP	WTP	WTP-DPP	6)
94.	999.08	Belanja Lain-lain	1)	WDP	WTP-DPP	WTP	6)
95.		Bendahara Umum Negara	3)	WDP	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
1)	:	Dibentuk Tahun 2010
2)	:	BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
3)	:	Diberikan Opini mulai Tahun 2010
4)	:	Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011
5)	:	Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
6)	:	Dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tidak diberikan opini
7)	:	Belum Selesai Diperiksa

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

(AUDITED)



MEI 2014



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

(Audited)

MEI 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2013 disampaikan terlebih dahulu kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP. LKPP Tahun 2013 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2013 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun, atau 95,80 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2013. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.650,56 triliun, atau 95,62 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2013, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp237,40 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,72 triliun;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp3.567,59 triliun dan Kewajiban sebesar Rp2.652,10 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 adalah sebesar 915,49 triliun;
3. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo awal kas sebelum koreksi per 1 Januari 2013 sebesar Rp71,58 triliun, koreksi saldo awal sebesar minus Rp309,30 miliar, dan penurunan Kas Negara selama TA 2013 sebesar Rp3,56 triliun, sehingga saldo Kas pada Kas Umum Negara (Kas pada Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp67,70 triliun;
4. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memahami hal-hal yang termuat dalam lembar muka (*face report*) laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

LKPP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2012, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II-SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

LKPP Tahun 2013 menginformasikan juga mengenai pelaksanaan Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan LKPP Tahun 2012. Selain upaya-upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan, dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan:

1. Peningkatan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga dan pengelola keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan antara lain melalui pencantuman kesanggupan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) oleh setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Presiden dalam Kontrak Kinerja, dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara tahunan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui sosialisasi dan bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh K/L dan pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang sampai dengan akhir tahun 2013 telah mendidik/melatih 32.611 orang;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP secara periodik.
4. Penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur, antara lain yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan APBN, termasuk kebijakan penyusutan Aset Tetap Pemerintah;
5. Penertiban aset-aset Pemerintah melalui inventarisasi dan penilaian terhadap Aset Tetap, penelusuran Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan pengamanan Aset Tetap melalui pensertifikatan tanah;
6. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKKL khususnya untuk K/L yang masih mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
7. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu Laporan Keuangan, sebagai *compliance auditor*, *quality assurance*, *consultative management*, dan *early warning system*.

Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama para pengguna laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 19 Mei 2014
a.n Pemerintah Republik Indones
Menteri Keuangan

Muhamad Chatib Basri

INDEKS ISI

KATA PENGANTAR iii
INDEKS ISI v
INDEKS TABEL vi
INDEKS GRAFIK vii
INDEKS DAFTAR ix
INDEKS SINGKATAN x
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xiii
RINGKASAN 2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 6
I. LAPORAN REALISASI APBN 8
II. NERACA 11
III. LAPORAN ARUS KAS 15
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 18
A. PENJELASAN UMUM 18
A.1. DASAR HUKUM 18
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 18
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 46
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 50
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 65
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 65
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 66
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 90
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 100
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 100
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 101
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 175
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 195
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 195
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 199
DAFTAR 219

INDEKS TABEL

1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013	19
2.	Ringkasan Realisasi Anggaran TA 2012, APBN 2013 dan APBNP 2013	20
3.	Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2013	29
4.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2009 – 2013	30
5.	Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja 2009-2013	38
6.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2009-2013	42
7.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009-2013	45
8.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2012 dan TA 2011	72
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	107
10.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	108
11.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*	167
12.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	167
13.	Saldo Anggaran Lebih TA 2013 dan TA 2012	168
14.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2013 dan 2012	175
15.	Seri SPN yang diterbitkan tahun 2013	466
16.	Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2013	466
17.	Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2013	467
18.	Rincian pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2013	467
19.	Transaksi *Buyback* tahun 2013	468
20.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2013	470
21.	*Outstanding* SBN seri *Fixed Rate* (FR) per 31 Desember 2013	470
22.	Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2013	472
23.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri *Variable Rate* (VR) per 31 Desember 2013	473
24.	Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2013	474
25.	Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013	476
26.	Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2013	476
27.	Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2013	477
28.	Struktur *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2013	479
29.	Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S 31 Desember 2013	479
30.	Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013	480
31.	Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013	481
32.	Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2013	483
33.	SBN Neto Tahun 2013	484

INDEKS GRAFIK

1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2009– 2013 22
2. Tren PDB Harga Berlaku tahun 2013 23
3. Struktur PDB Menurut Pengeluaran tahun 2012 dan 2013 24
4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 dan 2013 24
5. Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2009-2013 25
6. Tren Laju Inflasi Bulanan (m-t-m) selama Tahun 2013 26
7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2012-2013 26
8. Perkembangan Ekspor tahun 2012 dan 2013 27
9. Perkembangan Impor tahun 2012 dan 2013 27
10. Cadangan Devisa Triwulanan 2012-2013 27
11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013 28
12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013 30
13. Pagu Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013 31
14. Persentase Capaian Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013 31
15. Tax Ratio Indonesia 2009-2013 31
16. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2009-2013 32
17. Persentase Capaian PNBP Tahun 2009-2013 32
18. Komposisi PNBP Tahun 2013 33
19. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 37
20. Tren Belanja Pemerintah Pusat Bulanan TA 2013 dan TA 2012 39
21. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2013 39
22. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2013 40
23. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2013 40
24. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2013 41
25. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2013 41
26. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2013 41
27. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2013 42
28. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2013 43
29. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2013 43
30. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2009-2013 44
31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2009-2013 45
32. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2009 - 2013 65
33. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2009 - 2013 66

34. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 66
35. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 72
36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013 73
37. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2013 73
38. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 79
39. Komposisi Pendapatan BLU TA 2013 92
40. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2013 92
41. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2009– Tahun 2013 100
42. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 184
43. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 198
44. Struktur *Outstanding* ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2013 471
45. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2013 472
46. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2013 473
47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2013 473
48. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2013 474
49. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2013 474
50. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2013 475
51. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2013 475
52. Struktur *Outstanding* SUP per 31 Desember 2013 476
53. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2013 476
54. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2013 477
55. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2013 477
56. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2013 478
57. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2013 478
58. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2013 479
59. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2013 479
60. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013 480
61. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013 480
62. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013 481
63. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013 481
64. Struktur *Outstanding* SBN Valas per 31 Desember 2013 482
65. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013 482
66. Struktur *Outstanding* SBN Rupiah per 31 Desember 2013 483

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2013 dan 2012 219
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2013 235
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 250
4. Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 302
5. Persetujuan *Multi Years Contract* (Kontrak Tahun Jamak) 306
6. Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA 307
7. Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 Pengelola Lain-lain TA 2013 310
8. Rekening Khusus per 31 Desember 2013 318
9. Saldo Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2013 319
10. Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 320
11. Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 326
12. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 328
13. Piutang Pajak per 31 Desember 2013 329
14. Piutang PNBP per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 334
15. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi 335
16. Aset Kredit Eks BPPN 336
17. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 339
18. Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 340
19. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2013 342
20. Daftar BPYBDS pada BUMN per 31 Desember 2013 348
21. Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2013 349
22. Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2013 351
23. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2013 352
24. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2013 353
25. Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2013 357
26. Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2013 369
27. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 370
28. Aset KKKS per 31 Desember 2013 372
29. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2013 379
30. Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 381
31. Aset PT PPA per 31 Desember 2013 383
32. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 385
33. Utang Bunga – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013 387
34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013 390
35. Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2013 392
36. Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2013 393
37. Ikhtisar laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2013 396
38. Penyesuaian Perhitungan Penyusutan 398
39. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2013 401
40. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2013 407
41. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2012 411
42. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 413
43. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2012 463

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*

DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor Production Sharing
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*

PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dolar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	66
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	67
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	67
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	67
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	68
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	68
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	69
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	69
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	70
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	70
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	71
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	71
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	73
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	74
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	75
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	75
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	76
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	77
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	77
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	78
Catatan	B.2.2.2	**Transfer ke Daerah**	78
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	79
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	80
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	80
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	80
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	81
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	81
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	81
Catatan	B.2.2.3	Suspen	82
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	**Defisit Anggaran**	83
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	83
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	83
Catatan	B.2.4.1.1	Penggunaan SAL	83
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	84
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	84
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	85
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	85
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	86
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	8

Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	87
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	87
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	87
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	87
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	88
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	89
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	89

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	89

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	90

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	101
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	102
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	103
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	103
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	103
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	104
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	104
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	105
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	106
Catatan	C.2.10	Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	106
Catatan	C.2.11	Piutang Pajak	106
Catatan	C.2.12	Piutang Bukan Pajak	109
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	118
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	118
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	118
Catatan	C.2.16	Piutang dari Kegiatan BLU	120
Catatan	C.2.17	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	120
Catatan	C.2.18	Persediaan	121
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.19	Dana Bergulir	123
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	124
Catatan	C.2.21	Investasi Non Permanen Lainnya	125
Catatan	C.2.22	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	126
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen PMN	126
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen BLU	131
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen Lainnya	132
Catatan	C.2.26	Aset Tetap	134
Catatan	C.2.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	135
Catatan	C.2.28	Piutang Jangka Panjang	136
Catatan	C.2.29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	138
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	139
Catatan	C.2.31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	153
Catatan	C.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	153

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.33	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154
Catatan	C.2.34	Utang Kepada Pihak Ketiga	154
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	157
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	157
Catatan	C.2.37	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	158
Catatan	C.2.38	Utang SBN Jangka Pendek	160
Catatan	C.2.39	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	160
Catatan	C.2.40	Pendapatan Diterima di Muka	160
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Pendek Lainnya	161

Kewajiban Jangka Panjang

Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	161
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	161
Catatan	C.2.44	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	163
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	164
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	166
Catatan	C.2.47	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	166

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.48	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	167
Catatan	C.2.49	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	170
Catatan	C.2.50	Cadangan Piutang	171
Catatan	C.2.51	Cadangan Persediaan	171
Catatan	C.2.52	Pendapatan yang Ditangguhkan	171
Catatan	C.2.53	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	172
Catatan	C.2.54	Selisih Kurs Bagian Lancar	172
Catatan	C.2.55	Dana Lancar Lainnya	173
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Harus Diterima	173
Catatan	C.2.57	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	173

Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	173
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	173
Catatan	C.2.60	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	173
Catatan	C.2.61	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	174
Catatan	C.2.62	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	174

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	175

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	200
Catatan	D.2.1.1	Pajak Penghasilan	200
Catatan	D.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	201
Catatan	D.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	201
Catatan	D.2.1.4	Cukai	201

Catatan	D.2.1.5	Pajak Lainnya	202
Catatan	D.2.1.6	Pajak Perdagangan Internasional	202
Catatan	D.2.2	PNBP	203
Catatan	D.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	203
Catatan	D.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	203
Catatan	D.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	203
Catatan	D.2.2.4	Penerimaan BLU	204
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	204
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	205
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	205
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	205
Catatan	D.2.7	Subsidi	206
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	207
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	207
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	207
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	208
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	208
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	208
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	208
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	209
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	209
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	209
Catatan	D.2.18	Dana Keistimewaan DIY	209

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.19	Penjualan Aset	210
Catatan	D.2.20	Belanja Modal	210

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	211
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	212
Catatan	D.2.23	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	213
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	214
Catatan	D.2.26	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	214
Catatan	D.2.27	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	214

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.28	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	215
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang	215
Catatan	D.2.30	Transito	216
Catatan	D.2.31	Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	217

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*

DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor Production Sharing
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*

PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dolar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	66
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	67
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	67
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	67
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	68
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	68
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	69
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	69
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	70
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	70
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	71
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	71
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	73
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	74
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	75
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	75
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	76
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	77
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	77
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	78
Catatan	B.2.2.2	**Transfer ke Daerah**	78
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	79
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	80
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	80
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	80
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	81
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	81
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	81
Catatan	B.2.2.3	Suspen	82
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	**Defisit Anggaran**	83
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	83
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	83
Catatan	B.2.4.1.1	Penggunaan SAL	83
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	84
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	84
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	85
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	85
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	86
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	8

Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	87
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	87
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	87
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	87
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	88
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	89
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	89

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	89

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	90

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	101
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	102
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	103
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	103
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	103
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	104
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	104
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	105
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	106
Catatan	C.2.10	Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	106
Catatan	C.2.11	Piutang Pajak	106
Catatan	C.2.12	Piutang Bukan Pajak	109
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	118
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	118
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	118
Catatan	C.2.16	Piutang dari Kegiatan BLU	120
Catatan	C.2.17	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	120
Catatan	C.2.18	Persediaan	121
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.19	Dana Bergulir	123
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	124
Catatan	C.2.21	Investasi Non Permanen Lainnya	125
Catatan	C.2.22	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	126
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen PMN	126
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen BLU	131
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen Lainnya	132
Catatan	C.2.26	Aset Tetap	134
Catatan	C.2.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	135
Catatan	C.2.28	Piutang Jangka Panjang	136
Catatan	C.2.29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	138
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	139
Catatan	C.2.31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	153
Catatan	C.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	153

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.33	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154
Catatan	C.2.34	Utang Kepada Pihak Ketiga	154
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	157
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	157
Catatan	C.2.37	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	158
Catatan	C.2.38	Utang SBN Jangka Pendek	160
Catatan	C.2.39	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	160
Catatan	C.2.40	Pendapatan Diterima di Muka	160
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Pendek Lainnya	161

Kewajiban Jangka Panjang

Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	161
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	161
Catatan	C.2.44	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	163
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	164
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	166
Catatan	C.2.47	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	166

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.48	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	167
Catatan	C.2.49	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	170
Catatan	C.2.50	Cadangan Piutang	171
Catatan	C.2.51	Cadangan Persediaan	171
Catatan	C.2.52	Pendapatan yang Ditangguhkan	171
Catatan	C.2.53	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	172
Catatan	C.2.54	Selisih Kurs Bagian Lancar	172
Catatan	C.2.55	Dana Lancar Lainnya	173
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Harus Diterima	173
Catatan	C.2.57	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	173

Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	173
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	173
Catatan	C.2.60	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	173
Catatan	C.2.61	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	174
Catatan	C.2.62	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	174

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	175

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	200
Catatan	D.2.1.1	Pajak Penghasilan	200
Catatan	D.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	201
Catatan	D.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	201
Catatan	D.2.1.4	Cukai	201

Catatan	D.2.1.5	Pajak Lainnya	202
Catatan	D.2.1.6	Pajak Perdagangan Internasional	202
Catatan	D.2.2	PNBP	203
Catatan	D.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	203
Catatan	D.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	203
Catatan	D.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	203
Catatan	D.2.2.4	Penerimaan BLU	204
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	204
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	205
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	205
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	205
Catatan	D.2.7	Subsidi	206
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	207
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	207
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	207
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	208
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	208
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	208
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	208
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	209
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	209
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	209
Catatan	D.2.18	Dana Keistimewaan DIY	209

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.19	Penjualan Aset	210
Catatan	D.2.20	Belanja Modal	210

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	211
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	212
Catatan	D.2.23	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	213
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	214
Catatan	D.2.26	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	214
Catatan	D.2.27	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	214

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.28	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	215
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang	215
Catatan	D.2.30	Transito	216
Catatan	D.2.31	Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	217



REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2013 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137,16 triliun atau 95,01 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2013 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp140,40 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2013 adalah sebesar Rp237,39 triliun atau 105,89 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,72 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2013 (*Unaudited*)			TA 2012 (*Audited*)
	Anggaran (UU No. 15/2013)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.502,0	1.438,89	95,80	1.338,11
Belanja Negara	1.726,19	1.650,56	95,62	1.491,41
Belanja Pemerintah Pusat	1.196,83	1.137,16	95,01	1.010,56
Transfer ke Daerah	529,36	513,26	96,96	480,65
Suspen Belanja Negara		0,14		0,20
Surplus (Defisit) Anggaran	(224,19)	(211,67)	94,42	(153,30)
Pembiayaan Neto	224,19	237,39	105,89	175,16
SiLPA (SiKPA)		25,72		21,86

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.567,59triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp252,74 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.183,17 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.709,86 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,90 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp418,92 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.652,10 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp368,09 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.284,01 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp915,49 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp113,36 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.028,85 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2013 (*Unaudited*)	31 Desember 2012 (*Audited*)
Aset	**3.567,59**	**3.432,98**
Aset Lancar	252,74	241,31
Investasi Jangka Panjang	1.183,17	932,41
Aset Tetap	1.709,86	1.895,50
Piutang Jangka Panjang	2,90	4,67
Aset Lainnya	418,92	359,09
Kewajiban	**2.652,10**	**2.156,89**
Kewajiban Jangka Pendek	368,09	266,14
Kewajiban Jangka Panjang	2.284,01	1.890,75
Ekuitas Dana Neto	**915,49**	**1.276,10**
Ekuitas Dana Lancar	(113,36)	(23,58)
Ekuitas Dana Investasi	1.028,85	1.299,68

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2013 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71,58 riliun, sedangkan pada awal tahun 2013 terjadi koreksi kurang sebesar minus Rp309,30miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2013 menjadi Rp71,27 triliun.

Selama TA 2013 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp31,32 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp180,36 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp237,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,11 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp30 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,61 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 menjadi Rp67,70 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp9,99 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran

sebesar Rp0,34 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,22 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,24triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,70 triliun. Selama tahun 2013 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp1,18 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp83,40 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2013 (*Unaudited*)	TA 2012 (*Audited*)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	**71,58**	**107,84**
Koreksi Saldo Awal	(0,31)	0,31
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	**71,27**	**108,15**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(31,32)	(8,87)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(180,36)	(144,43)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	237,39	175,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(0,11)	(1,50)
Pengunaan SAL	(30)	(56,17)
Penyesuaian Pembukuan	0,61	(0,76)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**(3,56)**	**(36,57)**
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	**67,70**	**71,58**

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2013 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual.

LKPP Tahun 2013 (*Audited*) ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), dan merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah diaudit oleh BPK, termasuk Laporan Keuangan BPK-RI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Jakarta, 19 Mei 2014

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Muhamad Chatib Basri



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN
(*AUDITED*)

I. LAPORAN REALISASI APBN (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2013 (*Audited*)			TA 2012 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.148.364.681.288.000**	**1.077.306.679.558.272**	**93,81**	**980.518.133.319.319**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.099.943.585.138.000	1.029.850.063.303.271	93,63	930.861.839.509.438
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	48.421.096.150.000	47.456.616.255.001	98,01	49.656.293.809.881
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**349.156.712.456.000**	**354.751.889.117.468**	**101,60**	**351.804.746.666.862**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	203.730.029.745.000	226.406.189.261.540	111,13	225.843.973.463.751
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	36.456.490.000.000	34.025.604.050.274	93,33	30.797.972.717.670
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	85.471.466.267.000	69.671.855.890.502	81,51	73.458.504.524.407
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	23.498.726.444.000	24.648.239.915.152	104,89	21.704.295.961.034
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**4.483.631.249.000**	**6.832.500.887.004**	**152,39**	**5.786.749.186.777**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**1.502.005.024.993.000**	**1.438.891.069.562.744**	**95,80**	**1.338.109.629.172.958**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.196.828.378.290.000**	**1.137.162.887.298.240**	**95,01**	**1.010.558.236.531.814**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	233.639.077.079.310	221.688.819.162.644	94,89	197.863.565.816.235
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	191.318.724.422.409	169.722.685.080.370	88,71	140.884.875.397.761
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	194.562.826.310.065	180.864.203.133.334	92,96	145.104.148.492.853
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	112.517.848.410.000	113.035.490.483.582	100,46	100.515.994.274.844
5. Subsidi	B.2.2.1.5	348.119.042.741.000	355.045.179.958.292	101,99	346.420.404.182.332
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	2.346.514.640.000	1.302.956.172.580	55,53	75.079.293.554
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	95.053.532.887.216	92.136.072.115.501	96,93	75.621.057.138.995
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	19.270.811.800.000	3.367.481.191.937	17,47	4.073.111.935.240
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**529.362.920.963.000**	**513.260.443.170.637**	**96,96**	**480.645.074.235.761**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1**	**445.531.465.397.000**	**430.354.730.161.983**	**96,59**	**411.293.124.979.761**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	102.695.033.232.000	88.463.060.120.183	86,14	111.537.202.920.761
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	311.139.289.165.000	311.139.289.165.000	100,00	273.814.438.203.000

Uraian	Catatan	TA 2013 (*Audited*)			TA 2012 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	31.697.143.000.000	30.752.380.876.800	97,02	25.941.483.856.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	**B.2.2.2.2**	**83.831.455.566.000**	**82.905.713.008.654**	**98,90**	**69.351.949.256.000**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	13.445.571.566.000	13.445.571.566.000	100,00	11.952.577.528.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	70.385.884.000.000	69.460.141.442.654	98,68	57.399.371.728.000
III. Suspen Belanja Negara	**B.2.2.3**		**140.396.949.208**		**206.913.823.419**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**1.726.191.299.253.000**	**1.650.563.727.418.085**	**95,62**	**1.491.410.224.590.994**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(224.186.274.260.000)**	**(211.672.657.855.341)**	**94,42**	**(153.300.595.418.036)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**241.056.105.053.000**	**243.199.747.083.370**	**100,89**	**198.622.535.177.645**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	30.000.000.000.000	30.000.000.000.000	100,00	56.170.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.556.616.999.000	4.174.085.472.290	91,60	6.533.098.103.446
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	475.000.000.000	1.500.151.167.201	315,82	1.277.994.564.583
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	231.799.994.000.000	224.672.521.479.583	96,93	159.704.323.637.096
Penerimaan Surat Berharga Negara			327.747.662.419.035		282.897.267.989.790
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(103.075.140.939.452)		(123.192.944.352.694)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	500.000.000.000	474.470.730.046	94,89	799.676.359.939
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(20.569.470.946.000)	(11.915.446.765.750)	57,93	(18.862.557.487.419)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(706.035.000.000)	(706.035.000.000)	100,00	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(5.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	100,00	(7.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(16.869.830.793.000)**	**(5.805.169.762.176)**	**34,41**	**(23.464.366.857.270)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	49.039.765.292.000	55.279.821.617.227	112,72	31.403.481.754.448
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	11.134.728.546.000	18.426.396.220.606	165,49	15.003.476.180.432
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.905.036.746.000	36.853.425.396.621	97,23	16.400.005.574.016
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(6.699.760.085.000)	(3.880.566.936.399)	57,92	(3.753.031.242.391)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(59.209.836.000.000)	(57.204.424.443.004)	96,61	(51.114.817.369.327)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**224.186.274.260.000**	**237.394.577.321.194**	**105,89**	**175.158.168.320.375**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA)	**B.2.5**		**25.721.919.465.853**		**21.857.572.902.339**



REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(*AUDITED*)

II. NERACA (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (*audited*)	31 Des 2012 (*audited*)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	43.737.911.964.052	37.382.696.367.039
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	9.999.484.261.911	13.495.665.498.447
Rekening Kas di KPPN	C.2.3	2.666.720.204.356	16.207.882.323.813
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	7.363.221.503.338	6.103.251.516.103
Kas pada BLU	C.2.7	19.072.940.458.860	16.643.419.462.034
Jumlah Kas dan Bank		83.409.010.150.043	90.242.524.455.635
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	141.923.861.996	787.370.392.558
Investasi Jangka Pendek	C.2.9	1.182.306.983.395	768.125.137.193
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	C.2.10	4.658.189.616.621	1.893.533.561.965
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.11	103.240.249.433.833	93.468.526.344.200
Piutang Bukan Pajak	C.2.12	147.710.233.612.351	120.925.758.512.257
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.13	1.977.442.150	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.14	142.483.141.891	366.808.908.475
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.15	6.011.228.743.194	5.325.797.572.454
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.16	2.728.415.892.912	2.473.903.438.486
Jumlah Piutang (Bruto)		259.834.588.266.331	222.560.794.775.872
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2.17	(159.689.806.285.608)	(136.953.775.912.378)
Jumlah Piutang (Bersih)		100.144.781.980.723	85.607.018.863.494
Persediaan	C.2.18	63.205.251.965.209	62.016.561.796.415
Jumlah Aset Lancar		**252.741.464.557.987**	**241.315.134.207.260**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	C.2.19	17.872.890.837.875	11.453.274.948.550
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.2.20	(39.997.900.137)	(20.196.519.935)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		17.832.892.937.738	11.433.078.428.615
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.21	8.340.448.484.300	7.969.545.521.754
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.22	(5.531.213.937)	(8.096.081.815)
Jumlah Investasi Non Permanan Lainnya (Bersih)		8.334.917.270.363	7.961.449.439.939
Jumlah Investasi Non Permanen		26.167.810.208.101	19.394.527.868.554
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.23	844.094.126.993.709	912.877.699.396.801
Investasi Permanen BLU	C.2.24	177.778.694.559	134.165.377.149
Investasi Permanen Lainnya	C.2.25	312.730.704.421.451	-
Jumlah Investasi Permanen		1.157.002.610.109.719	913.011.864.773.950
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**1.183.170.420.317.820**	**932.406.392.642.504**
Aset Tetap	C.2.26		
Tanah		1.041.019.298.252.419	996.878.472.254.880
Peralatan dan Mesin		282.940.410.570.636	238.129.446.805.797
Gedung dan Bangunan		191.278.171.370.296	170.243.266.954.328

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (*audited*)	31 Des 2012 (*audited*)
Jalan. Irigasi. dan Jaringan		423.232.566.227.236	379.236.269.019.824
Aset Tetap Lainnya		38.607.829.866.402	14.566.662.581.210
Konstruksi Dalam Pengerjaan		119.419.040.145.511	96.447.328.590.044
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.096.497.316.432.500	1.895.501.446.206.083
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.27	(386.642.243.569.313)	-
Jumlah Aset Tetap		**1.709.855.072.863.187**	**1.895.501.446.206.083**
Piutang Jangka Panjang	C.2.28		
Tagihan Penjualan Angsuran		-	1.375.031.741
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		239.948.430.983	246.721.313.918
Piutang Jangka Panjang Lainnya		4.856.087.111.476	4.767.505.815.736
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		5.096.035.542.459	5.015.602.161.395
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.2.29	(2.197.535.902.919)	(342.011.579.591)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**2.898.499.639.540**	**4.673.590.581.804**
Aset Lainnya	C.2.30		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		279.936.137.500	225.918.302.700
Aset Tak Berwujud		17.448.733.461.982	15.705.813.685.536
Aset yang Dibatasi Penggunaannya		95.453.796.857.223	43.873.903.783.522
Dana Penjaminan		71.638.992.611	68.309.705.830
Dana Kelolaan BLU		17.684.403.155.418	21.179.600.007.891
Aset KKKS		221.745.303.742.534	143.976.028.336.922
Aset Eks BPPN		3.181.247.163.249	3.972.872.786.807
Aset Lain-lain		98.608.345.001.685	103.540.902.717.960
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		7.968.396.497.466	2.430.048.955.900
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		46.871.682.852.501	44.014.286.077.588
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		509.313.483.862.169	378.987.684.360.656
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	C.2.31	(21.904.143.176.106)	(19.901.414.612.944)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.2.32	(68.489.052.477.854)	-
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**418.920.288.208.209**	**359.086.269.747.712**
JUMLAH ASET		**3.567.585.745.586.743**	**3.432.982.833.385.363**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.33	348.097.673.274	451.860.600.337
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.34	55.380.161.243.832	29.738.138.976.562
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	27.668.104.388.520	23.099.285.717.583
Utang Subsidi	C.2.36	71.683.090.732.971	54.678.143.480.247
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.37	162.251.340.131.620	118.216.112.940.270
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.38	41.722.185.956.000	22.689.283.544.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.39	161.408.703.427	812.930.306.639
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.40	8.454.347.000.882	6.721.668.089.201
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.41	418.095.877.428	9.728.965.176.829
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**368.086.831.707.954**	**266.136.388.831.668**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	1.939.381.089.664	1.658.364.752.248
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.43	1.523.750.834.782.215	1.279.847.990.292.207
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.44	17.161.745.000.000	18.161.745.000.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.45	68.366.428.707.899	5.024.283.525.498
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.611.218.389.579.778	1.304.692.383.569.953
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.46	646.221.116.658.252	559.487.514.862.710
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.47	26.573.441.869.951	26.569.686.370.533
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		672.794.558.528.203	586.057.201.233.243
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**2.284.012.948.107.981**	**1.890.749.584.803.196**
JUMLAH KEWAJIBAN		**2.652.099.779.815.935**	**2.156.885.973.634.864**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			

Uraian	Catatan	31 Des 2013 (*audited*)	31 Des 2012 (*audited*)
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.48	40.262.010.866.885	49.242.263.157.735
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.49	26.332.138.910.461	21.020.562.086.738
Cadangan Piutang	C.2.50	99.643.556.941.069	86.265.604.108.265
Cadangan Persediaan	C.2.51	63.205.251.965.209	62.016.561.796.415
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.52	4.817.382.158.336	9.043.802.422.858
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.53	(325.224.143.092.266)	(241.956.232.377.965)
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.54	(18.688.113.653.035)	(4.443.013.069.514)
Dana Lancar Lainnya	C.2.55	90.082.709.951	56.475.093.646
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.56	4.653.616.446.673	1.889.360.514.088
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.57	(8.454.347.000.882)	(6.721.668.089.201)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**(113.362.563.747.599)**	**(23.586.284.356.935)**
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.58	1.183.170.420.317.820	932.406.392.642.504
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.59	1.709.855.072.863.187	1.895.501.446.206.083
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.60	352.579.883.574.149	362.406.005.769.186
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.61	(2.031.798.722.297.177)	(1.850.355.668.169.689)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.62	(184.958.124.939.572)	(40.275.032.340.650)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**1.028.848.529.518.407**	**1.299.683.144.107.434**
EKUITAS DANA NETO		**915.485.965.770.808**	**1.276.096.859.750.499**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**3.567.585.745.586.743**	**3.432.982.833.385.363**



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
(*AUDITED*)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan	D.2.1.1	506.442.796.872.651	465.069.641.549.059
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.2.1.2	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
c. PajakBumi dan Bangunan	D.2.1.3	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
d. Cukai	D.2.1.4	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
e. Pajak Lainnya	D.2.1.5	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355
f. Pajak Perdagangan Internasional	D.2.1.6	47.456.616.255.001	49.656.293.809.881
Total Penerimaan Perpajakan		1.077.306.679.558.272	980.518.133.319.319
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.2.1	226.406.189.261.540	225.843.973.463.751
b. PenerimaanBagianPemerintah atas Laba BUMN	D.2.2.2	34.025.604.050.274	30.797.972.717.670
c. PNBP Lainnya	D.2.2.3	69.482.471.662.383	73.332.319.648.034
d. Penerimaan BLU	D.2.2.4	24.648.239.915.152	21.704.295.961.034
Total PNBP		354.562.504.889.349	351.678.561.790.489
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.533.878.206.066	4.141.701.818.979
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.436.403.062.653.687**	**1.336.338.396.928.787**
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	221.687.976.872.374	197.859.657.528.774
2. Belanja Barang	D.2.5	167.911.005.354.943	140.020.870.803.375
3. Belanja Bunga Utang	D.2.6	113.033.446.250.400	100.515.994.274.160
4. Belanja Subsidi	D.2.7	355.045.179.958.292	346.420.404.182.332
5. Belanja Hibah	D.2.8	1.305.414.705.780	75.079.945.754
6. Bantuan Sosial	D.2.9	92.108.033.527.871	75.602.528.863.964
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	3.367.142.169.363	4.072.855.812.156
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	43.855.009.346.533	47.214.136.030.788
9. Bagi Hasil SumberDayaAlam	D.2.12	42.456.559.513.479	62.600.285.617.315
10. Bagi Hasil Cukai	D.2.13	2.151.491.260.171	1.722.781.272.658
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	311.139.289.165.000	273.814.438.203.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	30.752.380.876.800	25.941.483.856.000
13. Dana OtonomiKhusus	D.2.16	13.445.571.566.000	11.952.577.528.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	69.344.444.403.654	57.399.369.998.082
15. Dana Keistimewaan DIY	D.2.18	115.696.326.500	-
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**1.467.718.641.297.160**	**1.345.212.463.916.358**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(31.315.578.643.473)**	**(8.874.066.987.571)**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.19	189.384.228.119	126.184.876.373
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**189.384.228.119**	**126.184.876.373**
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.20	180.546.463.439.987	144.552.713.306.838
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**180.546.463.439.987**	**144.552.713.306.838**

Uraian	Catatan	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		**(180.357.079.211.868)**	**(144.426.528.430.465)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	359.863.540.370.424	341.258.374.433.800
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	55.279.821.617.227	31.403.481.754.448
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.23	4.174.085.472.290	6.533.098.103.446
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**419.317.447.459.941**	**379.194.954.291.694**
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.24	108.216.396.993.594	130.306.379.872.182
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.25	57.204.424.443.004	51.114.817.369.327
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.26	12.621.481.765.750	18.862.557.487.419
4. Penerusan Pinjaman	D.2.27	3.880.566.936.399	3.753.031.242.391
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**181.922.870.138.747**	**204.036.785.971.319**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		**237.394.577.321.194**	**175.158.168.320.375**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.28	(104.009.136.761)	(1.303.714.095.928)
2. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	304.283.894.052	(279.648.621.588)
3. Transito (Neto)	D.2.30	(93.019.790.696)	99.792.905.182
4. Transaksi Non AnggaranPihakKetigaKarena Kesalahan RekeningdanKoreksiPemindahbukuan (Neto)	D.2.31	(1.315.856.649)	(17.893.087.832)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		**105.939.109.946**	**(1.501.462.900.166)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		**25.827.858.575.799**	**20.356.110.002.173**
Penggunaan SAL		**(30.000.000.000.000)**	**(56.170.000.000.000)**
Penyesuaian Pembukuan		**607.785.913.680**	**(755.835.540.649)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI	**D.1.2**	**(3.564.355.510.521)**	**(36.569.725.538.476)**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		**71.578.340.493.780**	**107.842.612.387.387**
Koreksi Saldo Awal		**(309.302.266.568)**	**305.453.644.869**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi	**D.1.1**	**71.269.038.227.212**	**108.148.066.032.256**
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		**67.704.682.716.691**	**71.578.340.493.780**
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	**9.999.484.261.911**	**13.495.665.498.448**
Kas di BendaharaPengeluaran	C.2.5	**342.891.820.960**	**213.458.829.221**
Kas di BendaharaPenerimaan	C.2.6	**225.839.936.566**	**196.150.458.978**
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	**6.248.372.302.671**	**5.447.004.782.640**
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1.3	**70.046.094.641**	**80.029.529.762**
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)		**(1.182.306.983.395)**	**(768.125.137.193)**
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		**83.409.010.150.045**	**90.242.524.455.636**



REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/20011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian global tahun 2013

Selama kurun waktu 2013, perekonomian global secara umum masih belum kuat dan diliputi ketidakpastian. Kondisi ini, antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya ekonomi Eropa dan menurunnya kinerja ekonomi negara berkembang. Ekonomi negara maju khususnya Amerika Serikat dan Jepang cenderung membaik, sedangkan di sisi lain ekonomi China dan India mengalami perlambatan. Ekonomi yang belum kuat tersebut berpengaruh terhadap inflasi global yang cenderung turun, pasar keuangan dengan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, serta mendorong respon kebijakan moneter bank sentral global masih bersifat akomodatif. Ekonomi global tahun 2013 tumbuh lebih rendah dibanding tahun 2012. Hal ini didorong oleh terjadinya penurunan harga komoditas global dan perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) terkait penghentian stimulus (*tapering off*) yang berperan dalam meningkatkan ketidakpastian. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa ekonomi global dalam tren membaik yang dimotori oleh AS dan Jepang, serta indikasi pemulihan ekonomi Eropa, China dan India. Perkembangannya dapat dipantau dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga komoditas dan perkembangan bursa saham.

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBNP TA 2013

Dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi selama tahun 2012 telah mempengaruhi kondisi ekonomi makro domestik dalam tiga bulan pertama tahun 2013 dan prospeknya dalam keseluruhan tahun 2013, sehingga menunjukkan kecenderungan pergerakan yang menjauh dari asumsi yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2013. Dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik tersebut serta dampaknya terhadap terjadinya defisit di sektor fiskal dan sektor eksternal mendasari dilakukannya langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam APBNP 2013. APBNP bukan dimaksudkan untuk menampung tambahan belanja, namun lebih ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan APBN dalam rangka pengamanan

pelaksanaan APBN, khususnya untuk mengurangi defisit anggaran. Guna mengendalikan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, ditempuh langkah-langkah yang bersifat "*sharing the burden*" di antaranya pemotongan belanja kementerian negara/lembaga (K/L), pengendalian subsidi BBM, penggunaan SAL, penambahan pinjaman program dan penerbitan surat berharga negara (SBN) neto. Adapun perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 sebagai berikut:

1). Pertumbuhan ekonomi dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen
Koreksi ke bawah ini disebabkan oleh tekanan dari perlambatan ekonomi dan penurunan perdagangan internasional;

2). Inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen
Perubahan inflasi ini terkait dengan kebijakan *administered price* di bidang energi dan dampak kenaikan harga produk hortikultura;

3). Nilai tukar dari Rp9.300/USD menjadi Rp9.600/USD
Pelemahan nilai tukar rupiah merupakan imbas dari kondisi neraca pembayaran yang masih mengalami defisit. Namun Demikian, kebijakan dalam mengendalikan subsidi BBM berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar rupiah kendatipun melemah, tidak sampai menjai terpuruk akibat kondisi neraca pembayaran yang masih defisit tersebut;

4). Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tetap di besaran 5,0 persen
Memperhatikan tingginya permintaan dan realisasi SBN hingga triwulan I 2013, maka suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen dianggap masih relevan;

5). Harga minyak Indonesia (ICP) dari USD100 per barel menjadi USD108 per barel
Dalam triwulan I 2013, realisasi harga minyak mentah di Indonesia mencapai rata-rata USD109/barel dan menunjukkan tren stabil pada level tersebut. Oleh karena itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia direvisi menjadi USD108/barel;

6). *Lifting* minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 barel per hari
Dengan memperhatikan capaian target *lifting* pada tahun 2012, maka asumsi *lifting* minyak direvisi menjadi 840 ribu barel per hari;

7). *Lifting* gas dari 1.360 ribu barel per hari menjadi 1.240 ribu barel per hari
Penurunan asumsi *lifting* gas berkaitan dengan adanya permasalahan teknis dan kapasitas sumber gas.

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013

INDIKATOR	APBN 2013	APBNP 2013	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	6,8	6,3	5,78
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	4,9	7,2	8,38
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	9.300	9.600	10.451,37
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,0	5,0	4,5
Harga Minyak (USD/Barel)	100,0	108,0	105.87
Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	900	840,0	825
Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.360	1.240,0	1.213

Sumber: Kementerian Keuangan

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN PERUBAHAN POSTUR APBN 2013

Tema Pembangunan RKP 2013

Memperhatikan capaian hasil kinerja tahun 2012, potensi yang dimiliki serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: **"Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat"**. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan;

(5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (12) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; (13) Bidang Perekonomian lainnya; dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Adapun fokus kegiatan dari 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu: (1) peningkatan daya saing; (2) peningkatan daya tahan ekonomi; (3) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; serta (4) pemantapan stabilitas sosial politik.

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Postur APBNP 2013

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama Pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2013 tetap ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hal tersebut diperlukan terutama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara; (3) kebijakan pembiayaan.

Postur APBNP tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal, postur APBNP 2013 meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

a. Pendapatan negara dari Rp1.529.673,1 miliar menjadi Rp1.502.005,0 miliar;

b. Belanja negara dari Rp1.683.011,1 miliar menjadi Rp1.726.191,3 miliar;

c. Defisit anggaran dari Rp153.338,0 miliar menjadi Rp224.186,3 miliar;

d. Pembiayaan defisit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dari Rp172.792,1 miliar menjadi Rp241.056,1 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) dari negatif Rp19.454,2 miliar menjadi negatif Rp16.869,8 miliar.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi Anggaran 2012, APBN dan APBNP 2013
(triliun Rupiah)

URAIAN	TA 2012 (Realisasi LKPP Audited)	TA 2013	
		APBN	APBNP
Penerimaan Perpajakan	980,52	1.192,99	1.148,36
PNBP	351,80	332,20	349,16
Penerimaan Hibah	5,79	4,48	4,48
Pendapatan Negara & Hibah	1.338,11	1.529,67	1.502,01
Belanja Pemerintah Pusat	1.010,56	1.154,38	1.196,83
Transfer ke Daerah	480,65	528,63	529,36
Total Belanja Negara	1.491,41	1.683,01	1.726,19
Surplus (Defisit)	(153,30)	(153,34)	(224,19)
Pembiayaan	175,16	153,34	224,19

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Umum Perpajakan

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Secara umum, pokok-pokok kebijakan perpajakan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional; (g) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (h) menyesuaikan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; dan (i) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (*hybrid and low cost green car*), serta fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu.

Kebijakan Lain Perpajakan

Guna mendukung tercapainya target pendapatan pajak, selain melaksanakan kebijakan yang bersifat umum, Pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

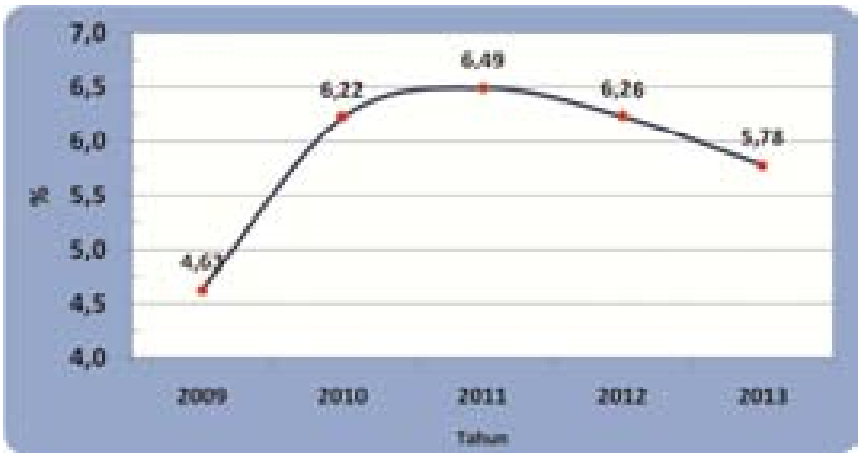
1. melakukan penggalian potensi perpajakan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor real estat, sektor otomotif, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan;
2. mengintensifkan pemeriksaan PPh pasal 21, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemotongan dan pemungutan PPh lainnya;
3. melakukan penataan ulang Wajib Pajak, dalam hal ini akan dicocokkan data Wajib Pajak orang pribadi dengan data NIK (*e*-KTP) dan data Wajib Pajak badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara;
4. melakukan relokasi Wajib Pajak terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak pertambangan dan perkebunan;
5. meningkatkan pengawasan kinerja Kanwil dan KPP Direktorat Jenderal Pajak;
6. memperluas pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) pada tahun 2013 dan menindaklanjuti hasil kegiatan SPN pada tahun 2012;
7. penerapan *e-tax invoice*.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengukuran pertumbuhan perekonomian suatu negara secara lazim dilakukan dengan melihat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yakni jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara. Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha/sektor. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata sebesar 5,88 persen. Pada tahun 2009, perekonomian domestik mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dampak krisis global yang berpengaruh terhadap sisi eksternal, dengan berkontraksinya ekspor-impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia sehingga hanya tumbuh sebesar 4,63. Pada tahun 2010 dan 2011, ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian

global yang belum pulih. Namun pada tahun 2012, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,26 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mampu tumbuh sebesar 6,49 persen. Perlambatan ini disebabkan antara lain oleh lemahnya kinerja ekonomi global yang berdampak pada sisi eksternal PDB dan kontraksi ekspor neto yang cukup dalam. Sumber pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 di antaranya adalah masih kuatnya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2009 – 2013

Di tengah ketidakpastian dan masih belum kuatnya kondisi perekonomian dunia, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2013 mampu tumbuh cukup baik sebesar 5,78 persen meskipun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,26 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 bersumber dari terbatasnya pertumbuhan ekspor riil akibat melambatnya ekonomi global. Di sisi investasi juga mengalami perlambatan khususnya investasi nonbangunan. Sedangkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan dibarengi konsumsi pemerintah yang tetap kuat.

Kinerja konsumsi masyarakat relatif terjaga meskipun dihadapkan pada tekanan harga yang cukup tinggi pada awal paruh kedua akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Hal ini ditunjang oleh langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti menyediakan dana tambahan untuk meningkatkan program perlindungan kesejahteraan rakyat miskin, seperti tambahan alokasi beras untuk rakyat miskin (raskin), BLSM, dan bantuan siswa miskin. Program kompensasi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menerapkan bentuk subsidi lebih tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang layak menerimanya.

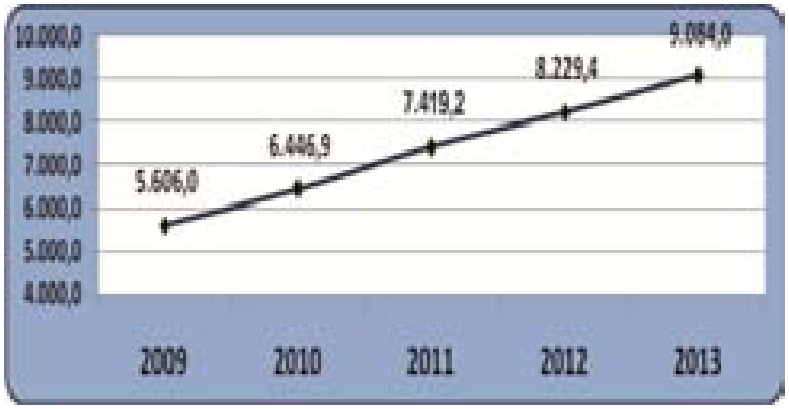
Di sisi konsumsi pemerintah, pertumbuhannya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan membaiknya realisasi belanja barang dan realisasi penyerapan bantuan sosial. Upaya peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terus didorong agar lebih tinggi antara lain berupa percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Tim TEPPA, pencairan gaji dan tunjangan ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/Pensiunan pada bulan Juli 2013 serta kelanjutan program reformasi birokrasi pada kementerian negara/lembaga.

Di sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), terjadi perlambatan yang cukup signifikan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan cukup signifikan terjadi pada jenis investasi mesin dan perlengkapan luar negeri (-0,38), dan alat angkutan luar negeri (-10,13). Perkembangan cukup menjanjikan terjadi pada kinerja penanaman modal langsung, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini mencerminkan minat investor yang cukup baik di pasar domestik.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2013 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan membaiknya perekonomian di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Dalam kaitan ini, pengelolaan

kondisi ekonomi makro dan fiskal perlu tetap dijaga dan diperbaiki untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dan usaha di dalam negeri guna mendorong investasi.

PDB atas dasar harga berlaku selama tahun 2013 mencapai Rp9.084,0 triliun, naik sebesar Rp854,6 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp8.229,4 triliun. Peningkatan terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai Rp2.770,3 triliun, naik Rp151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp2.618,9 triliun.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah)

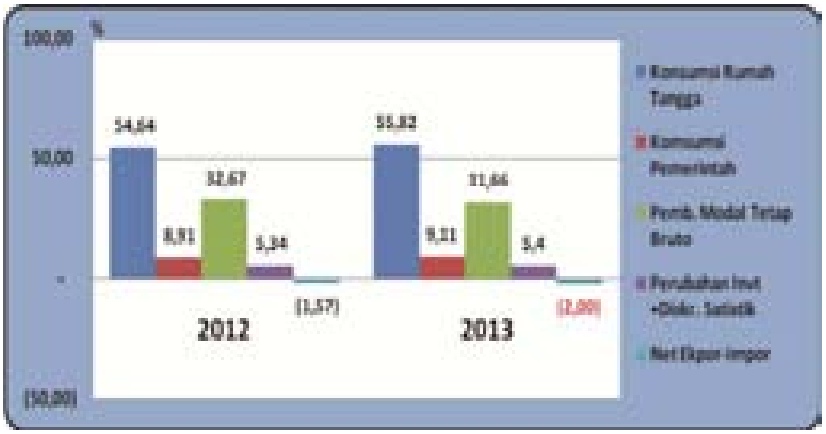
Sumber-sumber pertumbuhan

Dilihat dari sisi pengeluaran, PDB dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) dan Ekspor-Impor. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen didukung oleh semua komponen yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,28 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 4,87 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 4,71 persen, Komponen Perubahan Inventori sebesar 6,74 persen, dan Komponen Ekspor tumbuh sebesar 5,30 persen, serta Komponen Impor mengalami pertumbuhan 1,21 persen.

Sedangkan menurut kumulatif sumber pertumbuhan, pertumbuhan PDB tahun 2013 bersumber dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,91 persen, diikuti komponen Ekspor 2,52 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 1,15 persen, Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,10 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 0,38 persen. Sementara, Komponen Impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan 0,47 persen.

Komponen PDB menurut pengeluaran

Struktur PDB menurut pengeluaran (harga berlaku) tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 3. Penyumbang terbesar dalam pengeluaran PDB menurut pengeluaran masih berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 55,82 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 54,64 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah naik dari semula 8,91 persen pada tahun 2012 menjadi 9,11 persen pada tahun 2013. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2013 sebesar 31,66 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 32,67 persen. Komponen Perubahan Inventori dan Diskrepansi Statistik pada tahun 2013 sebesar 5,40 persen naik dari tahun 2012 sebesar 5,34 persen. Komponen Ekspor dan Impor dari semula 24,29 persen dan 25,86 persen pada tahun 2012 turun menjadi 23,74 persen dan 25,74 persen pada tahun 2013.



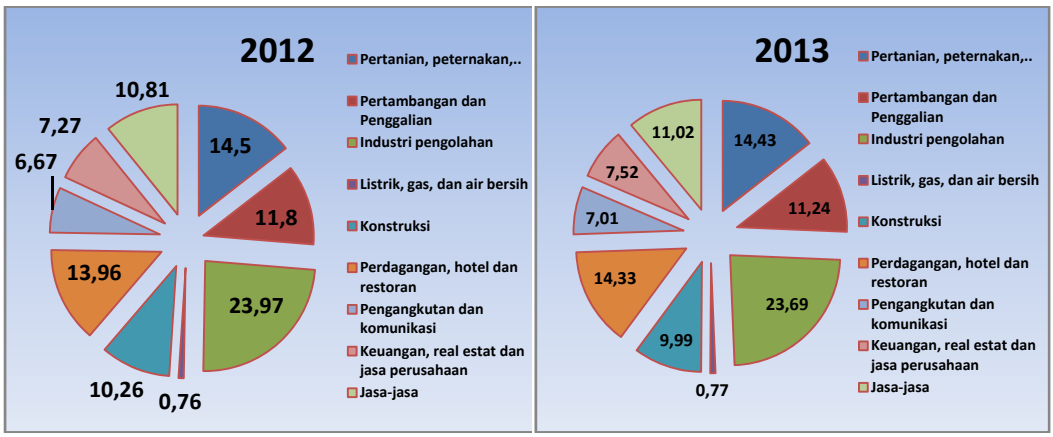
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Struktur PDB Menurut Pengeluaran tahun 2012 dan 2013

Komponen PDB berdasarkan lapangan usaha

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mengalami pertumbuhan dari sisi nominal. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (10,19 persen), diikuti oleh sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan (7,56 persen), sektor konstruksi (6,57 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (5,93 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (5,58 persen), sektor industri pengolahan (5,56 persen). Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 1,34 persen sampai dengan 5,46 persen.

Struktur pembentukan PDB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki peranan sebesar 52,45 persen. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 23,69 persen, sedangkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14,43 persen dan 14,33 persen. Struktur PDB menurut lapangan usaha tahun 2013 mengalami perubahan dibanding tahun 2012. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan peranan adalah sektor listrik, gas, dan air listrik naik dari 0,76 persen menjadi 0,77 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik dari 13,96 persen menjadi 14,33 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari 6,67 persen menjadi 7,01 persen, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan naik dari 7,27 persen menjadi 7,52 persen, sektor jasa-jasa naik dari 10,81 persen menjadi 11,02 persen. Adapun yang mengalami penurunan peranan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan turun dari 14,50 persen menjadi 14,43 persen, sektor pertambangan dan penggalian turun dari 11,80 persen menjadi 11,24 persen, sektor industri pengolahan turun dari 23,97 persen menjadi 23,69 persen, dan sektor konstruksi turun dari 10,26 persen menjadi 9,99 persen.

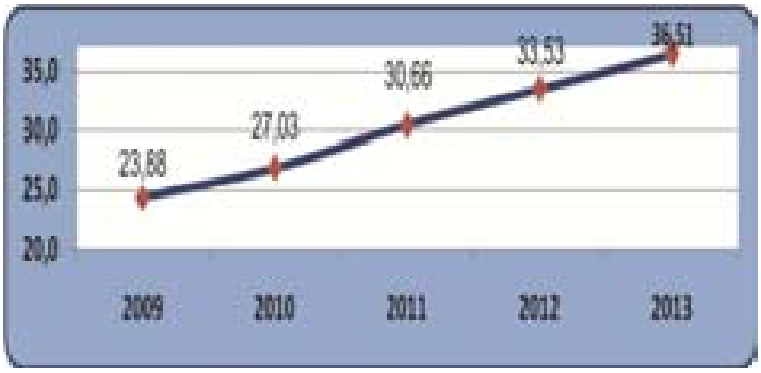


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 dan 2013 (persen)

PDB per kapita tahun 2013

PDB per kapita merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Seiring dengan tren peningkatan pertumbuhan PDB, maka PDB per kapita tahun 2013 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2013, nilai PDB perkapita mencapai Rp36,51 juta meningkat dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2012 yang sebesar Rp33,53 juta.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2009-2013 (juta Rupiah)

Inflasi

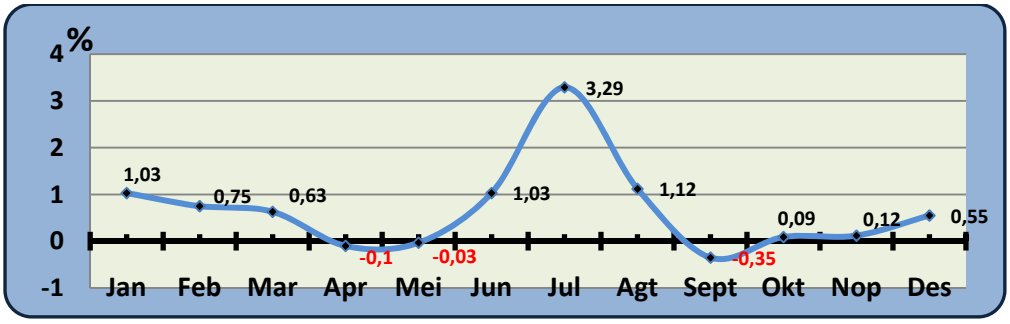
Sepanjang tahun 2013, harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dari hasil pemantauan BPS di 66 kota pada Desember 2013 terjadi inflasi 0,55 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 146,04 pada November 2013 menjadi 146,84 pada Desember 2013. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Desember) 2013 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2013 terhadap Desember 2012) masing-masing sebesar 8,38 persen.

Inflasi Desember 2013 terhadap November 2013 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan 0,79 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,44 persen; kelompok sandang 0,17 persen; kelompok kesehatan 0,16 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,06 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,56 persen.

Laju inflasi tahun kalender 2013 tercatat sebesar 8,38 persen di atas yang ditetapkan dalam APBNP sebesar 7,2 persen. Apabila dilihat dari komponen yang membentuk inflasi, hingga Desember 2013, inflasi komponen harga diatur Pemerintah *(administered price)* menunjukkan peningkatan tertinggi. Pada Desember 2013, inflasi tahunan komponen *administered price* mencapai 16,65 persen *(y-o-y),* sedangkan komponen inflasi bergejolak mencapai 11,83 persen dan diikuti inflasi komponen inti sebesar 4,98 persen.

Selama tahun 2013, kelompok-kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok bahan makanan 11,35 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,45; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 6,22 persen; kolompok sandang 0,52 persen; kelompok kesehatan 3,70 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,91 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang inflasi sebesar 15,36 persen.

Sepanjang tahun 2013, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 sebesar 3,29 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan tersebut antara lain: bensin, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, beras, tarif angkutan antar kota, telur ayam ras, dan rokok kretek filter. Sedangkan deflasi tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan September 2013 sebesar 0,35 persen. Komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan tersebut antara lain: bawang merah, tarif angkutan antar kota, cabai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara. Dalam rangka menjaga kestabilan harga domestik, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilitasi harga pangan strategis. Laju inflasi bulanan (*m-t-m*) selama tahun 2013 tergambar di Grafik 6.



Sumber: Badan Pusat Statistik

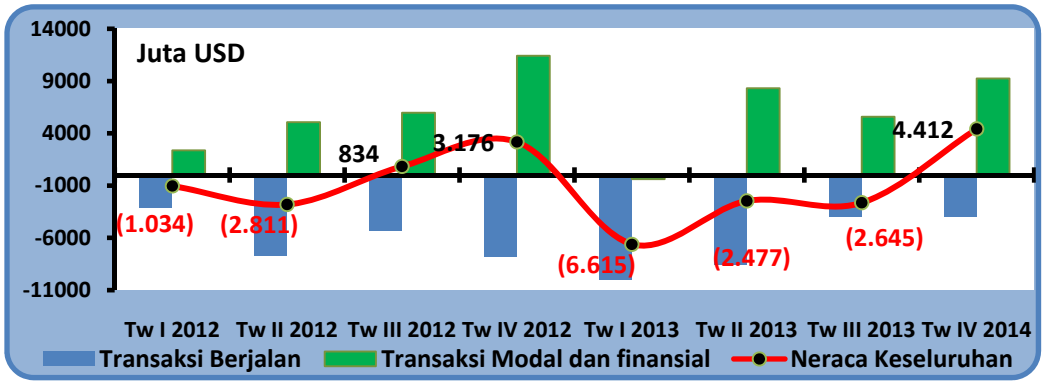
Grafik 6. Tren Laju Inflasi Bulanan Tahun 2013

Nilai tukar Rupiah

Tekanan kepada nilai tukar Rupiah pada tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya meningkatnya aliran modal ke luar yang dipicu ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan inflasi domestik pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta pengaruh global akibat sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh The Fed. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang menurun dan disertai dengan volatilitas yang meningkat. Selama tahun 2013, Rupiah secara *point-to-point* melemah 20,8 persen (yoy) ke level Rp12.170/USD atau secara rata-rata melemah 10,4 persen (yoy) ke level Rp10.445/USD. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung penyesuaian ekonomi secara terkendali.

Neraca Pembayaran Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan turut mempengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013. NPI mengalami defisit sampai triwulan III tahun 2013. Tekanan pada NPI dipengaruhi defisit transaksi berjalan pada tahun 2013 yang diperkirakan sekitar 3,5 persen dari PDB lebih tinggi dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8 persen dari PDB. Peningkatan defisit transaksi berjalan tahun 2013 antara lain dipengaruhi menurunnya surplus neraca perdagangan 2013 dibandingkan dengan surplus tahun 2012. Di samping itu, tekanan pada NPI 2013 juga dipengaruhi oleh surplus transaksi modal dan finansial 2013 yang lebih rendah dibanding 2012, sehingga tidak dapat sepenuhnya menutupi defisit transaksi berjalan. Namun demikian, pada triwulan IV tahun 2013 menunjukkan adanya tren penurunan tekanan terhadap NPI yang dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan antara lain didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas sejalan dengan perbaikan ekonomi global serta dipengaruhi adanya kontraksi impor seiring tren perlambatan ekonomi domestik.

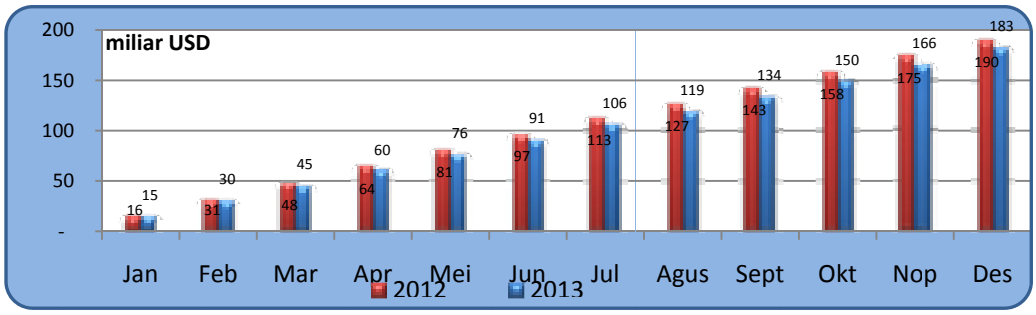


Sumber :Bank Indonesia

Grafik 7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2012-2013

Ekspor tahun 2013

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari – Desember 2013 sebesar USD182,55 miliar atau menurun 3,93 persen dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari ekspor non migas senilai UDS149,92 miliar atau turun 2,04 persen dari tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD32,63 miliar atau turun 11,75 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun sejalan dengan perbaikan ekonomi global, pada penghujung tahun 2013 terjadi perbaikan nilai ekspor. Perbaikan nilai ekspor dipengaruhi perkembangan positif kondisi perekonomian mitra dagang, berlanjutnya depresiasi rupiah dan adanya perbaikan pada harga komoditas global.

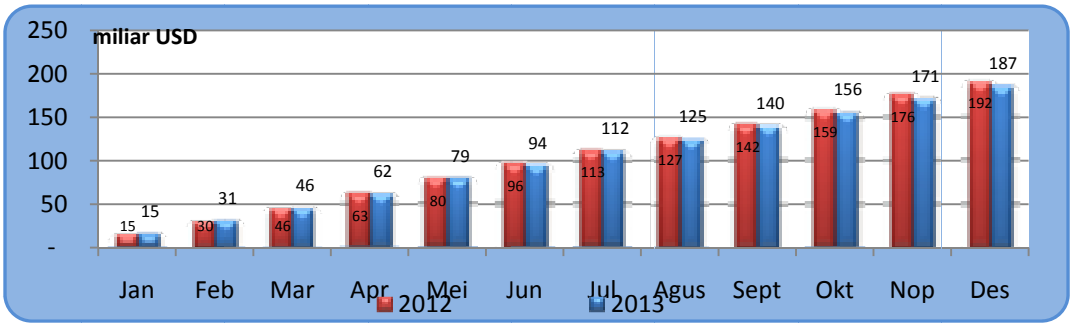


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 8. Perkembangan Akumulasi Ekspor tahun 2012 dan 2013 (miliar USD)

Tren impor tahun 2013 mengalami penurunan

Sepanjang tahun 2013 total impor mencapai USD186,63 miliar atau turun 2,64 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdiri dari impor non migas senilai USD141,36 miliar atau turun 5,21 persen dari tahun sebelumnya dan impor migas sebesar USD45,27 miliar atau naik 6,35 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Nilai impor golongan barang konsumsi dan barang modal mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,01 persen dan 17,36 persen. Sebaliknya impor bahan baku/penolong meningkat 1,31 persen. Perlambatan impor berasal dari penurunan impor barang konsumsi dan kontraksi impor barang modal serta bahan baku. Penurunan impor juga terkait dengan respons kebijakan dalam mengendalikan permintaan domestik dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Tren perkembangan impor selama tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 9.

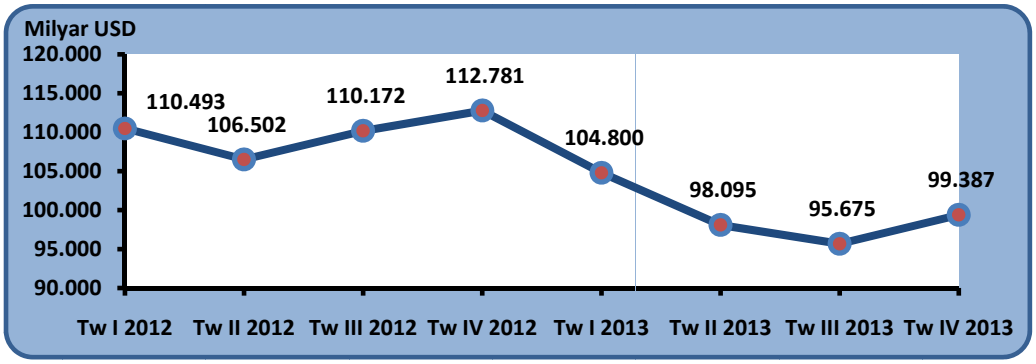


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 9. Perkembangan Akumulasi Impor Tahun 2012 dan 2013 (miliar USD)

Cadangan Devisa

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dipengaruhi transaksi modal dan finansial sepanjang tahun 2013 berhasil mencatat cadangan devisa pada akhir Desember 2013 sebesar USD99,4 miliar atau setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 10. Cadangan Devisa Triwulanan 2012-2013

BI Rate

Pada awal tahun 2013, BI *rate* ditetapkan sebesar 5,75 persen, selanjutnya BI merespon meningkatnya tekanan pada stabilitas makroekonomi dengan menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat berupa kenaikan BI *rate* sebesar 175 bps, sehingga BI *rate* mengalami perubahan menjadi sebesar 7,50 persen pada bulan Desember 2013. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi tekanan inflasi dan mendorong penyesuaian, defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN)

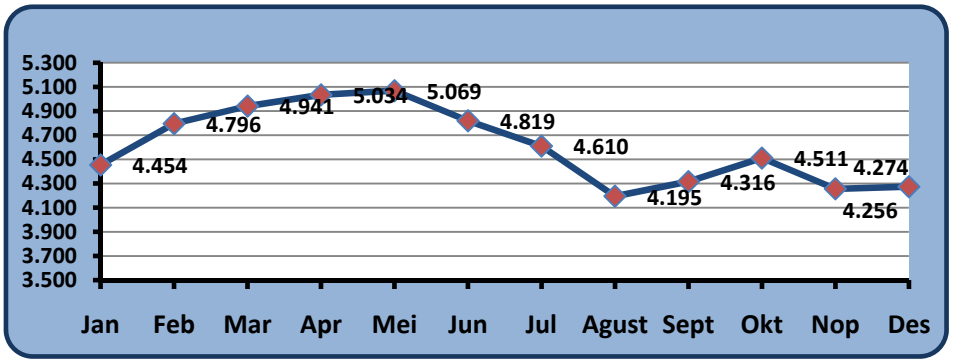
Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) menurun seiring dengan dampak ketidakpastian global dan persepsi terhadap ekonomi domestik. Hal ini tercermin dari *yield* SBN sepanjang tahun 2013 yang tercatat meningkat tajam sebesar 313,12 bps menjadi 8,29 persen dibanding 2012 sebesar 5,16 persen. Selama bulan Desember 2013, imbal hasil SBN jangka pendek, menengah dan panjang turun masing- masing sebesar 14,45 bps, 15,77 bps dan 19,20 bps menjadi 7,62 persen, 8, 34 persen dan 9,08 persen.

Suku bunga SPN 3 bulan

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal di antaranya aliran modal masuk *(capital inflows)* dan suku bunga global, sedangkan dari sisi internal meliputi masa jatuh tempo instrumen SPN 3 bulan yang cukup pendek masih menjadi daya tarik investor. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika ekonomi yang cepat, investor memerlukan keleluasaan untuk mengalihkan dananya dalam waktu singkat pada berbagai instrumen investasi lain. Realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 mencapai 4,5 persen atau di bawah yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar 5 persen.

IHSG

Kinerja saham domestik di tahun 2013 dalam tren menurun walaupun diwarnai dengan beberapa gejolak sebagai imbas dari ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi terhadap kondisi ekonomi domestik. IHSG sempat mencetak rekor tertinggi di level 5.214,98 pada 20 Mei 2013. Selanjutnya pada bulan Juni-Agustus, capaian tersebut memburuk karena terjadi koreksi cukup signifikan yang menyebabkan IHSG anjlok hingga menyentuh level 3.994,46 per 27 Agustus 2013. Penyebab lemahnya IHSG dapat berasal dari isu global maupun domestik. Dari isu global di antaranya adalah kekhawatiran investor pada rencana The Fed untuk mengurangi besaran stimulus moneter, isu US *government shutdown* dan perlambatan perekonomian China. Dari isu domestik antara lain adalah tekanan inflasi yang meningkat, defisit neraca perdagangan yang melebar. Di akhir tahun 2013, IHSG ditutup pada level 4.274,18.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013

Fungsi intermediasi perbankan yang membaik

Industri perbankan masih berada pada posisi ketahanan yang tetap solid yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang berada pada level 90,55 persen, rasio kecukupan modal bank (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) tercatat sebesar 18,36 persen pada Desember 2013 jauh di atas ketentuan minimum 8 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL/*Non Performing Loan*) *gross* masih terjaga pada level rendah, yang berada pada level 1,77 persen pada Desember 2013. Selama tahun 2013, kemampuan bank dalam mengelola risiko masih tetap terjaga termasuk terhadap tekanan pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Tabel 3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2013

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
LDR (%)	84,64	85,51	86,11	86,22	86,85	88,38	89,76	89,86	89,92	90,40	90,95	90,55
NPL (%)	2,01	2,03	1,97	1,96	1,95	1,88	1,87	1,99	1,86	1,91	1,88	1,77
CAR	19,18	19,15	18,92	18,61	18,39	17,98	17,95	17,89	18,00	18,36	18,60	18,36

Sumber : Bank Indonesia

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada awal tahun 2013, harga ICP berada di level USD111,07 per barel kemudian meningkat hingga mencapai USD114,86 per barel pada bulan Februari 2013. Selanjutnya ICP mengalami penurunan hingga mencapai level USD99,97 per barel pada bulan Juni 2013. Sementara pada triwulan III dan IV tahun 2013 tren harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan yang tertinggi pada bulan September 2013 yang mencapai USD109,69 per barel. Harga rata-rata ICP Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar USD105,77 per barel lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yaitu sebesar USD112,73 per barel.

Lifting Minyak

Selama tahun 2013, rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 825 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBNP tahun 2013 sebesar 840 ribu per barel per hari. Sementara itu, rata-rata *lifting* gas bumi mencapai 1.213 ribu barel setara minyak per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBNP tahun 2013 sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Penurunan ini antara lain terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwal produksi dan masalah perijinan lahan.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2013

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2013

Selama tahun 2013, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.502,01 triliun. Capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.077,31 triliun atau 93,81 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.148,36 triliun, realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp354,75 triliun atau 101,60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp349,16 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp6,83 triliun atau 152,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,48 triliun. Rendahnya capaian realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian, baik domestik maupun global. Indikator yang mempengaruhi antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta *lifting* minyak bumi dan gas alam. Selain terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik, dalam tahun 2013 juga terjadi perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut antara lain menyebabkan target pendapatan negara pada tahun 2013 mengalami deviasi dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2013.

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah 5 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009 - 2013) pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,24 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian APBN. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 21,63 persen, dan mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,53 persen.

Tabel 4. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2009 – 2013
(triliun Rupiah)

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
	APBNP	Real	APBNP	Real	APBNP	Real	APBNP	Real	APBNP	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	870,99	848,77	992,40	995,27	1.169,91	1.210,58	1.358,21	1.338,11	1.502,01	1.438,89
1. Penerimaan Perpajakan	651,95	619,92	743,32	723,30	878,68	873,87	1.016,24	980.52	1.148,36	1.077,31
a. Pajak Dalam Negeri	631,93	601,25	720,76	694,39	831,74	819,75	968,29	930.86	1.099,94	1.029,85
b. Pajak Perdagangan Internasional	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12	47,94	49.66	48,42	47,46
2. PNBP	218,03	227,18	247,18	268,95	286,58	331,46	341,14	351,80	349,16	354,75
a. Penerimaan SDA	138,65	138,96	164,73	168,83	191,98	213,82	217,16	225,84	203,73	226,41
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18	30,78	30,80	36,46	34,03
c. PNBP Lainnya	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,36	72,80	73,46	85,47	69,67
d. Pendapatan BLU	5,89	8,37	9,49	10,59	15,42	20,10	20,41	21,70	23,50	24,65
3. Hibah	1,01	1,67	1,90	3,02	4,66	5,25	0,83	5.79	4,48	6,83

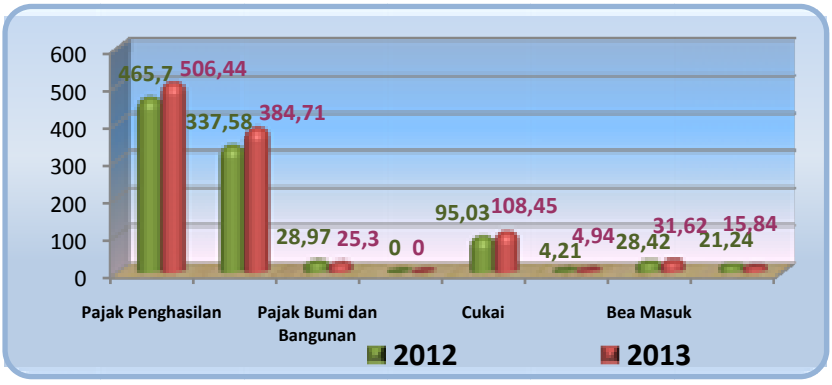
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-KementerianKeuangan

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013

Perpajakan tetap menjadi primadona utama dalam capaian pendapatan negara dan hibah tahun 2013. Penerimaan perpajakan tahun 2013 mencapai Rp1.077,31 triliun atau sebesar 93,81 persen dari target APBNP 2013 sebesar Rp1.148,36 triliun. Capaian ini meningkat 9,87 persen dari realisasi tahun 2012 yang mencapai Rp980,52 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 dipengaruhi antara lain oleh kebijakan insentif perpajakan yang dilaksanakan Pemerintah di tahun 2013 yang meliputi: (a) kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000,00 per tahun menjadi Rp24.300.000,00 per tahun; (b) kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (*Hybrid and Low Cost Green Car*); dan (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas bumi.

Komposisi Penerimaan Perpajakan

Komposisi penerimaan perpajakan tahun 2013 meliputi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.029,85 triliun atau sebesar 93,63 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.099,94 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp47,46 triliun atau sebesar 98,01 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp48,42 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri meliputi penerimaan PPh sebesar Rp506,44 triliun, penerimaan PPN sebesar Rp384,71 triliun, penerimaan PBB sebesar Rp25,30 triliun, penerimaan BPHTB sebesar Rp0, penerimaan cukai sebesar Rp108,45 triliun, dan penerimaan pajak lainnya sebesar Rp4,94 triliun. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk sebesar Rp31,62 triliun dan bea keluar sebesar Rp15,84 triliun.

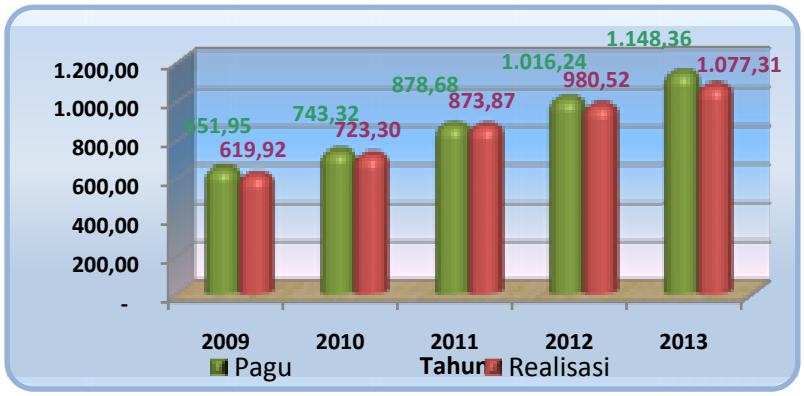


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013
(Triliun Rupiah)

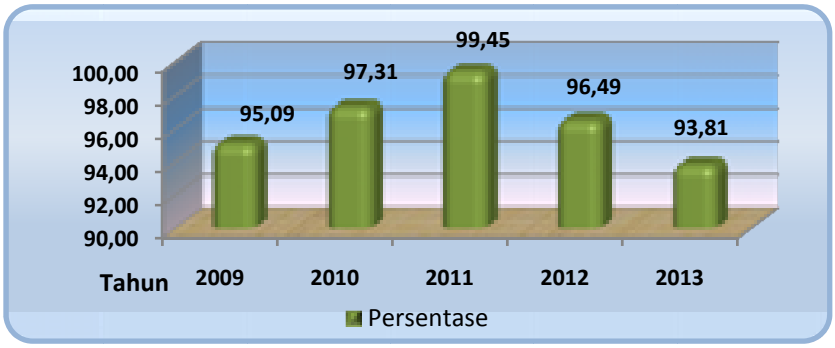
Tren realisasi penerimaan perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.077,31 triliun atau meningkat sebesar 9,87 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya yang mencapai Rp980,52 triliun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan perpajakan tetap mendominasi penerimaan negara, meskipun jika diperhatikan dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan mengalami tren menurun sejak tahun 2009.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 13. Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah)

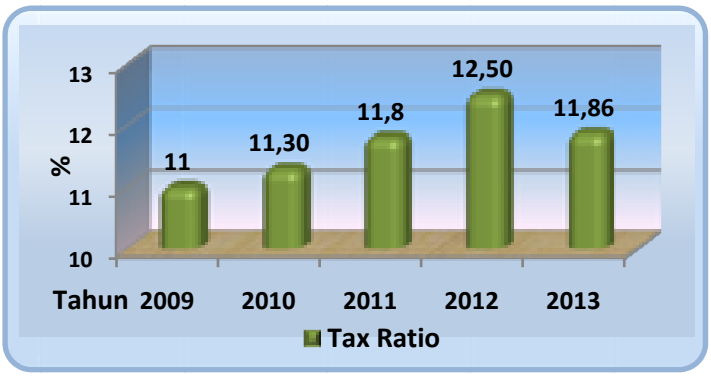


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 14. Persentase Capaian Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013

Tax Ratio

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara. *Tax ratio* Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2009-2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB *(tax ratio)* tahun 2013 mencapai 11,86 persen. Persentase ini menurun sebesar 5,40 persen bila dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2012 sebesar 12,5 persen.



Sumber : Kementerian Keuangan

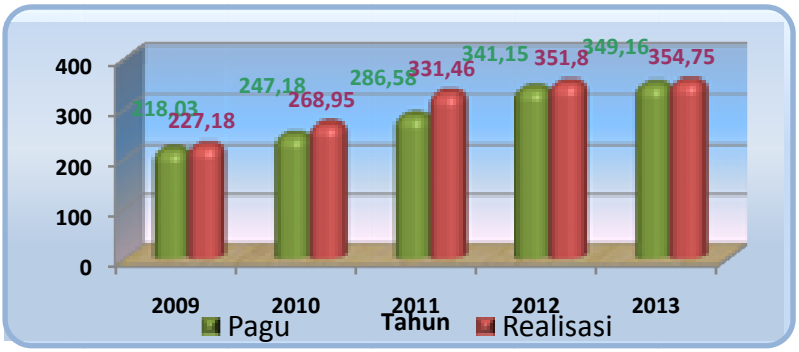
Grafik 15. Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2013

Optimalisasi PNBP

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP 2013, khususnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap USD, dan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi. Perubahan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam, yang dalam hal ini merupakan sumber utama PNBP. Selama tahun 2013 Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan realisasi PNBP, antara lain di sisi penerimaan sumber daya alam (SDA) dengan memfokuskan pada pencapaian target *lifting* minyak bumi dan gas bumi, efisiensi *cost recovery* dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi, dan peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sementara itu, optimalisasi PNBP lainnya dan BLU dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan pelayanan dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP lainnya dan BLU.

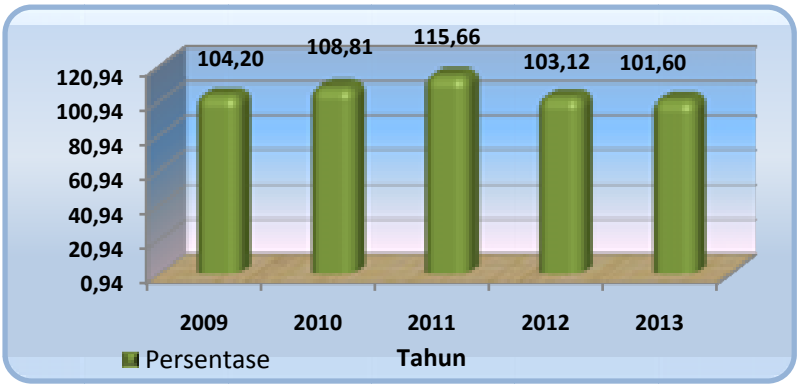
Realisasi PNBP tahun 2013

Capaian PNBP tahun 2013 mencapai Rp354,75 triliun, atau sebesar 101,60 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp349,16 triliun. Capaian realisasi PNBP ini naik sebesar Rp2,95 triliun dari realisasi PNBP tahun 2012 sebesar Rp351,80 triliun. Apabila dilihat dari persentase capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan dalam APBN, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang beragam, dan persentase tertinggi realisasi terhadap pagu PNBP dicapai pada tahun 2011 sebesar 115,66 persen dari pagu yang ditetapkan. Realisasi PNBP tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBP tahun 2011 di antaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBP K/L; dan (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBP pada K/L.



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 16. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2009-2013
(Triliun Rupiah)

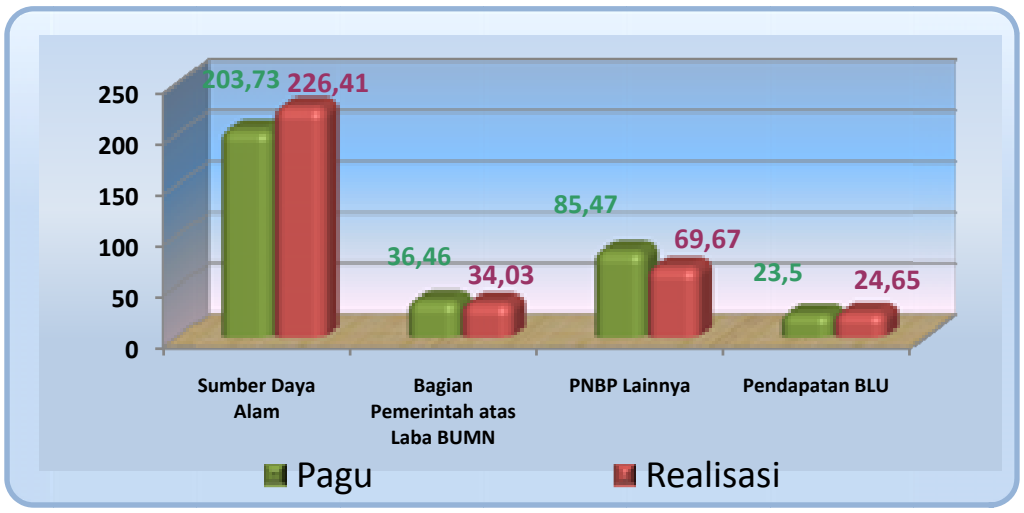


Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 17. Persentase Capaian PNBP Tahun 2009-2013

Komposisi PNBP Tahun 2013

Komposisi pencapaian PNBP pada tahun 2013 didominasi oleh realisasi penerimaan SDA sebesar Rp226,41 triliun atau 111,13 persen dari target dalam APBNP sebesar Rp203,73 triliun, atau 63,82 persen dari PNBP secara keseluruhan. Selain berasal dari penerimaan SDA, capaian PNBP tahun 2013 berasal pula dari penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp34,03 triliun atau 93,33 persen dari target APBNP sebesar Rp36,46 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp69,67 triliun atau 81,51 persen dari target APBNP sebesar Rp85,47 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp24,65 triliun atau 104,89 persen dari target dalam APBNP sebesar Rp23,50 triliun.



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 18. Komposisi PNBP Tahun 2013 (triliun Rupiah)

PNBP Sumber Daya Alam

PNBP sumber daya alam menjadi penyumbang terbesar capaian penerimaan PNBP tahun 2013, yaitu sebesar Rp226,41 triliun atau 63,82 persen dari PNBP secara keseluruhan. Capaian PNBP sumber daya alam ini meliputi penerimaan sumber daya alam migas sebesar Rp203,63 triliun dan penerimaan sumber daya alam non migas sebesar Rp22,78 triliun. Beberapa kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah antara lain: (a) pencapaian target *lifting* minyak mentah dan *lifting* gas bumi; (b) efisiensi *cost recovery* dan mengupayakan penurunan angka rasio *cost recovery* terhadap *gross revenue*; dan (c) melakukan secara intensif penagihan atas penjualan hasil migas bagian Pemerintah. Sementara itu, untuk mencapai target *lifting* migas akan dilakukan beberapa upaya, antara lain: (a) mendorong optimasi produksi pada lapangan eksisting termasuk penerapan *enhanced oil recovery*/EOR; (b) melaksanakan percepatan pengembangan lapangan baru dan struktur *idle*; (c) *term and condition* yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di *remote area* dan/atau laut dalam; (d) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan, dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional; serta (e) melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.

Boks 1. Kementerian Negara/Lembaga Penyumbang PNBP Lainnya Terbesar di Tahun 2013

Di antara seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang berkontribusi dalam menyumbang perolehan PNBP Lainnya di tahun 2013, terdapat tujuh Kementerian Negara/Lembaga yang berkontribusi paling besar, yaitu: (a) Kementerian Komunikasi dan Informatika: (b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (d) Kementerian Hukum dan HAM; (e) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (f) Badan Pertanahan Nasional, dan (g) Kementerian Perhubungan. Pencapaian realisasi tersebut sebagian besar berasal dari jasa layanan yang telah diberikan kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap penerimaan PNBP Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 adalah sebesar Rp11,73

triliun. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain: (a) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi secara optimal dengan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan audit kepada para wajib bayar; (b) melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi dan pengguna frekuensi radio; dan (c) melakukan otomasi/modernisasi proses perijinan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013 sebesar Rp11,22 triliun. Kebijakan dan strategi yang ditempuh Kementerian ESDM tahun 2013 difokuskan pada: (1) pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik; (2) peningkatan rasio elektrifikasi, antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyediaan listrik murah dan hemat untuk masyarakat daerah tertinggal dan nelayan, serta pembangunan pembangkit energi baru terbarukan; (3) meningkatkan produksi/*lifting* dan cadangan minyak dan gas bumi, antara lain melalui evaluasi cadangan migas, eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru, peningkatan kontrak kerja sama migas; (4) diversifikasi energi, antara lain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME), pengembangan panas bumi, pengembangan pemanfaatan gas bumi; (5) konservasi energi, antara lain melalui audit energi, edukasi, dan sosialisasi konservasi energi; (6) peningkatan infrastruktur energi, antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunan mini LPG *plant*; (7) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, antara lain melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang; (8) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.

Pencapaian PNBP Lainnya Polri tahun 2013 sebesar Rp4,04 triliun. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) memperkuat Polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan samsat, satpas, pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan, serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat; (b) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis, dan fungsional lalu lintas; (c) membangun jaringan *online* samsat di seluruh Polda dalam rangka *online system National Traffic Management Center* (NTMC); (d) menyiapkan pembangunan *Traffic Management Centre* (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres, dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar); (e) menyelenggarakan kegiatan *Open Government Information* (OGI) dalam rangka keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di bidang SIM, BPKB, STNK dan TNKB (SBST), antara lain dengan mengikuti kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4); (f) mencukupi kebutuhan blangko/formulir dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan fungsi intelijen keamanan (intelkam) dan mencukupi biaya listrik, telepon satuan pelayanan administrasi (satpas) serta honor petugas pelaksana kegiatan PNBP; serta (g) memperluas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 sebesar Rp2,97 triliun. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) menerapkan E-Paspor, elektronik kartu ijin tinggal terbatas (E-KITAS) dan elektronik kartu ijin tinggal tetap (E-KITAP); (b) mengembangkan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN) secara berkelanjutan; (c) melakukan sosialisasi tentang hak atas kekayaan intelektual; (d) membentuk *desk* pelayanan jasa hukum (*fidusia*) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; (e) mempermudah pembayaran fidusia melalui bank, sekaligus mewujudkan transparansi transaksi; serta (f) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 sebesar Rp2,12 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa berupaya untuk: (a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktifitas (*activity based budgeting*); (b) optimalisasi aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi; (c) tidak ada kenaikan tarif uang kuliah/SPP untuk perguruan tinggi negeri; (d) menggunakan tarif uang kuliah

tunggal untuk perguruan tinggi negeri mulai tahun 2013, yaitu tarif dihitung berdasarkan harga satuan dari semua komponen yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi; (e) menyediakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri oleh Pemerintah; serta (f) sumbangan murni yang tidak terkait dengan pendapatan mahasiswa baru dari masyarakat dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri.

Pencapaian PNBP Lainnya Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 sebesar Rp1,85 triliun. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui: (a) membangun kepercayaan masyarakat pada BPN (*trust building*) melalui sosialisasi tarif kepengurusan tanah di media cetak; (b) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh; (c) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (d) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; serta (e) membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

Pencapaian PNBP Lainnya Kementerian Perhubungan tahun 2013 sebesar Rp1,63 triliun. Upaya yang telah dilakukan antara lain: (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (LLASDP); (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai Standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; (c) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik; (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang; (e) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran, termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah; (f) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar; (g) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Departemen Perhubungan; dan (h) ekstensifikasi PNBP dengan cara mengoptimalkan aset/BMN dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Penerimaan Hibah Tahun 2013

Penerimaan hibah tahun 2013 terrealisasi sebesar Rp6,83 triliun atau sebesar 152,39 persen dari target APBNP tahun 2013 sebesar Rp4,48 triliun. Realisasi tersebut meningkat sebesar 18,07 persen bila dibandingkan dengan realisasi hibah tahun 2012 yang mencapai Rp5,79 triliun. Penerimaan hibah sangat tergantung atas komitmen negara donor untuk memberikan bantuannya dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah dalam melaporkan dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Dalam rangka tertib administrasi, kebijakan penerimaan hibah diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang meliputi: (a) penyempurnaan peraturan mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan dan pelaporan hibah; (b) penetapan kebijakan yang mengatur tentang penunjukan satker yang bertanggungjawab mengelola hibah Kementerian Negara/Lembaga; dan (c) perbaikan metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor.

REALISASI BELANJA NEGARA

Kebijakan Belanja Negara Tahun 2013

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara tahun 2013 mengacu pada prioritas, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Desain kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan lima agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan

untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik dalam jangka menengah maupun tahunan.

Strategi 4 (empat) pilar Belanja Negara

Esensi strategi belanja negara tahun 2013, baik belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada *level* yang cukup tinggi (*pro growth*); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*). Prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara, dalam tahun 2013 Pemerintah telah melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

Realisasi belanja negara tahun 2013

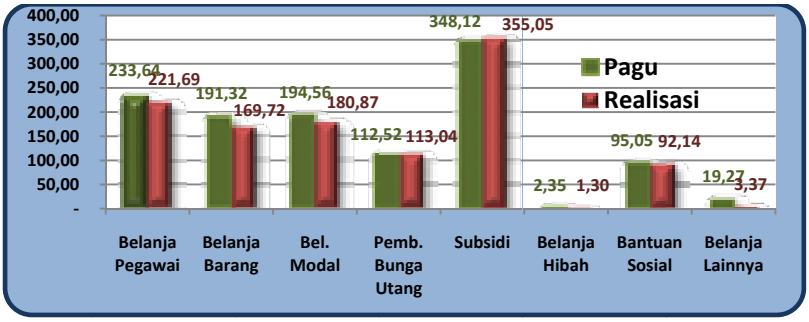
Tahun 2013 realisasi belanja negara mencapai Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp1.726,19 triliun. Secara nominal realisasi belanja negara tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp159,15triliun atau 10,67 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp1.491,41 triliun. Realisasi belanja negara tahun 2013 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.137,17 triliun atau 95,02 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp1.196,83 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari pagu APBNP sebesar Rp529,36 triliun. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara yang diterapkan Pemerintah di tahun 2013, Pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan,termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram, antarsektor, dan antarfungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

Peranan Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai komponen terbesar dari belanja negara, belanja pemerintah pusat setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal Pemerintah, memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi dalam perekonomian. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan nasional sebagaimana digariskan, baik dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut, kualitas kebijakan dan alokasi yang representatif juga mendorong persepsi positif dari para pengambil keputusan bisnis, yang berarti dapat berdampak positif terhadap perekonomian secara umum.

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai yang terrealisasi sebesar Rp221,69 triliun (94,89 persen dari pagu), belanja barang yang terrealisasi sebesar Rp169,72 triliun (88,71 persen dari pagu), belanja modal yang terrealisasi sebesar Rp180,87 triliun (92,96 persen dari pagu), belanja pembayaran bunga utang yang terrealisasi sebesar Rp113,04 triliun (100,46 persen dari pagu), belanja subsidi yang terrealisasi sebesar Rp355,05 triliun (101,99 persen dari pagu), belanja hibah yang terrealisasi sebesar Rp1,30 triliun (55,53 persen dari pagu), belanja bantuan sosial yang terrealisasi sebesar Rp92,14 triliun (96,93 persen dari pagu), dan belanja lainnya yang terrealisasi sebesar Rp3,37 triliun (17,47 persen dari pagu).



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 19. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (triliun Rupiah)

Komponen Terbesar Belanja Pemerintah Pusat

Komponen terbesar belanja pemerintah pusat apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi adalah belanja subsidi, belanja pegawai dan belanja modal. Belanja subsidi tahun 2013 melebihi pagu yang telah ditetapkan namun tetap dalam batas kemampuan negara. Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau di masyarakat, meliputi subsidi energi dan subsidi non energi. Sedangkan belanja pegawai sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium, dan juga digunakan untuk pembayaran kontribusi sosial, yakni asuransi kesehatan, dan pembayaran manfaat pensiun. Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai erat kaitannya dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, yang antara lain berupa: (1) kenaikan gaji pokok; (2) pemberian gaji bulan ke-13; serta (3) kenaikan pensiun pokok dan pemberian pensiun bulan ke-13. Selain itu, peningkatan anggaran dan realisasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2008 dan terus diperluas pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan besarnya realisasi belanja modal di tahun 2013 adalah sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja modal tersebut juga merupakan cermin dari besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.

Boks 2. Program Jaminan Sosial Nasional (PJSN)

Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi merupakan prioritas kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan. Salah satu tantangan yang muncul di antaranya adalah penanganan persoalan yang belum terpecahkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Dasar Hukum

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum nirlaba atau lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden, dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial di antaranya PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero). Transformasi

kelembagaan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan dilakukan serentak mulai Januari 2014. Namun untuk layanan program dilakukan secara bertahap yakni BPJS Kesehatan mulai Januari 2014 dan untuk BPJS Ketenagakerjaan mulai Tahun 2015.

Harapan

BPJS Kesehatan yang berlaku pada awal tahun 2014 akan menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia. Jaminan kesehatan rakyat semesta diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada tahun 2014 dengan target peserta sebanyak 121 juta jiwa, dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Keanggotaan BPJS

Sesuai Pasal 14 UU BPJS, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan bagi warga miskin iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkannya.

Kendala

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh BPJS pada tahun 2014 diperkirakan masih terkendala oleh persiapan dan infrastruktur. Sebagai contoh untuk persiapan diperlukan waktu yang cukup baik untuk penyebarluasan informasi program ke seluruh masyarakat maupun dalam pembuatan kartu peserta. Sedangkan untuk infrastruktur jumlah kamar rumah sakit kelas III yang ada saat ini masih kurang memadai, yaitu jumlah 123 ribu unit untuk menampung 29 juta warga miskin.

Konsekuensi Fiskal

Risiko fiskal yang dapat ditimbulkan oleh program tersebut bersumber dari aspek operasional dan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BPJS di awal pembentukan serta ke depan beban kontinjensi pemerintah akan bertambah sebagai konsekuensi transformasi program jaminan sosial.

Sumber: Kementerian Keuangan

Dominasi Belanja Operasional dalam Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan pembayaran bunga. Selama periode tahun 2009 - 2013, belanja operasional ini rata-rata mencapai 75,37 persen dari total belanja pemerintah pusat.Belanja pemerintah pusat dalam periode 2009 - 2013 secara nominal menunjukkan peningkatan rata-rata 16,13 persen per tahun, yaitu dari Rp628,81 triliun dalam tahun 2009 menjadi Rp1.137,17 triliun dalam tahun 2013.

Tabel 5. Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2009-2013

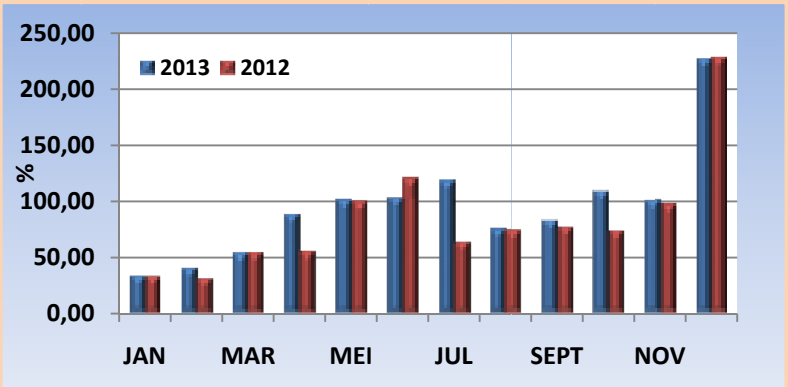
Rincian	2009		2010		2011		2012		2013	
	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)
Jumlah Bel Pem. Pusat	628,81	100	697,41	100	883,72	100	1,010,56	100	1.137,16	100
Bel Operasional Pem. Pusat	440,20	70,01	526,77	75,53	689,00	77,97	785,68	77,75	859,5	75,58
Belanja Pegawai	127,67	20,30	148,08	21,23	175,74	19,89	197,86	19.58	221,69	19,49
Belanja Barang	80,67	12,83	97,60	13,99	124,64	14,10	140,88	13.94	169,72	14,92
Pembayaran Bunga Utang	93,78	14,91	88,38	12,67	93,26	10,55	100,52	9.95	113,04	9,94
Subsidi	138,08	21,96	192,71	27,63	295,36	33,42	346,42	34.28	355,05	31,22
Belanja Modal	75,87	12,07	80,29	11,51	117,85	13,34	145,10	14,36	180,87	15,91
Hibah	-	-	0,07	0,01	0,30	0,03	0,07	0,01	1,30	0,11
Bantuan Sosial	73,81	11,74	68,61	9,84	71,10	8,05	75,62	7,48	92,14	8,10
Belanja Lain-lain	38,93	6,19	21,67	3,11	5,46	0,62	4,07	0,40	3,37	0,30

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran,Kementerian Keuangan

Boks 3. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2013

Peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini idealnya diikuti dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran yang masih tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran.

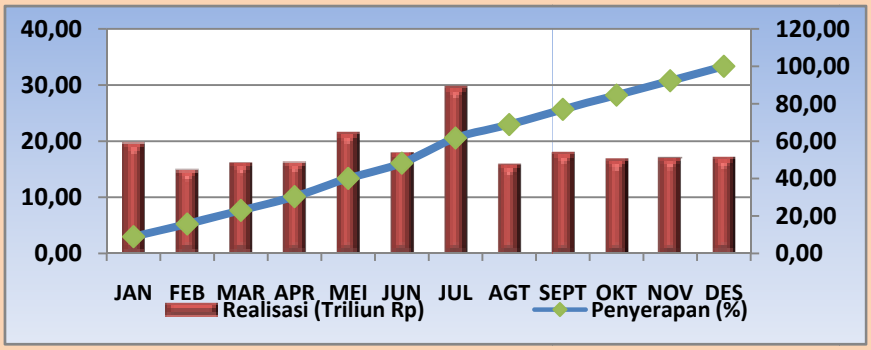
Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja kementerian negara/lembaga. Pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 20. Tren Belanja Pemerintah Pusat Bulanan Tahun 2013 dan Tahun 2012

Dari grafik tersebut belanja Pemerintah Pusat memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan tajam di bulan Agustus dan kecenderungan meningkat kembali dari bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp226,78 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp94,76 triliun.

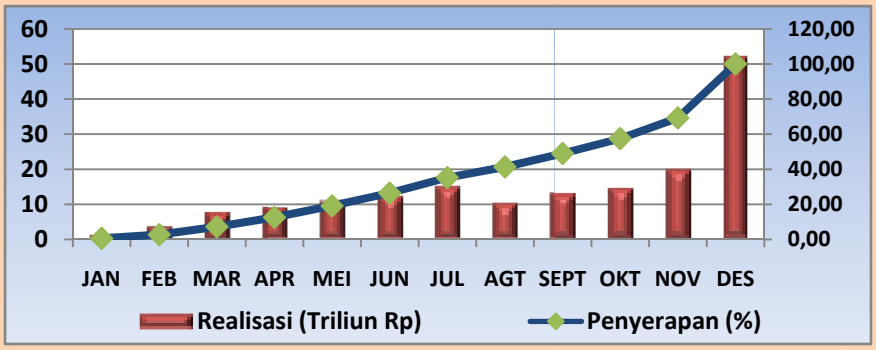


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 21. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2013

Belanja pegawai pada tahun 2013 terrealisasi sebesar Rp221,69 triliun atau 94,89 persen dari pagu APBNP sebesar Rp233,64 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp23,83 triliun atau 12,04 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp197,86 triliun. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013 tren belanja pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli 2013

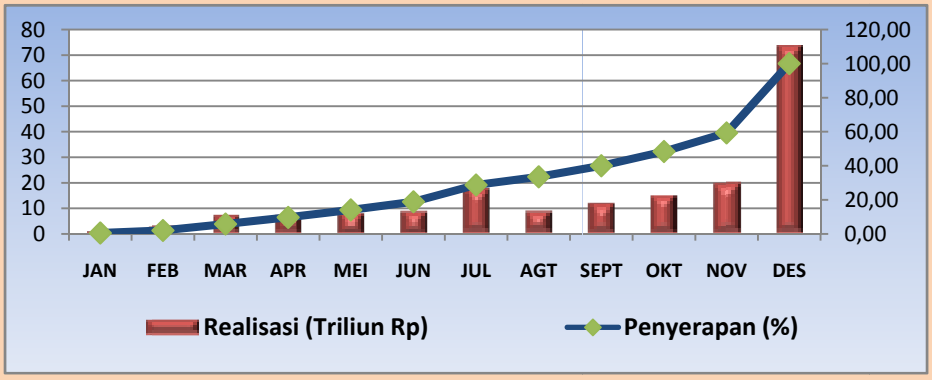
mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp29,78 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 22. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2013

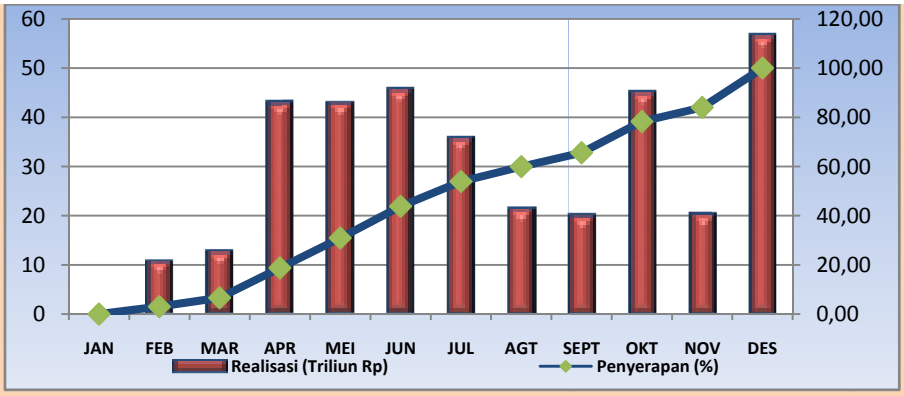
Belanja barang terrealisasi sebesar Rp169,72 triliun atau 88,71 persen dari pagu APBNP sebesar Rp191,32 triliun dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang terrealisasi sebesar Rp140,88 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2013 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp1,09 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp52,16 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2013

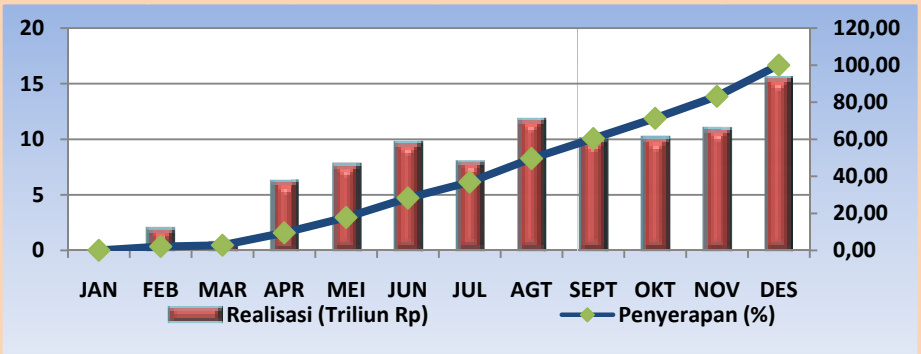
Realisasi belanja modal tahun 2013 sebesar Rp180,87 triliun atau 92,96 persen dari pagunya. Secara umum tren realisasi belanja modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang, yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,95 triliun, relatif tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp73,58 triliun. Rata-rata realisasi sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi anggaran belanja modal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi juga cermin dari besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorong distribusi barang.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2013

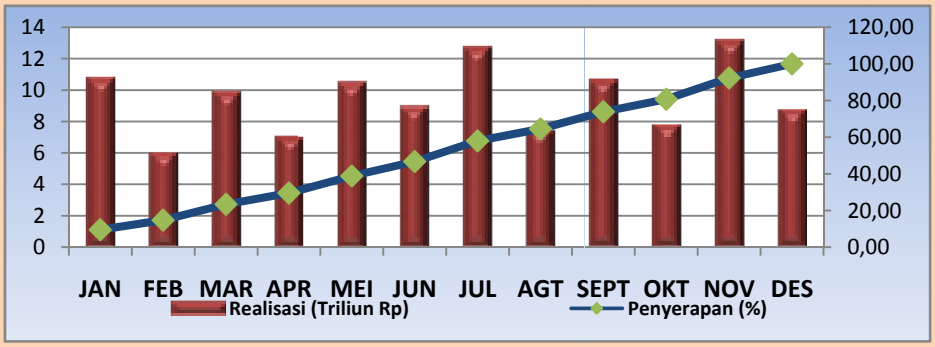
Realisasi belanja subsidi mencapai Rp355,05 triliun atau 101,99 persen dari yang pagu APBNP 2013 atau meningkat 2,49 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp346,42 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2013 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terrealisasi pada bulan Februari dan kemudian naik sampai bulan April sampai dengan Juni. Selama kurun waktu Juli sampai September realisasi kembali turun, serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp56,80. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp29,59 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2013

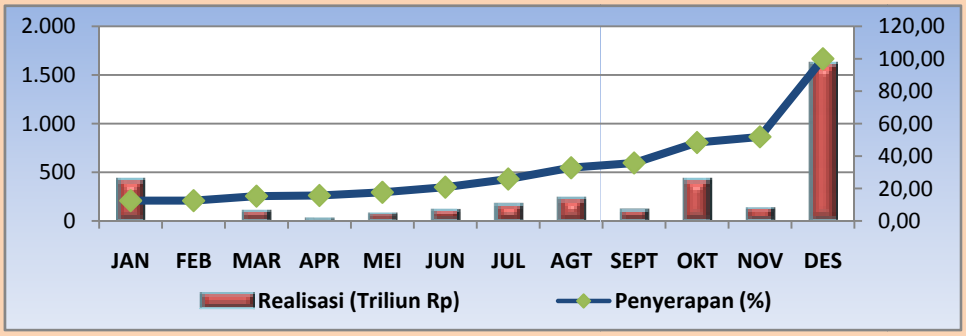
Belanja bantuan sosial terrealisasi sebesar Rp92,14 triliun atau 96,93 persen dari pagu APBNP 2013 atau mengalami kenaikan 21,84 persen dibanding realisasi tahun 2012 sebesar Rp75,62 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2013, penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,9 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp15,51 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp7,68 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2013

Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp113,04 triliun atau 100,46 persen dari yang dialokasikan dalam APBNP 2013. Peningkatan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 27. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2013

Pada tahun 2013 belanja lain-lain terrealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 17,47 persen dari yang dialokasikan dalam APBNP 2013 sebesar 19,27 triliun. Tren penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2013 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp0 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp1,62 triliun.

Porsi belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap PDB

Selama kurun waktu tahun 2009-2013 porsi belanja pemerintah pusat dan belanja modal terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara umum mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Anggaran yang dialokasikan dan realisasi yang telah dicapai pemerintah selama kurun waktu 2009-2013 berkontribusi signifikan bagi pencapaian misi tersebut. Dengan telah dijalankannya kebijakan fiskal yang ekspansif oleh pemerintah, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus bagi perekonomian terutama melalui instrumen belanja negara.

Porsi belanja pemerintah pusat terhadap PDB selama kurun waktu 2009-2013 secara umum mengalami peningkatan, yakni sebesar 11,20 persen di tahun 2009 menjadi 12,52 persen di tahun 2013. Namun demikian porsi belanja pemerintah pusat terhadap PDB ini sempat mengalami penurunan di tahun 2010, yaitu hanya sebesar 10,86 persen dari PDB. Kemudian realisasi belanja modal tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Serupa dengan belanja pemerintah pusat, rasio belanja modal terhadap PDB juga sempat mengalami penurunandi tahun 2010, dan kembali naik di tahun 2011. Rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2009-2013 adalah 1,35 persen, 1,25 persen, 1,59 persen, 1,76 persen dan 1,99 persen.

Tabel 6. Perkembangan Belanja Negara tahun 2009-2013
(triliun Rupiah)

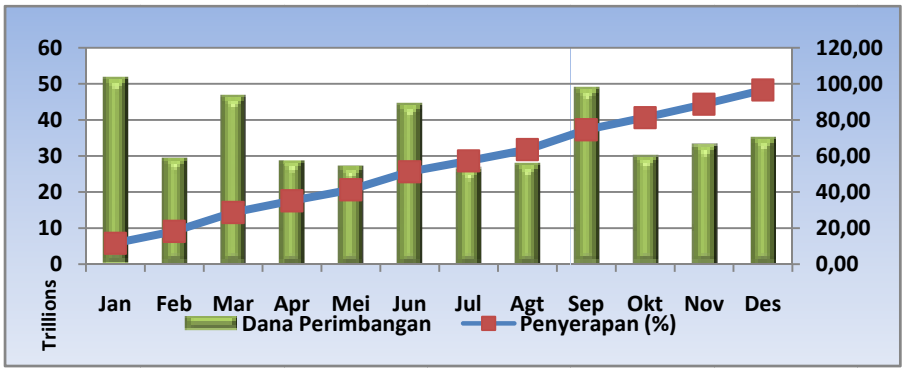
Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	937,38	16,70	1.042,12	16,23	1.295,00	17,44	1.491,41	18,10	1.650,56	18,17
Belanja Pemerintah Pusat	628,81	11,20	697,41	10,86	883,72	11,90	1.010,56	12,26	1.137,17	12,52
Transfer ke Derah	308,59	5,50	344,73	5,37	411,32	5,54	480,64	5,83	513,26	5,65
Belanja Modal	75,87	1,35	80,29	1,25	117,85	1,59	145,10	1,76	180,87	1,99
PDB	5.613,4		6.422,9		7.427,1		8.241,9		9.084,0	

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan*

Realisasi transfer ke daerah

Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical* dan *horizontalfiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara. Selain anggaran transfer ke daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian negara/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD.

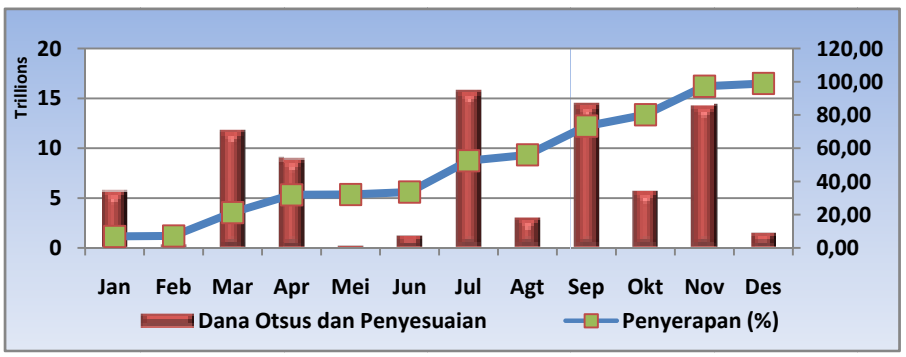
Realisasi transfer ke daerah dalam tahun 2013 mencapai Rp513,26 triliun (96,96 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp529,36 triliun), atau naik Rp32,62 triliun (6,79 persen) dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp480,64 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan dan dana otsus dan penyesuaian. Realisasi dana perimbangan tahun 2013 sebesar Rp430,35 triliun atau sebesar 96,59 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp445,53 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terrealisasi sebesar Rp82,91 triliun atau 98,90 persen dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp83,83 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 28. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2013

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2013. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp51,79 triliun atau 11,37 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan realisasi tertinggi di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan sebesar Rp35,04 triliun atau 7,69 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp430,35 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp35,86 triliun, lebih besar dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp34,27 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 29. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2013

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, penyerapan tertinggi ada di bulan Juli sebesar Rp15,79 triliun, berikutnya bulan September sebesar Rp14,51 triliun, dan November sebesar Rp14,35 triliun. Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp6,91 triliun. Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp82,91 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69,35 triliun.

PEMBIAYAAN

Kebijakan Pembiayaan tahun 2013

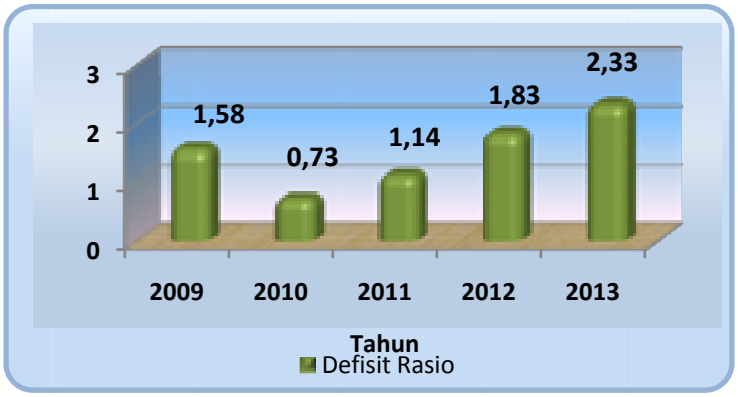
Guna mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian nasional serta meredam dampak krisis utang di zona Euro, kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2013 diarahkan pada kebijakan fiskal ekspansif. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari non utang dan utang. Mengingat minimnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan non utang, sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan dalam menutup defisit APBN 2013. Pembiayaan melalui utang dalam APBN 2013 dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri di saat yang bersamaan Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan *multiplier* perekonomian nasional.

Realisasi pembiayaan APBN

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2013 mencapai Rp237,40 triliun, lebih tinggi Rp13,21 triliun (5,89 persen) dari target APBNP 2013 sebesar Rp224,19 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp243,20 triliun, lebih tinggi Rp2,14 triliun (0,89 persen) dari target APBNP 2013 sebesar Rp241,06 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp5,81 triliun, lebih rendah sebesar Rp11,06 triliun dari target APBNP 2013 sebesar negatif Rp16,87 triliun.

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2009-2013 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 1,50 persen. Angka rasio defisit terhadap PDB selama periode 2009-2013 berturut-turut adalah 1,58 persen, 0,73 persen, 1,14 persen, 1,83 persen dan 2,33 persen.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

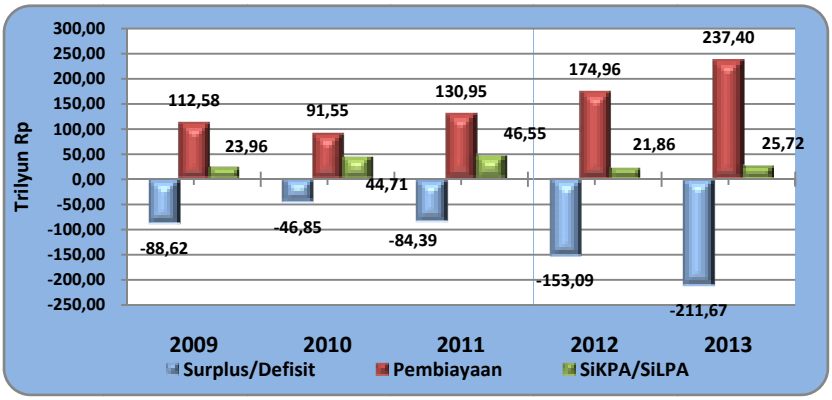
Grafik 30. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2009-2013

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SikPA/SiLPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran)/SiKPA (sisa kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran pemerintah pusat menghasilkan SiLPA. SiLPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SiLPA tahun anggaran berjalan dengan saldo

SiLPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2009 realisasi APBN mengalami SiLPA Rp23,96 triliun. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SiLPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SiLPA sebesar Rp44,71 triliun. Tahun 2011 jumlah SiLPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Sedangkan tahun 2012 jumlah SiLPA menjadi Rp21,86 triliun.Untuk tahun 2013 realisasi APBN mengalami SiLPA sebesar Rp25,72 triliun, meningkat Rp3,86 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp21,86 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan dan SiKPA/SiLPA

Tabel 7. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	2.178,9	2.314,5	2.464,6	2.618.9	2.770,3	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	5.606,2	6.446,9	7.419,2	8.229,4	9.084,0	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	23,9	27,03	30,66	33,53	36,5	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	4,63	6,22	6,49	6,23	5,78	(1)
5	Inflasi (%)	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	116,5	157,8	203,5	190,0	182,57	(1)
7	Eskpor Non Migas (USD miliar)	97,43	129,74	162,02	153,05	149,93	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	96,8	135,7	177,4	191,7	186,63	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	77,85	108,25	136,73	149,13	141,36	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	66,1	96,2	110,1	112,78	99,4	(2)
11	Rupiah/USD (y-o-y)	10.408	9.078	8.776	9.638	12.170	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	848,76	995,27	1.210,59	1.338,33	1.438,89	(3)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	937,38	1.042,1	1.294,98	1.489,72	1.650,56	(3)
14	Défisit Anggaran (Rp Triliun)	(88,62)	(46,85)	(84,38)	(150,52)	(211,67)	(3)
15	IHSG	2.534,0	3.704	3.822	4.316,7	4,274	(2)
16	HargaMinyak (USD/Barrel)	61,5	79.4	111,5	112,7	105,77	(4)
17	*Lifting* Minyak (ribu Barrel/hari)	952	954	898,1	860	825	(4)

Sumber :

(1) Badan Pusat Statistik
(2) Bank Indonesia
(3) DJPU, Kementerian Keuangan
(4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
(5) Badan Koordinasi Penanaman Modal
(6) Kementerian ESDM

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 disusun untuk tujuan umum (*general puposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP Tahun 2013 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja perangkat daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2013 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan gabungan dari entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya. Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Satker yang berada di bawahnya.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2013	2012
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	70
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.640	1.629
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	16	16
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	873	942
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	1.070	261
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	797	776
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.073	1.073
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.622	1.954
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	107	109
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	98	99
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	663	666
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	420	388
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.577	1.279
18	BA 025	Kementerian Agama	6.931	6.955
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	882	820
20	BA 027	Kementerian Sosial	216	278
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	407	407
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	790	794
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.083	1.245
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	2
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150	242
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	5
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	74	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	45	36
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	17
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	507	507
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan	35	35

		Perencanaan Pembangunan Nasional		
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	468	468
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	35
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	62	60
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.206	1.207
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	40	40
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	119	119
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	15	7
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	531	531
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	21
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	20	20
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	1
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	35	34
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	39
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	255	304
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	9	42
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	27	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	34	25
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
78	BA 110	Ombudsman RI	1	1
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	35	28
80	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
81	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
82	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
83	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	28	1
84	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	73
85	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	29	29
86	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
87	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang *)	1	1
	BA 999.02	Hibah *)	2	1
	BA 999.03	Investasi Pemerintah *)	11	8
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman *)	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah *)	3	1
	BA 999.07	Belanja Subsidi *)	13	14
	BA 999.08	Belanja Lain-lain*)	13	2
	BA 999.99	Transaksi Khusus *)		
	BA 999.--	Badan Lainnya*)		
		Jumlah Satker	**25.384**	**24.889**

**) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.*

LKPP Tahun 2013 mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya nonsatuan kerja.

LKPP Tahun 2013 ini tidak mencakup entitas:

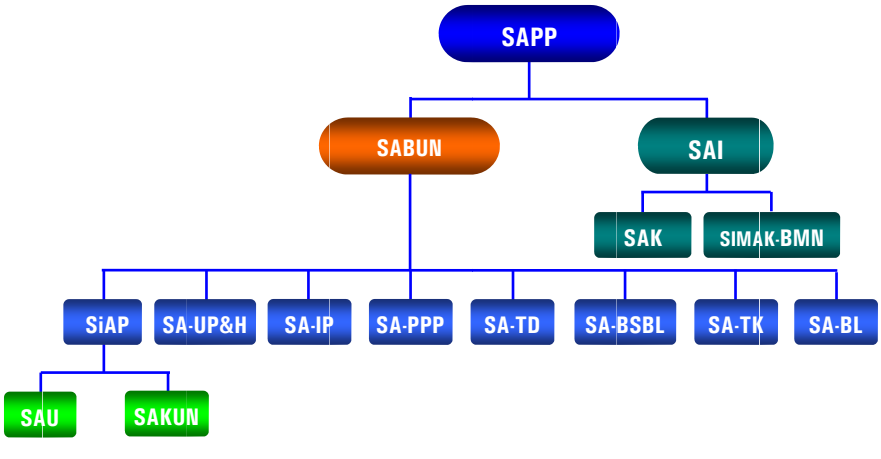
- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



Kerangka Umum SAPP



Alur Penyusunan LKPP

SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan

berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai data "Suspen."

- Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN TA 2013 disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan transaksi pembiayaan.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2013 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL, rekening khusus dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langung, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2013 berbasis Kas Menuju Akrual. Oleh karena itu, SAP yang diacu adalah Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis

Kas Menuju Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2013 diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan RekeningPanas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980, penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980, dan penerimaan pertambangan pada rekening 508.000071980, setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi

dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok hutang. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi permanen yang berasal dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tesebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara berupa pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Kas pada BLU merupakan Kas BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan tidak disajikan sebagai kas dan setara kas melainkan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah (rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2013 ini menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja / Belanja Dibayar di Muka.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

  Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi terdiri dari investasi jangkan pendek dan investasi jangka panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) yang ada di BLU.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada LKPP Tahun 2013, Investasi Non Permanen bukan merupakan penyertaan modal saham, melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN;
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada

perusahaan yang bukan perseroan terbatas);

- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkelolakan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes.* Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Penilaian investasi permanen diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2013 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi dan Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan Tahun 2013

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

d. Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada pemda, BUMN, BUMD/atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah, termasuk di dalamnya piutang sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemda/atau penerima lainnya.

- Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya.
- TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, Dana Abadi Umat, dana Biaya Penyelenggaraan Iuran Haji, dan Kas Besi Perwakilan RI di Luar Negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta dana lain yang sejenis.
- Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2013 adalah:
  - Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP Tahun 2013 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan yang diperoleh tahun 2005 - 2010 disajikan berdasarkan harga perolehan, bila tidak diketahui harga perolehannya maka digunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Untuk aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK.
  - Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun 2013 setelah *Placed Into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah

siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2013 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga / Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan / potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds, zero coupon bonds, international bonds,* Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai bagian lancar.

- ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Obligasi Negara Ritel (ORI)*** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bonds*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

- ***Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)*** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01
- ***SU-002*** dan ***SU-004*** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- ***SU-007*** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semi-annually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- ***SRBI-01*** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- ***International Bonds*** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liablility* (*unfunded liability*) berupa kewajiban

pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service liablility* terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Promissory notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Kewajiban Kontijensi pada Tahun 2013 juga meliputi Kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah karena belum dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

(8) Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang

asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	12.189,00	10.025,39
Dolar Australia [AUD]	1	10.875,66	7.907,12
Dolar Canada [CAD]	1	11.442,94	9.722,03
Franc Swiss [CHF]	1	13.731,78	10.596,70
Yuan China [CNY]	1	1.999,22	1.537,46
Kroner Denmark [DKK]	1	2.254,99	1.717,16
EURO [EUR]	1	1.6821,44	12.809,86
Poundsterling Inggris [GBP]	1	20.096,63	15.578,86
Yen Jepang [JPY]	100	11.616,88	11.196,68
Korean Won [KRW]	1	11,55	9,03

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2013 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan pinjaman,

investasi jangka pendek dalam mata uang asing, dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar. Sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, PMN/investasi jangka panjang, dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

   - Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milikBUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
   - Hasil pembagian angka 1 dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.

   Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

   - Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

     Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi

   - Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:

     - Membandingkan antara besaran mata uang asing yangdipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belumterealisasi saat pemindahbukuan;
     - Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Akun Ekuitas Dana Lancar-Selisih Kurs kemudian ditutup ke akun SILPA.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing.

a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
   - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
   - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2013) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aset / Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

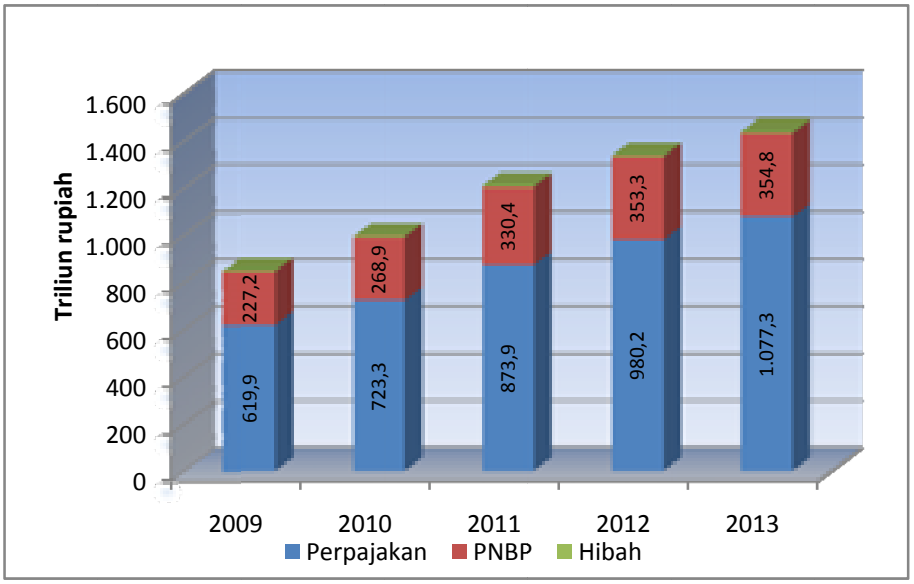
Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2013, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset / kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2013 dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2013 yang diungkapkan adalah aset / kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

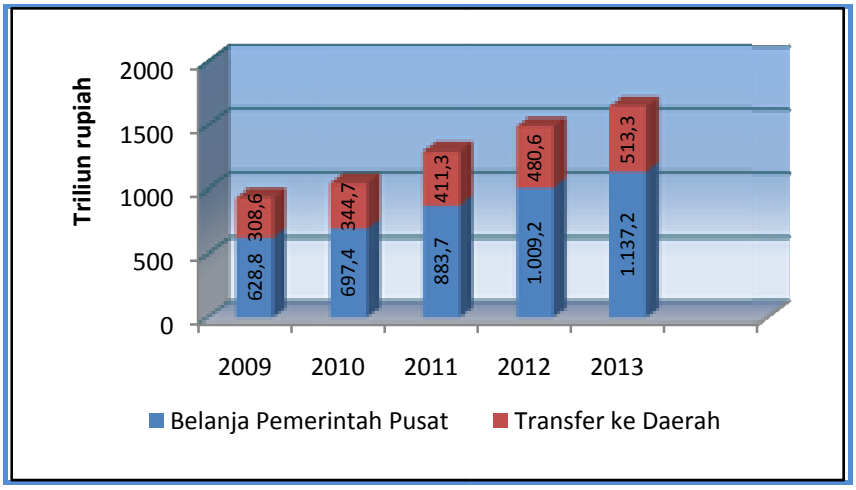
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp1.438.891.069.562.744 atau mencapai 95,80 persen dari target APBN-P TA 2013 sebesar Rp1.502.005.024.993.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.077.306.679.558.272, PNBP sebesar Rp354.751.889.117.468, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp6.832.500.887.004. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3.886.193.422.937 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp191.861.475.159 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang dan jasa) sebesar Rp2.298.622.680.938.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 mengalami kenaikan Rp100.781.440.389.786 atau 7,53 persen jika dibandingkan dengan TA 2012. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP sejak TA 2009 terlihat pada Grafik 32.



Grafik 32 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2009 - 2013

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085 atau 95,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2013 sebesar Rp1.726.191.299.253.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137.162.887.298.240, Transfer ke Daerah sebesar Rp513.260.443.170.637, dan terdapat Suspen sebesar Rp140.396.949.208. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 33.



Grafik 33 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2009- 2013

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.438.891.069.562.744 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.650.563.727.418.085 , maka Defisit Anggaran pada TA 2013 sebesar Rp211.672.657.855.341.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.194, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp243.199.747.083.370 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp5.805.169.762.176.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2013 sebesar Rp25.721.919.465.853.

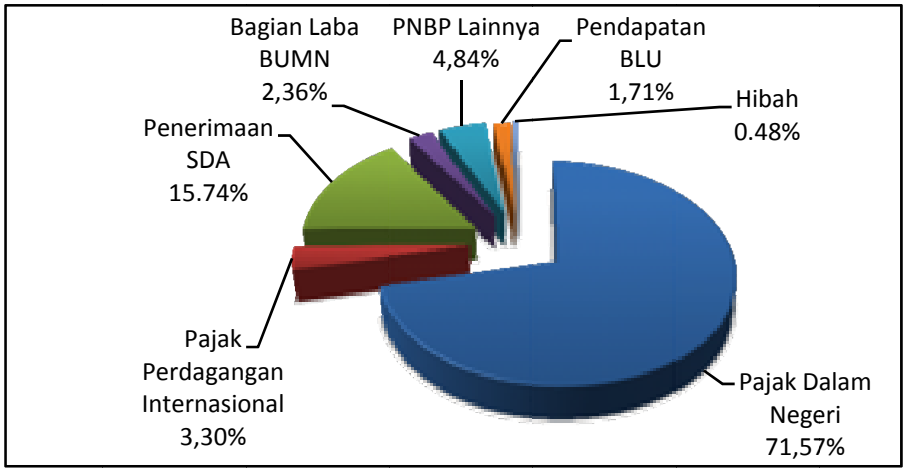
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.438,89 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 adalah sebesar Rp1.438.891.069.562.744, berarti mencapai 95,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.502.005.024.993.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 34.



Grafik 34 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013

Penerimaan Perpajakan Rp1.077,31 triliun

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2013 adalah sebesar Rp1.077.306.679.558.272 atau mencapai 93,81 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.148.364.681.288.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2013 lebih besar Rp96.788.546.238.953 atau naik 9,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.886.193.422.937 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp191.861.475.159.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp1.029,85 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp1.029.850.063.303.271 atau mencapai 93,63 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.099.943.585.138.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2013 lebih besar Rp98.988.223.793.833 atau naik 10,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
PPh Migas	88.747.448.408.293	83.460.868.001.301
PPh Nonmigas	413.808.305.275.411	377.942.175.058.445
PPh Fiskal	849.766.010	1.338.076.044
PPh Ditanggung Pemerintah	3.886.193.422.937	3.665.260.413.269
PPN dan PPnBM	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
PBB	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
BPHTB	-	-
Cukai	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
Pajak Lainnya	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355
Jumlah	**1.029.850.063.303.271**	**930.861.839.509.438**

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3,886,193,422,937 dalam bentuk Subsidi.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2012, namun untuk PBB mengalami penurunan. Penurunan pendapatan PBB disebabkan karena adanya pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemda. Disamping itu penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas tidak mencapai target antara lain karena pokok ketetapan PBB Migas Tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, terdapat SPPT PBB yang tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 serta pembayaran PBB yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi masih sangat minim.

Realisasi pendapatan cukai TA 2013 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif cukai sebesar 8,5 persen dan kenaikan volume produksi rokok di TA 2013. Peningkatan penjualan Benda Materai maupun Bea Materai selama tahun 2013 menjadi faktor yang menopang pertumbuhan penerimaan pajak lainnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp47,46 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 adalah sebesar Rp47.456.616.255.001, atau mencapai 98,01 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp48.421.096.150.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 lebih kecil Rp2.199.677.554.880 atau turun 4,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA

2012. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Bea Masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.044.419
Bea Keluar	15.835.366.230.277	21.237.934.765.462
Jumlah	**47.456.616.255.001**	**49.656.293.809.881**

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2013, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp191.861.475.159.

Penurunan penerimaan Bea Keluar TA 2013 disebabkan antara lain karena rendahnya harga *Crude Palm Oil (CPO)* di pasar internasional, pergeseran komoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluarnya lebih rendah serta turunnya sebagian besar komoditas termasuk bijih mineral terutama karena *global economic slowdown*.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp354,75 triliun

Realisasi PNBP TA 2013 adalah sebesar Rp354.751.889.117.468 mencapai 101,60 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp349.156.712.456.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2013 lebih besar Rp2.947.142.450.606 atau naik 0,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp226,41 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2013 adalah sebesar Rp226.406.189.261.540, atau mencapai 111,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp203.730.029.745.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2013 lebih besar Rp562.215.797.789 atau naik 0,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	135.329.234.847.290	144.717.087.022.468
Pendapatan Gas Bumi	68.300.185.200.293	61.106.427.615.761
Pendapatan Pertambangan Umum	18.620.492.963.389	15.877.387.816.604
Pendapatan Kehutanan	3.060.373.940.552	3.188.338.362.520
Pendapatan Perikanan	229.350.562.720	215.766.602.000
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.551.747.296	738.966.044.398
Jumlah	**226.406.189.261.540**	**225.843.973.463.751**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012, pendapatan minyak bumi mengalami penurunan. Beberapa asumsi makro yang mempengaruhi penerimaan minyak bumi pada tahun 2013, yaitu *lifting* minyak bumi yang hanya mencapai 825 MBOPD atau lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2013 sebesar 840 MBOPD. Sedangkan realisasi lifting minyak bumi Tahun 2012 sebesar 869 MBOPD, serta harga minyak mentah (ICP) Tahun 2013 yang hanya mencapai USD106,0 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2013 sebesar USD108 per barel dan realisasi ICP Tahun 2012 sebesar USD119 per barel.

B.2.1.2.2.Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp34,03 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 adalah sebesar Rp34.025.604.050.274 atau mencapai 93,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp36.456.490.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 lebih besar Rp3.227.631.332.604 atau naik 10,48 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Target Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2013 sebesar Rp36.456.490.000.000 diatur dalam UU 15 Tahun 2014 tantang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.490.907.289.021	4.070.293.177.055
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	26.534.696.761.253	26.727.679.540.615
Jumlah	**34.025.604.050.274**	**30.797.972.717.670**

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2013 tersebut, sebesar 81 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	7.795.000.000.000
2	PT Telkom	4.501.665.478.926
3	PT Bank Rakyat Indonesia	3.153.248.000.000
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.800.058.788.555
5	PT Bank Mandiri	2.790.731.860.000
6	PT Pupuk Indonesia	1.724.887.180.010
7	PT PLN	1.443.799.800.000
8	PT Bank Negara Indonesia	1.268.306.324.365
9	PT Semen Indonesia	1.112.662.424.301
10	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1,079,747,468,713
Total 10 BUMN		**27.670.107.324.870**

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp69,67 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2013 adalah sebesar Rp69.671.855.890.502 atau 81,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp85.471.466.267.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2013 lebih kecil Rp3.786.648.633.905 atau turun 5,15 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	10.348.855.443.833	9.792.221.299.572
Pendapatan Penjualan aset	189.384.228.119	126.184.876.373
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.461.844.460.369	13.063.747.762.645
Pendapatan Sewa	291.228.758.879	271.221.959.766
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	33.556.178.476	-
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	**24.324.869.069.676**	**23.253.375.898.356**
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	19.036.310.373.473	16.145.943.608.009
Pendapatan Jasa II	1.369.732.058.143	1.356.307.953.239
Pendapatan Jasa Luar Negeri	564.917.113.293	505.878.388.074
Pendapatan Jasa Perbankan	567.548.510	294.417.442
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.751.039.444.796	4.417.901.930.174
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.509.309.765.336	3.378.471.363.288
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	213.053.134.699	193.326.847.706

Pendapatan Jasa Kepolisian II	131.425.870.986	122.939.850.129
Pendapatan Jasa Lainnya	150.766.900.520	86.888.365.688
Total Pendapatan Jasa	**27.727.122.209.756**	**26.207.952.723.749**
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	2.157.055.147.430	3.370.659.392.659
Pendapatan Gain On Bond Redemption	260.000.000	-
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.712.015.999.000	8.297.301.019.952
Total Pendapatan Bunga	**4.869.331.146.430**	**11.667.960.412.611**
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	278.486.542.196	251.243.211.606
Pendapatan Pendidikan	2.287.742.131.383	2.375.603.736.186
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.930.683.217	158.144.829.032
Pendapatan Iuran dan Denda	1.398.128.607.728	1.459.529.823.727
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	5.201.515.618.841	4.661.015.950.737
Pendapatan Pelunasan Piutang	315.675.651.865	54.165.965.036
Pendapatan dari Penutupan Rekening	93.362.764.134	56.455.641.949
Pendapatan Selisih Kurs	1.770.265.769.281	2.091.891.225.681
Pendapatan Lain-lain	1.126.425.695.995	1.221.165.105.737
Total Pendapatan Lain-lain	**8.507.245.500.116**	**8.084.693.889.140**
Jumlah PNBP Lainnya	**69.671.855.890.502**	**73.458.504.524.407**

Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas terdiri atas Pendapatan Bersih hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak sebesar Rp15.216.005, Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar Rp12.941.088.975.472, dan Pendapatan lainnya dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp520.740.268.892. Pendapatan lainnya dari kegiatan Hulu Migas sebagian besar berasal dari kegiatan Transaksi Khusus yaitu sebesar Rp325.524.546.672.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp24,65 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2013 adalah sebesar Rp24.648.239.915.152 atau 104,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp23.498.726.444.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2013 lebih besar Rp2.943.943.954.118 atau naik 13,56 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	18.359.471.141.552	17.237.212.849.937
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.072.243.436.645	742.623.094.171
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	2.272.677.026.676	1.492.015.834.729
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**21.704.391.604.873**	**19.471.851.778.837**
Pendapatan Hibah BLU	108.230.165.667	83.863.755.868
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.339.038.388.726	1.081.392.058.923
Pendapatan BLU Lainnya	1.496.579.755.886	1.067.188.367.406
Jumlah	**24.648.239.915.152**	**21.704.295.961.034**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1.**

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp6,83 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp6.832.500.887.004 atau 152,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.483.631.249.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2013 lebih besar Rp1.045.751.700.227 atau naik 18,07 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2013 adalah termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas

(barang dan jasa) sebesar Rp2.298.622.680.938. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Rincian lebih lanjut Penerimaan Hibah dapat dilihat dalam **Daftar 1.**

B.2.2.Belanja Negara

Belanja Negara Rp1.650,56 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085 atau 95,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.726.191.299.253.000. Belanja Negara TA 2013 lebih besar Rp159.153.502.827.094 atau naik 10,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B.2.2.1.Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.137,16 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 adalah sebesar Rp1.137.162.887.298.240 atau 95,01 persen dari APBN-P sebesar Rp1.196.828.378.290.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 lebih besar Rp126.604.650.766.429 atau 12,53 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp1.010.558.236.531.814.

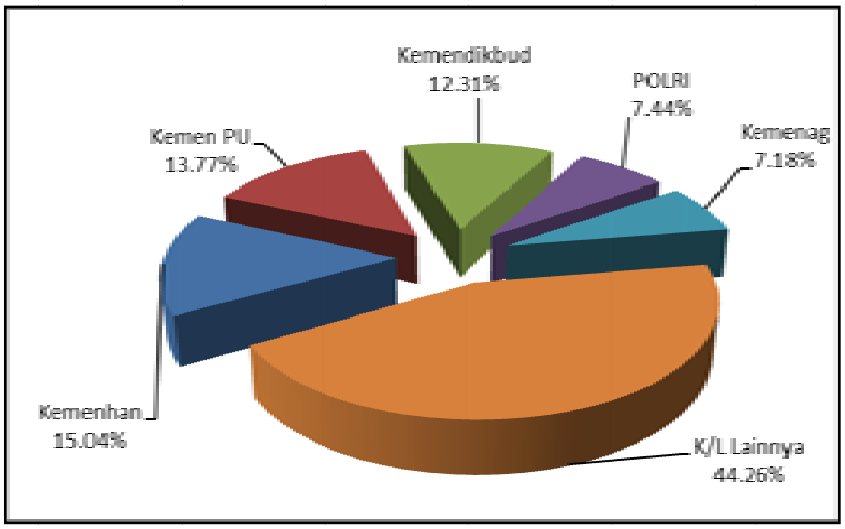
Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp553.825.118.921.477 atau 48,70 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp583.337.768.376.763. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp87.706.685.334.602 atau 15,04 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.
Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 35.



Grafik 35 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Daftar 2**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

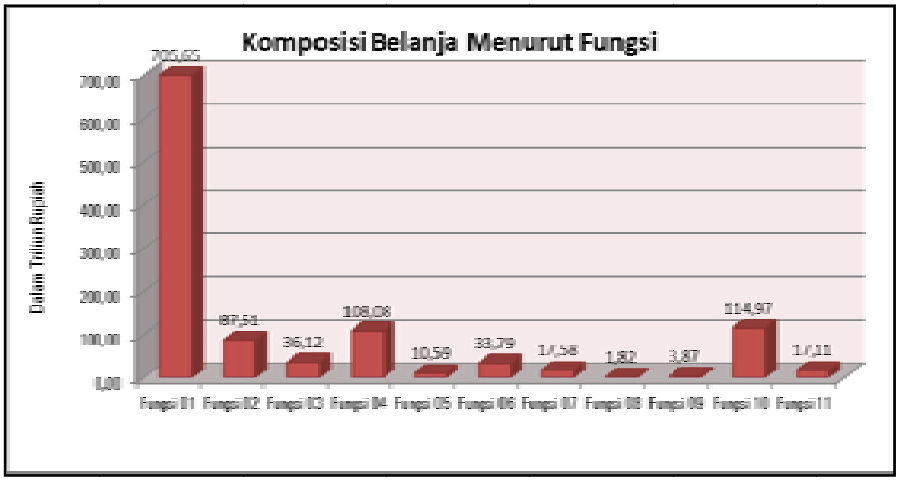
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2013 dan 2012 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 8 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2013 dan TA 2012

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	705.647.194.456.203	647.679.133.687.265
02	Pertahanan	87.510.069.209.435	61.226.856.461.850
03	Ketertiban dan Keamanan	36.120.377.751.587	29.096.481.226.224
04	Ekonomi	108.082.622.165.969	105.574.547.152.010
05	Lingkungan Hidup	10.590.449.510.737	8.814.131.853.162
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.790.021.564.664	26.440.889.955.614
07	Kesehatan	17.576.987.815.265	15.181.702.690.994
08	Pariwisata dan Budaya	1.818.809.622.380	2.516.325.963.996
09	Agama	3.872.784.643.682	3.419.676.039.247
10	Pendidikan	114.969.073.445.582	105.207.547.524.813
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	17.107.462.370.448	5.081.514.261.077
00	Tidak ada fungsi	77.034.742.288	319.429.715.562
	Total	**1.137.162.887.298.240**	**1.010.558.236.531.814**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013 dapat terlihat pada Grafik 36.



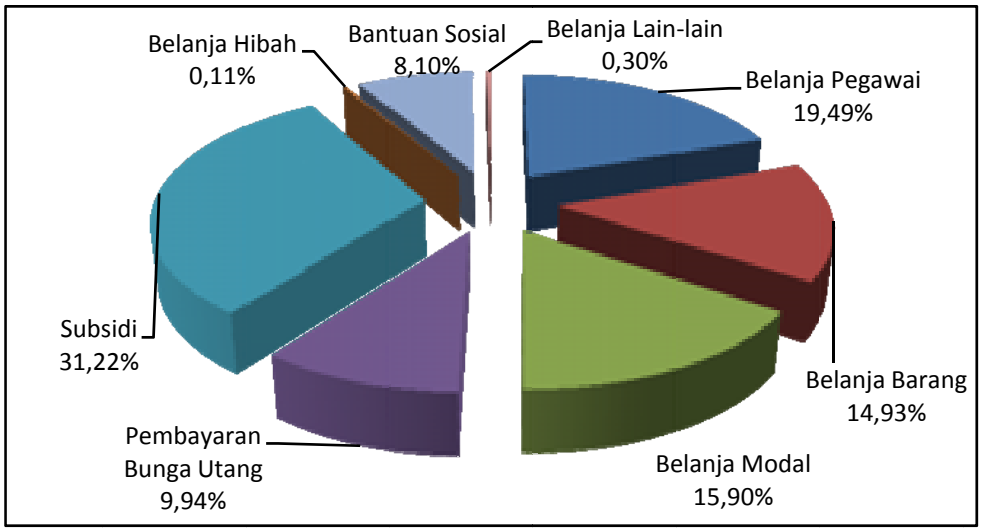
Grafik 36 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 37.



Grafik 37 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2013

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp221,69 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 adalah sebesar Rp221.688.819.162.644 yang berarti 94,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp233.639.077.079.310. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2013 lebih besar Rp23.825.253.346.409 atau naik

12,04 persen dari realisasi TA 2012. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	75.184.442.606.967	55.882.007.708.730
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	33.855.445.476.023	44.483.930.328.017
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	696.199.360.592	719.204.490.870
Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888	822.268.259.230
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	290.029.438.526	263.852.761.938
Belanja Honorarium	1.861.438.792.076	1.388.430.803.700
Belanja Lembur	659.533.750.843	652.210.581.779
Belanja Vakasi	274.929.984.523	231.246.787.842
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	26.353.376.624.682	23.491.693.093.887
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	78.462.009.589.533	67.282.448.603.246
Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.143.068.089	2.482.037.544.996
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	164.234.852.000
Jumlah	**221.688.819.162.644**	**197.863.565.816.235**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp169,72 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2013 adalah sebesar Rp169.722.685.080.370 yang berarti 88,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp191.318.724.422.409. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2013 lebih besar Rp28.837.809.682.609 atau naik 20,47 persen dari Realisasi TA 2012. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	27.405.891.254.659	24.071.839.666.586
Belanja Barang Non Operasional	50.456.678.134.073	43.962.828.987.692
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah MCC	132.633.509	-
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	338.877.631.430	26.778.115.731
Belanja Jasa	21.114.250.880.768	17.697.456.305.673
Belanja Pemeliharaan	13.180.727.198.049	10.964.292.083.598
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.373.891.355.500	17.862.360.165.289
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.165.212.320.557	1.831.343.630.403
Belanja Barang BLU	16.673.590.501.933	15.548.283.729.110
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	9.890.303.126.341	6.747.090.396.287
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.441.182.360.013	855.186.352.250
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	318.646.498.970	246.266.412.038
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	2.363.301.184.568	1.071.149.553.104
Jumlah	**169.722.685.080.370**	**140.884.875.397.761**

Belanja Barang BLU sebesar Rp16.673.590.501.933 terdiri dari:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.767.252.827.611	5.837.763.744.726
Belanja Barang	6.085.303.026.645	5.212.176.260.326
Belanja Jasa	1.787.797.254.569	1.679.228.854.277
Belanja Pemeliharaan	591.928.270.034	518.994.766.653
Belanja Perjalanan	487.575.659.099	503.406.694.730
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	101.181.795.904	
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.852.551.668.071	1.796.713.408.398
Jumlah	**16.673.590.501.933**	**15.548.283.729.110**

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Pada TA 2013, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp180,86 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2013 adalah sebesar Rp180.864.203.133.334 berarti 92,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp194.562.826.310.065. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2013 lebih besar Rp35.760.054.640.481 atau naik 24,64 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	4.634.554.545.099	3.621.341.327.511
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.330.717.773.271	43.489.836.812.569
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.143.230.323.439	19.549.767.573.166
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.790.109.327.027	72.322.551.241.233
Belanja Modal Lainnya	3.820.637.997.486	4.011.444.117.446
Belanja Modal BLU	2.144.953.167.012	2.103.005.518.752
Belanja Dana Bergulir	0	6.201.902.176
Jumlah	**180.864.203.133.334**	**145.104.148.492.853**

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	59.443.432.140	150.719.912.664
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	995.542.369.127	848.275.218.082
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.896.456.991	830.813.852.516
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.033.924.547	43.048.248.487
Belanja Modal Lainnya	189.036.984.207	230.148.287.003
Jumlah	**2.144.953.167.012**	**2.103.005.518.752**

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp113,04 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2013 adalah sebesar Rp113.035.490.483.582 yang berarti 100,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp112.517.848.410.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2013 lebih besar Rp12.519.496.208.738 atau naik 12,46 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.844. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	81.771.062.528.089	60.781.137.150.467
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	8.861.197.134.070	6.297.744.208.100
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	14.324.371.329.405	28.911.498.253.076
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	0	930.763.140.850
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	5.737.047.038.080	1.456.999.522.900
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	0	449.948.400.000
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	722.579.964.500	158.467.625.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	1.221.688.009.000	913.801.227.200
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	397.544.480.438	615.634.747.251
Belanja Pembayaran Biaya Penerimaan Hibah		
Jumlah	**113.035.490.483.582**	**100.515.994.274.844**

Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp113.035.490.483.582 berbeda dengan realisasi pembayaran bunga utang yang dilaksanakan oleh DJPU sebesar Rp112.637.946.003.144. Selisih sebesar Rp397.544.480.438 adalah merupakan pembayaran Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atas keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp355,05 triliun

Realisasi Subsidi TA 2013 adalah sebesar Rp355.045.179.958.292 yang berarti 101,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp348.119.042.741.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2013 ini lebih besar Rp8.624.775.775.960 atau naik 2,49 persen dari Realisasi TA 2012 sebesar Rp346.420.404.182.332. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Subsidi Premium	99.564.301.233.567	107.245.394.379.018
Belanja Subsidi Minyak Solar	73.200.555.361.351	64.671.963.110.933
Belanja Subsidi Minyak Tanah	6.253.111.231.399	7.129.123.174.256
Belanja Subsidi Elpiji	30.982.032.174.145	32.849.226.819.432
Belanja Subsidi Pangan	20.310.112.418.700	19.117.023.857.614
Belanja Subsidi Listrik	99.979.714.091.867	94.583.027.782.554
Belanja Subsidi Benih	414.368.821.123	60.261.413.488
Belanja Subsidi Pupuk	17.617.848.604.000	13.958.483.702.000
Belanja Subsidi PPh – DTP	3.885.500.000.000	3.663.360.000.000
Belanja Subsidi BM – DTP	191.572.181.000	99.813.751.137
Belanja Subsidi PT KAI	704.776.617.194	680.157.912.253
Belanja Subsidi PT PELNI	726.522.639.000	897.631.980.000
Belanja Subsidi PT Pos dan Giro		272.465.000.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	87.039.547.789	82.095.280.087
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	173.491.014.278	196.083.320.374
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	4.177.033.785	7.280.924.101
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	96.680.000.000	76.986.565.900
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.617.167.265	97.100.045
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	824.540.999.688	801.125.000.000
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	240.968.804	1.393.147.033
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	25.413.241.943	26.980.152.536
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	564.611.394	429.809.571
Jumlah	**355.045.179.958.292**	**346.420.404.182.332**

Realisasi belanja subsidi yang melampaui APBN-P adalah belanja subsidi energi yaitu subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 kg. Terlampauinya realisasi Subsidi energi dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 8 ayat 10 UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran belanja untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam realisasi subsidi Tahun Anggaran 2013 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2013, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO pada Rekening Menteri Keuangan sebesar Rp2.573.925.331.594. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima.

Di dalam realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp99.979.714.091.867 sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 hasil audit BPK sebesar

Rp7.310.728.671.630 dan kekurangan tahun 2012 sebesar Rp13.255.055.420.237.

Realisasi pembayaran subsidi PT KAI pada tahun 2013 sebesar Rp704.776.617.194 merupakan subsidi yang dibayarkan Pemerintah atas penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) perkeretaapian oleh PT. KAI. Menteri Perhubungan telah mengatur komponen biaya yang digunakan untuk menghitung tariff angkutan penumpang kereta api, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik, diatur mengenai biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO.

Penetapan hasil perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dinyatakan bahwa penetapan tarif dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, tarif yang ditetapkan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) secara khusus selaku penyelenggara sarana perkeretaapian telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dimaksud.

Dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yang dilaksanakan oleh PT KCJ, maka disusunlah klausul kontrak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Tahun Anggaran 2013, tarif yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2013. Di dalam lampiran Kontrak PSO Tahun Anggaran 2013, dijelaskan bahwa tarif Subsidi PSO yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah berupa tarif asal tujuan (*Origin Destination/OD*) dengan metode progresif (bukan tarif tetap). Perhitungannya adalah untuk 5 (lima) stasiun pertama diberikan Subsidi PSO sebesar Rp1.000 dan setiap 3 (tiga) stasiun berikutnya diberikan Subsidi PSO sebesar Rp500. Disamping tariff dan perhitungan subsidi PSO ini, pelaksanaan Kontrak PSO Tahun Anggaran 2013 adalah sesuai dengan klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak tersebut.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp1,30 Triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.302.956.172.580 yang berarti 55,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.346.514.640.000. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah melalui mekanisme *on granting* (hibah kepada Pemerintah Daerah) sebesar Rp1.293.247.172.580 dan hibah ke luar negeri kepada Negara Myanmar sebesar Rp9.709.000.000.
Realisasi belanja Hibah berdasarkan laporan BA 999.02 adalah sebagai berikut:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Mass Rapid Transit (MRT)	1.147.845.350.300
Water Resource and Irrigation Sector Management Projects phase 2 (WISMP-2)	87.554.822.280
Water and Sanitation Phase 2 Program	57.847.000.000
Hibah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk Myanmar	9.709.000.000
Jumlah	**1.302.956.172.580**

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp92,14 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 adalah sebesar Rp 92.136.072.115.501 yang berarti 96,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp95.053.532.887.216. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 lebih besar Rp16.515.014.976.506 atau naik 21,84 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	578.447.093.673	460.848.354.684
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.450.874.872.829	24.659.995.333.311
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	41.650.296.591.168	35.772.640.725.904
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	3.405.734.443.337	1.992.433.852.977
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.162.255.120.813	11.685.370.018.093
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	1.888.463.993.681	1.049.768.854.026
Jumlah	**92.136.072.115.501**	**75.621.057.138.995**

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp3,37 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2013 adalah sebesar Rp3.367.481.191.937 atau 17,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.270.811.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2013 lebih kecil Rp705.630.743.303 atau turun 17,32 persen dari Realisasi TA 2012. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

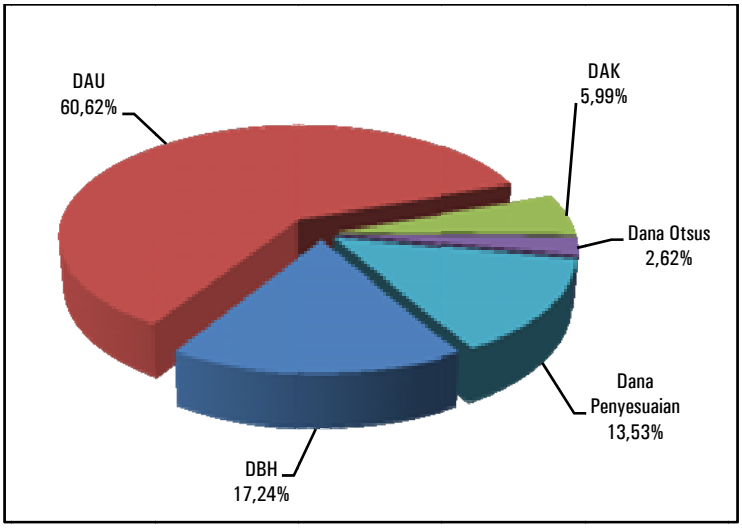
Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	-	2.000.000.000.000
Belanja Cadangan Benih Nasional	-	342.764.387.131
Belanja Selisih Harga Beras Bulog	51.034.500.000	18.255.217.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	41.129.077.440	-
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	5.218.952.593
Belanja Penugasan PT SMI	26.640.876.289	43.490.221.465
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	302.986.425.396	282.390.817.867
Jasa Perbendaharaan	-	199.994.423.436
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (*Land Capping*)	947.804.000.000	310.062.000.000
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	4.637.232.209	44.748.296.369
Belanja Lain-lain	2.001.789.861.364	826.187.619.379
Pengembalian belanja lain-lain	(8.540.780.761)	
Jumlah	**3.367.481.191.937**	**4.073.111.935.240**

Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2013 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K/L sesuai dengan *nature of transaction*-nya. Belanja Lain-lain sebesar Rp2.001.789.861.364 merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan Sekretariat Negara sebesar Rp434.779.267.515, penanganan arbitrase di ICSID dan OKI sebesar Rp24.726.096.820, biaya angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp82.895.025.000, pengeluaran belanja untuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebesar Rp43.828.545.029 serta pengeluaran belanja untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp1.415.560.927.000. Sedangkan pengembalian belanja lain-lain sebesar Rp8.540.780.761 adalah pengembalian belanja kegiatan Sekretariat Negara.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp513,26 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp513.260.443.170.637 yang berarti 96,96 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp529.362.920.963.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 ini lebih besar Rp32.615.368.934.876 atau naik 6,79 persen dari Realisasi TA 2012. Transfer ke Daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 disajikan pada Grafik 38.



Grafik 38 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013

Dalam realisasi transfer ke daerah TA 2013 terdapat pemotongan dana transfer dikarenakan lebih salur (LS) DBH TA sebelumnya atau LS Dana BOS hasil rekonsiliasi Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah dan Penyaluran Dana Cadangan TA 2012 yang disalurkan tanggal 13 Februari 2013, sehingga terdapat perbedaan nilai dana transfer yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perbedaan tersebut terdapat pada penyaluran dana transfer sebagai berikut:

No	Jenis Dana Transfer	Penyaluran Dana Transfer (bruto) 2013	Dana Transfer Disalurkan ke RKUD (netto)	Perbedaan Dana Transfer	Keterangan
a	b	c	d	e = c-d	f
1	DBH Pajak	43.855.009.346.533	43.447.075.587.352	407.933.759.181	Pot. lebih salur (LS) DBH TA sbelumnya (TAYL)
2	DBH SDA	42.456.559.513.479	55.110.111.500.107	(12.653.551.986.628)	Pot. LS DBH TAYL: Rp6.791.007.259
3	DAU	311.139.289.165.000	311.134.618.027.590	4.671.137.410	Pot. LS DBH TAYL
4	Dana Penyesuaian	69.437.076.792.654	69.163.374.829.328	273.701.963.326	Pot. LS Dana BOS TAYL (hasil Rekon Kemendikbud dg Pemda)
		466.887.934.817.666	478.855.179.944.377	-11.967.245.126.711	Perbedaan Pengakuan nilai transfer Antara LKPP & LKPD

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada lampiran 3.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp430,35 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 adalah sebesar Rp430.354.730.161.983 atau 96,59 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp445.531.465.397.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2013 ini lebih besar Rp19.061.605.182.222 atau naik 4,63 persen dari realisasi TA 2012. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp88,46 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2013 adalah sebesar Rp88.463.060.120.183 atau 86,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp102.695.033.232.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2013 ini lebih kecil Rp23.074.142.800.578 atau turun 20,69 persen dari realisasi TA 2012.
Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	19.091.529.508.064	19.378.280.456.694
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.763.479.838.469	27.597.042.553.038
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	238.813.021.056
Jumlah DBH Pajak	**43.855.009.346.533**	**47.214.136.030.788**
DBH Cukai	**2.151.491.260.171**	**1.722.781.272.658**
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	15.530.937.334.820	26.165.822.138.467
DBH SDA Gas Bumi	13.799.051.780.835	21.231.675.084.265
DBH SDA Pertambangan Umum	11.636.718.665.675	12.860.854.426.197
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	451.021.274.903	626.278.978.409
DBH SDA Kehutanan	889.055.732.766	1.535.890.432.615
DBH SDA Perikanan	149.774.724.480	179.764.557.362
Jumlah DBH SDA	**42.456.559.513.479**	**62.600.285.617.315**
Total DBH	**88.463.060.120.183**	**111.537.202.920.761**

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp311,14 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2013 adalah sebesar Rp311.139.289.165.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp311.139.289.165.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2013 ini lebih besar Rp37.324.850.962.000 atau naik 13,63 persen dari realisasi TA 2012.
Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

DAK Rp30,75 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013 adalah sebesar Rp30.752.380.876.800, atau 97,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp31.697.143.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2013 ini lebih besar Rp4.810.897.020.800 atau naik 18,55 persen dari realisasi TA 2012.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pada tahun anggaran 2013, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang. Selain itu, DAK tambahan untuk bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan dialokasikan kepada daerah yang termasuk kategori tertinggal. DAK ditetapkan melalui PMK nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2013.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp82,91 triliun

B.2.2.2.2.Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2013 adalah sebesar Rp82.905.713.008.654 atau 98,90 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp83.831.455.566.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2013 ini lebih besar Rp13.553.763.752.654 atau naik 19,54 persen dari realisasi TA 2012. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.
Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Daftar 3**.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp13,45 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2013 adalah sebesar Rp13.445.571.566.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp13.445.571.566.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2013 ini lebih besar Rp1.492.994.038.000 atau naik 12,49 persen dari realisasi TA 2012.

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Transfer Dana Otsus Untuk Propinsi Aceh	6.222.785.783.000	5.476.288.764.000
Transfer Dana Otonomi Khusus Untuk Papua	4.355.950.048.000	3.833.402.135.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	571.428.572.000	571.428.571.000
Transfer Dana Otonomi Khususuntuk Papua Barat	1.866.835.735.000	1.642.886.629.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	428.571.428.000	428.571.429.000
Jumlah	**13.445.571.566.000**	**11.952.577.528.000**

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Rp69,46 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 adalah sebesar Rp69.460.141.442.654, yang berarti 98,68 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp70.385.884.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 ini lebih besar Rp12.060.769.714.654 atau naik 21,01 persen dari realisasi TA 2012. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2013 terdiri dari:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.394.228.188.000	2.883.278.000.000
Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	43.049.824.362.000	30.557.995.724.250
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.452.953.387.154	22.540.298.003.750
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	-	-
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	59.639.179.000	30.000.000.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-
Dana Keistimewaan DIY	115.696.326.500	-
Jumlah	**69.460.141.442.654**	**57.399.371.728.000**

Dasar hukum dana penyesuaian adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dana Penyesuaian	Dasar Hukum
1.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	PMK No. 42/PMK.07/2013
2.	Dana Insentif Daerah	PMK No. 202/PMK.07/2012
3.	Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG)	PMK No. 41/PMK.07/2013 PMK No. 101/PMK.07/2013
4.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	PMK No. 246/PMK.07/2012
5.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	PMK No. 127/PMK.07/2013

Dalam Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 sebesar Rp69.460.141.442.654 terdapat realisasi Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp115.696.326.500 yang pertama kali dialokasikan pada TA 2013 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B.2.2.3. Suspen

Suspen Rp140,40 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2013 adalah sebesar Rp140.396.949.208, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	221.687.976.872.374	221.688.819.162.644	(842.290.270)
Belanja Barang	167.911.005.354.943	167.942.625.088.927	(31.619.733.984)
Belanja Modal	180.546.463.439.987	180.345.640.443.839	200.822.996.148
Pembayaran Bunga Utang	113.033.446.250.400	113.035.490.483.582	(2.044.233.182)
Subsidi	355.045.179.958.292	355.045.179.958.292	0
Belanja Hibah	1.305.414.705.780	1.302.956.172.580	2.458.533.200
Belanja Bantuan Sosial	92.108.033.527.871	92.136.072.115.501	(28.038.587.630)
Belanja Lain-lain	3.367.142.169.363	3.367.481.191.937	(339.022.574)
Total	**1.135.004.662.279.010**	**1.134.864.264.617.302**	**140.397.661.708**
Transfer ke Daerah			
Dana Bagi Hasil	88.463.060.120.183	88.463.060.120.183	-
Dana Alokasi Umum	311.139.289.165.000	311.139.289.165.000	-
Dana Alokasi Khusus	30.752.380.876.800	30.752.380.876.800	-
Dana Otonomi Khusus	13.445.571.566.000	13.445.571.566.000	-
Dana Penyesuaian	69.344.444.403.654	69.344.445.116.154	(712.500)
Dana Keistimewaan DIY	115.696.326.500	115.696.326.500	-
Total	**513.260.442.458.137**	**513.260.443.170.637**	**(712.500)**
Suspen			**140.396.949.208**

**) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)*

Suspen terjadi pada 32 (tiga puluh dua) K/L. Suspen positif terbesar terjadi pada K/L sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Suspen	Keterangan
1	022	Kementerian Perhubungan	202.771.638.209	Suspen positif berarti data SAU lebih besar daripada SAI
2	076	Komisi Pemilihan Umum	2.015.715.050	
3	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1.146.880.000	

Sedangkan Suspen negatif terbesar terjadi pada K/L sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Suspen	Keterangan
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	(53.815.947.223)	Suspen negatif berarti data SAI lebih besar daripada SAU
2	025	Kementerian Agama	(8.040.897.879)	
3	015	Kementerian Keuangan	(2.051.480.067)	

Daftar suspen lengkap dapat dilihat di **Daftar 4**.

Penyebab terjadinya suspen antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya laporan tingkat satker yang tidak terkonsolidasi di tingkat kementerian lembaga.
b. Ketidaktersediaan dokumen sumber pada Kementerian/Lembaga sebagai dasar pencatatan pengembalian belanja pada pada LKKL.
c. Kesalahan input kode satker maupun kode Bagian Anggaran.
d. Kesalahan input transaksi misalnya pencatatan Hibah barang yang seharusnya dicatat menggunakan dokumen MPHL namun dicatat menggunakan SPHL.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp211,67 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2013, maka Defisit Anggaran TA 2013 adalah sebesar Rp211.672.657.855.341, yang berarti 94,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp224.186.274.260.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.891.069.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.727.418.085	(1.491.410.224.590.994)
Defisit Anggaran	**(211.672.657.855.341)**	**(153.300.595.418.036)**

B.2.4.Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp237,39 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.194 yang berarti 105,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp224.186.274.260.000. Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri, dan Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp243,20 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp243.199.747.083.370, yang berarti 100,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp241.056.105.053.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Rp30 triliun

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2013 adalah sebesar Rp30.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp30.000.000.000.000. Rincian Penggunaan SAL adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penggunaan SAL	30.000.000.000.000	56.170.000.000.000
Jumlah	**30.000.000.000.000**	**56.170.000.000.000**

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,17 triliun

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2013 adalah sebesar Rp4.174.085.472.290 yang berarti 91,60 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.556.616.999.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	36.618.425.203	50.384.445.450
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	29.741.504.648	64.051.278.943
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	472.664.221.510	565.052.615.026
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	137.176.960.778	271.583.137.860
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	61.639.309.344	94.826.202.823
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	259.089.528.395	338.102.505.982
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.154.920.573.932	5.127.413.643.152
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	22.234.948.480	21.684.274.210
Total	**4.174.085.472.290**	**6.533.098.103.446**

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp1,5 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2013 sebesar Rp1.500.151.167.201 atau 315,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp475.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Privatisasi	56.700.000.000	138.269.961.371
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	1.362.055.382.471	876.202.056.673
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	81.395.784.730	263.522.546.539
Jumlah	**1.500.151.167.201**	**1.277.994.564.583**

Penerimaan dari hasil privatisasi berasal dari:

1. Penjualan saham milik negara pada PT Kertas Padalarang dengan nilai sebesar Rp13.000.000.000. Dari nilai penjualan tersebut, sebesar Rp11.700.000.000 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 17 Desember 2013 dan sisanya sebesar Rp1.300.000.000 masih dalam rekening penampungan, dan akan dilakukan penyetoran setelah dilakukan verifikasi biaya;

2. Hasil penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000. Setoran kepada Rekening Kas Umum Negara telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp45.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp5.000.000.000 akan disetorkan setelah diselesaikannya perhitungan atau verifikasi biaya.

Surat Berharga Negara (Neto) Rp224,67 triliun

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2013 adalah sebesar Rp224.672.521.479.583 atau 96,93 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp231.799.994.000.000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	42.400.000.000.000	30.520.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	187.631.255.000.000	146.780.745.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	2.936.148.166.000	2.251.726.240.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	23.507.074.053.640	46.069.805.000.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	107.679.673.000	171.346.293.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbendaharaan DN-jangka panjang	11.653.000.000.000	1.380.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	41.493.925.823.035	46.018.969.099.520
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	2.856.042.000	65.670.205.270
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	17.237.922.715.000	9.639.006.152.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	777.800.946.360	
Total Penerimaan	**327.747.662.419.035**	**282.897.267.989.790**
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(31.170.000.000.000)	(37.600.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(49.761.974.878.452)	(58.582.418.279.852)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(3.527.385.000.000)	(12.996.527.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.444.191.774.000)	(2.384.108.740.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(12.833.860.000.000)	(8.898.290.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(122.729.287.000)	(158.900.711.000)
Pelunasan SPN Syariah	(3.215.000.000.000)	(2.505.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	-	(67.699.621.842)
Total Pengeluaran	**(103.075.140.939.452)**	**(123.192.944.352.694)**
Jumlah SBN (Neto)	**224.672.521.479.583**	**159.704.323.637.096**

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp474,47 miliar

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp474.470.730.046, yang berarti 94,89 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp500.000.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2013 adalah:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	241.537.090.518	706.470.597.706
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Persahaan Daerah	374.189.693.670	206.641.281.721

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(141.256.054.142)	(113.435.519.488))
Jumlah	**474.470.730.046**	**799.676.359.939**

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah Rp11,92 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2013 adalah sebesar Rp11.915.446.765.750, yang berarti 57,93 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp20.569.470.946.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2013 adalah:

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	2.000.000.000.000	7.600.000.000.000
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	1.997.051.462.553	919,544,487,419
Investasi Pemerintah	4.582.642.303.197	3.299.600.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	1.126.500.000.000	876.500.000.000
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	2.209.253.000.000	6.166.913.000.000
Jumlah	**11.915.446.765.750**	**18.862.557.487.419**

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp2.000.000.000.000, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Asuransi Kredit Indonesia	800.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia	1.200.000.000.000
Jumlah	**2.000.000.000.000**

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp1.997.051.462.553, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector	9.580.115.196
Asian Development Bank	372.821.714.981
International Bank For Rekonstruction and Development	171.106.000.671
International Finance Corporation	8.652.361.650
International Fund for Agricultural Development	30.102.661.362
ASEAN Infratructure Fund	404.788.608.693
BPJS Kesehatan	500.000.000.000
BPJS Ketenagakerjaan	500.000.000.000
Jumlah	**1.997.051.462.553**

Dana Bergulir sebesar Rp 2.209.253.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	1.209.253.000.000
BLU LPDB KUMKM	1.000.000.000.000
Jumlah	**2.209.253.000.000**

PMN untuk Investasi Pemerintah sebesar Rp4.582.642.303.197 digunakan untuk pengambilalihan PT Inalum.

Kewajiban Penjaminan Rp706,03 milyar

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan adalah sebesar Rp706.035.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P sebesar Rp706.035.000.000. Realisasi tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Kewajiban Penjaminan untuk proyek sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dengan nilai alokasi sebesar Rp611.215.000.000. dan realisasi sebesar Rp611.215.000.000.
2. Penjaminan percepatan penyediaan air minum dengan nilai alokasi sebesar Rp35.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp35.000.000.000;
3. Penjaminan Proyek KPS melalui BUPI dengan nilai alokasi sebesar Rp59.820.000.000 dan realisasi sebesar Rp59.820.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp5 triliun

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2013 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp5.000.000.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp5,81 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2013 adalah sebesar minus Rp5.805.169.762.176, yang berarti 34,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp16.869.830.793.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman LN Rp55,28 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2013 adalah sebesar Rp55.279.821.617.227 yang berarti 112,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp49.039.765.292.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari *(i)* penarikan pinjaman program, dan *(ii)* penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Penarikan Pinjaman Program Rp18,43 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2013 adalah sebesar Rp18.426.396.220.606, yang berarti 165,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.134.728.546.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.
Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	3.888.653.458.800	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	9.639.342.761.806	8.620.410.260.122
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.898.400.000.000	5.812.200.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	-	570.865.920.310
Jumlah	**18.426.396.220.606**	**15.003.476.180.432**

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp38.200.000.000. Selisih ini disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	3.888.653.458.800	3.888.653.458.800	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	9.639.342.761.806	9.601.542.761.806	37.800.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.898.400.000.000	4.898.000.000.000	400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya			
Jumlah	**18.426.396.220.606**	**18.388.196.220.606**	**38.200.000.000**

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan Pinjaman Proyek Rp36,85 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2013 adalah sebesar Rp36.853.425.396.621, yang berarti 97,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp37.905.036.746.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	10.395.098.419.601	8.020.242.160.124
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.651.179.843.930	5.870.256.474.519
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	6.606.850.582.989	2.451.886.647.371
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	12.155.674.537.140	57.562.877.025
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	44.622.012.961	57.414.977
Jumlah	**36.853.425.396.621**	**16.400.005.574.016**

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp1.811.990.669.646 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	10.395.098.419.601	10.168.584.926.362	226.513.493.239
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.651.179.843.930	7.797.886.488.373	(146.706.644.443)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	6.606.850.582.989	4.985.281.917.832	1.621.568.665.157
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	12.155.674.537.140	12.089.681.394.408	65.993.142.732
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	44.622.012.961	0	44.622.012.961
Jumlah	**36.853.425.396.621**	**35.041.434.726.975**	**1.811.990.669.646**

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
NoD Valuta 2013, Diterima di Reksus 2014	88.421.317.603
NoD Valuta 2012, Diterima di Reksus 2013	(11.622.000.000)
Selisih Kurs	(17.153.299.237)
NoD Valuta 2013, SP3 2012	16.696.827.040
NoD Valuta 2012, SP3 2013	(2.433.362.836.723)
NoD Valuta 2014, SP3 2013	(176.410.000)
NoD diterima setelah LK *Audited*	(2.786.547.800)
SP3 belum terbit	559.712.249.869
Refund Direct Payment	(11.719.970.398)
Total	**1.811.990.669.646**

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman Rp3,88 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2013 adalah sebesar Rp3.880.566.936.399, yang berarti 57,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp6.699.760.085.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(117.600.418.723)	(92.016.402.136)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.762.966.517.676)	(3.661.014.840.255)
Total	**(3.880.566.936.399)**	**(3.753.031.242.391)**

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp57,20 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2013. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2013 adalah sebesar Rp57.204.424.443.004 yang berarti 96,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp59.209.836.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2013 dan TA 2012 (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	3.429.128.608.848	-
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	12.296.871.113.188	10.862.794.957.111
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.453.973.347.539	3.031.328.895.738
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	39.024.451.373.429	37.220.693.516.478
Jumlah	**57.204.424.443.004**	**51.114.817.369.327**

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp25,72 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp237.395.230.133.194 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp25.721.919.465.853, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 (*Audited*)	TA 2012 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.891.069.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.727.418.085	1.491.410.224.590.994
Surplus (Defisit)	(211.672.657.855.341)	(153.300.595.418.036)
Pembiayaan Neto	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
SiLPA (SiKPA)	**25.721.919.465.853**	**21.857.572.902.339**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2013.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2013 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.293..500.212.649	185.020.923.650	8.457.870.256.945
018	Kementerian Pertanian	1.940.778.337.031	7.309.797.198.712	-
019	Kementerian Perindustrian	114.464.772.631	-	-
020	KementerianESDM	37.090.469.621	-	-
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	506.940.705.619	120.450.433.109	-
024	Kementerian Kesehatan	729.977.869.060	5.655.899.664.394	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	338.354.058.924	1.480.892.927.341	-
027	Kementerian Sosial	516.564.448.631	119.617.619.053	-
029	Kementerian Kehutanan	171.788.792.696	14.399.160.703	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	346.604.057.821	1.086.605.833.840	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	185.842.378.521	1.528.555.461.284	
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	72.373.010.019	37.866.942.450	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	140.323.267.070	20.421.767.510	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	125,646,938,104	91,098.186.893	-
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	16.916.966.216	-	-
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	27.288.435.048	-	-
057	Perpustakaan Nasional	147.747.200.054	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.076.072.568	-	-
067	Kementerian PDT	2.918.025.000		-
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	20.158.676.158	-	-
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	5.363.199.175	-	-
090	Kementerian Perdagangan	75.389.320.116	731.354.195.965	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	202.297.404.875		-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7.532.100.953	53.501.051.057	-
	Total	**7.040.936.718.560**	**18.435.481.365.961**	**8.457.870.256.945**

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 dan pasal 69 bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak mengutamakan mencari keuntungan. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non PNS, serta remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2013, terdapat 141 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

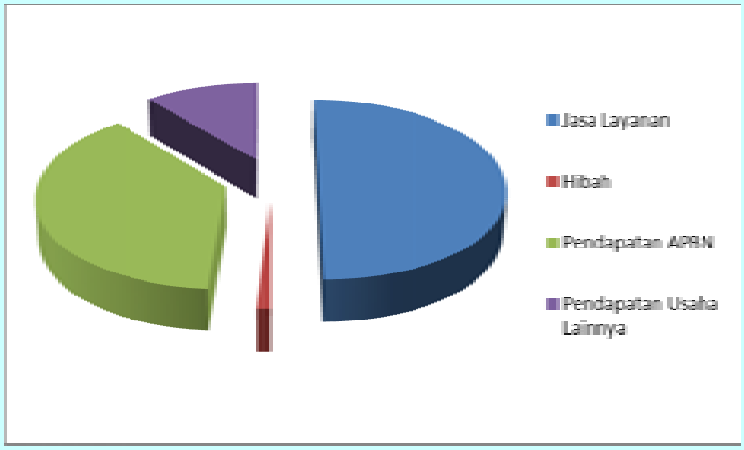
No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	3
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	33
8	Kementerian Kesehatan	52
9	Kementerian Agama	15
10	Kementerian Kehutanan	1

11	Kementerian Pekerjaan Umum	1
12	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
13	Kementerian Koperasi dan UKM	2
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
15	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
16	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
17	Kementerian Perumahan Rakyat	1
18	POLRI	10
19	BP Batam	1
20	BP Sabang	1
	Jumlah BLU	**141**

Ditinjau dari bidang layanan, dari 141 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

a. 131 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
b. 4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
c. 6 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

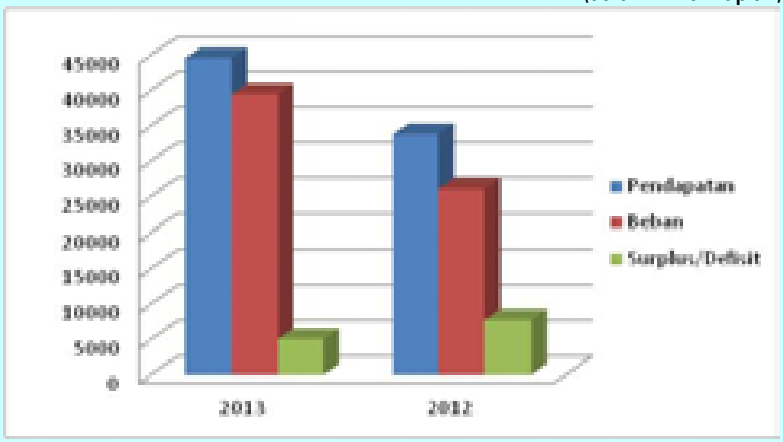
Berdasarkan laporan keuangan 141 BLU, total pendapatan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp37.174.288.217.160. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 44.



Grafik 39 Komposisi Pendapatan BLU TA 2013

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 45.

(dalam miliar rupiah)



Grafik 40 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2013

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada **Daftar 37**.

4. Pergeseran Pagu Anggaran pada BA 999.08 ke BA Kementerian Negara/Lembaga

Pagu anggaran pengelolaan belanja lain-lain (BA 999.08) TA 2013 ditetapkan dalam UU APBN/P Tahun 2013 meliputi jenis belanja sebagai berikut:

(*dalam rupiah*)

	Belanja Pegawai	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain-Lain	Jumlah
PAGU APBN	27.409.045.524.000	4.000.000.000.000	19.947.877.001.000	51.336.922.525.000
PAGU APBNP	11.557.968.346.000	2.300.000.000.000	19.229.708.186.000	33.087.676.532.000

Perubahan dalam APBNP disebabkan antara lain adanya pergeseran pagu anggaran BA 999.08 ke BA K/L ataupun ke BA BUN lainnya. Pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013. Pergeseran tersebut menggunakan mekanisme penerbitan Surat Pengesahan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) sebesar Rp12.518.453.753.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. SABA sebesar Rp1.969.095.517.000 telah masuk dalam APBNP TA 2013 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2013
b. SABA sebesar Rp10.549.358.236.000 tidak masuk dalam APBNP TA 2013 dikarenakan penerbitannya telah melewati jangka waktu proses pengajuan APBNP.

Pergeseran antar subbagian anggaran dari BA BUN 999.08 ke BA 999.05 dan BA 999.99 telah dimasukkan dalam APBNP Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

a. Realokasi ke BA 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah) sebesar Rp231.392.653.000 untuk pagu cadangan dana keistimewaan DIY
b. Realokasi ke BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus):
   - Sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk pembayaran *Unfunded Past Service Liability (UPSL)*
   - Sebesar Rp1.457.000.000.000 untuk pembayaran selisih kurang dana belanja pensiun tahun 2012
   - Sebesar Rp300.000.000.000 untuk pembayaran kekurangan pensiun PT ASABRI.

Pergeseran dari BA 999.08 ke BA 999.05 diatur dalam PMK Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), sedangkan pergeseran ke BA 999.02, BA 999.07, BA 999.08 dan BA 999.99 diatur dalam PMK 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

Terdapat 2 (dua) DIPA yang diterbitkan melalui BA 999.08 pada TA 2013 yang dipertanggungjawabkan pada Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99), yaitu:

Rincian DIPA BA 999.08 yang Dilaporkan
pada LK BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus)

(*dalam rupiah*

No	Nomer DIPA	Uraian	Nilai DIPA
1	DIPA-999.08.1.984475/2013 22 Februari 2013 (Revisi ke 2 tanggal 2 Desember 2013)	- Iuran Asuransi Kesehatan TA 2013 - Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	3.100.333.485.000
2	DIPA-999.08.1.962523/2013 23 Desember 2013	Penugasan kepada PT SMI (Persero) Tahun Anggaran 2013	34.762.040.000

Pertanggungjawaban atas DIPA tersebut sesuai dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012

yang selanjutnya diubah dengan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Pada Pasal 2 PMK tersebut, diatur bahwa yang secara akuntansi diklasifikasikan dalam BA 999.99 selain tetap termasuk pos pengeluaran dana asuransi kesehatan, juga selisih harga beras Bulog (tidak termasuk penugasan kepada PT SMI). Dengan pertimbangan bahwa proses penganggaran dan pelaporan keuangan merupakan hal yang berbeda namun harus tetap ada keterpaduan secara administratif, dalam PMK Nomor 221/PMK.05/2013. Rincian SP SABA dapat dilihat pada **Daftar 7.**

5. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamak Tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Kontrak Tahun Jamak
1	2014	13.528.368.077.000
2	2015	4.202.443.149.000
3	2016	2.297.042.133.000
4	2017	600.930.520.000
5	2018	10.935.213.000
6	2019	25.644.300.000
	Jumlah	20.665.363.392.000

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada **Daftar 5.**

6. Pagu Minus

Pagu APBN Tahun 2013 sebesar Rp1.726.191.299.253.000 terdiri dari pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196.828.378.290.000 dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp529.362.920.963.000. Sampai dengan akhir tahun 2013 masih terdapat pagu minus pada DIPA dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Satker	Nilai
1.	Belanja Pegawai	2.100	-950.037.055.740
2.	Non Belanja Pegawai	622	-2.108.395.238.266
3.	Hibah Langsung Barang/Jasa	293	-1.600.248.551.896

1. Belanja pegawai melebihi pagu anggaran DIPA terjadi khususnya belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat yang dibayarkan meskipun pagu anggaran dalam DIPA tidak cukup tersedia. Hal ini menyebabkan pada akhir tahun terdapat realisasi pembayaran gaji yang melebihi pagu anggaran yang menimbulkan pagu minus. Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji disebabkan tidak meratanya distribusi alokasi anggaran untuk pembayaran gaji sehingga terdapat satker yang kelebihan maupun kekurangan alokasi pembayaran gaji di akhir tahun. Selain itu, adanya pengangkatan pegawai baru maupun perpindahan/mutasi pegawai tidak disertai dengan penyesuaian/revisi DIPA sehingga jumlah alokasi anggaran pembayaran gaji pada setiap satker tidak sesuai dengan jumlah pegawai pada satker yang bersangkutan.

2. Data realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah dikontrakkan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Akibatnya revisi anggaran yang antara lain disebabkan oleh kebijakan penghematan/pemotongan anggaran menimbulkan alokasi pagu anggaran

lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontrakkan. Hal ini menimbulkan pagu minus.

3. Hibah langsung berupa barang/jasa menurut ketentuan tidak perlu direvisi DIPA-nya namun disahkan pendapatan dan belanjanya sebesar nilai barang/jasa yang diterima. Hal ini menimbulkan selisih pagu mengingat penerimaan hibah barang/jasa tidak dicatat dalam DIPA sedangkan pengesahan belanjanya tercatat dalam data realisasi.

Pagu minus terjadi pada tingkat satker, namun secara total pagu anggaran pada tingkat Kementerian/Lembaga tidak terjadi minus.

7. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor

Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi periode per 31 Desember 2013 dan periode per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Ekspor	BBL	117.380.467	115.202.596
	US$	12.187.878.389	12.707.664.486
Lifting Kontraktor	BBL	96.313.091	92.587.552
	US$	10.079.246.573	10.329.033.934
Lifting Pemerintah	BBL	21.067.376	22.615.044
	US$	2.108.631.816	2.378.630.552

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke kilang domestik periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	BBL	181.051.565	199.103.313
	US$	19.158.959.018	22.624.053.867
Lifting Kontraktor	BBL	40.658.355	41.992.262
	US$	4.266.710.266	4.762.354.817
Lifting Pemerintah	BBL	140.393.210	157.111.051
	US$	14.892.248.752	17.861.699.050
	Ekiv Rp	155.476.970.362.368	166.555.497.880.326

c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri/*Domestic Market Obligation*

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
DMO BBL	23.320.940	26.121.097
DMO FEE (US$)	1.168.028.468	1.477.370.144
DMO AT ICP (US$)	2.442.413.165	2.924.781.957

d. Pengiriman Ekspor Natural Gas

Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor.

Data pengiriman ekspor untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	353.435.664	379.367.902
	US$	5.120.660.835	5.927.726.685
Bagian Kontraktor	US$	3.744.860.809	4.337.471.089
Bagian Pemerintah	US$	1.375.800.026	1.590.255.596

e. Pengiriman Ekspor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.

f. Pengiriman Ekspor *Liquefied Natural Gas* (LNG)
Pengiriman eskpor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai dengan periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	888.403.742	949.441.445
	BBL	12.020.371.757	13.241.658.015
Biaya Operasi LNG	US$	1.451.913.807	1.298.107.914
Net Back	US$	10.568.457.950	11.943.550.101
Bagian Kontraktor	US$	7.121.973.644	8.283.030.522
Bagian Pemerintah	US$	3.446.484.306	3.660.519.579

g. Pengiriman Natural Gas Domestik
Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	1.193.143.354	1.154.702.810
	US$	7.326.629.400	6.700.670.630
Bagian Kontraktor	US$	5.405.585.303	4.900.139.460
Bagian Pemerintah	US$	1.921.044.098	1.800.531.170

h. Pengiriman LPG Domestik
Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	1.448.793	1.646.309
	US$	1.241.829.004	1.494.521.393
Bagian Kontraktor	US$	873.867.216	1.113.750.612
Bagian Pemerintah	US$	367.961.788	380.770.781

i. Pengiriman LNG Domestik
Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	67.525.409	41.325.143
	US$	788.614.005	497.381.230
Biaya Operasi LNG	US$	44.895.561	21.255.080
Net Back	US$	743.718.444	476.126.150
Bagian Kontraktor	US$	432.022.912	274.688.127
Bagian Pemerintah	US$	311.695.532	201.438.023

j. Pengiriman *Coal Bed Methane* (CBM) Domestik

Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Pengiriman baru mulai dilakukan sejak bulan Mei Tahun 2013. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2013 dan periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2013	Periode 31 Des 2012
Total Pengiriman	MMBTU	63.135	--
	US$	473.512	
Bagian Kontraktor	US$	369.931	--
Bagian Pemerintah	US$	103.581	--

8. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 untuk Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan

Pasal 33A UU PPh mengatur bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam kontrak karya. Beberapa kontrak karya mengatur bahwa pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 menggunakan ketentuan dalam UU PPh pada saat kontrak karya ditandatangani. Dengan adanya klausul ini, apabila UU PPh yang berlaku saat kontrak karya ditandatangani mengalami perubahan baik dasar pengenaan pajak, tarif, maupun objek pajaknya, maka WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan tetap harus melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 pada penyedia jasa berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *naildown*.

Di lain pihak, Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan melakukan pemotongan/pemungutan PPh pasal 21 kepada karyawan dan PPh Pasal 23 kepada penyedia jasa dengan menggunakan UU PPh yang berlaku saat pemotongan/pemungutan dilakukan. Metode pemotongan/pemungutan dengan cara seperti ini disebut metode *prevailing*.

UU PPh Tahun 1983 telah diubah beberapa kali yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2008. Dalam perubahan-perubahan tersebut, tarif PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 cenderung menurun. Dengan demikian, penerapan metode *prevaling* menghasilkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut lebih kecil jika dibandingkan dengan penerapan metode *naildown*.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait metode yang diterapkan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.11/2013. PMK ini ternyata memiliki klausa yang menimbulkan multi tafsir, khususnya tentang masa berlakunya PMK dimaksud. Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan saat ini tengah memproses penegasan atau perubahan PMK Nomor 39/PMK.11/2013 tahun 2013 supaya tidak lagi menimbulkan perbedaan interpretasi baik di internal maupun eksternal Pemerintah.

9. Perbandingan Pagu DIPA dan Pagu APBNP

Pada LKPP, Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan berdasarkan pagu anggaran pada APBNP. Sedangkan pada LKKL, pagu anggaran disajikan berdasarkan pagu DIPA. Secara umum, total pagu DIPA per K/L melebihi pagu anggaran per K/L pada APBNP. Terdapat 62 (enam puluh dua) K/L yang memiliki pagu DIPA yang lebih besar daripada Pagu APBNP. Daftar K/L yang memiliki pagu DIPA melebihi pagu anggaran pada APBNP dapat dilihat pada **Daftar 6.**

Lebih besarnya pagu DIPA per K/L dibandingkan pagu anggaran berdasarkan APBNP , seakan menimbulkan persepsi bahwa K/L melanggar UU APBN. Namun , berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN, Pagu DIPA per K/L dapat melebihi pagu APBNP. Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per K/L melebihi pagu anggaran pada APBNP adalah sebagai berikut:

a. Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNBP setelah ditetapkannya UU APBNP.
b. Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBNP.
c. Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBNP ditetapkan.
d. Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah ditetapkan dalam UU APBNP.
e. Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBNP seperti subsidi energi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBNP.

10. Biaya Operasional SKK Migas

Pengelolaan keuangan SKK Migas tahun 2013 pada prinsipnya masih sama dengan pengelolaan keuangan eks BPMIGAS yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 berdasarkan amanat UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat BPMIGAS dibubarkan pada 13 November 2012, maka dalam masa transisisebelum ditetapkannya UU Migas yang baru, payung hukum penyediaan dan mekanisme biaya operasional SKK Migas tahun 2013 berlandaskan pada Perpres 9 Tahun 2013, yaitu :

Pasal 18 ayat (1)

Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 18 ayat (2)

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, SKK Migas melalui Menteri ESDM menyampaikan usulan RKT-RAB SKK Migas kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan anggaran SKK Migas mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan tersebut.

Realisasi penerimaan migas tahun 2013 yang dilaporkan dengan menggunakan asas netto, antara lain karena memperhitungkan faktor pengurang berupa biaya operasional SKK Migas tahun 2013. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-266/MK.02/2013 tanggal 3 April 2013, biaya operasional yang disetujui adalah sebesar Rp1.634.298.467.143 dan US$20.390.997 atau ekuivalen Rp1.823.934.738.393. Realisasi biaya operasional SKK Migas sampai dengan 31 Desember 2013 adalah Rp1.368.616.554.354 dan

US$8.879.120 setara Rp1.451.192.369.238 atau sebesar 79,56% dari persetujuan biaya operasional.

Dalam pembahasan APBN 2014, Pemerintah telah berupaya agar biaya operasional SKK Migas masuk dalam mekanisme APBN dan dibahas bersama dengan DPR-RI. Namun demikian, dalam pembahasan APBN 2014 tersebut biaya operasional SKK Migas masih diperhitungkan dari penerimaan kegiatan usaha hulu migas yang dikelola dalam Rekening Migas.

Pada tahun 2015 Pemerintah akan berupaya untuk kembali memasukkan anggaran biaya operasional SKK Migas melalui mekanisme APBN. Oleh karena itu, dalam postur RAPBN 2015 yang akan diusulkan kepada DPR RI, Pemerintah telah mencadangkan biaya operasional SKK Migas dalam BA lain-lain.

Dengan demikian, Pemerintah telah berupaya agar anggaran biaya operasional SKK Migas ditetapkan melalui mekanisme APBN, namun masih bergantung pada hasil pembahasan dengan DPR RI dalam penetapan APBN.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

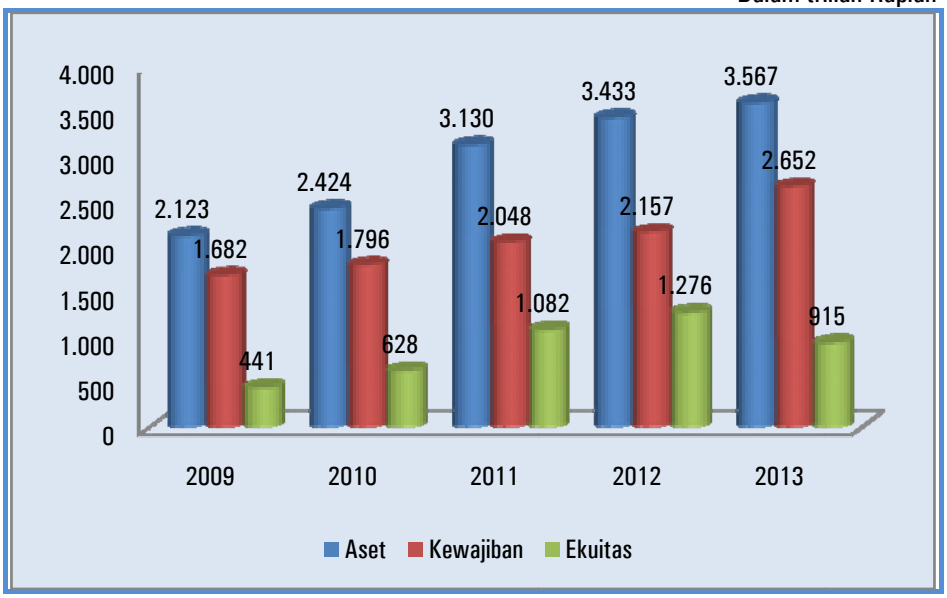
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Aset Lancar	252.741.464.557.987	241.315.134.207.260
Investasi Jangka Panjang	1.183.170.420.317.820	932.406.392.642.504
Aset Tetap	1.709.855.072.863.187	1.895.501.446.206.083
Piutang Jangka Panjang	2.898.499.639.540	4.673.590.581.804
Aset Lainnya	418.920.288.208.209	359.086.269.747.712
Jumlah Aset	**3.567.585.745.586.743**	**3.432.982.833.385.363**
Kewajiban Jangka Pendek	368.086.831.707.954	266.136.388.831.668
Kewajiban Jangka Panjang	2.284.012.948.107.981	1.890.749.584.803.196
Jumlah Kewajiban	**2.652.099.779.815.935**	**2.156.885.973.634.864**
Ekuitas Dana Lancar	(113.362.563.747.599)	(23.586.284.356.935)
Ekuitas Dana Investasi	1.028.848.529.518.407	1.299.683.144.107.434
Jumlah Ekuitas Dana Neto	**915.485.965.770.808**	**1.276.096.859.750.499**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.567.585.745.586.743**	**3.432.982.833.385.363**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 41**.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

Dalam triliun Rupiah



Grafik 41 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2009 – 2013

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat, namun pada per 31 Desember 2013 Ekuitas Dana mengalami penurunan sebesar 28,29 persen dari posisi 31 Desember 2012 dikarenakan Pemerintah menerapkan penyusutan aset tetap dan aset lainnya mulai tahun anggaran 2013.

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI Rp43,74 triliun

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp43.737.911.964.052 dan Rp37.382.696.367.039 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.154.699.513.919	2.199.992.464.994
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	4.710.389.197	6.339.139.103
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	2.316.773.947.848	680.372.438.864
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	9.639.143.719.777	940.127.275.397
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.711.413.249.853	4.985.649.807.746
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	99.188.970.376	564.701.567.195
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	8.492.000.735	8.492.000.735
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	21.674.873.255.508	25.755.966.698.308
Rekening Khusus	3.128.616.916.907	1.907.213.434.609
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	8.666.185
Kas dalam Transito	-	333.832.873.903
Jumlah*)	**43.737.911.964.120**	**37.382.696.367.039**

**) selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp68 karena pembulatan*

Rekening Kas BUN di BI dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Jenis Rekening	Saldo Valas	Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	USD386,445.91	4.710.389.197
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	JPY19,943,168,457.00	2.316.773.947.848
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	USD386,529,924.51	4.711.413.249.853
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	EUR5,896,580.22	99.188.970.376

Rekening SAL sebesar Rp21.674.873.255.508 merupakan rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana SAL pada Bank Indonesia. Pengelolaan rekening ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. Dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL digunakan dalam rangka:

1. menutup kekurangan pembiayaan APBN; dan/atau
2. memenuhi kebutuhan sementara pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut (*mismatch*).

Dana SAL yang dipindahbukukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada kondisi *mismatch* sebagaimana dimaksud di atas dikembalikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Tahun Anggaran 2013, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pembiayaan Anggaran TA 2013 salah satu sumbernya berasal dari SAL sebesar Rp30 Triliun.

Dalam rangka pengelolaan kas negara, pada Tahun Anggaran 2013 dana pada Rekening Kas SAL dipindahbukukan ke RKUN dalam Rupiah secara bertahap sebesar Rp42 Triliun sebagai dana talangan pada kondisi *mismatch*. Pengembalian dana talangan tersebut dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah dan telah dikembalikan seluruhnya dari RKUN dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL pada tanggal 31 Desember 2013.

Pemindahbukuan dari rekening Kas SAL ke RKUN dalam Rupiah dan sebaliknya dalam rangka talangan pada kondisi *mismatch* dicatat dengan akun non anggaran, yang membedakan pencatatan penggunaan SAL dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan APBN yang menggunakan akun pembiayaan.

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Daftar 8.**

C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp10,00 triliun

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp9.999.484.261.911 dan Rp13.495.665.498.447 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bank	**31 Desember 2013 (*audited*)**	**31 Desember 2012 (*audited*)**
1. Bank Indonesia	9.998.997.554.352	13.480.066.191.673
2. Bank Umum	486.707.559	15.599.306.774
Jumlah	**9.999.484.261.911**	**13.495.665.498.447**

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rekening	**31 Desember 2013 (*audited*)**	**31 Desember 2012 (*audited*)**
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	343.349.686.194	347.992.721.305
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	9.513.579.917.997	13.005.460.815.909
Rekening Pemerintah Lain	142.067.950.161	126.612.654.459
Jumlah	**9.998.997.554.352**	**13.480.066.191.673**

Rekening Panas Bumi sebesar Rp343.349.686.194 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp9.513.579.917.997 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp142.067.950.161 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp486.707.559 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan.
   Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Daftar 9.**

C.2.3 Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp2,67 triliun

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.666.720.204.356 dan Rp16.207.882.323.813 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 10.**

C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp342,89 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp342.891.820.960 dan Rp213.458.829.221 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada KL dapat dilihat pada **Daftar 11.**

C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp225,84 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp225.839.936.566 dan Rp196.150.458.978 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KL dapat dilihat pada **Daftar 11.**

C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp7,36 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp7.363.221.503.338 dan Rp6.103.251.516.103 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung KL. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	1.025.268.555.493	3.150.005.278.192
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	5.347.879.920.484	2.470.915.669.777
Dana Lancar Lainnya (hibah langsung KL)	928.211.810.722	482.330.568.134
Dana Lancar Lainnya (Reklas Saldo Kas Besi pada Kementerian Luar Negeri)	61.861.216.639	-
Jumlah	**7.363.221.503.338**	**6.103.251.516.103**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. KL	**6.944.460.747.533**	4.075.227.758.750
2. BUN	418.760.755.805	2.028.023.757.353
Jumlah	**7.363.221.503.338**	**6.103.251.516.103**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 11.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp418.760.755.805 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp44.390.196.217 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada TA berikutnya;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp374.370.559.588 terdiri dari:
   a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp374.285.765.826 terdiri dari pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp361.518.362.804, jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.494.988.464, Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.855.605.435, dan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sebesar Rp5.416.809.123.
   b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp84.788.600 dan pada BNP2TKI sebesar Rp5.162 yang merupakan jasa giro yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

C.2.7 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp19,07 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp19.072.940.458.860 dan Rp16.643.419.462.034 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa KL, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	671.254.901.128	621.292.524.757
2. BLU di Kementerian Keuangan	2.845.277.111.289	3.641.157.122.268
3. BLU di Kementerian Pertanian	9.795.621.801	5.541.107.213
4. BLU di Kementerian Perindustrian	46.944.070.443	33.304.572.029
5. BLU di Kementerian ESDM	36.775.862.947	19.979.456.001
6. BLU di Kementerian Perhubungan	193.152.487.378	161.040.871.577
7. BLU di Kementerian Dikbud	5.708.918.293.456	4.648.837.613.868
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.318.153.443.734	1.237.850.673.943
9. BLU di Kementerian Agama	348.804.831.308	222.780.109.509
10. BLU di Kementerian Nakertrans	-	958.406.319
11. BLU di Kementerian Kehutanan	175.661.002.418	96.050.928.714
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	1.058.978.856.111	643.925.235.828
13. BLU di Kementerian Ristek	1.285.610.397	2.129.679.285
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	408.380.605.182	314.893.667.838
15. BLU di Kementerian Kominfo	4.987.040.096.627	4.256.475.093.238
16. BLU di Kepolisian RI	52.137.058.434	43.290.564.998
17. BLU di BPPT	21.942.397.712	17.884.193.545
18. BLU di LAPAN	2.898.769.801	3.206.179.400
19. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	489.932.294.594	286.119.242.296
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	695.607.144.100	386.702.219.408
Jumlah	**19.072.940.458.860**	**16.643.419.462.034**

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp20.185.201.347.614 (lihat ***Catatan D.1***). Selain Kas pada BLU sebesar Rp19.072.940.458.860 tersebut, terdapat kas yang telah didepositokan sebesar Rp1.182.306.983.395 dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek - lihat ***Catatan C.2.9).*** Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp70.046.094.641 (Rp19.072.940.458.860 + Rp1.182.306.983.395 - Rp20.185.201.347.614).

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp141,92 miliar

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp141.923.861.996 dan Rp787.370.392.558 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp141.923.861.996 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp787.370.392.558 dikurangi dengan Uang Muka BUN yang diselesaikan selama tahun 2013 sebesar Rp645.446.530.562 atau 82%. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2013 *(audited)*	31 Desember 2012 *(audited)*
1. IBRD	(1.972.707.300)	185.506.947.772
2. ADB	30.646.456.028	341.516.046.918
3. OECF/JBIC	22.173.013.165	44.025.426.500
4. Lainnya	-	216.321.971.367
5. IFAD	91.077.100.103	-
Jumlah*)	**141.923.861.996**	**787.370.392.557**

**) selisih antara data neraca dengan rincian Uang Muka BUN sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.9 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp1,18 triliun

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.182.306.983.395 dan Rp768.125.137.193 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2013 merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.023.013.699, BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.035.619.969.696, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp70.105.000.000, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp11.559.000.000, dan BLU pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp40.000.000.000.

C.2.10 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp4,66 triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.658.189.616.621 dan Rp1.893.533.561.965 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa KL. Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp827.635.096.565 merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 12.**

C.2.11 Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp103,24 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp103.240.249.433.833 dan Rp93.468.526.344.200. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp52.759.972.365.678 berasal dari nilai bruto sebesar Rp103.240.249.433.833 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp50.480.277.068.155.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	77.366.561.749.071	70.721.181.887.660
Penyisihan	(48.785.110.550.899)	(42.929.017.362.023)
Nilai Bersih	28.581.451.198.172	27.792.164.525.637
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	25.873.687.684.762	22.747.344.456.540
Penyisihan	(1.695.166.517.256)	(1.621.925.268.921)
Nilai Bersih	24.178.521.167.506	21.125.419.187.619
Piutang Pajak (Bruto)	**103.240.249.433.833**	**93.468.526.344.200**
Total Penyisihan	(50.480.277.068.155)	(44.550.942.630.944)
Piutang Pajak (Bersih)	**52.759.972.365.678**	**48.917.583.713.256**

Piutang Pajak pada Ditjen Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp77.366.561.749.071 dan Rp70.721.181.887.660 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2013. Rincian

Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 9.**

Tabel 9 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.196.082.304.338	1.391.617.937.283
2.	Piutang PPh Pasal 22	474.859.038.112	468.432.815.179
3.	Piutang PPh Pasal 23	2.073.653.402.146	4.918.350.082.956
4.	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.464.443.087.320	1.218.354.326.211
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	26.484.631.354.502	18.473.224.608.353
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.654.047.893.334	2.093.962.968.364
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	847.587.668.063	589.715.652.211
8.	Piutang PPN Dalam Negeri	19.086.728.575.262	15.704.901.728.808
9.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	385.509.016.104	176.236.958.386
10.	Piutang PBB Pedesaan	1.992.878.656.086	2.996.934.810.829
11.	Piutang PBB Perkotaan	3.894.949.763.751	11.591.237.794.772
12.	Piutang PBB Perkebunan	607.271.063.282	661.307.597.823
13.	Piutang PBB Kehutanan	442.641.257.932	558.001.107.117
14.	Piutang PBB Pertambangan	12.217.284.060.116	7.587.645.821.758
15.	Piutang Pajak Tidak Langsung Lain	4.148.450	15.396.781
16.	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.543.990.460.273	2.291.242.280.829
	Jumlah	**77.366.561.749.071**	**70.721.181.887.660**

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Kurang dari 1 Tahun	27.232.821.682.563	20.573.515.583.316
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	15.023.526.070.272	14.312.073.025.071
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	11.708.327.205.897	12.904.367.823.451
5 Tahun atau Lebih	23.401.886.790.342	22.931.225.455.842
Jumlah *)	**77.366.561.749.074**	**70.721.181.887.680**

**) selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp3 dan Rp20 karena pembulatan*

a. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp77.366.561.749.071 terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42.573.913.995.249. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp15.331.353.474.096. Selama tahun 2013, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp860.980.213.205. Selama tahun 2013, tidak terdapat nilai piutang yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Daftar 13.**

   Terdapat sanski administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan STP bunga penagihan atas SKPKB/SKPKBT yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo dan diperkirakan nilainya adalah sebesar Rp482.758.038.599. Nilai sanksi tersebut masih dalam proses penelitian oleh Kementerian Keuangan sehingga belum termasuk dalam nilai piutang pajak yang disajikan di neraca.

b. Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42.573.913.995.249, terdapat piutang pajak sebesar Rp554.522.684.740 yang berada dalam sengketa di luar peradilan pajak. Piutang pajak tersebut telah berstatus *inkracht* pada mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan melalui peradilan pajak dengan putusan Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sita aset atas piutang pajak tersebut dengan nilai estimasi aset sitaan Rp259.067.541.000. Namun demikian, Wajib Pajak kembali mengajukan perkara piutang pajak dan

tindakan sita tersebut sebagai sengketa ke peradilan umum. Status sengketa di luar mekanisme peradilan pajak tersebut sudah berada pada tahap kasasi.

c. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp80.828.962.394.318.

Piutang Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp25.873.687.684.762 dan Rp22.747.344.456.540 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Kurang dari 1 Tahun	24.105.767.731.264	20.767.263.500.578
1 Tahun s.d 2 Tahun	44.189.653.179	522.021.007.821
2 Tahun s.d 3 Tahun	422.647.218.182	43.158.722.530
Di atas 3 Tahun	1.301.083.082.135	1.414.901.225.612
Jumlah *)	25.873.687.684.760	**22.747.344.456.541**

**) selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp2 dan Rp1 karena pembulatan*

Tabel 10 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1	Piutang PPh Pasal 22	10.756.000	6.545.000
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	49.284.114.651	38.935.638.305
3	Piutang PPN Dalam Negeri	3.702.269.055.842	3.208.801.445.758
4	Piutang PPN Impor	211.812.715.177	203.237.408.922
5	Piutang PPN Lainnya	-	-
6	Piutang PPnBM Impor	28.514.228.911	62.468.918.221
7	Piutang PPnBM Lainnya	-	-
8	Piutang Cukai Hasil Tembakau	19.816.801.760.259	17.033.037.355.284
9	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	889.000.000
10	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.825.600	3.130.764.100
11	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	29.453.271.760	106.520.802.678
12	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	9.205.833.909	46.852.066.615
13	Piutang Bunga Penagihan PPN	736.577.629	4.652.265.594
14	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	-
15	Piutang Bea Masuk	865.348.447.579	902.381.234.997
16	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	779.818.787.420	800.768.267.334
17	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	181.537.096.668	177.749.777.036
18	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	185.431.335.397	149.477.642.624
19	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	9.089.814.480	8.143.652.172
20	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	376.063.480	291.671.900
Jumlah		**25.873.687.684.762**	**22.747.344.456.540**

C.2.12 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp147,71 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp147.710.233.612.351 dan Rp120.925.758.512.257. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp39.769.944.943.267, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp147.710.233.612.351 dikurangi penyisihan sebesar Rp107.940.288.669.084. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	32.128.373.428.125	28.251.523.543.928
Penyisihan	(25.363.191.717.989)	(19.423.908.193.716)
Nilai Bersih	6.765.181.710.136	8.827.615.350.212
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	115.581.860.184.226	92.674.234.968.329
Penyisihan	(82.577.096.951.095)	(71.939.220.795.017)
Nilai Bersih	33.004.763.233.131	20.735.014.173.312
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	**147.710.233.612.351**	**120.925.758.512.257**
Total Penyisihan	(107.940.288.669.084)	(91.363.128.988.733)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	**39.769.944.943.267**	**29.562.629.523.524**

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp147.710.233.612.351 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Beberapa Piutang PNBP pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBP pada:

a. Kejaksaan Agung sebesar Rp13.201.201.066.267 merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas.

b. Kementerian ESDM sebesar Rp11.631.556.074.257 merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalty dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

c. Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.375.093.339.524 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan tunggakan ganti rugi tegakan.

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.222.238.267.848 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran telekomunikasi dan pengenaan denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada KL per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada **Daftar 14.**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp115,58 triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2013 sebesar Rp115.581.860.184.226 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang PNBP	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03:		
Nilai Bruto	145.678.487.897	185.384.473.276
Penyisihan	(98.536.398.650)	(100.617.241.298)
Nilai Bersih	47.142.089.247	84.767.231.978
2. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	7.723.988.955.720	3.913.204.981.704
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	7.723.988.955.720	3.913.204.981.704
3. Piutang pada BA 999.07:		

Nilai Bruto	1.144.616.528.092	1.142.775.784.247
Penyisihan	(5.723.082.640)	(5.713.878.921)
Nilai Bersih	1.138.893.445.452	1.137.061.905.326
4. Piutang pada BA 999.08:		
Nilai Bruto	99.210.000	211.015.741.654
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	99.210.000	211.015.741.654
5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	49.852.367.635	2.816.000.000
Penyisihan	(249.261.838)	(2.590.720.000)
Nilai Bersih	49.603.105.797	225.280.000
6. Piutang Migas pada BA 999.99:		
Nilai Awal	17.631.803.189.816	7.623.335.855.030
Penyisihan	(2.928.196.170.826)	(470.531.669.198)
Nilai Bersih	14.703.607.018.990	7.152.804.185.832
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada BA 999.99:		
Nilai Awal	3.068.262.937.868	2.804.109.072.920
Penyisihan	(15.341.314.690)	(14.020.545.365)
Nilai Bersih	3.052.921.623.178	2.790.088.527.555
8. Piutang pada BA 999.99 – Denda atas Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada PT BPD Sulselbar		
Nilai Bruto	63.325	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	63.325	-
9. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.610.995.939.584	10.692.391.724.314
Penyisihan	(10.472.680.079.679)	(10.573.232.359.354)
Nilai Bersih	138.315.859.905	119.159.364.960
10. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	145.290.066.492	42.120.486.400
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	145.290.066.492	42.120.486.400
11. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA		
Nilai Bruto	72.558.618.980.797	63.722.116.582.074
Penyisihan	(66.753.929.462.333)	(58.624.347.255.508)
Nilai Bersih	5.804.689.518.464	5.097.769.326.566
12. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA		
Nilai Bruto	2.502.653.456.999	2.334.964.266.710
Penyisihan	(2.302.441.180.439)	(2.148.167.125.373)
Nilai Bersih	200.212.276.560	186.797.141.337
Piutang PNBP (Bruto)*)	**115.581.860.184.225**	**92.674.234.968.329**
Total Penyisihan	(82.577.096.951.095)	(71.939.220.795.017)
Piutang PNBP (Bersih)	**33.004.763.223.130**	**20.735.014.173.312**

**) selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) sebesar Rp145.678.487.897 terdiri dari:

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**	**31 Desember 2012 (*audited*)**
Piutang Lancar	3.029.419.638	39.255.985.379
Piutang Diragukan	88.255.633.414	91.415.053.053
Piutang Macet	54.393.434.844	54.713.434.845
Piutang Dividen (Bruto)*)	**145.678.487.896**	**185.384.473.277**
Penyisihan	(98.536.398.650)	(100.617.241.298)
Piutang Dividen (Netto)	**47.142.089.246**	**84.767.231.979**

**) selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

a. Piutang Lancar sebesar Rp3.029.419.638 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (0,5%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	59.419.638	297.098	59.122.540
2. PT. Perkebunan Nusantara II	1.500.000.000	7.500.000	1.492.500.000
3. PT Inhutani I	600.000.000	3.000.000	597.000.000
4. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000
5. Perum Perumnas	750.000.000	3.750.000	746.250.000
Jumlah	**3.029.419.638**	**15.147.098**	**3.014.272.540**

b. Piutang Diragukan sebesar Rp88.255.633.414 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (50%)	Nilai Bersih
1. Perum Perumnas	66.225.637.648	33.112.818.824	33.112.818.824
2. PT. Perkebunan Nusantara II	18.217.527.690	9.108.763.845	9.108.763.845
3. PT Inhutani I	3.812.468.076	1.906.234.038	1.906.234.038
Jumlah*)	**88.255.633.414**	**44.127.816.707**	**44.127.816.707**

c. Piutang Macet sebesar Rp54.393.434.844 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT. Istaka Karya	6.391.154.934	6.391.154.934	-
2. PT. Bina Karya	566.628.402	566.628.402	-
3. PT. Balai Pustaka	586.749.799	586.749.799	-
4. PT. Industri Sandang Nusantara	43.586.982.444	43.586.982.444	-
5. PT Inhutani V	3.261.919.265	3.261.919.265	-
Jumlah	**54.393.434.844**	**54.393.434.844**	-

Dalam piutang dividen tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp956.493.260.000, yang pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini, mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perubahan nilai modal disetor dari dividen saham tersebut, telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan penerimaan dari dividen dan pelaksanaan penyertaan modal negara dari penerimaan dividen tersebut pada APBN-P Tahun 2013.

2. Piutang pada BA 999.05 sebesar Rp7.723.988.955.720 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih salur) Dana Perimbangan. Lebih salur tersebut akan

dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2014.

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp1.144.616.528.092 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 sebesar Rp435.113.206.842, tahun 2012 sebesar Rp707.662.577.405, dan lebih bayar Iuran Jasa Tirta II dan Kurang Bayar Subsidi Benih pada PT. Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar Rp1.840.743.845.

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp99.210.000 terdapat pada satker Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan hak atau pengakuan Pemerintah terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

5. Piutang PT PPA sebesar Rp49.852.367.635 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Saldo Awal (1)	**2.816.000.000**	**2.786.071.531**
Koreksi Saldo Awal (2)	(6.279.056)	88.928.469
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	-	295.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	-	2.978.000.000
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	-	159.445.000.000
Redemption Obligasi		
Penjualan dari right saham	-	-
HPA aset lainnya	-	1.962.000.000
Hasil Pengelolaan Saham		
Hasil Pengelolaan Saham Bank	31.814.189.995	-
Hasil Pengelolaan Saham Non Bank	54.801.093.725	-
Hasil Pengelolaan Saham dan Kredit	115.607.323.342	-
Jumlah HPA	**202.222.607.062**	**164.680.000.000**
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	-	-
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	-	2.829.000.000
Realisasi Hasil Pengelolaan Dana-HPA	2.872.657.484	-
Jumlah Penerimaan (3)	**205.095.264.546**	**167.509.000.000**
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	-	121.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	48.244.596.727	48.899.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	4.824.459.673	4.890.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	12.066.621	12.000.000
Biaya aset periode sebelumnya	120.666.213	-
Imbalan Kinerja	2.417.354.711	-
PPN Imbalan Kinerja	241.735.471	-
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	**55.860.879.416**	**53.922.000.000**
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((5)=(1)+(2)+(3) –(4))	152.044.106.074	116.462.000.000
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	102.191.738.439	113.646.000.000
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) – (6)	**49.852.367.635**	**2.816.000.000**

Nilai Piutang PT. PPA sebesar Rp49.852.367.635 merupakan piutang lancar yang akan dibayar oleh PT. PPA setelah Laporan Keuangan PT. PPA selesai diaudit.

6. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Piutang pada PT Pertamina	6.520.338.365.418	57.925.277.546
Piutang Migas Lainnya	11.111.464.824.398	7.565.410.577.484
Piutang Migas (Bruto)	**17.631.803.189.816**	**7.623.335.855.030**
Penyisihan	(2.928.196.170.826)	(470.531.669.198)
Piutang Migas (Netto)	**14.703.607.018.990**	**7.152.804.185.832**

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp6.520.338.365.418 terdiri dari USD114.472.900 dan Rp5.125.028.192.803.

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)		31 Desember 2012 (*audited*)	
	USD	Rp	USD	Rp
1. Nilai Lawan		5.125.028.192.803		46.084.659.028
2. Ekspor Minyak Mentah	106.896.795		514	-
3. Natural Gas	3.441.661		999.319	-
4. LPG	3.712.708		224.636	-
5. Overlifting	421.736		-	-
a. Minyak Bumi	79.208		-	-
b. Gas Alam	342.528		-	-
Jumlah	**114.472.900**	**5.125.028.192.803**	**1.224.469**	**46.084.659.028**
Total (setelah konversi ke rupiah)		**6.520.338.365.418**		**57.925.277.546**

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD911,597,737.665 ekuivalen dengan Rp11.111.464.824.398 terdiri dari:

(dalam USD)

No	Piutang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1	Penjualan Minyak Bumi	25,751,934.547	68,402,752.100
2	Penjualan Gas Alam	290,925,698.808	165,902,126.678
	a. Melalui *Trustee*	268,833,499.988	158,397,155.572
	1) Ekspor LNG	(22,018.080)	-
	2) Ekspor Gas Alam	219,217,890.978	128,361,674.870
	3) Domestik Gas Alam	11,952,858.770	30,035,480.702
	4) Domestik LPG	37,684,768.320	-
	5) Domestik LNG	-	-
	b. Melalui *NonTrustee* (Kewajiban KKKS)	22,092,198.820	7,504,971.106
	1) Ekspor LPG	248.670	248,670
	2) Domestik Gas Alam	22,016,156.210	7,504,722.436
	3) Domestik CBM	75,793.940	
3	*Overlifting* KKKS	588,995,238.470	544,294,203.780
	a. Minyak Bumi	247,190,937.870	343,025,279.252
	b. Gas Alam	341,804,300.600	201,268,924.528
4	Lainnya	5,924,865.840	3,759,818.940
	a. Bonus Produksi	50.000	3,000,025.000
	b. Transfer Material	35.000	759,793.940
	c. Denda/ Pinalty	2,158,777.590	
	d. Pembayaran kelebihan DMO Fee	3,766,003.250	
	Total Piutang	**911,597,737.65**	**782,358,901.498**

Berdasarkan hasil audit BPK-RI atas LKPP 2013, terdapat koreksi piutang migas yang dikelompokkan sebagai piutang Non Pertamina. Dalam LKPP Tahun 2013 (*Unaudited*) total piutang migas yang disajikan adalah sebesar Rp17.719.812.328.503, sedangkan dalam LKPP Tahun 2013 (*Audited*), total piutang migas adalah sebesar Rp17.631.803.189.816, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp88.009.139.687. Koreksi tersebut berasal dari piutang *overlifting* KKKS yang nilainya telah dikoreksi oleh SKK Migas, namun masih tercatat sebagai piutang pada saat penyusunan LKPP Tahun 2013 (*Unaudited*). Piutang migas dalam LKPP Tahun 2013 (*Audited*) sebesar Rp17.631.803.189.816, didalamnya masih terdapat piutang yang memerlukan pembahasan lebih lanjut (*dispute*) antara SKK Migas dengan KKKS sebesar USD312,855,778.60 atau ekivalen Rp3.813.399.085.355 (USD1=Rp12.189).

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp3.068.262.937.868 terdiri dari:

   a. Piutang sewa tanah di Jalan Terogong 33, Jakarta Selatan oleh Jakarta International School sebesar Rp34.004.144.099.

      Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa antara Menteri Keuangan dan Jakarta International School dan surat Nomor S-533/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, atas penggunaan lahan di Jalan Terogong 33, Jakarta Selatan periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa sebesar Rp90.677.717.599.

      Atas total tagihan sebesar Rp90.677.717.599 tersebut, pihak JIS telah melakukan pembayaran sewa melalui setoran ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp45.338.858.800 pada tanggal 14 Desember 2012 dan sebesar Rp11.334.714.700 pada tanggal 19 Maret 2013. Untuk itu, masih terdapat Piutang PNBP dari sewa periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 sebesar Rp34.004.144.099.

      Selanjutnya, untuk perpanjangan sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-150/MK.6/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terogong 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 28 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.536.668.524 dan selanjutnya telah ditandatangani Perjanjian Sewa antara DJKN dan *Head of JIS* sebagaimana Perjanjian Sewa Nomor PRJ–01/KN/2013 tanggal 23 Mei 2013. Pihak JIS sebelumnya telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp20.536.668.524 pada tanggal 20 Mei 2013.

   b. Piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp3.034.258.793.769.

      Berdasarkan hasil konfirmasi PT Pertamina (Persero) sebagaimana surat *Vice President Financial Accounting & Reporting* PT Pertamina (Persero) No. R-001/H10200/2014-S4 tanggal 5 Februari 2014, total nilai hutang sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sejak tahun 2003 per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD248.934.186, ekuivalen dengan nilai Rp3.034.258.793.769 (USD1=Rp12.189).

8. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Denda atas Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada PT BPD Sulselbar sebesar Rp63.325.

9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	7.964.168.186.187	8.045.563.970.917
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.646.827.753.397	2.646.827.753.397
Nilai Bruto	**10.610.995.939.584**	**10.692.391.724.314**
Penyisihan	(10.472.680.079.679	(10.573.232.359.354)
Nilai Bersih	**138.315.859.905**	**119.159.364.960**

a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	(252.873.341.830)
- Pengembalian tahun 2013	(81.395.784.730)	-
Jumlah	**7.964.168.186.187**	**8.045.563.970.917**

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 15.**

b. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Total dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	(8.401.880.081)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013	-	-
Jumlah*)	**2.646.827.753.396**	**2.646.827.753.396**

**) selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

Dari lima BDL, satu BDL yaitu Bank Prasidha telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, empat BDL yaitu PT Bank Asiatic, PT Bank Dagang Bali, PT Bank Global Internasional dan PT Bank Ratu belum melakukan penandatanganan BAST Aset.

10. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp145.290.066.492 terdiri dari:

    a. Piutang pada PT Asabri (Persero) atas Damu Pensiun yang seharusnya disetor kembali ke kas negara sebelum 31 Desember 2013 sebesar Rp29.537.016.500.
    b. Piutang pada PT Taspen atas koreksi kelebihan pencairan bulan Januari s.d Desember 2013 dan kelebihan karena koreksi Saldo Uang Pensiun sebesar Rp116.550.980.
    c. Piutang pada PT Askes/BPJS Kesehatan atas kelebihan pencairan belanja asuransi kesehatan tahun 2013 yang seharusnya disetor kembali ke kas negara sebelum 31 Desember 2013 sebesar Rp115.636.499.012.

11. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp72.558.618.980.797, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp66.009.120.450.552 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp6.549.498.530.245. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.804.689.518.464, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp72.558.618.980.797 dikurangi penyisihan sebesar Rp66.753.929.462.333. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	**31 Desember 2013 *(audited)***	**31 Desember 2012 *(audited)***
Aset kredit eks BPPN	66.009.120.450.552	57.875.238.023.263
Eks Kelolaan PT PPA	6.549.498.530.245	5.846.878.558.811
Piutang (Bruto)	**72.558.618.980.797**	**63.722.116.582.074**
Penyisihan	(66.753.929.462.333)	(58.624.347.255.508)
Piutang (Bersih)	**5.804.689.518.464**	**5.097.769.326.566**

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp66.009.120.450.552 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp66.009.120.450.552 dan Rp57.875.238.023.263. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dhi. Kantor Pusat DJKN), pengkategorian piutang menjadi PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing. Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2013 *(audited)***	**31 Desember 2012 *(audited)***
Aset Kredit Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	12.931.188.400.441	10.141.276.617.602
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.846.733.283.505	23.950.007.065.096
Aset Kredit ATK Yang Masih dikelola DJKN c.q. Dit PKNSI	29.057.038.925.936	23.783.954.340.565
Aset Kredit di PUPN (belum PB/PJPN) namun termasuk debitur ATK	174.159.840.670	-
Jumlah	**66.009.120.450.552**	**57.875.238.023.263**

Tagihan PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 16 obligor dengan nilai sebesar Rp23.846.733.283.505, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp23.950.007.065.096.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp6.549.498.530.245 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.812.668.724.099.

Dari aset eks BPPN sebesar Rp66.009.120.450.552 tersebut, aset kredit sebesar Rp4.129.377.864.591 tercatat dalam SAPB sebagai akun berstatus aktif dengan keterangan (*flag*) litigasi.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang SATK, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum PB/PJPN	35.091.264.847
Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor Pusat	25.853.538.030.353
PKPS yang belum PB/PJPN	5.795.674.781.296
Jumlah	**31.684.304.076.496**

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Daftar 16.**

12. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA sebesar Rp2.502.653.456.999 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 29 Mei 2013.

    Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	**31 Desember 2013 (*audited*)**		**31 Desember 2012 (*audited*)**	
	Nilai Aset (dalam Rp)	**Nilai Aset (dalam USD)**	**Nilai Aset (dalam Rp)**	**Nilai Aset (dalam USD)**
PT Jaya Perkasa Engineering	151.367.074.750	38,822,432	151.367.074.750	38,822,432
PT Polysindo Eka Perkasa	459.555.536	960,092	459.555.536	960,092
PT Texmaco Jaya	365.572.613	2,435	365.572.613	2,435

PT Wastra Indah	10.493.948	-	10.493.948	-
PT Bina Prima Perdana	470.399.713.486	25,540,008	470.399.713.486	25,540,008
PT Tuban Petrochemical Industries	1.083.805.023.903	-	1.083.805.023.903	-
Total	**1.706.407.434.236**	**65,324,967**	**1.706.407.434.236**	**65,324,967**
Total (setelah konversi ke Rp)	**2.502.653.456.999**		**2.334.964.266.710**	

C.2.13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp1,98 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.977.442.150 dan Rp0 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp0 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.977.442.150 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.977.442.150. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

C.2.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp142,48 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp142.483.141.891 dan Rp366.808.908.475 merupakan saldo Tagihan TGR pada KL dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp69.232.267.539 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp142.483.141.891 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.250.874.352.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing KL dan BUN dapat dilihat pada **Daftar 17.**

C.2.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman Rp6,01 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp6.011.228.743.194 dan Rp5.325.797.572.454. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp5.152.533.586.332 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2013. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.126.770.918.400 berasal dari nilai bruto Rp5.152.533.586.332 dikurangi penyisihan sebesar Rp25.762.667.932, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**	**31 Desember 2012 (*audited*)**
BUMN	4.641.607.703.528	3.559.205.061.823
BUMD	355.277.027.869	384.443.942.135
Pemda	64.431.439.913	64.970.519.686
Lainnya	85.394.628.593	100.085.268.993
RIDL	5.822.786.428	3.299.364.779
Kredit Program	-	-
Nilai Bruto*)	**5.152.533.586.331**	**4.112.004.157.416**
Penyisihan	(25.762.667.932)	(20.560.020.787)
Nilai Bersih	**5.126.770.918.399**	**4.091.444.136.629**

**) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp858.695.156.862 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Potensi Tunggakan dapat ditagih	212.899.226.855	736.967.707.027
Piutang Bunga	364.520.361.826	289.724.637.548
Piutang Denda	281.275.568.180	187.101.070.462
Nilai Bruto*)	**858.695.156.861**	**1.213.793.415.037**
Penyisihan	(24.335.196.342)	(100.065.474.842)
Nilai Bersih	**834.359.960.519**	**1.113.727.940.195**

**) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

a. Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp212.899.226.855 merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2013. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	80.040.951.737
BUMD	100.778.887.954
Pemda	17.803.369.699
Lainnya	14.244.850.111
Kredit Program	31.167.354
Nilai Bruto	**212.899.226.855**
Penyisihan	(21.106.216.692)
Nilai Bersih	**191.793.010.163**

b. Piutang Bunga sebesar Rp364.520.361.826 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	330.409.908.109
BUMD	9.980.950.041
Pemda	7.194.194.947
Lainnya (*Channeling* dan KUMK SUP 005)	5.187.618.044
Kredit Program	11.747.690.685
Nilai Bruto	**364.520.361.826**
Penyisihan	(1.822.601.809)
Nilai Bersih	**362.697.760.017**

c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp281.275.568.180 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	100.725.130.121
BUMD	155.846.385.098
Pemda	4.265.306.002
Lainnya	18.063.050.239
Kredit Program	2.375.696.720
Nilai Bruto*)	**281.275.568.180**
Penyisihan	(1.406.377.841)
Nilai Bersih	**279.869.190.339**

C.2.16 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp2,73 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.728.415.892.912 dan Rp2.473.903.438.486. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.584.501.525.319 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.728.415.892.912 dikurangi penyisihan sebesar 1.143.914.367.593. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp2.642.053.518.758, dan Non Operasional BLU sebesar Rp86.362.374.154. Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	706.442.769.071	776.749.968.403
2. BLU di Kementerian Keuangan	34.772.216.529	20.520.519.164
3. BLU di Kementerian Perindustrian	1.772.813.835	2.191.005.720
4. BLU di Kementerian ESDM	14.351.023.198	20.153.640.443
5. BLU di Kementerian Perhubungan	2.656.899.000	1.617.931.020
6. BLU di Kementerian Dikbud	337.746.267.412	393.579.565.638
7. BLU di Kementerian Kesehatan	879.978.571.229	689.346.027.709
8. BLU di Kementerian Agama	3.190.560.922	2.992.342.229
9. BLU di Kementerian PU	167.946.636.403	90.789.338.228
10. BLU di Kementerian KUKM	626.923.778	1.178.510.599
11. BLU di Kepolisian RI	17.228.423.203	14.915.843.477
12. BLU di BPPT	4.855.687.848	3.548.440.500
13. BLU di LAPAN	149.500.000	250.105.154
14. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	1.290.844.601	11.267.537.247
15. BLU di BPKPBPB Batam	469.044.381.729	362.129.072.826
Jumlah Nilai Bruto	**2.642.053.518.758**	**2.391.229.848.357**
Penyisihan	(1.132.232.682.038)	(836.493.290.147)
Jumlah Nilai Bersih	**1.509.820.836.720**	**1.554.736.558.210**

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	836.328.608	13.594.201.903
2. BLU di Kementerian Keuangan	37.689.339.104	32.766.356.150
3. BLU di Kementerian Perhubungan	-	42.357.400
4. BLU di Kementerian Dikbud	40.635.614.293	31.707.607.821
5. BLU di Kementerian Kesehatan	5.172.117.979	3.207.152.029
6. BLU di Kementerian Agama	2.026.219.768	1.354.184.936
7. BLU di LAPAN	2.754.402	1.729.890
Jumlah Nilai Bruto	**86.362.374.154**	**82.673.590.129**
Penyisihan	(11.681.685.555)	(12.629.824.084)
Jumlah Nilai Bersih	**74.680.688.599**	**70.043.766.045**

C.2.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp159,69 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp159.689.806.285.608 dan Rp136.953.775.912.378 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Piutang Pajak	50.480.277.068.155	44.550.942.630.944
2. Piutang Bukan Pajak	107.940.288.669.084	91.363.128.988.733
3. Bagian Lancar TPA	1.977.442.150	-
4. Bagian Lancar TP/TGR	73.250.874.352	69.955.682.840
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	50.097.864.274	120.625.495.630
6. Piutang dari kegiatan BLU	1.143.914.367.593	849.123.114.231
Penyisihan Piutang	**159.689.806.285.608**	**136.953.775.912.378**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp50.480.277.068.155 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp107.940.288.669.084 dapat dilihat pada **Daftar 16.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp1.977.442.150 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp73.250.874.352 dapat dilihat pada **Daftar 17.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp50.097.864.274 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.143.914.367.593 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	556.600.515.132	539.587.324.577
2. BLU di Kementerian Keuangan	934.080.191	745.235.221
3. BLU di Kementerian Perindustrian	324.893.249	373.036.619
4. BLU di Kementerian ESDM	6.146.638.918	10.900.489.822
5. BLU di Kementerian Perhubungan	53.146.683	48.163.630
6. BLU di Kementerian Dikbud	100.404.808.445	49.322.263.781
7. BLU di Kementerian Kesehatan	242.943.924.292	245.396.151.822
8. BLU di Kementerian Agama	375.057.144	93.060.000
9. BLU di Kementerian PU	133.785.213.770	377.635.698
10. BLU di Kementerian KUKM	67.711.235	160.434.192
11. BLU di Kepolisian RI	149.530.391	84.948.621
12. BLU di BPPT	24.278.440	17.742.203
13. BLU di LAPAN	144.041.272	149.644.995
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	6.454.223	56.337.686
15. BLU di BPKPBPB Batam	101.954.074.208	1.810.645.364
Jumlah	**1.143.914.367.593**	**849.123.114.231**

Persediaan Rp63,21 triliun

C.2.18 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp63.205.251.965.209 dan Rp62.016.561.796.415 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca KL dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Persediaan di KL	58.950.408.397.849	56.391.184.287.688
Persediaan di BLU	745.639.256.227	732.879.110.391
Persediaan di BUN	3.509.204.311.133	4.892.498.398.336
Jumlah	**63.205.251.965.209**	**62.016.561.796.415**

Persediaan di KL per 31 Desember 2013 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.795.552.443.588, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp2.439.013.463.183, POLRI sebesar Rp2.104.874.712.112, Kementerian Pertanian sebesar Rp1.545.182.315.303, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.352.133.180.621. Rincian Persediaan di KL dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 18.**

Persediaan di BUN per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.509.204.311.133 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca KL dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yang terdiri dari:

a. Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp39.957.337.379 setara dengan 2.862.349kg merupakan persediaan berupa benih di gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT. Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit, hasil *stock opname* fisik yang telah dilakukan tim untuk benih di gudang posisi 31 Desember 2013 sebagai berikut.

No.	Tahun	31 Desember 2013 (*audited*)		31 Desember 2012 (*audited*)	
		kg	Nilai (Rp)	kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	2.071.860	14.099.007.300	9.619.007	65.457.342.635
2	Padi Hibrida	-	-	437.160	20.678.040.424
3	Jagung Komposit	-	-	142.907	1.208.570.421
4	Jagung Hibrida	790.489	25.858.330.079	1.541.434	50.354.661.241
5	Kedelai	-	-	776.860	8.439.382.125
Jumlah		**2.862.349**	**39.957.337.379**	**12.517.368**	**146.137.996.846**

b. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2013 pada Perum BULOG sebesar Rp2.767.326.757.500 setara dengan kuatum 368.976.901 kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai stok CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

No	Tahun	31 Desember 2013 (*audited*)			31 Desember 2012 (*audited*)		
		Kuatum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuatum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2009	-	5.500	-	9.571.196	5.500	52.641.576.250
2	2011	102.310.234,47	6.450	659.901.012.343	155.038.760	6.450	1.000.000.000.000
3	2012	266.666.666,67	7.500	2.000.000.000.000	266.666.666	7.500	2.000.000.000.000
Jumlah		**368.976.901,14**		**2.659.901.012.343**	**431.276.622**		**3.052.641.576.250**

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2013 sebesar 62.299.721kg berdasarkan *Delivery Order* (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 16.918.053 kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2013 sebanyak 45.381.668 kg.

Penggunaan CBP selama Tahun 2013 dan saldo per 31 Desember 2013 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Kwantum (Kg)	Nilai Neraca	Nominal (Rp)	KETERANGAN
STOK AWAL (Lap Audited) Koreksi Stok Awal	431.276.622,04	**7.500**	**3.234.574.665.288**	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)
PENAMBAHAN STOK		**0**	**-**	Pembelian Pemerintah
STOK AWAL 2013	431.276.622,04			
PENGGUNAAN OP (PENDAPATAN NEGARA)				
- DO TA 2012			2.978.120.000	Outstanding OPM TA
			150.000	Kekurangan Harga OPM TA 2012
- Selama Tahun 2012 (Berdasarkan DO)	45.381.667,90		1.236.825.248.622	Bukti SSBP, tahun 2013
1. Total	**45.381.667,90**		**312.264.958.710**	**Penerimaan pada Tahun**
PENGGUNAAN BENCANA			-	Outstanding OPM TA 2013
- DO TA 2013	16.918.053,			
2. Total	**16.918.053,**			
Total Penggunaan (1+2)	**62.299.720,**			
STOK AKHIR	**368.976.901,**	**7.500**	**2.767.326.758.53**	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)
			2.767.326.757.50	Pembulatan

c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp697.965.698.647 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dibiayai dana RR DIPA BNPB BA 999.08 TA 2011 dan disalurkan TA 2012 namun belum diserahterimakan kepada penerima bantuan.

d. Persediaan di berbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp3.541.271.657 terdiri dari Persediaan pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp648.550.000, Persediaan pada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebesar Rp73.112.500, dan Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp3.232.855.107.

C.2.19 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp17,87 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.872.890.837.875 dan Rp11.453.274.948.550 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Kementerian Kehutanan	21.996.497.873	7.292.664.804
2. Kementerian Lingkungan Hidup	36.585.636.598	42.189.062.456
3. Kementerian Koperasi dan UKM	3.098.169.096.937	2.517.304.363.535
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	11.176.290.973.648	6.251.054.894.460
5. Kementerian Pekerjaan Umum	3.539.848.632.819	2.635.433.963.295
Jumlah	**17.872.890.837.875**	**11.453.274.948.550**

Dari Dana Bergulir sebesar Rp17.872.890.837.875, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp17.836.305.201.277 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp21.996.497.873 dan Rp7.292.664.804 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2013 dan

31 Desember 2012 sebesar Rp36.585.636.598 dan Rp42.189.062.456 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises.* Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.

3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.098.169.096.937 dan Rp2.517.304.363.535 berasal dari BA 999.03 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp11.176.290.973.648 dan Rp6.251.054.894.460 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.539.848.632.819 dan Rp2.635.433.963.295 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol. Dana bergulir pada Kementerian Pekerjaan Umum berasal dari BA 999.03.

C.2.20 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp40 miliar

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp39.997.900.137 dan Rp20.196.519.935 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Kementerian Kehutanan	-	-
2. Kementerian Lingkungan Hidup	16.782.036.260	16.080.898.500
3. Kementerian Koperasi dan UKM	23.215.863.877	4.115.621.435
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	-	-
5. Kementerian Pekerjaan Umum	-	-
Jumlah	**39.997.900.137**	**20.196.519.935**

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp0 karena semua penyaluran masih dalam masa tenggang *(grace period).*
2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp16.782.036.260 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih.
3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUKM sebesar Rp23.215.863.877 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih, dan dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

4. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp0 karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.
5. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp0, dengan pertimbangan: (1) BUJT wajib melakukan pelunasan dana talangan pengadaan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2) sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dibayar oleh BUJT, serta (3) tanah yang ditalangi oleh Dana Bergulir menjadi BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum.

C.2.21 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp8,34 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.340.448.484.300 dan Rp7.969.545.521.754 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa KL atau BUN, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Kementerian Perindustrian	14.481.582.162	23.044.785.419
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	8.319.488.777.138	7.927.713.973.835
Perguruan Tinggi Eks BHMN	6.478.125.000	18.786.762.500
Jumlah	**8.340.448.484.300**	**7.969.545.521.754**

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp14.481.582.162 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp8.950.368.225, yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp5.531.213.937.

2. Investasi yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp8.319.488.777.138 dan Rp7.927.713.973.835, atau meningkat sebesar 4,94%. Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah		
1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type B di Provinsi Sulawesi Tenggara	162.800.000.000	190.000.000.000
2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type C di Kota Surakarta	-	32.124.156.924
3. Pembangunan RSUD Type C di Kabupaten Muko Muko	32.201.999.999	16.715.116.050
4. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan	46.992.821.000	23.408.109.310
5. Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik di Kabupaten Lombok Timur	34.350.000.000	4.933.258.800
6. Pembangunan Dua Jembatan layang serta peningkatan dan pelebaran tujuh ruas jalan di kota Bandar Lampung	91.964.218.418	39.770.558.309
7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kabupaten Karangasem	42.899.876.601	6.644.467.500
8. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Povinsi Sulawesi Tenggara	125.221.265.174	19.203.513.300

9. Pembangunan Pasar Tradisional Marelan Kecamatan Medan Marelan, Pasar Tradisional Jawa Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Tradisional Lelang Kecamatan Medan Sunggal	11.334.000.000	-
10. Pembiayaan Pembangunan 15 Ruas Jalan di Kabupaten Lombok Tengah	80.499.021.350	-
11. Pembiayaan Pembangunan RSUD Anutapura di Kota Palu	77.986.550.849	-
12. Pembiayaan Pembangunan Terminal Dungingi di Kota Gorontalo	6.534.700.000	-
13. Pembiayaan Pembagunan 10 Ruas Jalan Provinsi dan 1 Jembatan di Sulawesi Selatan	106.704.323.746	-
Total Penyaluran Kepada Pemda	**819.488.777.137**	**332.799.180.193**
Investasi atau Penyaluran Kepada BUMN atau Badan Usaha		
1. Pinjaman dengan Persyaratan Lunak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 Tahun 2010 - PLN	7.500.000.000.000	7.500.000.000.000
2. Pengadaan 1200 Unit Gerbong PPCW- PT INKA	-	94.914.793.642
Total Penyaluran Kepada BUMN/Badan Usaha	**7.500.000.000.000**	**7.594.914.793.642**
Total Investasi/Penyaluran PIP*)	**8.319.488.777.137**	**7.927.713.973.835**

**) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

3. Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp6.478.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi pada Institut Teknologi Bandung.

C.2.22 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Rp5,53 miliar

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.531.213.937 dan Rp8.096.081.815 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 dengan kebijakan bahwa nilai yang dicadangkan adalah sebesar:

1. investasi yang diragukan pengembaliannya dengan bobot pengurang sebesar 50%, dalam hal debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran dalam 1 (satu) tahun; dan
2. investasi macet dengan bobot pengurang sebesar 100%, dalam hal debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pembentukan cadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

C.2.23 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi Permanen PMN Rp844,09 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp844.094.126.993.709 dan Rp912.877.699.396.801 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Lainnya, dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. BUMN/Perusahaan Negara	793.035.186.146.735	677.338.383.256.170
2. Eks BHMN	-	1.904.129.212.677
3. Non BUMN	1.678.121.327.192	5.178.641.951.881
4. Lembaga Internasional	49.380.371.357.652	38.497.052.327.727
5. Badan Usaha Lainnya	448.162.130	434.267.346
6. Bank Indonesia	-	166.468.468.000.000
7. Lembaga Penjamin Simpanan	-	23.490.590.381.000
Jumlah	**844.094.126.993.709**	**912.877.699.396.801**

PMN pada BUMN

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS pada LKPP Tahun 2013 disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp793.035.186.146.735 dan Rp677.338.383.256.170 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 tersebut merupakan nilai PMN pada 140 BUMN sebesar Rp770.401.674.533.011 dan lima BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp22.633.511.613.724. Status laporan keuangan pada 140 BUMN adalah sebagai berikut.

   (dalam rupiah)

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah	Persentase Nilai
Audited 2013	127	765.605.826.507.016	99,38%
Unaudited 2013	12	4.866.235.660.357	0,63%
Audited 2005	1	(70.387.634.362)	-0,01%
Jumlah	**140**	**770.401.674.533.011**	100%

   Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 19.**

   Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2013 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 21 BUMN dengan nilai sebesar Rp50.134.293.038.439. (**Daftar 20)**

   Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2013 termasuk PMN pada lima BUMN sebesar Rp22.633.511.613.724 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp8.299.338.000.000, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.790.942.276.094, PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp4.545.889.775.754, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp5.147.990.174.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.849.351.387.876. **(Daftar 21)**

   Penambahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

   a. Perubahan Nilai Ekuitas pada masing-masing Perusahaan Negara dari Aktivitas Operasi.

      Perubahan ekuitas Perusahaan Negara terutama disebabkan atas pembentukan cadangan yang dilakukan perusahaan, yang bersumber dari laba bersih yang tidak disetorkan menjadi dividen. Cadangan yang dibentuk akan menambah nilai ekuitas

masing-masing Perusahaan Negara. Selain karena pembentukan cadangan, perubahan nilai ekuitas dapat disebabkan adanya saldo laba tahun berjalan yang belum ditetapkan penggunaannya.

b. Penambahan Nilai PMN

Selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Pemerintah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 kepada beberapa Perusahaan Negara, yaitu:

1) penambahan PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebesar Rp2.000.000.000.000;
2) penambahan PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000;
3) peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga; dan
4) perubahan nilai BPYBDS PT Geo Dipa Energi.

c. Perubahan jumlah komposisi Perusahaan Negara

1) Penambahan PMN ke dalam modal saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah pada saham PT Pengerukan Indonesia (Persero) sebanyak 541.622 lembar saham senilai Rp426.418.000.000. Untuk perubahan status PT Pengerukan Indonesia (Persero) menjadi perseroan terbatas (swasta), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2) Penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya (Persero) sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar 100% senilai Rp7.431.982.660 kepada PT Wijaya Karya Tbk pada tanggal 30 Desember 2013.

d. Perubahan persentase kepemilikan Negara

Perubahan persentase kepemilikan Negara pada Perusahaan Negara disebabkan oleh *Initial Public Offering* PT Semen Baturaja pada tanggal 28 Juni 2013. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja, pemerintah telah memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan saham pemerintah dilakukan paling banyak 35% sehingga kepemilikan pemerintah menjadi paling sedikit 65%, untuk selanjutnya dijual berdasarkan ketentuan pasar modal (*initial public offering*).

e. Perubahan nilai BPYBDS pada beberapa Perusahaan Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 22.**

Nilai kepemilikan negara pada BUMN telah termasuk dividen saham tahun 2011 pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS), yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Juni 2011. RUPS tersebut telah menetapkan bahwa dividen sebesar Rp956.493.260.000 merupakan dividen berbentuk saham untuk Pemerintah. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT KS dan telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Penetapan dividen oleh RUPS menjadi dividen saham yang mengakibatkan perubahan nilai modal disetor Pemerintah

pada PT KS tidak sesuai dengan PP tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dan PP tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan penerimaan dari dividen dan pelaksanaan penyertaan modal negara dari penerimaan dividen tersebut kepada PT KS pada APBN-P TA 2013. Namun demikian, atas alokasi pada APBN tersebut tidak terealisasi sampai dengan tahun anggaran berakhir, karena tidak adanya persetujuan lebih lanjut dari Komisi terkait di DPR. Selanjutnya, Pemerintah kembali akan mengusulkan pengalokasian penerimaan dividen dari PT KS untuk selanjutnya menjadi PMN pada PT KS pada APBN-P tahun 2014.

Pemerintah pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengambil alih kepemilikan saham Nippon Asahan Alumunium (NAA) pada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar USD556,700,000.00. Atas pengambilalihan tersebut, 100% saham PT Inalum telah menjadi milik Pemerintah dan PT Inalum telah ditetapkan menjadi BUMN berdasarkan PP No.26 Tahun 2014. Selanjutnya nilai Penyertaan Modal Negara sebagai akibat peralihan saham milik NAA sesuai amanat PP No.26 Tahun 2014 Pasal 2 akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18 *Termination Agreement* menyatakan bahwa saat penyelesaian transaksi pengambilalihan, perseroan akan menyisihkan dana retensi sejumlah USD10,000,000.00 untuk memenuhi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan antara lain pajak yang belum dibayarkan yang merupakan kewajiban Perseroan periode sebelum Penyelesaian Transaksi. Dalam penentuan nilai buku per 31 Oktober 2013 sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP Nomor LAP-61.1/D1/03/2013 tanggal 25 November 2013, BPKP melakukan koreksi berdasarkan temuan bahwa terdapat penjualan ekspor kepada para pemegang saham ke Jepang yang di bawah harga sejak tahun 1985 s.d. 2013 (s.d. 31 Oktober) sebesar USD269,625,166.23. Terhadap temuan BPKP tersebut PT Inalum menanggapi bahwa harga jual di bawah harga pasar tersebut terjadi karena harga logam ditentukan dari negosiasi antara PT Inalum dan *The Japanese Investor-Buyers*, serta mencerminkan tingkatan yang masuk akal sebagai *equity metal*. Tim Perunding Pengambilalihan PT Inalum dan/atau DJKN Kementerian Keuangan selaku KPA Pembiayaan investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum TA 2013 belum pernah menyampaikan LHA BPKP tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak perseroan untuk tahun fiskal dimulai atau diakhiri tahun antara 2008 dan 2013. Nilai penjualan kepada para pemegang saham Jepang di bawah harga pasar sesuai temuan BPKP untuk periode 2008 s.d. 31 Oktober 2013 adalah sebesar USD58,715,164.48.

Selain itu, *Termination Agreement* juga menyatakan NAA menjamin sebesar maksimal USD100,000,000.00 kepada Pemerintah RI untuk mengajukan suatu gugatan dalam waktu 12 bulan setelah Tanggal Penyelesaian, dan NAA akan membayar Klaim untuk kerugian yang dapat dibuktikan berasal dari PLTA yang tidak dalam keadaaan baik dan layak pada Tanggal Pengembalian. DJKN Kementerian Keuangan belum pernah meminta kepada PT Inalum untuk melakukan pemeriksaan teknis atas PLTA sehingga tidak diketahui apakah terdapat bagian dari PLTA yang tidak dalam keadaan baik dan layak untuk dapat mengajukan klaim sebagaiman diatur dalam *Termination Agreement*.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Nomor S-914/KN/2014 tanggal 16 Mei 2014, telah menyampaikan Laporan Hasil Audit BPKP kepada Dirjen Pajak untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perpajakan dan selanjutnya melalui Surat Nomor S-915/KN/2014 tanggal 16 Mei 2014, telah menyampaikan temuan BPK kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan

Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

2. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.678.121.327.192 dan Rp5.178.641.951.881, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

   Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2013 disebabkan oleh:

   a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;

   b. Perubahan komposisi Non-BUMN, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium telah menjadi BUMN dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 100% dan penjualan seluruh saham milik negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang, yaitu sebanyak 25.000 saham atau sebesar 7,75%. Merujuk Surat BUMN Nomor S-11/MBU/2014 tanggal 10 Januari 2014 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp13.000.000.000 pada tanggal 17 Desember 2013 atas divestasi PT Kertas Padalarang. Uang tersebut telah disetorkan kepada Kas Negara pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp11.700.000.000 dan sisanya 10% atau sebesar Rp1.300.000.000 masih dalam rekening penampungan menunggu hasil verifikasi biaya;

   c. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 31 Desember 2013 kurs tengah BI adalah 1 USD=Rp12.189, sedangkan per tanggal 28 Desember 2012 adalah 1 USD=Rp9.670. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, dan *Asean Infrastructure Fund*. Pada ketiga perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung kepemilikan Pemerintah; dan

   d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia per tanggal 31 Desember 2013 kurs tengah BI adalah 1 MYR=Rp3.707,69, sedangkan per tanggal 28 Desember 2012 adalah 1 MYR=Rp3.159. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di *Asean Bintulu Fertilizer*, mengingat Laporan Keuangan penyertaan modal negara dan Laporan Keuangan *Asean Bintulu Fertilizer* menggunakan mata uang Ringgit Malaysia.

   Pada non-BUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

   Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada **Daftar 22.**

Penyertaan pada Lembaga Internasional

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp49.380.371.357.652 dan Rp38.497.052.327.727 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah

berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 28 Juni 2013. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 23.**

Dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp49.380.371.357.652, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp26.573.441.869.950 di antaranya sebesar Rp26.550.675.238.720 kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga International adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1	International Monetary Fund	26.550.675.238.720	26.550.675.238.720
2	International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
3	Multilateral Investment Guarantee Agency	13.834.734.402	10.975.624.060
4	Common Fund for Commodities	3.758.757.160	2.862.368.085
Jumlah total		**26.573.441.869.950**	**26.569.686.370.533**

Nilai penyertaan yang masih merupakan *promissory notes* dapat berkurang, yang disebabkan:

a. pembayaran atas *promissory notes*; dan
b. pengurangan/penghapusan *promissory notes*, yang dapat disebabkan antara lain adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan **C.2.47.**

PMN pada Badan Usaha Lainnya

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp448.162.130 dan Rp434.267.346 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas enam perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN I, Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, dan Perusahaan Penerbit SBSN V. Nilai kepemilikan negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp113.710.493, Rp106.732.777, Rp103.859.430, dan Rp103.859.430.

C.2.24 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp177,78 miliar

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp177.778.694.559 dan Rp134.165.377.149 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan Perguruan Tinggi eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada perusahaan. Saldo per 31 Desember 2013 terdiri dari:

1. penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%; dan
2. penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp50.946.537.232, Universitas Indonesia sebesar Rp12.104.883.972, Universitas Gajah Mada sebesar Rp61.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp7.414.463.690, Universitas Airlangga sebesar Rp10.590.688.105, Institut Pertanian Bogor sebesar Rp26.750.955.086, dan investasi permanen yang dilakukan IAIN Sumatera Utara pada PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp1.523.121.974.

C.2.25 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp312,73 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp312.730.704.421.451 dan Rp0 merupakan nilai penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Eks BHMN	1.651.156.056.451	-
2. Bank Indonesia	279.366.841.000.000	-
3. Lembaga Penjamin Simpanan	31.712.707.365.000	-
Jumlah	**312.730.704.421.451**	-

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN). Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

1. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.651.156.056.451 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN	31 Desember 2013 (*audited*)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	874.896.460.513
b. Universitas Airlangga	423.853.838.854
c. BP MIGAS	352.405.757.084
Jumlah	**1.651.156.056.451**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi eks BHMN dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013, telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan *cut off* pencatatan per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/barang milik negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 *audited* yang disesuaikan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2013 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *audited*.

Untuk BP Migas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BP MIGAS, Mahkamah Konstitusi telah mencabut dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BP MIGAS, sehingga per 13 November 2012 BP MIGAS telah dibubarkan.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 telah diatur hal-hal antara lain:

a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas);
b. dalam rangka Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks BP MIGAS dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi;
c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BP MIGAS tahun 2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-33/MK.05/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BP MIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

a. BP MIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
b. Pendanaan BP MIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03;
c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BP MIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *net equity* per 13 November 2012; dan

d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BP MIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BP MIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BP MIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BP MIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BP MIGAS (*unaudited*) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BP MIGAS.

Ekuitas BP MIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp715.012.340.753 dari posisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari peningkatan Surplus Kinerja Bersih sebesar Rp437.907.203.984 dan kenaikan Ekuitas Lainnya sebesar Rp277.105.136.769.

Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp279.366.841.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp31.712.707.365.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Daftar 24.**

   Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPS Tahun 2013 No.49.a/LHP/XV.3/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, BPK menyatakan opini tidak memberikan pendapat. Hal ini terkait dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS ke PT Bank Mutiara Tbk. Per 31 Desember 2013 sebesar Rp8.011,84 miliar. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, LPS melaksanakan penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS pada PT Bank Century Tbk. LPS tidak menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari nilai tercatat PMS pada Neraca LPS, dan pengaruhnya terhadap Laporan Surplus Defisit, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan pada Laporan Perubahan Modal LPS.

C.2.26 Aset Tetap

Aset Tetap Rp2.096,50 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.096.497.316.432.500 dan Rp1.895.501.446.206.083 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca KL dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*), serta telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.709.855.072.863.187, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.096.497.316.432.500 dikurangi penyusutan sebesar Rp386.642.243.569.313.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Tanah*)	1.041.019.298.252.419	996.878.472.254.880
Peralatan dan Mesin	282.940.410.570.636	238.129.446.805.797
Gedung dan Bangunan**)	191.278.171.370.296	170.243.266.954.328
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	423.232.566.227.236	379.236.269.019.824
Aset Tetap Lainnya	38.607.829.866.402	14.566.662.581.210
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.419.040.145.511	96.447.328.590.044
Aset Tetap sebelum Penyusutan	**2.096.497.316.432.500**	**1.895.501.446.206.083**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(386.642.243.569.313)	-
Jumlah Aset Tetap	**1.709.855.072.863.187**	**1.895.501.446.206.083**

**) Jumlah Tanah termasuk eliminasi sebesar Rp63.590.100.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

***) Jumlah Gedung dan Bangunan termasuk eliminasi sebesar Rp5.311.446.117 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp189.978.043.561.147, dengan rincian.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Tanah	131.283.481.154.544	130.676.108.835.137
Peralatan dan Mesin	21.943.894.181.328	19.253.528.366.020
Gedung dan Bangunan	27.624.046.542.060	24.128.206.445.290
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.855.332.216.886	1.536.971.319.943
Aset Tetap Lainnya	855.301.424.711	764.507.710.018
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.415.988.041.618	6.207.238.752.413
Aset Tetap sebelum Penyusutan	**189.978.043.561.147**	**182.566.561.428.821**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.732.647.221.617)	-
Jumlah Aset Tetap	**177.245.396.339.530**	**182.566.561.428.821**

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp200.995.870.226.417 atau 10,60 persen dari nilai per 31 Desember 2012, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami penurunan karena Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap, dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp386.642.243.569.313. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp180,86 triliun, koreksi penambahan hasil IP, koreksi pencatatan nilai, serta penambahan aset Tetap yang diperoleh dari hibah.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Daftar 25.**

C.2.27 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp386,64 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp386.642.243.569.313 dan Rp0 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca KL dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2013 (*audited*)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	157.611.985.219.129
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.463.855.914.974
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	176.081.093.005.564
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	485.309.429.646
Jumlah	**386.642.243.569.313**

KL melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

C.2.28 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp5,09 triliun

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.096.035.542.459 dan Rp5.015.602.161.395. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.898.499.639.540, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.096.035.542.459 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.197.535.902.919.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.375.031.741
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	239.948.430.983	246.721.313.918
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.856.087.111.476	4.767.505.815.736
Jumlah	**5.096.035.542.459**	**5.015.602.161.395**
Penyisihan	(2.197.535.902.919)	(342.011.579.591)
Nilai Bersih	**2.898.499.639.540**	**4.673.590.581.804**

Penjelasan masing-masing Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

TPA Rp0

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo TPA per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.375.031.741.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan TGR Rp239,95 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp239.948.430.983 dan Rp246.721.313.918. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp22.005.617.596 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp239.948.430.983 dikurangi penyisihan sebesar Rp217.942.813.387. Rincian Tagihan TGR pada KL dapat dilihat pada **Daftar 26.**

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp4,86 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.856.087.111.476 dan Rp4.767.505.815.736. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.859.240.224.444, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.856.087.111.476 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.996.846.887.032. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Kementerian Hukum dan HAM	17.340.500.000	-
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.799.403.300	12.824.000.000
3. Kementerian Kesehatan	15.245.500	-
4. Kementerian Kehutanan	227.423.226.077	340.314.515.268
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	319.411.750	1.023.896.389
6. Perpustakaan Nasional	-	44.400.000
7. BKKBN	8.499.808.374	8.499.808.374
8. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	-	6.372.083
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	1.354.164
10. BPKPBPB Batam	-	85.263.299.514
11. BA BUN 999.04	2.656.780.000.000	2.773.982.230.890
12. BA BUN 999.99	1.934.909.516.475	1.545.545.939.054
Nilai Bruto	**4.856.087.111.476**	**4.767.505.815.736**
Penyisihan	(1.996.846.887.032)	(153.960.433.382)
Nilai Bersih	**2.859.240.224.444**	**4.613.545.382.354**

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp17.340.500.000 merupakan piutang atas sewa tanah oleh PT Paramita Bangun yang belum dibayar, masa sewa terhitung mulai tahun 2013- 2015.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.799.403.300 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang afiliasi kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan IPB, termasuk diantaranya untuk pinjaman dari kompensasi PT Indah Pesona Bogor, Pinjaman untuk unit usaha Agrifresh, pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk *shareholder* PT Grahawita Cendikia, Pinjaman untuk *pool* bus, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima Kelola. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.745.406.284, berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.799.403.300 dikurangi penyisihan sebesar Rp53.997.016.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.245.500. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kesehatan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp0, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp15.245.500 dikurangi penyisihan sebesar Rp15.245.500.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp227.423.226.077. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan tahun 2012 disebabkan oleh adanya bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi Piutang HTI *Non Rescheduling* menjadi Piutang Bukan Pajak. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp204.680.903.469, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp227.423.226.077 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.742.322.608
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp319.411.750 merupakan piutang atas pemotongan penghasilan pada 9 orang debitur yang merupakan pejabat/pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan jatuh tempo setelah TA 2013. Nilai Piutang Jangka Panjang

Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp317.814.691, berasal dari nilai bruto sebesar Rp319.411.750 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.597.059.

6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihan sebesar Rp8.499.808.374.

7. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.656.780.000.000 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. KUMK	2.656.780.000.000	2.729.780.000.000
2. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Bagi Hasil Bank Muamalat	-	9.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	-	35.202.230.889
Nilai Bruto	**2.656.780.000.000**	**2.773.982.230.889**
Penyisihan piutang tidak tertagih	(13.283.900.000)	(13.869.911.154)
Nilai Bersih	**2.643.496.100.000**	**2.760.112.319.735**

8. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.934.909.516.475 atau senilai USD158,742,269 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar USD139,233,366 dan PT PIM sebesar USD19,508,903.

C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp2,19 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.197.535.902.919 dan Rp342.011.579.591terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.328.042.465
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	217.942.813.387	186.723.103.744
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.979.593.089.532	153.960.433.382
Jumlah	**2.197.535.902.919**	**342.011.579.591**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp217.942.813.387 dapat dilihat pada **Daftar 26.**
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.979.593.089.532 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Hukum Dan HAM sebesar Rp86.702.500, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp53.997.016, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.245.500, Kementerian Kehutanan sebesar Rp22.742.322.608, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp1.597.059, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp8.499.808.374, BA 999.04 sebesar Rp13.283.900.000, dan BA 999.99 sebesar Rp1.934.909.516.475.

C.2.30 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp509,31 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp509.313.483.862.169 dan Rp378.987.684.360.656. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp418.920.288.208.209, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp509.313.483.862.169 dikurangi penyisihan sebesar Rp21.904.143.176.106, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp68.489.052.477.854. Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	279.936.137.500	225.918.302.700
2. Aset Tak Berwujud	17.448.733.461.982	15.705.813.685.536
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	95.453.796.857.223	43.873.903.783.522
4. Dana Penjaminan	71.638.992.611	68.309.705.830
5. Dana Kelolaan BLU	17.684.403.155.418	21.179.600.007.891
6. Aset KKKS	221.745.303.742.534	143.976.028.336.922
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	3.181.247.163.249	3.972.872.786.807
8. Aset Lain-lain	98.608.345.001.685	103.540.902.717.960
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	7.968.396.497.466	2.430.048.955.900
10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	46.871.682.852.501	44.014.286.077.588
Jumlah	**509.313.483.862.169**	**378.987.684.360.656**
Penyisihan	(21.904.143.176.106)	(19.901.414.612.944)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(68.489.052.477.854)	-
Nilai Bersih	**418.920.288.208.209**	**359.086.269.747.712**

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp279,94 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp279.936.137.500 dan Rp225.918.302.700 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13.308.637.500	13.308.637.500
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	182.980.000.000	128.962.165.200
3. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	**279.936.137.500**	**225.918.302.700**

2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp17,45 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.448.733.461.982 dan Rp15.705.813.685.536 merupakan aset yang berupa *software*, dan hak paten yang berada di KL dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Daftar 27.**

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp95,45 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp95.453.796.857.223 dan Rp43.873.903.783.522, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Sekretariat Negara	-	399.950.434
2. Kementerian Luar Negeri	437.835.441.620	426.599.804.567
3. Kementerian Pertahanan	8.322.662.245.672	6.719.107.771.665
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	146.852.004
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	304.187.466.401	304.184.836.079
6. Kementerian Kesehatan	691.186.932.002	2.180.231.243.962
7. Kementerian Agama	1.965.546.621.619	1.183.992.839.523
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	85.513.964.067
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia	411.780.509.995	-
10. Lembaga Ketahanan Nasional	3.650.217.740	3.939.156.000
11. LPP TVRI	-	796.422.954
12. BUN	83.316.947.422.174	32.968.990.942.267
Jumlah	**95.453.796.857.223**	**43.873.903.783.522**

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp437.835.441.620 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *remise* (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/ instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Penggunaannya terutama pada belanja yang bersifat mengikat.
2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.322.662.245.672 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2013, dana *reimbursement*, dana *pending matters*, dana siaga ops, dan *Outstanding L/C* devisa.
3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp304.187.466.401 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.
4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp691.186.932.002 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2013. Termasuk di dalamnya saldo dana Program Jamkesmas Rujukan, Jamkesmas Dasar, dan Jampersal.
5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.965.546.621.619 merupakan aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang. Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BP-DAU tidak lagi disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sesuai PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012.
6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp411.780.509.995 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA.
7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp3.650.217.740 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai

dengan akhir tahun 2013.

8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp83.316.947.422.174, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Rekening Cadangan	7.076.413.245.972	19.989.510.992.821
Escrow Bank Mutiara	210.625.629.902	167.097.369.854
Rekening Lainnya di BUN	169.570.714.516	162.809.726.952
BA 999.03	17.361.728.097.294	12.649.572.852.640
PT Taspen	58.498.609.734.490	-
Jumlah	**83.316.947.422.174**	**32.968.990.942.267**

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

a. Rekening Cadangan sebesar Rp7.076.413.245.972 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	2.529.535.135.377	2.782.289.888.339
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	-	12.660.342.993.887
Jumlah	**7.076.413.245.972**	**19.989.510.992.821**

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa subsidi/PSO yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO dilaporkan pada BA 999.07.

  Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 *(audited)*	31 Desember 2012 (*audited*)
Subsidi Premium	6.948.201.957	2.566.317.591
Subsidi Minyak Solar	466.624.425.458	-
Subsidi LPG	-	1.082.924.124.704
Subsidi Benih	375.003.022.428	14.040.573.919
Subsidi Pupuk	1.315.446.867.744	1.099.268.374.258
Subsidi PELNI	126.522.639.000	197.631.980.000
Subsidi PT KAI	238.989.978.790	136.267.383.443
Subsidi PT Pos dan Giro	-	61.662.500.000
PSO Perum BULOG	-	187.928.634.424
Jumlah	**2.529.535.135.377**	**2.782.289.888.339**

b. Rekening *escrow* Bank Mutiara sebesar Rp210.625.629.902 adalah Rekening *escrow* pada rekening Nomor 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan

USD17,279,976.20 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 USD1=Rp12.189). Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.

c. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp169.570.714.516 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Rekening	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember2012 (*audited*)
1. Menteri Keuangan C.Q. Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	69.985.677.235	63.966.437.523
2. Menteri Keuangan Pengelolaan untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980 (Nama rekening berubah dari Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara menjadi Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9268/PB/2013 tanggal 20 Desember 2013)	12.625.000.000	12.625.000.000
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan nomor 502.000002980	82.107.368.549	82.107.368.550
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.395.096.768	1.367.896.768
5. Rekening Depkeu untuk Penampungan Hibah Dari luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	3.457.571.964	2.743.024.111
Total	**169.570.714.516**	**162.809.726.952**

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 sebesar Rp17.361.728.097.294 terdiri dari.

1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp37.993.097.294 merupakan dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil.

2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.617.700.000.000 merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

   Endowment Fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03 dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

3) Dana Kewajiban Penjaminan sebesar Rp706.035.000.000 terdiri dari:

   - Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dengan nilai alokasi sebesar Rp611.215.000.000 dan realisasi sebesar Rp611.215.000.000.
   - Penjaminan percepatan penyediaan air minum dengan nilai alokasi sebesar Rp35.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp35.000.000.000.
   - Penjaminan Proyek KPS melalui BUPI dengan nilai alokasi sebesar Rp59.820.000.000 dan realisasi sebesar Rp59.820.000.000.

4) Rekening Dana Cadangan BPJS sebesar Rp1.000.000.000.000.

   Di dalam pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa modal awal BPJS berasal dari PMN. Sehingga di dalam Undang-undang APBN 2013 telah dialokasikan PMN kepada PBJS Kesehatan

dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing sebesar Rp500.000.000.000. Namun mengingat BPJS belum didirikan, maka atas PMN tersebut di-*escrow*-kan. Berdasarkan PMK No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan disebutkan bahwa PMN tersebut boleh di-*escrow*-kan jika belum lengkap administrasinya. Hal ini terjadi pada BPJS dimana Askes dan Jamsostek belum bertransformasi menjadi BPJS dan belum lengkap organnya sehingga belum bisa diberikan PMN. Rekening Dana Cadangan BPJS dilaporkan pada BA 999.03.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen sebesar Rp58.498.609.734.490 merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2013 *Audited* diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp58.498.609.734.490.

4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp71,64 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp71.638.992.611 dan Rp68.309.705.830 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)/Jaminan Kredit Indonesia. Dana Penjaminan terdiri dari rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak perum Jamkrindo.

5. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan Rp17,68 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.684.403.155.418 dan Rp21.179.600.007.891 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

BADAN LAYANAN UMUM	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
BLU Pusat Investasi Pemerintah	10.037.781.780.501	9.302.552.213.906
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	3.510.151.367.181	4.414.566.036.705
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	996.864.026.352	4.712.847.105.540
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.992.586.201.127	2.007.290.034.196
BLU LPDB KUKM	1.147.019.780.257	742.344.617.544
JUMLAH DANA KELOLAAN	**17.684.403.155.418**	**21.179.600.007.891**

a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp10.037.781.780.501 merupakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan per 31 Desember 2013 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah atau tidak

outstanding berbentuk investasi pemerintah. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan Dana	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
RIDI Reguler		
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	4.241.222.862	26.016.026.165
2. Giro dollar AS di Bank BRI	2.440.557.639	1.936.187.741
3. Deposito BRI (9 bilyet)	3.569.600.000.000	3.839.600.000.000
4. Deposito Bank Mandiri (4 bilyet)	1.171.000.000.000	1.071.000.000.000
5. Deposito Bank BTN (5 bilyet)	890.000.000.000	940.000.000.000
6. Deposito Bank Bukopin (5 bilyet)	900.000.000.000	750.000.000.000
7. Deposito Bank Sumut (1 bilyet)	100.000.000.000	400.000.000.000
8. Deposito Bank Muamalat (2 bilyet)	200.000.000.000	200.000.000.000
9. Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet)	32.000.000.000	32.000.000.000
10. Deposito Bank BRI Syariah (1 bilyet)	9.000.000.000	9.000.000.000
11. Deposito Bank BJB Syariah (1 bilyet)	30.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah RIDI Reguler	**6.908.281.780.501**	**7.299.552.213.906**
RIDI GEOTHERMAL		
1. Giro di Bank BRI (RIDI Geothermal)	500.000.000	500.000.000
2. Deposito BRI (2 bilyet)	3.129.000.000.000	2.002.500.000.000
Jumlah RIDI Geothermal	**3.129.500.000.000**	**2.003.000.000.000**
Jumlah Dana Kelolaan PIP	**10.037.781.780.501**	**9.302.552.213.906**

b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp3.510.151.367.181. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

(dalam rupiah)

Nama Bank	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 126-00-0 481 9396	46.267.672.548	2.964.198.629
2. Giro BRI Acc. Nomor 00000193-01-000751-30-3	19.847.211.403	11.829.626.551
3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235	43.036.483.230	8.772.211.525
4. Deposito Berjangka	3.401.000.000.000	4.391.000.000.000
Jumlah	**3.510.151.367.181**	**4.414.566.036.705**

c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp996.864.026.352 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1. BTN	00001-01-30-000777-8	53.519.584
2. MANDIRI	119-00-2000150-7	1.359.304
3. BTN SYARIAH	7011001975	1.310.136
4. BUKOPIN	1022716014	1.791.092
5. BANK RIAU KEPRI	101-00-00103	1.447.130
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	82-00-30000-0	1.000.000
7. BANK SUMUT	350.01.06.000004-0	1.173.708
8. BANK SUMUT Syariah	610.01.06.000002-0	1.000.555
9. BANK Kaltim	0011100244	4.758.969.999
10. BANK Sumsel Babel	170-30-20010	10.613.898
11. BANK NTT	016.01.01.000001-0	2.088.168
12. BANK DIY	001.111.001168	1.038.688
13. BRI	0193-01-001528-30-5	102.177.487
14. BNI	1122223319	1.986.847
15. BRI SYARIAH	1007195784	2.019.538
16. BPD Jatim	0011251030	3.178.698
17. BPD Jateng	1-034-01721-9	1.350.746
18. BPD Papua	150.21.10.05.00004-5	1.986.357

19. BPD Kalteng	100.002.000002933.2	2.322.564
20. Bank Syariah Mandiri	7271220124	14.122.400
21. BTN	00014-01-40-019735-5	976.301.000.000
22. BTN SYARIAH	SY44668	118.000.000
23. BRI Syariah	MM1336500177	14.986.000.000
24. BUKOPIN	2410300020	549.000.000
Total Saldo Menurut Rekening Koran		**996.918.456.899**
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan		**(54.941.552)**
Cadangan Piutang		**511.000**
Total Saldo Dana Bergulir Pada Bank Pelaksana*)		**996.864.026.347**

**) selisih antara data neraca dengan rincian Dana Kelolaan BLU sebesar Rp5 karena pembulatan*

d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp1.992.586.201.127 terdiri dari:

- Rp12.586.201.127 ditempatkan pada Rekening Pengelolaan Pokok Dana Bergulir, pada rekening BRI Cabang Kebayoran Baru, dengan nomor rekening 0193-01-000830-30-1;
- Rp1.900.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito berjangka 1 bulan dengan nomor rekening 0193-01-010440-40-5.
- Rp80.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito berjangka 3 bulan dengan nomor rekening 00241-01-40-001855-4.

e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.147.019.780.257.

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp221,75 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp221.745.303.742.534 dan Rp143.976.028.336.922 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Aset KKKS	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)	% Kenaikan
1. Aset Tanah	**15.197.315.580.044**	**14.362.284.169.984**	**5,81%**
2. Aset Non Tanah	**206.547.988.162.490**	**168.047.902.599.614**	**22,91%**
a. Harta Benda Modal (HBM)	184.933.656.960.416	168.047.902.599.614	10,05%
b. Harta Benda Inventaris (HBI)	12.013.456.609	-	100%
c. Material Persediaan	21.602.317.745.465	-	100%
Nilai Aset KKKS	**221.745.303.742.534**	**182.410.186.769.598**	**21,56%**
Akumulasi Penyusutan	(53.903.062.985.532)	(38.434.158.432.676)	40,25%
Nilai Buku Aset KKKS	**167.842.240.757.002**	**143.976.028.336.922**	**16,58%**

Aset HBI dan Aset Material Persediaan KKKS baru disajikan pada tahun 2013. Nilai aset KKKS Tahun 2012 sebesar Rp143.976.028.336.922, merupakan nilai bersih aset KKKS setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan aset HBM sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp38.434.158.432.676.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2013 disajikan pada **Daftar 28.**

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2013 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2013, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Aset tanah pada 42 KKKS dengan perolehan di bawah tahun 2010 yang baru dilaporkan

oleh KKKS pada tahun 2013 senilai Rp1.241.507.378.459;

2. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.184.222.605.157;

3. Aset KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* sebanyak 15.222 item pada 36 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.012.078.784.071. Pada tahun 2012, *Subsequent Expenditure* menjadi sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.345.555.350.377. Perubahan sebanyak 1.325 item dengan nilai minus Rp333.476.566.306 berasal dari aset KKKS yang merupakan *Subsequent Expenditure* yang diperoleh setelah tahun 2010;

4. Aset Kondisi Rusak Berat 11.820 item pada 48 KKKS dengan nilai sebesar Rp356.816.206.196;

5. Aset yang dalam proses penghapusan yaitu sebanyak 7 item pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (dh. Kodeco Energy) senilai Rp267.670.481;

6. Aset Harta Benda Inventaris (HBI) dengan perolehan sebelum tahun 2011 yang berasal dari 41 KKKS senilai USD303,265 atau sebesar Rp24.062.557.076. Terdapat pula aset HBI yang tanggal perolehannya tidak tercatat pada 2 KKKS senilai USD265,162 dan sebesar Rp956.292.488 pada 7 KKKS yang masih memerlukan konfirmasi KKKS mengenai tanggal perolehan aset sebenarnya;

7. Aset LNG Tangguh senilai USD2,907,388,443 yang meliputi:

   a. Aset fisik yang ada di seluruh LNG *plant, and associated Plant* yang ada dalam *Principles of Agreement* antara SKK Migas dan seluruh *participating interest* LNG Tangguh;

   b. Aset fisik yang tidak berada di dalam LNG *plant, and associated plant* dalam POA yang merupakan bagian dalam pengeluaran (*expenditures*) biaya proyek LNG Tangguh.

   Pemerintah belum dapat melakukan pencatatan atas data dan nilai aset LNG Tangguh karena masih dalam bentuk *expenditure*, sehingga belum dapat disajikan dalam neraca LKPP Tahun 2013. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses verifikasi dan pencatatan satu AFE *(Autorization For Expenditure)* senilai USD2,089,134,825 terkait EPC *(Engineering Procurement and Construction)* LNG Plant yang diperkirakan selesai dan masuk dalam Sistem Informasi Aset (SINAS) MIGAS pada Triwulan IV 2014, sedangkan sisanya sebanyak 133 AFE senilai USD818,253,618 diperkirakan selesai diverifikasi, didaftarkan, dan dicatat dalam SINAS MIGAS pada Triwulan IV 2016. Setelah pencatatan dalam SINAS MIGAS selesai dilaksanakan, pemerintah baru akan dapat melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian atas aset LNG Tangguh.

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp3,18 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.181.247.163.249 dan Rp3.972.872.786.807 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, property, nostro, surat berharga, dan saham.

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2013 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	31 Desember 2013 *(audited)*		31 Desember 2012 *(audited)*	
	Jumlah Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Aset Properti	851	1.753.334.802.445	1.685	2.667.168.467.007
Aset Inventaris	36.342	13.760.890.622	36.978	13.865.663.622
Penempatan Antar Bank dan Nostro		478.622.000.000		478.622.000.000
Surat Berharga Eks BPPN		412.347.466.749		284.497.391.925
Saham Eks BPPN		523.182.003.433		528.719.264.253
Jumlah		**3.181.247.163.249**		**3.972.872.786.807**

Dari Aset properti sebanyak 851 aset properti senilai Rp1.753.334.802.445, sebanyak 98 aset senilai Rp157.799.804.037 adalah aset properti dengan dokumen kepemilikan berupa *covernote* dan masih menggunakan nilai buku. Selain aset properti tersebut, terdapat aset properti eks BPPN yang tidak dilaporkan dalam neraca karena dokumen kepemilikan asli tidak dikuasai DJKN dengan rincian sebagai berikut.

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Copy	394
Dokumen selain dokumen kepemilikan	881
Tidak ada keterangan	81
Jumlah	1.356

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan PKPS dicatat sebagai piutang bukan pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 29.**

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp98,61 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp98.608.345.001.685 dan Rp103.540.902.717.960 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp62.352.570.747.520, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp98.608.345.001.685 dikurangi penyisihan sebesar Rp21.669.784.761.843 dan penyusutan sebesar Rp14.585.989.492.322 Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. K/L	29.188.116.027.267	40.698.557.511.367
2. BA BUN 999.03	13.234.602.981	42.346.855.319
3. BA BUN 999.04	21.720.308.915.133	19.719.281.153.339
4. BA BUN 999.99	47.686.685.456.304	43.080.717.197.935
Nilai Bruto	**98.608.345.001.685**	**103.540.902.717.960**
Penyisihan	(21.669.784.761.843)	(19.681.343.182.556)
Akumulasi Penyusutan	(14.585.989.492.322)	-
Nilai Bersih	**62.352.570.747.520**	**83.859.559.535.404**

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di KL sebesar Rp29.188.116.027.267 termasuk didalamnya Aset lain-lain pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) sebesar Rp276.587.139.774. Aset lain-lain pada Kemnakertrans tersebut merupakan dana penjaminan atas 915 PPTKIS yang salah satu tujuannya untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan pengguna

dan/atau PPTKIS. Dana jaminan tersebut berupa rekening deposito atas nama Menteri Kemnakertrans qq PPTKIS yang disimpan di Bank Pemerintah. Setiap PPTKIS yang memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) diwajibkan untuk membayarkan uang jaminan sebesar Rp500.000.000. Pencairan dana penjaminan dapat dilakukan dalam hal PPTKIS tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa calon TKI/TKI yang terjadi. Dalam hal dana penjaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian perselisihan/sengketa calon TKI/TKI PPTKIS wajib memenuhi kekurangannya.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing KL disajikan pada **Daftar 30;**

2. Aset lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp13.234.602.981 terdiri dari Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2013. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
3. Aset Lain-lain pada BA BUN 999.04 sebesar Rp21.720.308.915.133, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp50.524.153.291 berasal dari nilai bruto sebesar Rp21.720.308.915.133 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp21.669.784.761.843. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.
   - Aset Lainnya RDI sebesar Rp21.011.593.005.254 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Pokok	Non Pokok	Jumlah
1. BUMN	745.883.290.603	3.259.344.411.589	4.005.227.702.192
2. BUMD	6.936.632.641.541	6.708.885.527.850	13.645.518.169.391
3. PEMDA	32.105.563.025	599.084.464.521	631.190.027.546
4. Lainnya	818.196.547.349	1.911.460.558.777	2.729.657.106.126
Nilai Bruto*)	**8.532.818.042.518**	**12.478.774.962.737**	**21.011.593.005.255**
Penyisihan			**(20.961.068.851.964)**
Nilai Bersih			**50.524.153.291**

**) selisih antara data neraca dengan rincian Aset Lainnya RDI sebesar Rp1 karena pembulatan*

   - Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp708.715.929.879, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. PIR Perkebunan	294.910.077.508	319.809.586.344
2. UPP Perkebunan	309.206.402.557	304.388.014.802
3. Peternakan	96.598.602.000	97.278.652.435
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000	5.270.305.000
6. P3 Bali	664.010.814	-
Nilai Bruto*	**708.715.909.879**	**728.813.070.581**
Penyisihan	(708.715.909.879)	(728.813.070.581)
Nilai Bersih	-	-

4. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp47.686.685.456.304 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. PT PPA (Persero)	24.120.423.000	83.761.065.882
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	5.098.915.229.333	1.158.800.710.887
3. Aset eks Pertamina	41.837.635.550.563	41.837.639.104.563
4. Aset Bekas Milik Asing/Cina	21.326.818.000	-
5. Aset BMN *Idle*	16.004.511.220	-
6. Aset PKP2B	688.260.190.000	-
7. Aset Lain-Lain DJKN selaku Pengelola Barang	422.734.188	516.316.603
Jumlah	**47.686.685.456.304**	**43.080.717.197.935**

1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp24.120.423.000 dan Rp83.761.065.882 merupakan aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan saham non bank. Penurunan nilai aset disebabkan penjualan saham bank PT Bank Panin, PT Bank Permata dan PT Tugu Reasuransi Indonesia dengan total hasil penjualan sebesar Rp83.814.189.996.

2). Aset Lain-lain eks PT PPA sebesar Rp5.098.915.229.333 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2013 sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Tambah (Kurang)		Saldo Akhir	
		Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Properti	1.900	1.120.153.419.614	246	3.917.601.066.128	2.146	5.037.754.485.742
2	Surat Berharga	9	16.657.242.209	-	-	9	16.657.242.209
3	Aset Saham Non Bank	20	21.990.049.064	-	22.513.452.318	20	44.503.501.382
Jumlah		**1.929**	**1.158.800.710.887**	**246**	**3.940.114.518.446**	**2.175**	**5.098.915.229.333**

Penurunan jumlah dan penambahan nilai aset tersebut disebabkan oleh penjualan melalui lelang, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui penetapan status penggunaan aset, koreksi penambahan jumlah, pelepasan hak atas aset dengan kompensasi, dan hasil penilaian aset.

Pada tahun 2013, terdapat penyesuaian pencatatan yang sebelumnya tercatat dengan satuan kode PRK menjadi satuan unit aset berdasarkan hasil penilaian. Jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA per 31 Desember 2013 setelah disesuaikan yaitu sebanyak 2.146 aset dengan nilai sebesar Rp5.037.754.485.742.

Dari 2.146 aset properti senilai Rp5.037.754.485.742, 37 aset senilai Rp123.953.401.452 merupakan Aset Properti dengan dokumen kepemilikan *Covernote*. Selain itu terdapat aset properti yang tidak dilaporkan di neraca sebanyak 666 aset senilai Rp2.204.710.941.833 karena Menteri Keuangan tidak menguasai dokumen kepemilikan yang asli. Dokumen yang dikuasai adalah berupa dokumen AJB, APHT, kopi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, dan IMB.

Pemerintah akan menelusuri sisa aset properti eks BPPN sesuai temuan BPK. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) disajikan pada **Daftar 31.**

3). Aset eks Pertamina sebesar Rp41.837.635.550.563 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2013 tersebut terdiri atas:

a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp16.302.960.024.041 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2013 sebesar Rp16.302.960.024.041 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2010 sebesar Rp16.302.447.401.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20 April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian aset per 12 Nopember 2010 pada 21 September 2012 (KMK Nomor 255/KM.6/2012) sebesar Rp3.212.808.000.

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebesar Rp11.029.729.944.488 sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP, dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian DJKN	Nilai
Target IP (Nilai Perolehan aset per 17 Sept 2003)	16.242.092.564.001
Hasil Inventarisasi	13.692.173.347.220
Aset Tidak Ditemukan, Aset di Luar WKP, Aset FUPP, dan Lainnya	2.549.919.216.781
Nilai Wajar Hasil Penilaian DJKN	**12.824.018.245.034**

c. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar Rp1.680.927.337.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas delapan aset tetap eks Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut.

No	Lokasi Aset	Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Nilai Perolehan (KMK 92/2008)	Penilaian DJKN (ribuan Rp)	Tanggal Penilaian
1	Jl.Agus Salim 108 & 108A	1.057	837	9.293.188.000	35.037.558	17-9-2012
2	Jl.Surabaya 60 & 60Pav	1.468	357	9.410.537.000	36.505.456	17-9-2012
3	Jl.Brawijaya VIII/30	665	401	6.486.717.000	14.490.489	6-9-2012
4	Jl.Terogong 33	105.557	N/A	207.375.000.000	1.233.433.545	10-8-2012
5	Jl.Tanjung 34	1.076	337	1	15.379.053	21-10-2012
6	Jl.Dipati Ukur 31	751	N/A	2.131.297.000	2.991.056	31-10-2012
7	Jl.Abdul Muis 68	22.305	N/A	121.275.536.000	265.899.043	12-12-2012
8	Jl.Kapten Tendean	46.280	N/A	15.505.583.177	77.191.137	26-9-2012
Jumlah				**371.477.858.178**	**1.680.927.337**	

4) Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebesar Rp21.326.818.000 merupakan nilai ABMA/C yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebesar 50% dari nilai aset tersebut.

5) Aset Lain-Lain BMN *idle* sebesar Rp16.004.511.220 merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN *idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam LKPP adalah BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang yang telah menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). BMN *idle* per 31 Desember 2013 terdiri dari Tanah sebesar Rp12.415.802.000 dan Gedung dan bangunan sebesar Rp3.588.709.220.

6) Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp688.260.190.000 diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Dalam kontrak (Negara diwakili Perusahaan Negara Batubara) diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik negara (Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B). Aset PKP2B sebesar Rp688.260.190.000 berasal dari PT. Adaro Indonesia yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

   Disamping aset dari PT. Adaro Indonesia di atas masih terdapat aset dari PKP2B sebesar lebih kurang USD3,050,445,559.16 dan Rp15.750.710.853. yang belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2013 karena:

   a. Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B masih dalam tahap penyusunan.

   b. BMN dimaksud belum dilakukan inventarisasi dan penilaian

   Aset PKP2B tersebut berasal dari Perusahaan tambang, yaitu: 1) PT. Arutmin Indonesia, 2) PT. Berau Coal, 3) PT. Kendilo Coal Indonesia, 4) PT. Kaltim Prima Coal, 5) PT. Kideco Jaya Agung, 6) PT. Multi Harapan Utama, dan 7) PT. Tanito Harum.

7) Aset Lain-lain yang dikelola oleh DJKN selaku Pengelola Barang sebesar Rp422.734.188 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks Indonesian *Debt Restructuring Agency* (INDRA), aset eks GIZ-Profi, aset eks GIZ-GGPAS, dan Gratifikasi KPK.

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp7,97 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp7.968.396.497.466 dan Rp2.430.048.955.900. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah	78.154.522.689	110.139.650.009
2. Otorita Asahan	1.194.758.813.300	540.080.422.400
3. Yayasan Gedung Veteran	11.786.424.283	11.480.805.908
4. Badan Amil Zakat	28.210.614.691	21.940.090.649
5. Badan Wakaf Indonesia	1.273.337.448	1.514.520.243
6. BP Dana Abadi Umat	2.454.141.693.320	2.239.100.173.266
7. SKK MIGAS	(639.765.931.972)	(494.206.706.575)
8. BAPERTARUM PNS	4.839.837.023.707	-
Jumlah	**7.968.396.497.466**	**2.430.048.955.900**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 mulai Laporan Keuangan tahun 2012 Ekuitas Bersih dari UBL tersebut disajikan pada pos Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya.

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebesar Rp78.154.522.689 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 setelah dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.
2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan sebesar Rp1.194.758.813.300 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2013.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp11.786.424.283 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2013.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp28.210.614.691 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional per tanggal 31 Desember 2013.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.273.337.448 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebesar Rp2.454.141.693.320 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BP DAU per tanggal 31 Desember 2013.
7. Nilai Aset Lainnya sebesar minus Rp639.765.931.972 yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2013 sebesar minus Rp287.360.174.888 dikurangi ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012 sebesar Rp352.405.757.084 berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS per 13 November 2012 *audited*.

   Pelaporan BP MIGAS (sekarang SKK MIGAS) dalam LKPP Tahun 2011 dan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 13 November 2012 disajikan pada LK BA 999.03 sebagai Investasi Permanen PMN sebesar Ekuitas Bersih.

   Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2012 sebesar minus Rp494.206.706.575 berasal dari total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2012 Rp97.314.910.162 dikurangi ekuitas bersih per tanggal 13 November 2012 sebesar Rp591.521.616.737.
8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.839.837.023.707 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM PNS per tanggal 31 Desember 2013.

   Ekuitas Bersih BAPERTARUM PNS per 31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Keuangan *audited* adalah sebesar Rp4.363.505.538.227. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

Aset Lainnya Penerusan Pinjaman Rp46,87 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp46.871.682.852.501 dan Rp44.014.286.077.588 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2013 tersebut terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	45.264.521.113.738	42.081.008.045.563
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	551.668.312.526	967.907.115.392
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	517.664.067.960	448.808.648.201
Penerusan Pinjaman Lainnya	511.018.890.082	516.562.268.432
Kredit Program	26.810.468.195	-
Nilai Bruto	**46.871.682.852.501**	**44.014.286.077.588**
Penyisihan	(234.358.414.263)	(220.071.430.388)
Nilai Bersih	**46.637.324.438.238**	**43.794.214.647.200**

C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Rp21,90 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp21.904.143.176.106 dan Rp19.901.414.612.944 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. Penerusan Pinjaman	234.358.414.263	220.071.430.388
2. Aset Lain-lain	21.669.784.761.843	19.681.343.182.556
Jumlah	**21.904.143.176.106**	**19.901.414.612.944**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp234.358.414.263 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp21.669.784.761.843 pada BA 999.04 yaitu Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain Kredit Program sebesar Rp708.715.909.879 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain RDI sebesar Rp 20.961.068.851.964.

C.2.32 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp68,49 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp68.489.052.477.854 dan Rp0 terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp14.585.989.492.322 dan akumulasi penyusutan aset KKKS sebesar Rp53.903.062.985.532.

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS sebesar Rp53.903.062.985.532 merupakan akumulasi penyusutan aset KKKS non tanah yang terdiri dari akumulasi penyusutan Harta Benda Modal (HBM) sebesar Rp53.900.490.480.719 dan akumulasi penyusutan Harta Benda Inventaris (HBI) sebesar Rp2.572.504.813. Nilai Rp53.900.490.480.719 tersebut terdiri dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp38.434.158.432.676 dan penyusutan tahun 2013 sebesar Rp15.466.332.048.043. Adapun HBI baru disajikan dan disusutkan pada tahun 2013.

Utang PFK Rp348,09 miliar

C.2.33 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp348.097.673.274 dan Rp451.860.600.337 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012	Penyesuaian	Transaksi Tahun 2013		31 Desember 2013
			Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	208.084.213.211		19.074.458.153.667	19.114.438.225.769	168.104.141.109
PFK 2% Gaji Terusan	(5.823.327.941)		5.542.566.319	8.895.867.118	(9.176.628.740)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	221.850.607.897		2.617.507.833.678	2.657.207.114.083	182.151.327.492
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	(1.528.466.964)		15.847.512.035	14.531.317.560	(212.272.489)
PFK 2% Askes TNI/Polri	726.385.684	(353.961.532)	-	-	1.080.347.216
PFK Lain-Lain	4.960.547.373		373.151.523.512	374.841.075.908	3.270.994.977
PFK Bulog	23.590.641.077		250.285.370.995	270.996.248.363	2.879.763.709
JUMLAH	**451.860.600.337**	**(353.961.532)**	**22.336.792.960.206**	**22.440.909.848.801**	**348.097.673.274**

Terhadap saldo awal tahun 2013 PFK 2% Askes TNI/Polri sebesar Rp726.385.684 terdapat koreksi sebesar minus Rp353.961.532 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rampung PFK tahun 2011 sesuai Berita Acara Nomor: BA-6/PB.3/212 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:24/KMK.05/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa terdapat kelebihan pembayaran atau penyaluran atas iuran asuransi kesehatan pensiun TNI/Polri sebesar (Rp353.961.532) dengan rincian sebagai berikut.
   a. Kelebihan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK 2% Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan (akun 821611) kepada PT Askes sebesar (Rp.162.071.768)
   b. Kelebihan pembayaran atas pengembalian penerimaan setoran PFK 2% Asuransi Kesehatan Pensiun Polri/PNS Polri (akun 821612) kepada PT Askes sebesar (Rp.191.889.764)
2. Terkait saldo debet utang PFK tahun 2011, tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PT.Askes dengan melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran pengembalian iuran asuransi kesehatan pensiun TNI/Polri sebesar Rp.353.961.532 ke kas negara melalui bank persepsi dengan menggunakan akun 423999 pada tanggal 20 Desember 2012

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp55,38 triliun

C.2.34 Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp55.380.161.243.832 dan Rp29.738.138.976.562 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
K/L	23.299.768.926.917	12.391.780.077.862
BUN	32.080.392.316.915	17.346.358.898.700
Jumlah	**55.380.161.243.832**	**29.738.138.976.562**

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp23.299.768.926.917 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 32.**

2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp32.080.392.316.915, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
BA 999.05	24.619.657.177.709	16.039.742.327.165
BA 999.08	49.746.677.557	186.675.433.374
BA 999.99	6.290.662.724.766	-
Utang terkait Retur SP2D	1.120.325.736.883	1.119.941.138.161
Jumlah	**32.080.392.316.915**	**17.346.358.898.700**

a. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp24.619.657.177.709, adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1	Kewajiban Diestimasi DBH Pajak dan SDA TA 2013	3.428.144.204.605	1.576.880.155.457
2	Dana Cadangan	-	12.660.342.993.887
3	Kurang Bayar Tunjangan Profesi Guru	4.310.747.365.410	-
4	Kurang Bayar DBH PPh Perorangan	1.254.285.753.184	877.896.330.191
5	Kurang Bayar DBH BP PBB	9.809.769.544	7.210.980.531
6	Kurang Bayar DBH PBB	222.619.306.573	252.648.869.223
7	Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2011	-	91.584.683.712
8	Kurang Bayar Cukai Hasil Tembakau TA 2012	124.074.406.742	-
9	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2012	357.460.669.187	357.460.669.187
	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2013	6.481.707.551.896	
	Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2013	6.484.175.551.215	
10	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2008-2012	924.546.388.182	188.755.284.278
	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2013	364.803.270.711	
	Kurang Bayar DBH Panas Bumi	254.898.057.709	
11	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2011	48.740.398.893	26.962.360.699
	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2013	322.483.113.858	
	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2011	31.161.370.000	
	Total	**24.619.657.177.709**	**16.039.742.327.165**

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp49.746.677.557 terdiri dari:

(1) Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp38.200.326.000 merupakan utang pembayaran *Completion Center* rangkaian pengadaan pesawat kepresidenan BBJ-2.

(2) Utang kepada Pihak Ketiga pada BNP2TKI sebesar Rp1.232.549.000 merupakan Belanja Lain-Lain untuk biaya pemulangan TKI, pengadaan bahan, honorarium pegawai dan lain-lain yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan (dua belas bulan).

(3) Utang kepada Pihak Ketiga pada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp4.840.753.374 merupakan kewajiban atas ongkos angkut beras PNS tahun 2012 yang belum dibayarkan berdasarkan Audit BPK.

(4) Utang kepada Pihak Ketiga dengan akun penyeimbang Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.416.809.123 terdapat pada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan merupakan LS yang masuk ke bendahara namun belum diselesaikan pembayarannya oleh OJK dan sebesar Rp56.240.060 merupakan belanja lain-lain (langganan daya dan jasa) yang belum dibayarkan

sampai dengan 31 Desember 2013.

c. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp6.290.662.724.766 terdiri dari:

(1) Kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dari rekening panas bumi sebesar Rp343.349.686.194, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**
PT Pertamina (Persero)	9.658.905.211
Chevron Geothermal Salak, Ltd	63.675.288.738
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	77.397.048.537
Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd	192.618.443.708
Jumlah	**343.349.686.194**

(2) Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) 31 Desember 2013 sebesar Rp5.947.306.251.720 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.513.579.917.997. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp5.947.306.251.720 dan sisanya sebesar Rp3.566.273.666.277 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	1.577.748.774.268
DMO Fee dan *Fee* lainnya	2.843.333.323.317
Reimbursment PPN	1.246.510.102.763
PDRD	12.930.161.673
Anggaran SKK MIGAS	266.783.889.699
Jumlah	**5.947.306.251.720**

Utang *Fee* Penjualan PT Pertamina (Persero) sebesar USD129,440,378.56 atau setara dengan Rp1.577.748.774.268 (USD1=Rp12.189), merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas bagian pemerintah tahun 2011. Utang *Fee* Penjualan PT Pertamina (Persero) tahun 2012 dan tahun 2013 belum dapat disajikan karena belum ditetapkannya perjanjian berupa SAA antara PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah atas penjualan dimaksud, sehingga belum dapat diterbitkan tagihan atas kewajiban tersebut. Dengan belum adanya SAA dan tagihan, maka nilai kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk penjualan tahun 2012 dan 2013 tidak dapat diukur dengan handal yang berdampak pada tidak dapat disajikannya nilai utang tersebut dalam neraca.

(3) Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kelebihan pembayaran jasa giro atas pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* sebesar Rp6.786.852 dari empat bank, yaitu Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Aceh, dan Bank BPD NTB.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu

retur SP2D sebesar Rp1.120.325.736.883. Jumlah ini berasal dari Utang Tahun 2012 sebesar Rp1.119.941.138.161 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp4.176.494.314.397 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp4.175.582.986.861 serta nilai Neto Koreksi Pemindahbukuan sebesar (Rp2.227.184.185) serta jurnal koreksi utang pihak ketiga pada KPPN sebesar Rp1.700.455.371.

C.2.35 Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman Rp27,67 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp27.668.104.388.520 dan Rp23.099.285.717.583 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	24.977.578.068.784	20.613.072.214.139
Utang Bunga Pinjaman LN	2.690.526.319.736	2.486.213.503.444
Jumlah	**27.668.104.388.520**	**23.099.285.717.583**

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut.

Utang Bunga Obligasi dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp24,98 triliun

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp24.977.578.068.784 dan Rp20.613.072.214.139 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Fixed Rate Bonds	15.418.502.075.720	13.473.294.459.092
ORI	151.377.994.140	115.220.237.595
SBSN	1.304.713.380.110	1.187.093.504.560
Variable Rate Bonds	765.632.174.544	562.986.830.700
SUP kepada BI	79.692.411.446	80.992.417.836
SBN Valas	7.235.193.242.237	5.183.426.483.222
Pinjaman Dalam Negeri	22.466.790.587	10.058.281.134
Jumlah	**24.977.578.068.784**	**20.613.072.214.139**

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 33.**

Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2,70 triliun

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp2.690.526.319.736 dan Rp2.486.213.503.444 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Utang Bilateral	1.141.845.218.799	1.064.654.480.636
Kredit Komersial	80.223.260.005	50.834.612.223
Kredit Ekspor	319.447.616.924	310.100.183.979
Multilateral	1.149.010.224.007	1.060.624.226.606
Jumlah*)	**2.690.526.319.735**	**2.486.213.503.444**

**) selisih antara data neraca dengan rincian utang bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.36 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp71,68 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71.683.090.732.971 dan Rp54.678.143.480.247, sehingga Utang Subsidi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp17.004.947.252.724 atau 31,10 persen dari TA 2012. Utang subsidi TA 2013 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (Kemensos, PT Pelni dan PT KAI)	909.325.891.030	583.490.497.867
Utang Subsidi Listrik	21.793.928.830.995	20.565.784.091.867
Utang Subsidi BBM dan LPG	46.915.727.232.666	23.394.896.413.838
Utang Subsidi Bunga	60.676.232.108	595.410.312.511
Utang Subsidi pada Kementan (Pupuk dan Benih)	2.003.432.546.172	9.538.562.164.164
Jumlah	**71.683.090.732.971**	**54.678.143.480.247**

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial sebesar Rp543.813.273.240 merupakan utang subsidi pangan berupa kurang bayar Pemerintah atas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI.
2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp365.512.617.790 terdiri dari utang subsidi/PSO kepada PT. PELNI sebesar Rp126.522.639.000 dan utang Subsidi/PSO kepada PT. KAI sebesar Rp238.989.978.790. Utang Subsidi sebesar Rp365.512.617.790 tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp 68.770.332.295.769 terdiri dari:
   a. Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp21.793.928.830.995 merupakan kekurangan subsidi listrik 2013; dan
   b. Utang Subsidi BBM dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp46.915.727.232.666. Adapun rincian utang tersebut adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)
Saldo utang kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI	46.910.488.534.926
Saldo utang atas kekurangan bayar PPN Tahun 2011 dan subsidi Tahun 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.	5.238.697.740
Jumlah	**46.915.727.232.666**

   c. Utang Subsidi Bunga sebesar Rp60.676.232.108.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2.003.432.546.172 terdiri dari:
   a. Dana *escrow account* TA 2013 senilai Rp1.690.449.890.172 terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp1.315.446.867.744 dan subsidi benih sebesar Rp375.003.022.428; dan
   b. Pengakuan utang subsidi pupuk sebesar sisa pagu anggaran TA 2013 sebesar Rp312.982.656.000.

C.2.37 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp162,25 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp162.251.340.131.620 dan Rp118.216.112.940.270 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	65.945.678.362.356	55.318.357.096.676
Subtotal	**65.945.678.362.356**	**55.318.357.096.676**
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	95.970.590.002.492	62.755.785.789.452
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	334.710.446.772	141.256.054.142
Utang pada Kemendikbud	361.320.000	714.000.000
Subtotal	**96.305.661.769.264**	**62.897.755.843.594**
Jumlah	**162.251.340.131.620**	**118.216.112.940.270**

Bagian Lancar Utang Luar Jangka Panjang Negeri menurut *lender* dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Bilateral	28.761.588.568.679	23.410.736.875.592
Multilateral	20.294.613.241.640	18.981.562.091.169
Export Credit	14.294.039.624.597	10.833.351.566.934
Commercial Credit	2.595.436.927.440	2.092.706.562.982
Jumlah	**65.945.678.362.356**	**55.318.357.096.676**

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
I. Fixed Rate Bonds		
Nominal	15.308.602.000.000	33.013.173.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(49.526.863.000)	(71.468.618.000)
Nilai bersih (nilai buku)	15.259.075.137.000	32.941.704.382.000
II. Variable Rate		
Nominal	9.411.226.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	9.411.226.000.000	-
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	5.815.606.883.492	5.274.926.878.452
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	5.815.606.883.492	5.274.926.878.452
IV. ORI		
Nominal	11.000.000.000.000	10.475.875.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	11.000.000.000.000	10.475.875.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	-	1.263.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	(32.112.311.000)
Nilai bersih (nilai buku)	-	1.230.887.689.000
VI. SBSN		
Nominal	18.532.410.000.000	12.833.860.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	(1.468.160.000)
Nilai bersih (nilai buku)	18.532.410.000.000	12.832.391.840.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**60.018.318.020.492**	**62.755.785.789.452**
VII. SUN Dalam Valas (USD)		
Nominal	28.034.700.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	(5.278.018.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	28.029.421.982.000	-
VIII. SBSN Dalam Valas (USD)		
Nominal	7.922.850.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	7.922.850.000.000	-
Subtotal SBN Denominasi Valas	**35.952.271.982.000**	
Total Bagian Lancar SBN (Rupiah dan Valas)	**95.970.590.002.492**	**62.755.785.789.452**

Catatan:

- *Fixed Rate Bond terdiri dari 2 seri Fixed Rate Bond, yaitu FR0051 dan FR0026;*

- *ORI terdiri dari 1 seri, yaitu ORI008;*
- *Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari 4 seri, yaitu SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01;*
- *Variable Rate Bond seri VR0019;*
- *SUN Valas (USD) terdiri dari 2 seri, yaitu RI0014 dan RI140504;*
- *SBSN Valas (USD) seri SNI14.*

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat dalam **Daftar 34.**

C.2.38. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp41,72 triliun

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp41.722.185.956.000 dan Rp22.689.283.544.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar Rp33.150.713.509.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp8.571.472.447.000. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam **Daftar 36.**

C.2.39. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp161,41 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp161.408.703.427 dan Rp812.930.306.639 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan	134.250.995.588	753.033.696.543
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	22.113.614.119	59.896.610.096
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.044.093.720	-
Jumlah	**161.408.703.427**	**812.930.306.639**

C.2.40. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp8,45 triliun

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.454.347.000.882 dan Rp6.721.668.089.201 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.429.642.965.800 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Daftar 32**.

C.2.41. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp418,09 miliar

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp418.095.877.428 dan Rp9.728.965.176.829, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
1. MA	-	5.000.000
2. Kementerian Pertahanan	70.718.467.432	69.911.720.814
3. Kementerian Pertanian	86.330.500	86.969.611
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43.968.789.966	78.639.309.319
5. Kementerian Kesehatan	18.333.957	78.814.543
6. Kementerian Agama	250.008.009	249.772.045
7. Komnas HAM	-	1.322.008.000
8. LPP TVRI	57.466.599.004	43.651.814.893
9. BA 999.99	245.587.348.560	1.879.198.705.596
10. Kewajiban terkait Rekening Migas*)	-	7.655.821.062.008
Jumlah	**418.095.877.428**	**9.728.965.176.829**

**) Kewajiban terkait Rekening Migas dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga*

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2013 sebesar Rp245.587.348.560 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, Oktober 2013	12.980.410.096
2. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, November 2013	41.310.933.720
3. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, Desember 2013	57.880.832.912
4. Kekurangan belanja pensiun Non Dapem ke PT Taspen, Desember 2013	122.969.200.274
5. Hutang pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT atas layanan jasa RTGSSWIFT/BG	852.736.606
6. Hutang Kontribusi dan Trust Fund	9.593.234.952
Jumlah	**245.587.348.560**

C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp1,94 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.939.381.089.664 dan Rp1.658.364.752.248. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

C.2.43. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp1.523,75 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.523.750.834.782.215 dan Rp1.279.847.990.292.207 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2013 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp1.161.310.482.736.211 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp362.440.352.046.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	692.082.601.000.000	543.227.588.000.000
Unamortized Premium (Discount)	3.624.803.547.000	4.460.562.331.500
Nilai Bersih (Nilai Buku)	695.707.404.547.000	547.688.150.331.500
II. ORI		
Principle Outstanding	32.882.000.000.000	23.676.745.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	32.882.000.000.000	23.676.745.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding		
Unamortized Premium (Discount)		
Nilai Bersih (Nilai Buku)		
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	113.343.707.000.000	122.754.933.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	113.343.707.000.000	122.754.933.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	229.053.931.322.211	234.869.538.205.700
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	229.053.931.322.211	234.869.538.205.700
VI. SBSN		
Principle Outstanding	91.541.380.000.000	85.788.915.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(1.217.940.133.000)	(417.246.536.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku))	90.323.439.867.000	85.371.668.464.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**1.161.310.482.736.211**	**1.014.361.035.001.200**
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	291.280.412.028.745	262.935.339.353.573
Accrued Indexation	72.162.197.971.255	1.972.010.646.427
Net Unamortized Premium (Discount)	(1.002.257.954.000)	579.605.291.000
Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)	**362.440.352.046.000**	**265.486.955.291.000**
Total SBN Jangka Panjang*)	**1.523.750.834.782.211**	**1.279.847.990.292.200**

**) selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp4 karena pembulatan*

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 40 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2044.
- ORI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2016.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 12 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds,* ORI, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2043. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2036, 10 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2015 – 2022, 2 seri Sukuk Ritel (SR-004 dan SR-005) dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2016, dan 6 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018 – 2043.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 16 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2015 – 2043, 3 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 – 2022, dan 3 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2018 – 2022.

Dalam rangka penerapan *Asset Liability Management* (ALM) Neraca Republik Indonesia yang

bermanfaat antara lain untuk memperkuat permodalan Bank Indonesia, IMF dan Bank Dunia merekomendasikan konversi Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi SUN *tradable*. Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan final antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai konversi SUP menjadi SBN *tradable*. Pemerintah akan mempelajari konversi SUP menjadi SBN *tradable*, menyusun "buku putih" mengenai kebijakan BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan dan selanjutnya akan melakukan pembahasan dengan BI. Apabila kesepakatan mengenai konversi tersebut telah dicapai, implementasi konversi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 36.**

C.2.44. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp17,16 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp17.161.745.000.000 dan Rp18.161.745.000.000 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Unfunded Liability akibat PP Nomor 9 Tahun 2007	1.638.443.906.070
Unfunded Liability akibat PP Nomor 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
Unfunded Liability akibat PP Nomor 8 Tahun 2009	3.024.845.340.493
Unfunded Liability akibat PP Nomor 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
Unfunded Liability akibat PP Nomor 11 Tahun 2011	3.432.866.853.874
Jumlah	**11.822.231.724.875**
Penetapan *Unfunded* PSLtahun 2007 s.d 2011	19.161.745.000.000
Pembayaran Tahun 2012	1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2013	1.000.000.000.000
Jumlah	**17.161.745.000.000**

Nilai *unfunded liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2012. Pembayaran *unfunded liability* akan dilakukan Pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada PT Taspen Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, Pemerintah menetapkan nilai *unfunded liability* atas program THT adalah sebesar Rp19.161.745.000.000, berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan BPKP bahwa *unfunded* PSL PT Taspen Tahun 2007 s.d 2011. Jumlah nilai Rp19.161.745.000.000 termasuk jumlah PSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat dalam Tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal Persetujuan Skema Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS, untuk pembayaran atas saldo UPSL Program THT PNS tahun 2007 – 2011 (Rp17.161.745.000.000) akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan skema pembayaran sebagai berikut.

Tahap	Tahun	Jumlah (Rp)
I	2014	2.000.000.000.000
II	2015	3.000.000.000.000
III	2016	4.000.000.000.000
IV	2017	4.000.000.000.000
V	2018	4.161.745.000.000
Jumlah		**17.161.745.000.000**

Sementara itu menurut Laporan Keuangan Konsolidasian PT Taspen (Persero) Tahun 2012 (*audited*), terdapat kenaikan *Unfunded Liability* sebesar Rp3.846.992.067.789 akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2012. Untuk Tahun 2013 terdapat kenaikan *Unfunded Liability*

sebesar Rp3.710.134.857.296. Terhadap *Unfunded Liability* Tahun 2012 dan 2013 belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

C.2.45. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp68,37 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp68.366.428.707.899 dan Rp5.024.283.525.498, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	58.498.609.734.490	-
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPETARUM-PNS	4.839.837.023.707	-
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	289.097.825.907	285.399.401.703
Jumlah	**68.366.428.707.899**	**5.024.283.525.498**

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

  Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.764.860.843.170 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

  Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

  Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk

disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25%xRp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

  Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp58.498.609.734.490 merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2013.

- Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPETARUM-PNS

  Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp4.839.837.023.707 merupakan Utang yang berasal dari ekuitas bersih BAPERTARUM PNS berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2013 *unaudited*.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

  Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp289.097.825.907 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp94.676.986.051, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp41.583.694.728, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.684.054.142

C.2.46. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp646,22 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp646.221.116.658.252 dan Rp559.487.514.862.710 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Bilateral	303.006.978.080.151	287.829.439.030.809
Multilateral	268.472.113.803.829	211.246.670.138.695
Kredit Ekspor	59.309.149.100.930	56.756.172.056.900
Kredit Komersial	15.432.875.673.342	3.655.233.636.306
Jumlah	**646.221.116.658.252**	**559.487.514.862.710**

C.2.47. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp26,57 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp26.573.441.869.951 dan Rp26.569.686.370.533, dengan rincian:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
International Monetary Fund	26.550.675.238.721	26.550.675.238.721
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	13.834.734.402	10.975.624.060
Common Fund for Commodities	3.758.757.160	2.862.368.084
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	**26.573.441.869.951**	**26.569.686.370.533**

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

Posisi Utang Luar negeri, SBN, dan PN

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *promissory notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada **Tabel 11** dan **Tabel 12.**

Tabel 11 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

(Dalam juta rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	65.945.678,36	55.453.404,89	10.492.273,47
Utang LN – Jangka Panjang	646.221.116,66	557.069.708,32	89.151.408,34
Utang Bunga LN	2.690.526,32	2.478.994,40	211.531,92
Total Utang LN	**714.857.321,34**	**615.002.107,61**	**99.855.213,73**
Surat Berharga Negara (SBN):			
Bagian Lancar SBN-Rupiah	41.485.908,02	49.262.212,70	(7.776.304,68)
Bagian Lancar SBN-Valas	28.029.421,98	-	28.029.421,98
SPN	41.722.185,96	22.689.283,54	19.032.902,42
SBSN Jangka Pendek-Rupiah	18.532.410,00	12.832.391,84	5.700.018,16
SBSN Jangka Pendek-Valas	7.922.850,00	-	7.922.850,00
SBN Jangka Panjang-Rupiah	1.070.987.042,87	929.668.359,82	141.318.683,05
SBN Jangka Panjang-Valas	319.778.852,05	239.861.455,29	79.917.396,76
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	90.323.439,87	85.371.668,46	4.951.771,41
SBSN Jangka Panjang-Valas	42.661.500,00	25.625.500,00	17.036.000,00
Utang Bunga SBN	24.955.111,28	20.602.879,90	4.352.231,38
Total SBN dan Bunga	**1.686.398.722,02**	**1.385.913.751,55**	**300.484.970,47**
***Promissory Notes* (PN):**			
PN Jangka Pendek	-	-	-
PN Jangka Panjang	26.573.441,87	26.569.686,37	3.755,50
Total PN	**26.573.441,87**	**26.569.686,37**	**3.755,50**

Tabel 12 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Posisi Utang Luar negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan (Penurunan)
ACU	350,515,061	305,669,131	44,845,930
ADB	67,036,119	89,346,229	(22,310,110)
AUD	446,120,928	387,464,928	58,656,000
CAD	118,665,472	128,975,789	(10,310,317)
CHF	170,687,742	204,679,671	(33,991,929)
CNY	1,395,075,132	1,472,579,306	(77,504,174)
DKK	31,079,999	37,254,435	(6,174,436)
EUR	3,615,546,709	3,942,045,410	(326.498.701)
GBP	246,048,411	307,954,978	(61,906,567)
JPY	2,019,108,387,137	2,138,377,756,015	(119,269,368,878)
KRW	210,963,667,670	197,039,877,460	13,923,790,210
KWD	5,639,300	7,366,200	(1,726,900)
SAR	78,305,752	87,368,653	(9,062,901)
SDR	1,932,600,413	2,060,307,886	(127,707,473)
USD	23,591,640,440	22,064,404,139	1,527,236,301
WBD	26,215,677	100,800,448	(74,584,771)

C.2.48. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah Penyesuaian Rp40,26 triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2013 dan TA 2012 sebesar Rp40.262.010.866.885 dan Rp49.242.263.157.735. SAL TA 2013 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2013 sebesar Rp70.262.825.244.473, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp8.149.767.980, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus Rp30.008.964.145.568. Pada TA 2013 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp26.332.138.910.461, sehingga SAL per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.594.149.777.346. Sementara itu, SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah sebesar Rp66.596.407.908.242, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp2.258.130.896. Rincian penghitungan SAL

sebagaimana disajikan pada **Tabel 13.**

Tabel 13 Saldo Anggaran Lebih TA 2013 dan TA 2012

(dalamrupiah)

Uraian	TA 2013 (*audited*)	TA 2012 (*audited*)
Saldo Awal SAL	**70.262.825.244.473**	**105.089.371.724.754**
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	8.149.767.980	17.425.252.112
Penggunaan SAL	(30.000.000.000.000)	(56.170.000.000.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	641.122.867	16.492.481
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	24.491.001.778	185.511.299.379
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	(601.517.310)	119.938.389.009
Kas dalam Transito	(33.494.752.903)	-
SAL setelah Penyesuaian	**40.262.010.866.885**	**49.242.263.157.735**
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**25.721.919.465.853**	**21.857.572.902.339**
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(644.751.888.573)	(305.501.981.845)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	(552.249)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(518.471.983)	(1.336.463.035)
Penyesuaian Kas KPPN	-	(30.893.583.426)
Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	1.198.523.336.037	-
Selisih Kurs (*unrealized*) 1)	56.966.469.127	(499.278.235.046)
Total Penyesuaian SiLPA	**610.219.444.608**	**(837.010.815.601)**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	**26.332.138.910.461**	**21.020.562.086.738**
Saldo Akhir SAL (A)	**66.594.149.777.346**	**70.262.825.244.473**
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	21.674.873.255.508	25.755.966.698.308
Rekening BUN di BI	18.934.421.791.637	9.719.516.234.122
Rekening KPPN	2.666.720.204.356	16.207.882.323.813
Rekening Khusus	3.128.616.916.907	1.907.213.434.609
Kas di Bendahara Pengeluaran	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas pada BLU yang telah Disahkan 2)	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan 3)	1.114.849.200.667	656.246.733.463
Total Fisik Kas	**68.047.574.537.649**	**71.791.799.323.001**
Penyesuaian Fisik Kas		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	17.256.780.750	50.977.427.950
Utang PFK	(348.097.673.274)	(451.860.600.337)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(1.120.325.736.883)	(1.119.941.138.161)
Total Penyesuaian Fisik Kas	**(1.451.166.629.407)**	**(1.520.824.310.548)**
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	**66.596.407.908.242**	**70.270.975.012.453**
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	**(2.258.130.896)**	**(8.149.767.980)**

Catatan:

1). Sejak tahun 2012 selisih kurs (unrealized) atas kas BUN yang merupakan bagian dari SAL merupakan penambah (pengurang) SiLPA.

2). Kas BLU sebesar Rp20.185.201.347.614 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.

3). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

Selisih antara catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam LKPP Audited Tahun 2013 sebesar Rp2.258.130.896 dapat dikelompokkan dalam dua kelompok permasalahan:

1. Permasalahan Pencatatan SAL

   SAL merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sedangkan SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

   Pencatatan SAL mencakup transaksi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan terjadi koreksi/penyesuaian saldo awal SAL dan penyesuaian

SILPA/SIKPA. Koreksi yang dilakukan pada saldo awal SAL antara lain disebabkan penyesuaian dari selisih lebih kas tahun lalu, maupun penyusuaian penggunaan SAL, koreksi saldo awal Kas di KPPN, koreksi saldo awal Kas pada BLU dan koreksi saldo awal Kas dari Hibah di K/L.

Sementara itu terkait dengan pencatatan selama tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penyesuaian atas SiLPA/SiKPA yang terjadi karena antara lain penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu, penyesuaian kas hibah langsung maupun penyesuaian selisih kurs belum terealisasi.

Koreksi/penyesuaian yang dimasukkan dalam perhitungan selisih catatan dan fisik SAL sebagaimana terdapat dalam **Tabel 13** tersebut di atas adalah koreksi yang dianggap mempengaruhi SAL, namun mengingat tidak diperolehnya informasi yang tepat atas koreksi tersebut serta belum didukungnya koreksi tersebut dengan dokumen sumber yang memadai maka koreksi/penyesuaian pemindahbukuan dapat menjadi tidak kurang tepat.

2. Permasalahan Saldo fisik SAL

Saldo fisik SAL dalam perhitungan selisih catatan dan fisik SAL terdiri dari:

a. Rekening SAL di BI
b. Rekening BUN di BI
c. Rekening Kas di KPPN
d. Rekening Khusus
e. Kas di Bendahara Pengeluaran
f. Kas pada BLU yang Telah Disahkan
g. Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan.

Pencatatan atas saldo fisik SAL pada rekening SAL di BI, Rekening BUN di BI, Rekening Kas di KPPN dan Rekening Khusus didasarkan pada rekening koran yang diterima dari Bank asal rekening masing-masing. Untuk saldo Kas pada BLU yang telah disahkan dan Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan, pencatatan saldo didasarkan pada pengesahan yang dilakukan oleh KPPN. Sedangkan untuk saldo kas di bendahara pengeluaran menggunakan pencatatan saldo kas di bendahara pengeluaran yang ada pada K/L.

Ketidakakuratan data dalam fisik SAL kemungkinan dapat terjadi pada saldo kas di bendahara pengeluaran mengingat penyajian saldo kas di bendahara pengeluaran dalam LKPP menggunakan pencatatan yang dilakukan oleh SAI. Pencatatan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker menjadi tidak akurat jika Satker tidak tepat mencatat saldo kas di bendahara pengeluaran karena tercampur dengan kas yang bukan berasal dari Uang Persediaan. Untuk itu terkait dengan saldo kas di bendahara pengeluaran, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran yang lebih akurat antara lain:

a. Menerbitkan paket peraturan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Nomor: PER-3/PB/2014. Dengan ditetapkannya peraturan ini akan mempertegas pengaturan Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara termasuk pemberlakuan sanksi apabila Bendahara tidak menyampaikan LPJ Bendahara dengan penundaan penerbitan SP2D-nya.
b. Membangun aplikasi untuk pembukuan dan pertanggungjawaban LPJ Bendahara Pengeluaran berupa Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI). Aplikasi SiLaBI ini terintegrasi dengan aplikasi SPM, sehingga tidak ada Bendahara atau satker yang tidak akan menyampaikan LPJ dengan benar, karena akan dikembalikan oleh KPPN dan penerbitan SP2D-nya akan ditunda. Penerapan LPJ Bendahara yang

menggunakan SiLaBI terhitung per Semester II atau bulan Juli untuk pelaporan bulan Agustus 2014. Dengan demikian LPJ Bendahara dapat dipastikan diterima KPPN dan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran dari data LPJ dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya data saldo kas Bendahara Pengeluaran pada LKBUN dan LKPP akan menggunakan data yang bersumber dari KPPN.

Adapun proses konsolidasi dan validasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut.

1) Rekonsiliasi antara LPJ Bendahara dengan unit UAKPA di internal satker yang dilakukan sebelum dikirim ke KPPN.
2) KPPN melakukan verifikasi dan membuat rekapitulasi LPJ untuk selanjutnya disampaikan ke Kanwil DJPB, begitu juga untuk rekonsiliasi LK UAKPA juga dilakukan oleh KPPN, sehingga akurasi data saldo kas pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada pada LPJ dan pada LK UAKPA dapat diyakini kebenarannya.
3) Selanjutnya Kanwil DJPB juga melakukan konsolidasi dan validasi atas LPJ dan dikirim ke Dit. PKN.

c. Terhadap saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat ditelusuri telah diterbitkan paket peraturan:

1) PMK No. 15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2) KMK No. 7/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2014 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
3) KMK No. 8/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Selain Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
4) Perdirjen Perbendaharaan No. PER-35/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koreksi Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

C.2.49. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SiLPA setelah Penyesuaian Rp26,33 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp26.332.138.910.461 dan Rp21.020.562.086.738 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2013 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2013 (*audited*)	TA 2012 (*audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438.891.069.562.744	1.338.109.629.172.958
Belanja Negara	1.650.563.727.418.085	1.491.410.224.590.994
Surplus (Defisit)	**(211.672.657.855.341)**	**(153.300.595.418.036)**
Pembiayaan Neto	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**25.721.919.465.853**	**21.857.572.902.339**
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(644.751.888.573)	(305.501.981.845)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	(552.249)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(518.471.983)	(1.336.463.035)
Penyesuaian Kas KPPN	-	(30.893.583.426)
Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	1.198.523.336.037	-
Selisih Kurs (*unrealized*) 1)	56.966.469.127	(499.278.235.046)
Total Penyesuaian SiLPA	**610.219.444.608**	**(837.010.815.601)**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	**26.332.138.910.461**	**21.020.562.086.738**

Sejak Tahun 2012, Selisih Kurs Kas BUN di BI *(unrealized)* merupakan penambah/pengurang perhitungan SiLPA.

C.2.50. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp99,64 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp99.643.556.941.069 dan Rp86.265.604.108.265. Jumlah Cadangan Piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Piutang Lancar (Bersih)	100.144.781.980.723	85.607.018.863.494
Belanja Dibayar di Muka berupa Persekot Gaji	4.573.169.948	4.173.047.877
Uang Muka dari Rekening BUN	141.923.861.996	787.370.392.558
Selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas	(647.722.071.597)	(132.958.195.664)
Jumlah*	**99.643.556.941.070**	**86.265.604.108.265**

**) selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.51. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp63,20 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp63.205.251.965.209 dan Rp62.016.561.796.415 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.52. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp4,82 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.817.382.158.336 dan Rp9.043.802.422.858 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Kas di Bendahara Penerimaan	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas[1)]	1.025.268.555.493	3.150.019.488.674
Rek. Penerimaan Panas Bumi	-	347.992.721.305
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS - PNBP	3.566.273.666.277	5.349.639.753.901
Jumlah	**4.817.382.158.336**	**9.043.802.422.858**

Catatan:

*1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (**lihat Catatan C.2.6**)*

C.2.53. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp325,22 triliun

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp325.224.143.092.266 dan minus Rp241.956.232.377.965. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Total Utang Jangka Pendek	368.086.831.707.954	266.363.759.102.680
Dikurangi:		
Utang PFK	(348.097.673.274)	(451.860.600.337)
Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan Rekening BUN dan Rekening Retur	(1.120.325.736.883)	(1.119.941.138.161)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(5.347.879.920.484)	(2.470.915.669.777)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas)	(6.290.655.937.914)	(7.883.177.122.538)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	(8.454.347.000.882)	(6.721.668.089.201)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(19.335.835.724.632)	(4.575.971.265.178)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH	(1.965.546.621.619)	(1.183.992.839.523)
Jumlah	**325.224.143.092.266**	**241.956.232.377.965**

C.2.54. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp18,69 triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp18.688.113.653.035 dan minus Rp4.443.013.069.514 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(19.335.835.724.632)	(4.575.971.265.178)
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	647.722.071.598	132.958.195.664
Jumlah	**(18.688.113.653.034)**	**(4.443.013.069.514)**

**) selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.55. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp90,08 miliar

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp90.082.709.951 dan Rp56.475.093.646, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	142.554.657.720	142.211.961.233
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	70.046.094.641	80.029.529.762
Selisih Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan Pencatatan di KPPN	(186.637.389.945)	(175.345.833.082)
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.03	-	1.429.667.753
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	2.258.130.896	8.149.767.980
Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kemlu	61.861.216.639	
Jumlah	**90.082.709.951**	**56.475.093.646**

C.2.56. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp4,65 triliun

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.653.616.446.673 dan Rp1.889.360.514.088. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 merupakan akun lawan dari Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja sebesar Rp4.658.189.616.621 dikurangi Persekot Gaji pada Mahkamah Agung sebesar Rp2.084.666.486, Kejaksaan Agung sebesar Rp1.011.480, Kementerian Keuangan sebesar Rp1.853.770.656, Kementerian Pertanian sebesar Rp66.100.020, Kementerian Kesehatan sebesar Rp563.949.706, Kementerian Agama sebesar Rp3.486.600, dan pada Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp185.000.

C.2.57. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp8,45 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp8.454.347.000.882 dan minus Rp6.721.668.089.201. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp8.454.347.000.882.

C.2.58. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp1.183,17 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.183.170.420.317.820 dan Rp932.406.392.642.504 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.709,85 triliun.

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.709.855.072.863.187 dan Rp1.895.501.446.206.083 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.60. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp352,58 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp352.579.883.574.149 dan Rp362.406.005.769.186 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

Rincian penghitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Piutang Jangka Panjang (bersih)	2.898.499.639.540	4.673.590.581.803
Aset Lainnya (bersih)	418.920.288.208.209	359.086.269.747.713
Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya	**421.818.787.847.749**	**363.759.860.329.516**
Dikurangi:		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(1.965.546.621.619)	(1.183.992.839.523)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	(17.256.780.750)	(50.977.427.950)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas	(3.917.654.113.035)	(118.884.292.857)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(4.839.837.023.707)	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen	(58.498.609.734.490)	-
Jumlah*)	**352.579.883.574.148**	**362.406.005.769.186**

**) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.61. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp2.031,80 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp2.031.798.722.297.177 dan minus Rp1.850.355.668.169.689 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.547.879.942.821.580	1.304.692.383.569.946
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	672.794.558.528.202	586.057.201.233.243
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(188.875.779.052.607)	(40.393.916.633.507)
Jumlah*)	**2.031.798.722.297.175**	**1.850.355.668.169.682**

**) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp2 dan Rp7 karena pembulatan*

C.2.62. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp184,96 triliun

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar minus Rp184.958.124.939.572 dan minus Rp40.275.032.340.650 dan minus merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013 (*audited*)	31 Desember 2012 (*audited*)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *	(188.875.779.052.607)	(40.393.916.633.507)
Selisih kurs pada aset atas Aset lainnya RDI dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	3.917.654.113.035	118.884.292.857
Jumlah	**(184.958.124.939.572)**	**(40.275.032.340.650)**

**) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp116.713.581.081.352 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar Rp72.162.197.971.255.*

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2013, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga rekening pada Bank Indonesia dan 17 rekening pada Bank Umum. Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Penerimaan pada rekening pertambangan dan perikanan berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKKS.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Kredit Program

Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

2. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp9.513.579.917.997. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2013.

Tabel 14 Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2013 dan 2012

URAIAN	31 Desember 2013 (*audited*)		31 Desember 2012 (*audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**1,344,928,728.80**	**13.005.460,82**	**687,818,565.53**	**6.237.138,75**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya a)	17,956,713,722.55	187.816.222,13	19,408,690,667.00	182.028.575,50
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain b)	141,804,600.22	1.391.823,79	164,394,244.00	1.594.436,36
4. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	13.789.282.61	-	8.549.237,79
5. Penerimaan belum jelas peruntukannya c)	10,091,953.18	111.004,17		
6. Pengembalian Dana Talangan d)	600,000,000.00	7.362.000,00		
Total Penerimaan	**18,708,610,275.95**	**210.470.332,69**	**19,573,084,911.00**	**192.172.249,65**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	1,802,624,546.55	20.745.751,75	2,049,888,164.00	19.614.118,12
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	9,121,599.65	98.330,85	5,255,471.00	48.929,83
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 e)				
• PPh Migas	8,380,393,964.93	88.673.813,40	8,852,903,719.00	83.460.732,12
• Pendapatan PNBP SDA Migas	5,775,934,021.86	63.008.139,89	5,192,878,640.00	49.238.284,64
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	29,063,981.18	325.524,55	105,757.70	972,55
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	15.997.138.114,17	172.851.560,44	16,101,031,751.70	152.363.037,26
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. *Reimbursement* PPN ke Kontraktor	1,092,795,043.65	11.112.063,92	612,808,143.00	5.741.666,36

b. Pembayaran DMO Fee KKKS f)	1,183,789,547.10	12.731.608,94	1,482,403,524.00	14.096.138,50
c. Pembayaran Fee / Anggaran SKK Migas	182,479,765.68	1.839.289,61	138,907,356.03	1.309.188,32
d. Pembayaran *Underlifting* KKKS g)	46,472,678.89	495.100,20	191,028,581.00	1.847.280,36
e. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	162,526,342.00	1.567.566,57
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.505.537.035,32	26.178.062,67	2,587,673,946.03	24.561.840,11
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI h)	140,971,739.07	1.384.014,36	163,685,347.00	1.587.768,90
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit i)	-	5.944.064,34	-	6.275.715,20
5. Pengeluaran lainnya j)	29,372,417.83	341.350,43	63,516,847.00	614.923,22
6. Administrasi Bank k)	30.00	0,36	-	-
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	14,302.26	161,01	66,856.00	641,88
8. Dana Talangan d)	600,000,000.00	7.263.000.00		
Total Pengeluaran	**19,273,033,638.65**	**213.962.213,59**	**18,915,974,747.73**	**185.403.926,57**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(564,423,362.70)**	**(3.491.880,90)**	**657,110,163.27**	**6.768.323,08**
V. Saldo Akhir (I + IV) I)	**780,505,366.97**	**9.513.579,92**	**1,344,928,728.80**	**13.005.461,83**

Penjelasan:

Rekening Migas Nomor 600.000411980

Merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.
   - Penerimaan PPh Migas

     Penerimaan PPh Migas sebesar USD 8,110,356,552.63 atau setara Rp84.577.999.764.377 merupakan penerimaan atas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang disetor ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan
   - PNBP SDA Migas

     Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara sebesar USD 9,824,634,753.61 atau setara Rp103.010.632.838.714
   - PNBP Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

     Meliputi Bonus dan Transfer Material

     Bonus sebesar USD 17,499,975.00 atau setara Rp183.535.224.550 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil yang menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.

     Transfer Material sebesar USD 4,222,441.31 atau setara Rp44.054.299.269 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan SKK MIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery.*

b) Penerimaan Lain-Lain

   Pada penerimaan lain-lain sebesar USD141,804,600.22 atau setara Rp1.391.823.791.265 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia, retur pengembalian karena salah rekening, dan penerimaan lainnya, diuraikan sebagai berikut.
   - Koreksi pembukuan kredit sebesar USD140,971,739.22 atau setara Rp1.383.548.475.654 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
   - Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD14,302.26 atau setara Rp159.627.524 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga.
   - Penerimaan Lainnya sebesar USD 818,558.89 atau setara dengan Rp8.115.688.087 merupakan penerimaan karena salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMO.

c) Penerimaan yang belum teridentifikasi peruntukannya sebesar USD10,091,953.18 atau setara Rp111.004.168.137 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

d) Dana Talangan Kredit/Debit sebesar USD600.000.000 atau setara dengan Rp7.362.000.000.000 merupakan pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 16 Desember 2013 untuk memenuhi kebutuhan dana pada Rekening Kas Umum Negara dalam membiayai pengeluaran Negara tahun 2013. Atas pemindahbukuan dana talangan tersebut, telah dikembalikan ke rekening migas pada tanggal 30 Desember 2013.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

   Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan Negara.
- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
- Pemindahbukuan PNBP Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

f) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD1,183,789,547.10 atau setara dengan Rp12.731.608.937.515 termasuk didalamnya pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD642,562,973.07, dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Maret s.d. November 2013 sebesar USD567,810,131.55 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD567,810,131.55 dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam USD65,193,204.91 atau setara Rp798.355.987.328 (Kode Akun 421211).
- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT PHE untuk periode bulan Maret s.d. April 2013 sebesar USD74,752,841.52 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD74,752,841.52, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD4,073,388.79 atau setara Rp49.756.444.070.

g) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran Underlifting KKKS sebesar USD46,472,678.89 atau setara dengan Rp495.100.199.234 termasuk didalamnya pembayaran *Underlifting* kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD11,727,751.00.

h) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD140,971,739.07 atau setara dengan Rp1.384.014.361.274 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

i) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit

Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

j) Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran Lainnya sebesar USD29,372,417.83 atau setara dengan Rp341.350.431.721 merupakan pengeluaran atau pemindahbukuan yang peruntukannya dapat dirinci sebagai berikut.

- Pengembalian dana kepada PT PLN (Persero) sebesar USD61,503.42 karena PT PLN (Persero) salah setor ke rekening migas.
- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD29,310,914.41 sebagai PPh di luar migas (PPh umum) karena Wajib Pajak Salah setor ke rekening migas

k) Biaya Adminstrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

l) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD780,505,366.97 atau setara dengan Rp9.513.579.917.997 (ekivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189/USD), di dalamnya termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban kontraktual dan kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2013 sebesar USD487,924,050.51. Sedangkan, sisanya sebesar USD292,581,316.46 merupakan pendapatan tahun 2013 (pendapatan yang ditunda) dan akan dipindahbukukan pada tahun 2014 apabila telah lengkap dokumen pendukungnya.

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp343.349.686.194 dan Rp347.992.721.305. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2013	31 Desember 2012
I.	**Saldo Awal**	**347.992.721.305**	**197.960.188.008**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.071.795.758.446	1.140.282.607.387
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		-
	Total Penerimaan	**1.071.795.758.446**	**1.140.282.607.387**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi	140.057.446.839	179.196.585.210
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	79.288.896.199	72.113.825.482
	3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN	857.092.450.519	738.939.663.398
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan		-
	5. Koreksi Pembukuan debit		-
	Total Pengeluaran	**1.076.438.793.557**	**990.250.074.090**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**(4.643.035.111)**	**150.032.533.297**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)**	**343.349.686.194**	**347.992.721.305**

Penjelasan:

1. Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp79.288.896.199 adalah pembayaran kembali (reimbursement) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan perincian sebagai berikut.
   a. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2011 Rp11.179.670.765
   b. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2012 Rp52.962.826.294
   c. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2013 Rp15.146.399.140
2. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp857.092.450.519 terdiri dari :
   a. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan I Tahun 2013 Rp151.826.260.896
   b. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan II Tahun 2013 Rp64.488.974.927
   c. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan III Tahun 2013 Rp126.597.291.380
   d. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2013 Rp426.460.460.575
   e. PNBP Pertambangan Panas Bumi TA 2013 atas setoran PT PGE TW II 2013 Rp87.719.462.741
3. Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2013 sebesar Rp140.057.446.839 terdiri dari:
   a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2013 sebesar Rp125.803.910.545 (Rp124.088.221.092 + Rp1.715.689.453)
   b. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi PT Geodipa Energi TA 2010-2012 sebesar Rp14.253.536.294
4. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2013 sebesar Rp343.349.686.194 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari
   a. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp9.658.905.211
   b. Chevron Geothermal Salak, Ltd sebesar Rp63.675.288.738
   c. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp77.397.048.537
   d. Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd sebesar Rp192.618.443.708

4. Piutang PBB Migas

Penerbitan ketetapan PBB Migas tahun 2013 sebesar Rp25.114.516.216.195, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	201.424.701.560	26.095.352.528	227.520.054.088
Onshore 2013	2.632.229.617.859	96.418.975.066	2.728.648.592.925
Offshore 2012	170.062.826	711.160.054.000	711.330.116.826
Offshore 2013	7.213.696.061.830	1.874.989.343.120	9.088.685.404.950
Tubuh Bumi 2012	5.107.540.267	36.875.889.965	41.983.430.232
Tubuh Bumi 2013	12.018.268.041.412	298.080.576.032	12.316.348.617.444
Total	**22.070.896.025.754**	**3.043.620.190.711**	**25.114.516.216.465**

Ketetapan PBB Migas yang belum dilunasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.422.801.297.800, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Pemindahbukuan	Dibayar sendiri oleh KKKS	Jumlah
Onshore 2012	200.435.685.000	26.095.352.528	226.531.037.528
Onshore 2013	656.439.124.722	96.418.975.066	752.858.099.788
Offshore 2012	-	711.160.054.000	711.160.054.000
Offshore 2013	-	1.874.989.343.120	1.874.989.343.120
Tubuh Bumi 2012	-	25.978.570.122	25.978.570.122
Tubuh Bumi 2013	542.867.979.766	288.416.213.476	831.284.193.242
Total	**1.399.742.789.488**	**3.023.058.508.312**	**4.422.801.297.800**

Dari ketetapan PBB Migas (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2013 tersebut diantaranya sebanyak 37 SPPT PBB Migas onshore senilai Rp856,87 miliar yang masih harus diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan dhi. DJP dan SKK Migas terkait dengan luas wilayah kerja eksplorasi yang menjadi dasar penetepan PBB terutang. Hasil klarifikasi atas 37 SPPT adalah sebagai berikut.

a. Enam SPPT dengan ketetapan sebesar Rp105.092.312.000 telah dilakukan pembatalan secara jabatan melalui Keputusan Dirjen Pajak pada tahun 2014.
b. Dua SPPT dengan ketetapan sebesar Rp74.439.993.600 telah dilakukan pembetulan secara jabatan pada tahun 2014, sehingga berubah menjadi Rp9.610.726.
c. Dua puluh sembilan SPPT dengan ketetapan sebesar Rp677.342.504.122 masih dalam proses penelitian.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.825.803.302.678 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Keberatan	Banding/gugatan
Onshore 2012	-	-
Onshore 2013	-	-
Offshore 2012	711.160.054.000	1.927.119.976.000
Offshore 2013	1.874.989.343.120	-
Tubuh Bumi 2012	28.406.258.759	-
Tubuh Bumi 2013	284.127.670.799	-
Total	**2.898.683.326.678**	**1.927.119.976.000**

Nilai keberatan tersebut merupakan keberatan yang dilakukan oleh KKKS yang tidak melalui mekanisme pemindahbukuan. Sedangkan permohonan pengajuan banding dari Wajib Pajak telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak pada Tahun 2014 dengan putusan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Wajib Pajak tersebut.

5. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak, salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai, data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut, diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal, khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa yang dapat menangguhkan daluwarsa penagihan pajak. Tentu dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efesiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menghadapi kendala baik dari sisi eksternal maupun internal di antaranya adalah:

a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*level of taxpayers compliance*) yang masih rendah terkait kewajiban;
b. Terdapat benturan peraturan perundang-undangan (disharmonisasi regulasi) antara ketentuan penagihan pajak dengan peraturan lainnya, diantaranya hak mendahulu utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbenturan dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
c. Belum sepenuhnya diperoleh data dari berbagai pihak di luar DJP, khususnya untuk mendukung a*ssets and debtor tracing,* sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

6. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administratif, fisik, maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian dibukukan pada LKKL. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada **Daftar 37.**

7. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2013, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih aset tetap bruto sebesar Rp 33.081.313.968, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL*)	Data LBMN*)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Tanah**)	1.040.131.067.576.640	1.040.133.036.754.080	(1.969.177.440)
Peralatan dan Mesin	282.726.407.833.664	282.725.972.387.683	435.445.981
Gedung dan Bangunan***)	191.283.482.816.413	191.197.303.687.608	86.179.128.805
Jalan, Irigasi dan Jaringan	423.197.534.152.356	423.321.135.559.654	(123.601.407.298)
Aset Tetap Lainnya	38.585.499.284.602	38.658.892.020.473	(73.392.735.871)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.250.335.675.507	119.104.905.615.716	145.430.059.791
Jumlah	2.095.174.327.339.182	2.095.141.246.025.214	33.081.313.968

**) tidak termasuk aset tetap yang ada di BA BUN*

***) Jumlah Tanah tidak termasuk eliminasi sebesar Rp63.590.100.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

****) Jumlah Gedung dan Bangunan tidak termasuk eliminasi sebesar Rp5.311.446.117 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

Penjelasan selisih aset tetap:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:
   a. Selisih Tanah pada LBMN Kementerian Agama sebesar Rp2.951.709.000 karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.
   b. Selisih tanah pada LBMN Kementerian Keuangan sebesar Rp982.521.562 antara lain disebabkan perbedaan klasifikasi akun berdasarkan BLU dan Non BLU pada aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
   a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp14.163.389.249 dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.
   b. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.861.889.937 masih dalam penelusuran .
   c. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Agama sebesar Rp421.962.131 karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.
3. Gedung dan Bangunan, antara lain:
   a. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp86.789.487.104 antara lain disebabkan

perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi yang diperoleh dari unit Eselon I lain pada Kementerian Keuangan.

b. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Agama sebesar Rp236.000.001 disebabkan proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.

c. Selisih Gedung dan Bangunan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp846.358.300 dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

a. Selisih Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp19.531.292.400 disebabkan reklasifikasi menjadi piutang.

b. Selisih Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.373.866.000 masih dalam penelusuran.

5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:

a. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp86.818.274.105 antara lain disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi yang diperoleh dari unit Eselon I lain pada Kementerian Keuangan.

b. Aset Tetap Lainnya pada DPR sebesar Rp14.986.653.857 merupakan Aset Tetap Renovasi yang telah dicatat pada aplikasi SAK, sementara pada aplikasi SIMAK BMN belum dicatat.

c. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.581.656.754 masih dalam penelusuran.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

a. KDP sebesar Rp24.459.786.491 pada Kementerian Pertahanan merupakan proyek dalam pengerjaan yang dicatat pada SAKPA sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sedangkan pada SIMAK BMN dicatat sebagai Aset Tak Berwujud.

b. KDP sebesar Rp4.204.357.000 pada Kementerian Kesehatan dikarenakan tidak seluruh satker melakukan pengiriman data aplikasi SIMAK BMN.

c. KDP sebesar Rp2.715.709.000 pada Kementerian Agama karena proses penggabungan data mengalami hambatan sehingga penarikan data tidak sempurna.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2013 antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN terdapat selisih sebesar Rp18.990.019.651, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL*)	Data LBMN*)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(157.590.445.032.847)	(157.602.867.351.209)	12.422.318.362
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(52.463.855.914.974)	(52.497.437.786.697)	33.581.871.723
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(176.078.542.793.170)	(176.088.922.131.254)	10.379.338.084
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(485.244.511.723)	(447.851.003.205)	(37.393.508.518)
Jumlah	(386.618.088.252.714)	(386.637.078.272.365)	18.990.019.651

**) tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di BA BUN*

8. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah pada Tahun 2013

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau hasil penilaian kembali dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mulai melaksanakan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN.

Dalam rangka penerapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Pusat, telah diterbitkan beberapa peraturan/ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Pusat melaksanakan penyusutan aset tetap mulai pelaporan keuangan tahun 2013.

Terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal tahun 2013. Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun 2012. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, termasuk

aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP). Kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP tersebut telah dilaksanakan oleh K/L pada pelaporan keuangan tahun 2013.

Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap aset tetap yang memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data aset tetap yang tidak sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila tidak dilakukan proses normalisasi maka data aset tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan aset tetap secara memadai dan akurat. Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka K/L yang bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data aset tetap yang andal dan akurat. Nilai normalisasi (neto) data SIMAK BMN pada awal tahun 2013 adalah sebesar minus Rp2.933.021.491.377.

Penyempurnaan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP dengan menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013. Dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 dinyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP, disusutkan sejak Semester II Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP tersebut, maka satuan kerja pada K/L akan melakukan koreksi nilai penyusutan pada pelaporan keuangan tahun 2014.

Pemerintah telah melakukan perhitungan berdasarkan nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2014, dan penyusutan per 31 Desember 2013 pada LKPP Tahun 2013 (Audited) yang mengacu pada PMK Nomor 1/PMK.06/2013 dan KMK Nomor 94/KM.6/2013. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp335.470.872.398.700. Sedangkan nilai penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 berdasarkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 adalah sebesar Rp291.450.785.563.097 yang berasal dari nilai penyusutan berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 ditambah dengan nilai penyesuaian sebesar minus Rp44.020.086.835.603.

Perbandingan nilai aset tetap per 1 Januari 2013, nilai normalisasi, dan penyusutan pertama kali per 1 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 disajikan pada **Daftar 38.**

9. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.

b. Kementerian Perhubungan berupa 4 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi enam kelompok:
   - koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit;
   - koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit;
   - koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit;
   - koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit;
   - koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit; dan
   - koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit.

d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.540 meter linier.
   - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
   - Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
   - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
   - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
   - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 871 *reel*.
   - Arsip *Optical Disc* sebanyak 3.336 keping.
   - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
   - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.

f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:

- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
- Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.

h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.197 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 141 eksemplar pada tahun 2013.

i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian:
- tugu peringatan prasasti sebanyak 1 unit;
- alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4 unit; dan
- eksakta sebanyak 13 unit.

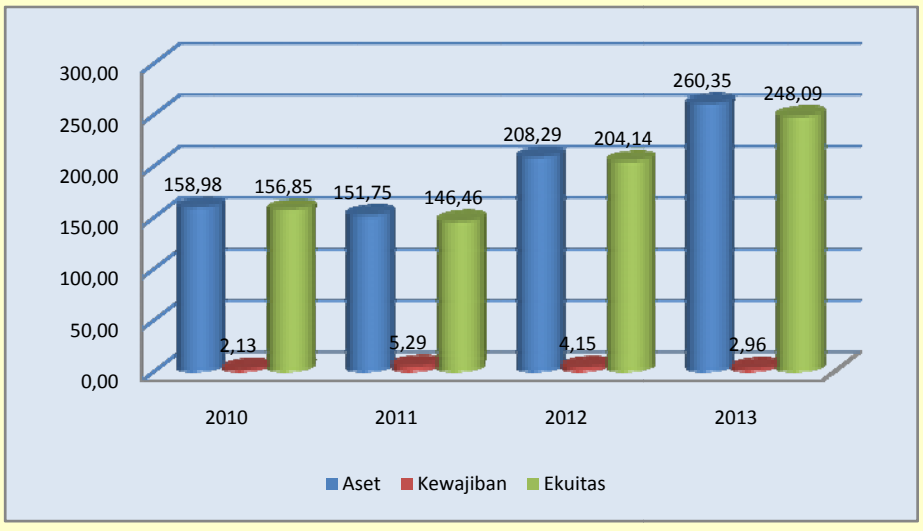
j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.

k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- tugu peringatan sebanyak 14 unit;
- bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
- monografi sebanyak 2 buah; dan
- laporan sebanyak 7 buah.

10. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 42 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010, 2011, 2012, dan Tahun 2013

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Daftar 39.**

11. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku empat tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2013, LK Likuidasi belum diterbitkan mengingat LK Penutup per 16 April 2009 belum diaudit oleh BPK. Menteri Keuangan pada bulan Februari 2014 telah menunjuk BPKP untuk mereviu LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009 sebelum diaudit oleh BPK. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*).

NERACA
BRR NAD-NIAS

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008 (*audited*)
Aset	
Aset Lancar	
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200
Uang Muka Belanja	24.546.204.400
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510
Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823
Aset Tetap	
Tanah	572.821.719.812
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802
Gedung Dan Bangunan	3.351.099.589.510
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842
Aset Lainnya	
Aset Lain-Lain	661.364.926.291
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291
Jumlah Aset	**12.079.073.627.956**
Kewajiban	-
Ekuitas Dana	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	27.212.757.110
Cadangan Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.364.926.291
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133
Jumlah Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**

12. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan I, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP Tahun 2013 dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.
Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara; dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah;
f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dari UBL, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/ Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/ Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN yang tidak menjadi PNBP, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan hibah dan sistem akuntansi hibah.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Di samping itu, Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker yang secara keseluruhan berjumlah 91 UBL, Ikhtisar laporan keuangannya disajikan dalam **Daftar 40**).

Terdapat 11 Unit Badan Lainnya yang tidak memenuhi kriteria dan karakteristik, sehingga diusulkan untuk dihapuskan pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut.

1. Menjadi Bagian Anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Informasi Geospasial
2. Tidak dibentuk dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Yayasan Pengembangan BUMN, Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna, Yayasan Gedung Arsip Nasional, Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini, Yayasan Purna Bhakti.
3. UBL dilikuidasi untuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)

4. Lembaga belum pernah dibentuk sesuai amanat peraturan untuk lembaga Koordinasi dan pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)
5. Dikelola oleh BUMN/BUMD dan tidak menggunakan dana APBN dan APBD untuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mankei

13. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pada tahun 2012, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara atas ABMA/C Hotel Makmur (dh. BAKOM PKB Kab. Belitung) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp2.544.330.000 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pada Tahun 2013, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas 3 (tiga) ABMA/C, yaitu:

1. Yayasan Pendidikan Ksatrian Semarang (YPKS) yang merupakan pelunasan atas alih penggunaan eks ABMA/C sejumlah Rp20.467.844.000 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. SD dan SMP Taman Harapan Kota Malang (dh. SD & SMP Taman Harapan) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp6.995.761.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
3. Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti (PRSD) Kediri yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp3.667.648.000 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2013, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 240 aset dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset);
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset);
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset); dan
4. Tahun 2012: 23 aset menjadi BMN, 86 aset menjadi BMD, dan 3 aset BMN dan BMD Sebagian (total 112 aset).
5. Tahun 2013: 13 aset menjadi BMN, 42 aset menjadi BMD, dan 6 aset BMN dan BMD Sebagian, dan 2 aset dilepas kepada pihak ketiga (total 63 aset).

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C s.d Tahun 2013 dapat dilihat pada **Daftar 41.**

14. PT Inalum

Berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor AG/11323/DPR-RI/X/2013 dan AG/11306/DPR-RI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, serta Nomor AG/12500/DPR RI/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, Pemerintah RI diwakili Menteri Perindustrian menandatangani *Agreement in relation to the expiry of the Master Agreement in respect of, and the transfer of shares in*, PT Indonesia Asahan Aluminium (*Termination Agreement*), pada tanggal 9 Desember 2013 di Jakarta, bersama Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. (NAA), para investor Jepang, JICA dan PT Inalum yang menyepakati bahwa Pemerintah membayar kompensasi saham NAA pada PT Inalum sebesar USD556,7 Juta. Pembayaran kompensasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013 dan diterima pihak NAA pada tanggal 19 Desember 2013. Selajutnya, pada tanggal 19 Desember 2013, telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham PT Indonesia Asahan Aluminium yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. kepada Pemerintah RI. Dengan telah beralihnya seluruh saham NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah RI. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perseroan (Persero) PT Asahan Aluminium, yang menetapkan nilai Penyertaan Modal Negara pada PT Inalum sebagai akibat peralihan saham milik NAA.

15. Aset Eks BPPN

Pada tahun 2013 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola Pemerintah merupakan pembiayaan dalam negeri non-utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pengelolaan aset pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.498.374.528.965 atau sebesar 315,45% terhadap target APBN-P 2013 sebesar Rp475.000.000.000. Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan pada dasarnya ditempuh melalui penjualan di muka umum atau lelang, pengurusan piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerahkelolaan aset kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset kredit eks BPPN sebesar Rp7.726.261.668.803 dan 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset properti dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan penelusuran terhadap selisih data dimaksud dan menyampaikan hasil penelusuran kepada BPK RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, per tanggal 31 Desember 2013 selisih data aset kredit dan properti yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 7.591 aset kredit senilai Rp3.065.098.455.943 dan sebanyak 626 aset properti senilai Rp400.289.684.384.

Pemerintah terus melakukan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti. Kerja keras pemerintah dalam menelusuri dokumen tersebut telah membawa hasil, sehingga sampai dengan saat ini selisih aset kredit yang masih harus ditelusuri tersisa menjadi Rp3,065 triliun yang meliputi aset kredit sebanyak 7.591 *account* dari semula 18.005 *account* pada tahun lalu. Sedangkan aset properti, dari semula senilai Rp1,07 triliun menjadi tersisa Rp400,2 miliar. Saat ini sebanyak 2.500 lebih *account* aset kredit sedang dimintakan konfirmasi ke Bank Indonesia dengan nilai kurang lebih Rp3 triliun. Maka jika Bank Indonesia mengkonfirmasi jumlah tersebut, nilai aset yang masih harus ditelusuri tersisa Rp65 miliar.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2012, yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

16. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas atau Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

1) tidak terdapat kemungkinan besar *(not probable)* suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah di antaranya timbul karena Pemerintah memberikan jaminan terhadap beberapa proyek infrastruktur. Rincian Jaminan pemerintah atas proyek infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Perpres Nomor 91/2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan.
b. Berdasarkan Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali kredit

investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen) yang selanjutnya menjadi beban PDAM, dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.

c. Berdasarkan Perpres Nomor 78/2010, Pemerintah memberikan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui badan usaha Penjaminan Infrastruktur. Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

Karakteristik kewajiban kontinjensi Pemerintah pada proyek infrastruktur di atas akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero), PDAM, dan PJPK) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan dari PT PLN (Persero) PDAM, dan PJPK. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas jaminan yang diberikan belum dapat diukur secara pasti. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) PDAM, dan PJPK kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Sampai dengan akhir TA 2013 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut.

- Dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara adalah sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36.216.962.894.355 dan USD3,958,718,574.
- Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 5 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 5 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Lombok Timur, Kota Malang dan Kota Banjarmasin) dengan nilai total jaminan Pemerintah sebesar Rp205.161.000.000.
- Sedangkan untuk program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, telah diterbitkan 1 Surat Jaminan untuk proyek Central Java Power Plant (PT. PLN sebagai PJPK) dengan nilai proyek sebesar ± USD3,2 miliar.

Pada tahun 2013 telah dialokasikan Anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah sebesar Rp706.035.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Program	*Exposure*	x	*Probability Default*	x	(100 %	-	*Recovery Rate*)	=	*Expected Loss*
Penjaminan PT PLN	Rp53.615 miliar	x	1.14%	x	(100 %	-	0 %)	=	611,21 miliar *
Penjaminan PDAM	Rp205,1 miliar	x	16.98 %	x	(100 %	-	0 %)	=	34,82 miliar **
Penjaminan KPS	Rp5.247 miliar	x	1.14 %	x	(100 %	-	0 %)	=	59,81 miliar ***

* kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp53.615 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp611,21 miliar. Sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT. PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA 2013 adalah sebesar Rp611,21 miliar.

** kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp205 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp34,82 miliar, sehingga alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp35 Miliar.

*** kewajiban penjaminan Pemerintah kepada badan usaha pada proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp5.247 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp59,81 miliar, sehingga alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program penjaminan KPS dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp59.82 Miliar.

Selain proyek infrastruktur di atas, pada tahun 2013 Pemerintah juga telah menerbitkan surat jaminan Pemerintah untuk proyek PLTU Jawa Tengah dan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Penandatanganan perjanjian penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 melalui penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *amount*

sharing, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 Miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Proyek PLTU Jawa Tengah memiliki kapasitas 2 x 1.000 MW, merupakan salah satu *project showcase* infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPS. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitar Rp30 Triliun. Dalam hal PT PLN (sebagai PJPK Proyek PLTU Jawa tengah) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*payment default*) kepada badan usaha, Pemerintah dan PT PII (selaku penjamin) akan membayar kewajiban kepada badan usaha sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Kewajiban kontinjensi Pemerintah juga timbul dari Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht* pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.900.000.000 berupa tuntutan pembayaran PT. Andihema Perdana atas pengadaan pupuk *Rock Phospate* kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Kewajiban Kontinjensi pemerintah pada tahun 2013 juga timbul karena penyaluran Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program. Kewajiban Kontinjensi yang timbul karena penyaluran subsidi non energi tersebut adalah sebesar Rp15.131.785.896.283 yang terdiri dari Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk sebesar Rp13.596.752.979.516 dan Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp1.535.032.916.767. Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Subsidi Pupuk
   Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.596.752.979.516. Kewajiban kontinjensi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk TA 2012 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2012 pada 5 (lima) produsen pupuk	6.637.127.697.934
Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2013 pada 5 (lima) produsen pupuk	7.272.607.937.582
Jumlah Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk	**13.909.735.635.516**
Pengakuan Utang Subsidi Pupuk dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Sisa Pagu Anggaran Subsidi Pupuk TA 2013	312.982.656.000
Jumlah Kewajiban Kontinjensi Subsidi Pupuk per 31 Desember 2013	**13.596.752.979.516**

2) Subsidi Bunga Kredit Program
   Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.535.032.916.767. Kewajiban kontinjensi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Nilai tagihan dari Bank Pelaksanadan Perusahaan Penjamin atas Subsidi Bunga Kredit Program TA 2013	1.595.709.148.875
Pengakuan Utang Subsidi Bunga Kredit Program dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Sisa Pagu Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program TA 2013	60.676.232.108
Jumlah Kewajiban Kontinjensi Subsidi Bunga Kredit Program per 31 Desember 2013	**1.535.032.916.767**

17. BMN *Idle* (*Idle Asset*)

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara, pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menerbitkan Sebagai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

BMN *idle* (*idle asset*) merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh *idle asset* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pada tahun 2013, saldo awal BMN *idle* per tanggal 1 Januari 2013 adalah nihil. Terdapat mutasi tambah atas BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang dalam hal ini KPKNL senilai Rp16.004.511.220 (Nilai sebelum penyusutan).

Rincian BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang per KPKNL pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Bentuk Aset *idle*	Jumlah	Nilai Rupiah	KPKNL
Tanah	1.119 m2	Rp6.714.000.000	KPKNL Surabaya
Tanah	6.595 m2	Rp3.300.122.000	KPKNL Jember
Tanah	6.032 m2	Rp2.401.680.000	KPKNL Jayapura
Total Tanah	**13.746 m2**	**Rp12.415.802.000**	
Gedung dan Bangunan	4 unit	Rp395.252.528	KPKNL Semarang
Gedung dan Bangunan	1 unit	Rp483.400.000	KPKNL Bandung
Gedung dan Bangunan	3 unit	Rp351.873.000	KPKNL Surabaya
Gedung dan Bangunan	24 unit	Rp1.536.962.000	KPKNL Jember
Gedung dan Bangunan	7 unit	Rp821.221.692	KPKNL Jayapura
Total Gedung dan Bangunan	**39**	**Rp3.588.709.200**	

Pengguna Barang yang telah menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah penetapan status penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan BMN tersebut; dan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN *idle*. Pengelolaan BMN *Idle* akan berimplikasi pada pendapatan dan belanja. Untuk pendapatan diperoleh dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN *idle* yang berada di Pengelola Barang (Tahun 2013, tidak terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN *idle*). Sedangkan belanja akan timbul untuk pemeliharaan dan pengamanan aset tersebut (Tahun 2013 tidak terdapat realisasi belanja (nihil) karena belum ada BMN *idle* yang harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanan).

18. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola "*fixed payment and fixed term*", dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*. Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan Sewa Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2003-2012 senilai total Rp2.738.233.545.596. Beban sewa BMN tersebut dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah karena belum dilakukan pembayaran sewa oleh PT Pertamina.

Penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara belum dapat dilakukan karena belum ditandatanganinya Perjanjian Sewa, saat ini terkendala menunggu kesepahaman dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai kepastian objek sewa dan besaran *cost recovery*.

Pemanfaatan Kilang LNG Arun Untuk Terminal Regasifikasi

Dalam rangka revitalisasi industri di Aceh, PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat Nomor 225/L00000/2011-S0 tanggal 23 Mei 2011 hal Kajian Ekonomi Pemanfaatan Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek Revitalisasi Industri Aceh, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sewa aktiva kilang LNG Arun yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatan lainnya, untuk digunakan sebagai Terminal Regasifikasi LNG. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-314/MK.6/2011 tanggal 9 September 2011 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek LNG *Receiving and Regasification Terminal* dan surat Nomor S–554/MK.6/2011 tanggal 30 Desember 2011, telah disampaikan persetujuan Pemerintah atas rencana pelaksanaan sewa aktiva kilang LNG Arun untuk Terminal Regasifikasi LNG oleh PT Pertamina, dengan nilai sewa (tidak termasuk pajak) sebesar Rp188.700.000.000 untuk jangka waktu lima tahun. Penandatangan Naskah Perjanjian Sewa saat ini belum dapat dilakukan karena menunggu kepastian Kementerian ESDM mengenai alokasi dan distribusi pasokan gas untuk kebutuhan industri di Aceh dan Sumatera Utara.

Pemanfaatan Aset oleh *Jakarta International School*

Head of Jakarta International School (JIS) dalam suratnya tanggal 12 Februari 2010 menyampaikan permohonan sewa tanah di Jalan Terogong Raya Nomor 33, Cilandak dengan usulan tarif untuk 5 tahun sebesar Rp23.655.056.765.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-341/MK.06/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa Antara Menteri Keuangan Dan Jakarta International School, disampaikan bahwa sesuai ketentuan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, nilai sewa minimum tanah per tahun adalah sebesar Rp23.655.056.765. sehingga permohonan JIS tersebut belum dapat disetujui.Setelah itu, melalui surat Head of JIS tanggal 4 Oktober 2011 hal Penindaklanjutan dari Notulen Rapat pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2011 Di Jakarta International School, menyampaikan permohonan sewa dengan usulan tarif sebesar 50% dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, melalui surat Head of JIS tanggal 22 Mei 2012 hal *Lease of the Cilandak Campus* menyampaikan kesediaan untuk membayar sewa sebesar 100% dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 dan untuk periode sewa mulai 1 Maret 2012s.d.29 Februari 2017, akan dilakukan secara tahunan dengan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-533/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, telah disampaikan persetujuan sewa tanah oleh JIS periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 (46 bulan) dengan nilai sewa sebesar Rp90.677.717.599.

Untuk itu, pihak JIS telah melakukan penyetoran uang untuk sewa periode 1 Mei 2008 s.d. 29 Februari 2012 ke Rekening Kas Umum Negara, sebagai berikut.

1. penyetoran uang sewa sebesar Rp45.338.858.800 pada tanggal 14 Desember 2012; dan
2. penyetoran uang sewa sebesar Rp11.334.714.700 pada tanggal 19 Maret 2013.

Selanjutnya, untuk perpanjangan sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-150/MK.6/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terogong 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 28 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.536.668.524, dan selanjutnya telah ditandatangani Perjanjian Sewa antara DJKN dan Head of JIS sebagaimana Perjanjian Sewa Nomor PRJ–01/KN/2013 tanggal 23 Mei 2013. Pihak Jakarta International School sebelumnya telah melakukan pembayaran tagihan sewa sebesar Rp20.536.668.524 pada tanggal 20 Mei 2013. Untuk perpanjangan sewa selanjutnya, Head of JIS dalam suratnya tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa periode 1 Maret 2013-28 Februari 2018 (5 tahun). Saat ini sedang dalam pemrosesan pemberian persetujuan sewa.

19. Penjelasan atas Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sehubungan dengan perubahan dan perpindahan pengeluaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka pengelolaan program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan berakhir di akhir tahun 2013. Terdapat klaim yang terkait dengan program Jamkesmas sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.984.471.025.763 yang berupa klaim pelayanan Jamkesmas pada Rumah Sakit sesuai dengan surat BPKP nomor: S-100/D2/01/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Atensi atas Perhitungan Sementara Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas Tahun 2013. Klaim Jamkesmas yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Independen adalah sebesar Rp1.484.337.196.108 dan telah diakui sebagai utang di Kementerian Kesehatan. Pembayaran kewajiban tersebut akan dibebankan pada APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN)

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir kali diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain (jika ada). Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di

dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerja sama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, bahwa ketentuan atas setiap tahun berjalan sebesar 70% dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina dan 30% dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli telah dihapuskan. Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk tahun buku 2013.

Posisi saldo dana Program Kemitraan per 31 Desember 2013 berupa posisi *outstanding* pinjaman Program dan Saldo Akhir Program Kemitraan, dengan rincian sebagai berikut.

a. Posisi *Outstanding* Pinjaman Program Kemitraan pada Mitra Binaan per 31 Desember 2013:

No	Uraian	Rupiah	Jumlah Mitra Binaan
1	Lancar	2.870.747.463.000	292.708
2	Kurang Lancar	483.267.107.000	36.865
3	Diragukan	222.363.165.000	14.037
4	Macet	1.689.705.965.000	151.503
5	Bermasalah	952.471.989.000	97.063
Jumlah		**6.218.555.689.000**	**592.176**

Penjelasan mengenai penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut.

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Piutang Bermasalah adalah pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, yang dikelompokkan dalam aktiva lain-lain.

b. Saldo dana Program Kemitraan yang ada pada BUMN per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.985.476.110.000.

Sedangkan posisi saldo dana Program Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.275.612.142.250 dengan rincian sebagai berikut.

a. Saldo dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina sebesar Rp807.735.348.000.

b. Saldo dana Program Bina Lingkungan BUMN Peduli sebesar RP467.876.794.250 yang terdiri dari saldo BL Peduli 8 Sektor sebesar Rp189.576.432.832, saldo BL Peduli pelimpahan sebesar Rp223.698.595.322, dan saldo BL Peduli Lain-lain sebesar Rp54.601.766.096.

21. Peralihan BP MIGAS menjadi SKK MIGAS

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, BP MIGAS dibatalkan status hukumnya, sehingga BP MIGAS secara hukum tidak ada lagi.

Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha hulu migas diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan

Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang migas sampai diterbitkannya peraturan yang baru.

Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat NomorS-834/MK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Pendanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun 2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.

Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan fungsi BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pengelolaan dana dan memperoleh dana operasional menggunakan mekanisme yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

22. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Selain yang telah dialokasikan Pada TA 2012 untuk persiapan pendirian OJK dialokasikan pada APBN sebesar Rp212.031.418.000, pada TA 2013 dialokasikan sebesar Rp1.645.293.987.000 di Bagian Anggaran 999.08.

23. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2012

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 dan menyampaikannya kepada BPK. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak lanjut dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada **Daftar 42.**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

D.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2013 sebesar Rp71,27 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1Januari 2013 adalah sebesar Rp71.269.038.227.212, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2012 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2013. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2012 sebesar Rp108.148.066.032.256, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp36.879.027.805.044 yang disebabkan antara lain oleh penurunan Kas dari Aktivitas Operasi dan penggunaan SAL selama tahun 2013.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU:		
Kas BUN di BI	37.382.696.367.039	82.453.918.298.407
Kas di KPPN	16.207.882.323.813	11.870.556.947.661
Kas pada BLU yang telah disahkan	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	656.246.733.463	429.120.562.354
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian	**71.578.340.493.780**	**107.842.612.387.387**
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU*)	24.491.001.778	185.511.299.379
Penyesuaian Saldo Awal KPPN**)	(333.191.751.036)	119.938.389.009
Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah***)	(601.517.310)	3.956.481
Total Penyesuaian Saldo Awal	**(309.302.266.568)**	**305.453.644.869**
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	**71.269.038.227.212**	**108.148.066.032.256**

Keterangan:

*) Penyesuaian saldo awal Kas BLU adalah perubahan saldo awal kas BLU Tahun 2013 dibandingkan saldo akhir Tahun 2012 melalui Memo Penyesuaian, yaitu perubahan kas BLU yang disebabkan adanya koreksi atas pendapatan dan belanja yang telah disahkan pada Tahun 2012, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Pekanbaru	(98.822.199)
KPPN Jakarta 1	12.465.808.207
KPPN Jakarta 2	(210.576.250)
KPPN Serang	(329.336.010)
KPPN Bandung 1	2.860.459.503
KPPN Yogyakarta	(12.323.408.186)
KPPN Gorontalo	(1.122.536.126)
KPPN Palu	7.379.984.985
KPPN Jakarta 3	10.703.964.667
KPPN Tangerang	1.377.181.722
KPPN Malang	3.788.281.465
Total	**24.491.001.778**

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp333.191.751.036 merupakan penyesuaian atas Kas di KPPN yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Sukabumi	(3.000.000)
KPPN Bondowoso	597.934
KPPN Waingapu	3

KPPN Atambua	(5)
KPPN Palopo	17.015.747
KPPN Sorong	580.248.081
KPPN Tapaktuan	932.702
KPPN Pontianak	132.213
KPPN Manado	(2)
KPPN Jayapura	45.196.218
Transaksi Penerimaan Negara	(24)
KPPN 999 BUN	(333.832.873.903)
Total	**(333.191.751.036)**

Koreksi saldo awal kas di KPPN (K/L dari Hibah Langsung, kas Bank Tunggal, kas Bank Operasional, Kas Bank Persepsi, Kas Pos dan lain-lain) sebagai berikut:

1) KPPN Sukabumi

   Kesalahan pencatatan penerimaan Kiriman Uang dari RPK BUN P ke BO I sebesar Rp334.304.450 seharusnya Rp331.304.450.

2) KPPN Bondowoso

   Penyesuaian saldo awal pada bank persepsi BRI (201) lebih limpah Rp780.000; Bank Jatim (203) kurang limpah Rp182.067; PT Pos Bondowoso (311) lebih limpah Rp1.

   KPPN Waingapu

   Penyesuaian kas atas kekurangan limpah SGG Giro Pos sebesar Rp3 tanggal 1 Maret 2011 yang telah dilimpahkan pada tahun 2012 sehingga mempengaruhi saldo awal kas tahun 2012. Penjelasan pada surat Kepala KPPN Waingapu tanggal 10 Desember 2013 Nomor : S-2750/WPB.23/KP.06/2013.

3) KPPN Atambua

   Koreksi terhadap kesalahan pembukuan kelebihan limpah pada akhir tahun 2012.

4) KPPN Palopo

   Penambahan data LHP 70 transaksi sebanyak 70 SSP sebesar Rp17.015.747

5) KPPN Sorong

   Penyesuaian terhadap Kas dalam Transito yang dibukukan manual pada penyusunan LKBUN tahun 2012 terhadap pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB yang belum diterima pada BO III sebesar Rp360.137; penyesuaian kas akibat keterlambatan penerimaan pelimpahan dari BRI ke BI sebesar Rp580.608.218

6) KPPN Tapaktuan

   Terdapat koreksi atas kekurangan catat pendapatan anggaran lain-lain akhir tahun 2012 akibat lebih limpah dari bank BO III PT. BRI Blangpidie

7) KPPN Pontianak

   Koreksi saldo awal bank persepsi sesuai surat Direktur APK No S-7135/PB.6/2013 tanggal 30 Oktober 2013

8) KPPN Manado

   Koreksi atas pembulatan transaksi kiriman uang dari BO III ke Bank Indonesia

9) KPPN Jayapura

   Jurnal Koreksi Pembukuan terhadap selisih pembukuan antara KPPN dengan Rekening Koran

10) Penyesuaian saldo awal pada KPPN 999 BUN Pusat sebesar minus Rp333.832.873.903 merupakan koreksi atas deposit in transit tahun 2012 yang menambah saldo akhir kas BUN di BI tahun 2012.

***)Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah sebesar minus Rp601.517.310 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN setempat, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Pekanbaru	(254.260.000)
KPPN Bandung 1	(680)
KPPN Jakarta VI (Khusus)	(347.256.630)
Total	**(601.517.310)**

1) KPPN Pekanbaru

   Terdapat koreksi pengesahan Pendapatan Hibah TAYL

2) KPPN Bandung 1

Koreksi kesalahan akun Pendapatan Lain-Lain tercatat sebagai Pendapatan Hibah

3) KPPN Jakarta Khusus Penerimaan dan Hibah

Koreksi terhadap kesalahan pengesahan Pendapatan Hibah TAYL

D.1.2. PERUBAHAN KAS

KenaikanKas padaTA 2013 sebesar minus Rp3,56 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2013dan TA 2012adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(31.315.578.643.473)	(8.874.066.987.571)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(180.357.079.211.868)	(144.426.528.430.465)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	237.394.577.321.194	175.158.168.320.375
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	105.939.109.944	(1.501.462.900.166)
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(30.000.000.000.000)	(56.170.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	607.785.913.680	(755.835.540.649)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**(3.564.355.510.523)**	**(36.569.725.538.476)**

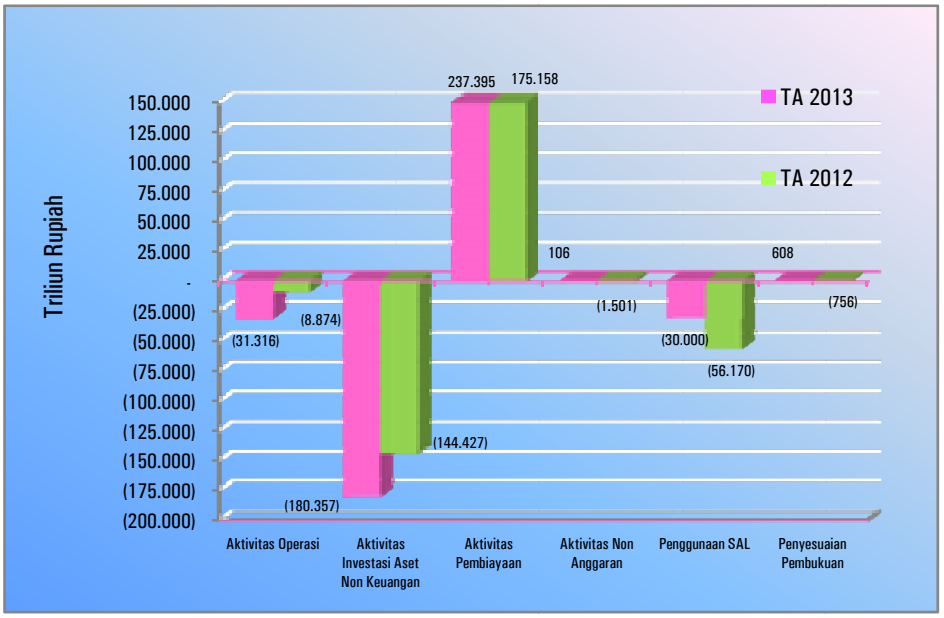
*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan yang disajikan pada aktivitas pembiayaan.

**)Penyesuaian Pembukuan TA 2013 sebesar Rp607.785.913.680, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
Koreksi Kas Hibah Langsung	(518.471.983)	Pembukuan terhadap penyetoran dana hibah Tahun Anggaran Yang Lalu yang disetorkan ke kas Negara (Bank Persepsi) pada tahun berjalan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain. Koreksi ini dilakukan untuk mengurangi nilai Kas di KL dari Hibah Langsung dan Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung). Dilaksanakan sesuai surat Direktur APK tanggal 18 Oktober 2013 Nomor S-6860/PB.6/2013, Surat tanggal 19 Desember 2013 Nomor S-9217/PB.6/2013 dan surat tanggal 17 Januari 2014 Nomor S-335/PB.6/2014.
Koreksi Pendapatan TA yang lalu	(599.245.989.874)	SPM/SP2D pengembalian PNBP TAYL yang dibayarkan melalui SPM Subdit RKN dan SP2D KPPN Jakarta II.
Koreksi pendapatan hibahTA yang lalu	(45.505.898.699)	koreksi atas pendapatan hibah TAYL Subdit RPH sebesar Rp45.505.898.699
Selisih kurs belum terealisasi	56.980.571.807	Selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp36.973.629.874 pada subdit RKUN dan subdit RPH sebesar Rp192.954.201.738; selisih kurs belum terealisasi pengembalian dana talangan rekening migas sebesar minus Rp99.000.000.000..
Penyesuaian selisih kurs	1.198.523.336.037	Penyesuaian SiLPA terkait pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-61/PB/2013
Koreksi Kas di bendahara pengeluaran	(2.447.633.550)	Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran

		untuk mencatat setoran pengembalian UP yang disetor pada Bank Persepsi bukan mitra kerja KPPN yang bersangkutan dan koreksi atas kesalahan penggunaan akun penerimaan/pengeluaran transito
Koreksi Pembulatan	(58)	Koreksi pembulatan : perhitungan angka yang terdiri lebih dari 15 digit (ribuan triliun) pada program Excel akan dibulatkan, sehingga menyebabkan perbedaan pada perhitungan akhir khususnya pada nilai satuan dan puluhan.
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**607.785.913.680**	

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 42.



Grafik 42: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp83,41 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp83.406.192.483.606, merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya. Dibandingkan dengan TA 2012, terdapat penurunan Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2013 sebesar Rp6.836.331.972.030. Penurunan Saldo Akhir Kas dan Bank ini disebabkan oleh besarnya Penurunan Kas dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	67.704.682.716.689	71.578.340.493.780
Rekening Pemerintah Lainnya	9.999.484.261.911	13.495.665.498.448
Kas di Bendahara Pengeluaran	342.891.820.960	213.458.829.221
Kas di Bendahara Penerimaan	225.839.936.566	196.150.458.978
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	6.248.372.302.671	5.447.004.782.640
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	70.046.094.641	80.029.529.762
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(1.182.306.983.395)	(768.125.137.193)
Jumlah Saldo Akhir Kas	**83.409.010.150.043**	**90.242.524.455.636**

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Rekening Kas BUN di BI	43.737.911.964.052	37.382.696.367.039
Rekening Kas di KPPN	2.666.720.204.356	16.207.882.323.813
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	1.114.849.200.667	656.246.733.463
Jumlah	**67.704.682.716.689**	**71.578.340.493.780**

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2013 sebesar Rp20.185.201.347.614 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp1.182.306.983.395 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.248.372.302.671 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.363.221.503.338 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp1.114.849.200.667.

***) Kas pada BLU sebesar Rp70.046.094.641 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Total Kas pada BLU menurut K/L	19.072.940.458.860	16.643.419.462.034
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	1.182.306.983.395	768.125.137.193
	20.255.247.442.255	17.411.544.599.227
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	**70.046.094.641**	**80.029.529.762**

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp20.185.201.347.614 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Saldo awal BLU	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	24.491.001.778	235.511.299.379
Pendapatan BLU	24.648.239.915.152	21.704.295.961.034
Belanja Barang BLU	(16.673.608.901.933)	(15.564.506.260.345)
Belanja Modal BLU	(2.144.953.167.012)	(2.082.802.509.568)
Pemindahbukuan Rek Kas BLU ke Bank Persepsi	(3.000.000.000.000)	(50.000.000.000)
Koreksi kas BLU	(482.569.836)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	**20.185.201.347.614**	**17.331.515.069.465**

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun2013 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp31,32 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember2013. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp31.315.578.643.473, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Arus Kas Masuk	1.436.403.062.653.687	1.336.338.396.928.787
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.467.718.641.297.160	1.345.212.463.916.358
Arus Kas Bersih	**(31.315.578.643.473)**	**(8.874.066.987.571)**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi

pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2013 sebesar minus Rp31.315.578.643.473 menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2013 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2012, terdapat penurunan arus kas bersih sebesarRp22.441.511.655.902.

D.2.1.Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.077,31triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2013 sebesar Rp1.077.306.679.558.272 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.029.850.063.303.271 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp47.456.616.255.001. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2013 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	506.442.796.872.651	465.069.641.549.059
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	384.713.518.912.993	337.584.577.488.285
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282
Cukai	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457
Pajak Lainnya	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355
Jumlah Penerimaan Pajak DN	**1.029.850.063.303.271**	**930.861.839.509.438**
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.044.419
Bea Keluar	15.835.366.230.277	21.237.934.765.462
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**47.456.616.255.001**	**49.656.293.809.881**
Penerimaan Perpajakan	**1.077.306.679.558.272**	**980.518.133.319.319**

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2013 lebih besar Rp96.788.546.238.954 atau 9,87 persen dibandingkan Penerimaan Perpajakan dalam TA 2012.

D.2.1.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebesar Rp506,44 triliun

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2013 adalah sebesar Rp506.442.796.872.651 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2013 dan TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	32.363.301.224.444	32.976.020.386.273
PPh Gas Alam	56.384.134.954.761	50.484.720.419.499
PPh Migas Lainnya	12.229.088	127.195.529
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	3.886.193.422.937	3.665.260.413.269
Jumlah PPh Migas	**92.633.641.831.230**	**87.126.128.414.570**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	90.162.275.144.909	79.599.440.782.334
PPh Pasal 22	6.837.153.122.927	5.506.854.819.126

PPh Pasal 22 Impor	36.332.464.974.534	31.610.164.408.871
PPh Pasal 23	22.207.243.817.727	20.302.691.144.663
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4.383.412.280.039	3.763.462.234.949
PPh Pasal 25/29 Badan	154.294.874.300.998	152.131.951.580.030
PPh Pasal 26	27.983.972.009.476	24.610.565.469.335
PPh Final dan Fiskal LN	71.570.842.143.275	60.387.050.055.016
PPh Non Migas Lainnya	36.917.247.536	31.332.640.165
Jumlah PPh Non Migas	**413.809.155.041.421**	**377.943.513.134.489**
Jumlah Pajak Penghasilan	**506.442.796.872.651**	**465.069.641.549.059**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2013 lebih besar Rp41.373.155.323.593 atau 8,90 persen dibandingkan penerimaan Pajak Penghasilan TA 2012.

D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

PPN dan PPnBM sebesar Rp384,71 triliun

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN &PPnBM) untuk TA 2013 adalah sebesar Rp384.713.518.912.993. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	238.309.752.684.913	202.365.564.710.548
PPN dan PPnBM Impor	146.270.495.713.343	135.032.893.134.371
PPN dan PPnBM lainnya	133.270.514.737	186.119.643.366
Jumlah PPN dan PPnBM	**384.713.518.912.993**	**337.584.577.488.285**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2013 lebih besar Rp47.128.941.424.708 atau 13,96 persen dari TA 2012.

D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan PBB sebesar Rp25,30 triliun

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2013 adalah sebesar Rp25.304.582.771.965. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
PBB Pedesaan	750.059.903.382	1.144.421.183.966
PBB Perkotaan	1.366.288.386.715	6.104.099.730.681
PBB Perkebunan	1.323.543.592.844	1.107.246.997.455
PBB Kehutanan	293.834.940.779	254.533.056.441
PBB Pertambangan	630.195.395.934	565.247.025.160
PBB Migas	20.940.660.552.311	19.793.314.708.579
Jumlah PBB (Neto)	**25.304.582.771.965**	**28.968.862.702.282**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2013 lebih kecil Rp3.664.279.930.317 atau 12,65 persen dari TA 2012.

D.2.1.4. Cukai

Penerimaan cukai sebesar Rp108,45 trilun

Penerimaan Cukai pada TA 2013 adalah sebesar Rp108.452.081.324.579, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Cukai Hasil Tembakau	103.560.193.054.883	90.553.638.824.974
Cukai Ethyl Alkohol	159.091.509.515	155.581.715.856
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	4.688.176.497.000	4.292.843.125.012
Denda Administrasi Cukai	32.495.144.662	17.154.851.382
Cukai Lainnya	12.125.118.519	8.662.704.233
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	**108.452.081.324.579**	**95.027.881.221.457**

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2013 lebih besar Rp13.424.200.103.122 atau 14,13 persen dari Penerimaan Cukai TA 2012.

D.2.1.5. Pajak Lainnya

Penrimaan Pajak Lainnya sebesar Rp4,94 triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2013 adalah sebesar Rp4.937.083.421.083. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penjualan Benda dan Bea Materai	4.269.589.801.257	3.876.648.878.412
Pendapatan PPn Batubara	345.029.515.313	769.733
Pajak Tidak Langsung	1.346.272.042	3.100.248.029
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	119.031.157.245	184.769.886.516
- Bunga Penagihan PPN	198.018.393.454	143.785.207.687
- Bunga Penagihan PPnBM	3.988.555.918	1.698.098.995
- Bunga Penagihan PTLL	79.725.854	873.458.983
Jumlah Pajak Lainnya	**4.937.083.421.083**	**4.210.876.548.355**

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2013 lebih besar Rp726.206.872.728 atau 17,25 persen dari TA 2012.

D.2.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp47,46 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2013 adalah sebesar Rp47.456.616.255.001, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp31.621.250.024.724 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp15.835.366.230.277. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Bea Masuk		
Bea Masuk	29.560.105.914.820	26.708.523.995.738
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	289.294.159	25.634.038
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	685.359.813.314	465.920.844.465
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.148.308.923.167	1.076.608.593.685
Denda atas sanksi administrasi	25.000.000	(16.070.653)
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah	191.572.181.000	99.813.751.137
Pabean Lainnya	35.588.898.264	67.482.296.009
Jumlah Bea Masuk	**31.621.250.024.724**	**28.418.359.044.419**
Bea Keluar	**15.835.366.230.277**	**21.237.934.765.462**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**47.456.616.255.001**	**49.656.293.809.881**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2013 lebih kecil Rp2.199.677.554.880 atau 4,43 persen dari TA 2012.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan PNBP sebesar Rp354,56 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2013 adalah sebesar Rp354.562.504.889.349, yang berarti lebih besar Rp2.883.943.098.859 atau 0,82 persen dari TA 2012 sebesar Rp351.678.561.790.490.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA sebesar Rp226,41triliun

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2013 adalah sebesar Rp226.406.189.261.540. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	135.329.234.847.290	144.717.087.022.468
Pendapatan Gas Alam	68.300.185.200.293	61.106.427.615.761
Pendapatan Pertambangan Umum	18.620.492.963.389	15.877.387.816.604
Pendapatan Kehutanan	3.060.373.940.552	3.188.338.362.520
Pendapatan Perikanan	229.350.562.720	215.766.602.000
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.551.747.296	738.966.044.398
Jumlah Penerimaan SDA	**226.406.189.261.540**	**225.843.973.463.751**

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2013 lebih besar Rp562.215.797.789 atau 0,25 persen dari TA 2012.

D.2..2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp34,03 triliun

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2013 adalah sebesar Rp34.025.604.050.274, yang berarti lebih besar Rp3.227.631.332.604 atau 10,48 persen dari TA 2012 sebesar Rp30.797.972.717.670.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp69,48 triliun

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2013 adalah sebesar Rp69.482.471.662.383. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	10.348.855.443.833	9.792.221.299.572
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.461.844.460.369	13.063.747.762.645
Pendapatan Sewa	291.228.758.879	271.221.959.766
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	33.556.178.476	-
Pendapatan Jasa I	19.036.310.373.473	16.145.943.608.009
Pendapatan Jasa II	1.369.732.058.143	1.356.307.953.239
Pendapatan Jasa Luar Negeri	564.917.113.293	505.878.388.074
Pendapatan Jasa Perbankan	567.548.510	294.417.442
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.751.039.444.796	4.417.901.930.174
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.509.309.765.336	3.378.471.363.288
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	213.053.134.699	193.326.847.706
Pendapatan Jasa Kepolisian II	131.425.870.986	122.939.850.129
Pendapatan Jasa Lainnya	150.766.900.520	86.888.365.688

Pendapatan Bunga	2.157.055.147.430	3.370.659.392.659
Pendapatan Gain On Bond Redemption	260.000.000	-
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.712.015.999.000	8.297.301.019.952
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	278.486.542.196	251.243.211.606
Pendapatan Pendidikan	2.287.742.131.383	2.375.603.736.186
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.930.683.217	158.144.829.032
Pendapatan Iuran dan Denda	1.398.128.607.728	1.459.529.823.727
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	5.201.515.618.841	4.661.015.950.737
Pendapatan Pelunasan Piutang	315.675.651.865	54.165.965.036
Pendapatan dari Penutupan Rekening	93.362.764.134	56.455.641.949
Pendapatan Selisih Kurs	1.770.265.769.281	2.091.891.225.681
Pendapatan Lain-lain	1.126.425.695.995	1.221.165.105.737
Jumlah PNBP Lainnya	**69.482.471.662.383**	**73.332.319.648.035**

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2013 lebih kecil Rp3.849.847.985.651 atau 5,25 persen dari TA 2012.

D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan BLU sebesar Rp24,65 triliun

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2013 adalah sebesar Rp24.648.239.915.152, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum	21.704.391.604.873	19.471.851.778.837
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	108.230.165.667	83.863.755.868
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.339.038.388.726	1.081.392.058.923
Pendapatan BLU Lainnya	1.496.579.755.886	1.067.188.367.406
Jumlah Penerimaan BLU	**24.648.239.915.152**	**21.704.295.961.034**

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2013 lebih besar Rp2.943.943.954.118 atau 13,56 persen dari TA 2012.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah sebesar Rp4,53 triliun

Penerimaan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp4.533.878.206.066. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya.
Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	1.694.593.930	2.639.167.850
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	125.229.823.031	137.005.740.382
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah daerah	1.056.935.885.195	394.172.180.379
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	5.076.150.000	-
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**1.188.936.452.156**	**533.817.088.611**
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	143.794.500
Hibah Luar Negeri – Bilateral	834.963.018.773	816.147.401.739
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.151.978.658.565	1.943.618.224.054
Hibah Luar Negeri Lainnya	101.246.491	16.459.947.530
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	177.934.000	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	313.994.295.486	88.737.200.479
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	989.733.078.584	708.306.049.484
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	53.993.522.011	34.472.112.582
Jumlah Hibah Luar Negeri	**3.344.941.753.910**	**3.607.884.730.368**
Jumlah Hibah	**4.533.878.206.066**	**4.141.701.818.979**

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2013 lebih besar Rp392.176.387.087 atau 9,47 persen dari TA 2012.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp221,69 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luarnegeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2013 adalah sebesar Rp221.687.976.872.374, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	62.559.867.616.768	55.875.093.305.816
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	46.479.411.957.065	44.484.734.109.218
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	696.117.985.588	724.259.524.906
Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888	822.268.259.230
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	290.025.917.126	264.003.728.588
Belanja Honorarium	1.849.645.392.876	1.388.355.153.950
Belanja Lembur	671.454.854.543	652.171.223.179
Belanja Vakasi	274.929.984.523	231.246.787.842
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.353.168.742.159	23.491.121.774.105
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	78.461.940.882.847	67.280.131.264.944
Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.143.068.089	2.482.037.544.996
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	164.234.852.000
Total Belanja Pegawai	**221.687.976.872.374**	**197.859.657.528.774**

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2013 mengalami kenaikan Rp23.828.319.343.600 Atau 12,04 persen dibandingkan TA 2012.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp167,91 triliun

Belanja Barang pada TA 2013 adalah sebesar Rp167.911.005.354.943 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Belanja Barang	77.832.230.968.636	68.038.279.672.480
Belanja Jasa	21.112.795.448.644	17.708.110.520.974
Belanja Pemeliharaan	13.181.035.547.365	10.964.286.080.027
Belanja Perjalanan	26.539.140.306.676	19.682.831.758.052
Belanja Barang BLU	16.673.608.901.933	15.564.506.260.345
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	12.572.194.181.689	8.062.856.511.497
Jumlah Belanja Barang	**167.911.005.354.943**	**140.020.870.803.375**

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2013 ini lebih besar Rp27.890.134.551.568 atau 19,92 persen dibandingkanTA 2012.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp113,03 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2013 sebesar Rp113.033.446.250.400 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal),*

baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. BelanjaPembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp12.517.451.976.240 atau 12,45 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.160.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp98.711.265.089.842 dan Rp14.322.181.160.558 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp98.711.265.089.842 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uangrupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rinciansebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	81.771.062.528.088	60.768.101.697.587
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	8.861.197.134.070	6.297.744.208.100
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN	5.737.047.038.080	1.456.999.522.900
Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	722.579.964.500	158.467.625.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	1.221.688.009.000	913.801.227.200
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	145.935.666	14.560.113.598.067
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	-	930.763.140.850
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	-	449.948.400.000
Belanja Pembayaran Denda	397.544.480.438	615.634.747.251
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**98.711.265.089.842**	**86.151.574.166.955**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.322.181.160.558 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.999.626.884.969	3.843.842.340.796
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.322.554.275.589	10.520.577.766.409
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**14.322.181.160.558**	**14.364.420.107.205**

Belanja Subsidi sebesar Rp355,05 triliun

D.2.7. Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2013 sebesar Rp355.045.179.958.292 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	**210.000.000.000.462**	**211.895.707.483.639**
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	138.322.043.935.690	127.718.796.755.656
Subsidi Non BBM – Pajak	4.077.072.181.000	3.763.173.751.137
Subtotal	**142.399.116.116.690**	**131.481.970.506.793**
Subsidi dalam Rangka PSO	**1.518.338.803.983**	1.932.350.172.340
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**353.917.454.921.135**	**345.310.028.162.772**
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.127.725.037.157	1.110.376.019.560
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	**1.127.725.037.157**	**1.110.376.019.560**
Jumlah Belanja Subsidi	**355.045.179.958.292**	**346.420.404.182.332**

Dengan demikian, Subsidi TA 2013 ini lebih besar Rp8.624.775.775.960 atau 2,49 persen dari Subsidi TA 2012.

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp1,31 triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2013 terdapat belanja hibah sebesar Rp1.305.414.705.780. Belanja hibah TA 2013 lebih besar Rp1.230.334.760.026 dari TA 2012 sebesar Rp75.079.945.754.

D.2. 9. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp92,11 triliun

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp92.108.033.527.871 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	549.544.741.283	424.170.718.781
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dlm bentuk barang/jasa	29.136.156.000	51.956.964.988
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/ Guru	-	17.510.231.505.695
Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga	-	7.116.168.297.550
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.434.604.708.177	-
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	41.647.139.522.837	35.772.440.166.735
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	3.397.607.668.050	1.992.433.852.977
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.161.959.929.813	11.684.596.488.228
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.888.040.801.711	1.050.530.869.010
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	**92.108.033.527.871**	**75.602.528.863.964**

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2013 ini lebih besar Rp16.505.504.663.907 atau 21,83 persen dari TA 2012.

D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp3,37 triliun

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2013 adalah sebesar Rp3.367.142.169.363, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Cadangan Kenaikan Harga Tanah (*Land Capping*)	947.804.000.000	310.062.000.000
Cadangan Beras Pemerintah	-	2.000.000.000.000
Belanja Cadangan Benih Nasional	-	342.764.387.131
Jasa Perbendaharaan	-	199.994.423.436
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	51.034.500.000	18.255.217.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	41.129.077.440	-
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	5.218.952.593
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	302.647.402.822	282.390.817.867
Belanja Penugasan PT SMI	26.640.876.289	43.490.221.465
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	4.637.232.209	44.748.296.369
Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	-	(244.999.000)
Belanja Pemilu	-	(750.000)
Belanja Lain-lain Lainnya	1.993.249.080.603	826.177.245.295
Jumlah Belanja Lain-lain	**3.367.142.169.363**	**4.072.855.812.156**

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp705.713.642.793 atau 17,33 persen dari TA 2012.

DBH Pajak sebesar Rp43,86 triliun

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2013 adalah sebesar Rp43.855.009.346.533, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	19.091.529.508.064	19.378.280.456.694
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.763.479.838.469	27.597.042.553.038
Bagi Hasil BPHTB	-	238.813.021.056
Jumlah Bagi Hasil Pajak	**43.855.009.346.533**	**47.214.136.030.788**

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2013 lebih kecil Rp3.359.126.684.255 atau 7,11 persen dari TA 2012.

DBH SDA sebesar Rp42,46 triliun

D.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2013 adalah sebesar Rp42.456.559.513.479, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Bagi Hasil Minyak Bumi	15.530.937.334.820	26.165.822.138.467
Bagi Hasil Gas Alam	13.799.051.780.835	21.231.675.084.265
Bagi Hasil Pertambangan Umum	11.636.718.665.675	12.860.854.426.197
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	451.021.274.903	626.278.978.409
Bagi Hasil Kehutanan	889.055.732.766	1.535.890.432.615
Bagi Hasil Perikanan	149.774.724.480	179.764.557.362
Jumlah Bagi Hasil SDA	**42.456.559.513.479**	**62.600.285.617.315**

Dengan demikian, DBH SDA TA 2013 lebih kecil Rp20.143.726.103.836 atau 32,18 persen dari TA 2012.

DBH Cukai Tembakau sebesar Rp2,15 triliun

D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2013 adalah sebesar Rp2.151.491.260.171, sedangkan pada TA 2012 sebesar Rp1.722.781.272.658.

Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2013 lebih besar Rp428.709.987.513 atau 24,88 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2012.

DAU sebesar Rp311,14 triliun

D.2.14. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2013 sebesar Rp311.139.289.165.000, jumlah tersebut lebih besar Rp37.324.850.962.000 atau 13,63 persen dari TA 2012 sebesar Rp273.814.438.203.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp30,75 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2013 sebesar Rp30.752.380.876.800, jumlah tersebut lebih besar Rp4.810.897.020.800 atau 18,55 persen dari TA 2012 sebesar Rp25.941.483.856.000.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp13,45 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2013 sebesar Rp13.445.571.566.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.492.994.038.000 atau 12,49 persen dari TA 2012 sebesar Rp11.952.577.528.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp69,34 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2013 adalah sebesar Rp69.344.444.403.654, lebih besar Rp11.945.074.405.572 atau 20,81 persen dari TA 2012 sebesar Rp57.399.369.998.082.

D.2.18. Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp115,70 miliar

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer pada belanja transfer lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2013 adalah sebesar Rp115.696.326.500, sedangkan pada TA 2012 tidak ada transaksi tersebut.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesarRp180,36 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp180.357.079.211.868, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Arus Masuk	189.384.228.119	126.184.876.373
Dikurangi Arus Keluar	180.546.463.439.987	144.552.713.306.838
Arus Kas Bersih	**(180.357.079.211.868)**	**(144.426.528.430.465)**

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2013 lebih besar Rp35.930.550.781.403 atau 24,88 persen dari TA 2012.

D.2.19. Penjualan Aset

Penjualan Aset sebesar Rp189,38 miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan AsetTetap pada TA 2013 adalah sebesar Rp189.384.228.119, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.744.182.436	12.444.700.247
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.809.031.144	7.228.982.579
Penjualan Sewa Beli	33.119.588.068	36.661.280.535
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	31.151.126.200	2.546.469.402
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	1.212.313.000	558.000
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	1.055.000	519.000
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	1.000.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	116.346.932.271	67.301.366.610
Jumlah Penjualan Aset	**189.384.228.119**	**126.184.876.373**

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2013 lebih besar Rp63.199.351.746 atau 50,08 persen dari TA 2012.

D.2.20. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp180,55 triliun

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada TA 2013 adalah sebesar Rp180.546.463.439.987, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	4.569.417.200.263	3.423.209.272.506
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.088.782.230.453	43.141.239.156.922
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.952.346.992.078	19.552.846.208.260
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	78.789.552.851.317	72.263.462.515.428
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.001.410.998.864	4.089.153.644.154
Belanja Modal BLU	2.144.953.167.012	2.082.802.509.568
Jumlah Belanja Modal	**180.546.463.439.987**	**144.552.713.306.838**

Belanja Modal ini pada TA 2013 lebih besar Rp35.993.750.133.149 atau 24,90 persen dari TA 2012.

Dengan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp31.315.578.643.473 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp180.357.079.211.868 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp237,40 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2013 adalah sebesar Rp237.394.577.321.194, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Arus Masuk	419.317.447.459.941	379.194.954.291.694
Dikurangi Arus Keluar	181.922.870.138.747	204.036.785.971.319
Arus Kas Bersih	**237.394.577.321.194**	**175.158.168.320.375**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2013 lebih besar

Rp62.236.409.000.820 atau 35,53 persen dari TA 2012.

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp359,86 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2013 adalah sebesar Rp359.863.540.370.424, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pembiayaan Perbankan	30.000.000.000.000	56.170.000.000.000
Pembiayaan Non Perbankan	615.726.784.188	913.111.879.427
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	327.747.662.419.035	282.897.267.989.790
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	1.500.151.167.202	1.277.994.564.583
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**359.863.540.370.424**	**341.258.374.433.800**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2013 lebih besar Rp18.605.165.936.625 atau 5,45 persen dibandingkan dengan TA 2012.

a. Pembiayaan Perbankan

Penerimaan pembiayaan perbankan pada TA 2013 sebesar Rp30.000.000.000.000 merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan dari Rekening SAL	30.000.000.000.000	56.170.000.000.000
Total Penerimaan dari Pembiayaan Perbankan	**30.000.000.000.000**	**56.170.000.000.000**

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2013 lebih kecil Rp26.170.000.000.000 atau 46,59 persen dari TA 2012.

b. Pembiayaan Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan pada TA 2013 adalah sebesar Rp615.726.784.188, berarti lebih kecil Rp297.385.095.239 atau 32,57persen dari penerimaan pada TA 2012 sebesar Rp913.111.879.427. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan pinjaman dalam negeri. Rincian Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pinjaman Dalam Negeri	615.726.784.188	913.111.879.427
Total Penerimaan Non Perbankan	**615.726.784.188**	**913.111.879.427**

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2013 sebesar Rp327.747.662.419.035, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan/Penjualan SPN	42.400.000.000.000	30.520.000.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN	187.631.255.000.000	146.780.745.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	2.936.148.166.000	2.251.726.240.000
Penerbitan/Penjualan SBSN	23.507.074.053.640	46.069.805.000.000
Imbalan dibayar di muka SBSN	107.679.673.000	171.346.293.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang		1.380.000.000.000

Perbendaharaan DN	11.653.000.000.000	
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek	777.800.946.360	-
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN - Valas	41.493.925.823.035	46.018.969.099.520
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	2.856.042.000	65.670.205.270
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang	17.237.922.715.000	9.639.006.152.000
Total Penerimaan SBN	**327.747.662.419.035**	**282.897.267.989.790**

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2013 lebih besar Rp44.850.394.429.245 atau 15,85 persen dibanding TA 2012.

d. Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2013 sebesar Rp1.500.151.167.202, lebih besar Rp222.156.602.619 atau 17,38 persen dari TA 2012 sebesar Rp1.277.994.564.583.

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan Hasil Privatisasi	56.700.000.000	138.269.961.371
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN	1.362.055.382.471	876.202.056.673
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	81.395.784.730	263.522.546.539
Total Penerimaan Aset Program Restrukturisasi	**1.500.151.167.202**	**1.277.994.564.583**

Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp55,28 triliun

D.2.22. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2013 sebesar Rp55.279.821.617.227 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pinjaman Program	18.426.396.220.606	15.003.476.180.432
Pinjaman Proyek	36.853.425.396.621	16.400.005.574.016
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**55.279.821.617.227**	**31.403.481.754.448**

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2013 lebih besar Rp23.876.339.862.779 atau 76,03 persen dari TA 2011.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2013 adalah sebesar Rp18.426.396.220.606, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Program Bilateral	3.888.653.458.800	-
Program Mutilateral	14.537.742.761.806	15.003.476.180.432
Jumlah Pinjaman Program	**18.426.396.220.606**	**15.003.476.180.432**

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2013 lebih besar Rp3.422.920.040.174 atau 22,81 persen dari TA 2012.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2013 adalah sebesar Rp36.853.425.396.621, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pinjaman Proyek dari Bilateral	10.395.098.419.601	8.020.242.160.124
Pinjaman Proyek dari Multilateral	7.651.179.843.930	5.870.256.474.519
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	6.606.850.582.989	2.451.886.647.371
Pinjaman Proyek Komersial	12.155.674.537.140	57.562.877.025
Pinjaman Proyek Lainnya	44.622.012.961	57.414.977
Jumlah Pinjaman Proyek	**36.853.425.396.621**	**16.400.005.574.016**

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2013 lebih besar Rp20.453.419.822.605 atau 124,72 persen dibandingkan TA 2012.

D.2.23. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp4,17 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2013 sebesar Rp4.174.085.472.290 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjamandalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	676.201.112.139	951.071.477.279
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	3.497.884.360.151	5.582.026.626.167
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	**4.174.085.472.290**	**6.533.098.103.446**

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2013 lebih kecil Rp2.359.012.631.156 atau 36,11 persen dari TA 2012.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp108,22 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2013 adalah sebesar Rp108.216.396.993.594 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000	7.000.000.000.000
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	141.256.054.142	113.435.519.488
Pelunasan Surat Berharga Negara	-	67.699.621.842
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	31.170.000.000.000	37.600.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	55.733.551.652.452	73.963.054.019.852
Pelunasan SBSN	12.956.589.287.000	9.057.190.711.000
Pelunasan Obligasi Internasional	3.215.000.000.000	2.505.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	**108.216.396.993.594**	**130.306.379.872.182**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2013 lebih kecil Rp22.089.982.878.588 atau 16,95 persen dibandingkan TA 2012.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp57,20 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2013 sebesar Rp57.204.424.443.004 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Pinjaman Program	15.480.047.043.061	10.862.794.957.111
Pinjaman Proyek	41.724.377.399.943	40.252.022.412.216
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**57.204.424.443.004**	**51.114.817.369.327**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2013 lebih besar Rp6.089.607.073.677 atau 11,91 persen dibandingkan dengan TA2012.

D.2.26. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/Investasi Pemerintahsebesar Rp12,62 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2013 adalah sebesar Rp12.621.481.765.750, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	2.000.000.000.000	7.600.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	883.189.211.087	541.150.086.050
Penyertaan Modal Negara Lainnya	1.113.862.251.466	378.394.401.369
Investasi Pemerintah	6.415.177.303.197	4.176.100.000.000
Dana Bergulir	2.209.253.000.000	6.166.913.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**12.621.481.765.750**	**18.862.557.487.419**

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2013 lebih kecil Rp6.241.075.721.669 atau 33,09 persen dariTA 2012.

D.2.27. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman sebesar Rp3,88 triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2013 adalah sebesar Rp3.880.566.936.399. Jumlah tersebut lebih besar Rp127.535.694.008 atau 3,40 persen dibandingkan dengan TA 2012 sebesar Rp3.753.031.242.391.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp237.394.577.321.194 dan defisit anggaran sebesar Rp211.672.657.855.341, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2013 sebesar Rp25.721.919.465.853.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp105,94 miliar

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2013, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp105.939.109.946, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(104.009.136.761)	(1.303.714.095.928)
Kiriman Uang (Neto)	304.283.894.052	(279.648.621.588)
Transito (Neto)	(93.019.790.696)	99.792.905.182
Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Neto)	(1.315.856.649)	(17.893.087.832)
Arus Kas Bersih	**105.939.109.946**	**(1.501.462.900.166)**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2013 lebih besar Rp1.607.402.010.112 dari TA 2012.

D.2.28. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar minus Rp104,01 miliar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2013 sebesar minus Rp104.009.136.761 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	19.074.458.153.667	17.887.641.206.166
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	3.554.963.758	3.042.006.448
Penerimaan PFK Beras BULOG	250.285.370.995	246.883.384.696
Penerimaan PFK 2% Pemda	2.633.355.345.713	2.473.251.467.474
Penerimaan PFK Lain-lain	373.259.275.346	378.878.255.234
Jumlah Penerimaan PFK	**22.334.913.109.479**	**20.989.696.320.018**
Penerimaan Dana Talangan	**7.263.000.000.000**	-
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(19.114.438.225.769)	(19.069.405.998.184)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(6.908.264.557)	(6.586.462.845)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(270.996.248.363)	(240.351.262.878)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(2.671.738.431.643)	(2.575.125.898.343)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(374.841.075.908)	(401.940.793.696)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(22.438.922.246.240)**	**(22.293.410.415.946)**
Pengembalian Penerimaan Dana Talangan	**(7.263.000.000.000)**	-
Jumlah PFK	**(104.009.136.761)**	**(1.303.714.095.928)**

Apabila dibandingkan dengan TA 2012, Perhitungan Fihak Ketiga dalam TA 2013 lebih besar Rp1.199.704.959.167.

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesarRp304,28 miliar

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2013 sebesar Rp304.283.894.052 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2013 dan TA 2012 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas belum dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU TA 2013 dan TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	2.117.057.860.802.173	1.834.076.472.402.377
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	3.573.413.869.790.803	3.301.447.640.409.840
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	11.796.707.966.953	6.689.356.520.899
Penerimaan Pemindahbukuan	1.392.852.569.038.352	1.326.460.559.905.517
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	1.951.024.663	2.169.647.956
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	4.145.665.873.799.628	4.052.818.451.020.209
Jumlah Penerimaan KU	**11.240.788.832.422.572**	**10.521.494.649.906.798**
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(2.117.060.925.875.409)	(1.834.076.212.342.641)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(3.573.106.403.160.146)	(3.301.700.077.607.338)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(11.796.707.966.953)	(6.722.591.420.868)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.392.852.686.701.722)	(1.326.454.796.489.374)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening	(1.951.024.663)	(2.169.647.956)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(4.145.665.873.799.628)	(4.052.818.451.020.209)
Jumlah Pengeluaran KU	**(11.240.484.548.528.520)**	**(10.521.774.298.528.386)**
Jumlah KU (Neto)	**304.283.894.052**	**(279.648.621.588)**

Dengan demikian, KU masuk neto dalam TA 2013 lebih besar Rp583.932.515.640 dari TA 2012.

D.2.30. Transito

Transito minus Rp93,02 miliar

Transito (Neto) TA 2013 sebesar minus Rp93.019.790.696 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012 *(Audited)*
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	34.347.888.988.646	18.572.705.257.284
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	5.554.597.299	107.006.869.093
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana)	1.383.610.704.467	1.268.151.087.109
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	250.846.457.087	337.193.550.526
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	324.514.862	328.009.196
Jumlah Penerimaan Transito	**35.988.225.262.361**	**20.285.384.773.208**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(34.665.599.968.792)	(18.770.109.917.107)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(1.173.400.000)	(112.284.762.859)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana)	(1.421.275.555.866)	(1.308.872.103.226)
Pengeluaran Pengemb Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	7.322.371.601	6.849.915.166
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(518.500.000)	(1.175.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(36.081.245.053.057)**	**(20.185.591.868.026)**
Jumlah Transito (Neto)	**(93.019.790.696)**	**99.792.905.182**

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2013 lebih kecil Rp192.812.695.878 atau 193,21 persen dari TA 2012.

D.2.31. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekeningdan Koreksi Pemindahbukuan

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga minus Rp1,32 miliar

Dalam TA 2013 dan TA 2012 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul karena retur SP2D, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2013 *(Audited)*	TA 2012*(Audited)*
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Rekening	4.176.494.314.397	3.765.941.982.780
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Rekening	(4.175.582.986.861)	(3.802.066.475.202)
Jumlah Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Neto)	**911.327.536**	**(36.124.492.422)**
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	76.639.480.949	264.670.566.350
Koreksi PenerimaanPemindahbukuan	(78.866.665.134)	(246.439.161.760)
Jumlah Koreksi Pemindahbukuan	**(2.227.184.185)**	**18.231.404.590**
Jumlah Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dan Koreksi Pemindahbukuan	**(1.315.856.649)**	**(17.893.087.832)**

Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga dan Koreksi Pemindahbukuan sebesar minus Rp1.315.856.649 mengakibatkan penurunan Utang terkait Retur SP2D dari Rp1.119.941.138.161 di TA 2012 menjadi Rp1.118.625.281.512 pada TA 2013.



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2012
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**1.502.005.024.993.000**	**1.438.891.069.562.744**	**95,80%**	**1.338.109.629.172.958**	**100.781.440.389.786**	7,53%
41	**Penerimaan Perpajakan**	**1.148.364.681.288.000**	**1.077.306.679.558.272**	**93,81%**	**980.518.133.319.319**	**96.788.546.238.953**	9,87%
411	**Pendapatan Pajak Dalam Negeri**	**1.099.943.585.138.000**	**1.029.850.063.303.271**	**93,63%**	**930.861.839.509.438**	**98.988.223.793.833**	10,63%
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**538.759.856.000.000**	**506.442.796.872.651**	**94,00%**	**465.069.641.549.058**	**41.152.222.313.925**	8,85%
41111	**Pendapatan Pajak PPh Migas**	**74.277.980.000.000**	**88.747.448.408.293**	**119,48%**	**83.460.868.001.301**	**5.286.580.406.992**	6,33%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.794.310.000.000	32.363.301.224.444	**120,78%**	32.976.020.386.273	(612.719.161.829)	-1,86%
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	47.483.670.000.000	56.384.134.954.761	**118,74%**	50.484.720.419.499	5.899.414.535.262	11,69%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	12.229.088	-	127.195.529	(114.966.441)	-90,39%
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**464.481.876.000.000**	**413.808.305.275.411**	**89,09%**	**377.942.175.058.445**	**35.866.130.216.966**	9,49%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	101.915.000.000.000	90.162.275.144.909	**88,47%**	79.599.440.782.334	10.562.834.362.575	13,27%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	6.600.930.000.000	6.837.153.122.927	**103,58%**	5.506.854.819.126	1.330.298.303.801	24,16%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	42.704.148.000.000	36.332.464.974.534	**85,08%**	31.610.164.408.871	4.722.300.565.663	14,94%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	24.530.781.000.000	22.207.243.817.727	**90,53%**	20.302.691.144.663	1.904.552.673.065	9,38%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6.443.343.000.000	4.383.412.280.039	**68,03%**	3.763.462.234.949	619.950.045.090	16,47%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	180.116.520.000.000	154.294.874.300.998	**85,66%**	152.131.951.580.030	2.162.922.720.968	1,42%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	32.779.509.000.000	27.983.972.009.476	**85,37%**	24.610.565.469.335	3.373.406.540.141	13,71%
411128	Pendapatan PPh Final	69.349.088.000.000	71.569.992.377.265	**103,20%**	60.385.711.978.972	11.184.280.398.293	18,52%
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	42.557.000.000	36.917.247.536	**86,75%**	31.332.640.165	5.584.607.371	17,82%
41113	**Pendapatan PPh Fiskal**	-	**849.766.010**	-	**1.338.076.044**	**(488.310.034)**	-36,49%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri		849.766.010	-	1.338.076.044	(488.310.034)	-36,49%
41114	**Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah**	-	**3.886.193.422.937**	-	**3.665.260.413.269**	**220.938.942.668**	6,03%
411141	Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah		699.355.937	-	1.900.413.269	(1.201.057.332)	-63,20%
411142	Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah			-	-		
411143	Pendapatan PPh psl 22 Import ditanggung Pemerintah		(5.933.000)	-	-	(5.933.000)	
411144	Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah			-	-		
411146	Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah		770.600.000.000	-	815.400.000.000	(44.800.000.000)	-5,49%
411147	Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah		3.114.900.000.000	-	2.847.960.000.000	266.940.000.000	9,37%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah			-	-		
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**	**423.708.254.749.000**	**384.713.518.912.993**	**90,80%**	**337.584.577.488.285**	**47.128.941.424.708**	**13,96%**
41121	**Pendapatan PPN**	-	**365.882.383.372.753**	-	**318.709.170.377.790**	**47.173.212.994.963**	**14,80%**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	226.761.763.410.216	-	191.936.827.053.476	34.824.936.356.740	18,14%
411212	Pendapatan PPN Impor	-	138.989.159.819.891	-	126.610.119.566.338	12.379.040.253.553	9,78%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
411219	Pendapatan PPN Lainnya	-	131.460.142.646	-	162.223.757.976	(30.763.615.330)	-18,96%
41122	**Pendapatan PPnBM**	-	**18.831.135.540.240**	-	**18.875.407.110.495**	**(44.271.570.255)**	**-0,23%**
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	-	11.547.989.274.697	-	10.428.737.657.072	1.119.251.617.625	10,73%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	-	7.281.335.893.452	-	8.422.773.568.033	(1.141.437.674.581)	-13,55%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	-	1.810.372.091	-	23.895.885.390	(22.085.513.299)	-92,42%
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**27.343.800.000.000**	**25.304.582.771.965**	**92,54%**	**28.968.862.702.282**	**(3.664.279.930.317)**	**-12,65%**
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	25.304.582.771.965	-	28.968.862.702.282	(3.664.279.930.317)	-12,65%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	750.059.903.382	-	1.144.421.183.966	(394.361.280.584)	-34,46%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	1.366.288.386.715	-	6.104.099.730.681	(4.737.811.343.966)	-77,62%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	-	1.323.543.592.844	-	1.107.246.997.455	216.296.595.389	19,53%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	-	293.834.940.779	-	254.533.056.441	39.301.884.338	15,44%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	-	630.195.395.934	-	565.247.025.160	64.948.370.774	11,49%
411316	Pendapatan PBB Migas	-	20.940.660.552.311	-	19.793.314.708.579	1.147.345.843.732	5,80%
4114	**Pendapatan BPHTB**	-		-	-		
41141	Pendapatan BPHTB	-		-	-		
411411	Pendapatan BPHTB			-	-		
4115	**Pendapatan Cukai**	**104.729.689.950.000**	**108.452.081.324.579**	**103,55%**	**95.027.881.221.457**	**13.424.200.103.122**	**14,13%**
41151	Pendapatan Cukai	104.729.689.950.000	108.452.081.324.579	**103,55%**	95.027.881.221.457	13.424.200.103.122	14,13%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	100.746.489.950.000	103.560.193.054.883	**102,79%**	90.553.638.824.974	13.006.554.229.909	14,36%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	180.700.000.000	159.091.509.515	**88,04%**	155.581.715.856	3.509.793.659	2,26%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	3.802.500.000.000	4.688.176.497.000	**123,29%**	4.292.843.125.012	395.333.371.988	9,21%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	32.495.144.662	-	17.154.851.382	15.340.293.280	89,42%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	12.125.118.519	-	8.662.704.233	3.462.414.286	39,97%
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**5.401.984.439.000**	**4.937.083.421.083**	**91,39%**	**4.210.876.548.355**	**726.206.872.728**	**17,25%**
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	-	**4.615.965.588.612**	-	**3.879.749.896.174**	**736.215.692.438**	**18,98%**
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1.204.894.943.137	-	1.104.415.931.742	100.479.011.395	9,10%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	3.064.694.858.120	-	2.772.232.946.670	292.461.911.450	10,55%
411613	Pendapatan PPn Batubara	-	345.029.515.313	-	769.733	345.028.745.580	44824471,03%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	1.346.272.042	-	3.100.248.029	(1.753.975.987)	-56,58%
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	-	**321.117.832.471**	-	**331.126.652.181**	**(10.008.819.710)**	**-3,02%**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	119.031.157.245	-	184.769.886.516	(65.738.729.271)	-35,58%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	198.018.393.454	-	143.785.207.687	54.233.185.767	37,72%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	3.988.555.918	-	1.698.098.995	2.290.456.923	134,88%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	79.725.854	-	873.458.983	(793.733.129)	-90,87%
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-		-	

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	
412	**Pajak Perdagangan Internasional**	**48.421.096.150.000**	**47.456.616.255.001**	**98,01%**	**49.656.293.809.881**	**(2.199.677.554.880)**	**-4,43%**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**30.811.680.000.000**	**31.621.250.024.724**	**102,63%**	**28.418.359.044.419**	**3.202.890.980.305**	**11,27%**
41211	Pendapatan Bea Masuk		31.621.250.024.724	-	28.418.359.044.419	3.202.890.980.305	11,27%
412111	Pendapatan Bea Masuk		29.560.105.914.820	-	26.708.523.995.738	2.851.581.919.082	10,68%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		289.294.159	-	25.634.038	263.660.121	1028,55%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		685.359.813.314	-	465.920.844.465	219.438.968.849	47,10%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		1.148.308.923.167	-	1.076.608.593.685	71.700.329.482	6,66%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)		25.000.000	-	(16.070.653)	41.070.653	
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)		191.572.181.000	-	99.813.751.137	91.758.429.863	91,93%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		35.588.898.264	-	67.482.296.009	(31.893.397.745)	-47,26%
4122	**Pendapatan Bea Keluar**	**17.609.416.150.000**	**15.835.366.230.277**	**89,93%**	**21.237.934.765.462**	**(5.402.568.535.185)**	**-25,44%**
41221	Pendapatan Bea Keluar		15.835.366.230.277	-	21.237.934.765.462	(5.402.568.535.185)	-25,44%
412211	Pendapatan Bea Keluar		15.816.250.853.064	-	21.212.623.814.884	(5.396.372.961.820)	-25,44%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		11.526.294.176	-	22.318.787.523	(10.792.493.347)	-48,36%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		7.589.083.037	-	2.992.163.055	4.596.919.982	153,63%
42	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**349.156.712.456.000**	**354.751.889.117.468**	**101,60%**	**351.804.746.666.862**	**2.947.142.450.606**	**0,84%**
421	**Penerimaan Sumber Daya Alam**	**203.730.029.745.000**	**226.406.189.261.540**	**111,13%**	**225.843.973.463.751**	**562.215.797.789**	**0,25%**
4211	**Pendapatan Minyak Bumi**	**129.339.220.000.000**	**135.329.234.847.290**	**104,63%**	**144.717.087.022.468**	**(8.703.682.940.086)**	**-6,01%**
421111	Pendapatan Minyak Bumi	129.339.220.000.000	135.329.234.847.290	**104,63%**	144.717.087.022.468	(8.703.682.940.086)	-6,01%
4212	**Pendapatan Gas Bumi**	**51.271.180.000.000**	**68.300.185.200.293**	**133,21%**	**61.106.427.615.761**	**6.509.588.349.440**	**10,65%**
421211	Pendapatan Gas Bumi	51.271.180.000.000	68.300.185.200.293	**133,21%**	61.106.427.615.761	6.509.588.349.440	10,65%
4213	**Pendapatan Pertambangan Umum**	**18.099.012.595.000**	**18.620.492.963.389**	**102,88%**	**15.877.387.816.604**	**2.743.105.146.785**	**17,28%**
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	729.643.370.000	593.500.481.758	**81,34%**	358.768.454.661	234.732.027.097	65,43%
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	17.369.369.225.000	18.026.992.481.631	**103,79%**	15.518.619.361.943	2.508.373.119.688	16,16%
4214	**Pendapatan Kehutanan**	**4.253.957.056.000**	**3.060.373.940.552**	**71,94%**	**3.188.338.362.520**	**(127.964.421.968)**	**-4,01%**
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.848.985.666.000	1.669.506.623.151	**90,29%**	1.627.099.143.958	42.407.479.193	2,61%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.848.985.666.000	1.669.506.623.151	**90,29%**	1.627.099.143.958	42.407.479.193	2,61%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.897.252.899.000	697.793.735.114	**36,78%**	986.272.637.355	(288.478.902.241)	-29,25%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.897.252.899.000	697.793.735.114	**36,78%**	986.272.637.355	(288.478.902.241)	-29,25%
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000	105.479.383.439	**840,47%**	102.560.156.090	2.919.227.349	2,85%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	1.300.000.000	1.493.329.129	**114,87%**	398.640	1.492.930.489	374505,94%
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-		-	-		
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-		-	2.664.000	(2.664.000)	-100,00%
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	11.250.000.000	103.986.054.310	**924,32%**	102.557.093.450	1.428.960.860	1,39%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	495.168.491.000	587.594.198.848	**118,67%**	472.406.425.117	115.187.773.731	24,38%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	495.168.491.000	587.594.198.848	**118,67%**	472.406.425.117	115.187.773.731	24,38%
4215	**Pendapatan Perikanan**	**250.000.094.000**	**229.350.562.720**	**91,74%**	**215.766.602.000**	**13.583.960.720**	**6,30%**
42151	Pendapatan Perikanan	250.000.094.000	229.350.562.720	**91,74%**	215.766.602.000	13.583.960.720	6,30%
421511	Pendapatan Perikanan	250.000.094.000	229.350.562.720	**91,74%**	215.766.602.000	13.583.960.720	6,30%
4216	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**516.660.000.000**	**866.551.747.296**	**167,72%**	**738.966.044.398**	**127.585.702.898**	**17,27%**
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	516.660.000.000	866.551.747.296	**167,72%**	738.966.044.398	127.585.702.898	17,27%
421611	Pendapatan Setoran Bagian Pertambangan Panas Bumi	516.660.000.000	857.112.163.019	**165,89%**	738.966.044.398	118.146.118.621	15,99%
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	516.660.000.000	9.439.584.277	**1,83%**	-	9.439.584.277	
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-	
				-			
422	**Pendapatan Bagian Laba BUMN**	**36.456.490.000.000**	**34.025.604.050.274**	**93,33%**	**30.797.972.717.670**	**3.227.631.332.604**	**10,48%**
4221	**Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN**	**36.456.490.000.000**	**34.025.604.050.274**	**93,33%**	**30.797.972.717.670**	**3.227.631.332.604**	**10,48%**
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.487.200.000.000	7.490.907.289.021	**100,05%**	4.070.293.177.055	3.420.614.111.965	84,04%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.487.200.000.000	7.490.907.289.021	**100,05%**	4.070.293.177.056	3.420.614.111.965	84,04%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	28.969.290.000.000	26.534.696.761.253	**91,60%**	26.727.679.540.615	(192.982.779.362)	-0,72%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	28.969.290.000.000	26.534.696.761.253	**91,60%**	26.727.679.540.615	(192.982.779.362)	-0,72%
				-			
423	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**85.471.466.267.000**	**69.671.855.890.502**	**81,51%**	**73.458.504.524.407**	**(3.786.648.633.905)**	**-5,15%**
4231	**Pendapatan Penjualan dan Sewa**	**27.792.245.994.000**	**24.324.869.069.676**	**87,52%**	**23.253.375.898.356**	**1.071.493.171.320**	**4,61%**
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	15.124.267.803.000	10.348.855.443.833	**68,43%**	9.792.221.299.572	556.634.144.261	5,68%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	3.272.243.000	15.559.857.761	**475,51%**	12.405.392.079	3.154.465.682	25,43%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	19.005.973.000	30.322.352.973	**159,54%**	25.092.857.789	5.229.495.184	20,84%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	15.032.511.038.000	9.789.587.514.203	**65,12%**	8.136.063.530.890	1.653.523.983.313	20,32%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	50.024.000.000	147.403.136.563	**294,66%**	309.451.289.769	(162.048.153.206)	-52,37%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya		33.524.372	-	31.057.345	2.467.027	7,94%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	10.188.336.000	42.501.644.852	**417,16%**	63.253.293.144	(20.751.648.292)	-32,81%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	4.711.257.000	176.766.430	**3,75%**	239.757.944	(62.991.514)	-26,27%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		312.329.077.480	-	1.241.170.700.122	(928.841.622.642)	-74,84%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	4.554.956.000	10.941.569.199	**240,21%**	4.513.420.490	6.428.148.709	142,42%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	11.703.466.000	189.384.228.119	**1618,19%**	126.184.876.373	63.199.351.746	50,08%
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	36.414.000	1.744.182.436	**4789,87%**	12.444.700.247	(10.700.517.811)	-85,98%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.876.074.000	5.809.031.144	**98,86%**	7.228.982.579	(1.419.951.435)	-19,64%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli		33.119.588.068	-	36.661.280.535	(3.541.692.467)	-9,66%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina		31.151.126.200	-	2.546.469.402	28.604.656.798	1123,31%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan		1.212.313.000	-	558.000	1.211.755.000	217160,39%
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin		1.055.000	-	519.000	536.000	103,28%
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	1.000.000	(1.000.000)	-100,00%
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	5.790.978.000	116.346.932.271	**2009,11%**	67.301.366.610	49.045.565.661	72,87%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	12.527.350.000.000	13.461.844.460.369	**107,46%**	13.063.747.762.645	398.096.697.724	3,05%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak		15.216.005	-	-	15.216.005	
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	12.230.350.000.000	12.941.088.975.472	**105,81%**	12.339.481.343.731	601.607.631.741	4,88%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000	520.740.268.892	**175,33%**	724.266.418.914	(203.526.150.022)	-28,10%
42314	Pendapatan Sewa	128.924.725.000	291.228.758.879	**225,89%**	271.221.959.766	20.006.799.113	7,38%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	105.900.454.000	211.622.555.598	**199,83%**	199.768.666.357	11.853.889.241	5,93%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	17.972.476.000	29.039.633.746	**161,58%**	41.261.940.524	(12.222.306.778)	-29,62%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, danJaringan	512.440.000	771.226.420	**150,50%**	1.491.636.660	(720.410.240)	-48,30%
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan		2.763.478.526	-	245.943.085	2.517.535.441	1023,63%
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	51.200.000	1.200.000	**2,34%**	43.000	1.157.000	2690,70%
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan		35.653.377	-	23.606.250	12.047.127	51,03%
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)		930.000	-	36.210.000	(35.280.000)	-97,43%
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)			-	-		
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	4.488.155.000	46.994.081.212	**1047,07%**	28.393.913.890	18.600.167.322	65,51%
42315	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan		33.556.178.476	-	-	33.556.178.476	
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang		3.455.907.436	-	-	3.455.907.436	
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS		30.100.271.040	-	-	30.100.271.040	
4232	**Pendapatan Jasa**	**28.327.211.183.000**	**27.727.122.209.756**	**97,88%**	**26.207.952.723.749**	**1.490.957.178.156**	**5,69%**
42321	**Pendapatan Jasa I**	**16.720.900.330.000**	**19.036.310.373.473**	**113,85%**	**16.145.943.608.009**	**2.890.366.765.464**	**17,90%**
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	13.970.075.000	132.557.175.139	**948,87%**	16.463.326.144	116.093.848.995	705,17%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	14.728.328.000	24.267.814.067	**164,77%**	17.398.110.910	6.869.703.157	39,49%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	2.050.682.500.000	2.197.239.167.421	**107,15%**	1.883.037.417.182	314.201.750.239	16,69%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	11.177.595.169.000	12.672.564.660.373	**113,37%**	10.534.658.683.147	2.137.905.977.226	20,29%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	133.400.066.000	249.160.532.759	**186,78%**	172.275.214.737	76.885.318.022	44,63%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, danTeknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	807.187.568.000	702.329.265.155	**87,01%**	946.106.871.167	(243.777.606.012)	-25,77%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000	66.274.154.703	**85,96%**	68.255.730.088	(1.981.575.385)	-2,90%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	751.156.804.000	1.165.241.015.323	**155,13%**	996.728.925.691	168.512.089.632	16,91%
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.695.078.800.000	1.826.676.588.533	**107,76%**	1.511.019.328.943		0,00%
42322	Pendapatan Jasa II	1.033.982.603.000	1.369.732.058.143	**132,47%**	1.356.307.953.239	13.424.104.904	0,99%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	358.940.877.000	335.120.999.719	**93,36%**	437.833.534.430	(102.712.534.711)	-23,46%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	500.000.000.000	756.908.885.956	**151,38%**	671.407.530.450	85.501.355.506	12,73%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		7.086.262	-	166.666	6.919.596	4151,77%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		100.308	-	15.592	84.716	543,33%
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4.026.275.000	1.204.607.865	**29,92%**	935.564.387	269.043.478	28,76%
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan		3.550.000	-	290.720.908	(287.170.908)	-98,78%
423227	Pendapatan Bea Lelang	123.998.065.000	212.466.116.406	**171,35%**	145.027.344.278	67.438.772.128	46,50%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	42.417.386.000	58.190.524.008	**137,19%**	94.507.923.026	(36.317.399.018)	-38,43%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	4.600.000.000	5.830.187.619	**126,74%**	6.305.153.502	(474.965.883)	-7,53%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	545.002.678.000	564.917.113.293	**103,65%**	505.878.388.074	59.038.725.219	11,67%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	459.832.670.000	372.649.789.681	**81,04%**	338.973.863.978	33.675.925.703	9,93%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	76.006.304.000	84.746.992.557	**111,50%**	68.612.019.061	16.134.973.496	23,52%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	9.163.704.000	107.520.331.055	**1173,33%**	98.292.505.035	9.227.826.020	9,39%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	567.548.510	-	294.417.442	273.131.068	92,77%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan		567.548.510	-	294.417.442	273.131.068	92,77%
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.178.342.946.000	2.751.039.444.796	**53,13%**	4.417.901.930.174	(1.666.862.485.378)	-37,73%
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	75.376.441.000	13.640.764.801	**18,10%**	84.144.709.181	(70.503.944.380)	-83,79%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000	-	**0,00%**	-	-	
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	202.915.386.000	126.903.791.564	**62,54%**	176.885.967.432	(49.982.175.868)	-28,26%
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	4.900.047.591.000	2.610.494.888.431	**53,27%**	4.156.871.253.562	(1.546.376.365.131)	-37,20%
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000	3.509.309.765.336	**78,86%**	3.378.471.363.288	130.838.402.048	3,87%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000	989.758.723.336	**90,52%**	915.366.777.713	74.391.945.623	8,13%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.057.262.775.000	975.219.427.000	**92,24%**	905.654.397.575	69.565.029.425	7,68%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	32.102.375.000	31.845.465.000	**99,20%**	58.890.605.000	(27.045.140.000)	-45,92%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	1.082.870.300.000	894.039.060.000	**82,56%**	884.776.925.000	9.262.135.000	1,05%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	897.349.200.000	587.275.560.000	**65,45%**	582.548.043.000	4.727.517.000	0,81%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui	284.512.300.000	28.547.205.000	**10,03%**	29.067.365.000	(520.160.000)	-1,79%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.648.125.000	2.624.325.000	**99,10%**	2.167.250.000	457.075.000	21,09%
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	-	213.053.134.699	-	193.326.847.706	19.726.286.993	10,20%
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	213.053.134.699	-	193.326.847.706	19.726.286.993	10,20%
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000	131.425.870.986	**46,08%**	122.939.850.129	8.486.020.857	6,90%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	227.705.250.000	53.671.179.785	**23,57%**	56.544.395.000	(2.873.215.215)	-5,08%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	46.000.950.000	64.544.694.125	**140,31%**	53.895.772.000	10.648.922.125	19,76%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri	9.100.000.000	11.693.460.000	**128,50%**	11.609.850.000	83.610.000	0,72%
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)		6.485.000	-	50.430.000	(43.945.000)	-87,14%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	2.400.000.000	1.510.052.076	**62,92%**	839.403.129	670.648.947	79,90%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	113.561.666.000	150.766.900.520	**132,76%**	86.888.365.688	63.878.534.832	73,52%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	113.561.666.000	101.791.418.879	**89,64%**	86.888.365.688	14.903.053.191	17,15%
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II		8.566.932.885	-	-	8.566.932.885	
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian		40.408.548.756	-	-	40.408.548.756	
4233	**Pendapatan Bunga**	**9.240.303.358.000**	**4.869.331.146.430**	**52,70%**	**11.667.960.412.611**	**(6.798.629.266.181)**	**-58,27%**
42331	Pendapatan Bunga	1.500.870.163.000	2.157.055.147.430	**143,72%**	3.370.659.392.659	(1.213.604.245.229)	-36,00%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi			-	-		
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi			-	-		
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.500.870.163.000	1.890.250.985.894	**125,94%**	1.889.554.108.681	696.877.213	0,04%
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah			-	141.139.610.618	(141.139.610.618)	-100,00%
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		265.836.654.462	-	327.852.371.933	(62.015.717.471)	-18,92%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya		967.507.074	-	1.012.113.301.427	(1.011.145.794.353)	-99,90%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	260.000.000	-	-	260.000.000	
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		260.000.000	-	-	260.000.000	
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	7.739.433.195.000	2.712.015.999.000	**35,04%**	8.297.301.019.952	(5.585.285.020.952)	-67,31%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	7.739.433.195.000	2.711.157.959.000	**35,03%**	7.929.964.713.100	(5.218.806.754.100)	-65,81%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		-	-	213.100.688.852	(213.100.688.852)	-100,00%
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupiah		858.040.000	-	154.235.618.000		0,00%
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-		-	-		
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN			-	-		
4234	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**103.329.664.000**	**278.486.542.196**	**269,51%**	**251.243.211.606**	**27.243.330.590**	**10,84%**
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	103.329.664.000	278.486.542.196	**269,51%**	251.243.211.606	27.243.330.590	10,84%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	885.000.000	3.906.973.266	**441,47%**	3.634.086.227	272.887.039	7,51%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	275.000.000	463.958.646	**168,71%**	658.727.059	(194.768.413)	-29,57%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	225.000.000	2.616.130.543	**1162,72%**	6.328.338.471	(3.712.207.928)	-58,66%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	71.997.300.000	211.515.197.966	**293,78%**	183.316.515.295	28.198.682.671	15,38%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	27.080.665.000	23.106.316.591	**85,32%**	22.144.284.459	962.032.132	4,34%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000	344.951.156	**17,25%**	1.296.954.660	(952.003.504)	-73,40%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi			-	2.115.000	(2.115.000)	-100,00%
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	866.699.000	36.533.014.028	**4215,19%**	33.862.190.435	2.670.823.593	7,89%
4235	**Pendapatan Pendidikan**	**2.588.073.277.000**	**2.287.742.131.383**	**88,40%**	**2.375.603.736.186**	**(87.861.604.803)**	**-3,70%**
42351	Pendapatan Pendidikan	2.588.073.277.000	2.287.742.131.383	**88,40%**	2.375.603.736.186	(87.861.604.803)	-3,70%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	2.437.203.471.000	1.765.060.869.392	**72,42%**	1.683.616.183.253	81.444.686.139	4,84%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	40.621.788.000	65.177.498.785	**160,45%**	71.608.700.610	(6.431.201.825)	-8,98%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	46.150.992.000	66.815.802.357	**144,78%**	59.850.019.750	6.965.782.607	11,64%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	64.097.026.000	390.687.960.849	**609,53%**	560.528.832.573	(169.840.871.724)	-30,30%
4236	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**66.585.000.000**	**278.930.683.217**	**418,91%**	**158.144.829.032**	**120.785.854.185**	**76,38%**
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	66.585.000.000	278.930.683.217	**418,91%**	158.144.829.032	120.785.854.185	76,38%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	36.965.000.000	129.233.798.204	**349,61%**	88.535.075.359	40.698.722.845	45,97%
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.000.000.000	1.548.619.812	**51,62%**	2.546.845.878	(998.226.066)	-39,19%
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan		534.443.534	-	338.979.472	195.464.062	57,66%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	26.620.000.000	147.133.594.226	**552,72%**	66.325.599.603	80.807.994.623	121,84%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	480.227.441	-	398.328.720	81.898.721	20,56%
4237	**Pendapatan Iuran dan Denda**	**855.954.099.000**	**1.398.128.607.728**	**163,34%**	**1.459.529.823.727**	**(61.401.215.999)**	**-4,21%**
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	600.000.000.000	922.393.422.616	**153,73%**	1.059.505.758.801	(137.112.336.185)	-12,94%
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000	722.697.770.022	**150,56%**	810.911.080.858	(88.213.310.836)	-10,88%
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	120.000.000.000	180.121.846.965	**150,10%**	179.194.147.167	927.699.798	0,52%
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		19.573.805.629	-	69.400.530.776	(49.826.725.147)	-71,80%
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	813.980.288	-	1.840.358.875	(1.026.378.587)	-55,77%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		813.980.288	-	1.840.358.875	(1.026.378.587)	-55,77%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	36.085.137.000	130.633.281.432	**362,01%**	184.307.131.642	(53.673.850.210)	-29,12%
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup	6.511.655.000	6.883.773.334	**105,71%**	6.430.980.457	452.792.877	7,04%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	102.300.000	55.788.000	**54,53%**	358.418.000	(302.630.000)	-84,43%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)			-	-		
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)		-	-	-	-	
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	29.347.057.000	36.052.492.293	**122,85%**	20.039.871.992	16.012.620.301	79,90%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	124.125.000	294.244.624	**237,06%**	188.262.278	105.982.346	56,30%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)			-	750.000	(750.000)	-100,00%
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan		87.346.983.181	-	157.288.848.915	(69.941.865.734)	-44,47%
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		-	-	-	-	
42375	Pendapatan Denda I	219.868.962.000	344.279.267.089	**156,58%**	213.856.984.631	130.422.282.458	60,99%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000	5.785.629.911	**289281,50%**	13.438.646.875	(7.653.016.964)	-56,95%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	219.766.962.000	312.752.135.597	**142,31%**	170.053.946.851	142.698.188.746	83,91%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		15.000.000	-	44.097.349	(29.097.349)	-65,98%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		4.857.442.706	-	18.759.228.018	(13.901.785.312)	-74,11%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	100.000.000	15.658.247.840	**15658,25%**	8.409.191.060	7.249.056.780	86,20%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		296.348.619	-	419.944.000	(123.595.381)	-29,43%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		-	-	23.067.950	(23.067.950)	-100,00%
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		948.339	-	140.162	808.177	576,60%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	-	4.913.514.077	-	2.708.722.366	2.204.791.711	81,40%
42376	Pendapatan Denda II	-	8.656.303	-	19.589.778	(10.933.475)	-55,81%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		5.604.539	-	500.035	5.104.504	1020,83%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB		3.051.764	-	19.089.743	(16.037.979)	-84,01%
4239	**Pendapatan Lain-Lain**	**16.497.763.692.000**	**8.507.245.500.116**	**51,57%**	**8.084.693.889.140**	**422.551.610.975**	**5,23%**
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	10.639.316.396.000	5.201.515.618.841	**48,89%**	4.661.015.950.737	540.499.668.104	11,60%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	7.835.861.000	185.276.253.160	**2364,47%**	95.836.858.451	89.439.394.709	93,32%
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.900.000	150.190.599.911	**2176675,36%**	124.260.810.847	25.929.789.064	20,87%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	5.131.907.000	3.423.044.648.756	**66701,22%**	3.582.793.634.341	(159.748.985.585)	-4,46%
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL		14.961.725.496	-	22.693.035.784	(7.731.310.288)	-34,07%
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	3.300.000	13.726.464.999	**415953,48%**	15.015.061.686	(1.288.596.687)	-8,58%
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		1.547.403.986	-	2.546.831.730	(999.427.744)	-39,24%
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL		1.412.768.522.533	-	817.869.717.898	594.898.804.635	72,74%
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	10.626.338.428.000		**0,00%**	-		
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	6.891.486.000	315.675.651.865	**4580,66%**	54.165.965.036	261.509.686.829	482,79%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	60.000.000	2.830.114.173	**4716,86%**	2.192.153.211	637.960.962	29,10%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	6.831.486.000	312.845.537.692	**4579,47%**	51.973.811.825	260.871.725.867	501,93%
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	93.362.764.134	-	56.455.641.949	36.907.122.185	65,37%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening		93.362.764.134	-	56.455.641.949	36.907.122.185	65,37%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	2.090.547.029.000	1.770.265.769.281	**84,68%**	2.091.891.225.681	(321.625.456.400)	-15,37%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN		1.769.395.899.246	-	2.088.401.826.505	(319.005.927.259)	-15,28%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI		869.870.035	-	3.489.399.176	(2.619.529.141)	-75,07%
42399	Pendapatan Lain-Lain	3.761.008.781.000	1.126.425.695.995	**29,95%**	1.221.165.105.737	(94.739.409.742)	-7,76%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	20.192.163.000	11.710.632.497	**58,00%**	11.157.163.911	553.468.586	4,96%
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000	9.632.725.551	**51797,20%**	7.712.609.129	1.920.116.422	24,90%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)		25.000	-	-	25.000	
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah			-	-		
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia		111.998.379	-	-	111.998.379	
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan			-	-		
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi		2.539.828	-	140.853.710	(138.313.882)	-98,20%
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak		2.205.703.688	-	2.660.275.000	(454.571.312)	-17,09%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	3.740.798.021.000	1.102.762.071.052	**29,48%**	1.199.494.203.987	(96.732.132.935)	-8,06%
424	**Pendapatan Badan Layanan Umum**	**23.498.726.444.000**	**24.648.239.915.152**	**104,89%**	**21.704.295.961.034**	**2.943.943.954.118**	**13,56%**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**22.631.636.400.000**	**21.704.391.604.873**	**95,90%**	**19.471.851.778.837**	**2.232.539.826.036**	**11,47%**
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	19.356.712.186.000	18.359.471.141.552	**94,85%**	17.237.212.849.937	1.122.258.291.615	6,51%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	5.809.918.676.000	6.509.988.422.078	**112,05%**	5.719.217.633.192	790.770.788.886	13,83%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	11.514.598.352.000	9.286.900.203.251	**80,65%**	9.324.580.999.440	(37.680.796.189)	-0,40%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	214.258.706.000	186.701.874.799	**87,14%**	162.582.735.402	24.119.139.397	14,83%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan		900.893.875	-	82.347.368	818.546.507	994,02%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian		-	-	-	-	
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.728.156.107.000	1.702.062.258.286	**98,49%**	1.557.810.037.540	144.252.220.746	9,26%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	1.900.000.000	887.702.776	**46,72%**	864.139.254	23.563.522	2,73%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	6.177.885.000	7.355.722.280	**119,07%**	6.007.373.560	1.348.348.720	22,44%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	81.702.460.000	664.674.064.207	**813,53%**	466.067.584.181	198.606.480.026	42,61%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	841.367.633.000	1.072.243.436.645	**127,44%**	742.623.094.171	329.620.342.474	44,39%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	687.279.000.000	932.200.572.897	**135,64%**	621.871.377.002	310.329.195.895	49,90%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		6.393.496.572	-	-	6.393.496.572	
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah		1.993.747.200	-	165.000.000	1.828.747.200	1108,33%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	154.088.633.000	131.655.619.976	**85,44%**	120.586.717.169	11.068.902.807	9,18%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	2.433.556.581.000	2.272.677.026.676	**93,39%**	1.492.015.834.729	780.661.191.947	52,32%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan			-	-		
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah			-	-		
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	1.456.768.000	3.883.423.283	**266,58%**	3.533.385.415	350.037.868	9,91%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	569.521.399.000	559.547.596.187	**98,25%**	420.322.358.013	139.225.238.174	33,12%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	16.723.060.000	27.032.263.771	**161,65%**	24.478.804.283	2.553.459.488	10,43%
424136	Pendapatan Investasi	995.179.000.000	688.344.353.174	**69,17%**	615.220.144.470	73.124.208.704	11,89%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	850.676.354.000	993.869.390.261	**116,83%**	428.461.142.548	565.408.247.713	131,96%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	-	108.230.165.667	-	83.863.755.868	24.366.409.799	29,05%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	-	57.244.726.688	-	45.711.363.265	11.533.363.423	25,23%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan		2.820.043.500	-	5.269.437.781	(2.449.394.281)	-46,48%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan		36.419.857.426	-	16.454.981.800	19.964.875.626	121,33%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda		16.288.422.000	-	22.235.603.933	(5.947.181.933)	-26,75%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan			-	-		
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		1.716.403.762	-	1.751.339.751	(34.935.989)	-1,99%
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara			-	-		
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya			-	-		
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	-	50.985.438.979	-	38.152.392.603	12.833.046.376	33,64%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan		5.673.249.000	-	15.000.950.000	(9.327.701.000)	-62,18%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		11.290.040.900	-	5.932.273.152	5.357.767.748	90,32%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda		17.203.570.000	-	9.998.612.070	7.204.957.930	72,06%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan		-	-	-	-	
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		824.223.287	-	-	824.223.287	
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara			-	-		
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya		15.994.355.792	-	7.220.557.381	8.773.798.411	121,51%
4243	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**251.099.991.000**	**1.339.038.388.726**	**533,27%**	**1.081.392.058.923**	**257.646.329.803**	**23,83%**
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	251.099.991.000	1.339.038.388.726	**533,27%**	1.081.392.058.923	257.646.329.803	23,83%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	9.803.236.000	70.891.881.105	**723,15%**	42.256.194.636	28.635.686.469	67,77%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	240.508.411.000	1.171.070.729.365	**486,91%**	996.179.627.837	174.891.101.528	17,56%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	788.344.000	97.075.778.256	**12313,89%**	42.956.236.450	54.119.541.806	125,99%
4249	**Pendapatan BLU Lainnya**	**615.990.053.000**	**1.496.579.755.886**	**242,96%**	**1.067.188.367.406**	**429.391.388.480**	**40,24%**
42491	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000	1.496.579.755.886	**242,96%**	1.067.188.367.406	429.391.388.480	40,24%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	615.990.053.000	1.496.579.755.886	**242,96%**	1.067.188.367.406	429.391.388.480	40,24%
				-			
43	**Penerimaan Hibah**	**4.483.631.249.000**	**6.832.500.887.004**	**152,39%**	**5.786.749.186.777**	**1.045.751.700.227**	**18,07%**
431	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri**	-	**6.832.500.887.004**	-	**5.786.749.186.777**	**1.045.751.700.227**	**18,07%**
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	-	**1.614.959.045.913**	-	**948.005.796.311**	**657.491.673.879**	**69,36%**
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-		-	-		
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan			-	-		
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri -Terencana Lembaga/Badan Usaha		-	-	-	-	
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana Lainnya			-	-		
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas		426.022.593.757	-	414.188.707.700	1.427.736.414	0,34%
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang		412.748.969.114	-	411.321.232.700	1.427.736.414	0,35%
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa		13.273.624.643	-	2.867.475.000	10.406.149.643	362,90%
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga		-	-	-	-	
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		1.188.936.452.156	-	533.817.088.611	656.063.937.465	122,90%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Perorangan		1.694.593.930	-	2.639.167.850	(944.573.920)	-35,79%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha		125.229.823.031	-	137.005.740.382	(11.775.917.351)	-8,60%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Pemerintah Daerah		1.056.935.885.195	-	394.172.180.379	662.763.704.816	168,14%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya		5.076.150.000	-	-	5.076.150.000	
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**		**5.217.541.841.091**	-	**4.838.743.390.466**	**378.798.450.625**	**7,83%**
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	1.987.042.923.829	-	2.776.369.367.823	(789.326.443.994)	-28,43%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan			-	143.794.500	(143.794.500)	-100,00%
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral		834.963.018.773	-	816.147.401.739	18.815.617.034	2,31%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral		1.151.978.658.565	-	1.943.618.224.054	(791.639.565.489)	-40,73%

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2013	%	TAHUN ANGGARAN 2012	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya		101.246.491	-	16.459.947.530	(16.358.701.039)	-99,38%
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas		1.872.600.087.181	-	1.230.858.660.098	641.741.427.083	52,14%
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang		280.793.151.871	-	355.406.477.276	(74.613.325.405)	-20,99%
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa		1.591.806.935.310	-	875.452.182.822	716.354.752.488	81,83%
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga		1.357.898.830.081	-	831.515.362.545	526.383.467.536	63,30%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan		177.934.000	-	-	177.934.000	
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral		313.994.295.486	-	88.737.200.479	225.257.095.007	253,85%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral		989.733.078.584	-	708.306.049.484	281.427.029.100	39,73%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya		53.993.522.011	-	34.472.112.582	19.521.409.429	56,63%
Jumlah Penerimaan		**1.502.005.024.993.000**	**1.438.891.069.562.744**	**95,80%**	**1.338.109.629.172.958**	**100.781.440.389.786**	**7,53%**

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2013
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	**BUMN Perbankan**	
1	Bank BRI	3.153.248.000.000,00
2	Bank Mandiri	2.790.731.860.000,00
3	Bank BNI	1.268.306.324.365,00
4	Bank BTN	246.143.984.220,00
5	Bank Bukopin	32.477.120.436,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN		**7.490.907.289.021,00**
B	**BUMN NON PERBANKAN**	
1	PT Pertamina	7.795.000.000.000,00
2	PT Telkom	4.501.665.478.926,00
3	PT Perusahaan Gas Negara	2.800.058.788.555,00
4	PT Pupuk Indonesia	1.724.887.180.010,00
5	PT PLN	1.443.799.800.000,00
6	PT Semen Indonesia	1.112.662.424.301,00
7	PT Bukit Asam	1.079.747.468.713,00
8	PT Pegadaian	786.929.026.000,00
9	PT Asuransi Jasa Rahardja	661.345.000.000,00
10	PT Pelindo II	624.723.070.000,00
11	PT Jasa Marga	448.585.264.400,00
12	PT Angkasa Pura II	446.743.770.448,00
13	PT Perkebunan Nusantara III	311.818.830.587,00
14	PT Pelindo III	295.020.190.600,00
15	PT Aneka Tambang	291.948.080.000,00
16	PT Angkasa Pura I	251.785.069.661,00
17	PT Perkebunan Nusantara IV	244.100.148.979,00
18	PT Inalum	108.170.850.308,00
19	PT Timah	140.261.550.000,00
20	PT Bio farma	105.178.377.000,00
21	PT Pelindo I	98.758.000.000,00
22	PT Perkebunan Nusantara V	93.684.543.381,00
23	PT Wijaya Karya	89.648.000.000,00
24	PT Pelindo IV	88.511.000.000,00
25	PT Perkebunan Nusantara X	75.784.162.490,00
26	PT KAI	67.557.000.000,00
27	PT Jamkrindo	64.632.000.000,00
28	PT PPA	64.111.072.957,00
29	PT Semen Baturaja	59.702.504.600,00
30	PT Asuransi Jasindo	51.267.000.000,00
31	PT ASDP	49.926.871.126,00
32	PT Pembangunan Perumahan	47.392.444.564,10
33	PT Socfin Indonesia	75.988.799.200,00
34	PT Perkebunan Nusantara IX	35.372.412.599,00

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
35	PT Pos Indonesia	34.248.732.000,00
36	PT Perkebunan Nusantara VI	30.391.085.651,00
37	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	28.467.975.002,00
38	PT Kimia Farma	27.699.306.809,00
39	PT Rajawali Nusantara Indonesia	27.031.537.205,00
40	PT Indosat	26.809.095.000,00
41	PT Perkebunan Nusantara XII	25.783.390.682,00
42	PT Perkebunan Nusantara VIII	23.724.987.050,00
43	PT Perkebunan Nusantara XI	22.792.705.920,00
44	PT Adhi Karya	21.582.549.240,00
45	PT Waskita Karya	13.820.333.310,00
46	PT SIER	13.633.780.919,00
47	PT ASEI	13.123.000.000,00
48	PT Biro Klasifikasi Indonesia	10.115.702.950,00
49	PT Surveyor Indonesia	9.416.762.311,00
50	Perum Perumnas	8.770.055.039,00
51	PT Kliring Berjangka Indonesia	8.404.567.004,00
52	PT Bhanda Ghara Reksa	7.407.841.000,00
53	PT Perkebunan Nusantara XIII	6.484.000.000,00
54	PT Sucofindo	5.082.101.950,00
55	PT Bali Tourism Developtment	4.998.398.000,00
56	PT PNM	4.157.950.175,00
57	PT IndoFarma	3.425.000.000,00
58	PT Kawasan Industri Medan	3.247.513.265,00
59	PT Kawasan Berikat Nusantara	3.082.339.930,00
60	PT Perkebunan Nusantara II	1.500.000.000,00
61	PT Kawasan Industri Makassar	1.340.400.000,00
62	PT Rekayasa Industri	1.267.298.000,00
63	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	795.245.815,00
64	PT Inhutani I	600.000.000,00
65	PT Balai Pustaka	200.000.000,00
66	PT Inhutani V	120.000.000,00
67	PT PDIP Batam	85.865.000,00
68	PT JIEP	8.321.062.630,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		**26.534.696.761.262,10**
JUMLAH SELURUHNYA		**34.025.604.050.283,10**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2013
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**730.867.163.000**	**649.949.767.142**	**504.096.547**	**649.445.670.595**	**(81.421.492.405)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	87.060.184.000	65.217.874.290	42.466.347	65.175.407.943	(21.884.776.057)
02	MAJELIS	643.806.979.000	584.731.892.852	461.630.200	584.270.262.652	(59.536.716.348)
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**2.898.569.426.000**	**2.355.371.416.995**	**20.099.423.464**	**2.335.271.993.531**	**(563.297.432.469)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	730.211.213.000	542.852.978.181	786.348.993	542.066.629.188	(188.144.583.812)
02	DEWAN	2.168.358.213.000	1.812.518.438.814	19.313.074.471	1.793.205.364.343	(375.152.848.657)
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**2.828.728.314.000**	**2.416.055.620.507**	**30.190.189.009**	**2.385.865.431.498**	**(442.862.882.502)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.043.827.091.000	1.745.280.478.597	8.815.203.243	1.736.465.275.354	(307.361.815.646)
02	B.P.K. PUSAT	784.901.223.000	670.775.141.910	21.374.985.766	649.400.156.144	(135.501.066.856)
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**7.254.631.337.000**	**6.656.304.872.501**	**9.174.151.272**	**6.647.130.721.229**	**(607.500.615.771)**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	6.845.222.945.000	6.262.719.775.380	7.365.714.527	6.255.354.060.853	(589.868.884.147)
02	KEPANITERAAN	113.864.569.000	110.024.541.747	1.797.470	110.022.744.277	(3.841.824.723)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	110.498.514.000	104.740.263.526	733.263.030	104.007.000.496	(6.491.513.504)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	62.736.300.000	60.729.736.128	246.786.681	60.482.949.447	(2.253.350.553)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	21.137.700.000	19.674.035.715	80.427.081	19.593.608.634	(1.544.091.366)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	74.773.309.000	72.364.493.571	743.875.586	71.620.617.985	(3.152.691.015)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	26.398.000.000	26.052.026.434	2.286.897	26.049.739.537	(348.260.463)
006	**KEJAKSAAN AGUNG**	**4.347.164.974.000**	**3.864.458.579.861**	**3.614.932.781**	**3.860.843.647.080**	**(486.321.326.920)**
01	KEJAKSAAN AGUNG	4.347.164.974.000	3.864.458.579.861	3.614.932.781	3.860.843.647.080	(486.321.326.920)
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**2.439.914.722.000**	**2.675.902.596.745**	**2.864.008.692**	**2.673.038.588.053**	**233.123.866.053**
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.345.820.996.911	1.044.560.185.840	334.336.296	1.044.225.849.544	(301.595.147.367)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	477.197.558.803	437.559.366.630	11.236.115	437.548.130.515	(39.649.428.288)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	282.303.159.604	565.358.883.090	1.223.035.080	564.135.848.010	281.832.688.406
05	SEKRETARIAT MILITER	35.663.988.451	33.142.525.584	94.533.804	33.047.991.780	(2.615.996.671)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	34.909.143.764	35.583.239.661		35.583.239.661	674.095.897
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	43.546.617.219	39.963.166.525	62.803.428	39.900.363.097	(3.646.254.122)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP)	75.309.376.082	413.985.774.873	279.598.020	413.706.176.853	338.396.800.771
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	145.163.881.167	105.749.454.542	858.465.949	104.890.988.593	(40.272.892.574)
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**15.701.136.031.999**	**14.459.324.877.489**	**11.085.785.513**	**14.448.239.091.976**	**(1.252.896.940.023)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.380.842.348.517	1.368.668.353.900	1.394.241.184	1.367.274.112.716	(13.568.235.801)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	68.467.579.912	55.278.097.658	143.237.809	55.134.859.849	(13.332.720.063)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	229.517.676.889	215.197.813.729	28.101.493	215.169.712.236	(14.347.964.653)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	475.742.659.867	506.987.843.377	620.519.984	506.367.323.393	30.624.663.526
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.688.886.398.664	10.041.192.399.848	5.499.557.295	10.035.692.842.553	(653.193.556.111)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	584.847.743.739	505.641.829.204	2.398.545.327	503.243.283.877	(81.604.459.862)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	193.781.467.635	152.817.830.051	316.529.010	152.501.301.041	(41.280.166.594)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.648.262.074.533	1.218.554.917.584	200.005.775	1.218.354.911.809	(429.907.162.724)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	80.548.892.507	72.092.425.320	262.408.609	71.830.016.711	(8.718.875.796)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	66.032.735.245	60.447.072.451	106.351.260	60.340.721.191	(5.692.014.054)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	284.206.454.492	262.446.294.367	116.287.767	262.330.006.600	(21.876.447.892)
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**5.680.095.139.999**	**5.106.091.257.119**	**11.243.825.561**	**5.094.847.431.558**	**(585.247.708.441)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.737.966.135.959	4.179.458.512.841	6.126.173.827	4.173.332.339.014	(564.633.796.945)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	185.477.016.070	180.593.689.794	1.117.122.462	179.476.567.332	(6.000.448.738)
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	44.869.155.863	45.701.863.255	2.009.229.404	43.692.633.851	(1.176.522.012)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	50.387.135.618	47.935.586.643	192.831.212	47.742.755.431	(2.644.380.187)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	384.115.992.255	385.364.785.098	157.940.207	385.206.844.891	1.090.852.636
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	67.607.271.369	63.542.264.270	143.602.104	63.398.662.166	(4.208.609.203)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	34.226.517.155	35.297.776.370	114.878.192	35.182.898.178	956.381.023
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	126.636.331.850	121.087.890.102	600.605.516	120.487.284.586	(6.149.047.264)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	23.117.661.356	23.044.075.461	293.614.806	22.750.460.655	(367.200.701)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	25.691.922.505	24.064.813.285	487.827.831	23.576.985.454	(2.114.937.051)
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**83.528.025.345.000**	**87.805.352.632.363**	**98.667.297.761**	**87.706.685.334.602**	**4.178.659.989.602**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	22.677.861.921.858	28.783.946.305.955	64.771.390.814	28.719.174.915.141	6.041.312.993.283
21	MARKAS BESAR TNI	6.969.109.677.752	6.850.079.150.320	2.665.293.066	6.847.413.857.254	(121.695.820.498)
22	MARKAS BESAR TNI AD	33.818.433.157.344	32.276.914.099.301	16.720.793.517	32.260.193.305.784	(1.558.239.851.560)
23	MARKAS BESAR TNI AL	10.619.564.153.155	10.443.526.350.888	1.431.526.574	10.442.094.824.314	(177.469.328.841)
24	MARKAS BESAR TNI AU	9.443.056.434.891	9.450.886.725.899	13.078.293.790	9.437.808.432.109	(5.248.002.782)
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**7.772.407.841.000**	**7.021.558.142.485**	**25.382.057.401**	**6.996.176.085.084**	**(776.231.755.916)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.018.403.345.343	5.538.656.928.517	15.268.037.180	5.523.388.891.337	(495.014.454.006)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	29.670.192.615	28.956.905.932	560.930.708	28.395.975.224	(1.274.217.391)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	356.495.497.575	268.877.903.544	1.460.359.556	267.417.543.988	(89.077.953.587)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	70.240.208.378	63.081.234.836	330.955.076	62.750.279.760	(7.489.928.618)
06	DITJEN IMIGRASI	919.804.535.475	839.342.435.018	7.039.013.079	832.303.421.939	(87.501.113.536)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	98.964.880.618	75.821.809.361	301.469.122	75.520.340.239	(23.444.540.379)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53.814.459.668	36.905.852.162	319.951.790	36.585.900.372	(17.228.559.296)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	31.869.712.035	28.641.960.598	2.224.412	28.639.736.186	(3.229.975.849)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	89.089.774.358	48.147.911.350	62.600.334	48.085.311.016	(41.004.463.342)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	23.599.969.208	21.407.416.712	35.086.965	21.372.329.747	(2.227.639.461)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	80.455.265.730	71.717.784.455	1.429.179	71.716.355.276	(8.738.910.454)
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**18.381.475.285.000**	**17.117.698.003.071**	**41.810.508.846**	**17.075.887.494.225**	**(1.305.587.790.775)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	7.062.492.659.394	6.189.529.457.420	32.319.318.995	6.157.210.138.425	(905.282.520.969)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	106.335.906.380	100.363.210.340	263.592.279	100.099.618.061	(6.236.288.319)
03	DITJEN ANGGARAN	133.926.995.275	126.499.137.388	429.580.469	126.069.556.919	(7.857.438.356)
04	DITJEN PAJAK	5.197.019.999.604	5.111.913.363.451	3.534.976.122	5.108.378.387.329	(88.641.612.275)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.551.579.130.349	2.453.104.520.943	1.245.797.006	2.451.858.723.937	(99.720.406.412)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	121.579.830.483	139.789.340.740	458.030.426	139.331.310.314	17.751.479.831
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	78.776.516.223	74.594.517.349	204.348.206	74.390.169.143	(4.386.347.080)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.757.091.174.124	1.638.508.705.225	1.159.492.062	1.637.349.213.163	(119.741.960.961)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	673.866.353.424	617.925.143.860	890.218.608	617.034.925.252	(56.831.428.172)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	541.419.111.965	526.747.235.120	1.071.763.669	525.675.471.451	(15.743.640.514)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	157.387.607.779	138.723.371.235	233.391.004	138.489.980.231	(18.897.627.548)
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**16.380.078.975.000**	**15.967.185.299.098**	**35.914.658.392**	**15.931.270.640.706**	**(448.808.334.294)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.120.536.330.433	1.094.410.312.429	2.816.986.927	1.091.593.325.502	(28.943.004.931)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	62.072.398.380	62.016.018.308	34.189.375	61.981.828.933	(90.569.447)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.637.821.741.263	2.337.313.832.536	17.266.684.321	2.320.047.148.215	(317.774.593.048)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	673.279.121.035	584.536.029.063	152.556.902	584.383.472.161	(88.895.648.874)
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.561.712.366.098	1.431.329.434.825	716.740.579	1.430.612.694.246	(131.099.671.852)
06	DITJEN PETERNAKAN	2.503.933.816.466	2.360.354.831.097	2.498.644.277	2.357.856.186.820	(146.077.629.646)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	541.649.765.511	561.870.339.829	497.996.621	561.372.343.208	19.722.577.697
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	3.130.049.747.673	3.314.145.638.757	7.098.081.870	3.307.047.556.887	176.997.809.214
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.594.470.200.779	1.625.489.276.016	1.792.778.724	1.623.696.497.292	29.226.296.513
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.225.721.920.457	1.234.334.984.265	1.776.452.595	1.232.558.531.670	6.836.611.213
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	591.239.715.028	606.112.604.135	181.067.592	605.931.536.543	14.691.821.515
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	737.591.851.877	755.271.997.838	1.082.478.609	754.189.519.229	16.597.667.352
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**3.087.817.435.000**	**2.803.479.360.490**	**5.805.576.853**	**2.797.673.783.637**	**(290.143.651.363)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.018.962.075.260	988.428.912.240	4.090.474.127	984.338.438.113	(34.623.637.147)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	292.772.991.262	230.398.847.296	242.349.478	230.156.497.818	(62.616.493.444)
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	398.628.741.452	391.866.971.669	18.084	391.866.953.585	(6.761.787.867)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	264.213.007.572	113.060.533.807	6.039.607	113.054.494.200	(151.158.513.372)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	393.202.659.914	380.506.658.506	591.237.497	379.915.421.009	(13.287.238.905)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	45.801.372.150	43.950.363.733	158.616.889	43.791.746.844	(2.009.625.306)
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN. IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	511.963.588.070	503.828.805.046	576.546.037	503.252.259.009	(8.711.329.061)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	108.019.116.764	102.235.642.719	104.924.432	102.130.718.287	(5.888.398.477)
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	54.253.882.556	49.202.625.474	35.370.702	49.167.254.772	(5.086.627.784)
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**17.371.542.412.999**	**11.194.002.233.239**	**7.859.828.875**	**11.186.142.404.364**	**(6.185.400.008.635)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.123.307.925.675	656.430.109.253	288.228.519	656.141.880.734	(467.166.044.941)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	128.383.801.168	93.670.398.755	2.173.265.284	91.497.133.471	(36.886.667.697)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	2.156.520.697.098	1.620.248.267.196	193.871.322	1.620.054.395.874	(536.466.301.224)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	9.464.358.896.042	5.376.670.562.516	934.260.158	5.375.736.302.358	(4.088.622.593.684)
06	DITJEN MINERAL. BATUBARA DAN PANAS BUMI	403.210.069.990	277.448.173.752	355.896.601	277.092.277.151	(126.117.792.839)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	74.879.432.813	66.588.564.067	120.769.570	66.467.794.497	(8.411.638.316)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	746.435.467.424	619.909.671.143	897.585.456	619.012.085.687	(127.423.381.737)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	657.414.016.267	601.997.585.162	409.526.462	601.588.058.700	(55.825.957.567)
13	BADAN GEOLOGI	1.007.027.576.950	839.237.893.290	1.734.035.729	837.503.857.561	(169.523.719.389)
14	BPH MIGAS	340.252.165.760	157.705.815.557	5.033.300	157.700.782.257	(182.551.383.503)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.269.752.363.813	884.095.192.548	747.356.474	883.347.836.074	(386.404.527.739)
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**35.269.321.221.000**	**31.738.545.616.219**	**20.285.687.091**	**31.718.259.929.128**	**(3.551.061.291.872)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	530.708.568.929	949.140.719.149	546.897.818	948.593.821.331	417.885.252.402
02	INSPEKTORAT JENDERAL	85.400.121.018	61.561.750.441	47.969.419	61.513.781.022	(23.886.339.996)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	3.000.811.247.578	2.677.615.627.446	940.891.683	2.676.674.735.763	(324.136.511.815)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.549.214.146.549	9.918.820.141.262	11.689.475.567	9.907.130.665.695	(1.642.083.480.854)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	7.537.415.160.269	7.010.019.295.332	2.252.672.166	7.007.766.623.166	(529.648.537.103)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	9.334.158.137.470	8.334.264.644.960	4.163.975.730	8.330.100.669.230	(1.004.057.468.240)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	220.390.683.180	187.355.871.197	27.794.067	187.328.077.130	(33.062.606.050)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	3.011.223.156.008	2.599.767.566.432	616.010.641	2.599.151.555.791	(412.071.600.217)
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**79.707.726.427.000**	**72.346.210.576.894**	**516.360.775.940**	**71.829.849.800.954**	**(7.877.876.626.046)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.423.955.254.147	2.271.732.246.143	2.846.495.325	2.268.885.750.818	844.930.496.671
02	INSPEKTORAT JENDERAL	201.136.458.915	163.697.077.477	12.729.942.215	150.967.135.262	(50.169.323.653)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR	16.511.829.958.408	16.007.265.567.121	318.790.312.581	15.688.475.254.540	(823.354.703.868)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	40.583.093.783.115	34.070.069.356.405	65.968.806.042	34.004.100.550.363	(6.578.993.232.752)
05	DITJEN PAUDNI	2.374.274.074.443	2.290.967.712.204	32.296.250.554	2.258.671.461.650	(115.602.612.793)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.272.453.148.874	1.017.233.134.086	11.020.028.864	1.006.213.105.222	(266.240.043.652)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	12.420.252.988.260	12.175.594.393.034	48.030.575.850	12.127.563.817.184	(292.689.171.076)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	372.790.890.156	298.890.849.675	280.039.751	298.610.809.924	(74.180.080.232)
14	BADAN PSDMPK DAN PMP	2.572.048.494.896	2.458.578.040.389	22.337.851.149	2.436.240.189.240	(135.808.305.656)
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.975.891.375.786	1.592.182.200.360	2.060.473.609	1.590.121.726.751	(385.769.649.035)
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**36.592.151.916.000**	**35.415.566.644.983**	**55.084.372.366**	**35.360.482.272.617**	**(1.231.669.643.383)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.163.325.731.431	3.133.410.585.542	10.762.335.461	3.122.648.250.081	(40.677.481.350)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	87.177.347.208	76.541.806.535	711.049.737	75.830.756.798	(11.346.590.410)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.033.512.640.485	1.990.967.588.961	9.790.027.877	1.981.177.561.084	(52.335.079.401)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	24.086.933.767.082	23.292.173.494.096	9.805.080.082	23.282.368.414.014	(804.565.353.068)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.175.803.723.401	2.196.751.318.931	1.212.912.536	2.195.538.406.395	19.734.682.994
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.617.375.299.227	1.566.153.816.658	7.693.033.794	1.558.460.782.864	(58.914.516.363)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	518.091.968.977	536.196.572.562	3.323.306.569	532.873.265.993	14.781.297.016

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	2.909.931.438.189	2.623.371.461.698	11.786.626.310	2.611.584.835.388	(298.346.602.801)
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**45.419.633.846.000**	**41.943.793.284.337**	**56.442.212.036**	**41.887.351.072.301**	**(3.532.282.773.699)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.914.253.388.345	1.640.016.445.117	5.622.359.286	1.634.394.085.831	(279.859.302.514)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	147.069.821.399	115.498.188.201	4.365.053.906	111.133.134.295	(35.936.687.104)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2.999.399.614.106	2.788.211.483.394	5.356.918.537	2.782.854.564.857	(216.545.049.249)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	36.867.410.963.208	34.234.240.847.771	28.904.876.785	34.205.335.970.986	(2.662.074.992.222)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.032.308.055.862	1.024.306.668.905	634.165.222	1.023.672.503.683	(8.635.552.179)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	568.066.704.609	541.739.820.536	635.859.588	541.103.960.948	(26.962.743.661)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	611.704.175.178	530.639.328.974	2.321.847.080	528.317.481.894	(83.386.693.284)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	226.089.959.513	181.280.577.406	1.015.972.083	180.264.605.323	(45.825.354.190)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	559.654.757.867	475.813.964.587	3.649.004.614	472.164.959.973	(87.489.797.894)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	493.676.405.912	412.045.959.446	3.936.154.935	408.109.804.511	(85.566.601.401)
026	**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**4.956.684.125.000**	**4.585.083.192.374**	**10.210.212.472**	**4.574.872.979.902**	**(381.811.145.098)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	396.684.763.722	455.349.136.333	1.117.993.700	454.231.142.633	57.546.378.911
02	INSPEKTORAT JENDERAL	49.179.297.997	44.873.943.648	64.906.066	44.809.037.582	(4.370.260.415)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	854.743.576.210	786.794.046.428	3.840.996.127	782.953.050.301	(71.790.525.909)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL	322.887.423.180	239.739.600.978	3.501.319.005	236.238.281.973	(86.649.141.207)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	859.063.515.849	793.505.276.668	350.850.824	793.154.425.844	(65.909.090.005)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	909.756.223.901	857.366.689.227	403.795.666	856.962.893.561	(52.793.330.340)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	445.574.492.733	416.657.651.946	221.987.369	416.435.664.577	(29.138.828.156)
11	BADAN PENELITIAN. PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	84.511.496.980	77.863.776.326	8.601.468	77.855.174.858	(6.656.322.122)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	1.034.283.334.427	912.933.070.820	699.762.247	912.233.308.573	(122.050.025.854)
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**16.014.112.574.000**	**15.968.742.518.122**	**146.710.522.701**	**15.822.031.995.421**	**(192.080.578.579)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	182.385.298.294	180.958.509.475	749.743.183	180.208.766.292	(2.176.532.002)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	24.084.351.177	25.131.843.481	91.426.110	25.040.417.371	956.066.194
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	938.886.551.380	900.275.457.118	5.449.310.625	894.826.146.493	(44.060.404.887)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	896.423.696.918	914.399.984.891	3.232.367.029	911.167.617.862	14.743.920.944
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.745.727.909.956	13.721.780.597.207	136.350.150.778	13.585.430.446.429	(160.297.463.527)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	226.604.766.275	226.196.125.950	837.524.976	225.358.600.974	(1.246.165.301)
029	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**	**6.357.534.677.000**	**6.123.083.323.833**	**10.130.791.426**	**6.112.952.532.407**	**(244.582.144.593)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	434.250.889.453	645.589.102.563	867.494.338	644.721.608.225	210.470.718.772
02	INSPEKTORAT JENDERAL	56.124.863.862	55.203.905.913	735.552.098	54.468.353.815	(1.656.510.047)
03	DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN	262.127.330.147	311.276.790.551	266.282.431	311.010.508.120	48.883.177.974
04	DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	2.681.127.727.256	2.433.438.114.001	1.586.395.233	2.431.851.718.768	(249.276.008.488)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.676.521.338.180	1.522.891.706.941	3.260.998.919	1.519.630.708.022	(156.890.630.158)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	688.326.062.501	621.669.817.295	2.601.934.387	619.067.882.908	(69.258.179.593)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	273.405.835.143	262.029.800.296	656.202.751	261.373.597.545	(12.032.237.598)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN	285.650.630.459	270.984.086.273	155.931.269	270.828.155.004	(14.822.475.455)
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**6.976.526.748.000**	**6.572.444.035.236**	**2.705.259.550**	**6.569.738.775.686**	**(406.787.972.314)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	466.244.416.373	563.348.635.278	402.836.308	562.945.798.970	96.701.382.597
02	INSPEKTORAT JENDERAL	60.265.411.133	58.515.408.549	174.319.173	58.341.089.376	(1.924.321.757)
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.845.633.401.417	1.643.626.373.998	589.624.769	1.643.036.749.229	(202.596.652.188)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.271.868.543.981	1.151.499.300.265	348.943.075	1.151.150.357.190	(120.718.186.791)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	559.695.091.713	529.348.206.771	200.410.754	529.147.796.017	(30.547.295.696)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	666.419.492.703	634.315.086.643	253.768.277	634.061.318.366	(32.358.174.337)
07	DITJEN KELAUTAN. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	720.043.519.972	672.256.025.569	87.764.629	672.168.260.940	(47.875.259.032)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	575.930.893.040	548.240.129.135	289.436.744	547.950.692.391	(27.980.200.649)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.836.094.771	474.338.600.176	143.138.420	474.195.461.756	(26.640.633.015)
13	BADAN KARANTINA IKAN. PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	309.589.882.897	296.956.268.852	215.017.401	296.741.251.451	(12.848.631.446)
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**	**83.328.624.458.000**	**80.354.589.308.757**	**23.970.883.695**	**80.330.618.425.062**	**(2.998.006.032.938)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	679.348.094.425	1.075.457.437.668	173.835.688	1.075.283.601.980	395.935.507.555
02	INSPEKTORAT JENDERAL	110.742.045.843	83.491.995.556	2.071.055.388	81.420.940.168	(29.321.105.675)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	764.548.446.260	725.575.546.901	419.411.559	725.156.135.342	(39.392.310.918)
04	DITJEN BINA MARGA	37.550.252.869.021	36.018.545.642.750	12.545.790.082	36.005.999.852.668	(1.544.253.016.353)
05	DITJEN CIPTA KARYA	21.164.170.693.876	20.952.370.080.971	4.361.508.875	20.948.008.572.096	(216.162.121.780)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	22.337.814.269.819	20.777.384.652.739	3.279.437.539	20.774.105.215.200	(1.563.709.054.619)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	424.065.939.687	424.941.735.976	383.647.620	424.558.088.356	492.148.669
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	297.682.099.071	296.822.216.196	736.196.944	296.086.019.252	(1.596.079.819)
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK. HUKUM DAN KEAMANAN**	**518.193.274.000**	**446.586.333.440**	**317.136.408**	**446.269.197.032**	**(71.924.076.968)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK. HUKUM DAN KEAMANAN	518.193.274.000	446.586.333.440	317.136.408	446.269.197.032	(71.924.076.968)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**281.087.900.000**	**209.631.364.701**	**3.388.772.879**	**206.242.591.822**	**(74.845.308.178)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	281.087.900.000	209.631.364.701	3.388.772.879	206.242.591.822	(74.845.308.178)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**299.340.266.000**	**272.530.817.449**	**484.911.484**	**272.045.905.965**	**(27.294.360.035)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	299.340.266.000	272.530.817.449	484.911.484	272.045.905.965	(27.294.360.035)
040	**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.933.104.096.000**	**1.622.287.163.766**	**2.099.802.996**	**1.620.187.360.770**	**(312.916.735.230)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	211.012.867.875	189.311.901.221	131.188.796	189.180.712.425	(21.832.155.450)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	29.878.099.742	20.579.824.042	336.467.632	20.243.356.410	(9.634.743.332)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	387.722.599.594	306.441.314.965	418.850.218	306.022.464.747	(81.700.134.847)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	566.360.545.206	514.967.167.024	26.679.395	514.940.487.629	(51.420.057.577)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARI	318.741.630.811	264.036.414.917	150.721.704	263.885.693.213	(54.855.937.598)
11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN	285.099.256.126	228.092.674.337	754.041.256	227.338.633.081	(57.760.623.045)
12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA. DE	134.289.096.647	98.857.867.260	281.853.995	98.576.013.265	(35.713.083.382)
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**134.637.813.000**	**109.929.082.348**	**682.754.775**	**109.246.327.573**	**(25.391.485.427)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	134.637.813.000	109.929.082.348	682.754.775	109.246.327.573	(25.391.485.427)
042	**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**	**628.105.650.000**	**801.044.268.273**	**509.653.084**	**800.534.615.189**	**172.428.965.189**
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	628.105.650.000	801.044.268.273	509.653.084	800.534.615.189	172.428.965.189
043	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**951.543.421.000**	**939.417.485.830**	**1.106.580.369**	**938.310.905.461**	**(13.232.515.539)**
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	951.543.421.000	939.417.485.830	1.106.580.369	938.310.905.461	(13.232.515.539)
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**	**1.739.998.862.000**	**1.607.349.460.830**	**160.202.611**	**1.607.189.258.219**	**(132.809.603.781)**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.739.998.862.000	1.607.349.460.830	160.202.611	1.607.189.258.219	(132.809.603.781)
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**234.710.156.000**	**225.162.066.994**	**626.487.566**	**224.535.579.428**	**(10.174.576.572)**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	234.710.156.000	225.162.066.994	626.487.566	224.535.579.428	(10.174.576.572)
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**201.285.843.000**	**162.987.167.147**	**872.486.035**	**162.114.681.112**	**(39.171.161.888)**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	201.285.843.000	162.987.167.147	872.486.035	162.114.681.112	(39.171.161.888)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**1.511.782.586.000**	**1.498.214.581.468**	**681.082.409**	**1.497.533.499.059**	**(14.249.086.941)**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.511.782.586.000	1.498.214.581.468	681.082.409	1.497.533.499.059	(14.249.086.941)
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**1.685.050.158.000**	**1.600.027.967.449**	**2.867.538.436**	**1.597.160.429.013**	**(87.889.728.987)**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.685.050.158.000	1.600.027.967.449	2.867.538.436	1.597.160.429.013	(87.889.728.987)
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**36.485.667.000**	**37.192.398.856**	**6.021.751**	**37.186.377.105**	**700.710.105**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	36.485.667.000	37.192.398.856	6.021.751	37.186.377.105	700.710.105
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**4.255.916.249.000**	**3.970.168.187.744**	**1.713.824.606**	**3.968.454.363.138**	**(287.461.885.862)**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.255.916.249.000	3.970.168.187.744	1.713.824.606	3.968.454.363.138	(287.461.885.862)
055	**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**	**1.043.304.410.000**	**1.106.285.122.704**	**1.620.565.578**	**1.104.664.557.126**	**61.360.147.126**
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.043.304.410.000	1.106.285.122.704	1.620.565.578	1.104.664.557.126	61.360.147.126
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**4.430.165.868.000**	**3.684.692.260.346**	**7.492.622.529**	**3.677.199.637.817**	**(752.966.230.183)**
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.430.165.868.000	3.684.692.260.346	7.492.622.529	3.677.199.637.817	(752.966.230.183)
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**479.150.804.000**	**458.923.251.329**	**116.801.666**	**458.806.449.663**	**(20.344.354.337)**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	479.150.804.000	458.923.251.329	116.801.666	458.806.449.663	(20.344.354.337)
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.739.533.436.000**	**3.239.484.377.900**	**3.879.477.515**	**3.235.604.900.385**	**(503.928.535.615)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	223.256.324.192	252.236.416.252	102.328.421	252.134.087.831	28.877.763.639
02	INSPEKTORAT JENDERAL	24.446.308.023	26.545.813.868	14.445.235	26.531.368.633	2.085.060.610
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	691.944.608.527	678.111.932.226	2.093.352.346	676.018.579.880	(15.926.028.647)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	155.470.408.505	116.716.230.292	504.824.303	116.211.405.989	(39.259.002.516)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	2.257.684.155.611	1.755.127.650.532	492.996.121	1.754.634.654.411	(503.049.501.200)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	166.575.197.116	176.976.808.256	660.534.889	176.316.273.367	9.741.076.251
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	220.156.434.026	233.769.526.474	10.996.200	233.758.530.274	13.602.096.248
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**47.109.426.030.000**	**43.418.143.855.391**	**23.660.560.498**	**43.394.483.294.893**	**(3.714.942.735.107)**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	47.109.426.030.000	43.418.143.855.391	23.660.560.498	43.394.483.294.893	(3.714.942.735.107)
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**1.164.499.219.000**	**1.133.970.310.677**	**16.680.461.653**	**1.117.289.849.024**	**(47.209.369.976)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.164.499.219.000	1.133.970.310.677	16.680.461.653	1.117.289.849.024	(47.209.369.976)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**245.227.520.000**	**209.691.563.418**	**640.480.653**	**209.051.082.765**	**(36.176.437.235)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	245.227.520.000	209.691.563.418	640.480.653	209.051.082.765	(36.176.437.235)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**705.750.673.000**	**608.662.781.273**	**1.489.929.287**	**607.172.851.986**	**(98.577.821.014)**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	705.750.673.000	608.662.781.273	1.489.929.287	607.172.851.986	(98.577.821.014)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**1.068.544.744.000**	**1.067.479.640.179**	**17.752.651.677**	**1.049.726.988.502**	**(18.817.755.498)**
01	PELAKSANA HARIAN BNN	1.068.544.744.000	1.067.479.640.179	17.752.651.677	1.049.726.988.502	(18.817.755.498)
067	**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**2.509.829.360.000**	**2.468.641.415.376**	**678.841.024**	**2.467.962.574.352**	**(41.866.785.648)**
01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.509.829.360.000	2.468.641.415.376	678.841.024	2.467.962.574.352	(41.866.785.648)
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**2.551.855.775.000**	**2.415.025.990.320**	**3.324.472.065**	**2.411.701.518.255**	**(140.154.256.745)**
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.551.855.775.000	2.415.025.990.320	3.324.472.065	2.411.701.518.255	(140.154.256.745)
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**72.611.701.000**	**74.520.644.234**	**262.108.338**	**74.258.535.896**	**1.646.834.896**
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	72.611.701.000	74.520.644.234	262.108.338	74.258.535.896	1.646.834.896
075	**BADAN METEOROLOGI. KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**1.312.421.313.000**	**1.438.017.055.318**	**600.823.531**	**1.437.416.231.787**	**124.994.918.787**
01	BADAN METEOROLOGI. KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.312.421.313.000	1.438.017.055.318	600.823.531	1.437.416.231.787	124.994.918.787
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**8.492.009.875.000**	**5.913.033.224.068**	**8.881.395.908**	**5.904.151.828.160**	**(2.587.858.046.840)**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.492.009.875.000	5.913.033.224.068	8.881.395.908	5.904.151.828.160	(2.587.858.046.840)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**199.108.930.000**	**213.105.855.284**	**142.428.439**	**212.963.426.845**	**13.854.496.845**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	199.108.930.000	213.105.855.284	142.428.439	212.963.426.845	13.854.496.845
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**79.691.716.000**	**73.932.230.941**	**514.798.480**	**73.417.432.461**	**(6.274.283.539)**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79.691.716.000	73.932.230.941	514.798.480	73.417.432.461	(6.274.283.539)
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**1.011.569.392.000**	**1.044.706.834.952**	**9.757.416.037**	**1.034.949.418.915**	**23.380.026.915**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.011.569.392.000	1.044.706.834.952	9.757.416.037	1.034.949.418.915	23.380.026.915
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**760.329.709.000**	**714.042.152.017**	**3.964.236.641**	**710.077.915.376**	**(50.251.793.624)**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	760.329.709.000	714.042.152.017	3.964.236.641	710.077.915.376	(50.251.793.624)
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**946.793.259.000**	**1.167.813.794.198**	**820.758.631**	**1.166.993.035.567**	**220.199.776.567**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	946.793.259.000	1.167.813.794.198	820.758.631	1.166.993.035.567	220.199.776.567
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**490.221.563.000**	**465.124.554.626**	**425.643.695**	**464.698.910.931**	**(25.522.652.069)**
01	L A P A N	490.221.563.000	465.124.554.626	425.643.695	464.698.910.931	(25.522.652.069)
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**	**558.532.409.000**	**535.402.450.461**	**1.825.253.425**	**533.577.197.036**	**(24.955.211.964)**
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	558.532.409.000	535.402.450.461	1.825.253.425	533.577.197.036	(24.955.211.964)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**98.547.152.000**	**89.391.213.162**	**344.986.391**	**89.046.226.771**	**(9.500.925.229)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	98.547.152.000	89.391.213.162	344.986.391	89.046.226.771	(9.500.925.229)
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**143.959.265.000**	**133.179.898.634**	**1.413.632.220**	**131.766.266.414**	**(12.192.998.586)**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	143.959.265.000	133.179.898.634	1.413.632.220	131.766.266.414	(12.192.998.586)
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**247.175.107.000**	**245.934.154.180**	**345.380.939**	**245.588.773.241**	**(1.586.333.759)**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	247.175.107.000	245.934.154.180	345.380.939	245.588.773.241	(1.586.333.759)
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**175.358.688.000**	**155.545.926.682**	**1.936.335.391**	**153.609.591.291**	**(21.749.096.709)**
01	ARSIP NASIONAL	175.358.688.000	155.545.926.682	1.936.335.391	153.609.591.291	(21.749.096.709)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**535.918.649.000**	**582.861.749.619**	**3.030.414.824**	**579.831.334.795**	**43.912.685.795**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	535.918.649.000	582.861.749.619	3.030.414.824	579.831.334.795	43.912.685.795
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.225.630.476.000**	**1.070.100.470.275**	**2.875.558.350**	**1.067.224.911.925**	**(158.405.564.075)**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.225.630.476.000	1.070.100.470.275	2.875.558.350	1.067.224.911.925	(158.405.564.075)
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**2.949.553.079.000**	**2.707.117.679.362**	**4.655.849.229**	**2.702.461.830.133**	**(247.091.248.867)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	491.383.597.868	491.498.706.098	733.467.172	490.765.238.926	(618.358.942)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.228.623.907.548	1.130.139.974.177	1.426.686.012	1.128.713.288.165	(99.910.619.383)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	181.625.040.000	168.618.460.723	213.076.595	168.405.384.128	(13.219.655.872)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	265.735.732.141	236.568.031.113	22.667.181	236.545.363.932	(29.190.368.209)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	35.034.663.671	29.489.780.544	143.009.434	29.346.771.110	(5.687.892.561)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	358.910.304.071	321.989.278.366	22.255.252	321.967.023.114	(36.943.280.957)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	84.384.282.634	71.096.618.968	346.356.596	70.750.262.372	(13.634.020.262)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	64.734.858.721	57.174.881.689	35.330.844	57.139.550.845	(7.595.307.876)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	239.120.692.346	200.541.947.684	1.713.000.143	198.828.947.541	(40.291.744.805)
091	**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**	**4.724.896.276.000**	**4.298.101.749.428**	**827.058.332**	**4.297.274.691.096**	**(427.621.584.904)**
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.724.896.276.000	4.298.101.749.428	827.058.332	4.297.274.691.096	(427.621.584.904)
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**1.886.788.531.000**	**1.649.347.664.757**	**978.683.344**	**1.648.368.981.413**	**(238.419.549.587)**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.886.788.531.000	1.649.347.664.757	978.683.344	1.648.368.981.413	(238.419.549.587)
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**703.876.268.000**	**469.592.885.872**	**2.847.772.630**	**466.745.113.242**	**(237.131.154.758)**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	703.876.268.000	469.592.885.872	2.847.772.630	466.745.113.242	(237.131.154.758)
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**594.868.848.000**	**530.644.205.794**	**5.834.408.928**	**524.809.796.866**	**(70.059.051.134)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	381.668.848.000	340.247.211.990	119.287.447	340.127.924.543	(41.540.923.457)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	213.200.000.000	190.396.993.804	5.715.121.481	184.681.872.323	(28.518.127.677)
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**91.588.475.000**	**86.792.706.713**	**324.758.580**	**86.467.948.133**	**(5.120.526.867)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	91.588.475.000	86.792.706.713	324.758.580	86.467.948.133	(5.120.526.867)
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.479.248.846.000**	**2.986.236.602.669**	**16.973.769.820**	**2.969.262.832.849**	**1.490.013.986.849**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.479.248.846.000	2.986.236.602.669	16.973.769.820	2.969.262.832.849	1.490.013.986.849
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**	**392.826.615.000**	**373.406.376.456**	**642.456.125**	**372.763.920.331**	**(20.062.694.669)**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	392.826.615.000	373.406.376.456	642.456.125	372.763.920.331	(20.062.694.669)
105	**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**	**2.053.090.527.000**	**1.801.678.470.246**	**77.910.000**	**1.801.600.560.246**	**(251.489.966.754)**
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	2.053.090.527.000	1.801.678.470.246	77.910.000	1.801.600.560.246	(251.489.966.754)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**204.819.393.000**	**188.977.857.703**	**1.222.771.054**	**187.755.086.649**	**(17.064.306.351)**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	204.819.393.000	188.977.857.703	1.222.771.054	187.755.086.649	(17.064.306.351)
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**1.840.076.655.000**	**1.846.564.755.464**	**157.533.531**	**1.846.407.221.933**	**6.330.566.933**
01	BADAN SAR NASIONAL	1.840.076.655.000	1.846.564.755.464	157.533.531	1.846.407.221.933	6.330.566.933
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**113.358.275.000**	**120.264.133.855**	**1.291.181.479**	**118.972.952.376**	**5.614.677.376**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.358.275.000	120.264.133.855	1.291.181.479	118.972.952.376	5.614.677.376
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**365.782.000.000**	**90.855.966.818**	**11.216.500**	**90.844.750.318**	**(274.937.249.682)**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	365.782.000.000	90.855.966.818	11.216.500	90.844.750.318	(274.937.249.682)
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**67.794.595.000**	**65.112.153.381**	**1.094**	**65.112.152.287**	**(2.682.442.713)**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	67.794.595.000	65.112.153.381	1.094	65.112.152.287	(2.682.442.713)
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**274.124.430.000**	**206.612.655.664**	**1.584.400.312**	**205.028.255.352**	**(69.096.174.648)**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	274.124.430.000	206.612.655.664	1.584.400.312	205.028.255.352	(69.096.174.648)
112	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**	**935.013.106.000**	**846.889.841.830**	**2.960.000**	**846.886.881.830**	**(88.126.224.170)**
01	BPKPB BATAM	935.013.106.000	846.889.841.830	2.960.000	846.886.881.830	(88.126.224.170)
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**	**306.998.510.000**	**291.058.783.443**	**393.083.688**	**290.665.699.755**	**(16.332.810.245)**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	306.998.510.000	291.058.783.443	393.083.688	290.665.699.755	(16.332.810.245)
114	**SEKRETARIAT KABINET**	**204.671.037.000**	**161.478.954.849**	**1.057.730.122**	**160.421.224.727**	**(44.249.812.273)**
01	SEKRETARIAT KABINET	204.671.037.000	161.478.954.849	1.057.730.122	160.421.224.727	(44.249.812.273)
115	**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**	**1.856.964.490.000**	**1.691.394.768.682**	**3.887.324.614**	**1.687.507.444.068**	**(169.457.045.932)**
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.856.964.490.000	1.691.394.768.682	3.887.324.614	1.687.507.444.068	(169.457.045.932)
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**948.275.844.000**	**864.555.805.862**	**1.117.346.172**	**863.438.459.690**	**(84.837.384.310)**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	948.275.844.000	864.555.805.862	1.117.346.172	863.438.459.690	(84.837.384.310)
117	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**821.270.540.000**	**776.827.655.763**	**86.619.680**	**776.741.036.083**	**(44.529.503.917)**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	821.270.540.000	776.827.655.763	86.619.680	776.741.036.083	(44.529.503.917)
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**	**359.605.879.000**	**233.355.435.972**	**45.833.267**	**233.309.602.705**	**(126.296.276.295)**
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	359.605.879.000	233.355.435.972	45.833.267	233.309.602.705	(126.296.276.295)
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**574.819.706.693.000**	**554.095.461.250.334**	**270.342.328.857**	**553.825.118.921.477**	**(20.994.587.771.523)**
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	112.517.848.410.000	112.672.991.179.144	35.045.176.000	112.637.946.003.144	120.097.593.144
02	PENGELOLA HIBAH	2.346.514.640.000	1.302.956.172.580		1.302.956.172.580	(1.043.558.467.420)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	348.119.042.741.000	355.045.179.958.292		355.045.179.958.292	6.926.137.217.292
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	35.844.676.532.000	2.954.231.093.573	8.540.780.761	2.945.690.312.812	(32.898.986.219.188)
99	TRANSAKSI KHUSUS	75.991.624.370.000	82.120.102.846.745	226.756.372.096	81.893.346.474.649	5.901.722.104.649
		1.196.828.378.290.000	**1.138.753.362.644.636**	**1.590.475.346.396**	**1.137.162.887.298.240**	**(59.665.490.991.760)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2013
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	22.259.965.050	617.566.627.555	9.619.077.990	-	-	-	-	-	649.445.670.595
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	487.523.467.500	1.813.499.298.421	34.249.227.610	-	-	-	-	-	2.335.271.993.531
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	729.682.923.966	1.166.171.087.337	490.011.420.195	-	-	-	-	-	2.385.865.431.498
005	MAHKAMAH AGUNG	4.862.518.500.828	962.591.386.202	822.020.834.199	-	-	-	-	-	6.647.130.721.229
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.772.843.660.558	1.555.034.288.791	532.965.697.731	-	-	-	-	-	3.860.843.647.080
007	SEKRETARIAT NEGARA	304.997.108.706	2.016.100.183.099	351.941.296.248	-	-	-	-	-	2.673.038.588.053
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	441.619.464.298	4.667.565.362.411	1.033.829.880.845	-	-	-	8.305.224.384.422	-	14.448.239.091.976
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.167.212.857.539	2.584.960.229.952	342.674.344.067	-	-	-	-	-	5.094.847.431.558
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	34.125.503.742.672	12.834.154.491.818	40.748.129.390.112	-	-	-	(1.102.290.000)	-	87.706.685.334.602
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.234.664.542.717	2.856.608.398.251	904.903.144.116	-	-	-	-	-	6.996.176.085.084
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	8.066.062.119.782	6.964.286.532.459	1.647.994.361.546	397.544.480.438	-	-	-	-	17.075.887.494.225
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.806.187.018.601	7.567.020.719.925	1.262.690.481.472	-	-	-	5.295.372.420.708	-	15.931.270.640.706
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	524.922.730.884	1.651.445.952.842	621.305.099.911	-	-	-	-	-	2.797.673.783.637
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	533.862.382.768	3.985.500.069.629	6.666.779.951.967	-	-	-	-	-	11.186.142.404.364
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.950.792.958.299	6.183.732.107.026	23.583.734.863.803	-	-	-	-	-	31.718.259.929.128
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.901.095.642.189	22.635.547.217.179	7.021.566.505.851	-	-	-	31.271.640.435.735	-	71.829.849.800.954
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.094.448.435.494	14.789.155.514.923	7.371.607.598.107	-	-	-	8.105.270.724.093	-	35.360.482.272.617
025	KEMENTERIAN AGAMA	20.540.487.509.109	7.132.066.475.522	2.659.391.222.191	-	-	-	11.555.405.865.479	-	41.887.351.072.301
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	345.748.894.857	3.139.796.335.296	1.038.549.931.962	-	-	-	50.777.817.787	-	4.574.872.979.902
027	KEMENTERIAN SOSIAL	307.043.773.440	2.061.742.262.425	179.169.602.322	-	-	-	13.274.076.357.234	-	15.822.031.995.421
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.141.305.871.931	4.130.482.816.414	641.318.844.062	-	-	-	199.845.000.000	-	6.112.952.532.407
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	717.796.148.558	4.109.714.129.872	1.011.400.872.758	-	-	-	730.827.624.498	-	6.569.738.775.686
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.629.887.575.667	9.819.253.183.698	61.269.576.969.320	-	-	-	7.611.900.696.377	-	80.330.618.425.062
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	42.739.892.475	227.824.843.818	175.704.460.739	-	-	-	-	-	446.269.197.032
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	34.297.175.468	166.690.326.554	5.255.089.800	-	-	-	-	-	206.242.591.822
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	35.337.693.441	196.510.703.964	40.197.508.560	-	-	-	-	-	272.045.905.965
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	157.105.434.216	1.283.155.474.196	93.651.452.358	-	-	-	86.275.000.000	-	1.620.187.360.770
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	17.106.349.686	82.052.975.617	10.087.002.270	-	-	-	-	-	109.246.327.573
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	69.086.548.891	455.246.918.699	276.201.147.599	-	-	-	-	-	800.534.615.189
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	77.887.134.684	838.798.378.141	21.625.392.636	-	-	-	-	-	938.310.905.461
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	49.265.743.802	921.484.429.430	190.719.605.987	-	-	-	445.719.479.000	-	1.607.189.258.219
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	29.872.170.066	135.285.768.449	59.024.417.913	-	-	-	353.223.000	-	224.535.579.428
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	34.370.484.736	108.885.862.492	18.858.333.884	-	-	-	-	-	162.114.681.112
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	115.349.768.312	966.405.019.997	415.778.710.750	-	-	-	-	-	1.497.533.499.059
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	73.021.573.678	136.420.128.005	1.387.718.727.330	-	-	-	-	-	1.597.160.429.013
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	11.539.241.729	23.173.948.876	2.473.186.500	-	-	-	-	-	37.186.377.105
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.280.539.096.450	1.990.474.486.827	697.440.779.861	-	-	-	-	-	3.968.454.363.138
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	96.858.067.511	962.508.215.193	45.298.274.422	-	-	-	-	-	1.104.664.557.126
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.101.914.451.768	1.988.060.980.483	587.224.205.566	-	-	-	-	-	3.677.199.637.817
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	55.240.538.812	381.629.906.084	21.936.004.767	-	-	-	-	-	458.806.449.663
059	KEMENTERIAN KOMINFO	257.043.193.186	2.689.627.932.184	288.933.775.015	-	-	-	-	-	3.235.604.900.385
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	29.112.397.960.902	8.116.868.881.185	6.165.216.452.806	-	-	-	-	-	43.394.483.294.893

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	310.132.033.120	500.547.133.184	306.610.682.720	-	-	-	-	-	1.117.289.849.024
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	53.942.231.388	91.896.416.882	63.212.434.495	-	-	-	-	-	209.051.082.765
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	63.840.281.902	496.028.981.211	47.303.588.873	-	-	-	-	-	607.172.851.986
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	182.554.237.223	588.093.829.926	278.978.921.353	-	-	-	100.000.000	-	1.049.726.988.502
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH	24.807.998.810	1.367.860.509.099	27.757.000.500	-	-	-	1.047.537.065.943	-	2.467.962.574.352
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	304.630.741.629	2.025.531.562.764	81.539.213.862	-	-	-	-	-	2.411.701.518.255
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	21.252.416.876	44.130.253.570	8.875.865.450	-	-	-	-	-	74.258.535.896
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	289.263.412.528	561.418.566.913	586.734.252.346	-	-	-	-	-	1.437.416.231.787
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	432.121.131.934	5.317.912.131.431	154.118.564.795	-	-	-	-	-	5.904.151.828.160
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	13.551.555.173	163.177.363.278	36.234.508.394	-	-	-	-	-	212.963.426.845
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	26.892.475.694	35.501.038.415	11.023.918.352	-	-	-	-	-	73.417.432.461
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	463.088.215.891	358.585.480.389	213.275.722.635	-	-	-	-	-	1.034.949.418.915
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	331.946.920.896	223.243.472.260	154.887.522.220	-	-	-	-	-	710.077.915.376
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	306.149.557.999	361.559.698.364	499.283.779.204	-	-	-	-	-	1.166.993.035.567
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	93.891.785.291	173.406.502.952	197.400.622.688	-	-	-	-	-	464.698.910.931
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	36.093.879.953	176.346.216.342	321.137.100.741	-	-	-	-	-	533.577.197.036
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	19.123.397.886	66.450.280.885	3.472.548.000	-	-	-	-	-	89.046.226.771
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	34.248.926.806	55.398.242.704	42.119.096.904	-	-	-	-	-	131.766.266.414
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	74.868.690.683	140.646.388.698	30.073.693.860	-	-	-	-	-	245.588.773.241
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	50.092.684.216	72.785.406.626	30.731.500.449	-	-	-	-	-	153.609.591.291
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	252.164.455.075	192.248.836.045	135.418.043.675	-	-	-	-	-	579.831.334.795
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	588.685.204.243	408.434.439.939	70.105.267.743	-	-	-	-	-	1.067.224.911.925
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	261.708.726.215	1.608.675.157.244	832.077.946.674	-	-	-	-	-	2.702.461.830.133
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	47.677.749.444	990.653.780.417	1.360.022.123.579	-	-	-	1.898.921.037.656	-	4.297.274.691.096
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	34.085.524.304	1.012.079.520.859	50.360.196.045	-	-	-	551.843.740.205	-	1.648.368.981.413
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	227.383.117.479	140.895.543.172	98.466.452.591	-	-	-	-	-	466.745.113.242
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	169.582.062.111	348.282.093.506	6.945.641.249	-	-	-	-	-	524.809.796.866
100	KOMISI YUDISIAL RI	9.068.853.519	72.383.977.476	5.015.117.138	-	-	-	-	-	86.467.948.133
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	16.264.486.962	931.216.332.173	325.897.130.350	-	-	-	1.695.884.883.364	-	2.969.262.832.849
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	60.678.473.265	271.493.603.560	40.591.843.506	-	-	-	-	-	372.763.920.331
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	12.835.823.091	137.695.435.314	1.640.870.651.841	-	-	-	10.198.650.000	-	1.801.600.560.246
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	15.637.454.484	111.625.165.521	60.492.466.644	-	-	-	-	-	187.755.086.649
107	BADAN SAR NASIONAL	187.737.531.631	363.558.564.075	1.295.111.126.227	-	-	-	-	-	1.846.407.221.933
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	21.412.988.153	94.533.196.998	3.026.767.225	-	-	-	-	-	118.972.952.376
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	6.250.873.000	38.043.818.201	46.550.059.117	-	-	-	-	-	90.844.750.318
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	14.720.800.166	44.038.258.721	6.353.093.400	-	-	-	-	-	65.112.152.287
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	5.864.308.533	147.255.649.703	51.908.297.116	-	-	-	-	-	205.028.255.352
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	570.760.245.302	276.126.636.528	-	-	-	-	-	846.886.881.830
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	5.589.099.054	126.573.237.970	158.503.362.731	-	-	-	-	-	290.665.699.755
114	SEKRETARIAT KABINET	74.337.470.952	76.555.890.801	9.527.862.974	-	-	-	-	-	160.421.224.727
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	200.443.813.323	1.420.341.147.897	66.722.482.848	-	-	-	-	-	1.687.507.444.068
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	304.033.692.905	396.006.317.286	163.398.449.499	-	-	-	-	-	863.438.459.690
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	209.168.668.087	461.810.580.429	105.761.787.567	-	-	-	-	-	776.741.036.083
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	21.904.960.627	211.404.642.078	-	-	-	-	-	233.309.602.705
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	81.471.555.595.524	-	-	112.637.946.003.144	355.045.179.958.292	1.302.956.172.580	-	3.367.481.191.937	553.825.118.921.477
	JUMLAH	**221.688.819.162.644**	**169.722.685.080.370**	**180.864.203.133.334**	**113.035.490.483.582**	**355.045.179.958.292**	**1.302.956.172.580**	**92.136.072.115.501**	**3.367.481.191.937**	**1.137.162.887.298.240**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2013
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**737.115.852.210.457**	**706.162.757.281.060**	**515.562.824.857**	**705.647.194.456.203**	**(31.468.657.754.254)**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN	136.383.849.829.761	128.218.208.497.269	225.212.684.885	127.992.995.812.384	(8.390.854.017.377)
01.03	PELAYANAN UMUM	12.297.199.174.211	11.210.672.038.296	27.180.320.737	11.183.491.717.559	(1.113.707.456.652)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	2.746.289.387.042	2.893.510.889.164	14.961.682.399	2.878.549.206.765	132.259.819.723
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	77.093.618.485	112.742.200.361.436	154.016.031	112.742.046.345.405	112.664.952.726.920
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	3.343.794.791.686	3.043.468.882.849	3.667.030.696	3.039.801.852.153	(303.992.939.533)
01.07	LITBANG PELAYANANAN UMUM	269.678.344.796	234.605.948.375	335.855.426	234.270.092.949	(35.408.251.847)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	581.997.947.064.475	447.820.090.663.671	244.051.234.683	447.576.039.428.988	(134.421.907.635.487)
02	**PERTAHANAN**	**83.338.454.671.902**	**87.608.797.669.705**	**98.728.460.270**	**87.510.069.209.435**	**4.171.614.537.533**
02.01	PERTAHANAN NEGARA	59.100.123.696.333	57.232.625.672.379	31.536.133.131	57.201.089.539.248	(1.899.034.157.085)
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	23.976.474.851.062	30.116.303.759.664	67.125.309.097	30.049.178.450.567	6.072.703.599.505
02.04	LITBANG PERTAHANAN	261.856.124.507	259.868.237.662	67.018.042	259.801.219.620	(2.054.904.887)
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**40.270.308.188.427**	**36.175.895.060.842**	**55.517.309.255**	**36.120.377.751.587**	**(4.149.930.436.840)**
03.01	KEPOLISIAN	24.263.581.990.312	19.880.479.319.056	16.441.403.291	19.864.037.915.765	(4.399.544.074.547)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	1.479.248.846.000	2.986.236.602.669	16.969.394.820	2.969.267.207.849	1.490.018.361.849
03.03	PEMBINAAN HUKUM	3.404.338.570.695	2.928.912.958.969	9.587.386.515	2.919.325.572.454	(485.012.998.241)
03.04	PERADILAN	7.334.110.511.421	6.741.653.642.258	9.159.261.522	6.732.494.380.736	(601.616.130.685)
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN	20.832.580.000	19.469.613.641	46.075.150	19.423.538.491	(1.409.041.509)
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	3.768.195.690.000	3.619.142.924.249	3.313.787.957	3.615.829.136.292	(152.366.553.708)
04	**EKONOMI**	**121.265.875.755.145**	**108.215.049.499.538**	**132.427.333.569**	**108.082.622.165.969**	**(13.183.253.589.176)**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	3.669.154.241.171	3.365.553.253.416	4.847.513.221	3.360.705.740.195	(308.448.500.976)
04.02	TENAGA KERJA	2.338.832.631.090	2.064.715.478.576	8.364.160.282	2.056.351.318.294	(282.481.312.796)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	18.066.957.940.110	17.305.662.128.149	33.346.037.589	17.272.316.090.560	(794.641.849.550)
04.04	PENGAIRAN	810.859.254.067	2.885.529.630.114	385.618.985	2.885.144.011.129	2.074.284.757.062
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	12.176.201.125.144	7.187.832.108.382	1.818.503.594	7.186.013.604.788	(4.990.187.520.356)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04.06	PERTAMBANGAN	2.079.385.449.322	1.646.371.669.597	1.983.437.092	1.644.388.232.505	(434.997.216.817)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	2.399.198.749.811	2.118.449.843.518	2.451.299.670	2.115.998.543.848	(283.200.205.963)
04.08	TRANSPORTASI	68.398.701.861.248	61.247.810.927.585	30.913.827.770	61.216.897.099.815	(7.181.804.761.433)
04.09	TELEKOMUNIKASI	3.115.200.000	2.676.099.622	41.148.550	2.634.951.072	(480.248.928)
04.10	LITBANG EKONOMI	3.868.390.092.293	3.976.588.817.787	5.636.552.542	3.970.952.265.245	102.562.172.952
04.90	EKONOMI LAINNYA	7.455.079.210.889	6.413.859.542.792	42.639.234.274	6.371.220.308.518	(1.083.858.902.371)
5	**LINGKUNGAN HIDUP**	**11.824.891.909.527**	**10.605.421.206.952**	**14.971.696.215**	**10.590.449.510.737**	**(1.234.442.398.790)**
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	2.716.898.279.236	2.526.292.858.502	817.848.654	2.525.475.009.848	(191.423.269.388)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	139.851.939.157	140.234.682.130	19.926.093	140.214.756.037	362.816.880
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	4.609.682.590.512	4.182.178.861.268	4.692.681.839	4.177.486.179.429	(432.196.411.083)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	3.466.681.325.316	2.949.679.532.449	7.048.765.705	2.942.630.766.744	(524.050.558.572)
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	891.777.775.307	807.035.272.603	2.392.473.924	804.642.798.679	(87.134.976.628)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**34.860.522.938.035**	**33.798.812.240.313**	**8.790.675.649**	**33.790.021.564.664**	**(1.070.501.373.371)**
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	3.915.556.670.189	3.658.735.329.466	270.865.892	3.658.464.463.574	(257.092.206.615)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	3.752.881.707.772	3.590.588.369.562	1.454.062.267	3.589.134.307.295	(163.747.400.477)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	7.096.738.658.902	7.028.834.083.452	589.998.388	7.028.244.085.064	(68.494.573.838)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	20.095.345.901.172	19.520.654.457.833	6.475.749.102	19.514.178.708.731	(581.167.192.441)
07	**KESEHATAN**	**17.754.439.691.105**	**17.624.042.735.623**	**47.054.920.358**	**17.576.987.815.265**	**(177.451.875.840)**
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.741.230.781.787	2.669.705.211.472	21.271.860.620	2.648.433.350.852	(92.797.430.935)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	9.708.893.010.533	9.824.615.048.385	10.358.835.556	9.814.256.212.829	105.363.202.296
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	2.082.823.708.752	2.102.402.713.241	3.683.728.755	2.098.718.984.486	15.895.275.734
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.551.855.775.000	2.415.025.990.320	3.324.472.065	2.411.701.518.255	(140.154.256.745)
07.05	LITBANG KESEHATAN	413.404.808.900	413.357.141.302	2.478.325.712	410.878.815.590	(2.525.993.310)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	256.231.606.132	198.936.630.903	5.937.697.650	192.998.933.253	(63.232.672.879)
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**2.270.597.036.666**	**1.820.902.926.854**	**2.093.304.474**	**1.818.809.622.380**	**(451.787.414.286)**
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	738.847.735.543	654.493.732.275	425.948.847	654.067.783.428	(84.779.952.115)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	8.192.795.607	7.953.280.517	1.082.400	7.952.198.117	(240.597.490)
08.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	15.734.658.982	12.247.918.997	-	12.247.918.997	(3.486.739.985)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	490.151.013.000	476.667.191.944	124.511.020	476.542.680.924	(13.608.332.076)
08.90	PARIWISATA LAINNYA	1.017.670.833.534	669.540.803.121	1.541.762.207	667.999.040.914	(349.671.792.620)
09	**AGAMA**	**4.061.058.784.696**	**3.885.941.615.703**	**13.156.972.021**	**3.872.784.643.682**	**(188.274.141.014)**
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.330.332.988.104	1.205.179.602.497	8.146.124.683	1.197.033.477.814	(133.299.510.290)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	65.140.886.305	57.676.223.109	891.088.948	56.785.134.161	(8.355.752.144)
09.03	LITBANG AGAMA	1.963.589.269.307	1.849.725.835.616	2.963.897.340	1.846.761.938.276	(116.827.331.031)
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	701.995.640.980	773.359.954.481	1.155.861.050	772.204.093.431	70.208.452.451
10	**PENDIDIKAN**	**126.569.092.910.005**	**115.525.912.023.899**	**556.838.578.317**	**114.969.073.445.582**	**(11.600.019.464.423)**
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	672.139.234.113	646.477.777.964	5.900.505.912	640.577.272.052	(31.561.962.061)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	31.100.815.001.432	29.176.766.184.631	328.310.657.875	28.848.455.526.756	(2.252.359.474.676)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	12.471.057.803.233	12.227.493.782.850	48.043.771.412	12.179.450.011.438	(291.607.791.795)
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	2.744.904.150.404	2.621.762.167.658	26.133.980.435	2.595.628.187.223	(149.275.963.181)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	809.248.734.068	757.336.348.041	601.111.233	756.735.236.808	(52.513.497.260)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	48.167.638.016.207	40.341.259.194.754	73.268.873.605	40.267.990.321.149	(7.899.647.695.058)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	4.367.906.096.087	5.022.824.197.995	37.380.922.092	4.985.443.275.903	617.537.179.816
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	2.832.091.267.593	2.610.923.219.939	6.367.668.811	2.604.555.551.128	(227.535.716.465)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.247.863.986.040	1.010.097.539.936	11.020.028.864	999.077.511.072	(248.786.474.968)
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.103.549.000.000	921.238.212.215	735.891.450	920.502.320.765	(183.046.679.235)
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	1.975.891.375.786	1.592.182.200.360	2.060.473.609	1.590.121.726.751	(385.769.649.035)
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	19.075.988.245.043	18.597.551.197.556	17.014.693.019	18.580.536.504.537	(495.451.740.506)
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**17.497.284.194.032**	**17.252.307.985.322**	**144.845.614.874**	**17.107.462.370.448**	**(389.821.823.584)**
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT	307.778.105.269	318.683.776.753	1.022.249.369	317.661.527.384	9.883.422.115
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA	142.884.817.210	142.375.979.121	298.214.963	142.077.764.158	(807.053.052)
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	484.502.043.784	484.022.225.528	2.135.943.455	481.886.282.073	(2.615.761.711)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	194.904.766.418	186.041.639.985	392.350.291	185.649.289.694	(9.255.476.724)
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	32.167.736.160	30.733.543.180	1.777.700	30.731.765.480	(1.435.970.680)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	270.866.313.244	252.995.277.340	175.449.558	252.819.827.782	(18.046.485.462)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	16.064.180.411.947	15.837.455.543.415	140.819.629.538	15.696.635.913.877	(367.544.498.070)
00.00	**Fungsi Subfungsi Tidak Ada**		**77.522.398.825**	**487.656.537**	**77.034.742.288**	**77.034.742.288**
JUMLAH		**1.196.828.378.290.000**	**1.138.753.362.644.636**	**1.590.475.346.396**	**1.137.162.887.298.240**	**(59.665.490.991.760)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.204.974.339.849	1.292.622.410.385	10.158.305.089	2.507.755.055.323	11.719.917.047.000	1.277.520.530.000	15.505.192.632.323
2	Provinsi Sumatera Utara	1.697.147.007.136	58.909.026.749	15.629.588.322	1.771.685.622.207	18.693.814.895.000	1.787.380.363.000	22.252.880.880.207
3	Provinsi Sumatera Barat	542.110.285.828	37.477.823.257	8.525.534.849	588.113.643.934	10.519.615.018.000	1.072.861.496.800	12.180.590.158.734
4	Provinsi Riau	2.634.810.090.044	8.420.950.516.419	-	11.055.760.606.463	6.481.357.143.000	277.992.194.000	17.815.109.943.463
5	Provinsi Kepulauan Riau	863.155.094.800	2.605.737.023.767	362.130.562	3.469.254.249.129	2.838.217.713.000	256.989.191.000	6.564.461.153.129
6	Provinsi Jambi	1.214.072.852.631	1.300.707.545.829	5.706.101.168	2.520.486.499.628	6.200.409.146.000	496.573.955.000	9.217.469.600.628
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.626.005.936.250	4.522.096.093.870	4.358.692.962	7.152.460.723.082	9.412.188.623.000	994.862.410.000	17.559.511.756.082
8	Provinsi Bangka Belitung	283.798.086.212	361.248.817.846	-	645.046.904.058	3.340.077.517.000	326.848.085.000	4.311.972.506.058
9	Provinsi Bengkulu	266.892.911.189	76.452.172.870	-	343.345.084.059	4.970.901.476.000	575.493.643.000	5.889.740.203.059
10	Provinsi Lampung	626.250.077.665	318.388.559.542	9.023.141.586	953.661.778.793	9.693.343.193.000	998.090.425.000	11.645.095.396.793
11	Provinsi DKI Jakarta	8.865.319.793.557	184.641.000.443	112.681.802	9.050.073.475.802	299.182.466.000	-	9.349.255.941.802
12	Provinsi Jawa Barat	3.448.850.107.880	1.059.937.928.287	186.569.451.046	4.695.357.487.213	28.596.892.768.500	2.066.608.923.000	35.358.859.178.713
13	Provinsi Banten	1.728.552.419.042	15.852.488.763	430.637.916	1.744.835.545.721	6.832.108.025.000	488.858.380.000	9.065.801.950.721
14	Provinsi Jawa Tengah	1.976.474.238.099	47.691.719.039	567.127.232.717	2.591.293.189.855	29.519.892.841.000	2.096.212.301.000	34.207.398.331.855
15	Provinsi DI Yogyakarta	286.076.708.843	1.533.273.673	21.442.308.874	309.052.291.390	4.545.995.551.000	251.423.938.000	5.106.471.780.390
16	Provinsi Jawa Timur	2.962.460.477.079	912.194.461.728	1.059.983.924.527	4.934.638.863.334	32.575.663.063.000	2.306.153.566.000	39.816.455.492.334
17	Provinsi Kalimantan Barat	600.106.505.691	160.021.396.594	-	760.127.902.285	9.279.203.722.000	1.301.541.681.000	11.340.873.305.285
18	Provinsi Kalimantan Tengah	778.116.825.027	747.222.501.898	3.652.177.219	1.528.991.504.144	8.359.272.605.000	607.706.030.000	10.495.970.139.144
19	Provinsi Kalimantan Selatan	836.762.826.081	2.481.237.347.415	-	3.318.000.173.496	6.554.384.059.000	499.650.965.000	10.372.035.197.496
20	Provinsi Kalimantan Timur	3.484.527.640.676	14.969.247.318.689	-	18.453.774.959.365	5.065.734.763.500	414.479.868.000	23.933.989.590.865
21	Provinsi Sulawesi Utara	399.797.060.752	31.811.709.228	527.789.687	432.136.559.667	6.724.981.749.000	838.186.510.000	7.995.304.818.667
22	Provinsi Gorontalo	131.304.030.935	4.065.764.601	-	135.369.795.536	2.976.005.963.000	382.774.735.000	3.494.150.493.536
23	Provinsi Sulawesi Tengah	380.113.319.455	97.152.672.454	5.535.243.764	482.801.235.673	6.861.776.287.000	809.601.530.000	8.154.179.052.673
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.087.996.876.550	64.967.813.625	14.241.518.155	1.167.206.208.330	13.755.069.191.000	1.451.724.097.000	16.373.999.496.330
25	Provinsi Sulawesi Barat	206.491.164.492	3.474.012.570	-	209.965.177.062	2.995.788.046.000	452.113.000.000	3.657.866.223.062
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	338.490.626.254	207.943.725.149	-	546.434.351.403	6.769.352.263.000	863.236.680.000	8.179.023.294.403
27	Provinsi Bali	457.081.249.921	2.712.218.346	12.833.042.872	472.626.511.139	5.724.556.270.000	381.966.558.000	6.579.149.339.139
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	335.588.260.517	50.444.894.879	219.420.070.799	605.453.226.195	6.480.305.637.000	758.698.880.000	7.844.457.743.195
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	441.250.652.253	9.630.745.584	5.851.686.255	456.733.084.092	9.965.570.014.000	1.515.613.418.000	11.937.916.516.092
30	Provinsi Maluku	379.323.099.485	28.273.757.175	-	407.596.856.660	5.507.152.661.000	729.837.323.000	6.644.586.840.660
31	Provinsi Maluku Utara	315.829.091.484	223.337.828.804	-	539.166.920.288	5.307.554.923.000	922.179.630.000	6.768.901.473.288
32	Provinsi Papua	1.309.669.638.779	889.505.094.771	-	2.199.174.733.550	16.548.335.077.000	2.701.957.731.000	21.449.467.541.550
33	Provinsi Papua Barat	1.145.610.052.077	1.269.069.849.230	-	2.414.679.901.307	6.024.669.449.000	847.242.840.000	9.286.592.190.307
34	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
35	Kembali ke RKUN	-	-	-	-	-	-	-
36	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**43.855.009.346.533**	**42.456.559.513.479**	**2.151.491.260.171**	**88.463.060.120.183**	**311.139.289.165.000**	**30.752.380.876.800**	**430.354.730.161.983**

DAFTAR 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**254.422.329.285**	**70.038.899.677**	**184.383.429.608**	**254.422.329.285**
2	Kab. Aceh Barat	22.048.147.064	3.821.272.445	18.226.874.619	22.048.147.064
3	Kab. Aceh Besar	24.578.486.406	5.542.370.420	19.036.115.986	24.578.486.406
4	Kab. Aceh Selatan	22.906.585.321	4.085.274.158	18.821.311.163	22.906.585.321
5	Kab. Aceh Singkil	20.581.717.418	2.864.017.073	17.717.700.345	20.581.717.418
6	Kab. Aceh Tengah	22.086.509.251	3.903.330.173	18.183.179.078	22.086.509.251
7	Kab. Aceh Tenggara	19.545.684.065	2.717.379.428	16.828.304.637	19.545.684.065
8	Kab. Aceh Timur	84.150.277.066	2.745.769.427	81.404.507.639	84.150.277.066
9	Kab. Aceh Utara	306.477.430.862	7.799.569.420	298.677.861.442	306.477.430.862
10	Kab. Bireun	32.736.740.637	5.220.295.045	27.516.445.592	32.736.740.637
11	Kab. Pidie	18.533.454.667	3.782.003.256	14.751.451.411	18.533.454.667
12	Kab. Simeulue	18.029.021.153	2.310.278.827	15.718.742.326	18.029.021.153
13	Kota Banda Aceh	28.783.205.437	16.897.795.329	11.885.410.108	28.783.205.437
14	Kota Sabang	19.092.902.599	2.295.475.498	16.797.427.101	19.092.902.599
15	Kota Langsa	24.334.006.207	5.831.980.900	18.502.025.307	24.334.006.207
16	Kota Lhokseumawe	71.981.282.131	12.804.837.102	59.176.445.029	71.981.282.131
17	Kab. Nagan Raya	25.388.255.565	3.208.321.838	22.179.933.727	25.388.255.565
18	Kab. Aceh Jaya	20.689.108.250	2.797.634.455	17.891.473.795	20.689.108.250
19	Kab. Pidie Jaya	17.119.920.652	2.417.797.825	14.702.122.827	17.119.920.652
20	Kab. Aceh Barat Daya	17.216.359.891	2.315.294.999	14.901.064.892	17.216.359.891
21	Kab. Gayo Lues	23.970.445.557	2.239.352.316	21.731.093.241	23.970.445.557
22	Kab. Aceh Tamiang	75.513.709.108	4.631.315.522	70.882.393.586	75.513.709.108
23	Kab. Bener Meriah	19.162.114.787	2.602.658.857	16.559.455.930	19.162.114.787
24	Kota Subulussalam	15.626.646.470	2.267.748.896	13.358.897.574	15.626.646.470
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**420.450.820.041**	**240.274.381.384**	**180.176.438.657**	**420.450.820.041**
26	Kab. Asahan	63.759.116.175	11.787.326.044	51.971.790.131	63.759.116.175
27	Kab. Dairi	24.567.134.677	4.941.274.529	19.625.860.148	24.567.134.677
28	Kab. Deli Serdang	57.644.354.260	16.076.380.169	41.567.974.091	57.644.354.260
29	Kab. Tanah Karo	28.036.316.419	6.078.147.702	21.958.168.717	28.036.316.419
30	Kab. Labuhan Batu	50.224.925.845	8.780.406.737	41.444.519.108	50.224.925.845
31	Kab. Langkat	163.157.763.473	9.811.385.272	153.346.378.201	163.157.763.473
32	Kab. Mandailing Natal	34.064.423.737	5.360.416.283	28.704.007.454	34.064.423.737
33	Kab. Nias	13.320.855.302	3.816.371.079	9.504.484.223	13.320.855.302
34	Kab. Simalungun	57.750.585.860	10.942.584.538	46.808.001.322	57.750.585.860
35	Kab. Tapanuli Selatan	33.904.090.646	9.976.535.710	23.927.554.936	33.904.090.646
36	Kab. Tapanuli Tengah	28.328.346.293	5.114.602.884	23.213.743.409	28.328.346.293
37	Kab. Tapanuli Utara	24.197.839.496	4.761.882.055	19.435.957.441	24.197.839.496
38	Kab. Toba Samosir	28.581.068.553	6.380.807.338	22.200.261.215	28.581.068.553
39	Kota Binjai	32.388.950.226	6.824.349.150	25.564.601.076	32.388.950.226
40	Kota Medan	172.455.530.898	145.236.267.478	27.219.263.420	172.455.530.898
41	Kota Pematang Siantar	23.671.350.201	13.731.098.255	9.940.251.946	23.671.350.201
42	Kota Sibolga	19.393.858.045	6.173.894.497	13.219.963.548	19.393.858.045
43	Kota Tanjung Balai	19.775.085.629	6.715.730.101	13.059.355.528	19.775.085.629
44	Kab. Batu Bara	36.137.716.642	8.390.081.739	27.747.634.903	36.137.716.642
45	Kab. Labuhan Batu Utara	34.343.559.721	5.530.953.434	28.812.606.287	34.343.559.721
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	55.153.306.642	6.655.418.513	48.497.888.129	55.153.306.642
47	Kab. Padang Lawas Utara	28.959.149.390	4.266.419.015	24.692.730.375	28.959.149.390
48	Kab. Padang Lawas	35.844.025.009	4.248.280.661	31.595.744.348	35.844.025.009
49	Kab. Nias Utara	12.338.545.875	3.879.444.896	8.459.100.979	12.338.545.875
50	Kab. Nias Barat	10.794.084.937	3.737.085.162	7.056.999.775	10.794.084.937
51	Kota Tebing Tinggi	21.668.891.709	5.714.503.317	15.954.388.392	21.668.891.709
52	Kota Padang Sidempuan	24.792.682.360	6.509.388.092	18.283.294.268	24.792.682.360
53	Kab. Pakpak Bharat	21.145.652.057	3.701.772.733	17.443.879.324	21.145.652.057
54	Kab. Nias Selatan	21.774.310.859	3.951.181.225	17.823.129.634	21.774.310.859
55	Kab. Humbang Hasundutan	24.167.167.568	4.215.971.213	19.951.196.355	24.167.167.568
56	Kab. Serdang Bedagai	44.514.715.886	8.161.605.883	36.353.110.003	44.514.715.886
57	Kab. Samosir	16.799.370.906	4.033.159.092	12.766.211.814	16.799.370.906
58	Kota Gunung sitoli	13.041.411.799	5.057.544.948	7.983.866.851	13.041.411.799
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**128.902.024.697**	**76.797.234.244**	**52.104.790.453**	**128.902.024.697**
60	Kab. Limapuluh Kota	22.185.225.461	3.890.982.361	18.294.243.100	22.185.225.461

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
61	Kab. Agam	21.707.437.119	6.006.844.343	15.700.592.776	21.707.437.119
62	Kab. Kepulauan Mentawai	19.753.010.615	2.418.822.607	17.334.188.008	19.753.010.615
63	Kab. Padang Pariaman	19.320.567.719	3.270.155.903	16.050.411.816	19.320.567.719
64	Kab. Pasaman	20.216.329.305	3.254.573.141	16.961.756.164	20.216.329.305
65	Kab. Pesisir Selatan	27.981.260.577	4.609.106.567	23.372.154.010	27.981.260.577
66	Kab. Sijunjung	21.308.559.061	3.507.430.045	17.801.129.016	21.308.559.061
67	Kab. Solok	20.128.993.384	4.624.956.298	15.504.037.086	20.128.993.384
68	Kab. Tanah Datar	15.871.874.843	4.564.520.611	11.307.354.232	15.871.874.843
69	Kota Bukit Tinggi	17.101.703.039	6.585.004.064	10.516.698.975	17.101.703.039
70	Kota Padang Panjang	15.240.144.334	2.918.626.641	12.321.517.693	15.240.144.334
71	Kota Padang	56.785.583.194	41.765.788.795	15.019.794.399	56.785.583.194
72	Kota Payakumbuh	15.208.651.902	4.026.800.174	11.181.851.728	15.208.651.902
73	Kota Sawahlunto	15.776.175.804	3.745.797.848	12.030.377.956	15.776.175.804
74	Kota Solok	16.276.557.858	4.324.615.382	11.951.942.476	16.276.557.858
75	Kota Pariaman	18.619.059.712	4.290.842.319	14.328.217.393	18.619.059.712
76	Kab. Pasaman Barat	25.283.335.983	4.194.516.497	21.088.819.486	25.283.335.983
77	Kab. Dharmasraya	22.814.484.648	3.826.230.036	18.988.254.612	22.814.484.648
78	Kab. Solok Selatan	21.629.306.573	3.370.237.715	18.259.068.858	21.629.306.573
79	**Provinsi Riau**	**618.581.055.569**	**206.702.596.847**	**411.878.458.722**	**618.581.055.569**
80	Kab. Bengkalis	401.213.297.212	65.535.529.074	335.677.768.138	401.213.297.212
81	Kab. Indragiri Hilir	70.868.354.693	13.764.778.530	57.103.576.163	70.868.354.693
82	Kab. Indragiri Hulu	144.743.170.735	13.898.336.231	130.844.834.504	144.743.170.735
83	Kab. Kampar	207.420.476.554	18.394.631.291	189.025.845.263	207.420.476.554
84	Kab. Kuantan Singingi	51.928.840.414	11.187.177.286	40.741.663.128	51.928.840.414
85	Kab. Pelalawan	179.269.861.043	16.399.347.998	162.870.513.045	179.269.861.043
86	Kab. Rokan Hilir	255.550.375.443	12.934.865.624	242.615.509.819	255.550.375.443
87	Kab. Rokan Hulu	119.195.693.858	9.872.178.763	109.323.515.095	119.195.693.858
88	Kab. Siak	318.318.847.175	31.520.566.735	286.798.280.440	318.318.847.175
89	Kota Dumai	53.339.799.194	24.579.017.079	28.760.782.115	53.339.799.194
90	Kota Pekanbaru	120.144.549.697	81.660.429.567	38.484.120.130	120.144.549.697
91	Kab. Kepulauan Meranti	94.235.768.457	10.307.037.069	83.928.731.388	94.235.768.457
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**214.179.634.464**	**97.641.112.757**	**116.538.521.707**	**214.179.634.464**
93	Kab. Bintan	76.503.172.531	10.846.044.750	65.657.127.781	76.503.172.531
94	Kab. Natuna	197.801.334.473	7.228.336.746	190.572.997.727	197.801.334.473
95	Kab. Karimun	66.640.473.408	13.798.675.623	52.841.797.785	66.640.473.408
96	Kota Batam	139.542.417.053	83.430.860.507	56.111.556.546	139.542.417.053
97	Kab. Kepulauan Anambas	77.903.205.541	12.026.377.387	65.876.828.154	77.903.205.541
98	Kota Tanjung Pinang	46.471.151.589	12.205.563.034	34.265.588.555	46.471.151.589
99	Kab. Lingga	44.113.705.741	7.166.961.707	36.946.744.034	44.113.705.741
100	**Provinsi Jambi**	**256.841.408.084**	**45.938.796.914**	**210.902.611.170**	**256.841.408.084**
101	Kab. Batanghari	179.228.643.997	3.794.038.510	175.434.605.487	179.228.643.997
102	Kab. Bungo	58.424.830.243	6.499.204.349	51.925.625.894	58.424.830.243
103	Kab. Kerinci	18.173.796.220	1.938.303.105	16.235.493.115	18.173.796.220
104	Kab. Merangin	68.138.027.939	4.245.372.610	63.892.655.329	68.138.027.939
105	Kab. Muaro Jambi	126.198.158.778	3.879.360.557	122.318.798.221	126.198.158.778
106	Kab. Sarolangun	94.098.521.186	4.423.798.331	89.674.722.855	94.098.521.186
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	120.836.031.330	5.723.686.304	115.112.345.026	120.836.031.330
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	116.971.904.210	5.686.261.775	111.285.642.435	116.971.904.210
109	Kab. Tebo	85.453.432.328	3.628.599.344	81.824.832.984	85.453.432.328
110	Kota Jambi	75.203.985.927	24.389.114.438	50.814.871.489	75.203.985.927
111	Kota Sungai Penuh	14.504.112.389	4.737.201.244	9.766.911.145	14.504.112.389
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**573.136.667.961**	**133.671.701.189**	**439.464.966.772**	**573.136.667.961**
113	Kab. Lahat	107.175.330.628	7.775.459.550	99.399.871.078	107.175.330.628
114	Kab. Musi Banyuasin	620.394.066.892	15.924.066.421	604.470.000.471	620.394.066.892
115	Kab. Musi Rawas	210.463.431.033	6.582.879.912	203.880.551.121	210.463.431.033
116	Kab. Muara Enim	394.761.882.652	21.917.228.872	372.844.653.780	394.761.882.652
117	Kab. Ogan Komering Ilir	84.139.959.855	8.045.847.094	76.094.112.761	84.139.959.855
118	Kab. Ogan Komering Ulu	84.719.450.846	7.619.497.244	77.099.953.602	84.719.450.846
119	Kota Palembang	96.383.033.898	76.668.662.243	19.714.371.655	96.383.033.898
120	Kota Pagar Alam	27.458.386.348	4.979.692.576	22.478.693.772	27.458.386.348
121	Kota Lubuk Linggau	29.405.212.449	8.203.329.828	21.201.882.621	29.405.212.449
122	Kota Prabumulih	65.390.618.463	13.854.386.241	51.536.232.222	65.390.618.463
123	Kab. Empat Lawang	24.037.283.973	4.516.635.056	19.520.648.917	24.037.283.973
124	Kab. Banyuasin	165.331.748.262	6.639.407.647	158.692.340.615	165.331.748.262
125	Kab. Ogan Ilir	76.411.311.927	6.700.910.532	69.710.401.395	76.411.311.927
126	Kab. OKU Timur	38.692.436.718	6.223.856.726	32.468.579.992	38.692.436.718
127	Kab. OKU Selatan	28.105.114.345	4.855.691.829	23.249.422.516	28.105.114.345

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**60.592.940.107**	**23.053.994.031**	**37.538.946.076**	**60.592.940.107**
129	Kab. Bangka	38.867.393.966	4.002.674.746	34.864.719.220	38.867.393.966
130	Kab. Belitung	35.745.406.816	3.654.904.608	32.090.502.208	35.745.406.816
131	Kota Pangkal Pinang	28.754.458.579	10.930.797.337	17.823.661.242	28.754.458.579
132	Kab. Bangka Selatan	28.626.450.129	2.428.861.776	26.197.588.353	28.626.450.129
133	Kab. Bangka Tengah	28.444.874.806	2.869.844.448	25.575.030.358	28.444.874.806
134	Kab. Bangka Barat	37.549.149.255	6.331.560.039	31.217.589.216	37.549.149.255
135	Kab. Belitung Timur	25.217.412.554	4.362.348.079	20.855.064.475	25.217.412.554
136	**Provinsi Bengkulu**	**54.195.618.954**	**21.094.353.877**	**33.101.265.077**	**54.195.618.954**
137	Kab. Bengkulu Selatan	17.719.126.983	2.245.704.790	15.473.422.193	17.719.126.983
138	Kab. Bengkulu Utara	24.805.204.947	3.412.755.634	21.392.449.313	24.805.204.947
139	Kab. Rejang Lebong	20.233.398.442	2.854.267.811	17.379.130.631	20.233.398.442
140	Kota Bengkulu	27.727.887.665	11.008.683.258	16.719.204.407	27.727.887.665
141	Kab. Kaur	21.009.734.893	1.612.139.258	19.397.595.635	21.009.734.893
142	Kab. Seluma	21.436.213.661	2.106.313.806	19.329.899.855	21.436.213.661
143	Kab. Mukomuko	26.188.191.649	3.042.393.375	23.145.798.274	26.188.191.649
144	Kab. Lebong	21.446.105.654	1.557.880.992	19.888.224.662	21.446.105.654
145	Kab. Bengkulu Tengah	14.829.276.548	2.027.958.726	12.801.317.822	14.829.276.548
146	Kab. Kepahiang	17.302.151.793	1.773.433.150	15.528.718.643	17.302.151.793
147	**Provinsi Lampung**	**145.363.286.959**	**70.662.193.259**	**74.701.093.700**	**145.363.286.959**
148	Kab. Lampung Barat	27.722.003.309	3.844.416.116	23.877.587.193	27.722.003.309
149	Kab. Lampung Selatan	36.124.809.846	8.027.351.388	28.097.458.458	36.124.809.846
150	Kab. Lampung Tengah	54.132.744.089	9.586.583.933	44.546.160.156	54.132.744.089
151	Kab. Lampung Utara	33.466.261.313	6.646.945.753	26.819.315.560	33.466.261.313
152	Kab. Lampung Timur	81.831.069.643	7.717.398.844	74.113.670.799	81.831.069.643
153	Kab. Tanggamus	26.052.643.459	5.449.531.236	20.603.112.223	26.052.643.459
154	Kab. Tulang Bawang	46.339.382.299	7.788.583.611	38.550.798.688	46.339.382.299
155	Kab. Way Kanan	32.280.529.616	4.434.333.388	27.846.196.228	32.280.529.616
156	Kab. Pesawaran	19.588.669.249	4.228.756.327	15.359.912.922	19.588.669.249
157	Kab. Pringsewu	17.657.540.618	5.154.560.074	12.502.980.544	17.657.540.618
158	Kab. Mesuji	19.462.749.614	2.979.258.139	16.483.491.475	19.462.749.614
159	Kab. Tulang Bawang Barat	17.445.515.242	3.173.542.755	14.271.972.487	17.445.515.242
160	Kota Bandar Lampung	45.798.754.889	31.256.438.595	14.542.316.294	45.798.754.889
161	Kota Metro	22.984.117.520	5.802.424.902	17.181.692.618	22.984.117.520
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**8.865.319.793.557**	**8.591.766.194.557**	**273.553.599.000**	**8.865.319.793.557**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**1.026.512.806.501**	**761.651.823.784**	**264.860.982.717**	**1.026.512.806.501**
164	Kab. Bandung	86.551.461.092	36.388.898.562	50.162.562.530	86.551.461.092
165	Kab. Bekasi	275.627.704.929	190.052.285.126	85.575.419.803	275.627.704.929
166	Kab. Bogor	148.165.846.663	80.336.840.842	67.829.005.821	148.165.846.663
167	Kab. Ciamis	64.583.278.949	17.820.280.610	46.762.998.339	64.583.278.949
168	Kab. Cianjur	89.923.206.655	24.004.840.310	65.918.366.345	89.923.206.655
169	Kab. Cirebon	80.870.616.030	27.447.893.561	53.422.722.469	80.870.616.030
170	Kab. Garut	90.919.405.965	27.076.361.294	63.843.044.671	90.919.405.965
171	Kab. Indramayu	177.329.511.406	31.488.288.962	145.841.222.444	177.329.511.406
172	Kab. Karawang	205.369.704.194	88.135.198.678	117.234.505.516	205.369.704.194
173	Kab. Kuningan	51.151.694.267	17.051.917.352	34.099.776.915	51.151.694.267
174	Kab. Majalengka	68.872.153.631	18.154.317.350	50.717.836.281	68.872.153.631
175	Kab. Purwakarta	92.169.646.958	35.713.656.123	56.455.990.835	92.169.646.958
176	Kab. Subang	161.074.326.107	22.634.010.098	138.440.316.009	161.074.326.107
177	Kab. Sukabumi	73.297.917.570	25.041.742.987	48.256.174.583	73.297.917.570
178	Kab. Sumedang	59.383.995.010	23.375.032.119	36.008.962.891	59.383.995.010
179	Kab. Tasikmalaya	60.974.724.755	19.348.598.248	41.626.126.507	60.974.724.755
180	Kab. Bandung Barat	41.940.566.711	24.583.405.035	17.357.161.676	41.940.566.711
181	Kota Bandung	198.499.119.214	169.688.632.969	28.810.486.245	198.499.119.214
182	Kota Bekasi	95.810.713.175	68.626.464.472	27.184.248.703	95.810.713.175
183	Kota Bogor	59.078.873.117	43.669.554.480	15.409.318.637	59.078.873.117
184	Kota Cirebon	38.268.840.270	24.760.188.824	13.508.651.446	38.268.840.270
185	Kota Depok	63.415.277.509	47.002.808.754	16.412.468.755	63.415.277.509
186	Kota Sukabumi	37.696.995.615	21.747.678.308	15.949.317.307	37.696.995.615
187	Kota Cimahi	31.503.216.848	20.569.411.979	10.933.804.869	31.503.216.848
188	Kota Tasikmalaya	35.426.890.388	24.638.203.498	10.788.686.890	35.426.890.388
189	Kota Banjar	34.431.614.351	14.970.826.460	19.460.787.891	34.431.614.351
190	**Provinsi Banten**	**494.203.273.696**	**332.765.807.524**	**161.437.466.172**	**494.203.273.696**
191	Kab. Lebak	67.510.347.580	23.079.995.987	44.430.351.593	67.510.347.580
192	Kab. Pandeglang	57.961.030.088	23.825.731.999	34.135.298.089	57.961.030.088
193	Kab. Serang	91.124.941.184	39.253.185.625	51.871.755.559	91.124.941.184
194	Kab. Tangerang	292.495.836.768	103.238.745.250	189.257.091.518	292.495.836.768

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
195	Kota Cilegon	116.061.338.075	60.811.585.679	55.249.752.396	116.061.338.075
196	Kota Tangerang	332.626.401.348	142.159.033.974	190.467.367.374	332.626.401.348
197	Kota Serang	49.394.566.673	30.083.203.103	19.311.363.570	49.394.566.673
198	Kota Tangerang Selatan	227.174.683.630	76.697.229.663	150.477.453.967	227.174.683.630
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**535.973.134.155**	**363.327.802.643**	**172.645.331.512**	**535.973.134.155**
200	Kab. Banjarnegara	40.740.753.658	9.506.337.931	31.234.415.727	40.740.753.658
201	Kab. Banyumas	58.518.910.121	27.629.400.567	30.889.509.554	58.518.910.121
202	Kab. Batang	27.966.478.582	8.526.358.957	19.440.119.625	27.966.478.582
203	Kab. Blora	78.481.875.290	11.685.972.325	66.795.902.965	78.481.875.290
204	Kab. Boyolali	28.420.031.223	10.335.044.200	18.084.987.023	28.420.031.223
205	Kab. Brebes	60.363.711.895	9.735.555.943	50.628.155.952	60.363.711.895
206	Kab. Cilacap	70.398.087.617	26.823.585.461	43.574.502.156	70.398.087.617
207	Kab. Demak	45.772.808.500	9.813.626.422	35.959.182.078	45.772.808.500
208	Kab. Grobogan	53.841.309.798	11.651.315.058	42.189.994.740	53.841.309.798
209	Kab. Jepara	47.961.960.307	11.571.813.903	36.390.146.404	47.961.960.307
210	Kab. Karanganyar	27.135.787.410	10.819.182.289	16.316.605.121	27.135.787.410
211	Kab. Kebumen	33.711.461.084	10.583.052.895	23.128.408.189	33.711.461.084
212	Kab. Kendal	52.776.280.192	9.884.597.160	42.891.683.032	52.776.280.192
213	Kab. Klaten	30.967.469.004	12.649.712.376	18.317.756.628	30.967.469.004
214	Kab. Kudus	70.767.322.412	41.602.550.351	29.164.772.061	70.767.322.412
215	Kab. Magelang	29.863.455.900	10.895.622.821	18.967.833.079	29.863.455.900
216	Kab. Pati	51.732.969.073	11.753.363.876	39.979.605.197	51.732.969.073
217	Kab. Pekalongan	26.524.945.841	7.991.874.894	18.533.070.947	26.524.945.841
218	Kab. Pemalang	32.885.153.668	9.766.307.541	23.118.846.127	32.885.153.668
219	Kab. Purbalingga	36.936.377.174	8.924.151.148	28.012.226.026	36.936.377.174
220	Kab. Purworejo	26.171.886.094	9.598.431.152	16.573.454.942	26.171.886.094
221	Kab. Rembang	32.721.891.777	8.727.633.870	23.994.257.907	32.721.891.777
222	Kab. Semarang	31.962.943.104	14.087.939.778	17.875.003.326	31.962.943.104
223	Kab. Sragen	42.246.521.493	9.361.293.153	32.885.228.340	42.246.521.493
224	Kab. Sukoharjo	27.104.416.238	13.526.691.497	13.577.724.741	27.104.416.238
225	Kab. Tegal	34.296.570.043	10.976.489.842	23.320.080.201	34.296.570.043
226	Kab. Temanggung	23.240.559.662	8.487.625.189	14.752.934.473	23.240.559.662
227	Kab. Wonogiri	39.564.885.391	10.633.085.842	28.931.799.549	39.564.885.391
228	Kab. Wonosobo	25.757.126.700	7.857.943.889	17.899.182.811	25.757.126.700
229	Kota Magelang	18.650.060.713	10.539.604.670	8.110.456.043	18.650.060.713
230	Kota Pekalongan	23.731.978.495	12.847.545.631	10.884.432.864	23.731.978.495
231	Kota Salatiga	21.770.918.261	9.386.858.391	12.384.059.870	21.770.918.261
232	Kota Semarang	112.974.040.456	94.361.692.482	18.612.347.974	112.974.040.456
233	Kota Surakarta	50.434.328.897	38.356.099.937	12.078.228.960	50.434.328.897
234	Kota Tegal	24.105.827.871	14.980.220.004	9.125.607.867	24.105.827.871
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**88.291.984.791**	**73.744.184.248**	**14.547.800.543**	**88.291.984.791**
236	Kab. Bantul	31.670.720.528	15.915.949.920	15.754.770.608	31.670.720.528
237	Kab. Gunung Kidul	36.088.673.482	10.752.538.219	25.336.135.263	36.088.673.482
238	Kab. Kulon Progo	30.228.776.788	10.424.863.626	19.803.913.162	30.228.776.788
239	Kab. Sleman	47.077.449.518	29.180.626.615	17.896.822.903	47.077.449.518
240	Kota Yogyakarta	52.719.103.736	44.442.161.817	8.276.941.919	52.719.103.736
241	**Provinsi Jawa Timur**	**792.011.871.151**	**491.627.680.341**	**300.384.190.810**	**792.011.871.151**
242	Kab. Bangkalan	74.856.269.283	9.294.267.884	65.562.001.399	74.856.269.283
243	Kab. Banyuwangi	50.254.942.582	12.268.273.238	37.986.669.344	50.254.942.582
244	Kab. Blitar	45.009.855.424	9.970.591.959	35.039.263.465	45.009.855.424
245	Kab. Bojonegoro	115.860.123.143	13.162.650.171	102.697.472.972	115.860.123.143
246	Kab. Bondowoso	31.470.899.958	8.639.494.650	22.831.405.308	31.470.899.958
247	Kab. Gresik	103.349.109.820	51.523.454.674	51.825.655.146	103.349.109.820
248	Kab. Jember	56.725.704.051	18.725.686.846	38.000.017.205	56.725.704.051
249	Kab. Jombang	64.249.174.258	13.839.875.882	50.409.298.376	64.249.174.258
250	Kab. Kediri	41.044.034.325	11.927.483.452	29.116.550.873	41.044.034.325
251	Kab. Lamongan	67.612.819.717	11.553.145.641	56.059.674.076	67.612.819.717
252	Kab. Lumajang	34.498.227.177	8.935.539.026	25.562.688.151	34.498.227.177
253	Kab. Madiun	35.785.011.229	8.846.231.575	26.938.779.654	35.785.011.229
254	Kab. Magetan	34.486.718.959	10.333.234.986	24.153.483.973	34.486.718.959
255	Kab. Malang	89.256.249.373	16.560.846.476	72.695.402.897	89.256.249.373
256	Kab. Mojokerto	55.180.661.449	14.386.056.914	40.794.604.535	55.180.661.449
257	Kab. Nganjuk	55.283.014.564	9.978.376.092	45.304.638.472	55.283.014.564
258	Kab. Ngawi	42.415.818.442	9.766.942.313	32.648.876.129	42.415.818.442
259	Kab. Pacitan	32.407.704.476	8.975.788.827	23.431.915.649	32.407.704.476
260	Kab. Pamekasan	50.059.565.313	10.799.070.486	39.260.494.827	50.059.565.313
261	Kab. Pasuruan	59.743.252.704	19.147.118.703	40.596.134.001	59.743.252.704

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
262	Kab. Ponorogo	34.951.681.996	10.728.986.877	24.222.695.119	34.951.681.996
263	Kab. Probolinggo	50.962.895.594	12.999.153.129	37.963.742.465	50.962.895.594
264	Kab. Sampang	55.991.474.864	8.724.272.759	47.267.202.105	55.991.474.864
265	Kab. Sidoarjo	116.682.046.793	57.568.897.793	59.113.149.000	116.682.046.793
266	Kab. Situbondo	35.164.222.909	9.117.479.048	26.046.743.861	35.164.222.909
267	Kab. Sumenep	132.594.555.260	11.823.215.748	120.771.339.512	132.594.555.260
268	Kab. Trenggalek	37.187.326.780	9.166.141.186	28.021.185.594	37.187.326.780
269	Kab. Tuban	75.269.748.717	16.791.627.022	58.478.121.695	75.269.748.717
270	Kab. Tulungagung	46.813.225.650	11.201.366.212	35.611.859.438	46.813.225.650
271	Kota Blitar	24.062.568.944	8.973.318.518	15.089.250.426	24.062.568.944
272	Kota Kediri	28.757.019.022	19.149.762.019	9.607.257.003	28.757.019.022
273	Kota Madiun	30.574.848.889	12.919.804.320	17.655.044.569	30.574.848.889
274	Kota Malang	42.771.331.983	28.655.559.175	14.115.772.808	42.771.331.983
275	Kota Mojokerto	22.568.754.048	11.533.822.642	11.034.931.406	22.568.754.048
276	Kota Pasuruan	22.348.622.393	11.509.743.300	10.838.879.093	22.348.622.393
277	Kota Probolinggo	24.755.648.233	8.823.030.912	15.932.617.321	24.755.648.233
278	Kota Surabaya	229.601.407.015	203.479.285.944	26.122.121.071	229.601.407.015
279	Kota Batu	19.842.070.591	7.012.348.859	12.829.721.732	19.842.070.591
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**131.765.240.711**	**55.289.504.702**	**76.475.736.009**	**131.765.240.711**
281	Kab. Bengkayang	27.409.842.960	3.159.338.786	24.250.504.174	27.409.842.960
282	Kab. Landak	36.613.904.053	3.348.942.149	33.264.961.904	36.613.904.053
283	Kab. Kapuas Hulu	44.137.046.785	3.967.860.547	40.169.186.238	44.137.046.785
284	Kab. Ketapang	55.913.140.813	6.690.734.373	49.222.406.440	55.913.140.813
285	Kab. Pontianak	19.092.374.897	3.855.386.170	15.236.988.727	19.092.374.897
286	Kab. Sambas	34.634.533.690	3.895.600.885	30.738.932.805	34.634.533.690
287	Kab. Sanggau	41.866.756.454	5.874.620.330	35.992.136.124	41.866.756.454
288	Kab. Sintang	41.544.724.053	5.015.775.446	36.528.948.607	41.544.724.053
289	Kota Pontianak	40.652.873.830	25.511.982.243	15.140.891.587	40.652.873.830
290	Kota Singkawang	20.183.953.501	4.398.785.299	15.785.168.202	20.183.953.501
291	Kab. Kayong Utara	21.280.130.017	2.233.538.886	19.046.591.131	21.280.130.017
292	Kab. Kubu Raya	29.947.888.845	8.507.978.823	21.439.910.022	29.947.888.845
293	Kab. Sekadau	26.378.588.740	3.073.547.552	23.305.041.188	26.378.588.740
294	Kab. Melawi	28.685.506.342	3.400.165.541	25.285.340.801	28.685.506.342
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**167.999.701.215**	**50.470.447.672**	**117.529.253.543**	**167.999.701.215**
296	Kab. Barito Selatan	46.163.814.720	3.921.879.732	42.241.934.988	46.163.814.720
297	Kab. Barito Utara	57.825.703.599	3.999.485.130	53.826.218.469	57.825.703.599
298	Kab. Kapuas	49.413.223.512	3.254.177.632	46.159.045.880	49.413.223.512
299	Kab. Kotawaringin Barat	46.469.872.857	9.831.676.672	36.638.196.185	46.469.872.857
300	Kab. Kotawaringin Timur	72.495.839.773	10.882.353.977	61.613.485.796	72.495.839.773
301	Kota Palangkaraya	34.022.406.186	15.796.540.416	18.225.865.770	34.022.406.186
302	Kab. Barito Timur	39.893.070.483	5.602.054.320	34.291.016.163	39.893.070.483
303	Kab. Murung Raya	48.717.649.420	4.763.837.269	43.953.812.151	48.717.649.420
304	Kab. Pulang Pisau	29.245.584.365	2.194.366.455	27.051.217.910	29.245.584.365
305	Kab. Gunung Mas	26.852.838.263	2.308.745.011	24.544.093.252	26.852.838.263
306	Kab. Lamandau	35.751.953.417	2.719.025.673	33.032.927.744	35.751.953.417
307	Kab. Sukamara	28.915.957.292	2.230.712.461	26.685.244.831	28.915.957.292
308	Kab. Katingan	31.222.100.521	2.943.924.426	28.278.176.095	31.222.100.521
309	Kab. Seruyan	63.127.109.404	5.256.892.323	57.870.217.081	63.127.109.404
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**195.825.381.145**	**82.417.938.115**	**113.407.443.030**	**195.825.381.145**
311	Kab. Banjar	70.273.331.234	8.268.319.149	62.005.012.085	70.273.331.234
312	Kab. Barito Kuala	49.470.972.200	4.543.463.065	44.927.509.135	49.470.972.200
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	46.539.413.192	5.102.530.698	41.436.882.494	46.539.413.192
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	24.606.937.702	5.132.614.104	19.474.323.598	24.606.937.702
315	Kab. Hulu Sungai Utara	31.392.834.141	4.347.457.365	27.045.376.776	31.392.834.141
316	Kab. Kotabaru	74.316.273.700	15.010.571.275	59.305.702.425	74.316.273.700
317	Kab. Tabalong	79.726.465.849	9.992.701.212	69.733.764.637	79.726.465.849
318	Kab. Tanah Laut	45.152.585.744	9.458.924.992	35.693.660.752	45.152.585.744
319	Kab. Tapin	46.321.012.113	6.173.925.362	40.147.086.751	46.321.012.113
320	Kota Banjarbaru	29.914.145.578	10.130.395.538	19.783.750.040	29.914.145.578
321	Kota Banjarmasin	45.040.182.659	30.706.211.556	14.333.971.103	45.040.182.659
322	Kab. Balangan	45.330.272.964	6.721.479.275	38.608.793.689	45.330.272.964
323	Kab. Tanah Bumbu	52.853.017.860	8.045.745.905	44.807.271.955	52.853.017.860
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**830.897.639.127**	**312.404.152.882**	**518.493.486.245**	**830.897.639.127**
325	Kab. Berau	71.752.497.068	15.527.183.343	56.225.313.725	71.752.497.068
326	Kab. Bulungan	221.343.840.473	13.397.771.375	207.946.069.098	221.343.840.473
327	Kab. Kutai Kartanegara	888.361.489.233	53.246.447.578	835.115.041.655	888.361.489.233
328	Kab. Kutai Barat	79.222.507.239	20.137.879.415	59.084.627.824	79.222.507.239

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
329	Kab. Kutai Timur	241.856.864.414	43.833.970.328	198.022.894.086	241.856.864.414
330	Kab. Malinau	69.387.625.456	11.574.043.469	57.813.581.987	69.387.625.456
331	Kab. Nunukan	130.188.137.962	12.405.642.747	117.782.495.215	130.188.137.962
332	Kab. Pasir	126.991.650.252	21.762.079.123	105.229.571.129	126.991.650.252
333	Kota Balikpapan	166.731.846.653	117.960.312.787	48.771.533.866	166.731.846.653
334	Kota Bontang	179.410.229.186	58.329.903.970	121.080.325.216	179.410.229.186
335	Kab. Tana Tidung	44.138.732.850	10.744.482.970	33.394.249.880	44.138.732.850
336	Kota Samarinda	152.454.944.606	57.643.629.091	94.811.315.515	152.454.944.606
337	Kota Tarakan	138.710.210.277	19.101.436.882	119.608.773.395	138.710.210.277
338	Kab. Penajam Paser Utara	143.079.425.880	12.999.036.601	130.080.389.279	143.079.425.880
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**83.877.167.546**	**41.638.285.526**	**42.238.882.020**	**83.877.167.546**
340	Kab. Bolaang Mongondow	20.429.266.141	1.517.306.418	18.911.959.723	20.429.266.141
341	Kab. Minahasa	26.199.843.160	4.301.219.223	21.898.623.937	26.199.843.160
342	Kab. Sangihe	13.984.809.321	3.120.358.562	10.864.450.759	13.984.809.321
343	Kota Bitung	25.419.706.239	3.963.241.658	21.456.464.581	25.419.706.239
344	Kota Manado	56.465.880.164	23.710.171.857	32.755.708.307	56.465.880.164
345	Kab. Kepulauan Talaud	17.451.553.013	2.089.841.463	15.361.711.550	17.451.553.013
346	Kab. Minahasa Selatan	18.070.898.963	2.831.513.141	15.239.385.822	18.070.898.963
347	Kab. Minahasa Tenggara	15.809.598.269	1.864.195.958	13.945.402.311	15.809.598.269
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	13.843.558.184	2.105.882.758	11.737.675.426	13.843.558.184
349	Kota Kotamubagu	17.023.986.091	4.285.952.058	12.738.034.033	17.023.986.091
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.812.889.004	1.671.040.076	14.141.848.928	15.812.889.004
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.397.574.348	1.275.350.104	10.122.224.244	11.397.574.348
352	Kota Tomohon	23.058.470.026	3.100.851.109	19.957.618.917	23.058.470.026
353	Kab. Minahasa Utara	24.888.547.903	4.734.321.258	20.154.226.645	24.888.547.903
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	16.063.312.380	1.886.182.620	14.177.129.760	16.063.312.380
355	**Provinsi Gorontalo**	**26.002.608.022**	**11.834.369.080**	**14.168.238.942**	**26.002.608.022**
356	Kab. Boalemo	17.640.320.701	1.577.899.113	16.062.421.588	17.640.320.701
357	Kab. Gorontalo	16.915.653.937	3.337.380.739	13.578.273.198	16.915.653.937
358	Kota Gorontalo	15.470.296.324	7.785.025.765	7.685.270.559	15.470.296.324
359	Kab. Pohuwato	18.878.074.014	1.587.741.474	17.290.332.540	18.878.074.014
360	Kab. Gorontalo Utara	15.617.299.787	1.413.579.516	14.203.720.271	15.617.299.787
361	Kab. Bone Bolango	20.779.778.150	2.049.927.008	18.729.851.142	20.779.778.150
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**80.385.202.691**	**32.935.808.562**	**47.449.394.129**	**80.385.202.691**
363	Kab. Banggai	37.295.572.746	6.566.787.794	30.728.784.952	37.295.572.746
364	Kab. Banggai Kepulauan	22.695.170.900	2.324.530.338	20.370.640.562	22.695.170.900
365	Kab. Buol	22.234.414.067	2.511.095.129	19.723.318.938	22.234.414.067
366	Kab. Toli-Toli	20.472.795.761	2.693.062.700	17.779.733.061	20.472.795.761
367	Kab. Donggala	28.291.621.545	2.949.680.914	25.341.940.631	28.291.621.545
368	Kab. Morowali	47.329.556.277	3.738.803.178	43.590.753.099	47.329.556.277
369	Kab. Poso	28.534.009.073	3.590.622.898	24.943.386.175	28.534.009.073
370	Kota Palu	25.567.361.449	16.734.494.484	8.832.866.965	25.567.361.449
371	Kab. Parigi Moutong	26.390.128.894	3.739.814.343	22.650.314.551	26.390.128.894
372	Kab. Sigi	17.789.674.786	2.336.072.259	15.453.602.527	17.789.674.786
373	Kab. Tojo Una Una	23.127.811.266	2.218.748.787	20.909.062.479	23.127.811.266
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**252.333.320.612**	**133.764.740.503**	**118.568.580.109**	**252.333.320.612**
375	Kab. Bantaeng	23.953.850.347	3.922.489.440	20.031.360.907	23.953.850.347
376	Kab. Barru	24.293.194.707	4.872.869.120	19.420.325.587	24.293.194.707
377	Kab. Bone	63.847.577.518	7.107.378.856	56.740.198.662	63.847.577.518
378	Kab. Bulukumba	29.634.665.050	6.350.899.903	23.283.765.147	29.634.665.050
379	Kab. Enrekang	28.546.433.621	4.719.163.329	23.827.270.292	28.546.433.621
380	Kab. Gowa	27.144.551.509	6.603.606.940	20.540.944.569	27.144.551.509
381	Kab. Jeneponto	26.058.762.947	4.623.174.063	21.435.588.884	26.058.762.947
382	Kab. Luwu	22.064.914.411	3.338.709.242	18.726.205.169	22.064.914.411
383	Kab. Luwu Utara	32.095.519.800	3.646.585.706	28.448.934.094	32.095.519.800
384	Kab. Maros	32.450.248.170	6.634.029.713	25.816.218.457	32.450.248.170
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	34.104.821.933	9.926.087.650	24.178.734.283	34.104.821.933
386	Kab. Pinrang	27.993.373.506	5.444.505.923	22.548.867.583	27.993.373.506
387	Kab. Selayar	21.622.723.251	4.040.057.798	17.582.665.453	21.622.723.251
388	Kab. Sidenreng Rappang	34.698.079.136	5.445.757.260	29.252.321.876	34.698.079.136
389	Kab. Sinjai	24.460.439.036	5.558.952.148	18.901.486.888	24.460.439.036
390	Kab. Soppeng	26.092.480.343	4.944.072.345	21.148.407.998	26.092.480.343
391	Kab. Takalar	23.196.980.293	4.451.687.835	18.745.292.458	23.196.980.293
392	Kab. Tana Toraja	18.823.495.192	3.987.589.352	14.835.905.840	18.823.495.192
393	Kab. Wajo	117.944.822.031	6.357.739.101	111.587.082.930	117.944.822.031
394	Kota Pare-pare	24.534.386.962	7.703.274.907	16.831.112.055	24.534.386.962
395	Kab. Toraja Utara	16.524.199.595	3.110.840.338	13.413.359.257	16.524.199.595

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
396	Kota Makassar	85.564.055.194	62.787.659.864	22.776.395.330	85.564.055.194
397	Kota Palopo	17.449.562.821	5.241.800.501	12.207.762.320	17.449.562.821
398	Kab. Luwu Timur	52.564.418.565	19.898.397.830	32.666.020.735	52.564.418.565
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**39.277.128.259**	**7.997.275.730**	**31.279.852.529**	**39.277.128.259**
400	Kab. Majene	25.352.740.801	1.846.755.663	23.505.985.138	25.352.740.801
401	Kab. Mamuju	47.545.922.895	4.250.368.615	43.295.554.280	47.545.922.895
402	Kab. Polewali Mandar	25.784.116.681	2.575.000.898	23.209.115.783	25.784.116.681
403	Kab. Mamasa	20.952.833.253	1.322.598.573	19.630.234.680	20.952.833.253
404	Kab. Mamuju Utara	47.578.422.603	2.001.189.838	45.577.232.765	47.578.422.603
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**67.214.668.491**	**24.585.243.251**	**42.629.425.240**	**67.214.668.491**
406	Kab. Buton	25.739.357.698	2.292.642.337	23.446.715.361	25.739.357.698
407	Kab. Konawe	18.291.519.709	2.448.147.204	15.843.372.505	18.291.519.709
408	Kab. Kolaka	34.789.925.654	4.787.739.320	30.002.186.334	34.789.925.654
409	Kab. Muna	18.905.790.876	2.861.393.061	16.044.397.815	18.905.790.876
410	Kota Kendari	30.442.098.053	11.720.043.330	18.722.054.723	30.442.098.053
411	Kota Bau-bau	19.660.560.303	2.525.737.088	17.134.823.215	19.660.560.303
412	Kab. Konawe Selatan	26.892.924.849	2.390.467.551	24.502.457.298	26.892.924.849
413	Kab. Bombana	24.741.823.189	1.946.855.246	22.794.967.943	24.741.823.189
414	Kab. Konawe Utara	18.893.502.396	1.186.463.164	17.707.039.232	18.893.502.396
415	Kab. Buton Utara	12.971.241.066	1.414.065.872	11.557.175.194	12.971.241.066
416	Kab. Wakatobi	18.243.356.610	1.788.321.474	16.455.035.136	18.243.356.610
417	Kab. Kolaka Utara	21.703.857.360	1.515.989.203	20.187.868.157	21.703.857.360
418	**Provinsi Bali**	**141.077.048.655**	**121.374.702.433**	**19.702.346.222**	**141.077.048.655**
419	Kab. Badung	56.018.514.713	41.781.210.053	14.237.304.660	56.018.514.713
420	Kab. Bangli	22.702.707.425	8.286.757.990	14.415.949.435	22.702.707.425
421	Kab. Buleleng	39.734.798.167	18.057.914.751	21.676.883.416	39.734.798.167
422	Kab. Gianyar	35.076.929.402	14.185.113.250	20.891.816.152	35.076.929.402
423	Kab. Jembrana	20.737.862.386	9.406.856.408	11.331.005.978	20.737.862.386
424	Kab. Karangasem	28.205.967.882	10.624.443.422	17.581.524.460	28.205.967.882
425	Kab. Klungkung	19.344.075.512	9.154.033.072	10.190.042.440	19.344.075.512
426	Kab. Tabanan	22.546.959.256	11.860.231.321	10.686.727.935	22.546.959.256
427	Kota Denpasar	71.636.386.523	59.425.799.046	12.210.587.477	71.636.386.523
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**82.702.088.299**	**52.754.870.213**	**29.947.218.086**	**82.702.088.299**
429	Kab. Bima	20.060.841.837	2.780.068.499	17.280.773.338	20.060.841.837
430	Kab. Dompu	19.179.427.969	4.230.097.164	14.949.330.805	19.179.427.969
431	Kab. Lombok Barat	18.147.161.359	5.048.512.843	13.098.648.516	18.147.161.359
432	Kab. Lombok Tengah	31.149.402.748	5.734.149.692	25.415.253.056	31.149.402.748
433	Kab. Lombok Timur	29.694.034.878	6.543.609.419	23.150.425.459	29.694.034.878
434	Kab. Sumbawa	28.069.418.615	5.240.826.045	22.828.592.570	28.069.418.615
435	Kota Mataram	28.917.113.899	16.514.979.990	12.402.133.909	28.917.113.899
436	Kab. Lombok Utara	16.208.397.981	3.269.843.053	12.938.554.928	16.208.397.981
437	Kota Bima	19.359.659.128	6.281.911.659	13.077.747.469	19.359.659.128
438	Kab. Sumbawa Barat	42.100.713.804	23.497.523.228	18.603.190.576	42.100.713.804
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**80.958.749.624**	**32.596.087.244**	**48.362.662.380**	**80.958.749.624**
440	Kab. Alor	16.740.960.822	2.001.199.351	14.739.761.471	16.740.960.822
441	Kab. Belu	19.866.314.063	2.903.378.201	16.962.935.862	19.866.314.063
442	Kab. Ende	17.399.745.712	2.617.669.189	14.782.076.523	17.399.745.712
443	Kab. Flores Timur	19.984.513.527	2.844.860.022	17.139.653.505	19.984.513.527
444	Kab. Kupang	18.139.321.936	1.917.401.940	16.221.919.996	18.139.321.936
445	Kab. Lembata	15.566.092.994	1.793.881.913	13.772.211.081	15.566.092.994
446	Kab. Manggarai	16.364.493.261	3.377.051.789	12.987.441.472	16.364.493.261
447	Kab. Ngada	12.817.664.016	1.300.338.752	11.517.325.264	12.817.664.016
448	Kab. Sikka	18.360.642.286	2.629.668.861	15.730.973.425	18.360.642.286
449	Kab. Sumba Barat	12.681.146.191	1.485.618.874	11.195.527.317	12.681.146.191
450	Kab. Sumba Timur	22.693.055.826	2.454.335.161	20.238.720.665	22.693.055.826
451	Kab. Timor Tengah Selatan	21.638.228.277	1.611.148.335	20.027.079.942	21.638.228.277
452	Kab. Timor Tengah Utara	19.225.142.295	2.209.308.706	17.015.833.589	19.225.142.295
453	Kota Kupang	27.150.272.560	11.699.978.144	15.450.294.416	27.150.272.560
454	Kab. Rote Ndao	16.546.155.291	1.184.630.136	15.361.525.155	16.546.155.291
455	Kab. Nagekeo	14.566.757.395	1.209.797.071	13.356.960.324	14.566.757.395
456	Kab. Sumba Tengah	14.188.288.698	1.134.042.289	13.054.246.409	14.188.288.698
457	Kab. Sumba Barat Daya	16.253.337.723	1.359.013.658	14.894.324.065	16.253.337.723
458	Kab. Manggarai Timur	13.990.863.780	832.203.289	13.158.660.491	13.990.863.780
459	Kab. Sabu Raijua	9.161.536.166	826.375.776	8.335.160.390	9.161.536.166
460	Kab. Manggarai Barat	16.957.369.810	1.707.561.053	15.249.808.757	16.957.369.810
461	**Provinsi Maluku**	**76.359.932.757**	**19.193.593.395**	**57.166.339.362**	**76.359.932.757**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	23.314.966.233	1.290.647.468	22.024.318.765	23.314.966.233

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	7 = 4+5+6
463	Kab. Maluku Tengah	37.682.028.446	2.469.978.199	35.212.050.247	37.682.028.446
464	Kab. Maluku Tenggara	23.679.778.327	1.985.513.122	21.694.265.205	23.679.778.327
465	Kab. Pulau Buru	18.752.152.297	1.614.311.377	17.137.840.920	18.752.152.297
466	Kota Ambon	34.931.565.207	14.756.357.933	20.175.207.274	34.931.565.207
467	Kab. Seram Bagian Barat	21.999.997.277	1.312.664.472	20.687.332.805	21.999.997.277
468	Kab. Seram Bagian Timur	71.607.361.019	1.075.414.091	70.531.946.928	71.607.361.019
469	Kab. Maluku Barat Daya	19.357.670.502	979.748.423	18.377.922.079	19.357.670.502
470	Kab. Buru Selatan	15.320.898.772	904.560.890	14.416.337.882	15.320.898.772
471	Kab. Kepulauan Aru	24.824.462.855	1.435.577.693	23.388.885.162	24.824.462.855
472	Kota Tual	11.492.285.793	965.616.413	10.526.669.380	11.492.285.793
473	**Provinsi Maluku Utara**	**59.371.068.300**	**20.312.765.613**	**39.058.302.687**	**59.371.068.300**
474	Kab. Halmahera Tengah	28.302.931.595	1.746.236.257	26.556.695.338	28.302.931.595
475	Kab. Halmahera Barat	23.626.027.019	2.177.118.137	21.448.908.882	23.626.027.019
476	Kota Ternate	35.405.485.369	8.005.711.453	27.399.773.916	35.405.485.369
477	Kab. Halmahera Timur	26.745.364.304	2.217.578.011	24.527.786.293	26.745.364.304
478	Kota Tidore Kepulauan	22.925.479.117	2.323.953.783	20.601.525.334	22.925.479.117
479	Kab. Kepulauan Sula	23.347.183.411	1.881.282.925	21.465.900.486	23.347.183.411
480	Kab. Pulau Morotai	11.624.065.292	1.020.633.837	10.603.431.455	11.624.065.292
481	Kab. Halmahera Selatan	32.664.866.780	1.823.075.576	30.841.791.204	32.664.866.780
482	Kab. Halmahera Utara	26.255.296.743	9.273.558.426	16.981.738.317	26.255.296.743
483	Kab. Yalimo	12.056.816.964	2.562.614.885	9.494.202.079	12.056.816.964
484	Kab. Lanny Jaya	13.504.506.590	2.634.492.221	10.870.014.369	13.504.506.590
485	**Provinsi Papua**	**313.454.079.119**	**155.184.358.323**	**158.269.720.796**	**313.454.079.119**
486	Kab. Biak Numfor	23.471.594.404	5.092.936.981	18.378.657.423	23.471.594.404
487	Kab. Jayapura	36.848.476.495	5.125.786.484	31.722.690.011	36.848.476.495
488	Kab. Jayawijaya	26.813.923.130	4.227.170.985	22.586.752.145	26.813.923.130
489	Kab. Merauke	49.486.170.274	9.718.095.296	39.768.074.978	49.486.170.274
490	Kab. Mimika	201.381.723.743	120.472.992.322	80.908.731.421	201.381.723.743
491	Kab. Nabire	27.991.704.819	4.259.432.563	23.732.272.256	27.991.704.819
492	Kab. Paniai	22.313.942.453	4.309.463.333	18.004.479.120	22.313.942.453
493	Kab. Puncak Jaya	24.068.082.117	2.862.786.173	21.205.295.944	24.068.082.117
494	Kab. Kepulauan Yapen	30.334.245.842	3.580.152.147	26.754.093.695	30.334.245.842
495	Kota Jayapura	39.123.223.378	19.901.414.784	19.221.808.594	39.123.223.378
496	Kab. Sarmi	30.616.040.340	2.809.501.285	27.806.539.055	30.616.040.340
497	Kab. Keerom	29.252.864.066	3.038.552.450	26.214.311.616	29.252.864.066
498	Kab. Yahukimo	34.741.968.502	2.501.604.910	32.240.363.592	34.741.968.502
499	Kab. Pegunungan Bintang	34.408.972.231	3.337.169.004	31.071.803.227	34.408.972.231
500	Kab. Tolikara	29.122.961.946	2.676.467.663	26.446.494.283	29.122.961.946
501	Kab. Boven Digoel	44.468.131.089	3.435.425.704	41.032.705.385	44.468.131.089
502	Kab. Mappi	40.794.087.980	3.282.606.336	37.511.481.644	40.794.087.980
503	Kab. Asmat	36.314.406.159	3.421.359.686	32.893.046.473	36.314.406.159
504	Kab. Waropen	40.224.877.082	2.732.674.602	37.492.202.480	40.224.877.082
505	Kab. Mamberamo Raya	86.685.551.528	2.479.581.397	84.205.970.131	86.685.551.528
506	Kab. Mamberamo Tengah	10.429.852.186	2.665.522.407	7.764.329.779	10.429.852.186
507	Kab. Nduga	11.564.264.450	2.578.820.436	8.985.444.014	11.564.264.450
508	Kab. Dogiyai	18.325.164.120	2.850.399.276	15.474.764.844	18.325.164.120
509	Kab. Intan Jaya	16.894.235.733	2.437.618.605	14.456.617.128	16.894.235.733
510	Kab. Puncak	18.172.335.460	2.666.611.804	15.505.723.656	18.172.335.460
511	Kab. Deiyai	13.096.324.514	2.526.766.322	10.569.558.192	13.096.324.514
512	Kab. Supiori	19.270.435.619	2.624.632.005	16.645.803.614	19.270.435.619
513	**Provinsi Papua Barat**	**232.949.652.491**	**33.774.912.994**	**199.174.739.497**	**232.949.652.491**
514	Kab. Sorong	239.578.249.007	4.454.245.601	235.124.003.406	239.578.249.007
515	Kab. Manokwari	88.460.803.928	9.463.686.467	78.997.117.461	88.460.803.928
516	Kab. Fak Fak	62.929.970.824	2.997.624.906	59.932.345.918	62.929.970.824
517	Kota Sorong	44.564.890.297	7.186.342.987	37.378.547.310	44.564.890.297
518	Kab. Sorong Selatan	59.844.079.678	2.494.802.289	57.349.277.389	59.844.079.678
519	Kab. Raja Ampat	69.641.451.046	2.324.414.232	67.317.036.814	69.641.451.046
520	Kab. Teluk Bintuni	216.639.873.034	14.806.166.897	201.833.706.137	216.639.873.034
521	Kab. Teluk Wondama	36.979.144.861	2.109.984.071	34.869.160.790	36.979.144.861
522	Kab. Tambrauw	23.574.777.955	1.420.837.369	22.153.940.586	23.574.777.955
523	Kab. Maybrat	27.859.458.154	1.410.548.368	26.448.909.786	27.859.458.154
524	Kab. Kaimana	42.587.700.802	2.071.153.677	40.516.547.125	42.587.700.802
525	**Dana cadangan**	-	-	-	-
526	**Nilai belum teridentifikasi daerah penerima**	-	-	-	-
JUMLAH		**43.855.009.346.533**	**19.091.529.508.064**	**24.763.479.838.469**	**43.855.009.346.533**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	957.557.377.947	558.657.059.544	396.301.587.255	1.686.276.697	8.272.088	76.482.805	-	956.729.678.389
2	Kab. Aceh Barat	9.733.859.500	2.626.914.073	4.699.228.307	929.054.567	752.008	13.372.790	301.357.594	8.570.679.339
3	Kab. Aceh Besar	8.292.827.356	2.626.914.073	4.699.228.307	528.507.427	752.008	8.288.772	301.357.594	8.165.048.181
4	Kab. Aceh Selatan	8.104.697.646	2.626.914.073	4.699.228.307	323.091.038	752.008	109.245.448	301.357.594	8.060.588.468
5	Kab. Aceh Singkil	8.073.490.610	2.626.914.073	4.699.228.307	54.768.010	752.008	8.177.206	301.357.594	7.691.197.198
6	Kab. Aceh Tengah	9.779.873.097	2.626.914.073	4.699.228.307	1.070.571.799	752.008	7.721.911	301.357.594	8.706.545.692
7	Kab. Aceh Tenggara	7.760.641.241	2.626.914.073	4.699.228.307	121.174.420	752.008	6.952.982	301.357.594	7.756.379.384
8	Kab. Aceh Timur	7.797.586.534	2.627.328.309	4.699.228.307	66.378.227	752.008	81.128.325	301.357.594	7.776.172.770
9	Kab. Aceh Utara	151.641.535.891	47.843.104.996	103.383.022.762	62.539.760	752.008	9.278.993	301.357.594	151.600.056.113
10	Kab. Bireun	7.918.923.069	2.626.914.073	4.699.228.307	71.752.110	752.008	8.176.167	301.357.594	7.708.180.259
11	Kab. Pidie	7.895.396.022	2.626.914.073	4.699.228.307	241.096.307	752.008	11.105.787	301.357.594	7.880.454.076
12	Kab. Simeulue	7.699.515.590	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	752.008	12.499.832	301.357.594	7.695.444.049
13	Kota Banda Aceh	7.694.159.056	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	752.008	6.952.982	301.357.594	7.689.897.199
14	Kota Sabang	7.709.951.226	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	16.544.178	6.952.982	301.357.594	7.705.689.369
15	Kota Langsa	7.700.107.640	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	752.008	7.557.280	301.357.594	7.690.501.497
16	Kota Lhokseumawe	7.694.159.056	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	752.008	6.952.982	301.357.594	7.689.897.199
17	Kab. Nagan Raya	8.935.908.388	2.626.914.073	4.699.228.307	1.079.807.026	752.008	164.633.373	301.357.594	8.872.692.381
18	Kab. Aceh Jaya	7.879.319.317	2.626.914.073	4.699.228.307	190.060.997	752.008	43.204.703	301.357.594	7.861.517.682
19	Kab. Pidie Jaya	7.698.700.376	2.626.914.073	4.699.228.307	59.233.555	752.008	6.952.982	301.357.594	7.694.438.519
20	Kab. Aceh Barat Daya	7.890.368.398	2.626.914.073	4.699.228.307	225.224.178	752.008	12.684.894	301.357.594	7.866.161.054
21	Kab. Gayo Lues	8.852.214.573	2.626.914.073	4.699.228.307	248.565.937	752.008	7.920.484	301.357.594	7.884.738.403
22	Kab. Aceh Tamiang	18.003.628.368	12.575.504.448	4.699.228.307	60.122.380	752.008	265.744.066	301.357.594	17.902.708.803
23	Kab. Bener Meriah	7.723.896.865	2.626.914.073	4.699.228.307	54.692.235	752.008	14.007.384	301.357.594	7.696.951.601
24	**Kota Subulussalam**	**7.733.187.458**	**2.626.914.073**	**4.699.228.307**	**85.864.933**	**752.008**	**12.675.845**	301.357.594	**7.726.792.760**
25	Provinsi Sumatera Utara	9.740.315.281	1.261.183.777	1.250.779.399	2.319.533.155	197.455.680	1.937.129.155	-	6.966.081.166
26	Kab. Asahan	1.042.820.074	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	268.907.059	301.357.594	813.415.075
27	Kab. Dairi	1.652.338.507	78.823.985	78.173.712	364.600.971	12.340.980	319.586.827	301.357.594	1.154.884.069
28	Kab. Deli Serdang	984.891.876	79.202.799	223.718.554	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	811.502.244
29	Kab. Tanah Karo	860.961.059	78.823.985	78.173.712	87.759.875	12.340.980	127.455.058	301.357.594	685.911.204
30	Kab. Labuhan Batu	840.439.237	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	122.140.792	301.357.594	666.648.808
31	Kab. Langkat	5.071.035.230	2.226.254.772	2.162.809.935	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	4.897.645.598
32	Kab. Mandailing Natal	3.838.261.534	78.823.985	78.173.712	864.621.629	394.911.360	1.749.310.344	301.357.594	3.467.198.624
33	Kab. Nias	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
34	Kab. Simalungun	3.003.879.260	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	2.038.292.211	301.357.594	2.582.800.227
35	Kab. Tapanuli Selatan	8.145.060.696	78.823.985	78.173.712	3.170.470.519	12.340.980	1.039.773.324	301.357.594	4.680.940.114
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.068.163.082	78.823.985	78.173.712	303.006.607	12.340.980	121.070.572	301.357.594	894.773.450
37	Kab. Tapanuli Utara	3.810.864.805	78.823.985	78.173.712	2.060.411.694	12.340.980	937.157.595	301.357.594	3.468.265.560
38	Kab. Toba Samosir	1.360.273.595	78.823.985	78.173.712	140.100.385	12.340.980	470.160.681	301.357.594	1.080.957.337
39	Kota Binjai	1.169.244.583	215.896.327	271.377.733	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	995.854.951
40	Kota Medan	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
41	Kota Pematang Siantar	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
42	Kota Sibolga	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
43	Kota Tanjung Balai	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
44	Kab. Batu Bara	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
45	Kab. Labuhan Batu Utara	1.067.187.534	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	287.010.318	301.357.594	831.518.334
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.126.662.644	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	306.240.306	301.357.594	850.748.322
47	Kab. Padang Lawas Utara	873.321.031	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	170.356.196	301.357.594	714.864.212
48	Kab. Padang Lawas	10.156.254.181	873.633.200	78.173.712	73.811.745	12.340.980	2.614.720.588	301.357.594	3.954.037.819
49	Kab. Nias Utara	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
50	Kab. Nias Barat	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
51	Kota Tebing Tinggi	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
52	Kota Padang Sidempuan	979.842.209	78.823.985	78.173.712	214.685.734	12.340.980	121.070.572	301.357.594	806.452.577
53	Kab. Pakpak Bharat	2.541.028.692	78.823.985	78.173.712	76.175.578	12.340.980	1.357.231.666	301.357.594	1.904.103.515
54	Kab. Nias Selatan	3.216.396.336	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	2.671.888.320	301.357.594	3.216.396.336
55	Kab. Humbang Hasundutan	3.217.472.556	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	771.528.866	301.357.594	1.316.036.882
56	Kab. Serdang Bedagai	838.968.220	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	121.070.572	301.357.594	665.578.588
57	Kab. Samosir	4.934.082.487	78.823.985	78.173.712	73.811.745	12.340.980	4.282.117.841	301.357.594	4.826.625.857
58	**Kota Gunung sitoli**	**838.968.220**	**78.823.985**	**78.173.712**	**73.811.745**	**12.340.980**	**121.070.572**	301.357.594	**665.578.588**
59	Provinsi Sumatera Barat	8.992.475.176	-	-	3.586.671.856	420.250.880	947.067.980	-	4.953.990.716
60	Kab. Limapuluh Kota	1.364.500.580	-	-	407.357.932	46.694.542	128.841.391	301.357.594	884.251.459
61	Kab. Agam	1.370.092.499	-	-	367.748.281	46.694.542	213.900.776	301.357.594	929.701.193
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6.629.586.872	-	-	362.771.700	46.694.542	4.314.985.956	301.357.594	5.025.809.792
63	Kab. Padang Pariaman	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	105.206.328	301.357.594	816.030.164
64	Kab. Pasaman	2.530.116.365	-	-	707.205.550	46.694.542	110.202.496	301.357.594	1.165.460.182
65	Kab. Pesisir Selatan	1.524.856.618	-	-	452.651.691	46.694.542	157.217.075	301.357.594	957.920.902
66	Kab. Sijunjung	4.302.911.808	-	-	2.139.255.417	46.694.542	111.908.358	301.357.594	2.599.215.911
67	Kab. Solok	1.548.151.857	-	-	728.171.810	46.694.542	121.346.807	301.357.594	1.197.570.753
68	Kab. Tanah Datar	1.313.970.553	-	-	401.846.250	46.694.542	107.069.821	301.357.594	856.968.207
69	Kota Bukit Tinggi	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	104.956.740	301.357.594	815.780.576
70	Kota Padang Panjang	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	104.956.740	301.357.594	815.780.576
71	Kota Padang	1.227.198.397	-	-	363.190.335	46.694.542	104.956.740	301.357.594	816.199.211
72	Kota Payakumbuh	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	104.956.740	301.357.594	815.780.576
73	Kota Sawahlunto	7.690.213.355	-	-	3.320.116.584	46.694.542	105.531.537	301.357.594	3.773.700.257
74	Kota Solok	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	104.956.740	301.357.594	815.780.576
75	Kota Pariaman	1.226.779.762	-	-	362.771.700	46.694.542	104.956.740	301.357.594	815.780.576
76	Kab. Pasaman Barat	1.555.753.437	-	-	403.654.885	46.694.542	191.830.078	301.357.594	943.537.099
77	Kab. Dharmasraya	4.724.336.905	-	-	2.422.336.536	46.694.542	1.116.463.384	301.357.594	3.886.852.056
78	**Kab. Solok Selatan**	**6.691.771.603**	-	-	**695.305.103**	**840.501.760**	**2.754.548.018**	301.357.594	**4.591.712.475**
79	Provinsi Riau	1.693.516.002.874	1.661.732.688.331	863.167.594	3.925.452.053	-	8.799.216.447	-	1.675.320.524.425
80	Kab. Bengkalis	1.825.551.468.735	1.788.802.509.438	156.939.562	607.164.245	-	10.479.243.832	301.357.594	1.800.347.214.671
81	Kab. Indragiri Hilir	357.938.745.144	302.133.216.060	156.939.562	2.322.810.727	-	17.908.994.252	301.357.594	322.823.318.195
82	Kab. Indragiri Hulu	330.921.619.356	309.840.349.919	156.939.562	4.074.126.572	-	1.941.496.360	301.357.594	316.314.270.007
83	Kab. Kampar	711.055.796.607	703.231.129.015	281.646.000	724.092.385	-	2.181.242.756	301.357.594	706.719.467.750
84	Kab. Kuantan Singingi	311.502.959.084	302.133.216.060	156.939.562	3.042.375.394	-	2.453.680.779	301.357.594	308.087.569.389
85	Kab. Pelalawan	333.160.932.479	311.821.511.982	1.697.257.418	607.869.845	-	12.516.159.237	301.357.594	326.944.156.076
86	Kab. Rokan Hilir	817.520.544.645	810.125.438.951	156.939.562	607.164.245	-	2.131.064.354	301.357.594	813.321.964.706
87	Kab. Rokan Hulu	318.373.074.910	309.028.771.344	156.939.562	873.144.890	-	2.409.285.951	301.357.594	312.769.499.341
88	Kab. Siak	888.282.661.137	874.169.942.469	156.939.562	607.164.245	-	4.400.370.655	301.357.594	879.635.774.525
89	Kota Dumai	322.427.205.711	302.133.216.060	156.939.562	607.164.245	-	6.662.161.592	301.357.594	309.860.839.053
90	Kota Pekanbaru	307.877.246.359	302.133.216.060	156.939.562	607.164.245	-	1.599.857.535	301.357.594	304.798.534.996
91	**Kab. Kepulauan Meranti**	**347.216.478.112**	**331.378.235.962**	**355.941.600**	**650.569.565**	-	**11.321.278.564**	301.357.594	**344.007.383.285**
92	Provinsi Kepulauan Riau	630.954.024.482	170.175.232.258	423.686.945.150	34.235.463.590	-	33.494.709	-	628.131.135.707
93	Kab. Bintan	212.832.925.851	56.139.751.083	129.276.576.249	26.940.051.021	-	11.164.903	301.357.594	212.668.900.850

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
94	Kab. Natuna	555.615.086.125	227.256.902.638	317.153.299.011	10.837.462.829	-	45.983.373	301.357.594	555.595.005.445
95	Kab. Karimun	216.857.927.517	56.139.751.083	129.276.576.249	28.520.412.517	-	69.397.176	301.357.594	214.307.494.619
96	Kota Batam	196.588.956.034	56.139.751.083	129.276.576.249	10.837.462.829	-	16.457.173	301.357.594	196.571.604.928
97	Kab. Kepulauan Anambas	389.877.302.736	148.279.755.765	230.440.965.429	10.837.462.829	-	11.164.903	301.357.594	389.870.706.520
98	Kota Tanjung Pinang	204.304.578.216	56.139.751.083	129.276.576.249	18.295.795.542	-	11.164.903	301.357.594	204.024.645.371
99	**Kab. Lingga**	**206.238.851.742**	**56.139.751.083**	**129.276.576.249**	**18.817.116.563**	**-**	**32.728.838**	301.357.594	**204.567.530.327**
100	Provinsi Jambi	263.173.549.035	98.241.956.808	149.529.042.179	8.720.501.597	-	1.825.297.658	-	258.316.798.242
101	Kab. Batanghari	57.478.975.104	20.519.703.281	29.905.808.435	3.116.070.541	-	1.030.361.982	301.357.594	54.873.301.833
102	Kab. Bungo	63.733.671.764	19.648.391.361	29.905.808.435	8.722.547.131	-	1.602.277.213	301.357.594	60.180.381.734
103	Kab. Kerinci	52.354.358.352	19.648.391.361	29.905.808.435	1.548.105.440	-	364.283.092	301.357.594	51.767.945.922
104	Kab. Merangin	54.675.677.319	19.648.391.361	29.905.808.435	2.813.562.366	-	664.976.896	301.357.594	53.334.096.652
105	Kab. Muaro Jambi	61.595.029.158	25.525.376.239	30.681.876.973	1.880.793.570	-	2.213.515.194	301.357.594	60.602.919.570
106	Kab. Sarolangun	71.838.611.196	27.981.248.030	29.905.808.435	6.537.858.492	-	1.327.352.082	301.357.594	66.053.624.633
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	343.574.663.418	130.843.661.892	208.041.152.741	1.787.413.005	-	1.336.443.329	301.357.594	342.310.028.561
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.755.811.018	67.008.306.791	120.146.671.514	1.548.105.440	-	687.986.053	301.357.594	189.692.427.392
109	Kab. Tebo	63.956.836.032	19.648.391.361	29.905.808.435	2.884.249.160	-	4.103.020.080	301.357.594	56.842.826.630
110	Kota Jambi	55.559.221.365	22.847.574.189	29.905.808.435	1.548.105.440	-	364.340.625	301.357.594	54.967.186.283
111	**Kota Sungai Penuh**	**52.352.263.950**	**19.648.391.361**	**29.905.808.435**	**1.548.105.440**	**-**	**362.345.547**	301.357.594	**51.766.008.377**
112	Provinsi Sumatera Selatan	914.473.284.634	181.979.213.115	614.966.646.581	101.565.666.238	129.301.344	1.614.989.910	-	900.255.817.188
113	Kab. Lahat	210.747.595.366	30.831.250.103	104.929.287.783	63.689.645.104	77.904.059	273.511.879	301.357.594	200.102.956.522
114	Kab. Musi Banyuasin	1.308.247.658.433	230.009.721.981	1.043.819.076.796	30.142.533.353	18.471.620	2.776.708.542	301.357.594	1.307.067.869.886
115	Kab. Musi Rawas	301.687.844.753	54.080.356.940	223.792.244.809	16.679.487.442	18.471.620	434.026.579	301.357.594	295.305.944.984
116	Kab. Muara Enim	355.880.615.972	78.496.546.621	113.686.440.333	145.729.749.923	171.507.149	475.187.814	301.357.594	338.860.789.434
117	Kab. Ogan Komering Ilir	131.695.647.245	25.997.030.444	87.852.378.082	14.810.705.995	18.471.620	821.299.118	301.357.594	129.801.242.853
118	Kab. Ogan Komering Ulu	155.555.730.070	44.214.045.355	93.422.952.139	15.138.769.365	18.471.620	239.038.509	301.357.594	153.334.634.582
119	Kota Palembang	130.088.645.104	25.997.030.444	87.852.378.082	13.993.331.710	18.471.620	230.712.844	301.357.594	128.393.282.294
120	Kota Pagar Alam	130.116.308.203	25.997.030.444	87.852.378.082	13.993.331.710	46.134.719	230.712.844	301.357.594	128.420.945.393
121	Kota Lubuk Linggau	130.088.645.104	25.997.030.444	87.852.378.082	13.993.331.710	18.471.620	230.712.844	301.357.594	128.393.282.294
122	Kota Prabumulih	135.211.310.360	29.226.701.007	89.545.181.713	14.186.678.254	18.471.620	232.637.230	301.357.594	133.511.027.418
123	Kab. Empat Lawang	130.292.046.169	25.997.030.444	87.852.378.082	14.196.732.775	18.471.620	230.712.844	301.357.594	128.596.683.359
124	Kab. Banyuasin	166.022.801.616	46.115.189.569	87.852.378.082	17.610.272.872	18.471.620	5.358.861.923	301.357.594	157.256.531.660
125	Kab. Ogan Ilir	137.195.589.004	32.963.827.764	87.852.378.082	14.133.478.290	18.471.620	230.712.844	301.357.594	135.500.226.194
126	Kab. OKU Timur	130.394.490.139	25.997.030.444	87.852.378.082	14.289.492.295	18.471.620	230.712.844	301.357.594	128.689.442.879
127	**Kab. OKU Selatan**	**130.300.604.624**	**25.997.030.444**	**87.852.378.082**	**14.160.083.085**	**18.471.620**	**276.096.105**	301.357.594	**128.605.416.930**
128	Provinsi Bangka Belitung	92.758.686.972	5.975.207.918	-	77.357.666.355	-	55.220.328	-	83.388.094.601
129	Kab. Bangka	85.940.023.347	1.705.551.195	-	75.921.059.434	-	27.814.873	301.357.594	77.955.783.096
130	Kab. Belitung	42.200.640.614	1.705.551.195	-	30.765.496.628	-	28.675.931	301.357.594	32.801.081.348
131	Kota Pangkal Pinang	25.293.043.091	1.705.551.195	-	21.204.438.399	-	18.406.776	301.357.594	23.229.753.964
132	Kab. Bangka Selatan	37.579.970.882	1.705.551.195	-	29.522.024.060	-	18.406.776	301.357.594	31.547.339.625
133	Kab. Bangka Tengah	33.147.113.641	1.705.551.195	-	29.212.385.383	-	21.607.702	301.357.594	31.240.901.874
134	Kab. Bangka Barat	60.388.486.147	1.705.551.195	-	49.145.022.950	-	25.536.452	301.357.594	51.177.468.191
135	**Kab. Belitung Timur**	**37.216.820.183**	**1.705.551.195**	-	**27.604.541.534**	-	**296.944.824**	301.357.594	**29.908.395.147**
136	Provinsi Bengkulu	14.755.897.957	-	-	14.572.176.838	-	79.060.801	-	14.651.237.639
137	Kab. Bengkulu Selatan	3.484.045.422	-	-	3.162.823.636	-	17.632.646	301.357.594	3.481.813.876
138	Kab. Bengkulu Utara	18.254.056.424	-	-	17.553.021.545	-	339.334.728	301.357.594	18.193.713.867
139	Kab. Rejang Lebong	3.454.030.357	-	-	3.131.996.511	-	17.569.067	301.357.594	3.450.923.172
140	Kota Bengkulu	3.453.097.379	-	-	3.131.996.511	-	17.569.067	301.357.594	3.450.923.172
141	Kab. Kaur	3.622.133.326	-	-	3.294.840.031	-	23.649.704	301.357.594	3.619.847.329
142	Kab. Seluma	3.998.593.072	-	-	3.504.965.520	-	32.410.700	301.357.594	3.838.733.814

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
143	Kab. Mukomuko	3.563.400.672	-	-	3.220.412.531	-	41.586.287	301.357.594	3.563.356.412
144	Kab. Lebong	3.831.324.963	-	-	3.417.663.644	-	20.745.429	301.357.594	3.739.766.667
145	Kab. Bengkulu Tengah	15.420.692.454	-	-	14.684.378.876	-	19.743.274	301.357.594	15.005.479.744
146	**Kab. Kepahiang**	**3.460.663.608**	-	-	**3.131.996.511**	-	**23.023.073**	301.357.594	**3.456.377.178**
147	Provinsi Lampung	89.487.537.360	79.281.505.620	7.765.502.000	1.469.402.459	273.690.110	89.676.018	-	88.879.776.207
148	Kab. Lampung Barat	13.644.206.550	11.558.493.079	1.108.812.000	213.580.990	415.975.185	13.796.310	301.357.594	13.612.015.158
149	Kab. Lampung Selatan	13.420.681.797	11.558.493.079	1.108.812.000	213.960.250	173.511.206	13.796.310	301.357.594	13.369.930.439
150	Kab. Lampung Tengah	13.273.797.810	11.558.493.079	1.108.812.000	217.041.265	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.241.606.418
151	Kab. Lampung Utara	13.278.015.485	11.558.493.079	1.108.812.000	221.258.940	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.245.824.093
152	Kab. Lampung Timur	53.669.233.560	51.961.418.094	1.108.812.000	209.552.000	42.106.170	13.796.310	301.357.594	53.637.042.168
153	Kab. Tanggamus	16.299.207.900	11.558.493.079	1.108.812.000	2.950.156.589	42.106.170	13.796.310	301.357.594	15.974.721.742
154	Kab. Tulang Bawang	13.365.154.950	11.558.493.079	1.108.812.000	308.398.405	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.332.963.558
155	Kab. Way Kanan	13.493.668.744	11.558.493.079	1.108.812.000	283.019.769	42.106.170	59.964.038	301.357.594	13.353.752.650
156	Kab. Pesawaran	13.583.829.396	11.558.493.079	1.108.812.000	249.558.883	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.274.124.036
157	Kab. Pringsewu	13.270.096.490	11.558.493.079	1.108.812.000	213.339.945	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.237.905.098
158	Kab. Mesuji	15.094.426.807	11.558.493.079	1.108.812.000	382.593.365	42.106.170	133.184.308	301.357.594	13.526.546.516
159	Kab. Tulang Bawang Barat	13.266.308.545	11.558.493.079	1.108.812.000	209.552.000	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.234.117.153
160	Kota Bandar Lampung	13.266.308.545	11.558.493.079	1.108.812.000	209.552.000	42.106.170	13.796.310	301.357.594	13.234.117.153
161	**Kota Metro**	**13.266.308.545**	**11.558.493.079**	**1.108.812.000**	**209.552.000**	**42.106.170**	**13.796.310**	301.357.594	**13.234.117.153**
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**184.641.000.443**	**159.543.984.217**	**23.288.870.400**	-	-	-	1.808.145.826	**184.641.000.443**
163	Provinsi Jawa Barat	261.353.489.550	95.465.737.205	61.730.046.344	5.561.452.576	88.835.215.041	1.544.425.198	-	253.136.876.364
164	Kab. Bandung	131.548.128.810	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	106.786.978.452	124.882.087	301.357.594	119.866.593.648
165	Kab. Bekasi	45.545.297.570	21.082.142.590	15.894.362.790	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	44.918.533.106
166	Kab. Bogor	55.394.527.491	7.394.585.363	4.848.491.237	8.279.146.316	30.077.035.100	165.273.831	301.357.594	51.065.889.441
167	Kab. Ciamis	22.604.540.115	7.394.585.363	4.848.491.237	635.791.044	7.106.817.202	1.242.321.950	301.357.594	21.529.364.390
168	Kab. Cianjur	22.836.075.737	7.394.585.363	4.848.491.237	829.734.563	7.106.817.202	793.513.629	301.357.594	21.274.499.588
169	Kab. Cirebon	20.824.813.784	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	133.508.041	301.357.594	20.195.058.352
170	Kab. Garut	52.993.714.810	7.394.585.363	4.848.491.237	1.078.020.611	36.520.592.017	139.172.914	301.357.594	50.282.219.736
171	Kab. Indramayu	43.888.505.049	20.104.772.430	14.904.567.157	410.298.915	7.106.817.202	374.796.345	301.357.594	43.202.609.643
172	Kab. Karawang	46.694.865.327	14.616.370.499	23.504.288.505	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	46.062.686.730
173	Kab. Kuningan	20.859.333.426	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	167.515.979	301.357.594	20.229.066.290
174	Kab. Majalengka	22.329.088.357	8.354.098.615	5.377.388.922	410.298.915	7.106.817.202	148.462.544	301.357.594	21.698.423.792
175	Kab. Purwakarta	21.085.694.806	7.394.585.363	4.848.491.237	410.759.585	7.169.358.739	369.504.678	301.357.594	20.494.057.196
176	Kab. Subang	44.640.654.760	8.256.219.123	27.659.377.762	410.298.915	7.241.931.121	132.848.291	301.357.594	44.002.032.806
177	Kab. Sukabumi	38.035.990.649	7.394.585.363	4.848.491.237	465.972.625	24.328.321.715	163.883.408	301.357.594	37.502.611.942
178	Kab. Sumedang	21.167.349.212	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.291.914.738	285.803.696	301.357.594	20.532.451.543
179	Kab. Tasikmalaya	22.380.899.104	7.394.585.363	4.848.491.237	1.919.302.886	7.106.817.202	180.399.638	301.357.594	21.750.953.920
180	Kab. Bandung Barat	21.014.366.451	7.394.585.363	4.848.491.237	419.264.035	7.186.577.967	227.420.555	301.357.594	20.377.696.751
181	Kota Bandung	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
182	Kota Bekasi	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
183	Kota Bogor	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
184	Kota Cirebon	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
185	Kota Depok	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
186	Kota Sukabumi	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
187	Kota Cimahi	20.811.868.790	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	123.554.015	301.357.594	20.185.104.326
188	Kota Tasikmalaya	20.816.229.938	7.394.585.363	4.848.491.237	410.298.915	7.106.817.202	126.854.707	301.357.594	20.188.405.018
189	**Kota Banjar**	**21.006.181.167**	**7.394.585.363**	**4.848.491.237**	**410.298.915**	**7.106.817.202**	**270.617.438**	301.357.594	**20.332.167.749**
190	Provinsi Banten	3.115.772.969	-	-	2.377.887.373	124.039.680	183.969.570	-	2.685.896.623
191	Kab. Lebak	1.810.634.957	-	-	1.215.010.697	35.439.908	77.595.396	301.357.594	1.629.403.595

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
192	Kab. Pandeglang	6.144.827.955	-	-	4.521.769.841	142.759.038	342.906.476	301.357.594	5.308.792.949
193	Kab. Serang	1.241.725.717	-	-	623.170.749	140.760.228	52.562.734	301.357.594	1.117.851.305
194	Kab. Tangerang	1.135.352.798	-	-	623.170.749	35.439.908	52.562.734	301.357.594	1.012.530.985
195	Kota Cilegon	1.135.352.798	-	-	623.170.749	35.439.908	52.562.734	301.357.594	1.012.530.985
196	Kota Tangerang	1.135.352.798	-	-	623.170.749	35.439.908	52.562.734	301.357.594	1.012.530.985
197	Kota Serang	1.135.352.798	-	-	623.170.749	35.439.908	52.562.734	301.357.594	1.012.530.985
198	**Kota Tangerang Selatan**	**1.183.242.164**	-	-	**671.060.115**	**35.439.908**	**52.562.734**	301.357.594	**1.060.420.351**
199	Provinsi Jawa Tengah	8.842.509.630	709.764.780	423.878.217	1.149.400.399	90.259.545	5.040.663.214	-	7.413.966.155
200	Kab. Banjarnegara	886.356.263	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	311.378.639	301.357.594	750.959.504
201	Kab. Banyumas	1.045.465.884	41.750.869	24.934.012	102.279.845	123.172.954	351.505.387	301.357.594	945.000.661
202	Kab. Batang	1.623.154.459	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	983.068.383	301.357.594	1.422.649.248
203	Kab. Blora	7.912.043.010	1.419.529.560	42.160.219	66.229.005	5.309.385	5.195.291.704	301.357.594	7.029.877.467
204	Kab. Boyolali	1.028.985.161	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	478.788.058	301.357.594	918.368.923
205	Kab. Brebes	1.315.886.789	41.750.869	24.934.012	66.229.005	22.266.782	604.624.459	301.357.594	1.061.162.721
206	Kab. Cilacap	3.322.371.701	41.750.869	24.934.012	2.272.596.034	5.309.385	546.106.063	301.357.594	3.192.053.957
207	Kab. Demak	818.526.941	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	297.279.921	301.357.594	736.860.786
208	Kab. Grobogan	1.755.525.860	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	940.693.995	301.357.594	1.380.274.860
209	Kab. Jepara	935.663.409	41.750.869	24.934.012	84.102.970	5.309.385	374.401.832	301.357.594	831.856.662
210	Kab. Karanganyar	818.395.364	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	297.303.560	301.357.594	736.884.425
211	Kab. Kebumen	846.217.065	41.750.869	24.934.012	69.691.870	5.309.385	319.248.416	301.357.594	762.292.146
212	Kab. Kendal	1.643.625.215	41.750.869	24.934.012	66.229.005	11.911.716	658.425.797	301.357.594	1.104.608.993
213	Kab. Klaten	818.689.728	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
214	Kab. Kudus	822.329.397	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	313.290.295	301.357.594	752.871.160
215	Kab. Magelang	838.877.937	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	297.060.987	301.357.594	736.641.852
216	Kab. Pati	1.181.035.532	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	589.267.177	301.357.594	1.028.848.042
217	Kab. Pekalongan	852.418.148	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	322.070.603	301.357.594	761.651.468
218	Kab. Pemalang	1.551.478.469	41.750.869	24.934.012	66.229.005	19.711.622	820.375.519	301.357.594	1.274.358.621
219	Kab. Purbalingga	845.589.260	41.750.869	24.934.012	66.229.005	24.109.386	299.136.997	301.357.594	757.517.863
220	Kab. Purworejo	836.554.096	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	313.317.211	301.357.594	752.898.076
221	Kab. Rembang	1.906.040.706	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	1.100.938.268	301.357.594	1.540.519.133
222	Kab. Semarang	834.056.846	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	318.223.202	301.357.594	757.804.067
223	Kab. Sragen	825.201.499	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	303.945.616	301.357.594	743.526.481
224	Kab. Sukoharjo	817.543.272	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
225	Kab. Tegal	1.332.442.651	41.750.869	24.934.012	66.229.005	25.035.936	649.789.205	301.357.594	1.109.096.621
226	Kab. Temanggung	917.003.515	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	445.389.541	301.357.594	884.970.406
227	Kab. Wonogiri	1.075.938.304	41.750.869	24.934.012	137.290.879	5.309.385	325.374.036	301.357.594	836.016.775
228	Kab. Wonosobo	850.492.468	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	314.053.911	301.357.594	753.634.776
229	Kota Magelang	817.543.272	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
230	Kota Pekalongan	817.543.272	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
231	Kota Salatiga	817.543.272	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
232	Kota Semarang	1.644.059.710	41.750.869	830.530.227	66.229.005	5.309.385	316.736.855	301.357.594	1.561.913.935
233	Kota Surakarta	817.543.272	41.750.869	24.934.012	66.229.005	5.309.385	296.509.600	301.357.594	736.090.465
234	**Kota Tegal**	**817.543.272**	**41.750.869**	**24.934.012**	**66.229.005**	**5.309.385**	**296.509.600**	301.357.594	**736.090.465**
235	Provinsi DI Yogyakarta	11.691.828	-	-	4.643.264	-	653.876	-	5.297.140
236	Kab. Bantul	301.869.089	-	-	-	-	511.495	301.357.594	301.869.089
237	Kab. Gunung Kidul	302.475.399	-	-	-	-	1.117.805	301.357.594	302.475.399
238	Kab. Kulon Progo	345.841.731	-	-	18.573.058	-	332.329	301.357.594	320.262.981
239	Kab. Sleman	301.684.532	-	-	-	-	326.938	301.357.594	301.684.532
240	**Kota Yogyakarta**	**301.684.532**	-	-	-	-	**326.938**	301.357.594	**301.684.532**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
241	Provinsi Jawa Timur	194.949.876.084	157.462.644.731	20.710.211.868	438.127.373	125.218.174	5.242.044.870	-	183.978.247.016
242	Kab. Bangkalan	24.060.138.058	19.414.985.436	3.993.821.276	14.059.138	6.768.550	294.524.888	301.357.594	24.025.516.882
243	Kab. Banyuwangi	13.903.626.157	8.506.032.678	1.621.711.330	154.278.412	103.114.978	2.706.278.316	301.357.594	13.392.773.308
244	Kab. Blitar	11.275.447.635	8.506.032.678	1.621.711.330	167.966.376	6.768.550	609.662.861	301.357.594	11.213.499.389
245	Kab. Bojonegoro	294.799.322.353	290.397.423.518	2.859.025.794	14.059.138	6.768.550	1.086.727.954	301.357.594	294.665.362.548
246	Kab. Bondowoso	10.904.437.436	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	54.666.156	374.505.897	301.357.594	10.872.332.793
247	Kab. Gresik	16.675.564.972	12.603.291.200	3.403.763.787	14.059.138	6.768.550	310.371.477	301.357.594	16.639.611.746
248	Kab. Jember	11.798.273.887	8.506.032.678	1.621.711.330	42.497.939	6.768.550	1.165.535.864	301.357.594	11.643.903.955
249	Kab. Jombang	10.937.769.354	8.506.032.678	1.621.711.330	27.033.331	6.768.550	416.539.094	301.357.594	10.879.442.577
250	Kab. Kediri	11.171.062.431	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	629.334.334	301.357.594	11.079.263.624
251	Kab. Lamongan	11.195.093.129	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	732.094.940	301.357.594	11.182.024.230
252	Kab. Lumajang	11.721.234.784	8.506.032.678	1.621.711.330	391.404.640	6.768.550	435.839.695	301.357.594	11.263.114.487
253	Kab. Madiun	12.238.047.129	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	39.990.746	1.333.118.161	301.357.594	11.816.269.647
254	Kab. Magetan	10.783.647.939	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	286.141.084	301.357.594	10.736.070.374
255	Kab. Malang	11.103.631.949	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	643.622.615	301.357.594	11.093.551.905
256	Kab. Mojokerto	10.831.386.001	8.506.032.678	1.621.711.330	15.094.883	6.768.550	302.122.257	301.357.594	10.753.087.292
257	Kab. Nganjuk	11.147.880.193	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	639.275.483	301.357.594	11.089.204.773
258	Kab. Ngawi	11.579.445.538	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	1.120.342.344	301.357.594	11.570.271.634
259	Kab. Pacitan	10.847.629.353	8.506.032.678	1.621.711.330	55.485.136	6.768.550	284.257.697	301.357.594	10.775.612.985
260	Kab. Pamekasan	10.768.469.393	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.405.149	301.357.594	10.733.334.439
261	Kab. Pasuruan	10.783.183.751	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	302.423.518	301.357.594	10.752.352.808
262	Kab. Ponorogo	11.087.237.074	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	72.157.800	539.845.748	301.357.594	11.055.164.288
263	Kab. Probolinggo	10.856.275.667	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	387.567.706	301.357.594	10.837.496.996
264	Kab. Sampang	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
265	Kab. Sidoarjo	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
266	Kab. Situbondo	10.835.721.547	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	7.580.864	349.698.082	301.357.594	10.800.439.686
267	Kab. Sumenep	11.076.038.417	8.536.739.064	1.763.416.123	14.059.138	6.768.550	409.159.297	301.357.594	11.031.499.766
268	Kab. Trenggalek	11.777.456.354	8.506.032.678	1.621.711.330	410.769.314	6.768.550	329.273.787	301.357.594	11.175.913.253
269	Kab. Tuban	18.443.231.923	14.760.477.418	1.621.711.330	46.956.218	6.768.550	1.424.383.085	301.357.594	18.161.654.195
270	Kab. Tulungagung	10.918.261.455	8.506.032.678	1.621.711.330	19.435.632	6.768.550	454.235.051	301.357.594	10.909.540.835
271	Kota Blitar	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
272	Kota Kediri	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
273	Kota Madiun	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
274	Kota Malang	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
275	Kota Mojokerto	10.769.253.268	8.506.032.678	1.621.711.330	14.848.171	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.734.072.099
276	Kota Pasuruan	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
277	Kota Probolinggo	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
278	Kota Surabaya	10.768.464.235	8.506.032.678	1.621.711.330	14.059.138	6.768.550	283.353.776	301.357.594	10.733.283.066
279	**Kota Batu**	**10.769.884.678**	**8.506.032.678**	**1.621.711.330**	**14.059.138**	**6.768.550**	**284.355.314**	301.357.594	**10.734.284.604**
280	Provinsi Kalimantan Barat	29.363.264.826	-	-	20.120.863.872	-	3.445.279.421	-	23.566.143.293
281	Kab. Bengkayang	4.103.192.708	-	-	2.478.022.457	-	518.616.212	301.357.594	3.297.996.263
282	Kab. Landak	9.358.216.299	-	-	6.453.635.718	-	932.072.189	301.357.594	7.687.065.501
283	Kab. Kapuas Hulu	9.679.818.496	-	-	3.345.718.194	-	3.951.752.195	301.357.594	7.598.827.983
284	Kab. Ketapang	66.430.533.239	-	-	33.736.859.529	-	18.391.830.847	301.357.594	52.430.047.970
285	Kab. Pontianak	4.817.711.867	-	-	2.408.756.720	-	658.762.154	301.357.594	3.368.876.468
286	Kab. Sambas	3.941.321.573	-	-	2.394.241.024	-	530.109.236	301.357.594	3.225.707.854
287	Kab. Sanggau	13.061.619.850	-	-	9.728.450.120	-	1.049.771.413	301.357.594	11.079.579.127
288	Kab. Sintang	10.768.148.648	-	-	2.839.816.819	-	6.921.812.882	301.357.594	10.062.987.295
289	Kota Pontianak	3.852.443.061	-	-	2.488.697.694	-	518.616.212	301.357.594	3.308.671.500

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
290	Kota Singkawang	3.729.624.176	-	-	2.365.878.809	-	518.616.212	301.357.594	3.185.852.615
291	Kab. Kayong Utara	5.611.015.578	-	-	3.415.041.137	-	518.616.212	301.357.594	4.235.014.943
292	Kab. Kubu Raya	15.927.635.458	-	-	2.516.732.134	-	11.636.010.093	301.357.594	14.454.099.821
293	Kab. Sekadau	3.875.958.904	-	-	2.475.605.645	-	528.411.815	301.357.594	3.305.375.054
294	**Kab. Melawi**	**9.841.247.898**	-	-	**3.231.857.069**	-	**5.681.936.244**	301.357.594	**9.215.150.907**
295	Provinsi Kalimantan Tengah	137.321.738.573	-	-	105.198.611.224	-	21.255.502.523	-	126.454.113.747
296	Kab. Barito Selatan	26.455.465.661	-	-	17.759.501.440	-	3.384.832.676	301.357.594	21.445.691.710
297	Kab. Barito Utara	80.005.338.825	-	-	45.713.751.937	-	26.667.512.051	301.357.594	72.682.621.582
298	Kab. Kapuas	58.610.448.644	-	-	45.897.148.782	-	11.429.269.457	301.357.594	57.627.775.833
299	Kab. Kotawaringin Barat	23.585.071.522	-	-	15.404.055.737	-	5.792.157.536	301.357.594	21.497.570.867
300	Kab. Kotawaringin Timur	43.986.852.062	-	-	26.872.133.908	-	6.129.038.827	301.357.594	33.302.530.329
301	Kota Palangkaraya	19.165.209.193	-	-	15.205.747.166	-	2.740.563.957	301.357.594	18.247.668.717
302	Kab. Barito Timur	38.881.080.975	-	-	32.087.108.331	-	2.980.396.960	301.357.594	35.368.862.885
303	Kab. Murung Raya	157.193.158.982	-	-	122.547.692.538	-	29.334.591.727	301.357.594	152.183.641.859
304	Kab. Pulang Pisau	19.171.665.221	-	-	15.159.953.741	-	2.748.971.475	301.357.594	18.210.282.810
305	Kab. Gunung Mas	32.858.554.636	-	-	15.960.818.718	-	14.420.842.683	301.357.594	30.683.018.995
306	Kab. Lamandau	32.759.075.337	-	-	17.507.672.873	-	10.369.504.075	301.357.594	28.178.534.542
307	Kab. Sukamara	21.139.953.707	-	-	15.806.757.676	-	3.772.015.387	301.357.594	19.880.130.657
308	Kab. Katingan	50.628.533.560	-	-	18.359.013.626	-	25.451.277.577	301.357.594	44.111.648.797
309	**Kab. Seruyan**	**70.762.302.121**	-	-	**15.438.818.997**	-	**51.608.231.977**	301.357.594	**67.348.408.568**
310	Provinsi Kalimantan Selatan	558.431.146.533	5.751.444.229	-	488.780.589.594	-	393.230.497	-	494.925.264.320
311	Kab. Banjar	162.959.662.039	958.574.038	-	130.688.573.653	-	143.514.177	301.357.594	132.092.019.462
312	Kab. Barito Kuala	92.588.592.826	958.574.038	-	81.138.935.904	-	118.562.180	301.357.594	82.517.429.716
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	111.874.141.881	958.574.038	-	96.566.744.244	-	64.378.330	301.357.594	97.891.054.206
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	92.702.342.218	958.574.038	-	81.180.347.721	-	64.378.330	301.357.594	82.504.657.683
315	Kab. Hulu Sungai Utara	92.532.158.059	958.574.038	-	81.138.935.904	-	64.378.330	301.357.594	82.463.245.866
316	Kab. Kotabaru	182.669.138.942	958.574.038	-	167.951.584.717	-	156.081.703	301.357.594	169.367.598.052
317	Kab. Tabalong	309.788.386.740	10.793.374.409	-	271.324.821.897	-	1.374.701.403	301.357.594	283.794.255.303
318	Kab. Tanah Laut	313.193.311.978	958.574.038	-	274.740.212.692	-	131.263.987	301.357.594	276.131.408.311
319	Kab. Tapin	173.067.688.404	958.574.038	-	155.923.570.195	-	64.378.330	301.357.594	157.247.880.157
320	Kota Banjarbaru	96.138.668.653	958.574.038	-	81.159.448.284	-	64.378.330	301.357.594	82.483.758.246
321	Kota Banjarmasin	92.548.883.088	958.574.038	-	81.138.935.904	-	76.615.500	301.357.594	82.475.483.036
322	Kab. Balangan	265.819.576.698	2.678.460.809	-	244.311.588.152	-	66.201.581	301.357.594	247.357.608.136
323	**Kab. Tanah Bumbu**	**255.418.895.799**	**958.574.038**	-	**207.879.171.469**	-	**846.581.820**	301.357.594	**209.985.684.921**
324	Provinsi Kalimantan Timur	3.486.786.377.639	574.422.721.045	1.687.132.351.164	1.185.690.577.022	-	20.756.496.304	-	3.468.002.145.535
325	Kab. Berau	728.530.870.805	84.872.535.477	249.615.756.388	339.062.934.274	-	36.466.985.414	301.357.594	710.319.569.147
326	Kab. Bulungan	571.866.504.795	99.931.231.768	250.480.103.186	195.209.191.439	-	23.264.225.182	301.357.594	569.186.109.169
327	Kab. Kutai Kartanegara	2.845.335.879.954	479.799.533.635	1.674.595.854.185	665.387.467.478	-	8.798.190.390	301.357.594	2.828.882.403.282
328	Kab. Kutai Barat	808.468.463.267	84.872.535.477	249.615.756.388	406.236.979.125	-	41.328.123.659	301.357.594	782.354.752.243
329	Kab. Kutai Timur	1.564.522.491.302	88.133.804.051	249.615.756.388	1.123.275.909.013	-	25.586.111.826	301.357.594	1.486.912.938.872
330	Kab. Malinau	560.090.478.312	84.872.535.477	249.615.756.388	203.235.288.498	-	15.782.358.961	301.357.594	553.807.296.918
331	Kab. Nunukan	577.640.957.460	89.031.633.732	249.615.756.388	210.644.648.493	-	23.283.895.010	301.357.594	572.877.291.217
332	Kab. Pasir	739.416.569.233	84.872.535.477	249.615.756.388	387.740.265.159	-	9.146.014.152	301.357.594	731.675.928.770
333	Kota Balikpapan	520.077.361.607	84.872.535.477	249.615.756.388	181.077.887.775	-	2.962.825.805	301.357.594	518.830.363.039
334	Kota Bontang	543.305.035.924	93.328.404.113	264.464.608.330	181.072.581.439	-	2.950.445.413	301.357.594	542.117.396.889
335	Kab. Tana Tidung	537.738.065.905	84.985.737.262	249.615.756.388	185.601.200.549	-	11.957.726.229	301.357.594	532.461.778.022
336	Kota Samarinda	568.918.831.975	88.824.128.025	250.723.239.019	223.621.266.989	-	2.950.445.413	301.357.594	566.420.437.040
337	Kota Tarakan	538.905.880.844	103.757.611.834	249.640.959.670	181.067.867.298	-	2.950.445.413	301.357.594	537.718.241.809
338	**Kab. Penajam Paser Utara**	**572.346.424.310**	**115.802.647.660**	**262.668.947.944**	**185.088.065.421**	-	**3.819.648.118**	301.357.594	**567.680.666.737**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
339	Provinsi Sulawesi Utara	5.802.936.630	-	-	5.322.866.362	-	56.874.880	-	5.379.741.242
340	Kab. Bolaang Mongondow	1.938.079.796	-	-	1.310.973.610	-	16.562.376	301.357.594	1.628.893.580
341	Kab. Minahasa	993.502.540	-	-	678.343.096	-	8.124.982	301.357.594	987.825.672
342	Kab. Sangihe	1.002.032.460	-	-	686.873.016	-	8.124.982	301.357.594	996.355.592
343	Kota Bitung	2.189.909.724	-	-	1.874.395.895	-	8.124.982	301.357.594	2.183.878.471
344	Kota Manado	993.818.809	-	-	678.463.750	-	8.124.982	301.357.594	987.946.326
345	Kab. Kepulauan Talaud	1.075.004.205	-	-	759.844.761	-	8.124.982	301.357.594	1.069.327.337
346	Kab. Minahasa Selatan	1.425.150.908	-	-	760.966.493	-	23.799.560	301.357.594	1.086.123.647
347	Kab. Minahasa Tenggara	1.041.278.590	-	-	726.119.146	-	8.124.982	301.357.594	1.035.601.722
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	993.502.540	-	-	678.343.096	-	8.124.982	301.357.594	987.825.672
349	Kota Kotamubagu	993.502.540	-	-	678.343.096	-	8.124.982	301.357.594	987.825.672
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.095.409.995	-	-	1.964.640.101	-	11.357.015	301.357.594	2.277.354.710
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.574.081.391	-	-	1.210.670.746	-	18.431.348	301.357.594	1.530.459.688
352	Kota Tomohon	993.502.540	-	-	678.343.096	-	8.124.982	301.357.594	987.825.672
353	Kab. Minahasa Utara	8.171.934.606	-	-	7.804.873.137	-	8.124.982	301.357.594	8.114.355.713
354	**Kab. Bolaang Mongondow Utara**	**1.871.462.103**	**-**	**-**	**841.992.120**	**-**	**427.018.798**	301.357.594	**1.570.368.512**
355	Provinsi Gorontalo	633.850.643	-	-	178.003.927	-	156.454.038	-	334.457.965
356	Kab. Boalemo	428.209.595	-	-	8.461.670	-	93.090.507	301.357.594	402.909.771
357	Kab. Gorontalo	760.060.164	-	-	133.666.400	-	73.838.925	301.357.594	508.862.919
358	Kota Gorontalo	363.996.130	-	-	-	-	62.581.615	301.357.594	363.939.209
359	Kab. Pohuwato	1.640.819.751	-	-	148.043.433	-	653.247.264	301.357.594	1.102.648.291
360	Kab. Gorontalo Utara	1.030.130.458	-	-	365.063.065	-	94.583.581	301.357.594	761.004.240
361	**Kab. Bone Bolango**	**622.492.875**	**-**	**-**	**192.654.083**	**-**	**97.930.529**	301.357.594	**591.942.206**
362	Provinsi Sulawesi Tengah	19.971.186.489	-	-	17.285.267.168	-	927.657.581	-	18.212.924.749
363	Kab. Banggai	8.004.523.325	-	-	5.632.411.202	-	523.750.871	301.357.594	6.457.519.667
364	Kab. Banggai Kepulauan	3.721.740.370	-	-	3.129.048.295	-	185.531.516	301.357.594	3.615.937.405
365	Kab. Buol	5.936.499.538	-	-	4.118.291.819	-	1.060.078.492	301.357.594	5.479.727.905
366	Kab. Toli-Toli	4.751.504.805	-	-	3.408.115.685	-	495.468.815	301.357.594	4.204.942.094
367	Kab. Donggala	5.129.621.424	-	-	3.911.100.155	-	255.192.987	301.357.594	4.467.650.736
368	Kab. Morowali	35.675.756.985	-	-	31.956.969.139	-	601.446.363	301.357.594	32.859.773.096
369	Kab. Poso	6.225.420.179	-	-	3.374.783.330	-	1.780.066.929	301.357.594	5.456.207.853
370	Kota Palu	3.754.632.918	-	-	3.159.801.185	-	187.087.300	301.357.594	3.648.246.079
371	Kab. Parigi Moutong	4.732.337.593	-	-	3.339.311.950	-	366.733.042	301.357.594	4.007.402.586
372	Kab. Sigi	3.777.307.334	-	-	3.149.616.115	-	210.677.767	301.357.594	3.661.651.476
373	**Kab. Tojo Una Una**	**5.321.601.082**	**-**	**-**	**4.472.907.690**	**-**	**306.423.524**	301.357.594	**5.080.688.808**
374	Provinsi Sulawesi Selatan	12.798.420.184	-	282.745.435	11.304.242.700	-	25.025.299	-	11.612.013.434
375	Kab. Bantaeng	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
376	Kab. Barru	1.339.109.311	-	24.586.559	932.877.610	-	2.176.113	301.357.594	1.260.997.876
377	Kab. Bone	1.665.907.843	-	24.586.559	1.275.040.477	-	2.176.113	301.357.594	1.603.160.743
378	Kab. Bulukumba	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
379	Kab. Enrekang	1.344.737.634	-	24.586.559	936.339.985	-	3.021.820	301.357.594	1.265.305.958
380	Kab. Gowa	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
381	Kab. Jeneponto	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
382	Kab. Luwu	1.528.871.253	-	24.586.559	1.119.706.021	-	3.906.220	301.357.594	1.449.556.394
383	Kab. Luwu Utara	1.799.352.502	-	24.586.559	1.195.538.120	-	3.065.356	301.357.594	1.524.547.629
384	Kab. Maros	1.341.510.172	-	24.586.559	928.620.315	-	2.176.113	301.357.594	1.256.740.581
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.437.813.330	-	24.586.559	929.642.168	-	5.260.037	301.357.594	1.260.846.358
386	Kab. Pinrang	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
387	Kab. Selayar	1.454.415.061	-	24.586.559	1.048.183.360	-	2.176.113	301.357.594	1.376.303.626

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
388	Kab. Sidenreng Rappang	1.333.226.409	-	24.586.559	923.551.230	-	2.176.113	301.357.594	1.251.671.496
389	Kab. Sinjai	1.400.732.026	-	24.586.559	994.500.325	-	2.176.113	301.357.594	1.322.620.591
390	Kab. Soppeng	1.319.394.966	-	24.586.559	913.163.265	-	2.176.113	301.357.594	1.241.283.531
391	Kab. Takalar	1.332.523.886	-	24.586.559	926.292.185	-	2.176.113	301.357.594	1.254.412.451
392	Kab. Tana Toraja	1.425.972.184	-	24.586.559	983.666.245	-	3.030.487	301.357.594	1.312.640.885
393	Kab. Wajo	1.860.708.848	-	565.490.871	913.572.835	-	2.176.113	301.357.594	1.782.597.413
394	Kota Pare-pare	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
395	Kab. Toraja Utara	1.459.903.456	-	24.586.559	1.043.998.976	-	2.176.113	301.357.594	1.372.119.242
396	Kota Makassar	1.319.053.786	-	24.586.559	912.822.085	-	2.176.113	301.357.594	1.240.942.351
397	Kota Palopo	1.517.190.957	-	24.586.559	1.110.959.256	-	2.176.113	301.357.594	1.439.079.522
398	**Kab. Luwu Timur**	**26.123.205.398**	**-**	**24.586.559**	**22.105.600.838**	**-**	**263.774.447**	301.357.594	**22.695.319.438**
399	Provinsi Sulawesi Barat	319.879.010	-	-	241.387.755	-	64.988.102	-	306.375.857
400	Kab. Majene	347.609.696	-	-	7.006.475	-	32.494.051	301.357.594	340.858.120
401	Kab. Mamuju	1.881.229.248	-	-	857.734.605	-	558.441.917	301.357.594	1.717.534.116
402	Kab. Polewali Mandar	365.431.036	-	-	21.742.735	-	33.214.051	301.357.594	356.314.380
403	Kab. Mamasa	391.461.746	-	-	44.947.560	-	38.350.782	301.357.594	384.655.936
404	**Kab. Mamuju Utara**	**377.407.265**	**-**	**-**	**34.119.680**	**-**	**32.796.887**	301.357.594	**368.274.161**
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	41.725.812.879	-	-	40.621.815.335	-	121.862.905	-	40.743.678.240
406	Kab. Buton	9.159.564.423	-	-	8.754.501.412	-	76.187.058	301.357.594	9.132.046.064
407	Kab. Konawe	11.247.713.010	-	-	9.135.955.211	-	336.061.912	301.357.594	9.773.374.717
408	Kab. Kolaka	41.718.068.303	-	-	40.778.006.673	-	378.840.367	301.357.594	41.458.204.634
409	Kab. Muna	7.612.739.450	-	-	7.033.513.524	-	86.548.533	301.357.594	7.421.419.651
410	Kota Kendari	7.351.890.802	-	-	7.016.354.739	-	24.228.806	301.357.594	7.341.941.139
411	Kota Bau-bau	7.471.111.188	-	-	7.061.210.485	-	27.437.303	301.357.594	7.390.005.382
412	Kab. Konawe Selatan	21.228.034.199	-	-	20.489.725.431	-	75.505.494	301.357.594	20.866.588.519
413	Kab. Bombana	13.511.286.703	-	-	12.180.352.654	-	32.834.314	301.357.594	12.514.544.562
414	Kab. Konawe Utara	22.891.041.763	-	-	21.843.753.704	-	138.664.576	301.357.594	22.283.775.874
415	Kab. Buton Utara	7.690.373.500	-	-	7.059.042.209	-	103.207.885	301.357.594	7.463.607.688
416	Kab. Wakatobi	7.348.586.707	-	-	7.016.354.739	-	22.156.891	301.357.594	7.339.869.224
417	**Kab. Kolaka Utara**	**14.538.541.213**	**-**	**-**	**13.858.791.980**	**-**	**54.519.881**	301.357.594	**14.214.669.455**
418	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
419	Kab. Badung	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
420	Kab. Bangli	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
421	Kab. Buleleng	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
422	Kab. Gianyar	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
423	Kab. Jembrana	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
424	Kab. Karangasem	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
425	Kab. Klungkung	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
426	Kab. Tabanan	301.357.594	-	-	-	-	-	301.357.594	301.357.594
427	**Kota Denpasar**	**301.357.594**	**-**	**-**	-	-	-	301.357.594	**301.357.594**
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	22.814.681.470	-	-	9.104.514.726	22.986.624	270.082.440	-	9.397.583.790
429	Kab. Bima	6.095.494.972	-	-	2.201.897.818	5.108.138	434.551.786	301.357.594	2.942.915.336
430	Kab. Dompu	5.711.101.639	-	-	1.964.107.868	45.973.248	423.335.475	301.357.594	2.734.774.185
431	Kab. Lombok Barat	5.279.675.994	-	-	1.954.802.745	5.108.138	14.833.260	301.357.594	2.276.101.737
432	Kab. Lombok Tengah	5.127.847.715	-	-	1.821.328.095	5.108.138	51.715.992	301.357.594	2.179.509.819
433	Kab. Lombok Timur	5.095.113.316	-	-	1.825.870.402	5.108.138	14.187.920	301.357.594	2.146.524.054
434	Kab. Sumbawa	7.249.189.887	-	-	3.865.806.412	5.108.138	90.908.207	301.357.594	4.263.180.351
435	Kota Mataram	5.090.571.009	-	-	1.821.328.095	5.108.138	14.187.920	301.357.594	2.141.981.747
436	Kab. Lombok Utara	5.090.571.009	-	-	1.821.328.095	5.108.138	14.187.920	301.357.594	2.141.981.747

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
437	Kota Bima	5.090.571.009	-	-	1.821.328.095	5.108.138	14.187.920	301.357.594	2.141.981.747
438	**Kab. Sumbawa Barat**	**44.910.100.176**	**-**	**-**	**17.320.261.281**	**5.108.138**	**451.633.353**	301.357.594	**18.078.360.366**
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.047.273.463	-	-	438.279.196	87.815.808	45.308.295	-	571.403.299
440	Kab. Alor	580.081.035	-	-	44.970.104	8.781.580	29.634.701	301.357.594	384.743.979
441	Kab. Belu	1.099.952.102	-	-	425.095.264	8.781.580	4.530.829	301.357.594	739.765.267
442	Kab. Ende	556.407.076	-	-	86.728.849	105.064.704	38.300.766	301.357.594	531.451.913
443	Kab. Flores Timur	342.688.144	-	-	13.912.679	8.781.580	4.530.829	301.357.594	328.582.682
444	Kab. Kupang	440.929.193	-	-	112.153.728	8.781.580	4.530.829	301.357.594	426.823.731
445	Kab. Lembata	804.054.049	-	-	13.912.679	79.348.492	4.530.829	301.357.594	399.149.594
446	Kab. Manggarai	419.522.564	-	-	48.432.549	8.781.580	4.530.829	301.357.594	363.102.552
447	Kab. Ngada	381.127.874	-	-	52.352.409	8.781.580	4.530.829	301.357.594	367.022.412
448	Kab. Sikka	378.642.829	-	-	13.912.679	8.781.580	31.742.781	301.357.594	355.794.634
449	Kab. Sumba Barat	390.029.179	-	-	61.253.714	8.781.580	4.530.829	301.357.594	375.923.717
450	Kab. Sumba Timur	427.086.549	-	-	98.311.084	8.781.580	4.530.829	301.357.594	412.981.087
451	Kab. Timor Tengah Selatan	662.369.233	-	-	226.217.756	8.781.580	4.530.829	301.357.594	540.887.759
452	Kab. Timor Tengah Utara	1.238.223.083	-	-	567.881.704	8.781.580	4.530.829	301.357.594	882.551.707
453	Kota Kupang	342.688.144	-	-	13.912.679	8.781.580	4.530.829	301.357.594	328.582.682
454	Kab. Rote Ndao	369.046.259	-	-	40.270.794	8.781.580	4.530.829	301.357.594	354.940.797
455	Kab. Nagekeo	460.422.159	-	-	131.646.694	8.781.580	4.530.829	301.357.594	446.316.697
456	Kab. Sumba Tengah	412.343.464	-	-	83.567.999	8.781.580	4.530.829	301.357.594	398.238.002
457	Kab. Sumba Barat Daya	421.743.414	-	-	92.967.949	8.781.580	4.530.829	301.357.594	407.637.952
458	Kab. Manggarai Timur	609.176.947	-	-	36.185.839	8.781.580	4.530.829	301.357.594	350.855.842
459	Kab. Sabu Raijua	351.872.144	-	-	20.736.594	8.781.580	4.530.829	301.357.594	335.406.597
460	**Kab. Manggarai Barat**	**383.886.325**	**-**	**-**	**13.912.679**	**8.781.580**	**4.530.829**	301.357.594	**328.582.682**
461	Provinsi Maluku	2.737.594.865	99.862.056	-	229.288.220	-	1.971.633.973	-	2.300.784.249
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.638.465.664	19.972.411	-	107.195.480	-	2.045.746.332	301.357.594	2.474.271.817
463	Kab. Maluku Tengah	2.221.274.178	19.972.411	-	29.842.785	-	1.806.352.020	301.357.594	2.157.524.810
464	Kab. Maluku Tenggara	803.566.884	19.972.411	-	-	-	394.824.458	301.357.594	716.154.463
465	Kab. Pulau Buru	10.444.485.377	19.972.411	-	-	-	9.286.530.062	301.357.594	9.607.860.067
466	Kota Ambon	803.018.922	19.972.411	-	-	-	394.326.794	301.357.594	715.656.799
467	Kab. Seram Bagian Barat	1.587.032.358	19.972.411	-	211.797.880	-	933.058.668	301.357.594	1.466.186.553
468	Kab. Seram Bagian Timur	2.194.394.167	199.724.114	-	-	-	671.234.262	301.357.594	1.172.315.970
469	Kab. Maluku Barat Daya	1.443.428.556	19.972.411	-	507.958.430	-	396.630.987	301.357.594	1.225.919.422
470	Kab. Buru Selatan	5.634.461.251	19.972.411	-	60.358.235	-	4.618.714.295	301.357.594	5.000.402.535
471	Kab. Kepulauan Aru	807.485.911	19.972.411	-	-	-	399.693.686	301.357.594	721.023.691
472	**Kota Tual**	**803.018.922**	**19.972.411**	**-**	**-**	**-**	**394.326.794**	301.357.594	**715.656.799**
473	Provinsi Maluku Utara	38.255.056.200	-	-	37.155.772.200	49.009.676	779.745.548	-	37.984.527.424
474	Kab. Halmahera Tengah	15.738.726.330	-	-	13.453.200.802	12.252.419	1.415.811.025	301.357.594	15.182.621.840
475	Kab. Halmahera Barat	9.860.077.588	-	-	9.198.132.060	98.019.353	194.936.387	301.357.594	9.792.445.394
476	Kota Ternate	9.668.600.759	-	-	9.092.422.165	12.252.419	194.936.387	301.357.594	9.600.968.565
477	Kab. Halmahera Timur	52.559.147.421	-	-	50.043.108.274	12.252.419	681.033.751	301.357.594	51.037.752.038
478	Kota Tidore Kepulauan	9.875.578.453	-	-	9.167.432.555	12.252.419	290.998.049	301.357.594	9.772.040.617
479	Kab. Kepulauan Sula	12.382.223.876	-	-	10.897.507.401	12.252.419	430.747.835	301.357.594	11.641.865.249
480	Kab. Pulau Morotai	9.863.522.167	-	-	9.228.929.973	12.252.419	194.936.387	301.357.594	9.737.476.373
481	Kab. Halmahera Selatan	24.930.708.238	-	-	19.069.485.610	12.252.419	5.488.471.815	301.357.594	24.871.567.438
482	Kab. Halmahera Utara	20.369.302.077	-	-	17.375.303.421	12.252.419	477.447.444	301.357.594	18.166.360.878
483	Kab. Yalimo	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
484	**Kab. Lanny Jaya**	**13.861.504.078**	**-**	**-**	**12.060.449.065**	**-**	**413.294.835**	301.357.594	**12.775.101.494**
485	Provinsi Papua	190.409.952.339	-	-	170.474.148.345	-	6.090.282.697	-	176.564.431.042

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
486	Kab. Biak Numfor	13.863.644.556	-	-	12.060.449.065	-	415.994.820	301.357.594	12.777.801.479
487	Kab. Jayapura	14.248.464.571	-	-	12.227.140.730	-	574.713.183	301.357.594	13.103.211.507
488	Kab. Jayawijaya	13.944.890.936	-	-	12.101.477.609	-	413.294.835	301.357.594	12.816.130.038
489	Kab. Merauke	22.471.175.833	-	-	12.060.449.065	-	9.326.204.675	301.357.594	21.688.011.334
490	Kab. Mimika	362.532.572.518	-	-	338.464.435.002	-	3.600.373.186	301.357.594	342.366.165.782
491	Kab. Nabire	16.122.549.547	-	-	12.493.787.089	-	973.716.006	301.357.594	13.768.860.689
492	Kab. Paniai	15.159.136.810	-	-	12.587.915.678	-	413.294.835	301.357.594	13.302.568.107
493	Kab. Puncak Jaya	14.372.822.473	-	-	12.571.767.460	-	413.294.835	301.357.594	13.286.419.889
494	Kab. Kepulauan Yapen	13.864.634.934	-	-	12.060.449.065	-	415.664.393	301.357.594	12.777.471.052
495	Kota Jayapura	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
496	Kab. Sarmi	22.221.134.347	-	-	12.448.762.445	-	8.120.278.003	301.357.594	20.870.398.042
497	Kab. Keerom	18.322.229.359	-	-	12.528.404.875	-	3.501.560.713	301.357.594	16.331.323.182
498	Kab. Yahukimo	14.926.109.893	-	-	13.125.054.880	-	413.294.835	301.357.594	13.839.707.309
499	Kab. Pegunungan Bintang	14.399.751.459	-	-	12.598.696.446	-	413.294.835	301.357.594	13.313.348.875
500	Kab. Tolikara	13.927.189.060	-	-	12.092.767.817	-	413.294.835	301.357.594	12.807.420.246
501	Kab. Boven Digoel	28.050.154.688	-	-	12.183.416.385	-	7.533.021.592	301.357.594	20.017.795.571
502	Kab. Mappi	13.972.400.907	-	-	12.060.449.065	-	565.265.924	301.357.594	12.927.072.583
503	Kab. Asmat	14.902.464.388	-	-	12.060.449.065	-	1.133.084.772	301.357.594	13.494.891.431
504	Kab. Waropen	14.192.056.437	-	-	12.312.972.195	-	420.746.807	301.357.594	13.035.076.596
505	Kab. Mamberamo Raya	30.825.540.791	-	-	12.851.902.805	-	5.062.917.666	301.357.594	18.216.178.065
506	Kab. Mamberamo Tengah	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
507	Kab. Nduga	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
508	Kab. Dogiyai	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
509	Kab. Intan Jaya	14.026.613.748	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
510	Kab. Puncak	13.861.504.078	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
511	Kab. Deiyai	14.026.613.748	-	-	12.060.449.065	-	413.294.835	301.357.594	12.775.101.494
512	**Kab. Supiori**	**13.861.504.078**	-	-	**12.060.449.065**	-	**413.294.835**	301.357.594	**12.775.101.494**
513	Provinsi Papua Barat	881.599.700.736	396.637.770.000	472.799.502.006	1.603.712.573	-	8.818.353.119	-	879.859.337.698
514	Kab. Sorong	43.993.200.014	22.219.562.082	13.279.342.573	335.014.590	-	6.418.494.893	301.357.594	42.553.771.732
515	Kab. Manokwari	20.804.631.114	4.103.149.000	12.333.900.052	956.920.805	-	1.826.668.669	301.357.594	19.521.996.120
516	Kab. Fak Fak	23.620.331.609	4.103.149.000	12.333.900.052	639.677.760	-	5.826.076.409	301.357.594	23.204.160.815
517	Kota Sorong	18.899.908.034	4.103.149.000	12.333.900.052	145.113.025	-	1.668.315.755	301.357.594	18.551.835.426
518	Kab. Sorong Selatan	19.937.011.237	4.103.149.000	12.333.900.052	247.405.495	-	2.356.027.070	301.357.594	19.341.839.211
519	Kab. Raja Ampat	22.653.279.865	4.692.946.000	12.333.900.052	1.963.548.023	-	1.746.762.555	301.357.594	21.038.514.224
520	Kab. Teluk Bintuni	154.786.047.981	15.001.066.608	122.393.558.003	1.083.059.510	-	13.133.600.072	301.357.594	151.912.641.787
521	Kab. Teluk Wondama	27.614.530.604	4.103.149.000	12.333.900.052	656.614.785	-	9.824.732.436	301.357.594	27.219.753.867
522	Kab. Tambrauw	19.730.873.564	4.103.149.000	12.333.900.052	329.467.090	-	1.774.185.771	301.357.594	18.842.059.507
523	Kab. Maybrat	20.238.676.617	4.103.149.000	12.333.900.052	145.113.025	-	3.040.219.234	301.357.594	19.923.738.905
524	**Kab. Kaimana**	**27.263.306.107**	**4.103.149.000**	**12.333.900.052**	**290.041.420**	-	**10.071.751.872**	**301.357.594**	**27.100.199.938**
525	**Dana Cadangan**	**12.751.813.349.698**	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**56.455.131.151.881**	**15.530.937.334.820**	**13.799.051.780.835**	**11.636.718.665.675**	**451.021.274.903**	**889.055.732.766**	**149.774.724.480**	**42.456.559.513.479**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**3.063.594.741**	**3.063.594.741**
2	Kab. Aceh Barat	172.737.615	172.737.615
3	Kab. Aceh Besar	482.181.963	482.181.963
4	Kab. Aceh Selatan	172.737.615	172.737.615
5	Kab. Aceh Singkil	172.737.615	172.737.615
6	Kab. Aceh Tengah	564.471.099	564.471.099
7	Kab. Aceh Tenggara	172.737.615	172.737.615
8	Kab. Aceh Timur	172.737.615	172.737.615
9	Kab. Aceh Utara	172.737.615	172.737.615
10	Kab. Bireun	172.737.615	172.737.615
11	Kab. Pidie	413.740.472	413.740.472
12	Kab. Simeulue	172.737.615	172.737.615
13	Kota Banda Aceh	172.737.615	172.737.615
14	Kota Sabang	172.737.615	172.737.615
15	Kota Langsa	172.737.615	119.060.242
16	Kota Lhokseumawe	172.737.615	172.737.615
17	Kab. Nagan Raya	172.737.615	172.737.615
18	Kab. Aceh Jaya	172.737.615	172.737.615
19	Kab. Pidie Jaya	409.489.312	409.489.312
20	Kab. Aceh Barat Daya	172.737.615	172.737.615
21	Kab. Gayo Lues	1.849.755.750	1.849.755.750
22	Kab. Aceh Tamiang	172.737.615	172.737.615
23	Kab. Bener Meriah	492.209.670	492.209.670
24	Kota Subulussalam	172.737.615	172.737.615
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**5.447.687.906**	**3.681.691.780**
26	Kab. Asahan	316.953.697	232.830.962
27	Kab. Dairi	724.321.286	724.321.286
28	Kab. Deli Serdang	560.611.476	560.611.476
29	Kab. Tanah Karo	1.219.483.448	1.219.483.448
30	Kab. Labuhan Batu	251.864.659	50.576.026
31	Kab. Langkat	392.538.841	392.538.841
32	Kab. Mandailing Natal	389.126.208	389.126.208
33	Kab. Nias	180.933.146	180.933.146
34	Kab. Simalungun	598.220.922	598.220.922
35	Kab. Tapanuli Selatan	218.289.713	218.289.713

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
36	Kab. Tapanuli Tengah	228.699.692	228.699.692
37	Kab. Tapanuli Utara	699.520.787	699.520.787
38	Kab. Toba Samosir	171.980.095	171.980.095
39	Kota Binjai	206.149.460	40.683.428
40	Kota Medan	846.499.788	846.499.788
41	Kota Pematang Siantar	1.801.889.939	1.801.889.939
42	Kota Sibolga	168.332.691	168.332.691
43	Kota Tanjung Balai	184.658.709	126.501.073
44	Kab. Batu Bara	244.145.918	244.145.918
45	Kab. Labuhan Batu Utara	230.681.019	230.681.019
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	216.981.288	216.981.288
47	Kab. Padang Lawas Utara	209.409.871	209.409.871
48	Kab. Padang Lawas	209.000.742	209.000.742
49	Kab. Nias Utara	180.227.308	180.227.308
50	Kab. Nias Barat	169.057.362	113.996.922
51	Kota Tebing Tinggi	181.851.935	181.851.935
52	Kota Padang Sidempuan	176.604.616	176.604.616
53	Kab. Pakpak Bharat	171.389.111	115.846.135
54	Kab. Nias Selatan	219.370.882	219.370.882
55	Kab. Humbang Hasundutan	684.822.358	684.822.358
56	Kab. Serdang Bedagai	301.548.984	301.548.984
57	Kab. Samosir	177.866.426	177.866.426
58	Kota Gunung sitoli	178.239.401	34.502.617
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**2.624.750.805**	**2.624.750.805**
60	Kab. Limapuluh Kota	2.204.605.660	2.204.605.660
61	Kab. Agam	363.663.135	363.663.135
62	Kab. Kepulauan Mentawai	138.144.779	138.144.779
63	Kab. Padang Pariaman	138.144.779	138.144.779
64	Kab. Pasaman	343.474.153	343.474.153
65	Kab. Pesisir Selatan	138.144.779	138.144.779
66	Kab. Sijunjung	138.144.779	138.144.779
67	Kab. Solok	395.474.829	263.797.630
68	Kab. Tanah Datar	383.266.630	383.266.630
69	Kota Bukit Tinggi	138.144.779	92.166.130
70	Kota Padang Panjang	138.144.779	92.166.130
71	Kota Padang	138.144.779	138.144.779
72	Kota Payakumbuh	399.529.744	399.529.744
73	Kota Sawahlunto	376.667.042	376.667.042
74	Kota Solok	138.144.779	138.144.779
75	Kota Pariaman	138.144.779	138.144.779

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
76	Kab. Pasaman Barat	138.144.779	138.144.779
77	Kab. Dharmasraya	138.144.779	138.144.779
78	Kab. Solok Selatan	138.144.779	138.144.779
79	**Provinsi Riau**	**-**	**-**
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**108.639.169**	**108.639.169**
93	Kab. Bintan	18.106.528	**18.106.528**
94	Kab. Natuna	18.106.528	**18.106.528**
95	Kab. Karimun	18.106.528	**18.106.528**
96	Kota Batam	144.852.225	**144.852.225**
97	Kab. Kepulauan Anambas	18.106.528	**18.106.528**
98	Kota Tanjung Pinang	18.106.528	**18.106.528**
99	Kab. Lingga	18.106.528	**18.106.528**
100	**Provinsi Jambi**	**1.794.690.856**	**1.794.690.856**
101	Kab. Batanghari	179.469.086	179.469.086
102	Kab. Bungo	179.469.086	179.469.086
103	Kab. Kerinci	2.247.875.993	2.247.875.993
104	Kab. Merangin	324.514.232	324.514.232
105	Kab. Muaro Jambi	179.469.086	179.469.086
106	Kab. Sarolangun	179.469.086	179.469.086
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	179.469.086	179.469.086
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	179.469.086	80.651.087
109	Kab. Tebo	179.469.086	120.341.190
110	Kota Jambi	179.469.086	120.341.190
111	Kota Sungai Penuh	179.469.086	120.341.190
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.607.905.999**	**1.607.905.999**
113	Kab. Lahat	460.211.676	460.211.676
114	Kab. Musi Banyuasin	108.685.199	69.599.156
115	Kab. Musi Rawas	108.685.199	108.685.199

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
116	Kab. Muara Enim	108.685.199	108.685.199
117	Kab. Ogan Komering Ilir	108.685.199	44.528.074
118	Kab. Ogan Komering Ulu	108.685.199	44.528.074
119	Kota Palembang	108.685.199	44.528.074
120	Kota Pagar Alam	466.485.302	222.640.375
121	Kota Lubuk Linggau	460.211.676	460.211.676
122	Kota Prabumulih	108.685.199	69.599.156
123	Kab. Empat Lawang	108.685.199	44.528.074
124	Kab. Banyuasin	108.685.199	44.528.074
125	Kab. Ogan Ilir	108.685.199	44.528.074
126	Kab. OKU Timur	516.674.307	222.640.375
127	Kab. OKU Selatan	761.345.707	761.345.707
128	**Provinsi Bangka Belitung**	-	-
129	Kab. Bangka	-	-
130	Kab. Belitung	-	-
131	Kota Pangkal Pinang	-	-
132	Kab. Bangka Selatan	-	-
133	Kab. Bangka Tengah	-	-
134	Kab. Bangka Barat	-	-
135	Kab. Belitung Timur	-	-
136	**Provinsi Bengkulu**	-	-
137	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
138	Kab. Bengkulu Utara	-	-
139	Kab. Rejang Lebong	-	-
140	Kota Bengkulu	-	-
141	Kab. Kaur	-	-
142	Kab. Seluma	-	-
143	Kab. Mukomuko	-	-
144	Kab. Lebong	-	-
145	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
146	Kab. Kepahiang	-	-
147	**Provinsi Lampung**	**2.725.696.875**	**2.725.696.875**
148	Kab. Lampung Barat	420.817.991	420.817.991
149	Kab. Lampung Selatan	517.442.830	517.442.830
150	Kab. Lampung Tengah	578.863.298	578.863.298
151	Kab. Lampung Utara	717.405.587	717.405.587
152	Kab. Lampung Timur	1.680.381.541	1.680.381.541
153	Kab. Tanggamus	322.659.077	322.659.077
154	Kab. Tulang Bawang	194.692.634	194.692.634
155	Kab. Way Kanan	198.397.797	198.397.797

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
156	Kab. Pesawaran	421.593.803	421.593.803
157	Kab. Pringsewu	415.981.872	415.981.872
158	Kab. Mesuji	194.692.634	132.177.968
159	Kab. Tulang Bawang Barat	194.692.634	194.692.634
160	Kota Bandar Lampung	194.692.634	194.692.634
161	Kota Metro	307.645.045	307.645.045
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**112.681.802**	**112.681.802**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**62.522.587.865**	**62.522.587.865**
164	Kab. Bandung	6.864.763.699	6.864.763.699
165	Kab. Bekasi	23.963.205.278	10.783.145.413
166	Kab. Bogor	3.116.978.259	3.116.978.259
167	Kab. Ciamis	3.164.942.196	3.164.942.196
168	Kab. Cianjur	3.174.023.086	3.174.023.086
169	Kab. Cirebon	6.051.052.353	4.557.001.663
170	Kab. Garut	8.096.835.461	8.096.835.461
171	Kab. Indramayu	3.124.216.603	1.417.732.860
172	Kab. Karawang	25.682.737.711	25.682.737.711
173	Kab. Kuningan	3.181.182.538	3.181.182.538
174	Kab. Majalengka	7.165.879.899	7.165.879.899
175	Kab. Purwakarta	3.157.536.094	3.157.536.094
176	Kab. Subang	3.178.784.719	3.178.784.719
177	Kab. Sukabumi	3.199.691.669	3.199.691.669
178	Kab. Sumedang	8.003.731.914	8.003.731.914
179	Kab. Tasikmalaya	3.155.995.259	3.155.995.259
180	Kab. Bandung Barat	3.141.417.218	3.141.417.218
181	Kota Bandung	3.145.814.013	3.145.814.013
182	Kota Bekasi	3.128.985.755	3.128.985.755
183	Kota Bogor	3.119.438.885	3.119.438.885
184	Kota Cirebon	3.362.112.260	1.655.565.059
185	Kota Depok	3.146.832.197	3.146.832.197
186	Kota Sukabumi	3.143.531.394	3.143.531.394
187	Kota Cimahi	3.125.310.170	2.219.935.503
188	Kota Tasikmalaya	3.148.260.798	3.148.260.798
189	Kota Banjar	3.142.778.921	296.119.919
190	**Provinsi Banten**	**129.191.272**	**129.191.272**
191	Kab. Lebak	21.531.893	**21.531.893**
192	Kab. Pandeglang	21.531.893	**21.531.893**
193	Kab. Serang	122.580.335	**122.580.335**
194	Kab. Tangerang	21.531.893	**21.531.893**
195	Kota Cilegon	21.531.893	**21.531.893**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
196	Kota Tangerang	21.531.893	**21.531.893**
197	Kota Serang	49.674.951	**49.674.951**
198	Kota Tangerang Selatan	21.531.893	**21.531.893**
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**170.138.169.816**	**170.138.169.816**
200	Kab. Banjarnegara	5.653.846.520	5.653.846.520
201	Kab. Banyumas	5.200.889.353	5.200.889.353
202	Kab. Batang	6.546.433.978	6.546.433.978
203	Kab. Blora	7.988.256.868	7.988.256.868
204	Kab. Boyolali	8.184.194.132	8.184.194.132
205	Kab. Brebes	5.103.201.288	5.103.201.288
206	Kab. Cilacap	5.155.192.344	5.155.192.344
207	Kab. Demak	14.983.483.018	14.983.483.018
208	Kab. Grobogan	8.564.348.061	8.564.348.061
209	Kab. Jepara	8.205.661.574	8.205.661.574
210	Kab. Karanganyar	7.378.663.220	7.378.663.220
211	Kab. Kebumen	6.936.672.235	6.936.672.235
212	Kab. Kendal	25.970.665.489	25.970.665.489
213	Kab. Klaten	15.385.788.097	15.385.788.097
214	Kab. Kudus	111.804.996.912	111.804.996.912
215	Kab. Magelang	13.291.952.837	13.291.952.837
216	Kab. Pati	8.599.331.531	8.599.331.531
217	Kab. Pekalongan	4.877.311.668	4.877.311.668
218	Kab. Pemalang	5.188.916.075	5.188.916.075
219	Kab. Purbalingga	6.951.329.671	6.951.329.671
220	Kab. Purworejo	6.434.753.207	6.434.753.207
221	Kab. Rembang	5.992.886.046	5.992.886.046
222	Kab. Semarang	8.562.450.422	8.562.450.422
223	Kab. Sragen	5.474.942.674	5.474.942.674
224	Kab. Sukoharjo	6.308.399.567	6.308.399.567
225	Kab. Tegal	6.225.011.294	6.225.011.294
226	Kab. Temanggung	25.981.032.843	25.981.032.843
227	Kab. Wonogiri	5.674.578.955	5.674.578.955
228	Kab. Wonosobo	8.424.393.114	8.424.393.114
229	Kota Magelang	5.125.850.529	5.125.850.529
230	Kota Pekalongan	6.443.783.236	6.443.783.236
231	Kota Salatiga	5.968.773.824	5.968.773.824
232	Kota Semarang	7.265.045.216	7.265.045.216
233	Kota Surakarta	6.258.369.496	6.258.369.496
234	Kota Tegal	4.877.657.607	4.877.657.607
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**6.432.692.663**	**6.432.692.663**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
236	Kab. Bantul	4.480.604.673	4.480.604.673
237	Kab. Gunung Kidul	2.128.547.282	2.128.547.282
238	Kab. Kulon Progo	3.001.682.035	3.001.682.035
239	Kab. Sleman	3.112.748.904	3.112.748.904
240	Kota Yogyakarta	2.286.033.317	2.286.033.317
241	**Provinsi Jawa Timur**	**318.989.485.829**	**318.989.485.829**
242	Kab. Bangkalan	9.199.444.777	9.199.444.777
243	Kab. Banyuwangi	14.111.857.388	14.111.857.388
244	Kab. Blitar	12.847.428.409	12.847.428.409
245	Kab. Bojonegoro	29.518.696.111	29.518.696.111
246	Kab. Bondowoso	16.742.773.179	16.742.773.179
247	Kab. Gresik	9.317.102.750	9.317.102.750
248	Kab. Jember	24.358.878.667	24.358.878.667
249	Kab. Jombang	16.625.576.523	16.625.576.523
250	Kab. Kediri	34.361.779.340	34.361.779.340
251	Kab. Lamongan	22.146.480.555	22.146.480.555
252	Kab. Lumajang	10.694.719.277	10.694.719.277
253	Kab. Madiun	10.152.684.323	10.152.684.323
254	Kab. Magetan	9.786.854.710	9.786.854.710
255	Kab. Malang	44.095.433.996	44.095.433.996
256	Kab. Mojokerto	12.590.919.424	12.590.919.424
257	Kab. Nganjuk	13.808.002.311	13.808.002.311
258	Kab. Ngawi	13.455.407.396	13.455.407.396
259	Kab. Pacitan	9.897.779.773	9.897.779.773
260	Kab. Pamekasan	33.555.607.091	33.555.607.091
261	Kab. Pasuruan	62.148.338.102	62.148.338.102
262	Kab. Ponorogo	10.010.654.040	10.010.654.040
263	Kab. Probolinggo	24.750.387.092	24.750.387.092
264	Kab. Sampang	12.427.478.602	12.427.478.602
265	Kab. Sidoarjo	20.241.155.355	20.241.155.355
266	Kab. Situbondo	14.593.871.811	14.593.871.811
267	Kab. Sumenep	24.227.468.617	24.227.468.617
268	Kab. Trenggalek	10.007.863.835	10.007.863.835
269	Kab. Tuban	11.959.011.964	11.959.011.964
270	Kab. Tulungagung	20.232.234.109	20.232.234.109
271	Kota Blitar	10.013.307.394	10.013.307.394
272	Kota Kediri	64.082.147.226	64.082.147.226
273	Kota Madiun	9.177.002.715	9.177.002.715
274	Kota Malang	28.731.309.031	28.731.309.031
275	Kota Mojokerto	10.897.180.277	7.582.818.708

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
276	Kota Pasuruan	8.583.147.290	8.583.147.290
277	Kota Probolinggo	8.591.489.741	8.591.489.741
278	Kota Surabaya	32.457.537.653	32.457.537.653
279	Kota Batu	13.909.789.413	13.909.789.413
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	-	-
281	Kab. Bengkayang	-	-
282	Kab. Landak	-	-
283	Kab. Kapuas Hulu	-	-
284	Kab. Ketapang	-	-
285	Kab. Pontianak	-	-
286	Kab. Sambas	-	-
287	Kab. Sanggau	-	-
288	Kab. Sintang	-	-
289	Kota Pontianak	-	-
290	Kota Singkawang	-	-
291	Kab. Kayong Utara	-	-
292	Kab. Kubu Raya	-	-
293	Kab. Sekadau	-	-
294	Kab. Melawi	-	-
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.459.036.672**	**1.459.036.672**
296	Kab. Barito Selatan	112.233.590	2.860.002
297	Kab. Barito Utara	112.233.590	2.860.002
298	Kab. Kapuas	112.233.590	2.860.002
299	Kab. Kotawaringin Barat	112.233.590	112.233.590
300	Kab. Kotawaringin Timur	112.233.590	16.708.659
301	Kota Palangkaraya	112.233.590	2.860.002
302	Kab. Barito Timur	112.233.590	2.860.002
303	Kab. Murung Raya	112.233.590	2.860.002
304	Kab. Pulang Pisau	1.945.382.230	1.945.382.230
305	Kab. Gunung Mas	112.233.590	2.860.002
306	Kab. Lamandau	112.233.590	72.744.839
307	Kab. Sukamara	112.233.590	20.331.211
308	Kab. Katingan	112.233.590	2.860.002
309	Kab. Seruyan	112.233.590	2.860.002
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	-
311	Kab. Banjar	-	-
312	Kab. Barito Kuala	-	-
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
315	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
316	Kab. Kotabaru	-	-
317	Kab. Tabalong	-	-
318	Kab. Tanah Laut	-	-
319	Kab. Tapin	-	-
320	Kota Banjarbaru	-	-
321	Kota Banjarmasin	-	-
322	Kab. Balangan	-	-
323	Kab. Tanah Bumbu	-	-
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	-
325	Kab. Berau	-	-
326	Kab. Bulungan	-	-
327	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
328	Kab. Kutai Barat	-	-
329	Kab. Kutai Timur	-	-
330	Kab. Malinau	-	-
331	Kab. Nunukan	-	-
332	Kab. Pasir	-	-
333	Kota Balikpapan	-	-
334	Kota Bontang	-	-
335	Kab. Tana Tidung	-	-
336	Kota Samarinda	-	-
337	Kota Tarakan	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**103.354.475**	**271.365.736**
340	Kab. Bolaang Mongondow	7.382.462	**7.382.462**
341	Kab. Minahasa	7.382.462	**7.382.462**
342	Kab. Sangihe	7.382.462	**22.645.979**
343	Kota Bitung	7.382.462	**7.382.462**
344	Kota Manado	7.382.462	**7.382.462**
345	Kab. Kepulauan Talaud	7.382.462	**7.382.462**
346	Kab. Minahasa Selatan	7.382.462	**7.382.462**
347	Kab. Minahasa Tenggara	7.382.462	**7.382.462**
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	7.382.462	**7.382.462**
349	Kota Kotamubagu	7.382.462	**7.382.462**
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	137.805.966	**137.805.966**
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7.382.462	**7.382.462**
352	Kota Tomohon	7.382.462	**7.382.462**
353	Kab. Minahasa Utara	7.382.462	**7.382.462**
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.382.462	**7.382.462**
355	**Provinsi Gorontalo**	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
356	Kab. Boalemo	-	-
357	Kab. Gorontalo	-	-
358	Kota Gorontalo	-	-
359	Kab. Pohuwato	-	-
360	Kab. Gorontalo Utara	-	-
361	Kab. Bone Bolango	-	-
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.660.573.089**	**1.660.573.089**
363	Kab. Banggai	167.120.768	167.120.768
364	Kab. Banggai Kepulauan	167.120.768	167.120.768
365	Kab. Buol	180.709.196	180.709.196
366	Kab. Toli-Toli	180.709.196	180.709.196
367	Kab. Donggala	167.120.768	167.120.768
368	Kab. Morowali	167.120.768	167.120.768
369	Kab. Poso	167.120.768	167.120.768
370	Kota Palu	2.176.286.139	2.176.286.139
371	Kab. Parigi Moutong	167.120.768	167.120.768
372	Kab. Sigi	167.120.768	167.120.768
373	Kab. Tojo Una Una	167.120.768	167.120.768
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**4.272.455.449**	**4.272.455.449**
375	Kab. Bantaeng	190.931.085	190.931.085
376	Kab. Barru	194.732.748	194.732.748
377	Kab. Bone	1.094.964.942	1.094.964.942
378	Kab. Bulukumba	278.558.379	278.558.379
379	Kab. Enrekang	179.323.259	179.323.259
380	Kab. Gowa	179.323.259	179.323.259
381	Kab. Jeneponto	184.217.385	184.217.385
382	Kab. Luwu	181.670.737	181.670.737
383	Kab. Luwu Utara	179.323.259	179.323.259
384	Kab. Maros	179.323.259	179.323.259
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	180.899.094	180.899.094
386	Kab. Pinrang	183.562.508	183.562.508
387	Kab. Selayar	179.323.259	179.323.259
388	Kab. Sidenreng Rappang	179.323.259	179.323.259
389	Kab. Sinjai	1.189.695.761	1.189.695.761
390	Kab. Soppeng	3.738.283.460	3.738.283.460
391	Kab. Takalar	179.323.259	179.323.259
392	Kab. Tana Toraja	195.326.940	195.326.940
393	Kab. Wajo	202.802.470	202.802.470
394	Kota Pare-pare	179.323.259	179.323.259
395	Kab. Toraja Utara	180.861.348	180.861.348

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
396	Kota Makassar	179.323.259	179.323.259
397	Kota Palopo	179.323.259	179.323.259
398	Kab. Luwu Timur	179.323.259	179.323.259
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	-
400	Kab. Majene	-	-
401	Kab. Mamuju	-	-
402	Kab. Polewali Mandar	-	-
403	Kab. Mamasa	-	-
404	Kab. Mamuju Utara	-	-
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-	-
406	Kab. Buton	-	-
407	Kab. Konawe	-	-
408	Kab. Kolaka	-	-
409	Kab. Muna	-	-
410	Kota Kendari	-	-
411	Kota Bau-bau	-	-
412	Kab. Konawe Selatan	-	-
413	Kab. Bombana	-	-
414	Kab. Konawe Utara	-	-
415	Kab. Buton Utara	-	-
416	Kab. Wakatobi	-	-
417	Kab. Kolaka Utara	-	-
418	**Provinsi Bali**	**3.895.029.737**	**3.895.029.737**
419	Kab. Badung	441.913.244	441.913.244
420	Kab. Bangli	477.875.305	477.875.305
421	Kab. Buleleng	4.980.889.265	4.980.889.265
422	Kab. Gianyar	956.526.752	956.526.752
423	Kab. Jembrana	441.913.244	441.913.244
424	Kab. Karangasem	463.545.177	463.545.177
425	Kab. Klungkung	441.913.244	291.523.660
426	Kab. Tabanan	441.913.244	441.913.244
427	Kota Denpasar	441.913.244	441.913.244
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**65.826.021.241**	**65.826.021.241**
429	Kab. Bima	10.726.140.287	10.726.140.287
430	Kab. Dompu	5.944.767.894	5.944.767.894
431	Kab. Lombok Barat	14.353.875.008	14.353.875.002
432	Kab. Lombok Tengah	25.934.438.539	25.934.438.539
433	Kab. Lombok Timur	58.196.616.552	58.196.616.552
434	Kab. Sumbawa	10.264.226.390	10.264.226.390
435	Kota Mataram	14.436.965.860	14.436.965.860

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
436	Kab. Lombok Utara	5.696.770.708	5.696.770.708
437	Kota Bima	4.291.139.185	4.291.139.185
438	Kab. Sumbawa Barat	3.749.109.141	3.749.109.141
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**2.345.609.091**	**2.345.609.091**
440	Kab. Alor	139.600.634	96.016.409
441	Kab. Belu	442.789.753	14.164.117
442	Kab. Ende	1.209.456.433	772.302.045
443	Kab. Flores Timur	405.104.302	405.104.302
444	Kab. Kupang	133.779.627	86.270.925
445	Kab. Lembata	302.354.337	210.693.070
446	Kab. Manggarai	161.500.301	112.221.794
447	Kab. Ngada	133.069.689	91.752.746
448	Kab. Sikka	342.009.016	238.928.505
449	Kab. Sumba Barat	235.037.705	150.693.451
450	Kab. Sumba Timur	195.144.767	136.335.998
451	Kab. Timor Tengah Selatan	134.343.067	92.185.869
452	Kab. Timor Tengah Utara	111.695.671	75.896.786
453	Kota Kupang	111.695.671	75.896.786
454	Kab. Rote Ndao	111.695.671	75.896.786
455	Kab. Nagekeo	208.715.396	143.660.642
456	Kab. Sumba Tengah	111.695.671	75.896.786
457	Kab. Sumba Barat Daya	543.353.351	386.968.279
458	Kab. Manggarai Timur	111.695.671	75.896.786
459	Kab. Sabu Raijua	150.487.535	11.431.470
460	Kab. Manggarai Barat	177.863.612	177.863.612
461	**Provinsi Maluku**	-	-
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
463	Kab. Maluku Tengah	-	-
464	Kab. Maluku Tenggara	-	-
465	Kab. Pulau Buru	-	-
466	Kota Ambon	-	-
467	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
468	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
469	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
470	Kab. Buru Selatan	-	-
471	Kab. Kepulauan Aru	-	-
472	Kota Tual	-	-
473	**Provinsi Maluku Utara**	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	-
475	Kab. Halmahera Barat	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
476	Kota Ternate	-	-
477	Kab. Halmahera Timur	-	-
478	Kota Tidore Kepulauan	-	-
479	Kab. Kepulauan Sula	-	-
480	Kab. Pulau Morotai	-	-
481	Kab. Halmahera Selatan	-	-
482	Kab. Halmahera Utara	-	-
483	Kab. Yalimo	-	-
484	Kab. Lanny Jaya	-	-
485	**Provinsi Papua**	-	-
486	Kab. Biak Numfor	-	-
487	Kab. Jayapura	-	-
488	Kab. Jayawijaya	-	-
489	Kab. Merauke	-	-
490	Kab. Mimika	-	-
491	Kab. Nabire	-	-
492	Kab. Paniai	-	-
493	Kab. Puncak Jaya	-	-
494	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
495	Kota Jayapura	-	-
496	Kab. Sarmi	-	-
497	Kab. Keerom	-	-
498	Kab. Yahukimo	-	-
499	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
500	Kab. Tolikara	-	-
501	Kab. Boven Digoel	-	-
502	Kab. Mappi	-	-
503	Kab. Asmat	-	-
504	Kab. Waropen	-	-
505	Kab. Mamberamo Raya	-	-
506	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
507	Kab. Nduga	-	-
508	Kab. Dogiyai	-	-
509	Kab. Intan Jaya	-	-
510	Kab. Puncak	-	-
511	Kab. Deiyai	-	-
512	Kab. Supiori	-	-
513	**Provinsi Papua Barat**	-	-
514	Kab. Sorong	-	-
515	Kab. Manokwari	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
516	Kab. Fak Fak	-	-
517	Kota Sorong	-	-
518	Kab. Sorong Selatan	-	-
519	Kab. Raja Ampat	-	-
520	Kab. Teluk Bintuni	-	-
521	Kab. Teluk Wondama	-	-
522	Kab. Tambrauw	-	-
523	Kab. Maybrat	-	-
524	Kab. Kaimana	-	-
525	**Dana Cadangan**	-	-
JUMLAH		**2.183.936.594.069**	**2.151.491.260.171**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**1.092.445.518.000**	**1.092.445.518.000**	**75.148.510.000**	**75.148.510.000**
2	Kab. Aceh Barat	507.582.407.000	507.582.407.000	69.100.470.000	69.100.470.000
3	Kab. Aceh Besar	618.323.628.000	618.323.628.000	75.506.040.000	75.506.040.000
4	Kab. Aceh Selatan	528.579.445.000	528.579.445.000	66.938.680.000	66.938.680.000
5	Kab. Aceh Singkil	336.786.951.000	336.786.951.000	56.596.650.000	56.596.650.000
6	Kab. Aceh Tengah	513.863.035.000	513.863.035.000	41.803.310.000	41.803.310.000
7	Kab. Aceh Tenggara	470.577.374.000	470.577.374.000	40.861.120.000	40.861.120.000
8	Kab. Aceh Timur	600.936.437.000	600.936.437.000	81.223.480.000	81.223.480.000
9	Kab. Aceh Utara	690.327.098.000	690.327.098.000	56.315.630.000	56.315.630.000
10	Kab. Bireun	699.060.589.000	699.060.589.000	59.183.470.000	59.183.470.000
11	Kab. Pidie	683.766.687.000	683.766.687.000	67.887.650.000	67.887.650.000
12	Kab. Simeulue	345.242.688.000	345.242.688.000	69.202.430.000	69.202.430.000
13	Kota Banda Aceh	567.628.828.000	567.628.828.000	31.003.110.000	31.003.110.000
14	Kota Sabang	301.933.548.000	301.933.548.000	28.135.400.000	28.135.400.000
15	Kota Langsa	381.240.982.000	381.240.982.000	29.920.830.000	29.920.830.000
16	Kota Lhokseumawe	437.793.850.000	437.793.850.000	30.890.340.000	30.890.340.000
17	Kab. Nagan Raya	464.191.402.000	464.191.402.000	58.981.370.000	58.981.370.000
18	Kab. Aceh Jaya	341.773.459.000	341.773.459.000	53.468.110.000	53.468.110.000
19	Kab. Pidie Jaya	350.574.172.000	350.574.172.000	50.647.270.000	50.647.270.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	362.624.746.000	362.624.746.000	65.504.540.000	65.504.540.000
21	Kab. Gayo Lues	374.040.972.000	374.040.972.000	48.430.790.000	48.430.790.000
22	Kab. Aceh Tamiang	423.677.588.000	423.677.588.000	41.006.940.000	41.006.940.000
23	Kab. Bener Meriah	375.310.917.000	375.310.917.000	52.306.820.000	52.306.820.000
24	Kota Subulussalam	251.634.726.000	251.634.726.000	27.457.570.000	27.457.570.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**1.223.445.404.000**	**1.223.445.404.000**	**73.097.930.000**	**54.823.448.000**
26	Kab. Asahan	733.671.988.000	733.671.988.000	79.875.480.000	79.875.480.000
27	Kab. Dairi	512.477.041.000	512.477.041.000	61.125.590.000	61.125.590.000
28	Kab. Deli Serdang	1.260.755.135.000	1.260.755.135.000	81.867.590.000	81.867.590.000
29	Kab. Tanah Karo	625.822.348.000	625.822.348.000	48.120.130.000	48.120.130.000
30	Kab. Labuhan Batu	520.457.519.000	520.457.519.000	49.738.450.000	49.738.450.000
31	Kab. Langkat	982.658.132.000	982.658.132.000	81.165.730.000	81.165.730.000
32	Kab. Mandailing Natal	625.543.432.000	625.543.432.000	51.721.690.000	38.791.268.000
33	Kab. Nias	319.069.648.000	319.069.648.000	64.603.150.000	64.603.150.000
34	Kab. Simalungun	977.808.611.000	977.808.611.000	80.773.970.000	80.773.970.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	517.342.688.000	517.342.688.000	54.321.700.000	54.321.700.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	491.010.818.000	491.010.818.000	83.254.250.000	83.254.250.000
37	Kab. Tapanuli Utara	552.463.211.000	552.463.211.000	55.778.010.000	55.778.010.000
38	Kab. Toba Samosir	423.292.453.000	423.292.453.000	46.036.240.000	46.036.240.000
39	Kota Binjai	477.553.537.000	477.553.537.000	30.656.930.000	19.655.758.000
40	Kota Medan	1.270.244.794.000	1.270.244.794.000	74.276.510.000	62.016.918.000
41	Kota Pematang Siantar	492.115.399.000	492.115.399.000	41.399.700.000	41.399.700.000
42	Kota Sibolga	338.507.471.000	338.507.471.000	29.474.070.000	29.474.070.000
43	Kota Tanjung Balai	369.246.576.000	369.246.576.000	28.391.040.000	28.391.040.000
44	Kab. Batu Bara	517.734.102.000	517.734.102.000	42.178.640.000	42.178.640.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	457.714.720.000	457.714.720.000	48.433.300.000	48.433.300.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	400.566.653.000	400.566.653.000	53.225.680.000	53.225.680.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	387.954.949.000	387.954.949.000	36.311.060.000	36.311.060.000
48	Kab. Padang Lawas	371.650.111.000	371.650.111.000	31.082.900.000	31.082.900.000
49	Kab. Nias Utara	294.071.932.000	294.071.932.000	56.382.660.000	56.382.660.000
50	Kab. Nias Barat	251.631.634.000	251.631.634.000	59.140.280.000	42.168.069.000
51	Kota Tebing Tinggi	368.586.756.000	368.586.756.000	36.283.080.000	36.283.080.000
52	Kota Padang Sidempuan	423.251.346.000	423.251.346.000	39.957.160.000	39.957.160.000
53	Kab. Pakpak Bharat	273.598.951.000	273.598.951.000	54.005.910.000	54.005.910.000
54	Kab. Nias Selatan	422.944.097.000	422.944.097.000	101.799.850.000	101.799.850.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	440.919.622.000	440.919.622.000	50.779.570.000	50.779.570.000
56	Kab. Serdang Bedagai	628.900.240.000	628.900.240.000	68.230.650.000	68.230.650.000
57	Kab. Samosir	384.760.680.000	384.760.680.000	44.730.000.000	33.547.500.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
58	Kota Gunung sitoli	356.042.897.000	356.042.897.000	35.585.700.000	31.781.842.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**1.039.922.511.000**	**1.039.922.511.000**	**64.822.530.000**	**63.941.974.800**
60	Kab. Limapuluh Kota	632.930.786.000	632.930.786.000	51.502.690.000	51.502.690.000
61	Kab. Agam	676.516.360.000	676.516.360.000	66.037.810.000	66.037.810.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	465.535.454.000	465.535.454.000	77.927.520.000	58.445.641.000
63	Kab. Padang Pariaman	633.453.395.000	633.453.395.000	97.024.360.000	97.024.360.000
64	Kab. Pasaman	481.180.159.000	481.180.159.000	41.291.780.000	41.291.780.000
65	Kab. Pesisir Selatan	689.380.494.000	689.380.494.000	86.922.400.000	86.922.400.000
66	Kab. Sijunjung	448.681.128.000	448.681.128.000	68.769.170.000	68.769.170.000
67	Kab. Solok	588.040.074.000	588.040.074.000	71.510.280.000	71.510.280.000
68	Kab. Tanah Datar	587.104.249.000	587.104.249.000	53.771.930.000	53.771.930.000
69	Kota Bukit Tinggi	368.311.195.000	368.311.195.000	29.814.060.000	22.360.545.000
70	Kota Padang Panjang	302.846.549.000	302.846.549.000	22.732.660.000	17.049.495.000
71	Kota Padang	1.003.116.093.000	1.003.116.093.000	81.841.800.000	81.841.800.000
72	Kota Payakumbuh	369.115.746.000	369.115.746.000	34.950.620.000	34.950.620.000
73	Kota Sawahlunto	296.397.490.000	296.397.490.000	30.307.130.000	30.307.130.000
74	Kota Solok	318.606.999.000	318.606.999.000	25.424.230.000	25.424.230.000
75	Kota Pariaman	343.061.622.000	343.061.622.000	33.771.130.000	33.771.130.000
76	Kab. Pasaman Barat	523.534.850.000	523.534.850.000	69.520.990.000	66.901.853.000
77	Kab. Dharmasraya	400.374.128.000	400.374.128.000	54.561.700.000	54.561.700.000
78	Kab. Solok Selatan	351.505.736.000	351.505.736.000	48.392.120.000	46.474.958.000
79	**Provinsi Riau**	**726.630.916.000**	**726.630.916.000**	**38.738.320.000**	**38.738.320.000**
80	Kab. Bengkalis	31.862.241.000	31.862.241.000	10.052.520.000	7.539.390.000
81	Kab. Indragiri Hilir	773.041.103.000	773.041.103.000	56.911.990.000	49.612.670.000
82	Kab. Indragiri Hulu	587.933.543.000	587.933.543.000	14.544.970.000	14.544.970.000
83	Kab. Kampar	685.859.400.000	685.859.400.000	54.949.780.000	41.212.335.000
84	Kab. Kuantan Singingi	569.206.381.000	569.206.381.000	1.541.560.000	1.541.560.000
85	Kab. Pelalawan	491.287.503.000	491.287.503.000	12.355.990.000	12.355.990.000
86	Kab. Rokan Hilir	388.866.199.000	388.866.199.000	52.511.390.000	39.383.543.000
87	Kab. Rokan Hulu	528.854.782.000	528.854.782.000	18.905.960.000	18.905.960.000
88	Kab. Siak	272.530.626.000	272.530.626.000	17.726.220.000	17.726.220.000
89	Kota Dumai	345.090.262.000	345.090.262.000	-	-
90	Kota Pekanbaru	738.107.469.000	738.107.469.000	30.355.870.000	22.766.903.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	342.086.718.000	342.086.718.000	18.219.110.000	13.664.333.000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**656.067.610.000**	**656.067.610.000**	**36.672.910.000**	**36.672.910.000**
93	Kab. Bintan	288.685.934.000	288.685.934.000	21.630.860.000	21.630.860.000
94	Kab. Natuna	177.949.262.000	177.949.262.000	74.759.910.000	74.759.910.000
95	Kab. Karimun	306.219.557.000	306.219.557.000	10.824.160.000	10.824.160.000
96	Kota Batam	528.839.827.000	528.839.827.000	59.434.120.000	59.434.120.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	233.124.880.000	233.124.880.000	60.648.960.000	45.486.721.000
98	Kota Tanjung Pinang	348.778.489.000	348.778.489.000	1.766.620.000	1.766.620.000
99	Kab. Lingga	298.552.154.000	298.552.154.000	6.413.890.000	6.413.890.000
100	**Provinsi Jambi**	**836.578.062.000**	**836.578.062.000**	**51.035.790.000**	**51.035.790.000**
101	Kab. Batanghari	507.478.487.000	507.478.487.000	49.684.450.000	49.684.450.000
102	Kab. Bungo	523.680.270.000	523.680.270.000	54.327.910.000	54.327.910.000
103	Kab. Kerinci	501.185.353.000	501.185.353.000	60.810.270.000	60.810.270.000
104	Kab. Merangin	565.160.895.000	565.160.895.000	51.814.890.000	51.814.890.000
105	Kab. Muaro Jambi	543.498.995.000	543.498.995.000	53.326.370.000	53.326.370.000
106	Kab. Sarolangun	472.596.098.000	472.596.098.000	45.967.650.000	45.967.650.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	387.991.551.000	387.991.551.000	3.548.560.000	3.548.560.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	430.383.112.000	430.383.112.000	8.069.440.000	8.069.440.000
109	Kab. Tebo	461.006.766.000	461.006.766.000	41.950.160.000	41.950.160.000
110	Kota Jambi	626.331.743.000	626.331.743.000	56.330.990.000	48.534.605.000
111	Kota Sungai Penuh	344.517.814.000	344.517.814.000	27.503.860.000	27.503.860.000
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**870.516.767.000**	**870.516.767.000**	**25.188.400.000**	**25.188.400.000**
113	Kab. Lahat	566.788.216.000	566.788.216.000	66.063.680.000	66.063.680.000
114	Kab. Musi Banyuasin	451.257.714.000	451.257.714.000	63.490.600.000	63.490.600.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
115	Kab. Musi Rawas	635.200.715.000	635.200.715.000	97.938.210.000	97.938.210.000
116	Kab. Muara Enim	678.488.372.000	678.488.372.000	46.527.530.000	46.527.530.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	844.190.649.000	844.190.649.000	110.789.960.000	110.789.960.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	517.309.972.000	517.309.972.000	20.890.190.000	20.890.190.000
119	Kota Palembang	1.125.008.229.000	1.125.008.229.000	66.991.120.000	66.991.120.000
120	Kota Pagar Alam	316.529.382.000	316.529.382.000	32.269.310.000	32.269.310.000
121	Kota Lubuk Linggau	377.966.605.000	377.966.605.000	31.334.550.000	31.334.550.000
122	Kota Prabumulih	352.645.058.000	352.645.058.000	30.853.630.000	30.853.630.000
123	Kab. Empat Lawang	308.418.229.000	308.418.229.000	54.002.650.000	54.002.650.000
124	Kab. Banyuasin	772.464.315.000	772.464.315.000	147.190.480.000	147.190.480.000
125	Kab. Ogan Ilir	520.287.726.000	520.287.726.000	78.045.160.000	78.045.160.000
126	Kab. OKU Timur	615.538.759.000	615.538.759.000	59.760.030.000	59.760.030.000
127	Kab. OKU Selatan	459.577.915.000	459.577.915.000	63.526.910.000	63.526.910.000
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**717.140.118.000**	**717.140.118.000**	**44.170.570.000**	**44.170.570.000**
129	Kab. Bangka	444.188.100.000	444.188.100.000	44.749.920.000	44.749.920.000
130	Kab. Belitung	376.540.510.000	376.540.510.000	41.549.650.000	41.549.650.000
131	Kota Pangkal Pinang	384.421.523.000	384.421.523.000	32.626.040.000	32.626.040.000
132	Kab. Bangka Selatan	363.886.920.000	363.886.920.000	63.168.870.000	63.168.870.000
133	Kab. Bangka Tengah	336.873.338.000	336.873.338.000	37.670.750.000	37.670.750.000
134	Kab. Bangka Barat	358.151.691.000	358.151.691.000	37.411.920.000	24.589.265.000
135	Kab. Belitung Timur	358.875.317.000	358.875.317.000	38.323.020.000	38.323.020.000
136	**Provinsi Bengkulu**	**854.647.828.000**	**854.647.828.000**	**51.587.330.000**	**51.587.330.000**
137	Kab. Bengkulu Selatan	444.045.665.000	444.045.665.000	46.491.850.000	46.491.850.000
138	Kab. Bengkulu Utara	483.142.211.000	483.142.211.000	46.762.980.000	46.762.980.000
139	Kab. Rejang Lebong	498.073.138.000	498.073.138.000	48.767.610.000	48.767.610.000
140	Kota Bengkulu	537.903.521.000	537.903.521.000	44.259.850.000	44.259.850.000
141	Kab. Kaur	329.881.353.000	329.881.353.000	56.262.670.000	56.262.670.000
142	Kab. Seluma	397.724.977.000	397.724.977.000	59.861.910.000	57.605.385.000
143	Kab. Mukomuko	404.397.726.000	404.397.726.000	63.658.060.000	60.901.488.000
144	Kab. Lebong	332.487.823.000	332.487.823.000	53.128.100.000	53.128.100.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	330.693.785.000	330.693.785.000	60.934.190.000	60.934.190.000
146	Kab. Kepahiang	357.903.449.000	357.903.449.000	48.792.190.000	48.792.190.000
147	**Provinsi Lampung**	**1.060.663.183.000**	**1.060.663.183.000**	**60.108.230.000**	**60.108.230.000**
148	Kab. Lampung Barat	558.555.207.000	558.555.207.000	89.282.150.000	89.282.150.000
149	Kab. Lampung Selatan	769.867.834.000	769.867.834.000	77.181.780.000	77.181.780.000
150	Kab. Lampung Tengah	1.086.335.279.000	1.086.335.279.000	92.974.600.000	92.974.600.000
151	Kab. Lampung Utara	761.218.384.000	761.218.384.000	92.155.100.000	92.155.100.000
152	Kab. Lampung Timur	860.136.385.000	860.136.385.000	62.383.990.000	62.383.990.000
153	Kab. Tanggamus	600.816.655.000	600.816.655.000	71.179.650.000	71.179.650.000
154	Kab. Tulang Bawang	482.230.950.000	482.230.950.000	53.295.680.000	53.295.680.000
155	Kab. Way Kanan	517.219.746.000	517.219.746.000	84.930.760.000	84.930.760.000
156	Kab. Pesawaran	538.309.950.000	538.309.950.000	72.426.830.000	66.613.055.000
157	Kab. Pringsewu	499.454.898.000	499.454.898.000	57.508.750.000	57.508.750.000
158	Kab. Mesuji	338.570.276.000	338.570.276.000	40.157.750.000	40.157.750.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	380.947.218.000	380.947.218.000	48.614.120.000	48.614.120.000
160	Kota Bandar Lampung	864.816.041.000	864.816.041.000	65.028.050.000	65.028.050.000
161	Kota Metro	374.201.187.000	374.201.187.000	36.676.760.000	36.676.760.000
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**299.182.466.000**	**299.182.466.000**	-	-
163	**Provinsi Jawa Barat**	**1.472.453.011.000**	**1.472.453.011.000**	**80.072.050.000**	**80.072.050.000**
164	Kab. Bandung	1.730.063.709.000	1.730.063.709.000	159.094.010.000	159.094.010.000
165	Kab. Bekasi	1.083.590.174.000	1.083.590.174.000	114.477.860.000	46.255.448.000
166	Kab. Bogor	1.887.770.112.500	1.887.770.112.500	216.694.720.000	216.694.720.000
167	Kab. Ciamis	1.303.907.527.000	1.303.907.527.000	95.612.680.000	95.612.680.000
168	Kab. Cianjur	1.305.617.257.000	1.305.617.257.000	97.513.400.000	97.513.400.000
169	Kab. Cirebon	1.280.797.128.000	1.280.797.128.000	97.245.530.000	97.245.530.000
170	Kab. Garut	1.563.833.157.000	1.563.833.157.000	179.732.880.000	179.732.880.000
171	Kab. Indramayu	1.134.695.113.000	1.134.695.113.000	74.211.500.000	74.211.500.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
172	Kab. Karawang	1.134.530.200.000	1.134.530.200.000	105.540.220.000	105.540.220.000
173	Kab. Kuningan	998.586.961.000	998.586.961.000	62.124.640.000	62.124.640.000
174	Kab. Majalengka	995.993.633.000	995.993.633.000	72.963.000.000	72.963.000.000
175	Kab. Purwakarta	722.162.721.000	722.162.721.000	56.137.400.000	56.137.400.000
176	Kab. Subang	1.032.567.532.000	1.032.567.532.000	59.497.100.000	59.497.100.000
177	Kab. Sukabumi	1.331.012.058.000	1.331.012.058.000	164.084.320.000	164.084.320.000
178	Kab. Sumedang	1.036.263.413.000	1.036.263.413.000	81.900.500.000	81.900.500.000
179	Kab. Tasikmalaya	1.225.934.879.000	1.225.934.879.000	98.997.370.000	98.997.370.000
180	Kab. Bandung Barat	909.359.898.000	909.359.898.000	64.682.770.000	64.682.770.000
181	Kota Bandung	1.485.941.032.000	1.485.941.032.000	67.312.530.000	67.312.530.000
182	Kota Bekasi	1.051.235.707.000	1.051.235.707.000	36.189.790.000	18.669.315.000
183	Kota Bogor	686.520.759.000	686.520.759.000	26.223.550.000	19.667.663.000
184	Kota Cirebon	536.884.996.000	536.884.996.000	28.845.610.000	28.845.610.000
185	Kota Depok	774.683.814.000	774.683.814.000	29.572.960.000	13.495.607.000
186	Kota Sukabumi	449.179.037.000	449.179.037.000	28.349.870.000	25.048.763.000
187	Kota Cimahi	489.174.792.000	489.174.792.000	25.643.550.000	25.643.550.000
188	Kota Tasikmalaya	657.012.125.000	657.012.125.000	36.374.200.000	36.374.200.000
189	Kota Banjar	317.122.023.000	317.122.023.000	21.127.340.000	19.192.147.000
190	**Provinsi Banten**	**617.081.101.000**	**617.081.101.000**	**14.134.950.000**	**10.601.213.000**
191	Kab. Lebak	901.740.477.000	901.740.477.000	121.185.600.000	121.185.600.000
192	Kab. Pandeglang	988.536.476.000	988.536.476.000	141.861.220.000	141.861.220.000
193	Kab. Serang	868.652.743.000	868.652.743.000	75.493.710.000	75.493.710.000
194	Kab. Tangerang	1.115.364.627.000	1.115.364.627.000	120.033.790.000	90.025.343.000
195	Kota Cilegon	461.398.284.000	461.398.284.000	5.558.320.000	5.558.320.000
196	Kota Tangerang	829.387.856.000	829.387.856.000	27.706.130.000	8.311.839.000
197	Kota Serang	513.769.007.000	513.769.007.000	35.555.680.000	35.555.680.000
198	Kota Tangerang Selatan	536.177.454.000	536.177.454.000	884.850.000	265.455.000
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**1.670.859.369.000**	**1.670.859.369.000**	**82.522.510.000**	**82.522.510.000**
200	Kab. Banjarnegara	763.426.566.000	763.426.566.000	69.482.630.000	69.482.630.000
201	Kab. Banyumas	1.127.939.938.000	1.127.939.938.000	78.662.730.000	78.662.730.000
202	Kab. Batang	641.663.630.000	641.663.630.000	49.792.440.000	49.792.440.000
203	Kab. Blora	753.830.036.000	753.830.036.000	53.492.890.000	53.492.890.000
204	Kab. Boyolali	871.685.981.000	871.685.981.000	59.233.500.000	59.233.500.000
205	Kab. Brebes	1.098.999.510.000	1.098.999.510.000	82.628.900.000	82.628.900.000
206	Kab. Cilacap	1.197.315.060.000	1.197.315.060.000	108.157.350.000	108.157.350.000
207	Kab. Demak	737.911.647.000	737.911.647.000	76.556.190.000	76.556.190.000
208	Kab. Grobogan	906.666.365.000	906.666.365.000	104.304.440.000	104.304.440.000
209	Kab. Jepara	814.380.324.000	814.380.324.000	67.487.370.000	67.487.370.000
210	Kab. Karanganyar	810.216.582.000	810.216.582.000	55.203.060.000	55.203.060.000
211	Kab. Kebumen	1.021.871.180.000	1.021.871.180.000	79.063.860.000	79.063.860.000
212	Kab. Kendal	788.134.078.000	788.134.078.000	59.393.690.000	41.931.490.000
213	Kab. Klaten	1.066.318.427.000	1.066.318.427.000	61.175.420.000	61.175.420.000
214	Kab. Kudus	719.406.935.000	719.406.935.000	52.208.880.000	52.208.880.000
215	Kab. Magelang	899.528.369.000	899.528.369.000	70.070.870.000	43.096.223.000
216	Kab. Pati	960.479.326.000	960.479.326.000	72.903.370.000	72.903.370.000
217	Kab. Pekalongan	768.500.117.000	768.500.117.000	60.587.590.000	60.587.590.000
218	Kab. Pemalang	931.426.998.000	931.426.998.000	71.402.250.000	63.504.568.000
219	Kab. Purbalingga	719.185.020.000	719.185.020.000	66.641.060.000	66.641.060.000
220	Kab. Purworejo	793.904.679.000	793.904.679.000	53.323.020.000	53.323.020.000
221	Kab. Rembang	640.273.360.000	640.273.360.000	56.771.470.000	42.098.910.000
222	Kab. Semarang	778.604.920.000	778.604.920.000	59.113.470.000	59.113.470.000
223	Kab. Sragen	869.155.545.000	869.155.545.000	61.857.560.000	61.857.560.000
224	Kab. Sukoharjo	763.462.900.000	763.462.900.000	53.124.680.000	53.124.680.000
225	Kab. Tegal	957.576.304.000	957.576.304.000	72.524.910.000	72.524.910.000
226	Kab. Temanggung	651.171.674.000	651.171.674.000	46.658.240.000	41.627.620.000
227	Kab. Wonogiri	917.476.557.000	917.476.557.000	75.705.890.000	75.705.890.000
228	Kab. Wonosobo	665.548.034.000	665.548.034.000	57.950.180.000	57.950.180.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
229	Kota Magelang	385.859.241.000	385.859.241.000	22.793.560.000	20.644.487.000
230	Kota Pekalongan	384.489.368.000	384.489.368.000	38.549.650.000	34.721.100.000
231	Kota Salatiga	358.331.867.000	358.331.867.000	28.398.410.000	16.958.760.000
232	Kota Semarang	1.054.002.569.000	1.054.002.569.000	49.976.740.000	14.993.022.000
233	Kota Surakarta	659.647.382.000	659.647.382.000	37.914.730.000	32.893.036.000
234	Kota Tegal	370.642.983.000	370.642.983.000	33.530.910.000	30.039.185.000
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**828.334.768.000**	**828.334.768.000**	**34.495.900.000**	**34.495.900.000**
236	Kab. Bantul	854.810.634.000	854.810.634.000	47.196.880.000	47.196.880.000
237	Kab. Gunung Kidul	779.069.238.000	779.069.238.000	65.283.610.000	59.793.058.000
238	Kab. Kulon Progo	594.978.790.000	594.978.790.000	52.894.140.000	52.894.140.000
239	Kab. Sleman	891.589.912.000	891.589.912.000	50.823.330.000	50.823.330.000
240	Kota Yogyakarta	597.212.209.000	597.212.209.000	6.220.630.000	6.220.630.000
241	**Provinsi Jawa Timur**	**1.632.648.287.000**	**1.632.648.287.000**	**85.644.430.000**	**85.644.430.000**
242	Kab. Bangkalan	778.024.112.000	778.024.112.000	105.241.400.000	105.241.400.000
243	Kab. Banyuwangi	1.154.495.171.000	1.154.495.171.000	76.997.760.000	76.997.760.000
244	Kab. Blitar	944.297.542.000	944.297.542.000	70.322.560.000	70.322.560.000
245	Kab. Bojonegoro	876.021.914.000	876.021.914.000	62.060.830.000	46.545.623.000
246	Kab. Bondowoso	752.776.704.000	752.776.704.000	80.710.600.000	80.710.600.000
247	Kab. Gresik	804.903.511.000	804.903.511.000	49.106.180.000	49.106.180.000
248	Kab. Jember	1.417.603.982.000	1.417.603.982.000	87.809.620.000	74.410.890.000
249	Kab. Jombang	920.097.938.000	920.097.938.000	58.289.380.000	43.717.035.000
250	Kab. Kediri	1.056.481.076.000	1.056.481.076.000	69.281.810.000	69.281.810.000
251	Kab. Lamongan	958.344.988.000	958.344.988.000	75.665.880.000	75.665.880.000
252	Kab. Lumajang	828.524.528.000	828.524.528.000	58.667.580.000	44.000.685.000
253	Kab. Madiun	734.152.390.000	734.152.390.000	51.129.000.000	51.129.000.000
254	Kab. Magetan	761.637.391.000	761.637.391.000	46.164.370.000	46.164.370.000
255	Kab. Malang	1.439.234.034.000	1.439.234.034.000	112.312.350.000	112.312.350.000
256	Kab. Mojokerto	832.266.682.000	832.266.682.000	52.117.700.000	35.577.547.000
257	Kab. Nganjuk	928.265.611.000	928.265.611.000	79.245.230.000	59.433.923.000
258	Kab. Ngawi	896.052.870.000	896.052.870.000	71.219.840.000	71.219.840.000
259	Kab. Pacitan	647.293.403.000	647.293.403.000	51.937.520.000	51.937.520.000
260	Kab. Pamekasan	702.610.217.000	702.610.217.000	97.071.780.000	97.071.780.000
261	Kab. Pasuruan	992.689.474.000	992.689.474.000	77.421.870.000	77.421.870.000
262	Kab. Ponorogo	890.922.311.000	890.922.311.000	65.307.550.000	65.307.550.000
263	Kab. Probolinggo	848.994.313.000	848.994.313.000	62.235.420.000	62.235.420.000
264	Kab. Sampang	683.242.704.000	683.242.704.000	105.384.510.000	105.384.510.000
265	Kab. Sidoarjo	1.104.580.340.000	1.104.580.340.000	54.281.080.000	54.281.080.000
266	Kab. Situbondo	692.549.026.000	692.549.026.000	81.427.290.000	81.427.290.000
267	Kab. Sumenep	917.539.019.000	917.539.019.000	79.219.770.000	79.219.770.000
268	Kab. Trenggalek	737.814.627.000	737.814.627.000	64.974.660.000	64.974.660.000
269	Kab. Tuban	849.399.312.000	849.399.312.000	49.173.770.000	49.173.770.000
270	Kab. Tulungagung	996.300.694.000	996.300.694.000	71.687.640.000	71.687.640.000
271	Kota Blitar	355.673.006.000	355.673.006.000	29.707.730.000	29.707.730.000
272	Kota Kediri	562.943.089.000	562.943.089.000	29.999.610.000	29.999.610.000
273	Kota Madiun	474.093.362.000	474.093.362.000	27.544.290.000	27.544.290.000
274	Kota Malang	746.686.937.000	746.686.937.000	30.315.710.000	30.315.710.000
275	Kota Mojokerto	354.452.407.000	354.452.407.000	21.279.540.000	19.389.310.000
276	Kota Pasuruan	353.127.853.000	353.127.853.000	25.890.580.000	25.890.580.000
277	Kota Probolinggo	414.534.284.000	414.534.284.000	32.341.470.000	32.341.470.000
278	Kota Surabaya	1.160.025.693.000	1.160.025.693.000	68.180.790.000	29.928.308.000
279	Kota Batu	374.362.261.000	374.362.261.000	25.376.230.000	23.431.815.000
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**1.144.712.840.000**	**1.144.712.840.000**	**74.172.390.000**	**74.172.390.000**
281	Kab. Bengkayang	457.245.355.000	457.245.355.000	91.999.300.000	84.828.811.000
282	Kab. Landak	534.166.873.000	534.166.873.000	88.711.460.000	88.711.460.000
283	Kab. Kapuas Hulu	782.050.975.000	782.050.975.000	121.191.660.000	121.191.660.000
284	Kab. Ketapang	898.337.135.000	898.337.135.000	123.395.170.000	123.395.170.000
285	Kab. Pontianak	463.983.726.000	463.983.726.000	48.281.810.000	48.281.810.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
286	Kab. Sambas	702.231.663.000	702.231.663.000	116.700.600.000	116.700.600.000
287	Kab. Sanggau	674.049.502.000	674.049.502.000	100.317.520.000	100.317.520.000
288	Kab. Sintang	738.622.011.000	738.622.011.000	132.045.410.000	132.045.410.000
289	Kota Pontianak	626.879.054.000	626.879.054.000	28.031.320.000	28.031.320.000
290	Kota Singkawang	431.527.888.000	431.527.888.000	61.795.550.000	61.795.550.000
291	Kab. Kayong Utara	343.376.301.000	343.376.301.000	61.345.910.000	61.345.910.000
292	Kab. Kubu Raya	627.894.391.000	627.894.391.000	98.923.710.000	98.923.710.000
293	Kab. Sekadau	386.021.907.000	386.021.907.000	77.332.990.000	77.332.990.000
294	Kab. Melawi	468.104.101.000	468.104.101.000	84.467.370.000	84.467.370.000
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.062.516.940.000**	**1.062.516.940.000**	**63.299.310.000**	**63.299.310.000**
296	Kab. Barito Selatan	504.292.137.000	504.292.137.000	39.197.280.000	39.197.280.000
297	Kab. Barito Utara	475.180.280.000	475.180.280.000	38.431.710.000	35.007.370.000
298	Kab. Kapuas	744.617.150.000	744.617.150.000	78.791.570.000	72.142.190.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	566.405.844.000	566.405.844.000	17.169.750.000	17.169.750.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	708.665.917.000	708.665.917.000	57.011.340.000	57.011.340.000
301	Kota Palangkaraya	539.535.616.000	539.535.616.000	43.773.450.000	43.773.450.000
302	Kab. Barito Timur	424.326.347.000	424.326.347.000	39.519.570.000	39.519.570.000
303	Kab. Murung Raya	545.932.782.000	545.932.782.000	-	-
304	Kab. Pulang Pisau	453.776.884.000	453.776.884.000	42.607.930.000	42.607.930.000
305	Kab. Gunung Mas	476.671.178.000	476.671.178.000	49.247.710.000	49.247.710.000
306	Kab. Lamandau	383.325.898.000	383.325.898.000	37.830.720.000	37.830.720.000
307	Kab. Sukamara	381.154.120.000	381.154.120.000	40.379.700.000	38.739.180.000
308	Kab. Katingan	579.301.377.000	579.301.377.000	1.960.720.000	1.960.720.000
309	Kab. Seruyan	513.570.135.000	513.570.135.000	70.199.510.000	70.199.510.000
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**683.511.441.000**	**683.511.441.000**	**41.553.540.000**	**41.553.540.000**
311	Kab. Banjar	590.526.945.000	590.526.945.000	27.497.900.000	27.497.900.000
312	Kab. Barito Kuala	490.244.084.000	490.244.084.000	99.896.120.000	99.896.120.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	452.522.473.000	452.522.473.000	49.613.620.000	49.613.620.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	453.312.619.000	453.312.619.000	48.210.820.000	48.210.820.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	415.479.351.000	415.479.351.000	62.093.770.000	62.093.770.000
316	Kab. Kotabaru	564.592.305.000	564.592.305.000	24.436.170.000	24.436.170.000
317	Kab. Tabalong	405.082.029.000	405.082.029.000	-	-
318	Kab. Tanah Laut	439.195.379.000	439.195.379.000	19.607.740.000	14.705.805.000
319	Kab. Tapin	383.383.301.000	383.383.301.000	36.980.660.000	36.980.660.000
320	Kota Banjarbaru	358.995.070.000	358.995.070.000	39.502.500.000	39.502.500.000
321	Kota Banjarmasin	631.124.460.000	631.124.460.000	47.044.150.000	47.044.150.000
322	Kab. Balangan	287.613.144.000	287.613.144.000	1.778.830.000	1.778.830.000
323	Kab. Tanah Bumbu	398.801.458.000	398.801.458.000	8.449.440.000	6.337.080.000
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**55.539.336.500**	**55.539.336.500**	**8.047.840.000**	**8.047.840.000**
325	Kab. Berau	471.929.720.000	471.929.720.000	6.068.990.000	1.820.697.000
326	Kab. Bulungan	326.787.105.000	326.787.105.000	5.979.760.000	4.484.820.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	150.245.858.000	150.245.858.000	70.261.370.000	52.696.028.000
328	Kab. Kutai Barat	599.731.060.000	599.731.060.000	104.100.920.000	104.100.920.000
329	Kab. Kutai Timur	506.528.289.000	506.528.289.000	12.067.290.000	12.067.290.000
330	Kab. Malinau	620.970.044.000	620.970.044.000	85.995.780.000	83.229.363.000
331	Kab. Nunukan	307.765.777.000	307.765.777.000	101.925.510.000	95.549.697.000
332	Kab. Pasir	301.950.343.000	301.950.343.000	15.126.580.000	11.344.935.000
333	Kota Balikpapan	427.133.126.000	427.133.126.000	23.186.930.000	23.186.930.000
334	Kota Bontang	140.109.328.000	140.109.328.000	-	-
335	Kab. Tana Tidung	133.386.322.000	133.386.322.000	7.580.720.000	7.580.720.000
336	Kota Samarinda	579.634.968.000	579.634.968.000	16.596.220.000	8.994.126.000
337	Kota Tarakan	249.444.302.000	249.444.302.000	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	194.579.185.000	194.579.185.000	4.588.340.000	1.376.502.000
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**885.684.277.000**	**885.684.277.000**	**54.346.140.000**	**54.346.140.000**
340	Kab. Bolaang Mongondow	437.804.387.000	437.804.387.000	58.766.200.000	58.766.200.000
341	Kab. Minahasa	550.100.008.000	550.100.008.000	61.893.640.000	61.893.640.000
342	Kab. Sangihe	433.201.221.000	433.201.221.000	85.220.310.000	85.220.310.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
343	Kota Bitung	421.672.562.000	421.672.562.000	43.453.920.000	43.453.920.000
344	Kota Manado	647.565.931.000	647.565.931.000	51.989.870.000	51.989.870.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	393.729.032.000	393.729.032.000	99.212.170.000	99.212.170.000
346	Kab. Minahasa Selatan	435.848.663.000	435.848.663.000	47.635.570.000	47.635.570.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	355.916.109.000	355.916.109.000	43.474.510.000	43.474.510.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	315.409.485.000	315.409.485.000	55.199.730.000	55.199.730.000
349	Kota Kotamubagu	311.773.832.000	311.773.832.000	34.342.900.000	34.342.900.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	254.509.410.000	254.509.410.000	35.476.390.000	35.476.390.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	267.064.711.000	267.064.711.000	38.874.620.000	38.874.620.000
352	Kota Tomohon	330.892.646.000	330.892.646.000	41.782.340.000	41.782.340.000
353	Kab. Minahasa Utara	395.558.587.000	395.558.587.000	51.800.070.000	51.800.070.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	288.250.888.000	288.250.888.000	34.718.130.000	34.718.130.000
355	**Provinsi Gorontalo**	**652.284.261.000**	**652.284.261.000**	**43.013.530.000**	**43.013.530.000**
356	Kab. Boalemo	341.152.435.000	341.152.435.000	66.339.520.000	66.339.520.000
357	Kab. Gorontalo	517.229.988.000	517.229.988.000	60.926.730.000	60.926.730.000
358	Kota Gorontalo	419.154.808.000	419.154.808.000	37.484.840.000	34.999.805.000
359	Kab. Pohuwato	390.979.131.000	390.979.131.000	69.787.410.000	69.787.410.000
360	Kab. Gorontalo Utara	288.205.298.000	288.205.298.000	64.698.890.000	64.698.890.000
361	Kab. Bone Bolango	367.000.042.000	367.000.042.000	43.008.850.000	43.008.850.000
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**994.658.685.000**	**994.658.685.000**	**65.949.350.000**	**65.949.350.000**
363	Kab. Banggai	711.134.461.000	711.134.461.000	68.285.040.000	68.285.040.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	446.340.738.000	446.340.738.000	74.232.960.000	74.232.960.000
365	Kab. Buol	405.310.339.000	405.310.339.000	50.566.760.000	50.566.760.000
366	Kab. Toli-Toli	487.396.299.000	487.396.299.000	68.020.880.000	68.020.880.000
367	Kab. Donggala	523.660.657.000	523.660.657.000	80.352.470.000	80.352.470.000
368	Kab. Morowali	615.422.867.000	615.422.867.000	72.035.720.000	72.035.720.000
369	Kab. Poso	583.806.859.000	583.806.859.000	73.980.930.000	73.980.930.000
370	Kota Palu	575.235.328.000	575.235.328.000	45.042.350.000	45.042.350.000
371	Kab. Parigi Moutong	588.502.963.000	588.502.963.000	82.492.140.000	82.492.140.000
372	Kab. Sigi	503.990.769.000	503.990.769.000	56.981.160.000	56.981.160.000
373	Kab. Tojo Una Una	426.316.322.000	426.316.322.000	71.661.770.000	71.661.770.000
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**1.089.771.438.000**	**1.089.771.438.000**	**64.264.340.000**	**64.264.340.000**
375	Kab. Bantaeng	379.463.356.000	379.463.356.000	53.714.160.000	53.714.160.000
376	Kab. Barru	417.942.379.000	417.942.379.000	43.713.440.000	40.354.837.000
377	Kab. Bone	867.813.851.000	867.813.851.000	88.244.460.000	88.244.460.000
378	Kab. Bulukumba	591.388.184.000	591.388.184.000	65.051.440.000	65.051.440.000
379	Kab. Enrekang	436.542.180.000	436.542.180.000	48.908.340.000	48.908.340.000
380	Kab. Gowa	670.579.761.000	670.579.761.000	67.662.600.000	67.662.600.000
381	Kab. Jeneponto	494.087.427.000	494.087.427.000	76.294.860.000	76.294.860.000
382	Kab. Luwu	542.118.008.000	542.118.008.000	59.690.400.000	59.690.400.000
383	Kab. Luwu Utara	512.644.776.000	512.644.776.000	53.187.510.000	53.187.510.000
384	Kab. Maros	540.383.322.000	540.383.322.000	51.205.510.000	51.205.510.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	566.929.217.000	566.929.217.000	78.201.060.000	78.201.060.000
386	Kab. Pinrang	574.244.531.000	574.244.531.000	63.154.020.000	63.154.020.000
387	Kab. Selayar	421.256.593.000	421.256.593.000	75.158.860.000	75.158.860.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	499.699.753.000	499.699.753.000	41.831.330.000	41.831.330.000
389	Kab. Sinjai	474.528.814.000	474.528.814.000	46.854.480.000	46.854.480.000
390	Kab. Soppeng	517.805.122.000	517.805.122.000	49.276.640.000	49.276.640.000
391	Kab. Takalar	479.073.701.000	479.073.701.000	48.956.910.000	48.956.910.000
392	Kab. Tana Toraja	444.741.329.000	444.741.329.000	55.955.450.000	55.955.450.000
393	Kab. Wajo	592.275.827.000	592.275.827.000	73.454.700.000	73.454.700.000
394	Kota Pare-pare	384.096.063.000	384.096.063.000	45.798.230.000	45.798.230.000
395	Kab. Toraja Utara	404.597.214.000	404.597.214.000	85.464.350.000	85.464.350.000
396	Kota Makassar	1.033.583.903.000	1.033.583.903.000	40.886.880.000	40.886.880.000
397	Kota Palopo	408.527.791.000	408.527.791.000	39.243.130.000	39.243.130.000
398	Kab. Luwu Timur	410.974.651.000	410.974.651.000	38.909.600.000	38.909.600.000
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**685.497.592.000**	**685.497.592.000**	**47.017.000.000**	**47.017.000.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
400	Kab. Majene	416.986.177.000	416.986.177.000	70.933.520.000	70.933.520.000
401	Kab. Mamuju	587.833.771.000	587.833.771.000	101.611.560.000	101.611.560.000
402	Kab. Polewali Mandar	555.943.291.000	555.943.291.000	81.957.270.000	81.957.270.000
403	Kab. Mamasa	410.741.106.000	410.741.106.000	95.116.040.000	95.116.040.000
404	Kab. Mamuju Utara	338.786.109.000	338.786.109.000	55.477.610.000	55.477.610.000
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**981.035.741.000**	**981.035.741.000**	**53.266.770.000**	**53.266.770.000**
406	Kab. Buton	535.326.605.000	535.326.605.000	85.447.460.000	85.447.460.000
407	Kab. Konawe	613.042.674.000	613.042.674.000	68.246.040.000	68.246.040.000
408	Kab. Kolaka	613.742.503.000	613.742.503.000	60.384.490.000	60.384.490.000
409	Kab. Muna	635.053.318.000	635.053.318.000	105.851.250.000	105.851.250.000
410	Kota Kendari	555.693.881.000	555.693.881.000	54.258.370.000	54.258.370.000
411	Kota Bau-bau	427.509.763.000	427.509.763.000	36.286.080.000	36.286.080.000
412	Kab. Konawe Selatan	538.654.988.000	538.654.988.000	97.978.590.000	97.978.590.000
413	Kab. Bombana	382.986.680.000	382.986.680.000	71.254.680.000	71.254.680.000
414	Kab. Konawe Utara	417.340.323.000	417.340.323.000	53.616.950.000	53.616.950.000
415	Kab. Buton Utara	329.371.283.000	329.371.283.000	56.514.210.000	56.514.210.000
416	Kab. Wakatobi	353.873.348.000	353.873.348.000	61.264.640.000	61.264.640.000
417	Kab. Kolaka Utara	385.721.156.000	385.721.156.000	58.867.150.000	58.867.150.000
418	**Provinsi Bali**	**792.365.876.000**	**792.365.876.000**	**43.835.380.000**	**43.835.380.000**
419	Kab. Badung	372.625.383.000	372.625.383.000	560.800.000	560.800.000
420	Kab. Bangli	450.812.694.000	450.812.694.000	41.703.550.000	38.687.560.000
421	Kab. Buleleng	796.419.224.000	796.419.224.000	67.312.020.000	67.312.020.000
422	Kab. Gianyar	609.293.266.000	609.293.266.000	45.158.740.000	45.158.740.000
423	Kab. Jembrana	450.919.726.000	450.919.726.000	45.403.270.000	45.403.270.000
424	Kab. Karangasem	563.981.785.000	563.981.785.000	51.209.640.000	51.209.640.000
425	Kab. Klungkung	444.174.019.000	444.174.019.000	43.711.680.000	32.783.760.000
426	Kab. Tabanan	663.156.595.000	663.156.595.000	48.921.470.000	48.921.470.000
427	Kota Denpasar	580.807.702.000	580.807.702.000	10.791.890.000	8.093.918.000
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**859.353.026.000**	**859.353.026.000**	**57.407.690.000**	**57.407.690.000**
429	Kab. Bima	698.561.969.000	698.561.969.000	89.626.810.000	89.626.810.000
430	Kab. Dompu	470.825.402.000	470.825.402.000	66.320.570.000	66.320.570.000
431	Kab. Lombok Barat	612.621.760.000	612.621.760.000	76.993.640.000	76.993.640.000
432	Kab. Lombok Tengah	793.651.563.000	793.651.563.000	94.048.350.000	94.048.350.000
433	Kab. Lombok Timur	932.462.555.000	932.462.555.000	106.989.740.000	106.989.740.000
434	Kab. Sumbawa	647.640.513.000	647.640.513.000	79.836.780.000	79.836.780.000
435	Kota Mataram	500.043.553.000	500.043.553.000	35.346.060.000	35.346.060.000
436	Kab. Lombok Utara	314.808.074.000	314.808.074.000	65.187.990.000	65.187.990.000
437	Kota Bima	377.377.812.000	377.377.812.000	40.879.460.000	40.879.460.000
438	Kab. Sumbawa Barat	272.959.410.000	272.959.410.000	46.061.790.000	46.061.790.000
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.003.991.703.000**	**1.003.991.703.000**	**77.822.660.000**	**77.822.660.000**
440	Kab. Alor	461.359.979.000	461.359.979.000	86.078.800.000	86.078.800.000
441	Kab. Belu	578.912.159.000	578.912.159.000	106.224.160.000	106.224.160.000
442	Kab. Ende	506.181.070.000	506.181.070.000	67.428.730.000	60.164.168.000
443	Kab. Flores Timur	477.818.636.000	477.818.636.000	65.608.070.000	65.608.070.000
444	Kab. Kupang	534.827.407.000	534.827.407.000	78.975.590.000	78.975.590.000
445	Kab. Lembata	352.353.778.000	352.353.778.000	52.767.600.000	52.767.600.000
446	Kab. Manggarai	452.287.758.000	452.287.758.000	91.337.250.000	91.337.250.000
447	Kab. Ngada	350.219.646.000	350.219.646.000	61.487.580.000	61.487.580.000
448	Kab. Sikka	498.499.639.000	498.499.639.000	63.735.450.000	47.801.588.000
449	Kab. Sumba Barat	307.533.200.000	307.533.200.000	58.427.720.000	58.427.720.000
450	Kab. Sumba Timur	515.736.111.000	515.736.111.000	68.947.090.000	68.947.090.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	606.976.388.000	606.976.388.000	97.091.900.000	97.091.900.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	459.487.080.000	459.487.080.000	83.683.070.000	62.762.303.000
453	Kota Kupang	527.785.630.000	527.785.630.000	56.499.880.000	56.499.880.000
454	Kab. Rote Ndao	345.248.896.000	345.248.896.000	83.154.930.000	83.154.930.000
455	Kab. Nagekeo	334.481.490.000	334.481.490.000	66.370.220.000	37.686.309.000
456	Kab. Sumba Tengah	253.664.988.000	253.664.988.000	46.537.040.000	46.537.040.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
457	Kab. Sumba Barat Daya	363.108.797.000	363.108.797.000	71.572.380.000	71.572.380.000
458	Kab. Manggarai Timur	382.067.746.000	382.067.746.000	83.454.990.000	83.454.990.000
459	Kab. Sabu Raijua	270.624.355.000	270.624.355.000	61.346.160.000	61.346.160.000
460	Kab. Manggarai Barat	382.403.558.000	382.403.558.000	59.865.250.000	59.865.250.000
461	**Provinsi Maluku**	**897.657.192.000**	**897.657.192.000**	**53.424.880.000**	**53.424.880.000**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	412.152.331.000	412.152.331.000	68.151.500.000	68.151.500.000
463	Kab. Maluku Tengah	766.730.637.000	766.730.637.000	90.812.370.000	90.812.370.000
464	Kab. Maluku Tenggara	376.516.763.000	376.516.763.000	57.973.600.000	57.973.600.000
465	Kab. Pulau Buru	356.075.091.000	356.075.091.000	52.276.360.000	52.276.360.000
466	Kota Ambon	551.507.941.000	551.507.941.000	49.531.570.000	49.531.570.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	441.210.135.000	441.210.135.000	56.896.970.000	56.896.970.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	366.782.861.000	366.782.861.000	64.827.370.000	64.827.370.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	402.856.361.000	402.856.361.000	88.251.950.000	66.188.963.000
470	Kab. Buru Selatan	294.019.779.000	294.019.779.000	61.799.700.000	61.799.700.000
471	Kab. Kepulauan Aru	375.944.887.000	375.944.887.000	71.720.550.000	71.720.550.000
472	Kota Tual	265.698.683.000	265.698.683.000	36.233.490.000	36.233.490.000
473	**Provinsi Maluku Utara**	**772.591.162.000**	**772.591.162.000**	**69.688.380.000**	**69.688.380.000**
474	Kab. Halmahera Tengah	353.060.178.000	353.060.178.000	68.003.760.000	68.003.760.000
475	Kab. Halmahera Barat	364.686.843.000	364.686.843.000	68.523.460.000	68.523.460.000
476	Kota Ternate	462.645.746.000	462.645.746.000	44.427.830.000	44.427.830.000
477	Kab. Halmahera Timur	337.707.086.000	337.707.086.000	71.106.860.000	71.106.860.000
478	Kota Tidore Kepulauan	443.177.446.000	443.177.446.000	55.218.880.000	55.218.880.000
479	Kab. Kepulauan Sula	408.687.131.000	408.687.131.000	70.391.160.000	67.620.820.000
480	Kab. Pulau Morotai	312.486.619.000	312.486.619.000	84.022.870.000	84.022.870.000
481	Kab. Halmahera Selatan	479.627.293.000	479.627.293.000	67.665.710.000	67.665.710.000
482	Kab. Halmahera Utara	366.797.961.000	366.797.961.000	67.616.060.000	67.616.060.000
483	Kab. Yalimo	488.582.116.000	488.582.116.000	117.293.840.000	117.293.840.000
484	Kab. Lanny Jaya	517.505.342.000	517.505.342.000	140.991.160.000	140.991.160.000
485	**Provinsi Papua**	**1.889.267.850.000**	**1.889.267.850.000**	**133.897.240.000**	**133.897.240.000**
486	Kab. Biak Numfor	464.681.810.000	464.681.810.000	80.027.610.000	80.027.610.000
487	Kab. Jayapura	533.111.084.000	533.111.084.000	53.194.590.000	53.194.590.000
488	Kab. Jayawijaya	584.835.644.000	584.835.644.000	132.718.040.000	132.718.040.000
489	Kab. Merauke	1.039.460.880.000	1.039.460.880.000	234.755.820.000	176.066.865.000
490	Kab. Mimika	506.661.741.000	506.661.741.000	80.363.550.000	80.363.550.000
491	Kab. Nabire	545.482.656.000	545.482.656.000	75.724.660.000	75.724.660.000
492	Kab. Paniai	440.647.916.000	440.647.916.000	98.630.620.000	98.630.620.000
493	Kab. Puncak Jaya	533.372.754.000	533.372.754.000	113.752.860.000	113.752.860.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	389.582.165.000	389.582.165.000	53.233.660.000	53.233.660.000
495	Kota Jayapura	586.198.486.000	586.198.486.000	61.325.080.000	61.325.080.000
496	Kab. Sarmi	566.914.711.000	566.914.711.000	63.366.250.000	63.366.250.000
497	Kab. Keerom	432.257.068.000	432.257.068.000	101.174.350.000	101.174.350.000
498	Kab. Yahukimo	556.257.151.000	556.257.151.000	104.045.520.000	104.045.520.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	695.877.613.000	695.877.613.000	181.490.630.000	181.490.630.000
500	Kab. Tolikara	507.270.132.000	507.270.132.000	124.318.390.000	124.318.390.000
501	Kab. Boven Digoel	660.845.140.000	660.845.140.000	86.430.550.000	83.755.255.000
502	Kab. Mappi	639.823.176.000	639.823.176.000	112.954.000.000	84.715.501.000
503	Kab. Asmat	744.492.145.000	744.492.145.000	89.927.150.000	89.927.150.000
504	Kab. Waropen	416.243.438.000	416.243.438.000	58.430.750.000	58.430.750.000
505	Kab. Mamberamo Raya	605.620.692.000	605.620.692.000	77.118.370.000	77.118.370.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	491.012.731.000	491.012.731.000	96.755.500.000	96.755.500.000
507	Kab. Nduga	439.888.368.000	439.888.368.000	96.606.490.000	96.606.490.000
508	Kab. Dogiyai	388.183.045.000	388.183.045.000	73.219.420.000	73.219.420.000
509	Kab. Intan Jaya	557.179.679.000	557.179.679.000	109.299.540.000	109.299.540.000
510	Kab. Puncak	624.649.053.000	624.649.053.000	136.096.060.000	136.096.060.000
511	Kab. Deiyai	336.371.266.000	336.371.266.000	88.225.020.000	88.225.020.000
512	Kab. Supiori	372.146.683.000	372.146.683.000	74.478.760.000	74.478.760.000
513	**Provinsi Papua Barat**	**1.064.872.637.000**	**1.064.872.637.000**	**64.931.200.000**	**64.931.200.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
514	Kab. Sorong	465.669.519.000	465.669.519.000	89.878.600.000	89.878.600.000
515	Kab. Manokwari	614.096.216.000	614.096.216.000	50.113.510.000	50.113.510.000
516	Kab. Fak Fak	541.068.761.000	541.068.761.000	43.082.050.000	43.082.050.000
517	Kota Sorong	392.494.592.000	392.494.592.000	51.340.410.000	51.340.410.000
518	Kab. Sorong Selatan	335.483.025.000	335.483.025.000	66.786.960.000	66.786.960.000
519	Kab. Raja Ampat	486.042.052.000	486.042.052.000	82.717.370.000	82.717.370.000
520	Kab. Teluk Bintuni	550.845.412.000	550.845.412.000	84.695.770.000	84.695.770.000
521	Kab. Teluk Wondama	351.726.364.000	351.726.364.000	67.280.430.000	67.280.430.000
522	Kab. Tambrauw	368.794.108.000	368.794.108.000	102.606.730.000	102.606.730.000
523	Kab. Maybrat	353.978.783.000	353.978.783.000	84.890.000.000	84.890.000.000
524	Kab. Kaimana	499.597.980.000	499.597.980.000	58.919.810.000	58.919.810.000
525	**Dana Cadangan**	-	-	-	-
	JUMLAH	**311.139.289.165.000**	**311.139.289.165.000**	**31.697.143.000.000**	**30.752.380.876.800**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
TAHUN ANGGARAN 2013 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**6.678.310.153.000**	**6.222.785.783.000**	**434.569.876.000**	-	**6.657.355.659.000**
2	Kab. Aceh Barat	40.305.084.000	-	40.305.084.000	-	40.305.084.000
3	Kab. Aceh Besar	86.578.121.000	-	86.578.121.000	-	86.578.121.000
4	Kab. Aceh Selatan	61.224.595.000	-	61.224.595.000	-	61.224.595.000
5	Kab. Aceh Singkil	14.187.161.000	-	14.187.161.000	-	14.187.161.000
6	Kab. Aceh Tengah	47.931.831.000	-	47.931.831.000	-	47.931.831.000
7	Kab. Aceh Tenggara	38.217.486.000	-	38.217.486.000	-	38.217.486.000
8	Kab. Aceh Timur	58.516.506.000	-	58.516.506.000	-	58.516.506.000
9	Kab. Aceh Utara	101.909.263.000	-	101.909.263.000	-	101.909.263.000
10	Kab. Bireun	112.635.805.000	-	112.635.805.000	-	112.635.805.000
11	Kab. Pidie	105.931.446.000	-	105.931.446.000	-	105.931.446.000
12	Kab. Simeulue	14.832.106.000	-	14.832.106.000	-	14.832.106.000
13	Kota Banda Aceh	130.574.347.000	-	130.574.347.000	-	130.574.347.000
14	Kota Sabang	13.340.670.000	-	13.340.670.000	-	13.340.670.000
15	Kota Langsa	47.560.478.000	-	47.560.478.000	-	47.560.478.000
16	Kota Lhokseumawe	44.979.106.000	-	44.979.106.000	-	44.979.106.000
17	Kab. Nagan Raya	28.671.377.000	-	28.671.377.000	-	28.671.377.000
18	Kab. Aceh Jaya	18.415.962.000	-	18.415.962.000	-	18.415.962.000
19	Kab. Pidie Jaya	42.621.105.000	-	42.621.105.000	-	42.621.105.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	37.554.115.000	-	37.554.115.000	-	37.554.115.000
21	Kab. Gayo Lues	15.047.923.000	-	15.047.923.000	-	15.047.923.000
22	Kab. Aceh Tamiang	51.336.590.000	-	51.336.590.000	-	51.336.590.000
23	Kab. Bener Meriah	31.249.052.000	-	31.249.052.000	-	31.249.052.000
24	Kota Subulussalam	12.739.991.000	-	12.739.991.000	-	12.739.991.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**1.607.068.621.000**	-	**1.543.316.224.500**	-	**1.543.316.224.500**
26	Kab. Asahan	106.929.135.000	-	106.929.135.000	-	106.929.135.000
27	Kab. Dairi	64.290.838.000	-	64.290.838.000	-	64.290.838.000
28	Kab. Deli Serdang	265.347.103.500	-	265.347.103.500	-	265.347.103.500
29	Kab. Tanah Karo	83.419.737.000	-	83.419.737.000	-	83.419.737.000
30	Kab. Labuhan Batu	68.633.944.000	-	68.633.944.000	-	68.633.944.000
31	Kab. Langkat	172.223.013.000	-	172.223.013.000	-	172.223.013.000
32	Kab. Mandailing Natal	96.618.337.000	-	96.618.337.000	-	96.618.337.000
33	Kab. Nias	17.400.751.000	-	17.400.751.000	-	17.400.751.000
34	Kab. Simalungun	183.715.261.000	-	183.715.261.000	-	183.715.261.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	52.334.306.000	-	52.334.306.000	-	52.334.306.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	61.952.769.000	-	61.952.769.000	-	61.952.769.000
37	Kab. Tapanuli Utara	116.344.568.000	-	116.344.568.000	-	116.344.568.000
38	Kab. Toba Samosir	65.204.719.000	-	65.204.719.000	-	65.204.719.000
39	Kota Binjai	74.039.384.000	-	74.039.384.000	-	74.039.384.000
40	Kota Medan	363.758.805.000	-	363.758.805.000	-	363.758.805.000
41	Kota Pematang Siantar	81.710.841.000	-	81.710.841.000	-	81.710.841.000
42	Kota Sibolga	31.051.518.000	-	31.051.518.000	-	31.051.518.000
43	Kota Tanjung Balai	29.544.175.000	-	29.544.175.000	-	29.544.175.000
44	Kab. Batu Bara	67.184.396.000	-	67.184.396.000	-	67.184.396.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	46.108.935.000	-	46.108.935.000	-	46.108.935.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	33.868.744.000	-	33.868.744.000	-	33.868.744.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	27.399.774.000	-	27.399.774.000	-	27.399.774.000
48	Kab. Padang Lawas	26.043.803.000	-	26.043.803.000	-	26.043.803.000
49	Kab. Nias Utara	15.218.449.000	-	15.218.449.000	-	15.218.449.000
50	Kab. Nias Barat	11.556.367.000	-	11.556.367.000	-	11.556.367.000
51	Kota Tebing Tinggi	49.035.913.000	-	49.035.913.000	-	49.035.913.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
52	Kota Padang Sidempuan	68.806.870.000	-	68.806.870.000	-	68.806.870.000
53	Kab. Pakpak Bharat	12.249.699.000	-	12.249.699.000	-	12.249.699.000
54	Kab. Nias Selatan	16.724.978.000	-	9.226.598.000	-	9.226.598.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	57.409.487.000	-	57.409.487.000	-	57.409.487.000
56	Kab. Serdang Bedagai	113.773.826.000	-	113.773.826.000	-	113.773.826.000
57	Kab. Samosir	39.612.415.500	-	39.612.415.500	-	39.612.415.500
58	Kota Gunung sitoli	31.562.729.000	-	31.562.729.000	-	31.562.729.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**561.355.320.000**	**-**	**537.331.622.500**	**-**	**537.331.622.500**
60	Kab. Limapuluh Kota	118.584.707.000	-	118.584.707.000	-	118.584.707.000
61	Kab. Agam	155.456.003.000	-	155.456.003.000	-	155.456.003.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	11.607.190.000	-	11.607.190.000	-	11.607.190.000
63	Kab. Padang Pariaman	128.665.973.000	-	128.665.973.000	-	128.665.973.000
64	Kab. Pasaman	74.306.893.000	-	74.306.893.000	-	74.306.893.000
65	Kab. Pesisir Selatan	126.206.867.000	-	126.206.867.000	-	126.206.867.000
66	Kab. Sijunjung	56.771.446.000	-	56.771.446.000	-	56.771.446.000
67	Kab. Solok	107.854.062.000	-	107.854.062.000	-	107.854.062.000
68	Kab. Tanah Datar	140.083.462.000	-	140.083.462.000	-	140.083.462.000
69	Kota Bukit Tinggi	49.740.773.000	-	49.740.773.000	-	49.740.773.000
70	Kota Padang Panjang	28.620.181.000	-	28.620.181.000	-	28.620.181.000
71	Kota Padang	264.220.977.000	-	264.220.977.000	-	264.220.977.000
72	Kota Payakumbuh	54.351.328.000	-	54.351.328.000	-	54.351.328.000
73	Kota Sawahlunto	31.421.831.000	-	31.421.831.000	-	31.421.831.000
74	Kota Solok	36.191.549.000	-	36.191.549.000	-	36.191.549.000
75	Kota Pariaman	41.273.913.000	-	41.273.913.000	-	41.273.913.000
76	Kab. Pasaman Barat	67.231.631.000	-	67.231.631.000	-	67.231.631.000
77	Kab. Dharmasraya	43.740.254.000	-	43.740.254.000	-	43.740.254.000
78	Kab. Solok Selatan	38.039.801.000	-	38.039.801.000	-	38.039.801.000
79	**Provinsi Riau**	**659.053.308.000**	**-**	**638.919.855.500**	**-**	**638.919.855.500**
80	Kab. Bengkalis	89.444.556.000	-	89.444.556.000	-	89.444.556.000
81	Kab. Indragiri Hilir	82.203.267.000	-	82.203.267.000	-	82.203.267.000
82	Kab. Indragiri Hulu	73.184.135.000	-	73.184.135.000	-	73.184.135.000
83	Kab. Kampar	132.654.651.000	-	132.654.651.000	-	132.654.651.000
84	Kab. Kuantan Singingi	75.994.936.000	-	75.994.936.000	-	75.994.936.000
85	Kab. Pelalawan	43.211.821.000	-	43.211.821.000	-	43.211.821.000
86	Kab. Rokan Hilir	48.727.854.000	-	48.727.854.000	-	48.727.854.000
87	Kab. Rokan Hulu	62.268.930.000	-	62.268.930.000	-	62.268.930.000
88	Kab. Siak	61.409.943.000	-	61.409.943.000	-	61.409.943.000
89	Kota Dumai	49.112.463.000	-	49.112.463.000	-	49.112.463.000
90	Kota Pekanbaru	160.439.428.000	-	160.439.428.000	-	160.439.428.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	27.467.950.000	-	27.467.950.000	-	27.467.950.000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**188.219.503.000**	**-**	**182.025.258.000**	**-**	**182.025.258.000**
93	Kab. Bintan	28.406.592.000	-	28.406.592.000	-	28.406.592.000
94	Kab. Natuna	14.391.609.000	-	14.391.609.000	-	14.391.609.000
95	Kab. Karimun	39.082.728.000	-	39.082.728.000	-	39.082.728.000
96	Kota Batam	48.795.612.000	-	48.795.612.000	-	48.795.612.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	6.383.516.000	-	6.383.516.000	-	6.383.516.000
98	Kota Tanjung Pinang	44.216.538.000	-	44.216.538.000	-	44.216.538.000
99	Kab. Lingga	19.357.670.000	-	19.357.670.000	-	19.357.670.000
100	**Provinsi Jambi**	**341.287.106.000**	**-**	**326.855.626.000**	**-**	**326.855.626.000**
101	Kab. Batanghari	51.176.578.000	-	51.176.578.000	-	51.176.578.000
102	Kab. Bungo	75.203.903.000	-	75.203.903.000	-	75.203.903.000
103	Kab. Kerinci	78.244.689.000	-	78.244.689.000	-	78.244.689.000
104	Kab. Merangin	73.245.824.000	-	73.245.824.000	-	73.245.824.000
105	Kab. Muaro Jambi	66.144.659.000	-	66.144.659.000	-	66.144.659.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
106	Kab. Sarolangun	52.764.245.000	-	52.764.245.000	-	52.764.245.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	49.053.348.000	-	49.053.348.000	-	49.053.348.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	44.065.391.000	-	44.065.391.000	-	44.065.391.000
109	Kab. Tebo	57.669.720.000	-	57.669.720.000	-	57.669.720.000
110	Kota Jambi	138.799.981.000	-	138.799.981.000	-	138.799.981.000
111	Kota Sungai Penuh	46.448.539.000	-	46.448.539.000	-	46.448.539.000
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**813.335.450.000**	**-**	**783.088.634.654**	**-**	**783.088.634.654**
113	Kab. Lahat	91.786.514.000	-	91.786.514.000	-	91.786.514.000
114	Kab. Musi Banyuasin	71.000.789.000	-	71.000.789.000	-	71.000.789.000
115	Kab. Musi Rawas	63.684.971.000	-	63.684.971.000	-	63.684.971.000
116	Kab. Muara Enim	106.727.452.000	-	106.727.452.000	-	106.727.452.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	92.278.035.000	-	92.278.035.000	-	92.278.035.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	68.762.196.000	-	68.762.196.000	-	68.762.196.000
119	Kota Palembang	384.274.694.750	-	384.274.694.750	-	384.274.694.750
120	Kota Pagar Alam	31.204.544.000	-	31.204.544.000	-	31.204.544.000
121	Kota Lubuk Linggau	53.026.436.000	-	53.026.436.000	-	53.026.436.000
122	Kota Prabumulih	42.055.217.000	-	42.055.217.000	-	42.055.217.000
123	Kab. Empat Lawang	23.145.847.000	-	23.145.847.000	-	23.145.847.000
124	Kab. Banyuasin	94.726.287.000	-	94.726.287.000	-	94.726.287.000
125	Kab. Ogan Ilir	72.037.812.000	-	72.037.812.000	-	72.037.812.000
126	Kab. OKU Timur	87.026.756.000	-	87.026.756.000	-	87.026.756.000
127	Kab. OKU Selatan	34.327.964.000	-	34.327.964.000	-	34.327.964.000
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**131.190.220.000**	**-**	**126.509.882.500**	**-**	**126.509.882.500**
129	Kab. Bangka	74.284.603.000	-	74.284.603.000	-	74.284.603.000
130	Kab. Belitung	33.816.863.000	-	33.816.863.000	-	33.816.863.000
131	Kota Pangkal Pinang	38.203.724.000	-	38.203.724.000	-	38.203.724.000
132	Kab. Bangka Selatan	21.884.106.000	-	21.884.106.000	-	21.884.106.000
133	Kab. Bangka Tengah	24.649.801.000	-	24.649.801.000	-	24.649.801.000
134	Kab. Bangka Barat	21.825.254.500	-	21.825.254.500	-	21.825.254.500
135	Kab. Belitung Timur	22.708.442.000	-	22.708.442.000	-	22.708.442.000
136	**Provinsi Bengkulu**	**200.671.450.000**	**-**	**192.774.237.500**	**-**	**192.774.237.500**
137	Kab. Bengkulu Selatan	56.437.585.000	-	56.437.585.000	-	56.437.585.000
138	Kab. Bengkulu Utara	67.463.489.000	-	67.463.489.000	-	67.463.489.000
139	Kab. Rejang Lebong	64.055.834.000	-	64.055.834.000	-	64.055.834.000
140	Kota Bengkulu	89.041.181.000	-	89.041.181.000	-	89.041.181.000
141	Kab. Kaur	29.333.569.000	-	29.333.569.000	-	29.333.569.000
142	Kab. Seluma	41.191.020.000	-	41.191.020.000	-	41.191.020.000
143	Kab. Mukomuko	31.302.259.000	-	31.302.259.000	-	31.302.259.000
144	Kab. Lebong	25.159.637.000	-	25.159.637.000	-	25.159.637.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	31.900.956.000	-	31.900.956.000	-	31.900.956.000
146	Kab. Kepahiang	33.492.117.000	-	33.492.117.000	-	33.492.117.000
147	**Provinsi Lampung**	**776.807.080.000**	**-**	**737.404.991.000**	**-**	**737.404.991.000**
148	Kab. Lampung Barat	97.806.557.000	-	97.806.557.000	-	97.806.557.000
149	Kab. Lampung Selatan	139.295.162.000	-	139.295.162.000	-	139.295.162.000
150	Kab. Lampung Tengah	247.981.062.000	-	247.981.062.000	-	247.981.062.000
151	Kab. Lampung Utara	137.118.066.000	-	137.118.066.000	-	137.118.066.000
152	Kab. Lampung Timur	200.098.694.000	-	200.098.694.000	-	200.098.694.000
153	Kab. Tanggamus	104.494.794.000	-	104.494.794.000	-	104.494.794.000
154	Kab. Tulang Bawang	44.726.552.000	-	44.726.552.000	-	44.726.552.000
155	Kab. Way Kanan	74.230.856.000	-	74.230.856.000	-	74.230.856.000
156	Kab. Pesawaran	83.876.148.000	-	83.876.148.000	-	83.876.148.000
157	Kab. Pringsewu	121.363.131.000	-	121.363.131.000	-	121.363.131.000
158	Kab. Mesuji	19.483.603.000	-	19.483.603.000	-	19.483.603.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	46.973.736.000	-	46.973.736.000	-	46.973.736.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
160	Kota Bandar Lampung	249.688.940.000	-	249.688.940.000	-	249.688.940.000
161	Kota Metro	69.290.881.000	-	69.290.881.000	-	69.290.881.000
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**2.187.700.615.000**	**-**	**2.132.792.063.500**	**-**	**2.132.792.063.500**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**4.167.073.410.000**	**-**	**3.953.392.746.000**	**-**	**3.953.392.746.000**
164	Kab. Bandung	428.493.318.000	-	428.493.318.000	-	428.493.318.000
165	Kab. Bekasi	215.182.968.000	-	215.182.968.000	-	215.182.968.000
166	Kab. Bogor	356.458.862.000	-	356.458.862.000	-	356.458.862.000
167	Kab. Ciamis	360.372.972.000	-	360.372.972.000	-	360.372.972.000
168	Kab. Cianjur	298.168.442.500	-	298.168.442.500	-	298.168.442.500
169	Kab. Cirebon	291.023.324.000	-	291.023.324.000	-	291.023.324.000
170	Kab. Garut	422.627.249.500	-	422.627.249.500	-	422.627.249.500
171	Kab. Indramayu	239.182.239.000	-	239.182.239.000	-	239.182.239.000
172	Kab. Karawang	247.349.527.000	-	247.349.527.000	-	247.349.527.000
173	Kab. Kuningan	228.370.460.000	-	228.370.460.000	-	228.370.460.000
174	Kab. Majalengka	240.995.505.000	-	240.995.505.000	-	240.995.505.000
175	Kab. Purwakarta	159.016.739.500	-	159.016.739.500	-	159.016.739.500
176	Kab. Subang	240.271.954.000	-	240.271.954.000	-	240.271.954.000
177	Kab. Sukabumi	282.344.041.000	-	282.344.041.000	-	282.344.041.000
178	Kab. Sumedang	221.272.875.000	-	221.272.875.000	-	221.272.875.000
179	Kab. Tasikmalaya	340.098.291.000	-	340.098.291.000	-	340.098.291.000
180	Kab. Bandung Barat	211.735.512.000	-	211.735.512.000	-	211.735.512.000
181	Kota Bandung	425.123.281.000	-	425.123.281.000	-	425.123.281.000
182	Kota Bekasi	211.865.494.000	-	211.865.494.000	-	211.865.494.000
183	Kota Bogor	154.905.086.000	-	154.905.086.000	-	154.905.086.000
184	Kota Cirebon	88.285.217.000	-	88.285.217.000	-	88.285.217.000
185	Kota Depok	143.850.136.000	-	143.850.136.000	-	143.850.136.000
186	Kota Sukabumi	74.449.501.000	-	74.449.501.000	-	74.449.501.000
187	Kota Cimahi	114.336.010.000	-	114.336.010.000	-	114.336.010.000
188	Kota Tasikmalaya	167.912.854.000	-	167.912.854.000	-	167.912.854.000
189	Kota Banjar	43.736.992.000	-	43.736.992.000	-	43.736.992.000
190	**Provinsi Banten**	**1.050.445.240.000**	**-**	**989.071.536.000**	**-**	**989.071.536.000**
191	Kab. Lebak	186.115.759.000	-	186.115.759.000	-	186.115.759.000
192	Kab. Pandeglang	204.652.604.000	-	204.652.604.000	-	204.652.604.000
193	Kab. Serang	198.430.846.000	-	198.430.846.000	-	198.430.846.000
194	Kab. Tangerang	226.592.480.000	-	226.592.480.000	-	226.592.480.000
195	Kota Cilegon	100.450.980.000	-	100.450.980.000	-	100.450.980.000
196	Kota Tangerang	219.224.098.000	-	219.224.098.000	-	219.224.098.000
197	Kota Serang	120.614.169.000	-	120.614.169.000	-	120.614.169.000
198	Kota Tangerang Selatan	129.705.606.000	-	129.705.606.000	-	129.705.606.000
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**2.774.166.781.000**	**-**	**2.664.344.879.500**	**-**	**2.664.344.879.500**
200	Kab. Banjarnegara	187.940.193.360	-	187.940.193.360	-	187.940.193.360
201	Kab. Banyumas	315.634.526.000	-	315.634.526.000	-	315.634.526.000
202	Kab. Batang	131.070.795.000	-	131.070.795.000	-	131.070.795.000
203	Kab. Blora	185.992.738.000	-	185.992.738.000	-	185.992.738.000
204	Kab. Boyolali	237.833.565.000	-	237.833.565.000	-	237.833.565.000
205	Kab. Brebes	240.397.126.000	-	240.397.126.000	-	240.397.126.000
206	Kab. Cilacap	304.988.176.500	-	304.988.176.500	-	304.988.176.500
207	Kab. Demak	168.424.571.000	-	168.424.571.000	-	168.424.571.000
208	Kab. Grobogan	217.919.024.000	-	217.919.024.000	-	217.919.024.000
209	Kab. Jepara	150.452.500.500	-	150.452.500.500	-	150.452.500.500
210	Kab. Karanganyar	215.823.145.000	-	215.823.145.000	-	215.823.145.000
211	Kab. Kebumen	219.576.541.000	-	219.576.541.000	-	219.576.541.000
212	Kab. Kendal	179.304.962.000	-	179.304.962.000	-	179.304.962.000
213	Kab. Klaten	319.829.819.000	-	319.829.819.000	-	319.829.819.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
214	Kab. Kudus	146.439.054.000	-	146.439.054.000	-	146.439.054.000
215	Kab. Magelang	168.558.883.000	-	168.558.883.000	-	168.558.883.000
216	Kab. Pati	247.300.858.000	-	247.300.858.000	-	247.300.858.000
217	Kab. Pekalongan	155.205.424.000	-	155.205.424.000	-	155.205.424.000
218	Kab. Pemalang	211.556.562.000	-	211.556.562.000	-	211.556.562.000
219	Kab. Purbalingga	151.903.035.000	-	151.903.035.000	-	151.903.035.000
220	Kab. Purworejo	210.021.221.000	-	210.021.221.000	-	210.021.221.000
221	Kab. Rembang	150.500.902.000	-	150.500.902.000	-	150.500.902.000
222	Kab. Semarang	179.511.614.000	-	179.511.614.000	-	179.511.614.000
223	Kab. Sragen	229.732.366.000	-	229.732.366.000	-	229.732.366.000
224	Kab. Sukoharjo	180.694.171.000	-	180.694.171.000	-	180.694.171.000
225	Kab. Tegal	205.339.080.000	-	205.339.080.000	-	205.339.080.000
226	Kab. Temanggung	136.253.400.000	-	136.253.400.000	-	136.253.400.000
227	Kab. Wonogiri	243.523.976.630	-	243.523.976.630	-	243.523.976.630
228	Kab. Wonosobo	145.810.630.000	-	145.810.630.000	-	145.810.630.000
229	Kota Magelang	63.049.373.000	-	63.049.373.000	-	63.049.373.000
230	Kota Pekalongan	60.786.075.000	-	60.786.075.000	-	60.786.075.000
231	Kota Salatiga	54.303.589.000	-	54.303.589.000	-	54.303.589.000
232	Kota Semarang	266.894.650.000	-	266.894.650.000	-	266.894.650.000
233	Kota Surakarta	218.373.319.000	-	218.373.319.000	-	218.373.319.000
234	Kota Tegal	74.069.104.000	-	74.069.104.000	-	74.069.104.000
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**530.091.625.000**	**-**	**285.950.927.000**	**115.696.326.500**	**401.647.253.500**
236	Kab. Bantul	246.782.676.000	-	246.782.676.000	-	246.782.676.000
237	Kab. Gunung Kidul	198.816.279.000	-	198.816.279.000	-	198.816.279.000
238	Kab. Kulon Progo	163.769.077.000	-	163.769.077.000	-	163.769.077.000
239	Kab. Sleman	285.488.358.000	-	285.488.358.000	-	285.488.358.000
240	Kota Yogyakarta	177.684.357.000	-	177.684.357.000	-	177.684.357.000
241	**Provinsi Jawa Timur**	**2.805.832.564.000**	**-**	**2.684.390.149.000**	**-**	**2.684.390.149.000**
242	Kab. Bangkalan	158.740.743.000	-	158.740.743.000	-	158.740.743.000
243	Kab. Banyuwangi	293.368.228.000	-	293.368.228.000	-	293.368.228.000
244	Kab. Blitar	276.727.595.500	-	276.727.595.500	-	276.727.595.500
245	Kab. Bojonegoro	236.525.556.000	-	236.525.556.000	-	236.525.556.000
246	Kab. Bondowoso	177.907.456.000	-	177.907.456.000	-	177.907.456.000
247	Kab. Gresik	199.836.702.000	-	199.836.702.000	-	199.836.702.000
248	Kab. Jember	345.795.931.500	-	345.795.931.500	-	345.795.931.500
249	Kab. Jombang	225.489.404.000	-	225.489.404.000	-	225.489.404.000
250	Kab. Kediri	272.334.730.000	-	272.334.730.000	-	272.334.730.000
251	Kab. Lamongan	276.114.495.000	-	276.114.495.000	-	276.114.495.000
252	Kab. Lumajang	181.945.527.000	-	181.945.527.000	-	181.945.527.000
253	Kab. Madiun	170.282.584.000	-	170.282.584.000	-	170.282.584.000
254	Kab. Magetan	211.159.024.500	-	211.159.024.500	-	211.159.024.500
255	Kab. Malang	370.878.002.000	-	370.878.002.000	-	370.878.002.000
256	Kab. Mojokerto	181.961.233.000	-	181.961.233.000	-	181.961.233.000
257	Kab. Nganjuk	256.595.597.000	-	256.595.597.000	-	256.595.597.000
258	Kab. Ngawi	217.699.223.000	-	217.699.223.000	-	217.699.223.000
259	Kab. Pacitan	172.525.413.000	-	172.525.413.000	-	172.525.413.000
260	Kab. Pamekasan	138.585.209.000	-	138.585.209.000	-	138.585.209.000
261	Kab. Pasuruan	222.755.724.000	-	222.755.724.000	-	222.755.724.000
262	Kab. Ponorogo	235.057.842.000	-	235.057.842.000	-	235.057.842.000
263	Kab. Probolinggo	196.793.327.000	-	196.793.327.000	-	196.793.327.000
264	Kab. Sampang	102.528.804.000	-	102.528.804.000	-	102.528.804.000
265	Kab. Sidoarjo	281.796.428.000	-	281.796.428.000	-	281.796.428.000
266	Kab. Situbondo	130.590.860.000	-	130.590.860.000	-	130.590.860.000
267	Kab. Sumenep	158.956.296.000	-	158.956.296.000	-	158.956.296.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
268	Kab. Trenggalek	193.892.007.000	-	193.892.007.000	-	193.892.007.000
269	Kab. Tuban	196.127.355.000	-	196.127.355.000	-	196.127.355.000
270	Kab. Tulungagung	311.416.144.500	-	311.416.144.500	-	311.416.144.500
271	Kota Blitar	58.978.981.000	-	58.978.981.000	-	58.978.981.000
272	Kota Kediri	81.492.920.000	-	81.492.920.000	-	81.492.920.000
273	Kota Madiun	117.120.867.000	-	117.120.867.000	-	117.120.867.000
274	Kota Malang	191.569.752.000	-	191.569.752.000	-	191.569.752.000
275	Kota Mojokerto	40.428.194.000	-	40.428.194.000	-	40.428.194.000
276	Kota Pasuruan	45.910.773.000	-	45.910.773.000	-	45.910.773.000
277	Kota Probolinggo	58.181.950.000	-	58.181.950.000	-	58.181.950.000
278	Kota Surabaya	360.003.798.000	-	360.003.798.000	-	360.003.798.000
279	Kota Batu	41.107.837.000	-	41.107.837.000	-	41.107.837.000
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**534.573.810.000**	**-**	**527.977.682.500**	**-**	**527.977.682.500**
281	Kab. Bengkayang	38.133.684.000	-	38.133.684.000	-	38.133.684.000
282	Kab. Landak	52.666.022.000	-	52.666.022.000	-	52.666.022.000
283	Kab. Kapuas Hulu	49.269.813.000	-	49.269.813.000	-	49.269.813.000
284	Kab. Ketapang	59.753.660.000	-	59.753.660.000	-	59.753.660.000
285	Kab. Pontianak	58.747.359.000	-	58.747.359.000	-	58.747.359.000
286	Kab. Sambas	102.092.094.000	-	102.092.094.000	-	102.092.094.000
287	Kab. Sanggau	67.749.869.000	-	67.749.869.000	-	67.749.869.000
288	Kab. Sintang	55.972.648.000	-	55.972.648.000	-	55.972.648.000
289	Kota Pontianak	149.154.587.000	-	149.154.587.000	-	149.154.587.000
290	Kota Singkawang	50.372.143.000	-	50.372.143.000	-	50.372.143.000
291	Kab. Kayong Utara	11.656.580.000	-	11.656.580.000	-	11.656.580.000
292	Kab. Kubu Raya	73.131.112.000	-	73.131.112.000	-	73.131.112.000
293	Kab. Sekadau	27.172.218.000	-	27.172.218.000	-	27.172.218.000
294	Kab. Melawi	29.156.106.000	-	29.156.106.000	-	29.156.106.000
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**251.314.880.000**	**-**	**248.449.830.000**	**-**	**248.449.830.000**
296	Kab. Barito Selatan	41.395.434.000	-	41.395.434.000	-	41.395.434.000
297	Kab. Barito Utara	34.165.804.000	-	34.165.804.000	-	34.165.804.000
298	Kab. Kapuas	96.124.411.000	-	96.124.411.000	-	96.124.411.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	44.958.532.000	-	44.958.532.000	-	44.958.532.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	89.642.183.000	-	89.642.183.000	-	89.642.183.000
301	Kota Palangkaraya	94.661.352.000	-	90.661.790.000	-	90.661.790.000
302	Kab. Barito Timur	37.789.426.000	-	37.789.426.000	-	37.789.426.000
303	Kab. Murung Raya	21.941.585.000	-	21.941.585.000	-	21.941.585.000
304	Kab. Pulang Pisau	43.485.799.000	-	43.485.799.000	-	43.485.799.000
305	Kab. Gunung Mas	27.791.303.000	-	27.791.303.000	-	27.791.303.000
306	Kab. Lamandau	15.628.306.000	-	15.628.306.000	-	15.628.306.000
307	Kab. Sukamara	16.931.771.000	-	16.931.771.000	-	16.931.771.000
308	Kab. Katingan	32.970.842.000	-	32.970.842.000	-	32.970.842.000
309	Kab. Seruyan	19.960.799.500	-	19.960.799.500	-	19.960.799.500
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**323.093.840.000**	**-**	**309.388.815.000**	**-**	**309.388.815.000**
311	Kab. Banjar	93.321.712.000	-	93.321.712.000	-	93.321.712.000
312	Kab. Barito Kuala	69.927.101.000	-	69.927.101.000	-	69.927.101.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	65.237.274.000	-	65.237.274.000	-	65.237.274.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	76.484.036.000	-	76.484.036.000	-	76.484.036.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	56.977.781.500	-	56.977.781.500	-	56.977.781.500
316	Kab. Kotabaru	43.896.950.000	-	43.896.950.000	-	43.896.950.000
317	Kab. Tabalong	70.000.804.000	-	70.000.804.000	-	70.000.804.000
318	Kab. Tanah Laut	68.424.582.000	-	68.424.582.000	-	68.424.582.000
319	Kab. Tapin	51.457.279.000	-	51.457.279.000	-	51.457.279.000
320	Kota Banjarbaru	56.635.122.000	-	56.635.122.000	-	56.635.122.000
321	Kota Banjarmasin	147.578.665.000	-	147.578.665.000	-	147.578.665.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
322	Kab. Balangan	31.278.248.000	-	31.278.248.000	-	31.278.248.000
323	Kab. Tanah Bumbu	42.207.539.000	-	42.207.539.000	-	42.207.539.000
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**408.618.280.000**	**-**	**397.336.285.000**	**-**	**397.336.285.000**
325	Kab. Berau	61.845.221.000	-	61.845.221.000	-	61.845.221.000
326	Kab. Bulungan	29.220.925.000	-	29.220.925.000	-	29.220.925.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	174.493.912.000	-	174.493.912.000	-	174.493.912.000
328	Kab. Kutai Barat	35.243.194.500	-	35.243.194.500	-	35.243.194.500
329	Kab. Kutai Timur	37.964.392.000	-	37.964.392.000	-	37.964.392.000
330	Kab. Malinau	12.394.284.000	-	12.394.284.000	-	12.394.284.000
331	Kab. Nunukan	24.761.597.000	-	24.761.597.000	-	24.761.597.000
332	Kab. Pasir	77.895.338.000	-	77.895.338.000	-	77.895.338.000
333	Kota Balikpapan	93.623.367.000	-	93.623.367.000	-	93.623.367.000
334	Kota Bontang	24.694.230.000	-	24.694.230.000	-	24.694.230.000
335	Kab. Tana Tidung	3.000.779.000	-	3.000.779.000	-	3.000.779.000
336	Kota Samarinda	150.924.903.000	-	150.924.903.000	-	150.924.903.000
337	Kota Tarakan	60.709.206.000	-	60.709.206.000	-	60.709.206.000
338	Kab. Penajam Paser Utara	34.480.615.000	-	34.480.615.000	-	34.480.615.000
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**256.030.430.000**	**-**	**243.177.647.000**	**-**	**243.177.647.000**
340	Kab. Bolaang Mongondow	44.400.658.000	-	44.400.658.000	-	44.400.658.000
341	Kab. Minahasa	118.577.696.000	-	118.577.696.000	-	118.577.696.000
342	Kab. Sangihe	45.337.593.000	-	45.337.593.000	-	45.337.593.000
343	Kota Bitung	80.468.781.000	-	80.468.781.000	-	80.468.781.000
344	Kota Manado	136.101.932.000	-	136.101.932.000	-	136.101.932.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	34.853.188.000	-	34.853.188.000	-	34.853.188.000
346	Kab. Minahasa Selatan	72.908.228.000	-	72.908.228.000	-	72.908.228.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	27.603.008.000	-	27.603.008.000	-	27.603.008.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	21.974.351.000	-	21.974.351.000	-	21.974.351.000
349	Kota Kotamubagu	40.087.760.000	-	40.087.760.000	-	40.087.760.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	8.771.338.000	-	8.771.338.000	-	8.771.338.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7.261.932.000	-	7.261.932.000	-	7.261.932.000
352	Kota Tomohon	37.904.681.000	-	37.904.681.000	-	37.904.681.000
353	Kab. Minahasa Utara	51.634.627.000	-	51.634.627.000	-	51.634.627.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	15.748.496.000	-	15.748.496.000	-	15.748.496.000
355	**Provinsi Gorontalo**	**120.657.990.000**	**-**	**115.921.045.000**	**-**	**115.921.045.000**
356	Kab. Boalemo	26.748.417.000	-	26.748.417.000	-	26.748.417.000
357	Kab. Gorontalo	120.445.104.000	-	120.445.104.000	-	120.445.104.000
358	Kota Gorontalo	78.053.695.000	-	78.053.695.000	-	78.053.695.000
359	Kab. Pohuwato	23.842.145.000	-	23.842.145.000	-	23.842.145.000
360	Kab. Gorontalo Utara	19.466.766.000	-	19.466.766.000	-	19.466.766.000
361	Kab. Bone Bolango	72.858.457.000	-	72.858.457.000	-	72.858.457.000
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**317.369.160.000**	**-**	**317.351.230.000**	**-**	**317.351.230.000**
363	Kab. Banggai	89.327.948.000	-	89.327.948.000	-	89.327.948.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	39.114.866.000	-	39.114.866.000	-	39.114.866.000
365	Kab. Buol	30.204.335.000	-	30.204.335.000	-	30.204.335.000
366	Kab. Toli-Toli	39.873.288.000	-	39.873.288.000	-	39.873.288.000
367	Kab. Donggala	86.944.731.000	-	86.944.731.000	-	86.944.731.000
368	Kab. Morowali	54.387.417.000	-	54.387.417.000	-	54.387.417.000
369	Kab. Poso	70.207.519.000	-	70.207.519.000	-	70.207.519.000
370	Kota Palu	143.580.217.000	-	143.580.217.000	-	143.580.217.000
371	Kab. Parigi Moutong	62.129.554.000	-	62.129.554.000	-	62.129.554.000
372	Kab. Sigi	55.155.568.000	-	55.155.568.000	-	55.155.568.000
373	Kab. Tojo Una Una	27.825.907.000	-	27.825.907.000	-	27.825.907.000
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**921.271.540.000**	**-**	**881.205.920.000**	**-**	**881.205.920.000**
375	Kab. Bantaeng	48.412.347.000	-	48.412.347.000	-	48.412.347.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
376	Kab. Barru	62.718.425.000	-	62.718.425.000	-	62.718.425.000
377	Kab. Bone	201.288.771.000	-	201.288.771.000	-	201.288.771.000
378	Kab. Bulukumba	108.278.314.000	-	108.278.314.000	-	108.278.314.000
379	Kab. Enrekang	71.115.930.000	-	71.115.930.000	-	71.115.930.000
380	Kab. Gowa	129.276.156.000	-	129.276.156.000	-	129.276.156.000
381	Kab. Jeneponto	71.928.297.000	-	71.928.297.000	-	71.928.297.000
382	Kab. Luwu	79.074.141.000	-	79.074.141.000	-	79.074.141.000
383	Kab. Luwu Utara	57.335.094.000	-	57.335.094.000	-	57.335.094.000
384	Kab. Maros	125.798.922.000	-	125.798.922.000	-	125.798.922.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	85.365.439.000	-	85.365.439.000	-	85.365.439.000
386	Kab. Pinrang	89.517.237.000	-	89.517.237.000	-	89.517.237.000
387	Kab. Selayar	44.530.513.000	-	44.530.513.000	-	44.530.513.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	81.102.451.000	-	81.102.451.000	-	81.102.451.000
389	Kab. Sinjai	70.630.036.000	-	70.630.036.000	-	70.630.036.000
390	Kab. Soppeng	94.803.422.000	-	94.803.422.000	-	94.803.422.000
391	Kab. Takalar	80.981.429.000	-	80.981.429.000	-	80.981.429.000
392	Kab. Tana Toraja	66.439.028.000	-	66.439.028.000	-	66.439.028.000
393	Kab. Wajo	110.596.915.000	-	110.596.915.000	-	110.596.915.000
394	Kota Pare-pare	53.865.128.000	-	53.865.128.000	-	53.865.128.000
395	Kab. Toraja Utara	60.789.293.000	-	60.789.293.000	-	60.789.293.000
396	Kota Makassar	297.058.872.914	-	297.058.872.914	-	297.058.872.914
397	Kota Palopo	51.921.459.000	-	51.921.459.000	-	51.921.459.000
398	Kab. Luwu Timur	43.371.879.000	-	43.371.879.000	-	43.371.879.000
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**153.304.644.000**	**-**	**147.705.234.000**	**-**	**147.705.234.000**
400	Kab. Majene	50.660.764.000	-	50.660.764.000	-	50.660.764.000
401	Kab. Mamuju	52.811.687.000	-	52.811.687.000	-	52.811.687.000
402	Kab. Polewali Mandar	87.639.935.000	-	87.639.935.000	-	87.639.935.000
403	Kab. Mamasa	29.623.571.000	-	29.623.571.000	-	29.623.571.000
404	Kab. Mamuju Utara	11.048.197.000	-	11.048.197.000	-	11.048.197.000
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**301.861.500.000**	**-**	**291.056.275.000**	**-**	**291.056.275.000**
406	Kab. Buton	97.954.161.000	-	97.954.161.000	-	97.954.161.000
407	Kab. Konawe	99.846.274.000	-	99.846.274.000	-	99.846.274.000
408	Kab. Kolaka	69.466.933.000	-	69.466.933.000	-	69.466.933.000
409	Kab. Muna	106.261.428.000	-	106.261.428.000	-	106.261.428.000
410	Kota Kendari	94.748.137.000	-	94.748.137.000	-	94.748.137.000
411	Kota Bau-bau	86.908.001.000	-	86.908.001.000	-	86.908.001.000
412	Kab. Konawe Selatan	52.791.604.000	-	52.791.604.000	-	52.791.604.000
413	Kab. Bombana	28.215.990.000	-	28.215.990.000	-	28.215.990.000
414	Kab. Konawe Utara	12.101.164.000	-	12.101.164.000	-	12.101.164.000
415	Kab. Buton Utara	13.106.584.000	-	13.106.584.000	-	13.106.584.000
416	Kab. Wakatobi	32.718.274.000	-	32.718.274.000	-	32.718.274.000
417	Kab. Kolaka Utara	18.480.767.000	-	18.480.767.000	-	18.480.767.000
418	**Provinsi Bali**	**394.134.150.000**	**-**	**374.799.827.500**	**-**	**374.799.827.500**
419	Kab. Badung	142.449.366.000	-	142.449.366.000	-	142.449.366.000
420	Kab. Bangli	55.975.166.000	-	55.975.166.000	-	55.975.166.000
421	Kab. Buleleng	185.615.619.000	-	185.615.619.000	-	185.615.619.000
422	Kab. Gianyar	161.704.394.000	-	161.704.394.000	-	161.704.394.000
423	Kab. Jembrana	70.517.727.000	-	70.517.727.000	-	70.517.727.000
424	Kab. Karangasem	116.152.134.000	-	116.152.134.000	-	116.152.134.000
425	Kab. Klungkung	70.411.164.000	-	70.411.164.000	-	70.411.164.000
426	Kab. Tabanan	146.900.369.000	-	146.900.369.000	-	146.900.369.000
427	Kota Denpasar	127.408.208.000	-	127.408.208.000	-	127.408.208.000
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**458.392.800.000**	**-**	**445.848.220.000**	**-**	**445.848.220.000**
429	Kab. Bima	114.669.850.000	-	114.669.850.000	-	114.669.850.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
430	Kab. Dompu	57.693.531.000	-	57.693.531.000	-	57.693.531.000
431	Kab. Lombok Barat	105.523.866.000	-	105.523.866.000	-	105.523.866.000
432	Kab. Lombok Tengah	136.130.722.000	-	136.130.722.000	-	136.130.722.000
433	Kab. Lombok Timur	185.096.400.000	-	185.096.400.000	-	185.096.400.000
434	Kab. Sumbawa	96.342.261.000	-	96.342.261.000	-	96.342.261.000
435	Kota Mataram	97.256.605.000	-	97.256.605.000	-	97.256.605.000
436	Kab. Lombok Utara	27.591.348.000	-	27.591.348.000	-	27.591.348.000
437	Kota Bima	62.642.011.000	-	62.642.011.000	-	62.642.011.000
438	Kab. Sumbawa Barat	29.067.645.000	-	29.067.645.000	-	29.067.645.000
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**717.287.620.000**	**-**	**695.151.935.000**	**-**	**695.151.935.000**
440	Kab. Alor	40.553.559.000	-	40.553.559.000	-	40.553.559.000
441	Kab. Belu	62.570.744.000	-	62.570.744.000	-	62.570.744.000
442	Kab. Ende	56.627.797.000	-	56.627.797.000	-	56.627.797.000
443	Kab. Flores Timur	53.878.123.856	-	53.878.123.856	-	53.878.123.856
444	Kab. Kupang	67.011.597.000	-	67.011.597.000	-	67.011.597.000
445	Kab. Lembata	20.859.917.000	-	20.859.917.000	-	20.859.917.000
446	Kab. Manggarai	49.348.555.000	-	49.348.555.000	-	49.348.555.000
447	Kab. Ngada	30.518.384.000	-	30.518.384.000	-	30.518.384.000
448	Kab. Sikka	51.743.708.000	-	51.743.708.000	-	51.743.708.000
449	Kab. Sumba Barat	18.729.424.250	-	18.729.424.250	-	18.729.424.250
450	Kab. Sumba Timur	39.685.518.000	-	39.685.518.000	-	39.685.518.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	70.200.666.000	-	70.200.666.000	-	70.200.666.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	39.242.768.000	-	39.242.768.000	-	39.242.768.000
453	Kota Kupang	97.479.540.000	-	97.479.540.000	-	97.479.540.000
454	Kab. Rote Ndao	23.416.343.000	-	23.416.343.000	-	23.416.343.000
455	Kab. Nagekeo	32.529.936.000	-	32.529.936.000	-	32.529.936.000
456	Kab. Sumba Tengah	10.250.122.000	-	10.250.122.000	-	10.250.122.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	24.485.115.000	-	24.485.115.000	-	24.485.115.000
458	Kab. Manggarai Timur	30.364.153.000	-	30.364.153.000	-	30.364.153.000
459	Kab. Sabu Raijua	18.292.619.000	-	18.292.619.000	-	18.292.619.000
460	Kab. Manggarai Barat	33.932.966.000	-	33.932.966.000	-	33.932.966.000
461	**Provinsi Maluku**	**218.828.410.000**	**-**	**214.406.840.000**	**-**	**214.406.840.000**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	35.969.209.000	-	35.969.209.000	-	35.969.209.000
463	Kab. Maluku Tengah	82.545.333.000	-	82.545.333.000	-	82.545.333.000
464	Kab. Maluku Tenggara	28.693.254.000	-	28.693.254.000	-	28.693.254.000
465	Kab. Pulau Buru	22.837.351.000	-	22.837.351.000	-	22.837.351.000
466	Kota Ambon	117.997.096.000	-	117.997.096.000	-	117.997.096.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	36.342.406.500	-	36.342.406.500	-	36.342.406.500
468	Kab. Seram Bagian Timur	14.063.218.000	-	14.063.218.000	-	14.063.218.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	15.275.823.000	-	15.275.823.000	-	15.275.823.000
470	Kab. Buru Selatan	7.468.717.000	-	7.468.717.000	-	7.468.717.000
471	Kab. Kepulauan Aru	13.562.208.000	-	13.562.208.000	-	13.562.208.000
472	Kota Tual	13.767.803.000	-	13.767.803.000	-	13.767.803.000
473	**Provinsi Maluku Utara**	**153.612.130.000**	**-**	**148.355.230.000**	**-**	**148.355.230.000**
474	Kab. Halmahera Tengah	11.300.250.500	-	11.300.250.500	-	11.300.250.500
475	Kab. Halmahera Barat	24.996.365.000	-	24.996.365.000	-	24.996.365.000
476	Kota Ternate	51.240.275.000	-	51.240.275.000	-	51.240.275.000
477	Kab. Halmahera Timur	11.395.080.000	-	11.395.080.000	-	11.395.080.000
478	Kota Tidore Kepulauan	31.003.487.500	-	31.003.487.500	-	31.003.487.500
479	Kab. Kepulauan Sula	19.649.544.000	-	19.649.544.000	-	19.649.544.000
480	Kab. Pulau Morotai	5.870.826.000	-	5.870.826.000	-	5.870.826.000
481	Kab. Halmahera Selatan	21.881.990.000	-	21.881.990.000	-	21.881.990.000
482	Kab. Halmahera Utara	20.886.213.000	-	20.886.213.000	-	20.886.213.000
483	Kab. Yalimo	663.000.000	-	165.750.000	-	165.750.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6 = 4 + 5
484	Kab. Lanny Jaya	2.022.290.000	-	694.790.000	-	694.790.000
485	**Provinsi Papua**	**5.263.958.900.000**	**4.927.378.620.000**	**323.988.375.000**	**-**	**5.251.366.995.000**
486	Kab. Biak Numfor	27.439.198.440	-	27.439.198.440	-	27.439.198.440
487	Kab. Jayapura	31.577.205.000	-	31.577.205.000	-	31.577.205.000
488	Kab. Jayawijaya	13.570.403.000	-	13.570.403.000	-	13.570.403.000
489	Kab. Merauke	39.737.691.000	-	39.737.691.000	-	39.737.691.000
490	Kab. Mimika	17.203.514.000	-	17.203.514.000	-	17.203.514.000
491	Kab. Nabire	25.467.782.000	-	25.467.782.000	-	25.467.782.000
492	Kab. Paniai	3.393.944.000	-	3.393.944.000	-	3.393.944.000
493	Kab. Puncak Jaya	2.613.447.000	-	1.402.947.000	-	1.402.947.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	22.096.160.000	-	22.096.160.000	-	22.096.160.000
495	Kota Jayapura	58.473.344.000	-	58.473.344.000	-	58.473.344.000
496	Kab. Sarmi	4.352.301.000	-	4.352.301.000	-	4.352.301.000
497	Kab. Keerom	12.640.439.000	-	12.640.439.000	-	12.640.439.000
498	Kab. Yahukimo	2.288.529.000	-	693.279.000	-	693.279.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	3.172.988.000	-	3.172.988.000	-	3.172.988.000
500	Kab. Tolikara	2.144.293.000	-	540.865.000	-	540.865.000
501	Kab. Boven Digoel	4.309.972.000	-	4.309.972.000	-	4.309.972.000
502	Kab. Mappi	9.000.847.000	-	9.000.847.000	-	9.000.847.000
503	Kab. Asmat	5.563.073.000	-	5.563.073.000	-	5.563.073.000
504	Kab. Waropen	5.288.468.000	-	5.288.468.000	-	5.288.468.000
505	Kab. Mamberamo Raya	3.051.760.000	-	784.782.000	-	784.782.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	1.405.382.000	-	381.632.000	-	381.632.000
507	Kab. Nduga	1.497.000.000	-	1.497.000.000	-	1.497.000.000
508	Kab. Dogiyai	2.785.737.000	-	2.785.737.000	-	2.785.737.000
509	Kab. Intan Jaya	1.318.566.000	-	1.318.566.000	-	1.318.566.000
510	Kab. Puncak	2.628.389.000	-	709.287.000	-	709.287.000
511	Kab. Deiyai	1.905.000.000	-	1.905.000.000	-	1.905.000.000
512	Kab. Supiori	4.368.593.000	-	4.368.593.000	-	4.368.593.000
513	**Provinsi Papua Barat**	**2.415.210.643.000**	**2.295.407.163.000**	**113.553.691.000**	**-**	**2.408.960.854.000**
514	Kab. Sorong	24.470.692.000	-	24.470.692.000	-	24.470.692.000
515	Kab. Manokwari	31.432.033.000	-	31.432.033.000	-	31.432.033.000
516	Kab. Fak Fak	18.103.252.000	-	18.103.252.000	-	18.103.252.000
517	Kota Sorong	34.463.366.000	-	34.463.366.000	-	34.463.366.000
518	Kab. Sorong Selatan	6.922.334.000	-	6.922.334.000	-	6.922.334.000
519	Kab. Raja Ampat	5.273.945.000	-	5.273.945.000	-	5.273.945.000
520	Kab. Teluk Bintuni	4.323.516.000	-	4.323.516.000	-	4.323.516.000
521	Kab. Teluk Wondama	1.877.825.000	-	1.877.825.000	-	1.877.825.000
522	Kab. Tambrauw	700.778.000	-	700.778.000	-	700.778.000
523	Kab. Maybrat	2.398.703.000	-	2.398.703.000	-	2.398.703.000
524	Kab. Kaimana	7.301.016.800	-	7.301.016.800	-	7.301.016.800
525	**Dana Cadangan**	-	-	-	-	-
526	**Selisih Pagu yang belum diverifikasi, PMK Nomor 127/PMK.07/2013 tanggal 2 September 2013 (MAK 653115 Transfer Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi)**	**21.744.821.000**	-	-	-	-
JUMLAH		**84.062.848.219.000**	**13.445.571.566.000**	**69.344.445.116.154**	**115.696.326.500**	**82.905.713.008.654**

SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	BELANJA BRUTO			PENGEMBALIAN			BELANJA NETTO		
		SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	649.949.767.142	649.949.767.142	-	571.771.411	504.096.547	67.674.864	649.377.995.731	649.445.670.595	(67.674.864)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.355.371.416.995	2.355.371.416.995	-	20.099.423.464	20.099.423.464	-	2.335.271.993.531	2.335.271.993.531	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.416.063.603.507	2.416.055.620.507	7.983.000	30.214.899.909	30.190.189.009	24.710.900	2.385.848.703.598	2.385.865.431.498	(16.727.900)
005	MAHKAMAH AGUNG	6.645.083.025.789	6.645.083.025.789	-	9.174.151.272	9.174.151.272	-	6.635.908.874.517	6.635.908.874.517	-
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.811.254.207.476	3.811.254.207.476	-	3.547.257.917	3.614.932.781	(67.674.864)	3.807.706.949.559	3.807.639.274.695	67.674.864
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.984.673.032.563	1.984.673.032.563	-	2.864.008.692	2.864.008.692	-	1.981.809.023.871	1.981.809.023.871	-
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	14.281.017.436.952	14.281.017.436.952	-	11.087.132.513	11.085.785.513	1.347.000	14.269.930.304.439	14.269.931.651.439	(1.347.000)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.106.091.257.119	5.106.091.257.119	-	11.322.655.124	11.243.825.561	78.829.563	5.094.768.601.995	5.094.847.431.558	(78.829.563)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	87.771.945.592.032	87.771.945.592.032	-	98.404.459.256	98.667.297.761	(262.838.505)	87.673.541.132.776	87.673.278.294.271	262.838.505
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.011.804.699.485	7.011.804.699.485	-	25.382.067.441	25.382.057.401	10.040	6.986.422.632.044	6.986.422.642.084	(10.040)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.089.382.140.181	17.089.382.140.181	-	43.861.988.913	41.810.508.846	2.051.480.067	17.045.520.151.268	17.047.571.631.335	(2.051.480.067)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.899.357.677.684	15.899.357.677.684	-	35.929.876.021	35.914.658.392	15.217.629	15.863.427.801.663	15.863.443.019.292	(15.217.629)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.803.479.360.490	2.803.479.360.490	-	5.805.576.853	5.805.576.853	-	2.797.673.783.637	2.797.673.783.637	-
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.190.392.771.714	11.190.392.771.714	-	7.865.938.875	7.859.828.875	6.110.000	11.182.526.832.839	11.182.532.942.839	(6.110.000)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.929.853.865.600	31.727.082.013.160	202.771.852.440	20.285.901.322	20.285.687.091	214.231	31.909.567.964.278	31.706.796.326.069	202.771.638.209
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72.341.965.834.615	72.342.115.975.674	(150.141.059)	570.026.582.104	516.360.775.940	53.665.806.164	71.771.939.252.511	71.825.755.199.734	(53.815.947.223)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	35.260.446.833.235	35.260.472.023.235	(25.190.000)	55.129.244.847	55.084.372.366	44.872.481	35.205.317.588.388	35.205.387.650.869	(70.062.481)
025	KEMENTERIAN AGAMA	41.852.849.422.337	41.852.849.422.337	-	64.483.109.915	56.442.212.036	8.040.897.879	41.788.366.312.422	41.796.407.210.301	(8.040.897.879)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.585.083.192.374	4.585.083.192.374	-	10.203.013.272	10.210.212.472	(7.199.200)	4.574.880.179.102	4.574.872.979.902	7.199.200
027	KEMENTERIAN SOSIAL	15.966.042.016.122	15.966.042.016.122	-	146.495.222.701	146.710.522.701	(215.300.000)	15.819.546.793.421	15.819.331.493.421	215.300.000
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.995.614.531.428	5.995.614.531.428	-	10.131.240.426	10.130.791.426	449.000	5.985.483.291.002	5.985.483.740.002	(449.000)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.572.444.035.236	6.572.444.035.236	-	2.705.259.550	2.705.259.550	-	6.569.738.775.686	6.569.738.775.686	-
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	80.345.356.036.757	80.345.356.036.757	-	23.970.883.695	23.970.883.695	-	80.321.385.153.062	80.321.385.153.062	-
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	446.586.333.440	446.586.333.440	-	317.136.408	317.136.408	-	446.269.197.032	446.269.197.032	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	209.631.364.701	209.631.364.701	-	3.388.772.879	3.388.772.879	-	206.242.591.822	206.242.591.822	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	272.530.817.449	272.530.817.449	-	484.911.484	484.911.484	-	272.045.905.965	272.045.905.965	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.622.287.163.766	1.622.287.163.766	-	2.123.083.146	2.099.802.996	23.280.150	1.620.164.080.620	1.620.187.360.770	(23.280.150)
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	109.929.082.348	109.929.082.348	-	682.754.775	682.754.775	-	109.246.327.573	109.246.327.573	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	801.044.268.273	801.044.268.273	-	509.653.084	509.653.084	-	800.534.615.189	800.534.615.189	-
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	864.389.423.714	864.389.423.714	-	1.106.580.369	1.106.580.369	-	863.282.843.345	863.282.843.345	-
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.607.349.460.830	1.607.349.460.830	-	160.202.611	160.202.611	-	1.607.189.258.219	1.607.189.258.219	-
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	222.005.344.646	222.005.344.646	-	625.908.666	626.487.566	(578.900)	221.379.435.980	221.378.857.080	578.900
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	147.389.606.826	147.389.606.826	-	872.486.035	872.486.035	-	146.517.120.791	146.517.120.791	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.498.214.581.468	1.498.214.581.468	-	681.082.409	681.082.409	-	1.497.533.499.059	1.497.533.499.059	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.600.027.967.449	1.600.027.967.449	-	2.867.538.436	2.867.538.436	-	1.597.160.429.013	1.597.160.429.013	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	37.192.398.856	37.192.398.856	-	6.021.751	6.021.751	-	37.186.377.105	37.186.377.105	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.968.711.181.100	3.968.711.181.100	-	1.713.824.606	1.713.824.606	-	3.966.997.356.494	3.966.997.356.494	-
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.014.256.943.498	1.014.256.943.498	-	1.620.565.578	1.620.565.578	-	1.012.636.377.920	1.012.636.377.920	-
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.665.684.602.071	3.665.684.602.071	-	7.492.622.529	7.492.622.529	-	3.658.191.979.542	3.658.191.979.542	-
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	459.088.940.429	458.923.251.329	165.689.100	123.491.262	116.801.666	6.689.596	458.965.449.167	458.806.449.663	158.999.504
059	KEMENTERIAN KOMINFO	3.239.484.377.900	3.239.484.377.900	-	3.879.477.515	3.879.477.515	-	3.235.604.900.385	3.235.604.900.385	-
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.086.467.001.039	43.086.467.001.039	-	23.660.560.498	23.660.560.498	-	43.062.806.440.541	43.062.806.440.541	-
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.133.567.520.859	1.133.567.520.859	-	16.680.461.653	16.680.461.653	-	1.116.887.059.206	1.116.887.059.206	-
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	209.654.563.418	209.654.563.418	-	640.480.653	640.480.653	-	209.014.082.765	209.014.082.765	-

KODE BA	URAIAN BA	BELANJA BRUTO			PENGEMBALIAN			BELANJA NETTO		
		SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih	SAU	SAI	Selisih
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	595.284.576.023	595.284.576.023	-	1.489.929.287	1.489.929.287	-	593.794.646.736	593.794.646.736	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.058.808.200.579	1.058.808.200.579	-	17.752.651.677	17.752.651.677	-	1.041.055.548.902	1.041.055.548.902	-
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.319.812.759.274	2.319.812.759.274	-	679.941.024	678.841.024	1.100.000	2.319.132.818.250	2.319.133.918.250	(1.100.000)
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.395.491.726.829	2.395.491.726.829	-	3.324.472.065	3.324.472.065	-	2.392.167.254.764	2.392.167.254.764	-
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	74.520.644.234	74.520.644.234	-	262.108.338	262.108.338	-	74.258.535.896	74.258.535.896	-
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.438.017.055.318	1.438.017.055.318	-	600.823.531	600.823.531	-	1.437.416.231.787	1.437.416.231.787	-
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.913.294.292.118	5.913.033.224.068	261.068.050	7.126.748.908	8.881.395.908	(1.754.647.000)	5.906.167.543.210	5.904.151.828.160	2.015.715.050
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	213.105.855.284	213.105.855.284	-	142.428.439	142.428.439	-	212.963.426.845	212.963.426.845	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	70.748.594.610	70.748.594.610	-	514.798.480	514.798.480	-	70.233.796.130	70.233.796.130	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.030.536.338.289	1.030.536.338.289	-	9.757.317.837	9.757.416.037	(98.200)	1.020.779.020.452	1.020.778.922.252	98.200
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	714.042.152.017	714.042.152.017	-	3.964.236.641	3.964.236.641	-	710.077.915.376	710.077.915.376	-
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.167.813.794.198	1.167.813.794.198	-	822.543.631	820.758.631	1.785.000	1.166.991.250.567	1.166.993.035.567	(1.785.000)
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	465.124.554.626	465.124.554.626	-	425.643.695	425.643.695	-	464.698.910.931	464.698.910.931	-
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.402.450.461	535.402.450.461	-	1.825.253.425	1.825.253.425	-	533.577.197.036	533.577.197.036	-
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	89.391.213.162	89.391.213.162	-	343.201.391	344.986.391	(1.785.000)	89.048.011.771	89.046.226.771	1.785.000
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133.179.898.634	133.179.898.634	-	1.416.432.220	1.413.632.220	2.800.000	131.763.466.414	131.766.266.414	(2.800.000)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	245.304.421.435	245.304.421.435	-	342.580.939	345.380.939	(2.800.000)	244.961.840.496	244.959.040.496	2.800.000
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	155.545.926.682	155.545.926.682	-	1.936.335.391	1.936.335.391	-	153.609.591.291	153.609.591.291	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	582.861.749.619	582.861.749.619	-	3.030.414.824	3.030.414.824	-	579.831.334.795	579.831.334.795	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.068.258.728.986	1.068.258.728.986	-	2.875.558.350	2.875.558.350	-	1.065.383.170.636	1.065.383.170.636	-
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.687.232.816.595	2.687.232.816.595	-	4.655.811.729	4.655.849.229	(37.500)	2.682.577.004.866	2.682.576.967.366	37.500
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.298.101.749.428	4.298.101.749.428	-	827.058.332	827.058.332	-	4.297.274.691.096	4.297.274.691.096	-
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.649.347.664.757	1.649.347.664.757	-	978.683.344	978.683.344	-	1.648.368.981.413	1.648.368.981.413	-
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	468.679.731.422	468.679.731.422	-	2.847.772.630	2.847.772.630	-	465.831.958.792	465.831.958.792	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	530.517.307.818	530.517.307.818	-	5.834.408.928	5.834.408.928	-	524.682.898.890	524.682.898.890	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	86.792.706.713	86.792.706.713	-	324.758.580	324.758.580	-	86.467.948.133	86.467.948.133	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.986.236.602.669	2.986.236.602.669	-	17.258.802.090	16.973.769.820	285.032.270	2.968.977.800.579	2.969.262.832.849	(285.032.270)
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	373.406.376.456	373.406.376.456	-	642.456.125	642.456.125	-	372.763.920.331	372.763.920.331	-
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.801.678.470.246	1.801.678.470.246	-	77.910.000	77.910.000	-	1.801.600.560.246	1.801.600.560.246	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	155.343.020.972	155.343.020.972	-	1.222.771.054	1.222.771.054	-	154.120.249.918	154.120.249.918	-
107	BADAN SAR NASIONAL	1.846.564.755.464	1.846.564.755.464	-	157.533.531	157.533.531	-	1.846.407.221.933	1.846.407.221.933	-
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	102.707.116.800	102.707.116.800	-	1.291.181.479	1.291.181.479	-	101.415.935.321	101.415.935.321	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	90.855.966.818	90.855.966.818	-	11.216.500	11.216.500	-	90.844.750.318	90.844.750.318	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	65.112.153.381	65.112.153.381	-	1.094	1.094	-	65.112.152.287	65.112.152.287	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	206.612.655.664	206.612.655.664	-	1.584.400.312	1.584.400.312	-	205.028.255.352	205.028.255.352	-
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	846.889.841.830	846.889.841.830	-	2.960.000	2.960.000	-	846.886.881.830	846.886.881.830	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	291.058.783.443	291.058.783.443	-	393.083.688	393.083.688	-	290.665.699.755	290.665.699.755	-
114	SEKRETARIAT KABINET	161.478.954.849	161.478.954.849	-	1.057.730.122	1.057.730.122	-	160.421.224.727	160.421.224.727	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.691.394.768.682	1.691.394.768.682	-	2.740.444.614	3.887.324.614	(1.146.880.000)	1.688.654.324.068	1.687.507.444.068	1.146.880.000
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	864.555.805.862	864.555.805.862	-	1.129.747.132	1.117.346.172	12.400.960	863.426.058.730	863.438.459.690	(12.400.960)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	776.827.655.763	776.827.655.763	-	86.619.680	86.619.680	-	776.741.036.083	776.741.036.083	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	233.355.435.972	233.355.435.972	-	45.833.267	45.833.267	-	233.309.602.705	233.309.602.705	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	554.293.616.545.127	554.095.461.250.334	198.155.294.794	470.245.949.118	270.342.328.857	199.903.620.261	553.823.370.596.010	553.825.118.921.477	(1.748.325.467)
000	TIDAK ADA KODE BA			-	14.405.731		14.405.731	(14.405.731)	-	(14.405.731)
JUMLAH		**1.136.855.926.520.023**	**1.136.454.739.963.695**	**401.186.556.328**	**1.851.264.241.013**	**1.590.475.346.396**	**260.788.894.617**	**1.135.004.662.279.010**	**1.134.864.264.617.302**	**140.397.661.708**

PERSETUJUAN *MULTI YEARS CONTRACT* (KONTRAK TAHUN JAMAK)

dalam Ribuan Rupiah

NO	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEBUTUHAN ALOKASI ANGGARAN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	005	Mahkamah Agung	100.000.000	65.109.079				
2	015	Kementerian Keuangan	941.911.286	608.881.321				
3	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000.000					
4	022	Kementerian Perhubungan	1.326.377.600	451.831.722				
5	024	Kementerian Kesehatan	0					
6	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	159.400.000					
7	033	Kementerian Pekerjaan Umum	10.237.186.302	2.821.730.286	2.180.857.425	600.930.520	10.935.213	25.644.300
8	041	Kementerian BUMN	16.982.480					
9	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.117.920					
10	057	Perpustakaan Nasional RI	159.536.490	180.062.952	116.184.708			
11	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	37.433.967					
12	086	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	19.882.210					
13	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat						
14	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	110.085.925	74.827.789				
15	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	188.294.397					
16	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)						
17	106	Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	37.859.500					
18	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	102.300.000					
Jumlah			**13.528.368.077**	**4.202.443.149**	**2.297.042.133**	**600.930.520**	**10.935.213**	**25.644.300**

PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN PAGU DIPA

KODE BA	URAIAN BA	PAGU APBN-P	PAGU DIPA	SELISIH
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	730.867.163.000	730.867.163.000	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.898.569.426.000	2.898.569.426.000	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.828.728.314.000	2.831.594.415.000	(2.866.101.000)
005	MAHKAMAH AGUNG	7.254.631.337.000	7.253.301.405.000	1.329.932.000
006	KEJAKSAAN AGUNG	4.347.164.974.000	4.347.164.974.000	-
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.439.914.722.000	2.492.814.722.000	(52.900.000.000)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	15.701.136.031.999	16.143.067.777.000	(441.931.745.001)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.680.095.139.999	5.804.829.209.000	(124.734.069.001)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	83.528.025.345.000	92.117.091.172.000	(8.589.065.827.000)
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.772.407.841.000	7.791.237.668.000	(18.829.827.000)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.381.475.285.000	18.408.676.395.000	(27.201.110.000)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	16.380.078.975.000	17.930.118.364.000	(1.550.039.389.000)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.087.817.435.000	3.334.518.422.000	(246.700.987.000)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17.371.542.412.999	17.383.514.462.000	(11.972.049.001)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35.269.321.221.000	35.926.285.034.100	(656.963.813.100)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.707.726.427.000	82.349.705.415.000	(2.641.978.988.000)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	36.592.151.916.000	38.636.738.592.000	(2.044.586.676.000)
025	KEMENTERIAN AGAMA	45.419.633.846.000	45.841.582.124.000	(421.948.278.000)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.956.684.125.000	5.038.401.010.000	(81.716.885.000)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	16.014.112.574.000	16.276.577.013.000	(262.464.439.000)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.357.534.677.000	6.606.723.235.000	(249.188.558.000)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.976.526.748.000	7.018.725.535.000	(42.198.787.000)
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	83.328.624.458.000	86.861.259.332.000	(3.532.634.874.000)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN	518.193.274.000	518.193.274.000	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	281.087.900.000	288.739.637.000	(7.651.737.000)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	299.340.266.000	322.724.558.000	(23.384.292.000)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.933.104.096.000	1.933.104.096.000	-
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK	134.637.813.000	134.637.813.000	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	628.105.650.000	944.872.199.000	(316.766.549.000)
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	951.543.421.000	980.922.262.000	(29.378.841.000)
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.739.998.862.000	1.739.998.862.000	-
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN	234.710.156.000	256.601.034.000	(21.890.878.000)
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN	201.285.843.000	229.794.536.000	(28.508.693.000)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.511.782.586.000	1.527.510.746.000	(15.728.160.000)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.685.050.158.000	1.685.050.158.000	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	36.485.667.000	38.399.300.000	(1.913.633.000)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.255.916.249.000	4.285.585.716.000	(29.669.467.000)
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.043.304.410.000	1.133.720.389.000	(90.415.979.000)
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.430.165.868.000	4.446.478.938.000	(16.313.070.000)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	479.150.804.000	487.743.929.000	(8.593.125.000)

KODE BA	URAIAN BA	PAGU APBN-P	PAGU DIPA	SELISIH
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.739.533.436.000	4.022.615.420.000	(283.081.984.000)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	47.109.426.030.000	48.163.422.059.000	(1.053.996.029.000)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.164.499.219.000	1.306.598.095.000	(142.098.876.000)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	245.227.520.000	245.227.520.000	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	705.750.673.000	705.750.673.000	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.068.544.744.000	1.160.275.565.000	(91.730.821.000)
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH	2.509.829.360.000	2.473.829.360.000	36.000.000.000
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA	2.551.855.775.000	2.697.010.456.000	(145.154.681.000)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	72.611.701.000	88.185.029.000	(15.573.328.000)
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.312.421.313.000	1.512.835.236.000	(200.413.923.000)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.492.009.875.000	8.485.960.460.000	6.049.415.000
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	199.108.930.000	216.754.454.000	(17.645.524.000)
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI	79.691.716.000	79.691.716.000	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.011.569.392.000	1.082.442.551.000	(70.873.159.000)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	760.329.709.000	768.864.278.000	(8.534.569.000)
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	946.793.259.000	1.234.315.858.000	(287.522.599.000)
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA	490.221.563.000	499.539.522.000	(9.317.959.000)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	558.532.409.000	602.101.929.000	(43.569.520.000)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	98.547.152.000	98.547.152.000	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	143.959.265.000	147.029.776.000	(3.070.511.000)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	247.175.107.000	280.464.766.000	(33.289.659.000)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	175.358.688.000	175.358.688.000	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	535.918.649.000	626.544.411.000	(90.625.762.000)
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN	1.225.630.476.000	1.119.517.794.000	106.112.682.000
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.949.553.079.000	2.963.458.632.000	(13.905.553.000)
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.724.896.276.000	4.904.317.123.000	(179.420.847.000)
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.886.788.531.000	1.886.788.531.000	-
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	703.876.268.000	703.876.268.000	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	594.868.848.000	594.868.848.000	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	91.588.475.000	91.588.475.000	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.479.248.846.000	3.129.114.870.000	(1.649.866.024.000)
104	BNP2TKI	392.826.615.000	409.120.556.000	(16.293.941.000)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	2.053.090.527.000	2.053.090.527.000	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	204.819.393.000	207.870.449.000	(3.051.056.000)
107	BADAN SAR NASIONAL	1.840.076.655.000	1.891.163.087.000	(51.086.432.000)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.358.275.000	113.358.275.000	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	365.782.000.000	365.782.000.000	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	67.794.595.000	68.857.179.000	(1.062.584.000)
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	274.124.430.000	274.124.430.000	-
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	935.013.106.000	959.677.812.000	(24.664.706.000)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	306.998.510.000	306.998.510.000	-

KODE BA	URAIAN BA	PAGU APBN-P	PAGU DIPA	SELISIH
114	SEKRETARIAT KABINET	204.671.037.000	204.671.037.000	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.856.964.490.000	2.276.641.817.000	(419.677.327.000)
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	948.275.844.000	950.904.369.000	(2.628.525.000)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	821.270.540.000	847.417.956.000	(26.147.416.000)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	359.605.879.000	359.605.879.000	-
999.01	PENGELOLAAN UTANG	112.517.848.410.000	112.674.922.142.000	(157.073.732.000)
999.02	HIBAH	2.346.514.640.000	1.423.301.882.000	923.212.758.000
999.05	TRANSFER KE DAERAH	529.362.920.963.000	529.393.357.476.483	(30.436.513.483)
999.07	BELANJA SUBSIDI	348.119.042.741.000	372.178.779.257.000	(24.059.736.516.000)
999.08	BELANJA LAINNYA	35.844.676.532.000	3.301.697.961.000	32.542.978.571.000
999.99	TRANSAKSI KHUSUS	75.991.624.370.000	81.883.719.894.000	(5.892.095.524.000)
TOTAL		**1.726.191.299.253.000**	**1.749.189.398.321.580**	**(22.998.099.068.586)**

REALISASI PENERBITAN SABA
BA 999.08 - PENGELOLA LAIN LAIN, TAHUN ANGGARAN 2013
(rupiah)

No.	No. SABA & Tgl	U R A I A N	SATKER/ KODE SATKER	REALISASI SABA
PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN LAIN				Rp 12.518.453.753.000
A. BELANJA PEGAWAI				**Rp 4.663.667.259.000**
1. GAJI DAN TUNJANGAN				**Rp -**
				Rp -
2. HONORARIUM, VAKASI DAN LAIN LAIN				**Rp 4.663.667.259.000**
Belanja TK dan Pegawai Transito				**Rp 4.663.667.259.000**
Cadangan Anggaran untuk Remunerasi Pejabat Negara				**Rp -**
Cadangan Anggaran untuk Remunerasi K/L				**Rp 4.646.997.904.000**
1	STAP-011/2013 4 April 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Arsip Nasional RI (ANRI) Tahun 2013	450448 Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 21.037.768.000
2	STAP-014/AG/2013 4 April 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2013	632505 Lemhanas RI	Rp 26.459.481.000
3	STAP-015/AG/2013 4 April 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2013	664827 Biro Umum & Perlengkapan LIPI di Jakarta	Rp 160.934.555.000
4	STAP-0020/AG/2013 15 April 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2013	017279 Kanpus BATAN	Rp 118.597.911.000
5	STAP-0021/AG/2013 22 April 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013	018576 Sekretaris Utama BPS	Rp 548.198.396.000
6	STAP-0024/AG/2013 6 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2013	450329 BPPT	Rp 94.693.846.000
7	STAP-0025/AG/2013 6 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2013	017220 BKN	Rp 90.625.762.000
8	STAP-0026/AG/2013 8 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tahun 2013	452482 Sekretariat Kemenpera	Rp 24.976.497.000
9	STAP-0029/AG/2013 29 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2013	451949 Biro Keu. Dan Perlengkapan	Rp 681.728.455.000
10	STAP-0030/AG/2013 29 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Tahun 2013	427922 Sekretariat Kemenristek	Rp 30.005.391.000
11	STAP-0031/AG/2013 29 Mei 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tahun 2013	24711 Sekretariat Jenderal	Rp 227.113.008.000
12	STAP-0033/AG/2013 19 Juni 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2013	450417 LANegara	Rp 32.511.980.000
13	STAP-0036/AG/2013 25 Juni 2013	Tunjangan Kinerja di lingkunganBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2013	017326 BKKBN	Rp 112.360.148.000
14	STAP-0037/AG/2013 25 Juni 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Pengawasa Obat dan Makanan (Badan POM) Tahun 2013	432731 Badan POM	Rp 133.349.921.000
15	STAP-041/AG/2013 11 Juli 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013	427944 Meneg Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.293.200.000
16	STAP-074/AG/2013 22 Oktober 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan BNN Tahun 2013	681595 Sekretariat Utama BNN	Rp 63.971.363.000
17	STAP-097/AG/2013 16 Desember 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2013	660117 Biro Umum Lapan	Rp 8.110.234.000
18	STAP-098/AG/2013 16 Desember 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2013	436766 Sekretaris Utama BMKG	Rp 72.763.856.000
19	STAP-099/AG/2013 16 Desember 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013	898003 Biro Umum Kementerian PU	Rp 353.631.240.000
20	STAP-100/AG/2013 16 Desember 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2013	613324 Sekretaris Utama BAPETEN	Rp 3.070.511.000
21	STAP-101/AG/2013 16 Desember 2013	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2013	423011 Sekjen Kementerian Perdag.	Rp 58.749.918.000

22	STAP-102/AG/2013 Desember 2013	16	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013	412631 Kantor Pusat Sekjen Kementerian Perhub.	Rp	267.059.900.000
23	STAP-103/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun 2013	403247 Kantor Pusat Sekjen Kemenlu	Rp	37.705.121.000
24	STAP-104/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan Tahun 2013	426839 Biro Keuangan Sekjen Kemenhut	Rp	168.598.914.000
25	STAP-105/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2013	531535 Perpustakaan Nasional RI Jakarta	Rp	9.417.622.000
26	STAP-106/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2013	414370 Badan SAR Nasional	Rp	41.380.087.000
27	STAP-107/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Ombudsman RI Tahun 2013	439624 Ombudsmn RI	Rp	1.062.584.000
28	STAP-108/AG/2013 Desember 2013	17	Tunjangan Kinerja di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013	427975 Setjen Dewan Ketahanan Nasional	Rp	1.913.633.000
29	STAP-109/AG/2013 Desember 2013	19	Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Intelijen Negara Tahun 2013	017194 Badan Intelijen Negara	Rp	15.728.160.000
30	STAP-110/AG/2013 Desember 2013	18	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013	137590 Sekretariat Jenderal Kemendikbud	Rp	989.848.587.000
31	STAP-111/AG/2013 Desember 2013	18	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013	664241 Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo	Rp	21.432.310.000
32	STAP-112/AG/2013 Desember 2013	18	Tunjangan Kinerja di lingkungan BNP2TKI Tahun 2013	449896 Sekretariat Utama BNP2TKI	Rp	16.293.941.000
33	STAP-113/AG/2013 Desember 2013	18	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013	450938 Biro Keungan Kemenakertrans	Rp	80.543.382.000
34	STAP-114/AG/2013 Desember 2013	18	Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013	622081 Biro Unum Setjen KKP	Rp	116.830.222.000
Cadangan Anggaran Pembayaran Unfunded Fiability-THT					**Rp**	-
Cadangan Anggaran Belanja Pegawai Transito					**Rp**	**16.669.355.000**
1	STAP-093/AG/2013 Nopember 2013	12	Honorarium Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komnas HAM Tahun 2013	650236 Komnas HAM	Rp	1.152.000.000
2	STAP-095/AG/2013 Nopember 2013	19	Kekurangan Belanja Pegawai Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2013	414370 Badan SAR Nasional	Rp	9.706.345.000
3	STAP-096/AG/2013 Nopember 2013	22	Tambahan Belanja Pegawai karena Kenaikan Tunjangan Fungsional Peneliti LIPI Tahun 2013	664827 Biro Umum dan Perlengkapan LIPI di JKT	Rp	5.811.010.000
3. KONTRIBUSI SOSIAL					**Rp**	-
B. BANTUAN SOSIAL					**Rp**	**2.183.720.000.000**
1. PENANGGULANGAN BENCANA					**Rp**	**2.183.720.000.000**
Penanggulangan Bencana					Rp	2.183.720.000.000
1	STAP-0009/AG/2013 2013	2 April	Tambahan Dana Siap Pakai (On Call) Tahun 2013	648521 BNPB	Rp	200.000.000.000
2	STAP-0038/AG/2013 2013	4 Juli	Tambahan Dana Siap Pakai (On Call) Tahun 2013 (Tahap II)	648521 BNPB	Rp	600.000.000.000
3	STAP-043/AG/2013 2013	31 Juli	Tambahan Dana Siap Pakai (On Call) Tahun 2013 (Tahap III)	648521 BNPB	Rp	200.000.000.000
4	STAP-064/AG/2013 Oktober 2013	4	Pengalokasian Dana Penanganan Banjir di DKI Jakarta	448333,622213 Ditjen Cipta Karya	Rp	166.220.000.000
5	STAP-065/AG/2013 Oktober 2013	4	Pengalokasian Dana Penanganan Banjir di DKI Jakarta	498128 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung-Cisadane	Rp	362.500.000.000
6	STAP-094/AG/2013 Nopember 2013	13	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Cadangan Penanganan Bencana sampai akhir Tahun 2013	648521 BNPB	Rp	655.000.000.000

C. BELANJA LAIN-LAIN					**Rp**	**5.671.066.494.000**
1. Jasa Perbendaharaan					**Rp**	**208.500.000.000**
1	STAP-0012/AG//2013 4 April 2013	Pembayaran Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2013	527010 Kanpus DJPB		Rp	208.500.000.000
2. Operasional Lembaga yang bellum mempunyai BA					**Rp**	-
3. Kontribusi ke Lembaga Internasional					**Rp**	-
4. Cadangan					**Rp**	-
5. Keperluan Mendesak					**Rp**	**1.242.841.219.000**
1	STAP-01/AG/2013 14 Januari 2013	Pengadaan Rumah Mantan Wakil Presiden Bp. H.M. Jusuf Kalla	403013 Sekneg		Rp	24.759.566.000
2	STAP-0021/AG/2013 14 Januari 2013	Perawatan Almarhumah Ibu Ema Norma Sudharmono	403013 Sekneg		Rp	1.875.741.000
3	STAP-004/AG/2013 15 Februari 2013	Pembangunan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme TA 2013			Rp	155.914.244.000
4	STAP-003/AG/2013 18 Februari 2013	Pengadaan Kendaraan VVIP dan Rombongan VVIP Tahun 2013	Setpres		Rp	-
5	STAP-005/AG/2013 4 Maret 2013	Pertemuan Keempat High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda (HLPEP) Tahun 2013	500621 UKP-PPP		Rp	10.135.572.000
6	STAP-006/AG/2013 4 Maret 2013	Pertemuan Keempat High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda (HLPEP) Tahun 2013	403013 Sekneg		Rp	24.027.843.000
7	STAP-007/AG/2013 18 Maret 2013	Pemberian Premi pada 5 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC		Rp	-
8	STAP-008/AG/2013 2 April 2013	Penambahan Dana Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013	404233 Sekjen Kum HAM		Rp	-
9	STAP-0010/AG/2013 2 April 2013	Penambahan Dana Kementerian Pertahanan Tahun 2013	562103 Kementerian Pertahanan		Rp	187.130.000.000
10	STAP-0013/AG/2013 8 April 2013	Penerbitan SABA untuk Pembangunan Gedung PKIA RSCM	415423 RSU DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta		Rp	178.023.206.000
11	STAP-0018/AG/2013 16 April 2013	Penanganan Gugatan Arbitrase di ICSID dan di OKI TA 2013	409294 Sekjen Kemenkeu		Rp	4.750.863.000
12	STAP-0019/AG/2013 16 April 2013	Peningkatan Kemampuan Studio Mini di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta Tahun 2013 (Di Revisi ke DUPA No. DIPA-999.08.1.962450/2013)	403128 Istana Kepresidenan Jakarta		Rp	-
13	STAP-007/AG/2013 18 Maret 2013	Revisi I SABA Pemberian Premi pd 5 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC		Rp	6.062.500.000
14	STAP-007/AG/2013 18 Maret 2013	Revisi II SABA Pemberian Premi pada 11 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC		Rp	23.689.048.000
15	STAP-016/AG/2013 9 April 2013	Penyediaan Anggaran Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden Tahun 2013 (di Revisi DIPA No. STAP-999.08.12-6/AG/2012 Tgl 10 April 2013)	962450 Istana Kepresidenan Jakarta		Rp	-
16	STAP-017/AG/2013 9 April 2013	Penyediaan Anggaran Dana Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden Tahun 2013 (di Revisi ke DIPA No. STAP-999.08.12-7/AG/2012)	999465 Sekretariat Wapres		Rp	-
17	STAP-022/AG/2013 24 April 2013	Revisi SP-SABA Penambahan Dana Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013	409257 Ditjen AHU		Rp	54.778.520.000
18	STAP-023/AG/2013 24 April 2013	Revisi SP-SABA Penambahan Dana Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013	409228 Badan Pembinaan Hukum Nasional		Rp	40.855.610.000
19	STAP-027/AG/2013 17 Mei 2013	Safeguarding pada Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan Subsidi Pangan Tahun 2013	630859 Setditjen Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan		Rp	-
20	STAP-028/AG/2013 21 Mei 2013	Safeguarding pada Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan Subsidi Pangan Tahun 2013	630859 Setditjen Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan		Rp	174.060.050.000
21	DIPA-999.08.1.999355/2013 14 Mei 2013	Penanganan Gugatan Arbitrase di ICSID dan di OKI TA 2013	999355 Sekjen Kementerian Keuangan		Rp	-
22	STAP-007/AG/2013 18 Maret 2013	Revisi III SABA Pemberian Premi pada 16 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC		Rp	27.997.619.000
23	STAP-007/AG/2013 18 Maret 2013	Revisi IV SABA Pemberian Premi pada 16 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC		Rp	53.599.574.000

24	STAP-047/AG/2013 Agustus 2013	2	Kegiatan Sail Komodo (Mabes TNI AD) Tahun 2013	579276 Mabes TNI AD	Rp	1.750.000.000
25	STAP-048/AG/2013 Agustus 2013	2	Kegiatan Sail Komodo (Mabes TNI) Tahun 2013	579262 Mabes TNI	Rp	3.500.000.000
26	STAP-049/AG/2013 Agustus 2013	16	Kegiatan Sail Komodo (Mabes TNI AL) Tahun 2013	579280 Mabes TNI AL	Rp	29.869.862.000
27	STAP-050/AG/2013 Agustus 2013	16	Kegiatan Sail Komodo (Pusat Penelitian Oceanografi LIPI) Tahun 2013	017106 Pusat Penelitian Ocenografi	Rp	1.985.715.000
28	STAP-051/AG/2013 Agustus 2013	16	Kegiatan Sail Komodo (Balai Teknologi Survei Kalutan BPPT) Tahun 2013	613675 Balai Teknologi Survei Kelautan	Rp	1.997.552.000
29	STAP-052/AG/2013 Agustus 2013	20	Kegiatan Sail Komodo (Mabes TNI AU) Tahun 2013	579297 Mabes TNI AU	Rp	2.710.727.000
30	STAP-053/AG/2013 Agustus 2013	20	Kegiatan Sail Komodo (Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat) Tahun 2013	427768 Menko Bidang Kesra	Rp	15.309.403.000
31	STAP-060/AG/2013 September 2013	10	Pembiayaan Collecting Fee Pelimpahan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR dan UPP TA 2013	238830 Ditjen Perkebunan	Rp	4.346.469.000
32	STAP-061/AG/2013 September 2013	12	Kegiatan Sail Komodo (Kepolisian Negara RI) Tahun 2013	644988 Roops Polda NTT	Rp	993.420.000
33	STAP-062/AG/2013 September 2013	11	Cost Sharing Pelaksanaan Program United Nation-World Food Programme (UN_WFP) Tahun 2012	427768 Menko Bidang Kesra	Rp	6.874.889.000
34	STAP-007/AG/2013 2013	18 Maret	Revisi V SABA Pemberian Premi pada 12 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC	Rp	18.085.921.000
35	STAP-007/AG/2013 2013	18 Maret	Revisi VI SABA Pemberian Premi pada 13 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC	Rp	29.101.993.000
36	STAP-083/AG/2013 Oktober 2013	24	Anggaran Biaya Tambahan pada Anggaran Ditjen Multilateral Kemenlu untuk Pembayaran Tagihan Kontribusi Pemerintah Indonesia TA 2013	667808 Ditjen Multilateral	Rp	87.028.948.000
37	STAP-090/AG/2013 Oktober 2013	12	LPP TVRI TA 2013	700200 Kantor Pusat TVRI	Rp	15.430.896.000
38	STAP-091/AG/2013 Oktober 2013	12	Persiapan Penanganan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden dalam rangka Pemilu Tahun 2014 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI)	653910 Mahkamah Konstitusi RI	Rp	11.519.642.000
39	STAP-092/AG/2013 Oktober 2013	12	Persiapan Penanganan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden dalam rangka Pemilu Tahun 2014 (Program Penanganan Perkara Konstitusi)	653910 Mahkamah Konstitusi RI	Rp	6.125.882.000
40	STAP-007/AG/2013 2013	18 Maret	Revisi VII SABA Pemberian Premi pada 26 Kantor Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC	Rp	38.549.944.000
6. Penugasan kepada PT SMI dalam rangka Penyiapan Proyek KPS					**Rp**	-
7. Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum					**Rp**	-
8. Cadangan Perluasan KUR					**Rp**	-
9. Kompensasi Perubahan Besaran Subsidi					**Rp**	-
10. Konversi BBM ke BBG untuk Transfortasi Umum					**Rp**	-
11. Policy Measure					**Rp**	-
12. Pengembangan Teknologi Unggulan					**Rp**	**516.229.926.000**
1	STAP-055/AG/2013 Agustus 2013	29	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan (Benih) Padi Nasional Tahun 2013	411971 BPPP Kanpus Jakarta	Rp	35.000.000.000

2	STAP-075/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Riset dan Teknologi (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan) Tahun 2013	427922 Sekretariat Kementerian Riset Dan Teknologi	Rp	42.934.000.000
3	STAP-076/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Riset dan Teknologi (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan) Tahun 2013	668309 Pusat Peragaan IPTEK	Rp	219.006.000.000
4	STAP-077/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada LIPI untuk Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan) Tahun 2013	450083, 450134 Pusat Penel Biotek, Pusat Penel. Tenaga Listrik dan Mekatronika	Rp	46.450.000.000
5	STAP-078/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada BATAN untu Program Dukungan Manajemen dn Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan) Tahun 2013	017279, 450231 Kantor Pusat BATAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Rp	1.050.000.000
6	STAP-079/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada BATAN untuk Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan) Tahun 2013	017258, 450222, 450304, 614858 Pusat Aptek Isotop dan Radiasi	Rp	7.039.926.000
7	STAP-080/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada BPPT untuk Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Pos Pengembangan Teknologi Unggulan)	450329, 450335, 631013 BPPT, Balai Besar Tek. Kekuatan Nuklir	Rp	164.750.000.000
13. Program Percepatan Pembangunan Madura					**Rp**	**760.660.000.000**
1	STAP-034/AG/2013 2013	26 Juni	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 untuk Pengembangan Sapi dan Kambing	238776 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	10.203.000.000
2	STAP-035/AG/2013 2013	26 Juni	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 untuk Pengembangan Tebu Lahan Kering	238830 Ditjen Perkebunan\	Rp	89.500.000.000
3	STAP-039/AG/2013 2013	2 Juli	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013	'465151 Ditjen Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau2 Kecil	Rp	19.900.000.000
4	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	498196 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas	Rp	200.630.000.000
5	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	498197 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas	Rp	100.700.000.000
6	STAP-045/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur	Rp	41.347.046.000
7	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	471735 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jaawa Timur	Rp	7.200.000.000
8	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	488131 Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jawa Timur	Rp	222.800.000.000
9	STAP-081/AG/2013 Oktober 2013	21	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kemenag Program Pendidikan Islam Tahun 2013 (Program Percepatan Pembangunan Madura)	299164, 299168, 299171, 299174 Kantor Kemenag Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pamekasan	Rp	68.379.954.000
14. Program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B)					**Rp**	**858.118.448.000**
1	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	448013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Papua dan Irjabar) di Jayapura	Rp	30.000.000.000
2	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498681 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)	Rp	90.000.000.000
3	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498685 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Prov. Papua (Nabire)	Rp	30.000.000.000

4	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498689 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Papua (Puncak Jaya)	Rp	100.000.000.000
5	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	501303 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Papua	Rp	30.000.000.000
6	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	485480 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Papua Barat	Rp	4.750.000.000
7	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498690 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Papua Barat (Fak Fak)	Rp	19.000.000.000
8	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498693 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Papua Barat (Manokwari)	Rp	23.750.000.000
9	STAP-046/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	498695 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Papua Barat (Bintuni)	Rp	47.500.000.000
10	STAP-067/AG/2013 Oktober 2013	7	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertahanan Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	579276 Mabes TNI AD	Rp	425.000.000.000
11	STAP-084/AG/2013 Oktober 2013	24	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Perhubungan untuk Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	517946 Unit Penyelenggara Pelabuhan AGATS	Rp	40.000.000.000
12	STAP-087/AG/2013 Nopember 2013	6	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Perhubungan untuk Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Tahun 2013 (Pos Program Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	414101, 606371 Bandara Waghete di Nabire, Bandara Kambuaya, Irian Jaya	Rp	18.118.448.000
15. Pembangunan Shelter Penanganan Bencana					**Rp**	**292.006.024.000**
1	STAP-040/AG/2013 2013	2 Juli	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013	634150 Pusat Penelitian dan Pengembangan SDL dan Pesisir	Rp	10.000.000.000
2	STAP-054/AG/2013 Agustus 2013	21	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2013	436766 Sekretariat Utama BMKG	Rp	44.000.000.000
3	STAP-059/AG/2013 September 2013	9	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2013	648521 BNPB	Rp	189.866.024.000
4	STAP-063/AG/2013 Oktober 2013	3	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013	483690 Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Strategis	Rp	23.600.000.000
5	STAP-076/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada Kemenristek (Pembangunan Shelter Penanganan Bencana) Tahun 2013	427922 Sekretariat Kemenristek	Rp	24.540.000.000
16. Program Percepatan Pembangunan NTT & Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013					**Rp**	**490.005.550.000**
1	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	498262 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II Prov. NTT	Rp	44.937.000.000
2	STAP-045/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	486661 Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan NTT	Rp	64.100.000.000
3	STAP-045/AG/2013 Agustus 2013	1	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTT	Rp	2.000.000.000

4	STAP-056/AG/2013 Agustus 2013	29	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	238251 Ditjen Tanaman Pangan	Rp	35.397.500.000
5	STAP-057/AG/2013 Agustus 2013	29	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	452332 Badan Ketahanan Pangan	Rp	13.582.050.000
6	STAP-058/AG/2013 Agustus 2013	29	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	238776 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	134.000.000.000
7	STAP-066/AG/2013 Oktober 2013	10	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada BKKBN Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	433098 Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Rp	15.000.000.000
8	STAP-073/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kemenpera Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	452537 Penyediaan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Prov NTT	Rp	154.444.350.000
9	STAP-068/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	453001, 465032 Ditjen Kapal Perikana dan Ditjen Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap	Rp	13.600.000.000
10	STAP-069/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	465091 Direktorat Usaha Perikanan Budidaya	Rp	4.680.000.000
11	STAP-070/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	449539 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp	720.000.000
12	STAP-071/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	427686, 465143, 465146, 465147 Balai Besar Pengem. Dan Pengendalian Hasil Perikanan, DirektoratPengolahan, Pengembangan, Pemas	Rp	4.000.000.000
13	STAP-072/AG/2013 Oktober 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	4651968 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Rp	1.000.000.000
14	STAP-082/AG/2013 Oktober 2013	24	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	902693 Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dibatalkan Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 05/DPDP/XI/2013 Tgl 13 Nopember 2013	
15	STAP-085/AG/2013 Oktober 2013	23	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Kesehatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	648449 Pusat Promosi Kesehatan	Dibatalkan berdasarkan Surat No S-5/AG/2013 Tgl 3 Januari 2014	
16	STAP-086/AG/2013 Nopember 2013	6	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	466570 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dibatalkan berdasarkan Surat No S-6/AG/2013 Tgl 3 Januari 2014	
17	STAP-088/AG/2013 Nopember 2013	6	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	682029 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Rp	1.344.650.000
18	STAP-097/AG/2013 Nopember 2013	22	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	427768 Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp	1.200.000.000
17. Program Pengembangan Peternakan (Ranch-Sapi, NTT dan Papua Barat)					**Rp**	**673.857.000.000**

1	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Pengembangan Peternakan/Ranch Sapi, di NTT dan Papua Barat)	498262 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II Prov. NTT	Rp	82.272.000.000
2	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Pengembangan Peternakan/Ranch Sapi, di NTT dan Papua Barat)	498267 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II Prov. NTT	Rp	23.728.000.000
3	STAP-044/AG/2013 Agustus 2013	1	Program Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian PU Tahun 2013 (Pos Pengembangan Peternakan/Ranch Sapi, di NTT dan Papua Barat)	498357 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua Barat	Rp	94.000.000.000
4	STAP-058/AG/2013 Agustus 2013	29	Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah pada BABUN pada Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Pos Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	238776 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	473.857.000.000
18. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal					**Rp**	**209.171.000.000**
1	STAP-042/AG/2013 2013	19 Juli	Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (LPU) Tahun 2013	664276 Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Rp	209.171.000.000
19. Cadangan Tambahan Anggaran Bawaslu					**Rp**	**419.677.327.000**
1	STAP-089/AG/2013 Nopember 2013	12	Dukungan Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013	500100 Badan Pengawas Pemillihan Umum	Rp	419.677.327.000
	J U M L A H				**Rp**	**12.518.453.753.000**

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2013

No	Uraian		Jumlah
1	Reksus Dalam Valuta Rupiah	Rp	293.949.132.476
2	Reksus Dalam Valuta AUD	Rp	806.116.247.243
3	Reksus Dalam Valuta EUR	Rp	7.088.712.239
4	Reksus Dalam Valuta JPY	Rp	19.677.999.163
5	Reksus Dalam Valuta USD	Rp	2.001.784.825.785
6	Rekening Dana Talangan No. 500.000001980	Rp	0
7	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah No. 609.000000980	Rp	0
8	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD No. 609.100411980	Rp	0
9	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Yen No. 609.002111980	Rp	0
10	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Euro No. 609.002991980		
11	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Asing Selain USD dan Yen USD No. 519.000120980	Rp	0
TOTAL		**Rp**	**3.128.616.916.906**

SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2013

No.	Nama Rekening	Saldo Awal 1 Januari 2013	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo Akhir 31 Desember 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Penampungan dana cadangan resiko KUT TP 1999/2000	-	-	-	-
2	Rekening induk dana lingkungan bergulir		15.186.142.600,00	15.185.774.822,00	367.778,00
3	Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan akuntasi (P2A)	-	-	-	-
4	Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	-	-	-	-
5	Proyek redistribusi ternak	-	-	-	-
6	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)		17.444.993,58	17.444.993,58	-
7	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)	628.030.789,54	1.309.832.684,19	1.912.796.451,28	25.067.022,45
8	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	11.219.549.132,63	20.947.148.283,97	31.705.464.203,82	461.233.212,78
9	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	455.671.373,68	960.159.228,33	1.415.791.056,01	39.546,00
10	Penampungan recovery risiko KUT TP 1999/2000	-	-	-	-
11	Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah		233.605.626.083,80	233.605.626.083,80	-
12	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)		1.001.568.611,36	1.001.568.611,36	-
13	Dirjen perbendaharaan untuk pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	653.367.178,79	5.947.921.348,36	6.601.288.527,15	-
14	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	41.978.182,49	296.992.822,08	338.971.004,57	-
15	Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	2.483.355.105,13	3.783.165.323,45	6.266.520.428,58	-
16	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	117.355.012,23	205.070.834,51	322.425.846,74	-
17	Penampungan nisbah bagi hasil dalam rangka KKPA bagi hasil bank muamalat		217.277.487,18	217.277.487,18	-
TOTAL		**15.599.306.774,49**	**283.478.350.300,81**	**298.590.949.516,07**	**486.707.559,23**

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
	I. ACEH		**35.907.274.651**	**246.974.287.980**
1	BANDA ACEH	001	23.846.206.230	123.269.177.573
2	LANGSA	002	1.313.083.602	18.101.292.915
3	MEULABOH	003	1.007.628.966	13.284.477.031
4	TAPAK TUAN	074	7.012.355.859	18.985.060.789
5	LHOKSEUMAWE	089	1.564.742.796	51.512.878.198
6	KUTACANE	105	210.672.054	11.768.772.807
7	TAKENGON	122	952.585.144	10.052.628.667
	II. MEDAN		**102.248.197.111**	**551.158.849.169**
9	MEDAN I	004	27.417.398.134	191.041.897.059
10	PEMATANG SIANTAR	005	2.211.933.537	42.512.135.860
11	PADANG SIDEMPUAN	006	18.470.355.237	30.017.957.727
12	GUNUNG SITOLI	007	9.562.488.144	15.848.180.267
13	RANTAU PRAPAT	075	7.177.962.619	15.704.695.739
14	TANJUNG BALAI	076	4.120.800.640	27.026.895.538
15	SIBOLGA	106	3.092.997.351	33.323.229.492
16	SIDIKALANG	119	10.350.231.935	17.206.509.739
17	MEDAN II	123	1.848.704.465	112.521.329.136
18	TEBING TINGGI	124	7.053.933.772	35.293.661.237
19	BALIGE	125	10.941.391.277	30.662.357.375
	III. PADANG		**33.384.010.429**	**238.876.601.056**
20	PADANG	010	15.968.996.000	131.486.195.196
21	BUKIT TINGGI	011	6.720.569.005	52.174.058.484
22	SIJUNJUNG	077	2.075.194.877	14.771.947.254
23	SOLOK	090	2.989.090.245	20.764.811.257
24	LUBUK SIKAPING	091	4.489.943.000	12.960.429.082
25	PAINAN	142	1.140.217.302	6.719.159.783
	IV. PEKANBARU		**145.706.464.137**	**438.691.060.217**
26	PEKANBARU	008	92.068.755.025	212.816.459.495
27	TANJUNG PINANG	009	2.146.208.268	45.162.831.599
28	RENGAT	092	12.189.255.820	15.488.138.983
29	DUMAI	120	34.528.637.629	135.207.910.285
30	BATAM	137	4.773.607.395	30.015.719.855
	V. JAMBI		**18.335.186.366**	**129.103.450.417**
31	JAMBI	012	6.563.545.821	64.958.783.085
32	SUNGAI PENUH	013	1.479.299.534	14.892.432.848
33	MUARA BUNGO	078	3.596.444.704	12.230.162.634
34	KUALA TUNGKAL	143	5.466.177.705	22.131.497.091

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
35	BANGKO	159	1.229.718.602	14.890.574.759
	VI. PALEMBANG		**66.782.177.770**	**318.241.511.251**
36	PALEMBANG	014	17.538.923.641	143.156.517.444
37	LUBUK LINGGAU	070	8.614.524.249	36.391.208.785
38	BATURAJA	109	5.015.795.397	14.021.373.847
39	LAHAT	144	24.136.548.857	72.760.419.498
40	SEKAYU	160	11.476.385.626	51.911.991.677
	VII. BANDAR LAMPUNG		**38.392.991.772**	**172.834.192.201**
41	BANDAR LAMPUNG	017	27.288.677.079	116.047.552.819
42	KOTABUMI	116	7.256.228.457	25.930.855.666
43	METRO	126	3.446.077.142	27.048.408.416
44	LIWA	145	402.009.094	3.807.375.300
	VIII. BENGKULU		**17.769.809.041**	**111.594.007.813**
45	BENGKULU	016	9.893.728.919	78.048.089.438
46	MANNA	121	2.012.381.457	12.299.025.351
47	CURUP	146	3.355.741.123	17.024.637.405
48	MUKO MUKO	181	2.507.957.542	4.222.255.619
	IX. PANGKAL PINANG		**17.741.372.393**	**62.756.929.547**
49	PANGKAL PINANG	015	15.864.501.244	56.123.122.437
50	TANJUNG PANDAN	107	1.876.871.149	6.633.807.110
	X. SERANG		**74.158.946.543**	**374.413.592.759**
51	SERANG	020	40.195.561.934	109.559.140.252
52	TANGERANG	127	33.866.992.809	256.134.918.475
53	RANGKASBITUNG	161	96.391.800	8.719.534.032
	XII. JAKARTA		**1.017.422.277.252**	**7.816.449.970.584**
54	JAKARTA I	018	154.241.104.191	642.959.421.852
55	JAKARTA II	019	260.614.285.055	5.706.749.536.342
56	JAKARTA III	088	465.850.388.056	781.645.582.783
57	JAKARTA IV	133	57.858.636.212	310.284.701.751
58	JAKARTA V	139	78.481.054.434	372.962.352.106
59	JAKARTA VI	140	376.809.304	1.848.375.750
	XII. BANDUNG		**206.433.539.412**	**1.094.270.704.064**
60	PURWAKARTA	021	11.734.169.858	56.376.499.064
61	BANDUNG I	022	27.920.083.676	180.024.223.757
62	BOGOR	023	30.442.744.915	178.209.370.423
63	CIREBON	024	10.008.502.098	64.343.410.527

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
64	TASIKMALAYA	025	8.493.104.513	64.177.131.460
65	KARAWANG	086	9.832.300.728	31.908.349.126
66	SUMEDANG	087	2.748.802.758	24.416.096.967
67	BANDUNG II	095	45.283.030.656	229.533.884.463
68	GARUT	096	6.734.163.882	38.517.004.416
69	SUKABUMI	128	24.203.102.156	65.746.568.111
70	KUNINGAN	147	1.561.600.443	20.305.992.204
71	BEKASI	171	27.471.933.729	140.712.173.546
	XIII. SEMARANG		**81.595.366.187**	**746.099.688.522**
72	SEMARANG I	026	16.059.805.880	122.081.919.125
73	PURWOREJO	027	1.973.485.457	23.877.300.041
74	SURAKARTA	028	7.719.040.405	112.301.808.479
75	PURWOKERTO	029	2.473.367.535	51.869.372.205
76	PEKALONGAN	072	3.486.929.539	24.582.428.644
77	PATI	097	4.230.998.692	32.501.460.876
78	MAGELANG	115	4.090.772.784	63.951.723.719
79	TEGAL	118	13.602.965.630	46.354.850.781
80	KUDUS	129	5.493.715.434	58.766.537.753
81	CILACAP	130	523.072.324	23.364.683.186
82	SEMARANG II	134	8.943.562.781	92.563.565.896
83	KLATEN	148	1.359.942.318	25.167.978.709
84	SRAGEN	162	2.743.718.369	24.676.502.850
85	PURWODADI	163	686.117.868	15.397.089.643
86	BANJARNEGARA	164	8.207.871.171	28.642.466.615
	XIV. YOGYAKARTA		**13.992.924.999**	**213.157.567.756**
87	YOGYAKARTA	030	13.786.044.256	191.393.902.908
88	WONOSARI	149	50.360.647	9.522.458.646
89	WATES	176	156.520.096	12.241.206.202
	XV. SURABAYA		**129.535.758.009**	**1.015.948.425.956**
90	SURABAYA I	031	21.289.970.507	226.325.004.900
91	MALANG	032	22.712.581.255	165.847.093.574
92	MADIUN	033	3.465.658.659	77.021.945.020
93	KEDIRI	034	25.834.797.260	95.089.396.277
94	BONDOWOSO	035	3.513.795.986	26.491.382.824
95	PAMEKASAN	036	21.875.538.030	39.155.734.589
96	BOJONEGORO	073	2.963.583.165	18.958.169.672
97	MOJOKERTO	098	2.713.798.971	49.933.426.436
98	PACITAN	099	750.882.738	7.230.452.886
99	BANYUWANGI	100	2.765.389.829	16.730.632.502
100	JEMBER	131	148.570.546	62.928.357.630
101	SURABAYA II	135	12.722.646.426	125.350.912.640

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
102	BLITAR	150	2.338.524.419	32.287.581.752
103	SIDOARJO	165	3.219.955.114	59.188.458.551
104	TUBAN	166	3.220.065.104	13.409.876.703
	XVI. PONTIANAK		**27.223.416.097**	**169.971.391.027**
105	PONTIANAK	042	4.349.175.227	97.578.410.425
106	SINTANG	079	6.731.121.292	15.755.516.160
107	SINGKAWANG	093	9.905.912.007	24.335.644.317
108	KETAPANG	094	201.590.221	12.267.294.880
109	PUTUSSIBAU	117	256.136.931	8.870.436.313
110	SANGGAU	167	5.779.480.419	11.164.088.932
	XVII. PALANGKARAYA		**10.894.919.509**	**85.124.157.150**
111	PALANGKARAYA	043	3.706.288.271	53.092.076.311
112	SAMPIT	044	5.601.688.073	14.597.480.790
113	BUNTOK	080	200.305.199	9.648.478.668
114	PANGKALAN BUN	102	1.386.637.966	7.786.121.381
	XVIII. BANJARMASIN		**34.364.628.835**	**198.527.322.727**
115	BANJARMASIN	045	21.455.312.824	110.851.018.459
116	KOTABARU	081	5.182.628.084	27.661.531.532
117	BARABAI	110	2.861.161.880	31.768.237.494
118	TANJUNG	151	3.148.472.679	15.063.955.112
119	PELAIHARI	168	1.717.053.368	13.182.580.130
	XIX. SAMARINDA		**245.931.900.921**	**431.941.402.875**
120	SAMARINDA	046	87.327.290.761	205.879.766.913
121	BALIKPAPAN	047	33.250.365.234	110.201.466.731
122	TARAKAN	048	91.137.091.056	67.722.959.852
123	NUNUKAN	152	29.796.677.125	30.655.779.485
124	TANJUNG REDEP	153	4.420.476.745	17.481.429.894
	XX. DENPASAR		**6.530.935.116**	**177.272.502.482**
125	DENPASAR	037	5.323.569.656	137.016.851.228
126	SINGARAJA	132	1.101.472.492	26.177.909.070
127	AMLAPURA	154	105.892.968	14.077.742.184
	XXI. MATARAM		**13.422.597.846**	**130.615.523.727**
128	MATARAM	038	7.866.639.899	85.977.835.985
129	BIMA	071	897.112.182	17.279.480.779
130	SUMBAWA BESAR	101	4.235.747.086	13.996.899.498
131	SELONG	169	423.098.679	13.361.307.465

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
	XXII. KUPANG		**50.788.775.611**	**128.084.106.822**
132	KUPANG	039	26.400.072.679	80.072.272.258
133	ENDE	040	7.055.362.686	15.144.157.549
134	WAINGAPU	041	4.460.459.445	8.079.987.812
135	RUTENG	111	9.392.346.452	10.958.838.910
136	ATAMBUA	172	169.693.205	8.385.109.176
137	LARANTUKA	174	3.310.841.144	5.443.741.117
	XXIII. MAKASAR		**49.684.266.600**	**393.172.117.245**
138	MAKASSAR I	054	14.980.031.363	147.436.830.463
139	WATAMPONE	055	2.019.386.040	27.601.782.569
140	BANTAENG	056	2.332.905.644	15.318.053.683
141	PARE-PARE	057	2.383.947.652	39.570.102.278
142	PALOPO	058	4.762.202.531	19.279.768.040
143	MAJENE	059	659.091.984	11.867.495.854
144	MAKASAR II	136	2.801.712.203	94.180.894.956
145	BENTENG	155	268.549.260	3.301.823.460
146	MAKALE	170	3.598.668.784	6.946.291.553
147	SINJAI	177	196.043.040	503.255.301
148	MAMUJU	178	15.681.728.099	27.165.819.088
	XXIV. PALU		**10.856.750.599**	**112.893.144.345**
149	PALU	051	7.271.145.333	85.177.404.176
150	POSO	052	1.192.502.062	10.852.641.820
151	LUWUK	053	321.309.261	10.978.643.692
152	TOLI-TOLI	082	2.071.793.943	5.884.454.657
	XXV. KENDARI		**32.639.641.074**	**125.069.584.448**
153	KENDARI	060	21.449.138.735	87.187.148.462
154	BAU-BAU	103	3.373.603.103	19.651.321.099
155	KOLAKA	156	6.662.814.755	12.120.264.095
156	RAHA	157	1.154.084.481	6.110.850.792
	XXVI. GORONTALO		**8.185.026.629**	**52.448.479.858**
157	GORONTALO	050	7.803.556.993	47.846.157.884
158	MARISA	180	381.469.636	4.602.321.974
	XXVII. MANADO		**38.300.996.248**	**152.000.009.087**
159	MANADO	049	14.593.268.607	108.459.020.686
160	TAHUNA	083	5.177.512.714	3.866.393.127
161	KOTAMOBAGU	158	9.921.676.245	14.984.415.024
162	BITUNG	179	8.608.538.682	24.690.180.250

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 13	31 DES 12
	XXVIII. TERNATE		**20.725.472.301**	**56.047.389.012**
163	TERNATE	062	18.409.274.708	47.177.044.257
164	TOBELO	112	2.316.197.593	8.870.344.755
	XXIX. AMBON		**7.511.544.756**	**97.092.401.969**
165	AMBON	061	6.823.304.244	76.245.673.931
166	TUAL	084	212.020.772	8.977.016.839
167	SAUMLAKI	104	180.718.165	3.586.767.803
168	MASOHI	173	295.501.575	8.282.943.396
	XXX. JAYAPURA		**108.485.756.000**	**367.051.951.747**
169	JAYAPURA	063	70.675.670.251	129.721.798.199
170	BIAK	064	2.058.826.653	32.621.175.781
171	MANOKWARI	065	9.971.413.501	38.226.433.145
172	SORONG	066	2.719.991.938	39.707.070.576
173	FAK-FAK	067	1.784.430.916	12.164.676.544
174	MERAUKE	068	10.147.257.816	49.793.683.259
175	NABIRE	085	1.229.505.564	10.317.691.576
176	WAMENA	113	2.014.355.576	18.296.279.453
177	SERUI	138	3.540.514.637	8.400.238.890
178	T I M I K A	141	4.343.789.148	27.802.904.324
	REKENING PENERIMAAN		**1.767.280.142**	**0**
179	REKENING PENERIMAAN	901	1.767.280.142	0
JUMLAH KAS KPPN			**2.666.720.204.356**	**16.207.882.323.813**

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

Dalam Rupiah

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	5.791.912.330	245.854.591			7.868.226.000	1.821.261.971
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		4.187.884.264	731.064	41.098	47.918.295.055	19.461.343.127
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	34.371.562.641	312.171.706			4.656.860.249	3.285.409.606
4	005	MAHKAMAH AGUNG	279.659.504	762.775.284	22.746.290	141.405.490	666.451.680	2.208.991.086
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	534.784.562	529.445.200			37.648.474.983	7.299.844.508
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.180.946.238	7.825.054.290	19.869.553.657	12.001.333.379	13.344.317.491	14.732.170.708
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.642.461.467	2.166.221.516	127.061.633	876.135.813	34.166.442.342	5.635.155.491
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	98.782.590.698	74.188.572.032	26.193.063.995	23.617.699.173	79.629.943.370	164.962.221
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	316.390		301.097.741	2.150.025.094	1.414.464.297.940	204.452.465.878
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.137.424.659	4.905.638.455	5.739.408.169	5.804.728.975	10.309.750.010	20.417.269.305
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.185.018.342	8.796.459.747	8.612.212.342	6.659.080.618	64.892.258.341	20.739.677.126
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	19.749.314.360	7.256.928.378	579.397.354	727.404.900	23.345.001.689	221.026.831.575
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.130.717.786	702.782.550	64.877.267	369.140.585	262.168.632	207.920.841
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	116.734.824	2.056.198.993	31.470.000	855.039.194	72.897.628	15.810.637
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.167.058.545	810.754.169	10.121.153.259	19.029.872.722	424.615.684.680	3.329.183.847
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29.140.655.081	27.815.158.787	126.561.575.731	84.169.697.427	1.835.281.478.457	814.433.874.164
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.186.710.112	6.262.832.774	2.356.175.466	623.004.566	834.856.880.212	241.587.253.030
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.185.098.030	4.393.553.295	776.513.091	1.033.400.795	599.807.218.464	8.685.980.410
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.245.614.540	6.405.547.026	565.824.099	11.776.493.881	12.237.384.000	93.582.296
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	436.229.599	553.837.436		115.483.600	219.115.957.248	186.916.521.611
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.432.973.234	8.807.078.629	58.113.289	11.448.241.591	122.145.354.137	16.274.025.016
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.785.266.786	944.490.452	43.029.266	150.527.604	81.885.986.643	2.018.057.651
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.871.243.030	288.246.285			355.427.694.961	8.549.586.967
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	702.499.396	445.960.216			94.230.890	53.237.800
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN					536.647.728	536.001.150
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	790.749.017	1.388.055.759			832.416.170	258.130.322
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.468.589.350	181.674.532		57.661.500	5.190.835	5.790.052.021
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	24.594.597				171.451.800	
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.628.326.014	694.577.314	1.534	639	1.420.216.760	4.773.916.499
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	8.086.014	280.875.100			22.619.070.199	2.126.233.320
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	200.000.000	3.330.000			2.675.479.365	2.913.896.411
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	62.550.520	556.935.000			3.236.256.517	4.581.928.445
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	140.681.800				2.927.500.302	
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA					97.902.355	1.366.311.316
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	23.374.000				500.000.000	
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.460.062.404	240.116.614	79.981.150	4.268.005	5.430.297.754	2.982.000.066
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.860.199.276	554.826.593			6.632.266.552	3.776.656.767
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	625.663.524	316.869.362	474.056.350	595.548.647	478.397.184	1.143.567.599
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	32.321.331	102.470.469	36.953.653	25.552.580		
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.138.717	227.054.318			51.652.981.383	1.631.407.114
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.030.894.208	1.821.055.720	3.108.695.000	4.378.685.000	225.354.194.911	840.182.458.453
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	258.156.593	119.000.835	1.153.615.000	86.955.000	8.753.468.580	70.585.046.807
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		107.950.650				2.684.794.099

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	928.478.128	4.563.602.803			541.000	
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	552.730.218	626.059.418	7.482.854.135			56.449.642.805
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	23.650.000	162.332.300				
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	11.483.264.463	3.678.008.618	6.253	6.253	2.969.737.920	143.063.977
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	183.455.937	1.000.000			5.763.692.250	5.541.203.601
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	74.004.774	47.235.076	4.984.780	71.770	66.211.838.254	100.937
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	16.105.364.955	1.988.329.566			5.652.072.319	31.172.034
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	8.967.046				51.452.930	
52	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	93.118.672	78.334.853	444.881.620	363.781.034	13.368.798.609	10.891.863.676
53	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.180.000	7.852.625	50.000	338.235.000	16.000	7.979.343.984
54	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	431.094.397	28.178.205	7.067.354.006	1.156.811.626	689.655.314	338.726.822
55	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	181.271.587	544.241.877			87.021.468	159.105.460
56	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	30.000		106.041.878	1.171.862.824	186.261.600	714.480.987
57	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL			33.221		4.925.028.000	
58	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR			53.297.000		872.100	189.679.500
59	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.220.000		873.312.224	936.601.888	2.583.825.884	1.040.777.650
60	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	118.300	11.940.000		343.000.000	1.534.414.400	1.681.755.000
61	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		32.082.786				2.000.000
62	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		162.543.743	5.625.000		525.000	28.754.964
63	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7.310.288.374	10.005.599.488	2.832.027.845	3.555.160.551	37.335.236.964	342.208.496
64	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	813.252.090			47.854.248.061	1.140.273.266.395
65	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.189.949.029	44.024.750		5.518.200	763.393.596	
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	582.997.500	3.757.620	75.000.000		612.817.808	3.500.396
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.680.535.817	5.602.098.653			3.342.773.684	3.786.178.476
68	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	44.007.890.000	674.630.400			20.956.484.625	31.150.008.852
69	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	894.251.522	521.092.220	17.162.204		1.184.711.713	25.821.855
70	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO						
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH					189.385.267	277.672.560
72	107	BADAN SAR NASIONAL	7.363.713	90.552.483				
73	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	74.677.800					105.900.646
74	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	132.441.981	10.250.000				99.100.601
75	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	22.372.000					
76	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM					7.322.596.710	207.517.479
77	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	41.690.650	617.156.502				501.077.101
78	114	SEKRETARIAT KABINET	129				3.423.463.348	606.351.819
79	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	14.095.670.219				86.908.221.476	48.765.000
80	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5.200.500	3.742.050			16.885.866.841	7.473.448.131
81	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	5.110.000	931.041.030			55.618.800.895	56.392.452.285
82	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG				1.581.981.956		
83	999.03	INVESTASI PEMERINTAH					-	1.429.667.753
84	999.05	TRANSFER KE DAERAH						768.861.261.146
85	999.07	BELANJA SUBSIDI					44.390.196.217	374.370.559.588
86	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	2.075.253.730	4.951.651.724			374.370.559.588	374.370.559.588
TOTAL			**342.891.820.960**	**213.458.829.221**	**225.839.936.566**	**196.150.458.978**	**7.363.221.503.338**	**5.594.259.806.825**

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2012
			Audited	*Audited*	*Audited*	*Audited*
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	611.084.773	1.650.874.994		
2	005	MAHKAMAH AGUNG	2.635.700.699	2.951.231.216		
3	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.011.480	7.694.940		
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	14.513.425.971	76.128.570		
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	87.142.551.989			20.020.281.442
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	23.444.860.213	7.903.132.855		
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2.558.205.188.866			
8	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.840.825.002			
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	72.072.741.956	23.212.842.494	91.572.000	3.723.250.772
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	158.352.481	20.232.200		
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	19.124.646	6.433.650.610		
12	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	219.863.167	160.596.995	22.216.828.700	19.835.100.558
13	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.697.153.507	56.227.476.637	110.320.585.748	54.910.107.821
14	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	14.034.904.313	14.233.629.570	276.703.125.544	168.901.211.223
15	025	KEMENTERIAN AGAMA	11.791.600	295.550.010	3.258.709.273	238.205.273
16	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			660.413.450	
17	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.285.342.500			
18	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.239.008.541	528.454.898	253.126.150	153.679.300
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	215.640.306	173.368.764		
20	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	179.752.667	166.458.667		
21	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	43.298.500	57.214.000		
22	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	489.050.000			
23	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	726.290.000	13.465.522.375		2.086.351.352
24	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP		41.666.667		
25	054	BADAN PUSAT STATISTIK	461.742.797	322.971.666		
26	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	191.820.414	138.875.833		-
27	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	827.635.096.565	1.036.431.395.605		
28	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	67.409.202.565	9.944.525.682		
29	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.533.210.237			3.699.539.504
30	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	4.497.564.225			
31	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	6.069.292.489	314.666.666		
32	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	3.050.269.157			
33	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	28.199.999	55.033.333		
34	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		2.614.800		-
35	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	536.477.658	90.125.000	1.794.833	
36	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	151.223.500			400.000.000
37	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	7.500.000	39.666.667		
38	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	14.326.686.389	2.642.035.000		
39	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL				338.654.428.427
40	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	108.658.000	106.480.000		
41	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	587.088.620	502.132.167		
42	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN			25.580.678.257	30.244.896.533
43	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI			897.247.292	527.083.403
44	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	427.731.233	435.852.250		
45	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	243.746.800	15.647.974.391		
46	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	66.666.667			150.415.667
47	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	24.969.096.723	10.619.014.941		
48	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	1.494.498.000			
49	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.492.197.548	1.819.275.084		
50	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN			920.070.512	2.626.923.952
51	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	267.656.763	63.805.871		341.786.000
52	115	BADAN PENGAWAS PEMILU		1.200.320.000		
53	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	570.625.000			
54	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	160.236.238	206.616.068	54.964.058.288	38.831.193.252
55	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	368.333.614.418		914.341.392	
TOTAL			**4.161.407.065.182**	**1.208.189.107.486**	**496.782.551.439**	**685.344.454.479**

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Percobaan Tahun Anggaran 2013 Audited	Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) Modul ALPP	Selisih
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.196.082.304.338	1.196.082.304.341	3
115122	Piutang PPh Pasal 22	474.859.038.112	474.859.038.112	0
115124	Piutang PPh Pasal 23	2.073.653.402.146	2.073.653.402.149	3
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.464.443.087.320	1.464.443.087.318	-2
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	26.484.631.354.502	26.484.631.354.502	0
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.654.047.893.334	2.654.047.893.334	0
115128	Piutang PPh Final	847.587.668.063	847.587.668.062	-1
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	19.086.728.575.262	19.086.728.575.264	2
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	385.509.016.104	385.509.016.104	0
115151	Piutang PBB Pedesaan	1.992.878.656.086	1.992.878.656.088	2
115152	Piutang PBB Perkotaan	3.894.949.763.751	3.894.949.763.748	-3
115153	Piutang PBB Perkebunan	607.271.063.282	607.271.063.283	1
115154	Piutang PBB Kehutanan	442.641.257.932	442.641.257.931	-1
115155	Piutang PBB Pertambangan	12.217.284.060.116	12.217.284.060.114	-2
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	4.148.450	4.148.450	0
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.543.990.460.273	3.543.990.460.273	0
Piutang Pajak Bruto		77.366.561.749.071	77.366.561.749.074	3
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPh Non Migas	-22.766.914.360.708	-22.766.914.360.703	5
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPN	-12.559.338.970.838	-12.559.338.970.837	1
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	-164.399.019.131	-164.399.019.132	-1
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PBB dan BPHTB	-10.838.970.178.860	-10.838.970.178.859	1
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pajak Lainnya	-2.455.488.021.362	-2.455.488.021.364	-2
Total Penyisihan Piutang Tidak tertagih		-48.785.110.550.899	-48.785.110.550.896	4
Piutang Pajak Neto		28.581.451.198.172	28.581.451.198.178	6

ket: Selisih antara Neraca Percobaan dengan LP3 karena pembulatan

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
per 31 Desember 2013 Audited
(dalam rupiah)

NO	KANWIL DJP	Bunga Penagihan	Kehutanan	Pedesaan	Perkebunan	Perkotaan	Pertambangan	PPh Psl. 21	PPh Psl. 22	PPh Psl. 23	PPh Psl. 25 Badan	PPh Psl. 25 OP	PPh Psl. 26	PPh Psl.4 Ayat (2)	PPN	PPn BM	PTLL	Jumlah
1	NAD	319.898.841	9.939.578.123	80.252.632.272	29.513.768.066	83.276.424.738	233.352.899.980	30.180.301.904	3.518.378.675	10.343.144.000	54.440.953.811	6.215.191.056	1.344.528.431	2.075.143.625	137.644.329.986	48.115.427	-	682.465.288.935
2	SUMUT I	46.746.887.086	-	25.586.536.120	80.214.379.117	11.488.585.811	49.770.943.320	20.937.997.971	10.975.835.131	13.306.019.777	234.828.529.214	40.290.097.645	4.938.486.442	16.103.464.805	687.379.147.822	2.533.571.548	3.823.450	1.245.104.305.258
3	SUMUT II	571.715.131	82.985.470	76.370.156.692	208.982.036.766	113.649.403.309	128.544.696.638	9.081.695.680	47.176.355	614.142.139	92.164.507.034	32.104.162.567	44.517.625.783	1.354.298.507	69.003.880.993	7.308.847	-	777.095.791.911
4	RIAU DAN KEPRI	24.370.599.832	43.069.404.323	52.384.176.907	27.265.053.717	101.583.646.159	708.928.197.583	67.828.140.416	30.565.209.883	46.689.047.339	470.330.400.713	28.809.514.509	27.505.509.327	51.362.768.789	638.006.633.354	12.897.102.243	-	2.331.595.405.096
5	SUMBAR JAMBI	4.961.705.318	4.971.636.138	101.846.422.843	19.444.253.355	195.986.442.947	249.708.808.671	18.673.726.181	856.361.457	22.105.460.378	168.653.967.829	40.465.745.270	2.330.131.108	4.746.308.760	244.912.174.744	154.288.359	-	1.079.817.433.358
6	SUMSEL BABEL	8.321.894.282	15.998.227.377	111.635.226.520	24.879.152.837	83.658.286.182	797.416.956.167	29.359.781.117	1.389.752.902	47.088.244.723	188.615.556.408	35.566.219.031	5.596.409.692	6.179.669.884	281.121.915.291	786.561	-	1.636.828.078.974
7	BENGKULU	4.203.076.127	383.011.560	66.074.426.963	17.421.642.767	90.860.570.934	174.790.600.930	21.924.949.220	3.321.141.448	4.886.975.155	141.011.654.214	41.135.977.189	1.176.091.047	6.425.236.554	198.831.102.180	139.950	-	772.446.596.238
8	JKT PUSAT	682.966.496.240	-	-	-	-	13.110.007.388	102.956.744.929	2.169.831.632	120.945.731.969	3.384.092.156.058	78.742.517.221	450.579.440.264	173.636.059.358	1.615.519.406.098	126.697.052.640	325.000	6.751.415.768.796
9	JKT BARAT	50.207.484.151	-	-	-	-	15.682.546.208	22.051.639.517	2.594.595.103	19.096.703.399	477.686.094.379	58.321.466.243	3.454.649.175	10.443.712.454	566.493.204.094	1.105.355.931	-	1.227.137.450.653
10	JKT SELATAN	230.314.573.851	-	-	-	-	15.502.790.708	148.425.071.752	7.361.631.419	440.985.720.558	3.367.065.551.202	137.123.121.466	178.279.262.191	73.341.808.734	1.779.382.928.315	111.275.703.695	-	6.489.058.163.891
11	JKT TIMUR	44.780.263.103	-	-	-	-	15.566.426.793	43.204.225.821	301.548.686	24.222.038.235	724.755.704.279	41.525.898.245	10.545.464.000	32.851.403.646	658.049.306.099	1.471.340.350	-	1.597.273.619.257
12	JKT UTARA	19.305.576.674	-	-	-	-	33.202.918.710	22.336.214.111	392.897.838.941	26.263.772.309	679.385.670.753	166.986.024.579	1.953.846.270	24.541.699.342	1.785.479.506.027	10.764.366.215	-	3.163.117.433.931
13	JKT KHUSUS	1.387.150.574.076	-	-	-	-	5.402.221.803.193	92.632.474.186	1.964.208.309	563.669.341.914	4.850.606.909.949	15.687.244.268	1.506.166.512.147	78.618.453.488	1.683.680.758.284	60.290.989.480	-	15.642.689.269.294
14	BANTEN	22.224.031.375	127.247.600	258.322.565.476	259.372.526	1.804.661.936.214	54.215.933.789	61.577.797.672	672.963.038	19.012.814.416	203.640.076.084	21.559.934.451	11.732.585.395	11.978.242.217	394.822.161.857	6.624.500.046	-	2.871.432.162.155
15	JAWA BARAT I	14.946.390.103	-	76.587.755.409	28.231.730.876	179.137.729.110	120.858.296.525	50.275.755.802	178.803.261	39.685.161.365	341.560.539.622	121.522.299.891	24.971.082.517	29.979.464.505	781.438.292.340	2.136.323.632	-	1.811.509.624.959
16	JAWA BARAT II	96.168.459.255	2.435.357.205	123.756.198.567	11.222.583.971	75.856.638.502	264.287.410.882	76.045.711.511	272.244.805	34.192.949.946	253.571.864.681	49.916.305.853	28.863.875.279	36.463.178.590	731.191.459.943	1.540.614.393	-	1.785.784.853.382
17	JAWA TENGAH I	27.964.160.117	-	82.412.698.595	3.993.784.811	87.943.764.561	368.793.465.185	23.755.577.771	1.622.288.579	20.637.573.085	217.869.598.394	77.037.068.148	3.210.907.954	20.093.817.498	487.479.376.904	2.306.080.265	-	1.425.120.161.867
18	JAWA TENGAH II	10.284.237.651	-	13.190.734.962	2.252.476.221	15.838.389.610	132.486.837.987	11.460.134.512	224.158.393	8.769.952.844	173.544.520.694	36.887.364.310	10.257.938.419	7.718.845.252	523.511.664.537	1.200.368.806	-	947.627.624.199
19	DIY	6.179.801.145	-	10.325.260.262	-	8.498.904.568	20.185.907.036	7.287.750.682	-	2.756.920.524	42.706.837.601	13.729.833.853	530.387.684	7.776.884.477	119.059.930.605	199.927.274	-	239.238.345.712
20	JATIM I	11.808.674.653	-	-	-	-	8.812.970.057	22.236.080.135	5.022.838.052	16.018.380.485	255.148.085.875	84.821.131.150	2.125.396.781	20.772.023.103	549.696.751.980	32.159.375.657	-	1.008.621.707.927
21	JATIM II	8.703.186.476	21.246.844	31.682.980.885	771.639.276	44.816.035.962	359.252.959.478	14.422.988.117	999.841.009	11.102.701.003	141.204.164.474	32.083.131.731	5.941.968.932	24.827.762.225	327.635.868.340	2.835.000	-	1.003.469.309.752
22	JATIM III	8.481.138.328	694.879.290	151.014.716.910	7.165.502.934	105.294.416.529	116.379.883.459	14.218.773.201	607.957.272	7.811.663.189	127.910.876.938	45.519.136.009	9.500.313.381	5.684.251.262	218.801.671.558	846.669.199	-	819.931.849.458
23	KALBAR	11.066.926.592	32.600.949.087	25.906.841.860	31.161.774.106	53.696.266.988	132.479.562.344	12.194.737.770	236.061.578	7.429.040.725	60.212.692.123	25.212.778.942	270.527.948	2.043.991.235	133.797.265.725	1.340.647	-	528.310.757.671
24	KALSELTENG	10.149.232.339	86.780.119.579	75.748.085.459	28.467.038.152	186.550.277.302	484.534.528.699	34.006.575.426	259.456.522	41.830.852.099	262.648.754.107	22.793.623.437	3.307.072.368	10.258.214.997	401.748.798.390	2.648.050	-	1.649.085.276.926
25	KALTIM	25.602.192.519	87.924.213.195	42.814.073.210	43.037.807.311	67.470.349.025	816.136.870.761	40.977.360.374	435.849.337	40.985.870.953	507.525.989.887	18.556.585.545	10.134.358.772	24.021.936.313	634.031.847.297	30.000	-	2.359.655.334.500
26	SULSELBARTRA	7.862.111.505	22.902.417.044	121.128.261.438	28.884.855.432	124.191.629.220	270.784.365.289	40.078.814.576	3.425.353.862	13.559.033.212	171.214.213.841	42.566.443.875	175.868.406	22.741.968.994	358.905.190.217	611.228.095	-	1.229.031.755.007
27	SULUTTENGGORMALUT	942.602.993	13.514.112.876	96.562.373.602	9.817.348.652	146.604.027.603	274.724.240.906	16.986.940.795	2.705.847.952	4.255.278.204	95.084.012.009	28.166.062.655	965.014.188	5.006.225.981	159.173.376.656	227.006.120	-	854.734.471.193
28	BALI	11.917.759.270	-	80.281.429.064	368.392.832	96.338.392.581	24.762.379.606	14.113.986.070	32.197.148	14.886.675.029	116.685.463.298	26.054.101.440	5.059.416.553	26.245.253.459	311.721.650.084	10.157.836.703	-	738.624.933.138
29	NUSRA	1.667.418.881	-	172.312.103.418	380.402.741	97.979.760.547	133.139.155.428	11.585.084.615	120.748.246	3.092.886.917	40.842.481.360	27.369.069.872	57.322.343	7.633.801.185	103.381.448.343	375.000	-	599.562.058.897
30	PAPUA DAN MALUKU	180.511.018.113	121.195.872.220	116.682.998.653	3.536.066.817	119.567.885.346	797.649.696.394	13.421.557.637	38.231.306	2.623.266.053	123.688.086.575	16.333.190.879	7.426.531	1.798.830.465	207.237.445.683	245.735.971	-	1.704.538.308.643
31	WAJIB PAJAK BESAR	583.290.374.246	-	-	-	-	-	101.843.714.872	40.687.811	444.786.040.204	8.515.934.441.093	51.341.845.986	298.548.474.007	100.862.948.359	2.297.590.081.519	-	-	12.394.238.608.098
Total		**3.543.990.460.273**	**442.641.257.931**	**1.992.878.656.088**	**607.271.063.283**	**3.894.949.763.748**	**12.217.284.060.114**	**1.196.082.304.341**	**474.859.038.112**	**2.073.653.402.149**	**26.484.631.354.502**	**1.464.443.087.318**	**2.654.047.893.334**	**847.587.668.062**	**19.086.728.575.264**	**385.509.016.104**	**4.148.450**	**77.366.561.749.074**

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN UMUR PAJAK
per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

NO	KANWIL DJP	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	JUMLAH
1	NAD	120.459.963.868	62.353.099.601	50.982.566.429	144.410.159.547	146.477.885.137	157.781.614.353	682.465.288.935
2	SUMUT I	386.008.589.421	63.033.104.550	45.433.004.154	49.369.355.160	112.425.020.224	588.835.231.749	1.245.104.305.258
3	SUMUT II	239.608.191.917	106.957.113.404	74.652.198.787	76.681.161.727	131.384.817.494	147.812.308.582	777.095.791.911
4	RIAU DAN KEPRI	788.823.851.776	264.778.651.712	185.756.163.915	254.647.292.994	308.604.598.143	528.984.846.556	2.331.595.405.096
5	SUMBAR JAMBI	249.067.109.370	109.187.528.724	69.288.583.459	119.748.670.827	209.187.071.793	323.338.469.185	1.079.817.433.358
6	SUMSEL BABEL	359.894.250.647	291.296.955.458	167.828.887.247	157.395.034.964	377.486.438.717	282.926.511.941	1.636.828.078.974
7	BENGKULU	151.949.753.694	57.741.809.659	53.906.347.734	93.345.153.605	160.331.554.133	255.171.977.413	772.446.596.238
8	JKT PUSAT	1.813.380.041.178	656.182.797.187	251.937.737.519	277.460.534.760	808.069.819.845	2.944.384.838.307	6.751.415.768.796
9	JKT BARAT	259.919.244.068	84.782.806.011	65.943.013.426	64.088.647.183	32.206.561.682	720.197.178.283	1.227.137.450.653
10	JKT SELATAN	3.006.466.802.580	218.481.361.461	261.197.371.726	365.723.578.416	459.267.382.773	2.177.921.666.935	6.489.058.163.891
11	JKT TIMUR	554.676.969.770	83.107.500.112	72.497.453.616	108.228.030.951	83.910.049.168	694.853.615.639	1.597.273.619.257
12	JKT UTARA	279.527.950.952	190.076.625.443	160.443.273.146	58.055.725.645	87.206.980.201	2.387.806.878.544	3.163.117.433.931
13	JKT KHUSUS	5.486.683.320.170	4.034.484.429.401	490.826.274.161	409.396.495.697	490.917.539.077	4.730.381.210.786	15.642.689.269.294
14	BANTEN	577.741.435.891	351.988.598.830	334.098.955.724	266.240.412.081	219.527.625.161	1.121.835.134.467	2.871.432.162.155
15	JAWA BARAT I	481.171.333.633	136.329.994.267	102.998.538.100	210.423.270.382	190.138.316.402	690.448.172.175	1.811.509.624.959
16	JAWA BARAT II	447.990.797.590	201.298.803.823	93.944.047.316	226.482.790.362	234.239.613.447	581.828.800.844	1.785.784.853.382
17	JAWA TENGAH I	337.897.176.420	300.685.469.929	121.847.744.784	124.741.149.981	123.431.929.354	416.516.691.399	1.425.120.161.867
18	JAWA TENGAH II	497.263.453.969	96.994.839.511	50.590.050.433	52.464.662.801	76.693.521.440	173.621.096.045	947.627.624.199
19	DIY	57.634.403.215	33.555.642.130	33.427.534.284	20.952.749.446	22.938.762.197	70.729.254.440	239.238.345.712
20	JATIM I	378.953.042.700	55.987.229.935	59.623.484.617	117.045.400.407	30.764.328.963	366.248.221.305	1.008.621.707.927
21	JATIM II	270.149.355.494	110.792.051.101	57.124.089.761	136.180.268.592	209.454.366.884	219.769.177.919	1.003.469.309.752
22	JATIM III	164.444.516.474	74.571.948.165	42.880.465.878	87.127.194.679	116.233.185.998	334.674.538.265	819.931.849.458
23	KALBAR	120.479.108.246	51.748.410.242	39.578.567.130	58.853.806.222	110.151.410.002	147.499.455.829	528.310.757.671
24	KALSELTENG	615.213.910.919	179.344.521.230	150.733.511.468	144.244.590.960	195.514.919.845	364.033.822.503	1.649.085.276.926
25	KALTIM	510.049.380.346	151.324.108.912	147.152.880.992	474.022.411.391	575.155.802.588	501.950.750.271	2.359.655.334.500
26	SULSELBARTRA	306.103.175.775	128.463.791.829	130.722.824.691	158.165.223.065	211.252.113.672	294.324.625.975	1.229.031.755.007
27	SULUTTENGGORMALUT	204.518.293.118	52.206.229.675	55.414.440.138	102.377.670.033	198.336.101.605	241.881.736.623	854.734.471.193
28	BALI	168.031.574.584	50.389.366.461	73.468.992.902	158.041.278.817	64.755.633.650	223.938.086.723	738.624.933.138
29	NUSRA	96.190.099.175	59.501.183.698	41.273.153.623	60.146.973.260	111.506.893.276	230.943.755.865	599.562.058.897
30	PAPUA DAN MALUKU	540.912.509.779	106.354.100.656	62.852.865.410	207.052.531.126	391.778.712.883	395.587.588.789	1.704.538.308.643
31	WAJIB PAJAK BESAR	7.761.612.075.823	2.787.967.102.426	323.133.872.157	66.307.576.209	369.558.448.851	1.085.659.532.631	12.394.238.608.098
JUMLAH		**27.232.821.682.563**	**11.151.967.175.545**	**3.871.558.894.727**	**4.849.419.801.291**	**6.858.907.404.606**	**23.401.886.790.342**	**77.366.561.749.074**

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PPH Pasal 25 OP	1.158.745.003.501	532.533.222.184	4.427.033.385	-
PPH Pasal 25 Badan	16.689.562.066.410	6.268.347.896.957	39.498.743.676	-
PPH Pasal 21	840.612.117.398	335.797.630.522	1.989.365.562	-
PPH Pasal 22	460.823.609.866	15.329.828.250	229.679.685	-
PPH Pasal 23	1.330.016.931.930	608.529.472.837	13.704.710.480	-
PPH Pasal 26	1.864.765.876.531	1.090.911.181.268	289.981.928	-
PPH Pasal 4(2)	422.388.755.066	180.695.532.093	413.850.353	-
PPN	12.559.338.970.837	3.611.624.266.067	84.116.450.591	-
PPnBM	164.399.019.132	39.991.517.502	48.651.940	-
Bunga Penagihan	2.455.483.872.914	1.709.545.567.150	8.009.390.458	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	4.148.450	775.172	3.021.982	-
PBB Sektor Pedesaan	992.258.022.403	305.551.994.449	207.527.496.626	-
PBB Sektor Perkotaan	1.983.413.765.761	548.816.092.586	369.031.007.155	-
PBB Sektor Perkebunan	179.641.728.106	13.517.987.690	-	-
PBB Sektor Perhutanan	268.725.388.398	56.597.496.679	-	-
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	93.587.417.546	5.455.770.409	-	-
PBB Sektor Pertambangan Migas	7.321.343.856.646	8.107.242.282	131.690.829.384	-
BPHTB	-	-	-	-
JUMLAH	**48.785.110.550.896**	**15.331.353.474.096**	**860.980.213.205**	**-**

KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK DAN PIUTANG PAJAK YANG DILAKUKAN UPAYA HUKUM
per 31 Desember 2013

NO	JENIS PAJAK	PENGURANGAN /PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	PPh Pasal 25 Orang Pribadi	23.071.764.389	64.389.691.908	28.989.818.027	752.169.907	117.203.444.231
2	PPh Pasal 25 Badan	1.598.719.217.424	263.755.806.604	2.016.473.496.026	206.312.404.816	4.085.260.924.870
3	PPh Pasal 21	45.551.295.522	5.540.874.490	2.622.507.016	4.003.581.886	57.718.258.914
4	PPh Pasal 22	232.633.291	9.615.688	62.216.952	-	304.465.931
5	PPh Pasal 23	211.862.387.692	76.376.461.830	255.482.542.529	64.604.127.745	608.325.519.796
6	PPh Pasal 26	23.254.528.903	131.666.098.782	68.984.424.462	31.207.056.643	255.112.108.790
7	PPh Pasal 4 (2)	42.614.511.326	8.649.145.938	6.663.890.251	30.004.318.315	87.931.865.830
8	PPN	598.076.101.146	423.476.172.281	345.126.646.584	256.789.523.447	1.623.468.443.457
9	PPnBM	-	876.441.507	-	-	876.441.507
10	Bunga Penagihan	366.130.269.554	-	1.067.279.534	398.531.909	367.596.080.997
11	Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	-	-	-	-
12	PBB Sektor Pedesaan	215.795.149	923.597	-	-	216.718.746
13	PBB Sektor Perkotaan	3.223.422.952	3.296.687	28.000.000	-	3.254.719.639
14	PBB Sektor Perkebunan	4.640.141.070	15.150.276.001	8.315.039.904	1.581.465.290	29.686.922.265
15	PBB Sektor Kehutanan	11.110.259.416	5.908.800.745	-	-	17.019.060.161
16	PBB Sektor Pertambangan dan Non Migas	285.183.675.894	3.616.921.797	112.465.358.004	-	401.265.955.695
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	87.342.855.600	2.881.216.262.760	-	-	2.968.559.118.360
18	BPHTB	-	-	-	-	-
NASIONAL		**3.301.228.859.327**	**3.880.636.790.615**	**2.846.281.219.289**	**595.653.179.958**	**10.623.800.049.189**

PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 Audited			31 Desember 2012 Audited		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	650.819	(3.254)	647.565			-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT			-	7.468.407.149	(37.342.036)	7.431.065.113
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.131.262.182	(30.656.314)	6.100.605.868	5.082.027.403	(25.410.138)	5.056.617.265
4	005	MAHKAMAH AGUNG	151.378.337	(756.891)	150.621.446	474.760.446	(424.301)	474.336.145
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	13.201.201.066.267	(11.131.116.911.979)	2.070.084.154.288	12.570.632.222.592	(7.825.549.363.203)	4.745.082.859.389
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	665.218.971	(3.326.095)	661.892.876	1.207.113	(6.036)	1.201.077
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	25.281.841.510	(495.858.140)	24.785.983.370	3.549.915.000	(21.729.575)	3.528.185.425
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	55.180.849.338	-	55.180.849.338	103.963.942.184	-	103.963.942.184
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	97.199.395.837	(17.470.480.377)	79.728.915.460	83.737.774.393	-	83.737.774.393
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	185.252.175.906	(1.109.479.300)	184.142.696.606	37.497.955.959	(12.670.630.903)	24.827.325.056
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	67.006.879.145	(46.363.232.047)	20.643.647.098	96.450.818.001	(51.808.973.643)	44.641.844.358
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.194.540.637	(25.254.232)	1.169.286.405	2.463.017.960	(233.518.690)	2.229.499.270
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	31.454.850.231	(29.624.083.696)	1.830.766.535	3.433.122.283	(267.203.432)	3.165.918.851
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.631.556.074.257	(10.678.588.650.286)	952.967.423.971	9.399.082.826.374	(8.229.230.514.076)	1.169.852.312.298
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	167.358.155.328	(19.276.250.570)	148.081.904.758	146.322.771.124	(28.407.901.233)	117.914.869.891
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	71.283.499.448	(7.785.474.651)	63.498.024.797	21.639.032.813	(257.575.523)	21.381.457.290
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	45.313.629.168	(344.183.953)	44.969.445.215	132.537.177.149	(53.368.242)	132.483.808.907
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	9.760.197.621	(390.828.368)	9.369.369.253	3.542.282.517	(2.557.490)	3.539.725.027
19	027	KEMENTERIAN SOSIAL	18.420.000	(92.100)	18.327.900	72.350.000	(361.750)	71.988.250
20	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.375.093.339.524	(1.852.235.671.927)	522.857.667.597	2.067.471.003.070	(1.778.821.775.130)	288.649.227.940
21	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.491.148.915	(189.891.639)	31.301.257.276	144.845.719	(724.247)	144.121.472
22	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	5.080.519.248	(18.494.991)	5.062.024.257	3.479.383.930	(13.425.394)	3.465.958.536
23	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	189.010.212	(945.051)	188.065.161	278.248.981	(1.391.245)	276.857.736
24	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT			-	558.536.000		558.536.000
25	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.209.951.250	(6.646.756)	1.203.304.494	2.573.784.317	(12.865.922)	2.560.918.395
26	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	906.748.000	(4.533.740)	902.214.260	79.750.000	(39.875.000)	39.875.000
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	620.606.676	(623.506)	619.983.170	501.354.000	(2.506.770)	498.847.230
28	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	28.710.623.100	(15.857.292.899)	12.853.330.201			-
29	051	LEMBAGA SANDI NEGARA			-	2.557.251.555	(12.786.258)	2.544.465.297
30	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140.482.880	(702.414)	139.780.466			-
31	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.922.376.093	(14.611.880)	2.907.764.213	89.793.732	(448.968)	89.344.764
32	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS			-	2.197.800	(10.989)	2.186.811
33	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.382.670.839	(973.220.823)	2.409.450.016	6.975.637.424	(34.878.201)	6.940.759.223
34	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	57.600.000	(288.000)	57.312.000	24.000.000	(120.000)	23.880.000
35	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.222.238.267.848	(1.441.394.019.885)	1.780.844.247.963	2.780.032.927.625	(1.375.490.622.216)	1.404.542.305.409
36	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9.399.214.241	(236.436.867)	9.162.777.374	15.700.999.463	(80.970.300)	15.620.029.163
37	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	93.687.000	(468.435)	93.218.565			-
38	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.001.382.800		1.001.382.800			-
39	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.737.707.622	(245.852.914)	2.491.854.708	2.747.692.715	-	2.747.692.715
40	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	844.870.837	(4.224.354)	840.646.483			-
41	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	64.857.207.201	(235.066.078)	64.622.141.123	10.465.520.491	(52.327.603)	10.413.192.888
42	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	10.865.108	(3.325)	10.861.783	94.615.072	-	94.615.072
43	077	MAHKAMAH KONSTITUSI			-	299.201.563	(1.496.008)	297.705.555
44	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	18.597.863	(92.989)	18.504.874	25.842.500	(129.213)	25.713.287
45	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.494.456.207	(272.258.665)	2.222.197.542	2.654.712.840	(159.939.521)	2.494.773.319
46	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	268.291.166	(12.213.321)	256.077.845	803.431.921	(4.017.160)	799.414.761
47	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	51.249.240.425	(12.191.520.398)	39.057.720.027	34.195.581.633	(10.477.719.011)	23.717.862.622
48	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	60.442.178	(302.211)	60.139.967	409.674.994	(1.912.442)	407.762.552
49	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	14.320.000	(71.600)	14.248.400	31.840.000	(159.200)	31.680.800
50	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	350.703.000	(133.686.655)	217.016.345	552.899.000	(234.380.305)	318.518.695
51	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.080.000	(5.400)	1.074.600	188.500.000	(942.500)	187.557.500
52	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			-	223.150.531	(1.115.752)	222.034.779
53	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	339.444.740	(307.314.820)	32.129.920	340.693.544	(323.138.897)	17.554.647
54	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.605.000	(38.025)	7.566.975			-
55	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	708.818.565	(61.958.768)	646.859.797	388.611.870	(18.416.978)	370.194.892
56	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	54.827.192.569	(274.135.963)	54.553.056.606			-
57	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	501.567.745.604	(30.252.843.810)	471.314.901.794	516.903.016.873	(30.306.317.535)	486.596.699.338
58	100	KOMISI YUDISIAL	4.302.030.241		4.302.030.241	41.676.185		41.676.185
59	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	2.999.561.508	(2.400.838.768)	598.722.740	3.028.561.850	(15.142.810)	3.013.419.040
60	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	20.483.732.952	(591.399)	20.483.141.553	37.277.302.290	(12.414.448)	37.264.887.842
61	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			-	626.131.123	-	626.131.123
62	107	BADAN SAR NASIONAL	21.487.842.836	(9.582.200.000)	11.905.642.836	12.643.400.000	(12.643.400.000)	-
63	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	47.176.671.490	(44.837.671.490)	2.339.000.000	49.939.919.330	(45.829.210.160)	4.110.709.170
64	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	140.087.759	(700.439)	139.387.320			-
65	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS			-	1.380.700	-	1.380.700
66	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.584.695.311	(12.923.476)	2.571.771.835	852.606.035	(4.263.030)	848.343.005
67	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	66.665.135.919	(18.898.148.481)	47.766.987.438	67.244.099.178	(20.742.470.232)	46.501.628.946
68	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	2.224.602.236		2.224.602.236	11.122.157.614	-	11.122.157.614
69	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	145.678.487.897	(98.536.398.650)	47.142.089.247	185.384.473.276	(100.617.241.298)	84.767.231.978
70	999.05	TRANSFER KE DAERAH	7.723.988.955.720	-	7.723.988.955.720	3.913.204.981.704		3.913.204.981.704
71	999.07	BELANJA SUBSIDI	1.144.616.528.092	(5.723.082.640)	1.138.893.445.452	1.142.775.784.247	(5.713.878.921)	1.137.061.905.326
72	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	99.210.000	-	99.210.000	211.015.741.654	-	211.015.741.654
73	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	106.577.476.989.109	(82.478.446.059.096)	24.099.030.930.013	87.221.853.987.448	(71.832.889.674.798)	15.388.964.312.650
TOTAL			**147.718.830.832.784**	**(107.945.989.574.801)**	**39.772.841.257.982**	**120.925.758.512.257**	**(91.363.128.988.733)**	**29.562.629.523.525**

RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000								Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2013	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2013
			Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009*	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011	Pengembalian Tahun 2012	Pengembalian Tahun 2013		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11	13 = 3 - 12
	BDL eks Dana Talangan												
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	9.502.388.722,00	357.853.052,78	1.609.203.328,00	6.540.713.343,00	12.619.581.693,00	1.645.743.999,00	7.391.557.193,00	49.199.998.670,85	160.880.729.704,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	17.316.896.847,89	2.660.283.085,82	2.048.426.605,69	2.996.154.673,00	3.859.090.506,92	10.666.408.037,00	6.683.428.986,45	229.785.696.742,77	21.269.311.257,23
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	41.314.533.283,56	5.204.191.984,61	5.106.988.512,65	8.779.090.328,44	3.495.995.672,14	19.679.459.985,75	5.571.886.991,80	674.880.203.257,95	3.191.302.109.594,12
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	6.315.060.527,00	385.357.786,00	190.370.760,00	0,00	0,00	1.389.331.696,00	0,00	33.378.309.606,19	168.423.857.329,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	30.746.092.410,83	7.878.883.538,00	2.046.975.489,00	3.296.914.583,00	974.999.999,00	2.331.479.260,00	563.181.363,00	94.710.728.713,83	107.101.885.577,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	3.193.944.737,00	0,00	0,00	0,00	665.664.209,00	1.376.574.591,00	40.440.183.537,00	296.323.026.329,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	29.347.497.898,00	111.657.561.420,00	14.675.177.662,50	19.726.988.659,30	1.960.001.520,16	74.243.254.273,00	22.691.927.168,00	606.325.484.868,76	1.527.040.949.970,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	550.081.483,46	66.997.186.362,78	29.687.774.331,00	37.982.436.510,76	28.020.046.077,00	92.456.945.888,90	27.048.468.169,00	1.140.130.156.216,55	547.219.359.155,98
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	28.197.078.896,79	134.453.227,00	3.489.512.824,00	230.736.340,00	27.808.545.454,00	30.880.337.546,00	33.495.447,00	190.076.879.115,68	709.322.144.190,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	329.500.000,00	11.424.546,00	13.636.365,00	34.624.695.511,00	75.481.301.619,87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	0,00	51.742.862.725,42	0,00	0,00	1.299.224.575,00	6.317.697.524,00	2.411.681.893,00	193.721.070.317,42	385.197.190.381,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	745.723.907,00	24.308.490.543,00	3.590.996.621,00	4.534.212.586,00	1.303.214.409,00	5.412.986.712,00	4.886.022.933,92	63.238.327.812,03	617.846.163.107,55
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	6.710.675.330,00	0,00	210.993.999.999,67	0,33
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	0,00	0,00	78.318.742.617,00	88.420.788,00	47.841.145,00	461.932.823,00	2.723.923.629,00	360.764.861.002,00	150.705.368.324,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		**11.888.938.781.558,30**	**2.730.645.774.151,38**	**228.053.353.976,53**	**323.144.463.070,41**	**140.764.168.750,84**	**84.175.667.811,50**	**83.718.041.051,22**	**252.873.341.829,65**	**81.395.784.730,17**	**3.924.770.595.371,70**	**7.964.168.186.186,58**

No.	ASAL BANK BDL		Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000								Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2013	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2013
			Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011	Pengembalian Tahun 2012	Pengembalian Tahun 2013		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11	13 = 3 - 12
	BDL eks Dana Penjaminan												
1	PT Bank Asiatic		886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	-	8.000.000.000,00	0,00	68.000.000.000,00	818.579.224.443,83
2	PT Bank Dagang Bali		1.331.516.911.477,24	-	-	-	269.906.630.005,00	123.389.652.865,00	-	-	0,00	393.296.282.870,00	938.220.628.607,24
3	PT Bank Global Internasional		804.234.270.395,51	-	-	-	62.260.000.000,00		100.000.000.000,00	-	0,00	162.260.000.000,00	641.974.270.395,51
4	PT Bank Ratu		71.817.985.352,00	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-	0,00	30.000.000.000,00	41.817.985.352,00
5	PT Bank Prasidha Utama		227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	-	-	16.497.034.464,52	-	-	401.880.081,00	0,00	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	28.500.000.000,00	15.000.000.000,00	380.163.664.469,52	133.389.652.865,00	100.000.000.000,00	8.401.880.081,00	0,00	674.455.197.415,52	2.646.827.753.397,06
	TOTAL EKS BANK DALAM LIKUIDASI		**15.210.221.732.370,90**	**2.739.645.774.151,38**	**256.553.353.976,53**	**338.144.463.070,41**	**520.927.833.220,36**	**217.565.320.676,50**	**183.718.041.051,22**	**261.275.221.910,65**	**81.395.784.730,17**	**4.599.225.792.787,22**	**10.610.995.939.583,60**

ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Aset Kredit di PUPN (belum PB/PJPN) namun termasuk debitur ATK	Aset Kredit ATK lainnya	Grand Total
Jumlah	12.931.188.400.441,20	23.846.733.283.504,50	26.483.667.982.331,30	174.159.840.670,22	2.573.370.943.605,10	**66.009.120.450.552,30**

1 Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2013	Saldo Per 31 Desember 2012 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2012
Dollar Amerika	481.935.785,43	5.874.315.288.627,24	319.562.831,35	3.090.172.579.117,20
Rupiah	6.404.475.885.201,56	6.404.475.885.201,56	6.422.343.187.967,61	6.422.343.187.967,61
Yen Jepang	5.615.941.858,85	652.397.226.612,37	5.615.941.858,85	628.760.850.516,85
Deutschmark	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**12.931.188.400.441,20**		**10.141.276.617.601,70**

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

2 Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Mutasi Tahun 2013	Saldo Per 31 Desember 2012 (audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00		577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00		155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00		170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00		4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	63.834.063.875,36	(22.086.350.225,46)	85.920.414.100,82
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00		136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00		596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,00	(44.545.454.546,00)	554.531.818.182,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.870.417.758.563,18	(34.529.726.820,00)	7.904.947.485.383,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00		188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00		790.557.000.000,00
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.528.191.979.248,00	(2.112.250.000,00)	2.530.304.229.248,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00		70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00		406.415.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	5.048.095.000.000,00		5.048.095.000.000,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00		424.656.000.000,00
Jumlah		**23.846.733.283.504,50**	**(103.273.781.591,46)**	**23.950.007.065.096,00**

3 Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2013 (unaudited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2013	Saldo Per 31 Desember 2012*)	Nilai Konversi per 31 Desember 2012 (audited)
Rupiah	13.350.383.864.509,50	13.350.383.864.509,50	13.350.383.864.509,50	13.350.383.864.509,50
Dollar Amerika	1.048.022.609,17	12.774.347.583.173,10	1.048.022.609,17	10.134.378.630.673,90
Yen Jepang	998.413.744,22	115.984.526.569,54	998.413.744,22	111.782.402.802,87
Deutschmark		.		.
Euro	13.263.365,67	223.108.909.815,97	13.263.365,67	169.901.857.361,51
Dollar Australia	1.332.783,73	14.494.902.701,01	1.332.783,73	13.361.676.678,90
Poundsterling	266.124,00	5.348.195.562,12	266.124,00	4.145.908.538,64
Jumlah		**26.483.667.982.331,30**		**23.783.954.340.565,40**

*) Berdasarkan pengecekan ulang SAPB dan MKN

4 Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN (belum PB/PJPN) namun termasuk debitur ATK

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2013
Dollar Amerika	2.176.635,00	26.531.004.015,00
Rupiah	147.628.836.655,22	147.628.836.655,22
Yen Jepang	0,00	0,00
Deutschmark	0,00	0,00
Jumlah		**174.159.840.670,22**

5 Aset Kredit ATK lainnya

Mata Uang	Hasil Penelusuran Aset Kredit (audited)	Hasil Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2012 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2013
Dollar Amerika		26.403.988,65	321.838.217.654,85
Rupiah	271.003.330.923,94	1.980.529.395.026,31	2.251.532.725.950,25
Jumlah			**2.573.370.943.605,10**

Catatan

Kurs Tengah BI	Per 28 Desember 2012	Per 30 Juni 2013	Per 31 Desember 2013
Dollar Amerika	9.670,00	9.929,00	12.189,00
Yen Jepang	111,96	100,35	116,17
Deutschmark	24.979,23	25.305,58	32.801,81
Euro	12.809,86	12.977,22	16.821,44
Dollar Australia	10.025,39	9.183,84	10.875,66
Poundsterling	15.578,86	15.159,11	20.096,63

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2013 (unaudited)
Jumlah	3.812.668.724.099,19	2.736.829.806.145,89	**6.549.498.530.245,08**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2013	Nilai Konversi 31 Desember 2013 (unaudited)	Saldo Per 31 Desember 2012	Nilai Konversi per 31 Desember 2012 (audited)
Dollar Amerika	106.903.814,07	1.303.050.589.699,23	76.147.157,57	736.343.013.701,90
Dollar Singapore	79.397,45	764.437.854,63	0,00	0,00
Rupiah	2.467.568.128.777,47	2.467.568.128.777,47	2.338.948.051.798,34	2.338.948.051.798,34
Yen Jepang	141.216.722,50	16.404.977.192,76	141.216.722,50	15.810.624.251,10
Deutchmark	758.512,78	24.880.590.575,11	758.512,78	18.947.062.914,02
Jumlah		**3.812.668.724.099,19**		**3.110.048.752.665,36**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2013 (unaudited)	Saldo 31 Desember 2012 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
TOTAL		**2.736.829.806.145,89**	**2.736.829.806.145,89**

Catatan

	Mata Uang	Per 28 Desember 2012	Per 30 Juni 2013	Per 31 Desember 2013
1	**Dollar Amerika**	9.670,00	9.929,00	12.189,00
2	**Yen Jepang**	111,96	100,35	116,17
3	**Deutschmark**	24.979,23	25.305,58	32.801,81
4	**Euro**	12.809,86	12.977,22	16.821,44
5	**Dollar Australia**	10.025,39	9.183,84	10.875,66
6	**Poundsterling**	15.578,86	15.159,11	20.096,63
7	**Dollar Singapura**	7.907,12	7.841,28	9.627,99

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

No	Uraian	Formula Penyisihan Piutang	Perhitungan			Jumlah Penyisihan
			%	Outstanding 31 Desember 2013	Agunan	
1	Aset kredit eks BPPN	92% x (Outstanding piutang 31 Desember 2013)	0,92	66.009.120.450.552		60.728.390.814.508,20
2	Aset kredit eks kelolaan PT PPA	92% x (Outstanding piutang 31 Desember 2013)	0,92	6.549.498.530.245		6.025.538.647.825,47
3	Aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA	92% x (Outstanding piutang 31 Desember 2013)	0,92	2.502.653.456.999		2.302.441.180.438,75
4	Piutang eks BDL	100% x (outstanding piutang 31 Desember 2013 - nilai agunan)	1,00	10.610.995.939.584	138.315.859.905	10.472.680.079.678,60
5	Piutang pada PT PPA	92% x (Outstanding piutang 31 Desember 2013)	0,92	49.852.367.635		249.261.838,18
Total						**79.529.299.984.289,20**

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 Audited			31 Desember 2012 Audited		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	39.000.000	(195.000)	38.805.000			-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	517.472.222	(2.587.361)	514.884.861			-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	53.046.296	(2.834.630)	50.211.666	85.162.037	(1.011.204)	84.150.833
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.243.658.356	(987.358.646)	256.299.710	1.246.335.592	(961.769.723)	284.565.869
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.400.000	(12.000)	2.388.000	2.400.000	(12.000)	2.388.000
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	13.855.000	(69.275)	13.785.725	50.240.000	(251.200)	49.988.800
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.278.573.422	(91.392.867)	18.187.180.555	86.972.704	(434.864)	86.537.840
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	35.145.475.971	(34.643.510.915)	501.965.056	33.217.459.509	(32.731.700.958)	485.758.551
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.730.080	(18.650)	3.711.430	5.232.005	-	5.232.005
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386.254.414	(6.054.272)	380.200.142	178.837.498	(894.188)	177.943.310
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	10.574.192.619	(9.568.068.047)	1.006.124.572	9.625.650.721	(9.414.674.698)	210.976.023
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	5.639.410.900	(693.164.878)	4.946.246.022	1.643.001.627	(602.009.332)	1.040.992.295
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			-	1.600.000	(8.000)	1.592.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	35.650.000	(178.250)	35.471.750	62.107.000	(310.535)	61.796.465
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	25.703.566.497	(128.517.833)	25.575.048.664	287.903.313.703	(215.000)	287.903.098.703
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	144.628.360	(723.142)	143.905.218	223.761.170	(959.806)	222.801.364
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.300.000	(247.500)	48.052.500	44.375.000	(497.875)	43.877.125
18	025	KEMENTERIAN AGAMA			-	1.500.000	-	1.500.000
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.387.759.750	(1.121.047.578)	10.266.712.172			-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	7.262.000	(36.310)	7.225.690	16.359.900	(81.800)	16.278.100
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	9.432.750.807	(9.248.181.144)	184.569.663	9.481.645.887	(9.223.360.770)	258.285.117
22	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	152.102.083	(760.510)	151.341.573	503.214.788	(2.516.074)	500.698.714
23	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	7.251.576	(36.258)	7.215.318	7.251.576	(36.258)	7.215.318
24	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
25	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	36.154.239	(12.821.525)	23.332.714	28.098.410	(140.492)	27.957.918
26	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.000.000	(20.000.000)	-	24.000.000	(120.000)	23.880.000
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	16.426.934.596	(16.187.145.329)	239.789.267	16.452.257.474	(16.190.794.280)	261.463.194
28	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	74.400.000	(372.000)	74.028.000	57.600.000	(3.258.000)	54.342.000
29	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	443.075.102	(2.215.376)	440.859.726	459.093.088	(2.295.466)	456.797.622
30	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.760.733.628	(8.803.668)	1.751.929.960	681.930.564	(3.409.653)	678.520.911
31	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL			-	29.285.148	(146.426)	29.138.722
32	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	29.410.828	(1.276.683)	28.134.145			-
33	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			-	19.000.000	(15.000.000)	4.000.000
34	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	353.064.478	(1.765.323)	351.299.155	1.347.250	(6.736)	1.340.514
35	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	71.956.477	(503.585)	71.452.892			-
36	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	37.060.296	(185.301)	36.874.995	14.880.000	(74.400)	14.805.600
37	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	846.276.253	(7.140.756)	839.135.497	104.199.992	(521.000)	103.678.992
38	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	627.769.460	(3.138.847)	624.630.613	1.838.025.728	(275.936.097)	1.562.089.631
39	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	18.700.000	(93.500)	18.606.500			-
40	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	3.248.000	(16.240)	3.231.760	1.200.000	(6.000)	1.194.000
41	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.527.484.590	(7.637.423)	1.519.847.167	11.304.000	(56.520)	11.247.480
42	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	394.826.000	(1.974.130)	392.851.870	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935
43	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	6.000.000	(30.000)	5.970.000	6.000.000	(30.000)	5.970.000
44	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	41.400.000	(207.000)	41.193.000			-
45	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.976.188	(9.881)	1.966.307	2.964.288	(14.821)	2.949.467
46	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	297.819.800	(1.489.099)	296.330.701	1.648.114.290	(8.240.571)	1.639.873.719
47	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	427.071.208	(333.761.103)	93.310.105	363.589.208	(333.443.693)	30.145.515
48	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	6.225.861	(31.129)	6.194.732			-
49	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	8.500.000	(42.500)	8.457.500	13.200.000	(66.000)	13.134.000
50	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	11.626.600	(58.133)	11.568.467	54.847.998	(274.239)	54.573.759
51	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	177.522.930	(165.072.930)	12.450.000	178.941.115	(178.941.115)	-
52	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	14.065.000	(70.325)	13.994.675	31.696.201	(158.481)	31.537.720
TOTAL			**142.483.141.891**	**(73.250.874.352)**	**69.232.267.539**	**366.808.908.475**	**(69.955.682.840)**	**296.853.225.635**

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.849.704.103	2.881.355.431
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	17.309.111.644	14.890.423.697
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	19.150.915.144	24.539.681.115
4	005	MAHKAMAH AGUNG	9.497.572.576	8.996.475.335
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	144.586.201.387	160.148.509.223
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	213.437.412.312	203.336.908.519
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.147.008.817	74.258.049.593
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	398.277.629.566	385.938.241.128
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46.785.908.919	41.167.550.689
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	44.795.552.443.588	44.647.358.307.542
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	426.696.399.246	324.101.005.634
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	282.569.446.845	284.672.873.440
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	1.206.628.616	913.269.070
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.512.893.144.452	905.627.537.236
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	32.289.170.851	17.214.862.186
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	20.402.006.545	39.520.592.845
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.970.488.338	
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.231.516.194.138	819.945.422.944
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	264.005.547.156	154.789.258.848
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.931.815.998	1.305.581.206
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239.651.661.055	200.038.773.429
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	205.520.281.436	195.413.139.998
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	884.762.608.877	982.793.939.244
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	467.370.571.744	414.626.580.637
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	65.972.592.018	80.889.655.702
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	8.411.534.879	4.068.412.628
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.616.035.975	50.044.362.305
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		534.944.407
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	313.879.721.108	307.581.276.149
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	94.971.603.310	102.210.748.516
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	439.780.151.946	335.432.858.964
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	485.483.279.585	397.247.031.751
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	164.817.852	399.328.494
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	868.405.239	1.072.644.674
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.255.031.262	909.558.824
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	125.514.311.471	93.444.658.629
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.602.538.489	1.915.538.403
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	20.475.249.889	16.103.260.628
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	34.117.226.773	31.017.567.337
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	301.287.033	151.081.644
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.442.227.575	690.774.025
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.573.109.228	1.885.079.937
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.079.068.742	812.707.447
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.689.082.917	2.991.965.980
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.982.636.307	6.527.651.935
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	10.600.900	25.513.700
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	18.195.228.568	18.257.177.113
48	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	2.931.245.793	3.419.627.611
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	56.008.738.902	61.046.164.797
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.664.585.510	448.464.020
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.307.775.451	51.655.136.288
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.169.097.500	11.143.402.700
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.104.874.712.112	2.514.597.356.111
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	124.387.132.591	78.905.931.172
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	36.329.936	44.665.005
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	12.624.997.621	9.862.079.965
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	23.452.140.836	18.026.512.814
58	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	262.268.700	70.668.031.896
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	534.233.212.363	632.375.797.484
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	184.318.108	84.120.934
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	31.525.309.405	21.465.620.019
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	483.295.950.395	401.403.738.376
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	1.600.552.858	1.260.238.329
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.367.883.281	813.780.988
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.055.107.211	6.554.603.435
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	57.070.939.693	56.944.602.898

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	10.827.308.661	11.653.945.045
68	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.780.250	629.120
69	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	45.320.864.533	34.885.205.578
70	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	115.001.076	119.383.110
71	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	84.774.203.857	133.306.056.181
72	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	220.628.744	299.852.579
73	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	869.421.320	681.201.740
74	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.340.555.985	1.929.728.129
75	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	288.606.170	670.406.839
76	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.502.824.570	14.097.031.747
77	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.185.610.369	7.385.810.532
78	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	13.396.063.435	5.832.728.260
79	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	2.439.007.375.933	911.749.448.150
80	091	BLU KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	6.087.250	12.999.600
81	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	173.037.327.947	11.286.179.408
82	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	29.716.663.603	26.135.356.185
83	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS		76.642.906.311
84	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3.190.047.187	2.247.400.031
85	100	KOMISI YUDISIAL	547.186.590	824.138.257
86	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	308.474.413.427	475.216.786.893
87	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	51.531.847.528	54.820.922.799
88	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	274.385.186	132.222.804
89	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.533.027.369	1.322.006.083
90	107	BADAN SAR NASIONAL	30.852.497.323	19.306.830.535
91	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	828.308.728	1.205.184.714
92	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	71.154.439	45.377.000
93	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	132.580.525	140.936.150
94	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.910.919.579	636.190.150
95	112	BLU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	11.056.561.897	12.577.082.111
96	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	12.291.053	4.928.250
97	114	SEKRETARIAT KABINET	1.773.758.802	1.034.256.952
98	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	133.954.620	67.784.000
99	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	7.002.557.226	6.986.630.375
100	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	10.971.302.106	8.072.215.335
101	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.321.624.103	3.321.624.103
102	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	3.509.204.311.133	4.892.498.398.336
TOTAL			**63.205.251.965.209**	**62.016.561.796.415**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2013
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2013	A	863.949	856.818	7.130	46.471	23.939	29.663	-	29.663	6.742	22.921	15.604	38.525
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2013	BB	1.548.668	1.452.846	95.822	83.994	201.700	(21.884)	75.036	(96.920)	3.759	(100.679)	-	(100.679)
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2013	AA	5.732.518	5.060.247	672.271	80.225	48.110	704.386	103.198	601.188	233.884	367.304	-	367.304
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2013	AA	5.442.741	4.572.558	870.183	52.646	0	922.829	247.393	675.436	244.686	430.750		430.750
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2013	AA	4.972.847	4.841.734	131.113	79.479	35.843	174.750	-	174.750	44.365	130.385		130.385
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2013	AA	2.341.213	2.219.380	121.834	5.516	-	127.350	36.302	91.048	28.613	62.436	4.252	66.687
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2013	A	4.616.805	4.257.247	359.558	92.795	44.535	407.818	293.251	114.567	35.915	78.652		78.652
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2013	AA	1.868.311	1.751.796	116.515	71.099	-	187.614	7.632	179.982	60.363	119.619	18	119.637
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2013	A	1.524.755	1.441.284	83.472	105.992	53.227	136.237	73.108	63.128	42.530	20.599	-	20.599
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2013	AA	2.375.078	2.183.257	191.821	217.762	195.884	213.699	28.285	185.414	56.085	129.329	-	129.329
11		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2013	A	2.097.807	1.982.000	115.806	23.073	31.710	107.169	62.937	44.232	19.743	24.488		24.488
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2013	AA	1.159.356	932.318	227.039	-	52.544	174.495	-	174.495	34.490	140.005	-	140.005
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2013	BBB	3.058.070	2.984.873	73.196	48.655	77.877	43.974	49.087	(5.113)	(3.914)	(1.198)		(1.198)
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2013	B	402.423	492.456	(90.033)	-	45.419	(135.452)	-	(135.452)	(451)	(135.002)	-	(135.002)
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2013	BBB	4.137.132	4.068.699	68.432	88.845	63.574	93.704	-	93.704	60.462	33.242	-	33.242
16	Kehutanan	Perum Perhutani	Audited 2013	Sehat AA (83,50)	3.955.790	3.690.266	265.524	-	879	264.645	3.799	260.846	56.756	204.090		204.090
17		PT Inhutani I	Audited 2013	Sehat A (68,44)	174.945	165.826	9.119	26.422	9.743	25.797	-	25.797	4.181	21.616		21.616
18		PT Inhutani II	Audited 2013	Sehat A (71,50)	62.257	58.686	3.571	9.586	8.930	4.227	-	4.227	(517)	4.744	(224)	4.520
19		PT Inhutani III	Audited 2013	Krg Sehat BBB (62	17.623	30.331	(12.708)	7.922	2.650	(7.437)	139	(7.575)	98	(7.673)	-	(7.673)
20		PT Inhutani IV	Audited 2013	Sehat A (67,5)	43.968	46.740	(2.771)	2.997	1.882	(1.656)	-	(1.656)	(36)	(1.620)	3.374	1.754
21		PT Inhutani V	Audited 2013	Sehat A (72,0)	11.538	16.016	(4.478)	34.989	22.475	8.036		8.036	(100)	8.136		8.136
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2013	Sehat A (76.30)	187.911	185.851	2.061	33.172	23.266	11.967	-	11.967	401	11.565	-	11.565
23		Perum Perikanan Indonesia	Audited 2013	Sehat AAA (97,6)	179.155	174.667	4.488	13.270	2.803	14.955	-	14.955	(218)	15.173	7	15.180
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2013		28.890.079	27.591.048	1.299.031	635.988	861.777	1.073.242	1.549.467	(476.226)	(134.170)	(342.056)		(342.056)
25		PT Sang Hyang Seri	Audited 2013		381.324	546.912	(165.589)	48.507	750.432	(867.514)	80.943	(948.457)	(236.452)	(712.005)	-	(712.005)
26		PT Pertani	Audited 2013	Kurang Segat (BB"42")	1.416.869	1.336.043	80.826	14.334	372.001	(276.841)	61.066	(337.908)	(59.671)	(278.237)	-	(278.237)
27	Pupuk	PT Pupuk Indonesia	Audited 2013	Sehat AA (90,45)	56.320.230	48.788.998	7.531.232	1.176.410	1.438.611	7.269.031	2.089.642	5.179.389	1.435.992	3.743.397	(246.028)	3.497.368
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2013	Sehat AAA (95,60)	332.625	244.394	88.232	8.021	11.248	85.005	-	85.005	18.550	66.455	(4.500)	61.955
29		Perum Jasa Tirta II	Audited 2013	Sehat AA (91,65)	534.877	437.293	97.584	-	-	97.584	-	97.584	19.755	77.829		77.829
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2013		11.298.322	10.877.290	421.032	85.316	578.618	(72.270)	60.660	(132.930)	(542.878)	409.947	191	410.139
31		PT Timah Tbk	Audited 2013		5.852.453	5.027.005	825.448	15.633	4.747	836.334	34.832	801.502	257.101	544.401	5.296	549.697
32		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2013		11.209.219	9.351.877	1.857.342	610.245	-	2.467.587	6.225	2.461.362	607.081	1.854.281	497.069	2.351.350
33		PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)	Unaudited 2013		4.396.916	4.023.059	373.857	153.087	47.951	478.993	-	478.993	115.303	363.691	-	363.691
34		PT Pertamina	Audited 2013	Sehat AA	866.663.521	807.690.043	58.973.478	10.601.371	2.396.187	67.178.662	5.832.875	61.345.787	23.961.453	37.384.333	2.079.346	39.463.679
35		PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2013		36.585.486	25.507.902	11.077.585	2.928.817	26.286	13.980.116	266.495	13.713.620	2.818.062	10.895.558	(69.101)	10.826.457
36		PT Energy Management Indonesia	Audited 2013		8.945	13.886	(4.941)	1.009	1.344	(5.276)	-	(5.276)		(5.276)	-	(5.276)
37		PT Batan Teknologi	Unaudited 2013	Kurang Sehat BB	20.581	23.873	(3.292)	647	1.514	(4.159)	-	(4.159)	-	(4.159)	-	(4.159)
38		PT Semen Indonesia Tbk	Audited 2013		24.501.241	17.528.856	6.972.385	288.183	-	7.260.568	340.169	6.920.400	1.566.101	5.354.299	497.724	5.852.023
39		PT Semen Baturaja	Audited 2013	91,22 (Sehat AA)	1.168.608	706.400	462.208	73.152	134.894	400.466	64	400.402	88.218	312.184		312.184
40		PT Semen Kupang	Audited 2013		14.681	4.749	9.932	243.010	55.171	197.771	1.274	196.497	-	196.497	-	196.497
41		PT Dirgantara Indonesia	Audited 2013		4.031.728	4.017.086	14.642	436.764	128.714	322.691	160.610	162.081	4.397	157.684	(242.357)	-84673,619
42		PT PAL Indonesia	Audited 2013		836.772	796.397	40.375	94.558	399.515	(264.583)	137.779	(402.362)	(20.225)	(382.138)	(5.039)	(387.177)
43		PT Pindad	Audited 2013		1.877.574	1.674.328	203.245	115.583	157.024	161.804	34.713	127.091	29.487	97.604	-	97.604
44		PT Dahana	Audited 2013	82,75 (Sehat AA)	947.801	893.375	54.426	-	5.431	48.995	-	48.995	8.728	40.267	11.223	51.490
45		PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2013		25.407.337	25.893.495	(486.158)	1.074.875	212.015	376.701	556.452	(179.751)	13.981	(193.732)	(613.326)	(807.058)
46		PT INKA	Audited 2013	47,25 (Kurang Sehat BBB)	508.699	550.371	(41.672)	-	8.651	(50.323)	50.982	(101.305)	(4.522)	(96.784)	-	(96.784)
47		PT Barata Indonesia	Audited 2013	80 (Sehat A)	807.902	764.624	43.278	24.762	22.659	45.380	17.106	28.274	13.306	14.969		14.969
48		PT Boma Bisma Indra	Audited 2013	30,06 (Kurang Sehat B)	166.424	177.418	(10.994)	8.128	17.097	(19.963)	-	(19.963)	-	(19.963)		(19.963)
49		PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2013		777.046	776.106	940	-	7.532	(6.592)	-	(6.592)	(4.019)	(2.573)		(2.573)
50		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Unaudited 2013		330.009	384.344	(54.335)	27.478	43.216	(70.073)	24.307	(94.380)	169	(94.549)	(285)	(94.834)
51		PT Industri Kapal Indonesia	Audited 2013		66.536	60.213	6.324	7.482	5.393	8.412	-	8.412	(211)	8.623		8.623
52		PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2013		91.833	128.721	(36.888)	7.431	18.609	(48.065)	-	(48.065)	(6.891)	(41.174)	(15.729)	(56.903)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11
53		PT Garam	Audited 2013		268.873	243.954	24.919	13.338	10.095	28.162	3.894	24.268	4.745	19.523		19.523
54		PT Primissima	Audited 2013		150.669	156.496	(5.827)	-	4.661	(10.488)	-	(10.488)	(839)	(9.650)		(9.650)
55		PT Iglas	Audited 2013		105.279	145.886	(40.607)	14.206	45.044	(71.444)	24.795	(96.239)	(25.310)	(70.929)		(70.929)
56		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005		33.718	51.344	(17.626)	11.790	734	(6.570)	15.435	(22.005)	432	(22.437)		(22.437)
57		Perum Peruri	Audited 2013	Sehat, AA, 94,50	2.353.824	1.925.859	427.965	71.113	9.275	489.803	50.141	439.661	164.098	275.564		275.564
58		PT Balai Pustaka	Unaudited 2013		20.735	46.568	(25.832)	177.715	2.540	149.343	-	149.343	2.634	146.709		146.709
59		Perum PNRI	Unaudited 2013		494.088	454.706	39.383	8.564	4.964	42.983	3.569	39.414	10.567	28.847		28.847
60		PT Kertas Leces	Audited 2013	Kurang Sehat B	149.012	230.102	(81.090)	48.636	155.555	(188.008)	12.085	(200.093)	(48.985)	(151.109)	15.966	(135.143)
61		PT Kertas Kraft Aceh	Audited 2013		-	25.360	(25.360)	513	25.233	(50.079)	39.919	(89.999)	-	(89.999)	-	(89.999)
62		PT Indofarma Tbk	Audited 2013	Kurang Sehat	1.337.498	1.369.804	(32.306)	136	-	(32.171)	30.862	(63.033)	(8.810)	(54.223)	-	(54.223)
63		PT Kimia Farma Tbk	Audited 2013	Sehat AA, 88,84	4.348.074	3.055.922	1.292.152	44.493	1.042.880	293.765	9.640	284.125	68.483	215.642	-	215.642
64		PT Bio Farma	Audited 2013	Sehat AAA, 96	1.853.682	1.100.740	752.942	152.838	127.191	778.589	-	778.589	206.121	572.468		572.468
65		PT Telkom Tbk	Audited 2013	Sehat	85.546.000	57.700.000	27.846.000	836.000	1.533.000	27.149.000	-	27.149.000	6.859.000	20.290.000	112.000	20.402.000
66		PT INTI	Audited 2013	KS, BBB, 61,30	1.466.790	1.369.158	97.632	16.096	66.712	47.017	22.465	24.552	20.252	4.300	-	4.300
67		PT LEN Industri	Audited 2013	Sehat AA, 89	2.058.074	1.881.725	176.349	22.351	46.801	151.899	34.787	117.112	44.786	72.327	2.527	74.854
68		Perum LKBN Antara	Audited 2013		184.946	188.900	(3.954)	4.373	3.399	(2.981)	-	(2.981)	1.277	(4.258)	-	(4.258)
69		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2013		5.348	6.691	(1.344)	594	0	(749)		(749)		(749)		(749)
70	Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2013		257.404.581	220.911.147	36.493.434	2.528.502	48.096.810	(9.074.874)	30.146.545	(39.221.419)	(9.653.958)	(29.567.461)		(29.567.461)
71		PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2013	Sehat "AA" (93.23)	1.893.989	1.180.905	713.084	77.986	87.595	703.475	79.205	624.270	135.025	489.246	-	489.246
72		PT Pelabuhan Indonesia II	Audited 2013	Sehat "AA" (87,50)	6.116.088	4.753.036	1.363.051	1.352.376	97.454	2.617.974	68.864	2.549.110	548.347	2.000.763	4.903	2.005.666
73		PT Pelabuhan Indonesia III	Audited 2013	93,70 "Sehat AA"	5.120.875	3.146.789	1.974.086	180.861	20.588	2.134.360	33.436	2.100.923	528.483	1.572.440	-	1.572.440
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2013	Sehat "AA" (93,53	1.697.831	1.119.043	578.789	91.284	147.211	522.862	-	522.862	133.656	389.206	(38)	389.168
75		PT Angkasa Pura I	Audited 2013	Sehat AA (87,50)	3.063.906	2.370.808	693.098	418.261	291.816	819.543	-	819.543	174.375	645.169	(54.424)	590.745
76		PT Angkasa Pura II	Audited 2013	Sehat AAA (95,39)	4.205.916	2.943.104	1.262.812	297.745	61.214	1.499.343	-	1.499.343	466.595	1.032.749	(11.221)	1.021.528
77		PT Kereta Api Indonesia	Audited 2013	Sehat (AA)	8.600.972	7.540.858	1.060.114	74.777	37.386	1.097.505	308.199	789.306	228.590	560.717	-	560.717
78		Perum PPD	Audited 2013	Kurang Sehat	66.785	68.687	(1.902)	7.560	3.973	1.685	-	1.685	1.520	165		165
79		Perum DAMRI	Audited 2013	Sehat	990.720	918.638	72.081	15.516	3.374	84.224	-	84.224	(4.847)	89.071		89.071
80		PT Merpati Nusantara Airlines	Unaudited 2013		1.725.850	2.217.083	(491.233)	429.057	1.156.363	(1.218.539)	-	(1.218.539)	-	(1.218.539)		(1.218.539)
81		PT Garuda Indonesia	Audited 2013		45.295.258	45.218.146	77.112	759.732	-	836.844	729.391	107.453	(29.068)	136.521	6.893	143.415
82		PT PELNI	Audited 2013		2.494.374	2.831.176	(336.802)	9.198	250.368	(577.972)	21.028	(599.000)	35.175	(634.175)	-	(634.175)
83		PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	Audited 2013		1.675.031	1.543.052	131.979	56.922	6.308	182.592	-	182.592	31.478	151.114		151.114
84		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2013		147.215	119.677	27.538	502.224	123.094	406.668	-	406.668	1.848	404.819		404.819
85		PT Amarta Karya	Audited 2013	S A (76,00)	284.162	264.488	19.674	2.119	740	21.052	2.465	18.588	6.864	11.724	-	11.724
86		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2013	S AA (83,00)	9.854.155	8.935.405	918.751	152.427	248.895	822.283	107.919	714.365	305.927	408.438	1.424	409.862
87		PT Istaka Karya	Unaudited 2013		12.482	12.420	62	154	-	216	-	216	46	170		170
88		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2013		11.655.844	10.582.459	1.073.385	102.206	141.509	1.034.082	267.192	766.890	346.170	420.720	-	420.720
89		PT Hutama Karya	Audited 2013	S AA (81,50)	5.501.538	5.199.960	301.579	136.797	133.877	304.499	-	304.499	174.371	130.128	-	130.128
90		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2013	S AA (84,75)	12.145.882	10.929.720	1.215.962	(9.938)	189.334	1.016.690	-	1.016.690	392.319	624.372	-	624.372
91		Perum Perumnas	Audited 2013	S A (73,70)	1.203.671	1.004.256	199.415	57.135	113.488	143.062	-	143.062	49.192	93.871	-	93.871
92		PT Brantas Abipraya	Audited 2013	S AAA (96)	1.515.427	1.354.146	161.281	5.301	24.608	141.974	32.633	109.341	36.557	72.784		72.784
93		PT Waskita Karya, Tbk	Audited 2013	S AA (84,25)	12.145.882	10.929.720	1.215.962	(135.244)	64.028	1.016.690	-	1.016.690	392.319	624.372	-	624.372
94		PT Bina Karya	Audited 2013	S AA (84,17)	52.943	51.349	1.594	5.678	693	6.579	436	6.144	2.728	3.415		3.415
95		PT Indah Karya	Audited 2013	S (A) (68,25)	28.175	26.114	2.061	2.625	590	4.095	321	3.773	-	3.773		3.773
96		PT Yodya Karya	Audited 2013	S AA (94,75)	168.557	149.205	19.352	1.226	2.717	17.861	2.418	15.443	7.015	8.428		8.428
97		PT Indra Karya	Audited 2013	S AA (86,50)	94.546	88.426	6.120	2.388	108	8.400	1.073	7.327	3.538	3.790	-	3.790
98		PT Virama Karya	Audited 2013	AAA	168.055	144.974	23.081	1.411	6.258	18.234	4.715	13.519	5.085	8.434		8.434
99		PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2013	Sehat AA	675.288	347.859	327.429	45.143	177	372.394	2.207	370.188	53.087	317.101	-	317.101
100		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2013		32.858	19.939	12.919	3.959	55	16.822	-	16.822	1.730	15.092	-	15.092
101		PT Kawasan Industri Medan	Audited 2013	Sehat AA	119.220	59.192	60.029	5.190	-	65.219	534	64.685	6.562	58.123		58.123
102		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2013	Sehat AAA	51.608	24.307	27.302	1.548	22	28.828	-	28.828	3.337	25.491	(146)	25.345
103		PT PDIP Batam	Audited 2013	"A" Sehat (76,6)	73.360	71.568	1.792	4.889	1.195	5.486	-	5.486	1.652	3.834		3.834
104		PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2013		261.359	257.802	3.557	591	3.782	365	-	365	(518)	883	-	883
105		PT Bhanda Ghara Reksa	Audited 2013	Sehat, AAA, 96,00	736.962	666.020	70.942	5.913	6.187	70.668	-	70.668	20.578	50.090		50.090
106		PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2013	Sehat	71.341.628	47.789.917	23.551.711	510.126	-	24.061.837	-	24.061.837	5.231.903	18.829.934	(833.848)	17.996.086
107		PT Bank BRI Tbk	Audited 2013	Sehat	59.461.084	15.354.813	44.106.271	10.130.948	26.327.153	27.910.066	-	27.910.066	6.555.736	21.354.330	(1.437.676)	19.916.654
108		PT Bank BNI Tbk	Audited 2013	Sehat	26.450.708	7.392.427	19.058.281	9.800.701	17.580.817	11.278.165	-	11.278.165	2.220.234	9.057.931	(2.814.087)	6.243.844
109		PT Bank BTN Tbk	Audited 2013	Sehat	11.995.538	9.859.629	2.135.909	22.316	17.454	2.140.771	-	2.140.771	578.610	1.562.161	(119.104)	1.443.057

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11
110		PT JIWASRAYA	Audited 2013	Sehat A (skor 80)	7.466.446	6.992.119	474.327	-	-	474.327	-	474.327	13.377	460.950	-	460.950
111		PT ASABRI	Audited 2013	Sehat, Skor 80 (A)	1.866.817	1.798.741	68.077	-	-	68.077	-	68.077	676	67.400	(594.584)	(527.184)
112		PT JAMSOSTEK (dhi BPJS Ketenagakerjaan)	Audited 2013	Sehat	9.129.783	8.022.657	1.107.126	1.779.412	78.041	2.808.497	-	2.808.497	520.854	2.287.643	-	2.287.643
113		PT TASPEN	Audited 2013	Sehat (AA) skor 81	17.623.861	17.013.051	610.811	761.262	40.314	1.331.758	-	1.331.758	7.466	1.324.293	(4.936.686)	(3.612.394)
114		PT ASKES (BPJS Kesehatan)	Audited 2013		10.032.137	10.167.770	(135.633)	790.320	371.360	283.327	-	283.327	(10.620)	293.947	(9.543)	284.404
115		PT JASINDO	Audited 2013	Sehat AA nilai skor 92,5	1.195.318	1.078.346	116.972	648.851	365.937	399.886	-	399.886	95.803	304.083	(37.138)	266.944
116		PT RUI	Audited 2013		1.395.684	1.285.362	110.322	1.118	983	110.458	-	110.458	6.760	103.698	(88.046)	15.652
117		PT Jasa Raharja	Audited 2013	Sehat 87,00	5.463.282	3.056.007	2.407.275	-	-	2.407.275	-	2.407.275	483.644	1.923.631	(479.371)	1.444.261
118		PT ASEI	Audited 2013	Sehat AAA nilai sko	482.771	367.531	115.240	1.056	-	116.295	-	116.295	8.959	107.336	-	107.336
119		PT ASKRINDO	Audited 2013	Sehat 97,22	729.503	342.545	386.958	24.877	-	411.835		411.835	61.118	350.717		350.717
120		Perum JAMKRINDO	Audited 2013	Sehat AA	1.601.806	1.455.160	146.646	449.461	-	596.107		596.107	70.898	525.209	(80.069)	445.140
121		PT PPA	Audited 2013	A	1.995.195	1.874.435	120.760	97.695		218.455	59.505	158.950	55.433	103.517	(15.769)	87.748
122		PT Danareksa	Audited 2013	Sehat	378.446	185.062	193.384	27.627	1.933	219.079	150.072	69.007	45.918	23.089	(28.339)	(5.250)
123		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2013		972.641	305.717	666.924	83.706	667.568	83.062	-	83.062	34.542	48.520	186	48.706
124		Perum Pegadaian	Audited 2013	Sehat	7.864.767	5.327.789	2.536.978	26.903	15	2.563.866	2.172.576	391.290	649.178	(257.888)	-	(257.888)
125		PT PANN Multi Finance	Unaudited 2013		313.070	191.024	122.046	155.478	199.168	78.356	-	78.356	35.884	42.472		42.472
126		PT Bahana PUI	Audited 2013	Sehat	650.408	447.517	202.891	38.421	-	241.312	72.399	168.913	49.287	119.626	-	119.626
127		PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Audited 2013	BB	1.484.565	1.487.182	(2.616)	25.975	-	23.359	-	23.359	5.140	18.219		18.219
128		PT Sarinah	Audited 2013	AA	313.271	300.590	12.681	23.493	3.439	32.735	-	32.735	4.922	27.813	-	27.813
129		PT Surveyor Indonesia	Audited 2013	S AA (94,16)	880.896	751.380	129.516	24.790	9.699	144.607	-	144.607	40.818	103.789	491	104.280
130		PT Sucofindo	Audited 2013	S AAA (96,5)	1.850.607	1.582.417	268.190	62.990	118.032	213.147	1.580	211.567	56.633	154.934	(41.473)	113.460
131		PT BKI	Audited 2013	S AAA	555.197	419.032	136.165	11.698	2.878	144.985		144.985	39.870	105.115	1.234	106.349
132		PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2013	Kurang Sehat	306.731	373.226	(66.496)	52.972	-	(13.524)	29.345	(42.869)	-	(42.869)	3.548	(39.321)
133		PT TWC PBR	Audited 2013	Sehat	212.979	167.286	45.693	-	-	45.693		45.693	11.399	34.294	434	34.728
134		PT Pengembangan Pariwisata Bali	Audited 2013	Sehat	128.145	91.132	37.012	26.660	13.667	50.005	-	50.005	(2.248)	52.254	(450)	51.804
135		PT Berdikari	Unaudited 2013	Kurang Sehat BBB	362.660	390.150	(27.490)	90.159	10.709	51.960	13.289	38.671	7.416	31.255		31.255
136		PT Jasa Marga Tbk	Audited 2013	S AA (87,1)	**10.294.668**	**7.631.490**	2.663.177	**0**	**4.303**	2.658.874	**944.219**	1.714.655	**476.835**	1.237.821	**(1.194)**	1.236.627
137		PT Pos Indonesia	Audited 2013	Sehat A, 78,5	4.174.896	3.858.607	316.289	58.549	36.025	338.814	21.816	316.998	70.862	246.135	237	246.372
138		PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2013	Sehat 100,76	43.290	27.800	15.490	17.443	647	32.286	-	32.286	345	31.941	-	31.941
139		PT Survai Udara Penas	Audited 2013	B	5.043	22.570	(17.527)	2.919	467	(15.076)	3.849	(18.925)	-	(18.925)		(18.925)
140		Perum LPPNPI	Audited 2013	Sehat AA (80,60)	1.379.385	834.479	544.905	93.785	7.827	630.863	-	630.863	160.027	470.835		470.835
		GRAND TOTAL	140		1.890.281.301	1.615.481.655	274.799.646	54.263.689	108.911.967	220.151.369	47.810.651	172.340.718	50.168.389	122.172.329	(9.515.848)	112.656.481

IHKTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2013

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13x16
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2013	A	181.636	1.134.721	-	1.316.356	555.859	531.205	1.087.064	135.951	-	-	70.177	22.921	229.049	243	229.292	100%	229.049
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2013	BB	920.744	2.400.722	-	3.321.466	1.740.661	1.389.010	3.129.671	327.606	-	-	135.479	(272.776)	190.309	1.486	191.795	100%	190.309
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2013	AA	2.126.848	8.889.720	-	11.016.569	1.787.947	4.423.514	6.211.461	3.321.298	-	-	(25.917)	1.511.965	4.807.346	(2.238)	4.805.108	100%	4.807.346
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2013	AA	1.729.821	8.234.029	-	9.963.850	1.647.134	3.677.217	5.324.351	2.942.116	-	-	-	1.450.419	4.392.535	246.964	4.639.499	100%	4.392.535
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2013	AA	1.005.088	4.014.345	176.959	5.196.392	1.284.447	2.011.976	3.296.423	1.313.322	-	-	456.262	130.385	1.899.969	-	1.899.969	100%	1.899.969
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2013	AA	420.564	1.642.752	-	2.063.316	416.905	715.497	1.132.402	653.293	-	-	-	277.621	930.914	-	930.914	100%	930.914
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2013	A	2.251.692	5.788.609	-	8.040.301	1.921.235	4.505.122	6.426.357	1.226.223	-	-	8.889	378.190	1.613.302	641	1.613.943	100%	1.613.302
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2013	AA	688.024	2.729.663	31.647	3.449.334	653.480	1.537.092	2.190.573	897.527	-	-	(5.085)	365.486	1.257.928	833	1.258.761	100%	1.257.928
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2013	A	1.212.973	1.550.071	-	2.763.044	1.744.789	246.090	1.990.879	599.815	-	-	-	172.350	772.165	-	772.165	100%	772.165
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2013	AA	1.542.641	2.245.560	-	3.788.201	1.087.810	1.228.952	2.316.763	870.596	-	-	25.927	570.284	1.466.807	4.631	1.471.438	100%	1.466.807
11		PT Perkebunan Nusantara X I	Audited 2013	A	1.751.121	1.234.197	-	2.985.318	1.887.063	377.620	2.264.683	518.481	-	-	-	202.149	720.630	5	720.635	100%	720.630
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2013	AA	469.060	1.519.154	-	1.988.214	466.381	586.575	1.052.955	572.976	-	-	217.715	140.222	930.913	4.346	935.259	100%	930.913
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2013	BBB	1.013.025	3.952.291	37.110	5.002.426	1.957.472	1.686.633	3.644.105	1.029.738	-	-	242.693	1.028	1.273.459	84.861	1.358.321	100%	1.273.459
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2013	B	456.294	635.768	-	1.092.062	538.520	1.151.960	1.690.480	235.000	-	-	30.591	(864.009)	(598.418)	-	(598.418)	100%	(598.418)
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2013	BBB	3.758.187	3.566.379	56.587	7.381.153	2.843.762	2.992.219	5.835.981	352.425	-	-	-	918.390	1.270.815	274.356	1.545.172	100%	1.270.815
16	Kehutanan	Perum Perhutani	Audited 2013	Sehat AA (83,50)	1.708.444	797.115	-	2.505.559	337.921	137.631	475.552	700.000	-	-	-	1.336.148	2.036.148	(6.142)	2.030.006	100%	2.036.148
17		PT Inhutani I	Audited 2013	Sehat A (68,44)	186.292	174.384	-	360.676	80.062	98.262	178.323	450.333	16.001	-	11.183	(295.165)	182.353	-	182.353	100%	182.353
18		PT Inhutani II	Audited 2013	Sehat A (71,50)	38.177	194.443	12.687	245.307	32.029	104.898	136.927	183.083	6.785	-	-	(81.488)	108.379	-	108.379	100%	108.379
19		PT Inhutani III	Audited 2013	Krg Sehat BBB (62,18)	21.598	93.546	-	115.144	5.810	5.680	11.491	324.120	2.302	-	103	(222.871)	103.653	-	103.653	100%	103.653
20		PT Inhutani IV	Audited 2013	Sehat A (67,5)	46.234	14.675	9.308	70.217	5.680	3.186	8.866	92.253	-	-	9.915	(40.817)	61.351	-	61.351	100%	61.351
21		PT Inhutani V	Audited 2013	Sehat A (72,0)	30.945	138.022	12	168.979	128.039	2.040	130.079	132.659	44860,567	-	1	(138.620)	38.900	-	38.900	100%	38.900
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2013	Sehat A (76.30)	26.733	191.584	103.985	322.301	13.218	141.443	154.661	121.140	-	-	1.993	44.508	167.640	-	167.640	100%	167.640
23		Perum Perikanan Indonesia	Audited 2013	Sehat AAA (97,6)	80.669	40.365	1.577	122.611	18.894	37.418	56.312	41.434	-	-	-	24.865	66.299	-	66.299	100%	66.299
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2013		21.568.185	3.398.795	924.644	25.891.624	20.941.100	58.778	20.999.878	6.847.136	-	675.251	(2.636.644)	-	4.885.743	6.003	4.891.746	100%	4.885.743
25		PT Sang Hyang Seri	Audited 2013		768.848	436.621	20.223	1.225.693	1.632.630	104.171	1.736.800	134.000	-	-	140.098	(785.205)	(511.108)	-	(511.108)	100%	(511.108)
26		PT Pertani	Audited 2013	Kurang Segat (BB"42")	675.947	332.095	4.431	1.012.473	1.053.242	125.015	1.178.256	51.315	35.952	-	2.499	(255.571)	(165.805)	21	(165.783)	100%	(165.805)
27	Pupuk	PT Pupuk Indonesia	Audited 2013	Sehat AA (90,45)	42.615.552	22.189.682	-	64.805.234	21.744.502	17.745.850	39.490.352	12.899.908	-	-	(179.138)	12.420.074	25.140.843	174.039	25.314.882	100%	25.140.843
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2013	Sehat AAA (95,60)	269.519	93.331	444	363.293	56.976	10.945	67.921	15.000	16.701	-	-	263.672	295.373	-	295.373	100%	295.373
29		Perum Jasa Tirta II	Audited 2013	Sehat AA (91,65)	377.939	308.526	-	686.466	106.007	50.637	156.644	164.548	-	-	287.445	77.829	529.822	-	529.822	100%	529.822
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2013		7.080.437	14.784.680	-	21.865.117	3.855.512	5.216.118	9.071.630	953.846	29.705	-	54.995	11.754.916	12.793.462	26	12.793.488	65%	8.315.750
31		PT Timah Tbk	Audited 2013		5.360.664	2.522.630	-	7.883.294	2.439.590	551.594	2.991.184	251.651	120.792	-	48.253	4.471.302	4.891.998	112	4.892.110	65%	3.179.799
32		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2013		6.479.783	5.197.372	-	11.677.155	2.260.956	1.864.630	4.125.586	1.152.066	30.486	-	(1.838.676)	8.093.505	7.437.381	114.188	7.551.569	68,91%	5.125.099
33		PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)	Unaudited 2013		7.436.301	4.692.908	11.849	12.141.058	211.922	214.115	426.038	11.219.682	-	-	-	495.338	11.715.020	-	11.715.020	100%	11.715.020
34	Energi	PT Pertamina	Audited 2013	Sehat AA	294.319.994	307.103.935	-	601.423.929	200.458.271	190.230.615	390.688.885	83.090.697	46.208	12.453	2.745.545	123.912.813	209.807.717	927.327	210.735.044	100%	209.807.717
35		PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2013		21.702.854	31.479.886	-	53.182.740	10.797.003	9.143.573	19.940.576	2.424.151	2.762.100	-	284.041	25.555.641	31.025.933	2.216.231	33.242.164	56,97%	17.675.474
36		PT Energy Management Indonesia	Audited 2013		8.288	42.188	3.633	54.110	39.923	1.926	41.849	15.555	0	-	33.086	(36.380)	12.261	-	12.261	100%	12.261
37		PT Batan Teknologi	Unaudited 2013	Kurang Sehat BB	22.258	4.505	5.464	32.227	19.663	7.939	27.602	27.200	-	-	(22.576)	-	4.624	-	4.624	100%	4.624
38	Industri semen	PT Semen Indonesia Tbk	Audited 2013		9.972.110	20.820.774	-	30.792.884	5.297.631	3.691.278	8.988.908	593.152	1.458.258	-	350.222	18.480.911	20.882.543	921.433	21.803.976	51,01%	10.651.262
39		PT Semen Baturaja	Audited 2013	91,22 (Sehat AA)	2.106.641	604.775	-	2.711.416	193.631	50.828	244.460	983.768	1.034.032	-	-	449.157	2.466.957	-	2.466.957	76,24%	1.880.808
40		PT Semen Kupang	Audited 2013		20.082	596.473	-	616.556	19.644	613.937	633.582	133.713	-	-	-	(150.739)	(17.026)	-	(17.026)	61,48%	(10.468)
41	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Audited 2013		6.783.080	1.740.550	-	8.523.630	4.631.934	1.390.252	6.022.186	5.604.718	749.745	-	1.262.186	(5.115.206)	2.501.443	-	2.501.443	100,00%	2.501.443
42		PT PAL Indonesia	Audited 2013		2.644.335	1.666.544	-	4.310.879	1.775.542	3.039.055	4.814.598	2.385.661	-	-	23.527	(2.912.863)	(503.675)	(43)	(503.718)	100%	(503.675)
43		PT Pindad	Audited 2013		2.699.279	229.048	-	2.928.327	1.867.198	293.483	2.160.681	70.000	597542	-	2.498	97.604	767.644	2	767.646	100%	767.644
44		PT Dahana	Audited 2013	82,75 (Sehat AA)	598.056	517.191	-	1.115.248	571.614	96.456	668.069	250.000	6.398	-	56.341	134.440	447.178	-	447.178	100%	447.178
45	Ind. Baja, Manufaktur, &	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2013		13.349.624	15.151.646	502.504	29.003.774	13.872.874	2.307.426	16.180.300	7.887.500	1.130.965	-	2.166.040	1.395.519	12.580.023	243.451	12.823.474	80%	10.064.018
46	Rekayasa Rnc Bangun	PT INKA	Audited 2013	47,25 (Kurang Sehat BBB)	546.279	560.268	-	1.106.547	803.224	68.444	871.668	251.843	-	-	295.351	(318.963)	228.231	6.648	234.879	100%	228.231
47		PT Barata Indonesia	Audited 2013	80 (Sehat A)	673.803	209.293	54.177	937.273	605.280	168.137	773.417	128.203	15.000	-	129.370	(108.717)	163.856	-	163.856	100%	163.856
48		PT Boma Bisma Indra	Audited 2013	30,06 (Kurang Sehat B)	146.745	61.210	45.725	253.680	304.075	18.253	322.328	295.113	-	-	55.319	(419.080)	(68.648)	-	(68.648)	100%	(68.648)
49	Industri Dok dan	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2013		1.022.377	622.408	-	1.644.784	3.466.728	31.475	3.498.203	76.600	85	-	(1.930.103)	-	(1.853.418)	-	(1.853.418)	99%	(1.834.884)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
50	Perkapalan	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Unaudited 2013		254.220	172.464	2.072	428.756	648.226	88.662	736.888	40.535	-	-	39.058	(387.725)	(308.132)	-	(308.132)	100%	(308.132)
51		PT Industri Kapal Indonesia	Audited 2013		163.966	178.026	137.934	479.926	63.441	261.710	325.151	256.694	-	-	336	(102.254)	154.775	-	154.775	100%	154.775
52	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2013		17.367	630.443	-	647.810	281.012	64.968	345.980	198.870	-	-	403.833	(300.872)	301.830	-	301.830	100%	301.830
53		PT Garam	Audited 2013		218.465	248.473	332	467.270	172.652	3.840	176.492	300.000	-	-	-	(9.222)	290.778	-	290.778	100%	290.778
54		PT Primissima	Audited 2013		49.781	43.696	-	93.477	80.913	10.739	91.652	13.000	121	-	38.281	(49.577)	1.825	-	1.825	53%	963
55		PT Iglas	Audited 2013		86.116	178.539	1.035	265.690	560.392	133.261	693.653	47.007	94.583	-	-	(569.554)	(427.964)	-	(427.964)	100%	(427.964)
56		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005		12.956	143.335	4.803	161.094	100.687	130.795	231.482	15.000	-	-	-	(85.388)	(70.388)	-	(70.388)	100%	(70.388)
57	Ind. Kertas, Percetakan da	Perum Peruri	Audited 2013	Sehat, AA, 94,50	1.483.325	1.243.452	-	2.726.777	668.085	562.886	1.230.971	363.573	(64.059)	-	-	1.187.188	1.486.702	9.104	1.495.806	100%	1.486.702
58		PT Balai Pustaka	Unaudited 2013		69.284	2.994	10.385	82.663	79.953	2.561	82.514	14.400	-	-	15.598	(29.850)	149	-	149	100%	149
59		Perum PNRI	Unaudited 2013		558.557	53.818	6.533	618.908	484.545	13.255	497.800	43.243	506	497	-	76.862	121.108	-	121.108	100%	121.108
60		PT Kertas Leces	Audited 2013	Kurang Sehat B	48.042	1.075.664	44.711	1.168.417	874.874	1.013.705	1.888.579	415.073	1.976	-	507.117	(1.644.327)	(720.161)	-	(720.161)	100%	(720.161)
61		PT Kertas Kraft Aceh	Audited 2013		74.336	175.385	253.840	503.561	936.712	141.612	1.078.324	798.994	-	-	-	(1.373.757)	(574.763)	-	(574.763)	96,65%	(555.508)
62	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	Audited 2013	Kurang Sehat	848.840	445.670	-	1.294.511	670.903	32.815	703.717	309.927	75.100	-	203.344	2.420	590.792	1	590.793	80,66%	476.533
63		PT Kimia Farma Tbk	Audited 2013	Sehat AA, 88,84	1.810.615	661.325	-	2.471.940	746.123	101.462	847.585	555.400	53.664	-	-	999.160	1.608.225	16.130	1.624.355	90,03%	1.447.885
64		PT Bio Farma	Audited 2013	Sehat AAA, 96	1.542.901	1.160.169	-	2.703.070	389.637	48.371	438.008	750.000	-	-	-	1.515.062	2.265.062	-	2.265.062	100%	2.265.062
65	Telekomunikasi dan	PT Telkom Tbk	Audited 2013	Sehat	33.075.000	94.876.000	-	127.951.000	28.437.000	22.090.000	50.527.000	5.040.000	2.323.000	-	(5.449.000)	58.628.000	60.542.000	16.882.000	77.424.000	53,14%	32.172.019
66	Media	PT INTI	Audited 2013	KS, BBB, 61,30	1.639.138	183.387	138	1.822.663	1.277.435	103.058	1.380.493	350.000	-	-	84.420	4.075	438.494	3.676	442.171	100%	438.494
67		PT LEN Industri	Audited 2013	Sehat AA, 89	1.284.351	158.070	30.404	1.472.825	1.065.018	74.846	1.139.864	45.601	-	-	75.953	207.496	329.050	3.910	332.960	100%	329.050
68		Perum LKBN Antara	Audited 2013		55.836	43.631	-	99.468	43.210	10.406	53.616	9.116	25.928	-	-	10.753	45.797	54	45.851	100%	45.797
69		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2013		1.577	28.743	0	30.319	11.260	35	11.295	40.000	-	14.904	1.879	(37.758)	19.025	-	19.025	100%	19.025
70	Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2013		84.837.180	502.544.978	-	587.382.158	88.315.046	374.330.565	462.645.611	46.197.380	1.239.409	40.166.762	0	37.039.821	124.643.372	93.175	124.736.547	100%	124.643.372
71	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2013	Sehat "AA" (93.23)	1.274.054	3.305.244	-	4.579.297	611.997	1.176.939	1.788.936	511.960	-	538.813	1.250.342	489.246	2.790.361	-	2.790.361	100%	2.790.361
72		PT Pelabuhan Indonesia II	Audited 2013	Sehat "AA" (87,50)	2.580.611	12.387.545	119.593	15.087.749	3.639.834	1.418.350	5.058.184	1.444.029	-	0	(285.869)	8.689.006	9.847.167	182.398	10.029.565	100%	9.847.167
73		PT Pelabuhan Indonesia III	Audited 2013	93,70 "Sehat AA"	3.446.026	6.836.378	-	10.282.403	2.428.502	1.709.308	4.137.810	1.018.953	-	-	-	4.411.507	5.430.460	714.133	6.144.594	100%	5.430.460
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2013	Sehat "AA" (93,53)	915.151	2.722.834	0	3.637.986	527.711	466.771	994.482	603.149	308.983	199.952	(4.958)	1.528.209	2.635.334	8.170	2.643.504	100%	2.635.334
75	Bandar Udara	PT Angkasa Pura I	Audited 2013	Sehat AA (87,50)	1.749.277	11.232.532	-	12.981.809	2.211.948	1.300.197	3.512.146	3.488.245	-	2.978.614	126.501	2.875.039	9.468.399	1.264	9.469.664	100%	9.468.399
76		PT Angkasa Pura II	Audited 2013	Sehat AAA (95,39)	2.491.772	10.661.551	224.286	13.377.610	891.825	359.821	1.251.645	5.000.000	81.100	2.332.609	(290.603)	5.002.858	12.125.964	0	12.125.964	100%	12.125.964
77	Angkutan Darat, Udara	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2013	Sehat (AA)	4.137.884	9.286.121	636.964	14.060.969	4.258.534	4.877.986	9.136.520	3.296.547	-	-	968	1.523.916	4.821.431	103.019	4.924.449	100%	4.821.431
78	dan Laut	Perum PPD	Audited 2013	Kurang Sehat	25.604	19.714	3.010	48.328	75.132	106.662	181.794	231.769	166.023	-	9.848	(541.107)	(133.467)	-	(133.467)	100%	(133.467)
79		Perum DAMRI	Audited 2013	Sehat	151.720	923.505	16.716	1.091.940	150.924	442.374	593.298	19.700	257.207	59.719	78.752	83.265	498.642	0	498.642	100%	498.642
80		PT Merpati Nusantara Airlines	Unaudited 2013		269.845	2.366.760	0	2.636.605	4.856.336	2.744.799	7.601.135	1.964.556	-	-	2	(6.929.088)	(4.964.530)	-	(4.964.530)	96,99%	(4.815.098)
81		PT Garuda Indonesia	Audited 2013		9.984.423	26.019.261	-	36.003.685	11.992.645	10.394.122	22.386.766	10.392.217	55.436	-	1.640.873	1.510.473	13.598.999	17.920	13.616.918	69,14%	9.401.831
82		PT PELNI	Audited 2013		1.216.668	3.957.553	171.666	5.345.887	766.797	488.512	1.255.308	6.565.092	55.674	-	-	(2.530.761)	4.090.005	574	4.090.579	100%	4.090.005
83		PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	Audited 2013		917.844	2.360.637	-	3.278.481	239.668	236.414	476.082	1.680.678	7.741	481.892	480.784	151.304	2.802.399	-	2.802.399	100%	2.802.399
84		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2013		56.029	555.343	235.471	846.844	247.479	208.521	456.000	180.640	399.920	667.189	363.513	(1.220.420)	390.843	-	390.843	100,00%	390.843
85	Konstruksi	PT Amarta Karya	Audited 2013	S A (76,00)	365.028	19.930	891	385.850	299.276	50.804	350.081	11.250	-	-	3.030	21.489	35.769	-	35.769	100%	35.769
86		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2013	S AA (83,00)	9.099.467	556.414	65.081	9.720.962	6.541.657	1.630.842	8.172.499	180.132	50.004	-	1.792	1.307.301	1.539.229	9.234	1.548.463	51,00%	785.007
87		PT Istaka Karya	Unaudited 2013		74.329	116.699	7.040	198.068	154.834	741	155.575	50.000	-	-	(7.677)	170	42.494	-	42.494	100%	42.494
88		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2013		11.901.585	514.084	-	12.415.669	8.776.013	1.654.909	10.430.922	484.244	462.357	-	-	1.037.220	1.983.821	926	1.984.747	51%	1.011.749
89		PT Hutama Karya	Audited 2013	S AA (81,50)	5.339.289	532.107	63.523	5.934.919	3.801.378	1.280.096	5.081.474	500.000	-	-	-	352.764	852.764	681	853.445	100%	852.764
90		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2013	S AA (84,75)	7.994.289	4.528.931	71.743	12.594.963	7.298.469	2.069.534	9.368.004	613.997	713.746	-	419.125	1.202.095	2.948.963	277.996	3.226.959	65,15%	1.921.249
91		Perum Perumnas	Audited 2013	S A (73,70)	2.637.873	336.197	2.794	2.976.865	1.426.532	709.078	2.135.610	475.969	-	-	256.114	94.360	826.444	14.811	841.255	100%	826.444
92		PT Brantas Abipraya	Audited 2013	S AAA (96)	861.125	290.204	-	1.151.330	481.560	379.491	861.050	161.555	-	-	32.311	90.845	284.711	5.568	290.279	100%	284.711
93		PT Waskita Karya, Tbk	Audited 2013	S AA (84,25)	7.781.413	985.710	21.180	8.788.303	5.427.139	977.727	6.404.866	963.224	860.068	-	(3.801)	562.911	2.382.402	1.035	2.383.437	68%	1.620.033
94	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Audited 2013	S AA (84,17)	39.795	25.752	-	65.547	28.673	14.890	43.562	2.728	-	-	16.086	3.171	21.985	-	21.985	100%	21.985
95		PT Indah Karya	Audited 2013	S (A) (68,25)	19.963	4.429	2.462	26.853	22.152	144	22.296	7.000	-	-	2.125	(4.568)	4.557	-	4.557	100%	4.557
96		PT Yodya Karya	Audited 2013	S AA (94,75)	103.865	5.731	150	109.746	66.829	4.042	70.871	8.000	-	-	22.447	8.428	38.875	-	38.875	100%	38.875
97		PT Indra Karya	Audited 2013	S AA (86,50)	55.398	15.384	221	71.003	39.558	18.784	58.343	2.000	-	-	575	10.086	12.660	-	12.660	100,00%	12.660
98		PT Virama Karya	Audited 2013	AAA	78.266	2.652	10.994	91.912	38.520	22.538	61.058	10.000	4.498	-	-	16.356	30.854	-	30.854	100%	30.854
99	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2013	Sehat AA	703.718	681.314	-	1.385.031	292.583	150.540	443.123	363.945	111.968	-	85	465.910	941.908	-	941.908	73,15%	689.006
100		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2013		57.950	50.644	-	108.593	10.494	2.035	12.528	40.000	-	-	40.973	15.092	96.065	-	96.065	60%	57.639
101		PT Kawasan Industri Medan	Audited 2013	Sehat AA	228.032	56.928	1.271	286.231	40.072	3.203	43.275	30.000	-	-	212.956	-	242.956	-	242.956	60%	145.774
102		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2013	Sehat AAA	54.453	37.485	-	91.938	15.473	-	15.473	25.863	-	-	-	50.601	76.464	-	76.464	51,09%	39.066
103		PT PDIP Batam	Audited 2013	"A" Sehat (76,6)	46.865	47.050	1.076	94.992	12.628	33.014	45.642	19.000	-	-	26.442	3.908	49.350	-	49.350	100%	49.350
104	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2013		89.276	14.531	-	103.807	71.917	24.064	95.980	11.000	-	-	3.149	(6.323)	7.826	-	7.826	100%	7.826
105		PT Bhanda Ghara Reksa	Audited 2013	Sehat, AAA, 96,00	297.762	140.489	-	438.251	125.590	44.784	170.374	140.000	-	-	77.788	50.090	267.878	-	267.878	100%	267.878
106	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2013	Sehat	353.854.532	379.245.230	-	733.099.762	60.516.151	583.793.015	644.309.166	11.666.667	17.316.192	-	(1.195.620)	59.831.998	87.419.237	1.371.359	88.790.596	60,00%	52.451.542
107		PT Bank BRI Tbk	Audited 2013	Sehat	-	-	7.004.037	626.182.926	-	-	546.855.504	6.167.291	2.773.858	-	(645.561)	70.868.083	79.163.671	163.751	79.327.422	56,75%	44.925.383

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
108		PT Bank BNI Tbk	Audited 2013	Sehat	62.798.836	317.674.645	6.181.334	386.654.815	296.772.242	42.199.068	338.971.310	9.054.807	14.568.468		(3.034.875)	27.011.835	47.600.235	83.270	47.683.505	60%	28.560.141
109		PT Bank BTN Tbk	Audited 2013	Sehat	33.629.064	94.310.484	3.230.182	131.169.730	92.047.982	27.564.995	119.612.977	5.282.427	2.025.764		(79.446)	4.328.008	11.556.753	-	11.556.753	60,14%	6.950.231
110	Asuransi	PT JIWASRAYA	Audited 2013	Sehat A (skor 80)	14.552.410	2.399.151	52.995	17.004.555	-	-	15.253.718	235.000	-	-	1.054.475	460.913	1.750.388	449	1.750.837	100%	1.750.388
111		PT ASABRI	Audited 2013	Sehat, Skor 80 (A)	362.005	9.145.681	2.032	9.509.717	298.725	8.251.533	8.550.258	200.000	-	-	(401.154)	1.160.614	959.459	-	959.459	100%	959.459
112		PT JAMSOSTEK (dhi BPJS Ketenagakerjaan)	Audited 2013	Sehat	152.304.205	1.126.785	302.139	153.733.129	145.836.379	1.546.867	147.383.246	6.349.879	-	-	-	-	6.349.879	3	6.349.882	100%	6.349.879
113		PT TASPEN	Audited 2013	Sehat (AA) skor 81	135.632.726	314.066	8.441	135.955.233	5.191.487	120.686.555	125.878.042	100.000	-	-	(2.002.031)	11.974.636	10.072.605	4.586	10.077.191	100%	10.072.605
114		PT ASKES (BPJS Kesehatan)	Audited 2013		7.895.351	7.985.448	23.600	15.904.399	6.399.543	353.196	6.752.739	1.000.000	-	-	7.761.236	382.377	9.143.613	8.047	9.151.660	100%	9.143.613
115		PT JASINDO	Audited 2013	Sehat AA nilai skor 92,5	7.447.840	482.520	123.811	8.054.171	5.731.089	643.007	6.374.096	425.000	-	-	945.766	303.381	1.674.148	5.928	1.680.076	100%	1.674.148
116		PT RUI	Audited 2013		1.971.195	63.688	-	2.034.882	1.378.936	491.407	1.870.342	40.000	-	-	(73.667)	198.199	164.532	8	164.540	100%	164.532
117		PT Jasa Raharja	Audited 2013	Sehat 87,00	-	-	114.955	9.223.587	-	-	2.988.143	2.500.000	-	-	(402.059)	4.105.252	6.203.193	32.251	6.235.444	100%	6.203.193
118		PT ASEI	Audited 2013	Sehat AAA nilai skor 96	-	-	-	1.914.080	-	-	1.057.488	300.000	-	-	(10.278)	566.869	856.592	-	856.592	100%	856.592
119		PT ASKRINDO	Audited 2013	Sehat 97,22	7.338.045	509.581	15.448	7.863.074	1.155.118	1.387.997	2.543.114	400.000	4.511.000	-	-	408.957	5.319.957	3	5.319.960	100%	5.319.957
120	Pembiayaan	Perum JAMKRINDO	Audited 2013	Sehat AA	7.872.058	52.822	368.502	8.293.382	639.816	1.103.428	1.743.243	-	5.338.733	-	686.196	525.209	6.550.138	-	6.550.138	100%	6.550.138
121		PT PPA	Audited 2013	A	2.792.672	1.752.815	34.775	4.580.262	1.846.701	171.024	2.017.725	1.996.688	(305.768)	-	173.307	695.608	2.559.835	2.702	2.562.537	100%	2.559.835
122		PT Danareksa	Audited 2013	Sehat	-	-	9.909	2.532.527	-	-	1.888.530	701.480	85.927	-	(28.339)	(115.187)	643.881	116	643.997	100%	643.881
123		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2013		-	-	19.707	5.092.287	-	-	4.483.255	300.000	-	-	211	302.225	602.436	6.597	609.032	100%	602.436
124		Perum Pegadaian	Audited 2013	Sehat	28.644.416	4.741.402	83.539	33.469.357	17.629.534	5.481.200	23.110.735	251.252	-	-	3.866.363	6.241.007	10.358.622	-	10.358.622	100%	10.358.622
125		PT PANN Multi Finance	Unaudited 2013		541.332	3.032.503	77.571	3.651.406	625.943	5.809.530	6.435.472	238.065	-	-	86.850	(3.108.982)	(2.784.067)	-	(2.784.067)	93%	(2.590.296)
126		PT Bahana PUI	Audited 2013	Sehat	-	-	72.845	2.926.025	-	-	2.573.823	22.500	-	-	(7.069)	(134.088)	(118.657)	470.858	352.201	100%	(118.657)
127	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Audited 2013	BB	494.512	1.781.306	491.137	2.766.955	692.657	578.378	1.271.036	156.200	86	-	1.338.531		1.494.817	1.102	1.495.919	100%	1.494.817
128		PT Sarinah	Audited 2013	AA	128.155	158.462	2.127	288.744	86.480	23.469	109.949	46.850	-	-	104.105	27.808	178.762	33	178.795	100%	178.762
129	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	Audited 2013	S AA (94,16)	535.530	194.933	-	730.463	176.582	35.416	211.998	25.000	-	-	-	494.598	519.598	(1.134	518.464	85,12%	442.282
130		PT Sucofindo	Audited 2013	S AAA (96,5)	857.284	325.836	25.860	1.208.980	365.044	138.337	503.380	300.000	369	-	292.392	113.461	706.223	(623	705.599	95%	670.911
131		PT BKI	Unaudited 2013	S AAA	372.364	68.522	62.730	503.616	274.943	68.025	342.968	75.000	-	-	54.393	31.255	160.648	-	160.648	100%	160.648
132	Perhotelan dan	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2013	Kurang Sehat	252.903	757.085	-	1.009.988	76.763	859.671	936.434	101.700	82	-	12.704	(40.933)	73.554	-	73.554	100%	73.554
133	Pariwisata	PT TWC PBR	Audited 2013	Sehat	110.697	126.020	16.071	252.788	39.441	29.003	68.444	100.000	108	-	-	84.238	184.344	-	184.344	100%	184.344
134		PT Pengembangan Pariwisata Bali	Audited 2013	Sehat	346.943	720.857	2.037	1.069.837	38.849	95.819	134.668	410.000	297.808	-	3.300	224.616	935.724	(555	935.169	100%	935.724
135	Lain-lain	PT Berdikari	Unaudited 2013	Kurang Sehat BBB Skor 54,55	305.168	116.485	16.524	438.177	242.810	69.516	312.326	75.000	-	-	-	50.851	125.851	-	125.851	100%	125.851
136		PT Jasa Marga Tbk	Audited 2013	S AA (87,1)	3.746.345	24.620.001	-	28.366.345	4.919.884	12.579.482	17.499.365	3.400.000	2.453.890	-	2.098	3.449.446	9.305.434	1.561.546	10.866.980	70%	6.513.804
137		PT Pos Indonesia	Audited 2013	Sehat A, 78,5	4.505.231	1.056.925	-	5.562.155	4.125.265	460.526	4.585.792	455.023	-	-	(1.372)	551.901	1.005.552	(29.188)	976.364	100%	1.005.552
138		PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2013	Sehat 100,76	862.284	41.967	-	904.251	635.740	3.986	639.726	102.000	-	-	135.850	25.673	263.523	1.002	264.525	100%	263.523
139		PT Survai Udara Penas	Audited 2013	B	4.901	31.306	1.933	38.140	70.849	2.975	73.825	13.000	-	-	-	(48.685)	(35.685)	-	(35.685)	100%	(35.685)
140		Perum LPPNPI	Audited 2013	Sehat AA (80,60)	1.647.700	199.977	-	1.847.677	1.276.736	2.153	1.278.889	97.953	-	-	-	470.835	568.788	-	568.788	100%	568.788
		GRAND TOTAL	140		1.507.900.996	2.045.431.857	22.495.525	4.216.478.356	1.163.051.280	1.513.337.334	3.251.489.074	303.838.450	64.455.386	48.128.654	11.540.407	509.779.063	937.741.961	27.247.315	964.989.276		770.401.675

DAFTAR BPYBDS PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2013

No.	BUMN	STATUS DATA	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012
1	Perum DAMRI		59.718.900.000,00	31.844.050.000,00
2	Perum PPD		0,00	12.150.681.819,00
3	PT Kereta Api Indonesia		0,00	0,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara		40.166.761.933.551,00	30.718.066.780.700
5	Perum Jasa Tirta I		0,00	0,00
6	PT Angkasa Pura I		2.978.613.945.862,06	2.793.108.893.422,36
7	PT Angkasa Pura II		2.332.609.302.906,41	313.027.372.227,51
8	Perum BULOG		675.250.887.482,00	675.250.887.482,00
9	PT Pelindo I		538.812.899.239,00	427.056.982.506,00
10	PT Pelindo III		0,00	0,00
11	PT Pelindo IV		199.952.304.000,00	0,00
12	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan		481.891.840.059,00	896.740.136.947,00
13	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia		0,00	0,00
14	Perum Prasarana Perikanan Samudra		0,00	34.501.090.440,00
15	PT Djakarta Lloyd		667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
16	PT Pelayaran Nasional Indonesia		0,00	0,00
17	Perum Perumnas		0,00	0,00
18	PT Pos Indonesia		0,00	0,00
19	Perum produksi film Negara (PFN)		14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
20	PT Pertamina		12.452.878.178,53	12.452.878.178,53
21	PT Geo Dipa Energi		2.006.135.598.753,75	1.979.664.199.753,75
Jumlah			**50.134.293.038.439**	**38.575.956.501.883,20**

PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10-11)
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2013		3.076.923	2.078.665	998.258	-	1.150	997.108	-	997.108	175.498	821.610	(43.850)	777.760
													-		-
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2013		536.793	348.480	188.313	873		189.186	-	189.186	44.447	144.739		144.739
						-					-		-		-
3	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2013		424.105	167.991	256.114	10.011	3.265	262.860	-	262.860	55.671	207.189	28.383	235.573
													-		-
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2013		392.961	86.028	306.933	807	3.040	304.700	-	304.700	54.940	249.760	(17.437)	232.323
									-		-		-		-
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2013		24.934	97.146	(72.212)	21.008	53.980	(105.183)	-	(105.183)	2.005	(107.188)	-	(107.188)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2013
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam juta Rupiah)

No.	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13*16
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2013	29.406	46.473.158	-	-	38.173.820	6.321.586	-	-	(40.644)	2.018.396	8.299.338		8.299.338	1	8.299.338
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2013	-	7.477.641	1.044.899	3.641.800	4.686.699	2.000.000				790.942	2.790.942		2.790.942	1	2.790.942
															-		
3	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2013	-	7.088.890	-	-	2.543.001	4.000.000	-		118.285	427.605	4.545.890		4.545.890	1	4.545.890
															-		
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2013	-	5.196.468	-	-	48.478	4.500.000			(15.520)	663.510	5.147.990		5.147.990	1	5.147.990
															-		
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2013	9.860	2.745.475	87.599	881.916	969.515	662.001	-	2.006.136	-	(897.166)	1.770.971		1.770.971	1	1.849.351
													22.555.131				**22.633.512**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2013

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31 Desember 2013
1	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)	Audited 2013	50,00%	336.068.674.425	168.034.337.213
2	PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)	Unaudited 2013	50,00%	254.775.227.000	127.387.613.500
3	PT Asean Copper Product				-
4	Asean Infrastructure Fund	Angka Realisasi PMN	25,52%		883.232.984.230
Jumlah I					**1.178.654.934.942**

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilika	Jumlah Saham	Kepemilkan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin	Audited 2013	A	0,06%	4.736.255	47.362.550.000
			B	13,00%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	Unaudited 2013		4,97%	22.366	22.366.000.000
3	PT Freeport Indonesia	Unaudited 2013	Biasa	9,36%	21.300	25.962.570.000
4	PT Indosat, Tbk	Audited 2013	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
5	PT Socfindo	Audited 2013	Seri B		1	265.000
			Seri C		2.999	794.735.000
			Seri D		2.000	3.430.000.000
			Total	10,00%	42.250.000.000	
6	PT Prasadha pamunah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2012		5,00%	50	14.367.783.750
7	PT Nindya Karya	Audited 2013		1,00%	59.500	59.500.000.000
8	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2012		13,00%	39.000	144.596.751.000
JUMLAH II						**499.466.392.250**
JUMLAH I + II						**1.678.121.327.192**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2013

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL				Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory Notes
		Mata Uang		USD	IDR[1]	
1	Asian Development Bank	SDR	256.266.242,17	394.649.756,67	4.810.385.884.102,32	
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.300.000,00	3.202.119.920,70	39.030.639.713.412,30	26.550.675.238.720,50
	World Bank Group					
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD	135.553.029,69	135.553.029,69	1.652.255.878.891,41	
4	International Development Association	USD	16.114.990,97	16.114.990,97	196.425.624.909,51	5.173.139.667,81
5	International Finance Corporation	USD	29.384.013,04	30.093.863,04	366.814.096.594,56	
6	Multilateral Investment Guarantee Agency	USD	3.797.820,00	3.797.820,00	46.291.627.980,00	13.834.734.402,00
7	Islamic Development Bank Group	ID	124.260.000,00	191.360.275,74	2.332.490.400.994,86	
8	International Islamic Trade Finance Corporation	USD	2.060.000,00	2.060.000,00	25.109.340.000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.140,32	192.715,97	2.349.014.929,80	
10	International Fund for Agricultural Development	USD	54.398.386,38	54.398.386,38	663.061.931.585,82	
11	Common Fund for Commodities	USD	1.336.882,72	1.336.882,72	16.295.263.459,00	3.758.757.160,15
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	6.946.523,98	6.946.523,98	84.671.180.792,22	
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12.600.000,00	12.600.000,00	153.581.400.000,00	
	Jumlah total			**4.051.224.165,86**	**49.380.371.357.651,80**	**26.573.441.869.950,50**

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	30 DESEMBER 2013	30 DESEMBER 2012
AKTIVA		
Kas dan Setara Kas	533.884.404,00	609.177.281,00
Investasi Surat Berharga	33.943.324.464,00	26.971.502.699,00
Piutang Premi Penjaminan	571.533	1.719.544,00
Piutang Investasi	504.336.077,00	390.261.604,00
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih	0,00	2.975.000,00
Piutang Lain-Lain Bersih	2.739.194,00	3.020.529,00
Penyertaan Modal Sementara	8.011.841.000,00	6.762.361.000,00
Aktiva Tetap Bersih	115.553.965,00	116.881.725,00
Aktiva Lain-Lain	25.889.655,00	21.802.253,00
TOTAL AKTIVA	**43.138.140.292,00**	**34.879.701.635,00**
KEWAJIBAN		
Hutang Klaim Penjaminan	29.806.815,00	26.141.776,00
Cadangan Klaim Penjaminan	12.045.647.000,00	11.184.587.299,00
Cadangan Manfaat Karyawan	26.391.329,00	15.278.005,00
Hutang Pajak	149.514.799,00	129.359.106,00
Hutang Lain-Lain	33.702.621,00	33.745.078,00
TOTAL KEWAJIBAN	12.285.062.564,00	11.389.111.264,00
EKUITAS		
Modal Awal Pemerintah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Cadangan Tujuan	5.370.615.545,00	3.898.118.076,00
Cadangan Penjaminan	21.482.462.183,00	15.592.472.305,00
TOTAL EKUITAS	30.853.077.728,00	23.490.590.381,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**43.138.140.292,00**	**34.879.701.645,00**

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2013

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2013 - 30 Desember 2013	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012
PENDAPATAN OPERASI		
Pendapatan Premi Penjaminan	7.006.456.335,00	6.201.380.301,00
Pendapatan Hasil Investasi	2.033.765.289,00	1.552.831.073,00
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	54.500,00	29.584,00
Pendapatan Denda	134.502,00	19.272,00
Pendapatan Pengembalian Klaim	9.182.507,00	25.458.317,00
TOTAL PENDAPATAN OPERASI	**9.049.593.133,00**	**7.779.718.547,00**
BIAYA OPERASI		
Biaya Klaim Penjaminan	40.984.652,00	8.673.939,00
Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi	(40.984.652,00)	(8.673.939,00)
Biaya terkait Dengan Resolusi Bank	9.408.500,00	4.003.447,00
Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim	902.044.352,00	491.291.384,00
Biaya Investasi	356.189.536,00	277.121.635,00
Biaya Umum dan Administrasi	279.876.669,00	195.970.635,00
TOTAL BIAYA OPERASI	**1.547.519.057,00**	**968.387.101,00**
SURPLUS (DEFISIT) OPERASI	**7.502.074.076,00**	**6.811.331.446,00**
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	68.525.779,00	51.439.757,00
Biaya Lain-Lain	(13.695.985,00)	(10.402.972,00)
Total Pendapatan dan Biaya Lain-Lain	**54.829.794,00**	**41.036.785,00**
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SEBELUM PAJAK	**7.556.903.870,00**	**6.852.368.231,00**
Pajak Penghasilan Badan		
Biaya PPh Badan Kini	196.857.354,00	89.637.513,00
Biaya PPh Badan Tangguhan	(2.440.831,00)	(1.370.808,00)
Total Pajak Penghasilan Badan	**194.416.523,00**	**88.266.705,00**
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	**7.362.487.347,00**	**6.764.101.526,00**

BANK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	30 DESEMBER 2013	30 DESEMBER 2012
AKTIVA		
Emas	36.757.308	38.248.767
Uang Asing	11.802	11.842
Hak Tarik Khusus	33.060.049	26.254.734
Giro	135.179.177	55.434.566
Deposito	31.271.039	98.062.115
Surat Berharga	972.742.507	874.344.507
Surat Berharga Negara Republik Indonesia	117.066.701	108.430.258
Surat Berharga yang dibeli dengan Janji Jual Kembali	219.172	0
Tagihan Kepada Pemerintah	237.779.774	243.056.782
Tagihan Kepada Bank	2.315.341	3.225.921
Tagihan Kepada Lainnya	8.147.560	6.477.604
Penyertaan	850.343	675.212
Aktiva Lain-Lain	85.276.075	77.595.949
Penyisihan Aktiva	(12.001.395)	(12.292.109)
TOTAL AKTIVA	**1.648.675.453**	**1.519.526.148**
KEWAJIBAN		
Uang Asing Dalam Peredaran	500.030.818	439.730.814
Giro	384.377.182	345.491.704
Sertifikat Bank Indonesia	114.944.212	77.282.423
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	4.712.000	3.455.000
Penempatan Berjangka	56.788.961	208.511.902
Penempatan Dana	111.099.310	69.024.266
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	16.267.400	15.582.200
Surat Berharga yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	68.785.840	99.591.644
Pinjaman dari Pemerintah	76.069	98.086
Pinjaman Luar Negeri	2.976.199	3.427.704
Alokasi Hak Tarik Khusus	37.174.934	29.520.637
Kewajiban Lain-Lain	72.075.687	61.341.300
TOTAL KEWAJIBAN	1.369.308.612	1.353.057.680
EKUITAS		
Modal	17.111.547	17.114.024
Cadangan Umum	22.924.506	17.145.069
Cadangan Tujuan	13.208.397	13.168.140
Keuntungan/Kerugian Belum Realisasi	188.715.296	113.221.542
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	37.407.095	5.819.693
TOTAL EKUITAS	279.366.841	166.468.468
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.648.675.453,00**	**1.519.526.148,00**

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2013

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2013 - 30 Desember 2013	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012
PENERIMAAN		
Pengelolaan Moneter		
Pengelolaan Devisa	26.724.597,00	24.697.913,00
Pengelolaan SSB Dalam Negeri	8.205.948,00	7.074.621,00
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	272.203,00	289.421,00
Selisih Kurs Karena Transaksi Valuta Asing	33.568.134,00	7.416.842,00
Pengelolaan Sistem Pembayaran	244.982,00	241.272,00
Pengawasan Perbankan	258.179,00	26.264,00
Lainnya	1.839.385,00	289.262,00
JUMLAH PENERIMAAN	**71.113.428,00**	**40.035.595,00**
BEBAN		
Pengendalian Moneter		
Operasi Moneter	17.789.713,00	19.006.279,00
Pengelolaan Devisa	275.769,00	143.487,00
Pinjaman Luar Negeri	72.722,00	92.384,00
Lainnya	44.240,00	31.525,00
Jasa Giro Pemerintah	2.610.495,00	4.156.871,00
Penyelenggaran Sistem Pembayaran		
Sistem Pembayaran Tunai	2.679.328,00	1.439.975,00
Sistem Pembayaran Non Tunai	29.772,00	24.427,00
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	198.459,00	183.002,00
Umum dan Lainnya		
SDM dan Logistik	5.169.213,00	5.726.167,00
Lainnya		1.135.248,00
JUMLAH BEBAN	**28.869.711,00**	**31.939.365,00**
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	**42.197.491,00**	**8.096.230,00**
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**(4.790.396,00)**	**(2.276.537,00)**
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	**37.407.095,00**	**5.819.693,00**

TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	110.719.212.605	110.719.212.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.587.450.938.448	1.470.696.300.781
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.390.511.580.342	4.127.704.396.064
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.268.411.741.320	3.239.921.239.706
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	14.079.228.576.510	12.431.891.082.320
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	72.951.949.833.609	72.952.681.862.609
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.255.323.523.625	2.257.117.021.625
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10.361.862.953.692	10.347.134.394.551
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	253.048.782.872.896	250.333.224.309.500
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.362.113.598.258	11.715.655.610.505
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.305.298.530.619	17.296.534.823.816
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	545.355.589.927	545.192.062.827
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	10.484.012.519.457	8.526.991.615.703
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	647.183.099.926	647.183.099.926
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.067.385.745.501	2.026.838.231.901
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	117.727.799.088	117.727.799.088
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.041.833.333.179	2.996.270.993.579
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	57.388.535.368.980	50.201.701.857.731
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.265.874.384.051	1.250.491.053.251
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.439.857.625.528	10.301.352.112.164
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.429.680.879.874	41.304.782.082.556
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.840.173.288.344	2.786.838.614.952
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	10.692.949.700.550	10.451.286.878.102
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	7.004.905.467.277	7.162.300.303.102
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3.534.246.260.451	3.088.171.642.778
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.914.680.892.884	1.450.460.071.634
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		318.592.354.000
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.433.039.145.077	3.410.562.126.743
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.192.995.774.148	2.183.593.473.405
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.938.565.593.249	1.939.105.329.406
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	400.979.919.447.531	376.454.697.179.232
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	4.894.335.600	4.230.095.600
34	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.540.657.874.507	2.524.517.183.826
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.980.636.227.808	1.980.636.227.808
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	40.772.187.225	40.772.187.225
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	876.321.187.609	874.647.572.527
39	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	294.120.000	294.120.000
40	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.201.075.586.605	1.201.075.586.605
41	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	128.885.359.447	95.999.709.127
42	054	BADAN PUSAT STATISTIK	621.671.343.680	607.568.536.649
43	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	179.478.885.500	179.478.885.560
44	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.802.440.519.432	1.770.969.944.356
45	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	317.661.875.000	317.661.875.000
46	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	927.861.745.290	925.286.606.040
47	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.255.245.848.633	42.768.016.400.389
48	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.513.607.068	
49	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	520.567.813.882	492.308.755.622
50	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	101.438.100.000	101.438.100.000
51	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000

TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*
52	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	50.236.401.000	29.654.975.000
53	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	368.802.024.366	366.783.710.993
54	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	825.460.316.462	831.279.172.710
55	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	103.026.665.805	93.863.055.405
56	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
57	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	67.881.000.000	67.881.000.000
58	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.015.687.608.539	6.014.226.413.854
59	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.789.648.034.766	1.789.648.034.766
60	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	735.224.629.500	735.224.629.500
61	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	275.246.835.716	275.154.255.716
62	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
63	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.666.122.750	20.666.122.750
64	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511.094.866.313	511.094.866.313
65	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	215.554.860.396	215.554.860.396
66	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	407.745.766.569	407.745.766.569
67	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.052.626.177.318	1.074.635.416.873
68	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	634.471.700.530	645.618.488.202
69	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	323.999.844.320	9.238.075.100
70	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	128.390.705.000	119.363.101.000
71	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS		452.520.454.538
72	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	6.925.422.490	6.925.422.490
73	100	KOMISI YUDISIAL	47.188.389.400	47.188.389.400
74	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	75.865.180.100	75.865.180.100
75	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	23.520.842.986	13.089.354.050
76	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	3.061.691.048.603	1.534.985.399.118
77	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
78	107	BADAN SAR NASIONAL	199.769.718.582	183.572.447.082
79	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	1.233.535.000	
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	6.259.141.197.032	6.064.230.668.678
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.981.129.125.733	3.010.576.498.280
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.099.287.494.100	3.083.576.253.100
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	542.329.877.054	527.697.028.425
84	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	951.820.775.779	310.062.000.000
TOTAL			**1.041.082.888.352.420**	**996.878.472.254.880**

PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 *(Audited)*			31 Desember 2012 *(Audited)*
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	103.066.723.010	(81.082.288.365)	21.984.434.645	97.745.489.058
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	634.196.973.114	(476.259.993.161)	157.936.979.953	602.864.782.648
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.254.750.905.809	(744.613.658.586)	510.137.247.223	1.121.296.356.157
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.932.818.423.627	(1.375.900.047.896)	556.918.375.731	1.804.368.186.164
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.715.725.831.515	(1.198.725.594.711)	517.000.236.804	1.542.412.159.613
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.859.485.173.720	(1.183.338.261.992)	676.146.911.728	1.756.710.104.259
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	89.149.336.777	(64.525.974.030)	24.623.362.747	88.805.245.409
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.466.817.116.534	(1.428.162.043.242)	1.038.655.073.292	2.382.517.300.080
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.258.544.124.912	(888.463.652.321)	370.080.472.591	1.077.618.275.152
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95.990.530.655.779	(53.965.432.523.936)	42.025.098.131.843	84.968.694.840.711
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3.026.289.712.192	(1.846.849.675.041)	1.179.440.037.151	2.540.006.548.203
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.281.994.108.652	(6.753.559.938.824)	2.528.434.169.828	8.849.450.471.389
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	58.757.128.310	(34.163.902.944)	24.593.225.366	51.293.956.632
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.288.958.679.643	(2.536.894.754.751)	1.752.063.924.892	3.634.424.914.390
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	59.419.811.500	(34.371.529.790)	25.048.281.710	47.912.631.350
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.506.124.596.380	(1.300.287.231.684)	1.205.837.364.696	2.307.557.284.675
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	230.347.496.912	(143.697.348.822)	86.650.148.090	189.091.263.075
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.511.015.317.557	(2.075.500.532.277)	1.435.514.785.280	3.059.354.067.098
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	22.863.639.549.608	(10.191.639.718.979)	12.671.999.830.629	16.889.268.343.786
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.064.403.552.977	(36.987.570.052)	1.027.415.982.925	750.047.580.208
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.376.284.615.970	(8.858.952.297.267)	1.517.332.318.703	8.518.977.355.090
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.313.920.001.808	(2.856.415.422.716)	8.457.504.579.092	10.046.279.713.426
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.758.762.620.889	(5.421.428.115.667)	8.337.334.505.222	11.029.378.773.845
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	7.370.638.441.681	(4.466.361.304.157)	2.904.277.137.524	6.406.981.172.209
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.558.518.881.749	(2.879.403.511.466)	679.115.370.283	3.121.598.427.876
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	1.329.928.392.972	(344.414.753.510)	985.513.639.462	1.433.378.930.111
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS	2.013.109.132.391	(1.032.682.675.684)	980.426.456.707	1.369.237.065.772
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS			-	130.617.827.333
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.073.931.332.944	(699.160.468.847)	374.770.864.097	957.336.268.845
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.218.153.129.819	(1.303.948.325.739)	914.204.804.080	1.851.666.302.911
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.519.565.589.862	(1.979.796.261.061)	1.539.769.328.801	3.118.821.657.279
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	7.046.953.212.077	(3.499.139.520.148)	3.547.813.691.929	5.997.749.417.018
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	693.142.136.958	(284.850.280.935)	408.291.856.023	503.060.091.552
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	52.430.818.240	(36.651.152.508)	15.779.665.732	50.208.350.697
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	54.543.262.715	(30.259.788.488)	24.283.474.227	40.770.872.388
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	296.568.270.341	(177.089.364.442)	119.478.905.899	421.346.897.421
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	98.884.720.947	(82.327.323.909)	16.557.397.038	98.537.478.801
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOG	580.433.517.308	(345.052.103.848)	235.381.413.460	402.873.960.800
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	264.031.090.632	(204.004.708.624)	60.026.382.008	259.711.203.677
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	226.362.629.507	(184.878.251.768)	41.484.377.739	187.358.200.277
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	119.005.057.149	(9.077.391.147)	109.927.666.002	90.225.899.339
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	29.719.888.380	(26.219.474.623)	3.500.413.757	29.786.042.057
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	64.537.961.056	(43.329.947.725)	21.208.013.331	51.623.394.615
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.356.439.639.594	(1.659.287.444.496)	697.152.195.098	1.984.515.554.045
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.006.112.927.595	(4.336.160.785.801)	2.669.952.141.794	5.674.955.801.215
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	21.228.635.060	(16.072.045.999)	5.156.589.061	18.819.613.710
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.075.388.459.597	(653.773.324.061)	421.615.135.536	880.035.421.039
48	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	140.799.307.128	(87.969.914.506)	52.829.392.622	125.519.509.170
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.433.435.058.905	(861.511.899.595)	571.923.159.310	1.189.583.634.333
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	176.723.482.595	(150.309.470.557)	26.414.012.038	169.449.089.370
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.404.271.507.973	(897.253.695.543)	507.017.812.430	1.144.711.650.055
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.291.488.665	(7.373.997.458)	3.917.491.207	9.539.040.958
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	28.800.154.695.201	(16.565.319.381.282)	12.234.835.313.919	20.487.326.126.452
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	284.516.047.699	(71.601.574.679)	212.914.473.020	
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.365.133.218.411	(634.238.621.532)	730.894.596.879	1.123.001.150.191
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	147.014.569.544	(94.312.734.634)	52.701.834.910	129.655.457.354
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	200.883.888.646	(143.109.249.285)	57.774.639.361	180.412.102.068
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	657.925.175.161	(318.465.742.428)	339.459.432.733	589.286.345.580
59	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	47.678.004.343	(33.970.284.783)	13.707.719.560	38.829.566.509
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	353.804.920.192	(241.067.885.096)	112.737.035.096	298.558.585.479
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	17.984.403.400	(12.737.766.826)	5.246.636.574	15.585.308.890
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.308.461.292.015	(1.225.820.499.238)	1.082.640.792.777	1.998.676.181.331
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	566.512.934.002	(341.101.483.978)	225.411.450.024	515.699.690.708
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	195.695.836.788	(160.521.638.101)	35.174.198.687	179.435.535.137
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	58.868.754.828	(42.695.885.976)	16.172.868.852	51.058.316.225
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	962.732.605.277	(636.718.029.352)	326.014.575.925	846.168.506.429
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	543.229.493.612	(292.755.161.509)	250.474.332.103	452.583.382.979
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG	1.826.026.715.334	(946.576.680.274)	879.450.035.060	1.423.086.159.721
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG	6.503.201.075	(2.253.587.820)	4.249.613.255	5.224.998.175
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	702.699.169.751	(310.913.174.699)	391.785.995.052	560.013.700.522
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.233.298.103	(781.540.879)	1.451.757.224	1.499.348.095
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	328.765.686.150	(242.323.163.787)	86.442.522.363	273.505.985.813
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	28.595.166.873	(18.428.015.242)	10.167.151.631	25.521.781.015
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	86.099.602.526	(41.673.881.551)	44.425.720.975	52.165.826.786
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	128.516.194.389	(104.440.959.822)	24.075.234.567	126.311.289.157
76	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	171.558.428.270	(134.099.705.257)	37.458.723.013	157.278.538.416
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	327.506.656.991	(231.966.164.182)	95.540.492.809	295.801.985.632
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	257.391.236.017	(215.895.098.703)	41.496.137.314	242.659.121.809
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	720.473.649.562	(530.528.537.482)	189.945.112.080	674.080.500.075
80	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	47.818.712.990	(28.524.435.225)	19.294.277.765	42.406.604.278
81	091	BLU KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	3.780.925.700	(1.852.500.376)	1.928.425.324	2.630.759.700
82	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	380.374.744.072	(235.962.045.138)	144.412.698.934	357.436.620.815

PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 *(Audited)*			31 Desember 2012 *(Audited)*
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
83	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	224.881.586.890	(166.771.191.109)	58.110.395.781	202.377.424.782
84	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS			-	526.645.377.630
85	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	98.315.193.061	(74.755.898.366)	23.559.294.695	92.399.298.137
86	100	KOMISI YUDISIAL	35.897.228.395	(26.554.422.865)	9.342.805.530	31.500.734.142
87	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	377.858.464.591	(144.390.669.823)	233.467.794.768	213.282.162.231
88	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TK	103.442.854.677	(57.493.890.538)	45.948.964.139	87.571.579.911
89	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	95.048.111.943	(43.650.837.719)	51.397.274.224	85.193.763.347
90	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	43.142.401.261	(30.247.167.355)	12.895.233.906	37.641.498.333
91	107	BADAN SAR NASIONAL	3.094.029.751.481	(1.001.116.147.800)	2.092.913.603.681	1.797.653.284.186
92	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	24.255.526.071	(17.083.434.795)	7.172.091.276	23.420.934.919
93	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	17.949.611.844	(6.549.519.365)	11.400.092.479	14.489.675.524
94	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	22.223.172.340	(8.983.212.714)	13.239.959.626	12.501.585.010
95	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	58.130.003.886	(17.694.708.196)	40.435.295.690	45.815.650.194
96	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	642.660.110.270	(511.874.912.829)	130.785.197.441	585.467.787.186
97	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.904.978.042	(9.653.472.155)	29.251.505.887	2.406.608.662
98	114	SEKRETARIAT KABINET	49.750.576.594	(30.539.558.448)	19.211.018.146	3.691.400.921
99	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	82.149.850.444	(15.677.296.193)	66.472.554.251	19.655.757.466
100	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.167.913.044.549	(866.250.281.254)	301.662.763.295	1.013.497.251.360
101	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.099.102.336.344	(882.804.301.783)	216.298.034.561	1.081.563.166.428
102	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	40.663.373.024	(22.087.416.705)	18.575.956.319	29.662.710.817
103	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	214.002.736.972	(21.540.186.282)	192.462.550.690	1015261979
TOTAL			**282.940.410.570.636**	**(157.611.985.219.129)**	**125.328.425.351.507**	**238.129.446.805.797**

GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 *(Audited)*			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	201.338.478.094	(64.873.151.762)	136.465.326.332	203.392.581.890
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	811.031.260.536	(294.321.688.597)	516.709.571.939	808.549.785.883
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.832.863.279.400	(241.649.312.884)	1.591.213.966.516	1.693.294.560.279
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.884.608.970.713	(1.311.497.650.174)	3.573.111.320.539	4.355.832.378.413
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.230.377.402.433	(820.247.495.330)	2.410.129.907.103	2.936.131.026.464
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.640.078.734.489	(788.699.187.225)	851.379.547.264	1.345.806.102.822
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.229.408.893.413	(723.331.822.698)	506.077.070.715	1.155.146.356.037
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.552.309.423.938	(471.967.071.375)	2.080.342.352.563	2.481.771.138.682
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.571.939.223.198	(3.805.272.537.239)	1.766.666.685.959	5.453.006.581.404
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	26.876.214.065.464	(12.217.492.279.864)	14.658.721.785.600	25.152.523.125.133
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.428.886.350.375	(1.953.548.474.012)	4.475.337.876.363	5.570.641.029.594
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.220.156.775.183	(3.108.901.324.659)	9.111.255.450.524	11.211.918.159.435
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	216.874.887.239	(48.113.450.893)	168.761.436.346	196.710.647.484
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.493.404.156.327	(917.954.174.941)	2.575.449.981.386	3.099.711.753.431
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	38.173.828.526	(20.080.037.828)	18.093.790.698	35.815.129.126
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.006.461.977.147	(316.095.930.500)	690.366.046.647	788.862.119.489
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	98.923.034.446	(34.539.916.834)	64.383.117.612	86.366.087.736
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.675.956.612.173	(457.247.269.054)	1.218.709.343.119	1.466.654.428.145
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.579.087.072.196	(1.873.310.435.878)	7.705.776.636.318	7.819.752.237.038
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.221.062.700.116	(5.974.891.407)	1.215.087.808.709	1.325.147.647.960
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.360.758.910.051	(4.645.179.687.278)	6.715.579.222.773	9.812.935.933.408
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.669.007.769.264	(1.488.591.791.033)	14.180.415.978.231	13.109.466.423.145
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.199.037.545.782	(714.120.052.868)	3.484.917.492.914	3.405.341.806.215
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	5.642.034.060.629	(1.495.881.446.051)	4.146.152.614.578	5.081.785.664.432
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.887.024.583.702	(3.434.399.020.296)	10.452.625.563.406	12.685.517.209.250
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	2.854.214.613.722	(251.626.045.786)	2.602.588.567.936	2.456.791.738.974
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.257.204.933.919	(414.312.049.387)	1.842.892.884.532	639.879.854.145
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	121.363.122.110
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	766.442.053.751	(247.375.216.126)	519.066.837.625	733.799.467.066
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.664.926.597.711	(373.211.824.198)	1.291.714.773.513	1.430.714.945.550
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.931.144.823.109	(411.140.602.034)	2.520.004.221.075	2.757.294.269.986
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	8.203.829.841.325	(993.827.433.102)	7.210.002.408.223	7.552.812.528.385
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	42.213.514.105	(2.129.362.654)	40.084.151.451	38.413.085.105
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	19.733.715.055	(1.973.371.506)	17.760.343.549	19.733.715.055
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	159.963.616.730	(1.609.582.147)	158.354.034.583	148.974.650
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	675.706.655.556	(143.313.074.581)	532.393.580.975	943.757.986.641
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	174.601.658.470	(22.630.188.627)	151.971.469.843	174.021.372.308
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	326.766.774.323	(120.186.543.868)	206.580.230.455	243.063.209.971
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	55.586.878.128	(15.068.441.795)	40.518.436.333	54.892.610.158
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	379.218.956.507	(121.563.502.463)	257.655.454.044	276.951.167.537
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	535.771.869.784		535.771.869.784	535.771.869.784
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	240.425.660	(84.148.980)	156.276.680	240.425.660
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	24.669.613.408	(3.579.628.900)	21.089.984.508	19.579.545.604
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	326.272.346.383	(98.598.640.047)	227.673.706.336	313.786.931.107
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	112.583.363.628	(32.021.572.804)	80.561.790.824	108.383.209.438
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.385.544.442.998	(297.778.904.778)	1.087.765.538.220	1.161.270.740.143
47	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	104.920.815.861	(40.295.271.461)	64.625.544.400	84.069.344.694
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	968.838.228.069	(294.127.037.657)	674.711.190.412	810.412.719.245
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	202.833.332.406	(66.476.060.132)	136.357.272.274	202.162.433.406
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	581.444.521.135	(176.010.082.882)	405.434.438.253	702.496.447.900
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.841.758.502	(953.670.340)	22.888.088.162	23.841.758.502
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13.080.697.903.724	(4.261.765.794.370)	8.818.932.109.354	12.507.711.878.307
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	94.733.126.419	(28.778.541.993)	65.954.584.426	
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	486.743.763.434	(96.134.940.775)	390.608.822.659	422.519.191.673
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	116.402.853.453	(4.866.911.150)	111.535.942.303	36.188.579.498
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245.451.127.331	(57.426.391.958)	188.024.735.373	199.414.306.109
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	648.451.175.165	(43.419.123.443)	605.032.051.722	520.062.030.224
58	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	255.705.326.222	(120.754.199.342)	134.951.126.880	239.433.632.412
59	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.700.501.450	(293.153.476)	13.407.347.974	7.954.000.000
60	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	887.569.035.176	(182.140.435.952)	705.428.599.224	846.960.953.962
61	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	419.862.101.444	(35.396.400.400)	384.465.701.044	328.715.195.669
62	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	229.234.913.483	(24.688.758.928)	204.546.154.555	223.489.299.679
63	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	77.750.726.417	(8.635.241.417)	69.115.485.000	77.987.068.927
64	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	812.562.072.444	(142.483.390.519)	670.078.681.925	695.979.442.825
65	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	476.180.820.141	(211.528.234.346)	264.652.585.795	468.937.952.262
66	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	709.967.389.267	(126.847.536.014)	583.119.853.253	691.344.790.843

GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 *(Audited)*			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
67	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	193.424.947.239	(73.046.762.366)	120.378.184.873	161.382.008.128
68	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	78.742.710.826	(34.969.375.467)	43.773.335.359	74.858.154.421
69	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.550.991.370	(3.010.807.377)	16.540.183.993	19.584.304.312
70	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	389.579.291.654	(81.362.330.216)	308.216.961.438	389.707.308.680
71	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	188.514.743.536	(62.691.405.548)	125.823.337.988	175.871.756.557
72	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	565.012.907.152	(126.653.612.809)	438.359.294.343	440.858.400.443
73	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	678.585.050.381	(207.399.767.054)	471.185.283.327	642.723.054.616
74	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.146.299.348.525	(191.536.169.522)	2.954.763.179.003	2.519.419.225.039
75	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.266.767.100.006	(207.297.586.310)	4.059.469.513.696	2.859.949.003.765
76	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	288.326.151.422	(33.691.837.879)	254.634.313.543	272.518.330.859
77	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129.000.060	(6.000.003)	123.000.057	129.000.060
78	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS			-	439.593.970.307
79	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	99.693.000	(5.981.580)	93.711.420	99.693.000
80	100	KOMISI YUDISIAL	70.623.104.266	(6.344.089.723)	64.279.014.543	70.471.586.566
81	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	120.650.875.622	(1.206.508.756)	119.444.366.866	-
82	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	50.418.164.020	(3.537.991.975)	46.880.172.045	43.908.513.272
83	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.095.905.100	(63.463.109)	1.032.441.991	957.905.100
84	107	BADAN SAR NASIONAL	442.009.886.324	(38.203.562.534)	403.806.323.790	382.875.928.591
85	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	8.598.833.775	(458.226.741)	8.140.607.034	5.676.312.775
86	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	37.021.835.924	(1.269.357.568)	35.752.478.356	24.777.659.194
87	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	848.304.579.359	(248.426.492.286)	599.878.087.073	909.037.244.033
88	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	100.507.448.736	(1.007.189.586)	99.500.259.150	
89	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	411.265.921.754	(192.636.084.663)	218.629.837.091	380.490.149.146
90	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	404.896.149.107	(214.860.309.272)	190.035.839.835	409.823.500.374
91	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	72.509.996.606	(5.829.591.612)	66.680.404.994	64.122.236.681
TOTAL			**191.283.482.816.413**	**(52.463.855.914.974)**	**138.819.626.901.439**	**170.243.266.954.328**

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.561.081.600	(3.339.409.234)	10.221.672.366	9.790.961.500
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	67.937.884.595	(23.244.012.478)	44.693.872.117	64.901.869.781
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	276.086.520.755	(97.649.180.141)	178.437.340.614	271.686.389.709
4	005	MAHKAMAH AGUNG	206.271.705.824	(49.435.830.410)	156.835.875.414	198.715.162.539
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	52.749.531.594	(20.834.155.481)	31.915.376.113	47.391.754.050
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	116.073.917.111	(62.087.130.702)	53.986.786.409	111.912.441.221
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	469.981.034.821	(209.710.805.098)	260.270.229.723	464.728.914.985
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	192.759.444.189	(57.342.711.212)	135.416.732.977	241.047.706.845
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	45.345.904.293	(40.769.683.776)	4.576.220.517	44.802.449.587
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.012.302.136.154	(4.891.217.770.831)	1.121.084.365.323	4.844.040.533.141
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	187.832.116.877	(63.772.394.301)	124.059.722.576	161.477.026.260
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	376.594.636.513	(121.584.325.222)	255.010.311.291	348.573.649.280
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	19.157.870.618	(8.507.414.494)	10.650.456.124	18.437.121.332
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	465.461.076.093	(159.463.915.681)	305.997.160.412	418.719.321.493
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	11.100.798.830	(7.693.387.463)	3.407.411.367	10.155.870.130
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	48.749.460.682	(8.849.326.465)	39.900.134.217	45.026.301.608
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	640.415.541	(203.304.093)	437.111.448	640.415.541
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.361.987.592.279	(303.864.797.338)	2.058.122.794.941	2.084.355.312.724
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	63.703.842.252.840	(31.669.796.419.709)	32.034.045.833.131	52.728.985.432.198
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	52.724.893.361	(70.930.137)	52.653.963.224	42.434.655.576
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	568.999.387.880	(507.176.942.072)	61.822.445.808	484.924.524.185
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	801.146.331.893	(127.599.055.900)	673.547.275.993	584.850.370.291
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	139.107.342.768	(32.298.882.478)	106.808.460.290	187.010.954.455
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	339.626.428.097	(179.649.499.248)	159.976.928.849	310.810.229.722
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	254.087.358.192	(119.544.555.295)	134.542.802.897	201.689.754.410
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	144.155.117.030	(10.165.576.313)	133.989.540.717	95.717.135.245
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.715.207.396.655	(453.300.231.931)	1.261.907.164.724	71.416.933.824
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	7.800.704.921
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	59.017.414.604	(26.551.702.852)	32.465.711.752	57.674.514.317
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	188.911.164.283	(70.787.550.393)	118.123.613.890	157.446.133.496
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.074.345.634.297	(812.770.332.739)	1.261.575.301.558	1.873.015.165.854
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	331.979.913.789.707	(130.881.333.292.433)	201.098.580.497.274	301.628.323.265.365
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN	30.063.444.660	(2.856.932.932)	27.206.511.728	30.063.444.660
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	144.386.000	(15.123.075)	129.262.925	144.386.000
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	39.810.361.627	(16.903.310.289)	22.907.051.338	50.470.234.851
36	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(546.836.736)	2.654.219.684	3.201.056.420
37	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	33.327.401.786	(14.019.126.986)	19.308.274.800	31.649.807.986
38	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.291.250.920	(757.981.988)	1.533.268.932	2.181.250.920
39	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	44.826.764.134	(7.990.155.544)	36.836.608.590	31.639.977.300
40	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	268.308.500	(21.472.502)	246.835.998	226.308.500
41	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	255.108.000	(143.456.650)	111.651.350	255.108.000
42	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.395.216.550	(380.207.454)	1.015.009.096	1.395.216.550
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	123.811.988.233	(38.853.036.184)	84.958.952.049	117.194.333.634
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	35.880.627.826	(10.023.331.245)	25.857.296.581	35.880.627.826
45	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL			-	
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19.232.499.391	(9.200.289.217)	10.032.210.174	19.663.199.850
47	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	5.684.654.080	(1.510.104.819)	4.174.549.261	4.706.496.640
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	9.112.741.069	(4.226.923.020)	4.885.818.049	8.144.937.430
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	630.646.000	(6.321.875)	624.324.125	101.150.000
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.432.188.719	(7.680.904.503)	20.751.284.216	23.512.183.604
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.169.593.700	(81.624.785)	1.087.968.915	1.169.593.700
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	690.315.237.530	(307.469.885.976)	382.845.351.554	684.422.388.869
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	15.361.424.495	(5.047.638.038)	10.313.786.457	
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	21.261.814.149	(3.026.461.088)	18.235.353.061	19.396.163.560
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.369.996.087	(774.976.280)	595.019.807	1.369.996.087
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.863.164.183	(1.094.027.867)	3.769.136.316	4.863.164.183
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	38.582.919.525	(7.236.364.025)	31.346.555.500	38.095.621.525
58	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	22.224.046.832	(5.986.970.559)	16.237.076.273	17.278.957.020
59	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA			-	
60	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	236.453.444.939	(73.893.496.397)	162.559.948.542	235.903.574.617
61	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.463.549.885	(390.019.141)	1.073.530.744	1.433.729.885
62	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	44.607.776.966	(18.221.595.342)	26.386.181.624	44.607.776.966
63	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	542.646.198	(81.396.930)	461.249.268	542.646.198
64	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	181.623.004.708	(64.549.278.900)	117.073.725.808	176.901.883.760

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
65	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	41.401.520.690	(34.098.548.799)	7.302.971.891	38.394.358.590
66	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	85.333.172.769	(16.718.608.873)	68.614.563.896	142.466.170.699
67	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	39.550.825.032	(17.576.051.075)	21.974.773.957	34.750.842.407
68	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.443.374.375	(2.054.254.884)	1.389.119.491	3.233.142.000
69	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.106.846.614)	1.165.565.258	2.263.658.842
70	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	13.295.627.871	(2.725.468.911)	10.570.158.960	13.295.627.871
71	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	16.240.117.839	(4.348.745.367)	11.891.372.472	13.419.676.529
72	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	18.692.047.270	(8.204.010.692)	10.488.036.578	18.692.047.270
73	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.715.903.069	(5.678.685.446)	5.037.217.623	10.600.481.125
74	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.248.898.044	(18.490.382.804)	7.758.515.240	25.899.620.044
75	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	80.500.000	(18.112.500)	62.387.500	751.251.911.202
76	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.582.525.136	(6.220.110.923)	3.362.414.213	8.756.628.136
77	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	82.568.038.322	(14.630.625.707)	67.937.412.615	65.089.219.713
78	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS			-	672.892.764.152
79	100	KOMISI YUDISIAL	3.530.800.628	(3.083.924.792)	446.875.836	3.450.884.028
80	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA			-	-
81	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	5.997.633.604	(1.790.273.609)	4.207.359.995	5.864.159.104
82	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	903.701.519.497	(112.258.578.708)	791.442.940.789	865.899.662.542
83	107	BADAN SAR NASIONAL	29.021.082.705	(5.655.433.130)	23.365.649.575	16.846.071.672
84	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	40.483.996.687	(3.257.266.295)	37.226.730.392	23.871.707.175
85	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	116.011.296.583	(21.416.182.817)	94.595.113.766	108.399.762.040
86	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	6.822.650.239.108	(4.091.203.444.719)	2.731.446.794.389	6.810.701.847.860
87	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	37.941.030.875	(1.627.262.399)	36.313.768.476	
88	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	27.854.500	(2.413.050)	25.441.450	2.575.000
89	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	33.034.241.052	(15.767.596.521)	17.266.644.531	32.038.729.552
90	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	19.206.889.593	(12.351.794.883)	6.855.094.710	19.541.941.537
91	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	252.617.702.147	(55.966.753.684)	196.650.948.463	135.741.252.108
92	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	35.032.074.880	(2.550.212.394)	32.481.862.486	7.986.086.500
TOTAL			**423.232.566.227.236**	**(176.082.405.365.863)**	**247.150.160.861.373**	**379.236.269.019.824**

ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	56.933.815.023	(18.957.383)	56.914.857.640	56.517.880.193
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	370.981.600.642		370.981.600.642	371.207.967.145
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	55.379.615.223	(217.023.968)	55.162.591.255	45.716.567.413
4	005	MAHKAMAH AGUNG	56.301.175.922	(448.566.059)	55.852.609.863	58.964.475.083
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	11.471.275.354	(244.722.363)	11.226.552.991	9.690.342.168
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.261.942.173.242	(4.771.088.799)	1.257.171.084.443	714.205.336.259
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	8.063.698.732	(6.443.985.224)	1.619.713.508	8.063.698.732
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	190.143.591.546	(2.173.578.554)	187.970.012.992	259.963.071.400
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	89.575.316.723	(4.925.391.533)	84.649.925.190	85.771.614.008
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	857.409.802.265	(29.830.990.399)	827.578.811.866	240.479.871.301
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	77.596.821.685	(7.424.820.963)	70.172.000.722	44.614.453.012
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.063.850.892	(301.126.830)	27.762.724.062	26.339.299.995
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	13.801.033.266		13.801.033.266	11.807.907.831
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	291.079.233.976	(454.029.837)	290.625.204.139	267.827.296.562
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	482.221.631		482.221.631	577.988.886
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	22.999.124.941	(900.629.525)	22.098.495.416	16.630.512.427
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.353.429.186	(24.926.763)	3.328.502.423	3.012.502.496
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	438.502.421.932	(1.033.571.100)	437.468.850.832	374.245.220.258
19	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.094.146.850.907	(10.278.265.914)	2.083.868.584.993	2.433.243.142.358
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.400.241.482	(23.502.680)	17.376.738.802	13.053.107.171
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	502.693.267.708	(59.935.367.052)	442.757.900.656	359.292.188.824
22	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	629.623.497.452	(3.798.969.899)	625.824.527.553	572.187.473.210
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134.107.341.854	(677.736.736)	133.429.605.118	69.730.558.579
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	75.982.382.199	(1.358.112.577)	74.624.269.622	74.205.613.653
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	884.219.041.637	(37.185.964.705)	847.033.076.932	549.211.523.509
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	103.553.959.541	(497.003.160)	103.056.956.381	78.974.331.115
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	216.216.407.409	(455.796.798)	215.760.610.611	10.855.397.036
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	660.280.424
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	37.182.855.115	(2.003.743.664)	35.179.111.451	34.884.722.279
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	65.299.027.898	(633.692.862)	64.665.335.036	60.393.338.093
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	124.333.720.879	(3.803.763.957)	120.529.956.922	99.538.810.861
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	27.775.039.425.280	(274.004.315.365)	27.501.035.109.915	5.387.820.016.284
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	23.315.581.730	(3.000.000)	23.312.581.730	22.201.143.721
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925		63.071.925	67.526.925
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.246.852.901		19.246.852.901	19.223.015.131
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	60.860.184.685	(407.115.550)	60.453.069.135	160.289.805.590
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	938.105.931		938.105.931	871.857.661
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	25.665.692.427	(110.261.340)	25.555.431.087	22.362.479.427
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	29.762.940.970	(320.634.286)	29.442.306.684	22.984.514.039
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	13.943.355.930		13.943.355.930	602.875.930
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.675.107.090		2.675.107.090	1.861.931.800
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	525.355.414	(4.500.000)	520.855.414	450.745.175
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	7.340.175.552		7.340.175.552	7.340.175.552
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.214.518.145	(39.750.000)	2.174.768.145	2.140.158.145
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	5.297.864.300	(31.265.114)	5.266.599.186	3.868.375.400
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	568.097.704		568.097.704	568.097.704
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	31.713.515.941	(9.460.000)	31.704.055.941	28.465.852.027
48	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	3.024.385.883		3.024.385.883	2.457.634.083
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	790.479.838.655	(124.755.500)	790.355.083.155	716.383.038.911
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	103.982.062.608	(13.912.500)	103.968.150.108	215.222.151.966
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	37.848.773.770	(381.733.387)	37.467.040.383	19.421.210.039
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.217.850		100.217.850	100.217.850
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	51.960.706.255	(16.176.348.840)	35.784.357.415	50.473.160.835
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	262.979.432		262.979.432	
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	11.214.339.873	(13.750.000)	11.200.589.873	48.461.763.478
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	2.161.941.248	(93.744.487)	2.068.196.761	1.819.977.248
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.029.594.329	(358.775.400)	670.818.929	1.027.785.329
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	6.612.456.855	(1.297.908.930)	5.314.547.925	4.294.618.725
59	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	754.260.000		754.260.000	7.705.345.078
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.263.911.292	(47.098.750)	4.216.812.542	4.153.389.332
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	9.403.780.620		9.403.780.620	9.181.583.480
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	9.559.461.707	(609.121.700)	8.950.340.007	7.092.048.490
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.187.433.901	(116.853.808)	1.070.580.093	1.275.082.221
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	20.918.324.461		20.918.324.461	13.838.650.246
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	232.283.807	(22.552.500)	209.731.307	503.804.727
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	48.168.574.178	(81.197.475)	48.087.376.703	62.859.643.561
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.362.053.000	(12.873.100)	8.349.179.900	7.882.521.262

ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2012 (*Audited*)
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	50.899.457.145	(395.872.110)	50.503.585.035	45.762.842.869
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.611.350		1.611.350	1.611.350
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	23.345.895.070	(5.000.000)	23.340.895.070	10.638.974.306
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.045.500		1.045.500	1.045.500
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	11.765.317.596	(36.400.000)	11.728.917.596	6.583.800.575
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.683.694.001		1.683.694.001	1.455.064.001
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.100.150.255	(3.000.000)	1.097.150.255	1.746.644.053
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.720.653.932	(44.583.450)	3.676.070.482	3.241.280.160
76	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.924.247.888	(27.313.663)	7.896.934.225	7.815.257.888
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.006.113.604	(29.800.000)	976.313.604	942.450.234
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.348.414.495	(298.846.518)	2.049.567.977	2.268.785.284
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	15.310.559.767	(514.384.256)	14.796.175.511	17.980.633.583
80	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	23.188.726.540		23.188.726.540	
81	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.680.057.605		2.680.057.605	1.521.823.665
82	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	50.559.530.114		50.559.530.114	47.079.496.449
83	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS			-	15.021.199.484
84	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	36.849.829.375		36.849.829.375	36.559.833.130
85	100	KOMISI YUDISIAL	741.191.281		741.191.281	691.761.248
86	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4.794.692.750		4.794.692.750	56.408.661.774
87	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	10.511.375.663		10.511.375.663	9.784.549.563
88	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	415.171.434.455		415.171.434.455	428.077.576.423
89	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	7.068.978.175	(4.268.750)	7.064.709.425	6.956.312.977
90	107	BADAN SAR NASIONAL	6.136.729.895		6.136.729.895	3.463.205.599
91	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.865.512.429	(2.114.063)	1.863.398.366	1.768.698.727
92	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	8.995.481.750	(724.325.000)	8.271.156.750	8.271.156.750
93	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.037.727.925		1.037.727.925	377.142.800
94	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	19.253.968.793	(1.691.008.820)	17.562.959.973	1.514.069.471
95	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN	14.373.306.309	(34.699.000)	14.338.607.309	15.187.114.384
96	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	39.981.670		39.981.670	
97	114	SEKRETARIAT KABINET	598.562.546		598.562.546	91.650.623
98	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	4.853.179.426		4.853.179.426	2.585.520.900
99	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	14.748.023.606	(6.096.355.380)	8.651.668.226	14.687.507.081
100	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.447.385.181	(1.190.283.377)	1.257.101.804	2.425.078.106
101	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	10.940.426.600		10.940.426.600	8.613.142.600
102	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	22.330.581.800	(64.917.923)	22.265.663.877	
TOTAL			**38.607.829.866.402**	**(485.309.429.646)**	**38.122.520.436.756**	**14.566.662.581.210**

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2012 (Audited)
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.360.968.400	4.042.335.400
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	51.445.951.151	21.761.774.500
3	005	MAHKAMAH AGUNG	573.769.368.646	509.891.597.540
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	109.312.995.360	152.849.208.264
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	654.166.375.234	195.644.778.154
6	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	43.738.576.277	24.594.707.755
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	824.353.851.131	317.179.028.279
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.738.461.384	24.871.464.854
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	27.134.953.190.740	11.209.658.432.786
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	513.912.932.922	587.006.702.669
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	457.589.043.017	677.317.480.494
12	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN		10.887.286.730
13	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	115.445.115.271	77.344.598.625
14	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	19.726.146.000	13.137.042.627
15	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.151.435.690.890	15.153.499.291.696
16	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28.032.064.309.662	25.113.457.585.228
17	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	12.505.118.867	56.216.277.370
18	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.182.625.738.623	1.780.099.092.992
19	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.577.382.848.300	4.938.270.877.075
20	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.676.184.755.988	1.974.244.996.993
21	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	1.046.116.382.651	900.682.271.965
22	025	KEMENTERIAN AGAMA	565.327.053.297	771.520.771.801
23	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	724.403.890.023	276.587.331.518
24	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	189.160.467.945	151.183.709.969
25	027	KEMENTERIAN SOSIAL	939.701.738	2.122.859.000
26	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	53.803.018.094	50.968.864.416
27	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	366.159.232.103	228.386.263.832
28	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	32.932.366.109.466	26.100.648.839.841
29	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	10.660.099.950	60.322.217.950
30	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		132.463.022.288
31	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	36.423.023.654	37.713.056.138
32	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	6.105.435.500	
33	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	1.207.700.000	1.207.700.000
34	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	47.130.397.700	76.263.869.000
35	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	57.450.779.353	
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	26.369.134.394	47.087.227.489
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	196.490.800	
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	30.599.208.039	14.946.006.608
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6.833.632.600	
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	129.214.126.765	112.889.229.474
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.430.922.516.271	796.273.883.821
42	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.841.225.500	
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	8.954.243.610	45.962.567.175
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	41.657.569.915	80.368.478.728
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL		25.489.155.233
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	113.001.786.426	46.297.290.312
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	18.616.214.000	
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	11.967.763.000	18.565.102.691

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2012 (Audited)
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	229.014.853.791	70.672.270.958
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.484.807.854	14.047.026.827
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	41.957.300	42.000.000
52	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	117.597.564.270	136.587.797.635
53	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	36.857.625.510	155.725.219.200
54	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	21.082.692.693	11.446.806.000
55	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.665.146.506	29.918.483.324
56	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	106.100.000	106.100.000
57	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	
58	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	35.914.316.264	11.813.662.483
59	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.843.767.057	28.268.569.907
60	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.128.387.850	36.900.000
61	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	53.529.288.335	4.749.788.200
62	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	43.883.648.890	18.352.633.775
63	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	541.133.005.008	541.133.005.008
64	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	33.747.108.771	
65	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS		329.112.111.638
66	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.776.470.776	4.776.470.776
67	100	KOMISI YUDISIAL	29.000.000	
68	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	76.899.401.025	6.937.804.600
69	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	2.352.784.000	2.352.784.000
70	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	78.498.094.472	962.473.514
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	38.867.475.831	1.333.452.325
72	107	BADAN SAR NASIONAL	17.961.035.000	178.168.109.000
73	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	13.569.237.083	12.409.978.633
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	14.980.165.810	16.203.227.736
75	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	477.975.109.090	314.281.214.000
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME		3.857.738.750
77	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	10.969.342.400	180.166.000
78	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.350.691.861.264	1.280.994.258.475
79	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	168.704.470.004	452.934.258.000
TOTAL			**119.419.040.145.511**	**96.447.328.590.044**

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 Audited			31 Desember 2012 Audited		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	35.750.000	(178.750)	35.571.250			-
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.270.337.544	(2.270.337.544)	-	1.805.083.257	(1.805.083.257)	-
3	005	MAHKAMAH AGUNG	433.688.156	(17.453.718)	416.234.438	442.849.467	(8.184.243)	434.665.224
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	112.188.627	(37.862.127)	74.326.500	113.388.627	(37.868.127)	75.520.500
5	007	SEKRETARIAT NEGARA			-	13.855.000	(69.275)	13.785.725
6	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI			-	18.420.089.235	-	18.420.089.235
7	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.073.420.040	(5.436.279)	1.067.983.761	232.336.044	(6.626.237)	225.709.807
8	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.246.530.192	(3.833.143.152)	413.387.040	4.262.335.790	-	4.262.335.790
9	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.065.108.739	(89.696.707)	975.412.032	1.512.747.503	(77.474.849)	1.435.272.654
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.238.991.501	(14.288.710)	2.224.702.791	171.642.005	(858.210)	170.783.795
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.964.538.169	(2.551.694.748)	412.843.421	2.845.325.250	(2.302.967.643)	542.357.607
12	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	54.340.000	(37.847.875)	16.492.125	40.265.000	(37.777.500)	2.487.500
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	412.578.733	(16.085.073)	396.493.660	479.001.363	(1.653.998)	477.347.365
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.443.750	(122.219)	24.321.531	28.050.000	(140.250)	27.909.750
15	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.822.878.422	(120.185.118)	5.702.693.304	5.853.574.766	(120.108.099)	5.733.466.667
16	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	564.330.625	(67.092.430)	497.238.195	576.602.260	(76.450.750)	500.151.510
17	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	7.775.000	(38.875)	7.736.125			-
18	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS	2.718.135.714	(210.249.290)	2.507.886.424	13.771.235.658	(6.885.618)	13.764.350.040
19	027	KEMENTERIAN SOSIAL	94.358.320	(93.263.820)	1.094.500	90.162.000	(86.518.310)	3.643.690
20	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	27.965.000	(139.825)	27.825.175	87.228.974	(35.211.394)	52.017.580
21	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.014.140.231	(321.554.002)	692.586.229	1.008.724.495	(175.028.615)	833.695.880
22	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	29.644.998	(148.225)	29.496.773	31.869.468	(159.347)	31.710.121
23	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	180.364.805	(168.126.305)	12.238.500	2.485.785.307	(168.064.805)	2.317.720.502
24	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	45.480.335	(227.402)	45.252.933	61.829.662	(309.148)	61.520.514
25	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	1.363.636.361	(1.363.636.361)	-	1.373.636.362	(1.373.636.362)	-
26	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	23.460.378	(117.302)	23.343.076	54.030.207	(9.274.903)	44.755.304
27	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			-	6.000.000	(30.000)	5.970.000
28	054	BADAN PUSAT STATISTIK	38.430.590	(3.477.005)	34.953.585	25.907.973	(4.971.097)	20.936.876
29	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.016.299.748	(2.076.650.145)	939.649.603	3.155.900.348	(2.109.414.985)	1.046.485.363
30	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.329.990.183	(346.718.259)	983.271.924	1.362.339.403	(354.529.181)	1.007.810.222
31	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	251.794.030	(205.771.782)	46.022.248	409.157.104	(206.558.597)	202.598.507
32	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL			-	26.844.691	(134.223)	26.710.468
33	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	33.572.200	(326.245)	33.245.955			-
34	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			-	58.000.000	-	58.000.000
35	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL			-	1.347.250	(6.736)	1.340.514
36	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	144.473.523	(289.565)	144.183.958			-
37	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	48.049.269	(240.247)	47.809.022	29.658.827	(148.294)	29.510.533
38	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	60.379.494.321	(59.684.253.419)	695.240.902	53.772.171.119	(53.751.607.775)	20.563.344
39	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.382.872.541	(21.140.027.111)	2.242.845.430	22.491.189.860	(20.194.564.680)	2.296.625.180
40	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	80.474.493.676	(80.474.493.676)	-	67.492.809.337	(67.449.327.837)	43.481.500
41	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.975.914.447	(1.694.249.069)	281.665.378	1.701.968.664	(169.329.042)	1.532.639.622
42	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.489.226.067	(10.421.411.613)	67.814.454	13.242.893.007	(10.145.938.649)	3.096.954.358
43	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL			-	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935
44	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	22.676.256	(113.381)	22.562.875	28.676.256	(143.381)	28.532.875
45	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	41.400.000	(207.000)	41.193.000			-
46	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			-	1.976.188	(9.881)	1.966.307
47	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	30.666.908.630	(30.666.908.630)	-	25.994.008.771	(25.994.008.771)	-
48	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	460.984.250	(2.304.921)	458.679.329	468.184.250	(2.340.921)	465.843.329
49	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA			-	8.500.000	(42.500)	8.457.500
50	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TK			-	24.563.650	(122.819)	24.440.831
51	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	6.445.462	(6.445.462)	-	7.536.370	(7.536.370)	-
52	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	361.320.150		361.320.150	252.620.150		252.620.150
TOTAL			**239.948.430.983**	**(217.942.813.387)**	**22.005.617.596**	**246.721.313.918**	**(186.723.103.744)**	**59.998.210.174**

ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2013 (*Audited*)
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	TOTAL	ASET TAK BERWUJUD *)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	988.499.540		988.499.540	988.499.540
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	27.953.090.474		27.953.090.474	18.259.646.774
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	90.965.279.408		90.965.279.408	64.337.315.213
4	005	MAHKAMAH AGUNG	24.199.349.226		24.199.349.226	20.291.891.071
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.496.589.903		3.496.589.903	3.309.798.403
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	12.759.890.598		12.759.890.598	15.165.235.054
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	600.312.000		600.312.000	305.659.000
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	736.983.395.672		736.983.395.672	1.513.687.117.222
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	14.851.369.282		14.851.369.282	12.325.132.833
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	653.836.669.020		653.836.669.020	489.295.668.447
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	333.848.538.055		333.848.538.055	288.291.861.880
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	580.754.434.414		580.754.434.414	518.108.669.309
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	3.177.745.040		3.177.745.040	3.177.745.040
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	66.334.123.856		66.334.123.856	61.924.734.091
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	149.250.000		149.250.000	4.432.790
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	29.171.123.047		29.171.123.047	27.012.663.128
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	412.105.000		412.105.000	364.970.000
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.748.063.883.559		1.748.063.883.559	1.672.085.287.468
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.130.288.135.264	16.045.930.645	2.146.334.065.909	1.886.541.933.297
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	76.395.841.868		76.395.841.868	42.026.303.393
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	420.955.179.489		420.955.179.489	361.056.604.717
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	204.525.641.293		204.525.641.293	167.096.017.733
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	79.882.134.668		79.882.134.668	59.933.887.371
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	42.411.353.924		42.411.353.924	28.007.851.163
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	74.539.181.070		74.539.181.070	61.526.128.279
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	21.854.422.732		21.854.422.732	18.454.671.532
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.132.726.926		48.132.726.926	44.675.607.153
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	558.042.084
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	47.714.157.806		47.714.157.806	19.120.804.306
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	77.224.162.861		77.224.162.861	65.661.460.948
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.570.707.616		47.570.707.616	37.526.347.402
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	4.941.193.108.154	1.043.392.500	4.942.236.500.654	4.919.228.727.633
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	43.446.575.134		43.446.575.134	36.866.485.817
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	517.810.000		517.810.000	217.680.750
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.326.863.920		2.326.863.920	2.266.145.420
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	25.966.956.791		25.966.956.791	21.475.791.427
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	14.023.859.524		14.023.859.524	15.637.031.192
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	43.854.828.646		43.854.828.646	42.527.429.146
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	22.801.257.099		22.801.257.099	16.623.377.045
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	18.489.303.462		18.489.303.462	15.123.060.962
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	16.405.871.430		16.405.871.430	13.030.938.000
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.359.045.500		3.359.045.500	3.002.050.500
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	3.425.238.320		3.425.238.320	2.575.023.720
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	441.189.209.188		441.189.209.188	421.868.768.788
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	134.768.120.799		134.768.120.799	116.922.073.689
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.220.146.044		4.220.146.044	4.025.245.964
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	441.265.030.532		441.265.030.532	179.365.871.843
48	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	19.912.235.037		19.912.235.037	19.686.419.731
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	119.856.307.804		119.856.307.804	106.850.641.704
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	77.410.216.499		77.410.216.499	56.913.776.992
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	232.192.723.569		232.192.723.569	150.949.043.922
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.461.943.300		5.461.943.300	5.461.943.300
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	400.604.904.112		400.604.904.112	306.455.496.578
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.138.003.623		4.138.003.623	
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	58.174.737.879		58.174.737.879	59.377.156.339
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	149.671.659.546	2.003.599.250	151.675.258.796	149.303.736.448
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	94.627.521.270		94.627.521.270	88.368.164.878
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	65.457.417.778	620.181.072	66.077.598.850	56.960.938.158
59	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	14.000.000		14.000.000	14.000.000
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	26.226.808.520		26.226.808.520	21.769.745.654
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.748.204.589		1.748.204.589	1.707.252.089
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	139.293.315.153		139.293.315.153	130.021.054.483
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.238.654.166		2.238.654.166	1.729.592.666
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	11.301.960.459		11.301.960.459	5.479.346.974
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	12.179.544.902		12.179.544.902	8.444.716.975
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	25.114.798.584		25.114.798.584	11.050.335.154
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	196.568.317.189		196.568.317.189	27.977.944.914
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	84.038.864.209		84.038.864.209	60.723.930.817
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	34.727.000		34.727.000	34.727.000
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	33.894.596.887		33.894.596.887	16.367.334.785
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.361.000		4.361.000	4.361.000
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	705.844.892.383	443.887.407.132	1.149.732.299.515	510.530.952.633

ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2013 (*Audited*)			31 Desember 2013 (*Audited*)
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	TOTAL	ASET TAK BERWUJUD *)
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.738.718.750		1.738.718.750	1.434.637.750
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.470.386.876		1.470.386.876	1.320.219.056
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.768.229.100		3.768.229.100	3.418.506.100
76	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	14.565.599.145		14.565.599.145	12.659.577.325
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	148.865.894.061		148.865.894.061	147.886.272.661
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.659.761.595		10.659.761.595	9.983.054.815
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	128.766.991.539		128.766.991.539	130.199.386.130
80	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	56.109.487.803		56.109.487.803	46.815.142.553
81	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	23.712.208.900		23.712.208.900	18.430.889.900
82	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	28.775.595.567		28.775.595.567	16.453.417.052
83	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.614.616.732		5.614.616.732	5.059.536.602
84	100	KOMISI YUDISIAL	1.838.089.798		1.838.089.798	1.524.651.246
85	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	28.902.576.584		28.902.576.584	28.331.128.584
86	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	8.685.337.920		8.685.337.920	6.314.782.920
87	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	549.989.747		549.989.747	549.989.747
88	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	11.755.967.809		11.755.967.809	11.133.566.320
89	107	BADAN SAR NASIONAL	49.718.523.796		49.718.523.796	28.132.472.322
90	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	6.566.995.261		6.566.995.261	9.231.159.346
91	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	56.313.187.005	668.575.820	56.981.762.825	35.432.797.250
92	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	78.480.000		78.480.000	184.549.840
93	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	107.258.711.036		107.258.711.036	73.375.610.560
94	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	26.557.799.924		26.557.799.924	5.235.025.271
95	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	668.703.900		668.703.900	19.016.400
96	114	SEKRETARIAT KABINET	6.824.438.946		6.824.438.946	889.454.500
97	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	2.554.622.411		2.554.622.411	230.267.026
98	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.337.411.618		1.337.411.618	1.029.234.318
99	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.502.313.211		2.502.313.211	2.479.038.211
100	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	260.850.000		260.850.000	
101	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	23.514.123.117	1.225.529.800	24.739.652.917	
TOTAL			**16.983.238.845.763**	**465.494.616.219**	**17.448.733.461.982**	**15.705.813.685.536**

*) Pada LKPP Tahun 2012 belum terdapat akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

ASET TANAH KKKS TAHUN 2013

No.	KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2012		KET	Selisih		LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	Aset Tambahan > 2011							SALDO PER DESEMBER 2013	
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)		LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)			LUAS (M2)	Koreksi	LUAS (M2) SETELAH KOREKSI	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	Koreksi	NILAI WAJAR TANAH (RP) SETELAH KOREKSI	LOKASI	LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			13	14	15
1	TOTAL INDONESIA E&P	BALIKPAPAN	9.705.925	546.054.937.372		4.605.286	35.863.668.686	5.100.639	510.191.268.686			-			-		5.100.639	510.191.268.686
2	VICO SANGA SANGA	SANGA-SANGA	1.154.632	44.075.198.000				1.154.632	44.075.198.000			-			-		1.154.632	44.075.198.000
3	PT. MEDCO E & P TARAKAN	TARAKAN	340.635	28.962.632.000				340.635	28.962.632.000			-			-		340.635	28.962.632.000
4	PT PERTAMINA EP AREA CEPU	AREA CEPU	42.055	6.392.360.000				42.055	6.392.360.000			-			-		42.055	6.392.360.000
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BALIKPAPAN	14.459.988	261.863.240.500				14.459.988	261.863.240.500			-			-		14.459.988	261.863.240.500
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN	437.675.097	10.592.439.949.130				437.675.097	10.592.439.949.130	37.315.732		37.315.732	69.559.990.162		69.559.990.162	Rokan	474.990.829	10.661.999.939.292
7	PT. KONDUR PETROLEUM SA	PEKANBARU	6.981.158	230.121.681.000				6.981.158	230.121.681.000			-			-		6.981.158	230.121.681.000
8	PT. PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG	411.388	10.602.840.000				411.388	10.602.840.000			-			-		411.388	10.602.840.000
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKANBARU - PELALAWAN	6.195.852	84.653.336.280				6.195.852	84.653.336.280			-			-		6.195.852	84.653.336.280
10	PT. KALILA (BENTU) LTD.	PELALAWAN & PEKANBARU	361.235	1.945.175.000				361.235	1.945.175.000			-			-		361.235	1.945.175.000
11	PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD.	PEKANBARU	464.088	7.592.592.400				464.088	7.592.592.400			-			-		464.088	7.592.592.400
12	PT. PETROCHINA INT. BERMUDA	SORONG	3.862.621	7.307.770.750				3.862.621	7.307.770.750			-			-		3.862.621	7.307.770.750
13	PT. PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	1.660.974	2.654.097.310		-	(8)	1.660.974	2.654.097.318			-			-		1.660.974	2.654.097.318
14	KANGEAN ENERGY	KANGEAN BLOCK	898.504	40.817.865.860				898.504	40.817.865.860			-			-		898.504	40.817.865.860
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.087	5.562.224.000		(1)	(7)	1.497.088	5.562.224.007			-			-		1.497.088	5.562.224.007
16	MOBIL CEPU LTD	BLORA & BOJONEGORO	587.573	49.679.658.000				587.573	49.679.658.000	3.493.394	30.988	3.524.382	730.779.026.540	6.818.315.000	737.597.341.540	Cepu	4.111.955	787.276.999.540
17	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BLOCK B ACEH	504.273	10.501.230.000				504.273	10.501.230.000			-			-		504.273	10.501.230.000
18	PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.540.916	932.092.427.000				12.540.916	932.092.427.000			-			-		12.540.916	932.092.427.000
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD	JAMBI	25.887.874	3.400.038.160				25.887.874	3.400.038.160			-			-		25.887.874	3.400.038.160
20	VICO UNIT SEMBERAH	SEMBERAH	12.392.826	51.415.100.000				12.392.826	51.415.100.000			-			-		12.392.826	51.415.100.000
21	VICO UNIT PAMAGUAN	LAPANGAN PAMAGUAN	5.689.285	20.536.437.113				5.689.285	20.536.437.113			-			-		5.689.285	20.536.437.113
22	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN MUTIARA	11.686.331	64.787.724.558				11.686.331	64.787.724.558			-			-		11.686.331	64.787.724.558
23	VICO UNIT BADAK & NILAM	BADAK DAN NILAM	79.897.257	186.273.424.543				79.897.257	186.273.424.543			-			-		79.897.257	186.273.424.543
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO	BANGKO BLOCK	1.014.425	19.021.937.352				1.014.425	19.021.937.352			-			-		1.014.425	19.021.937.352
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEMATANG BLOCK	962.044	3.549.632.633				962.044	3.549.632.633			-			-		962.044	3.549.632.633
26	JOB HESS JAMBI MERANG	JAMBI	871.217	6.029.860.000				871.217	6.029.860.000			-			-		871.217	6.029.860.000
27	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO	PENDOPO	955.055	31.627.815.000		(90.337)	-	1.045.392	31.627.815.000			-			-		1.045.392	31.627.815.000
28	JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN	TUBAN	569.945	66.459.346.700				569.945	66.459.346.700	87.282		87.282	11.962.426.316		11.962.426.316	Tuban	657.227	78.421.773.016
29	CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD	GRISSIK - MUSI BANYUASIN	685.838	502.869.000				685.838	502.869.000			-			-		685.838	502.869.000
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS	289.342	2.112.767.000				289.342	2.112.767.000			-			-		289.342	2.112.767.000
31	JOB PERTAMINA TALISMAN	OGAN KOMERING	482.923	2.258.798.000				482.923	2.258.798.000			-			-		482.923	2.258.798.000
32	PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO	SIAK - PEKANBARU	132.829	4.100.448.000				132.829	4.100.448.000	87.643		87.643	2.966.365.705		2.966.365.705	CPP	220.472	7.066.813.705

No.	KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2012		KET	Selisih		LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	Aset Tambahan > 2011							SALDO PER DESEMBER 2013	
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)		LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)			LUAS (M2)	Koreksi	LUAS (M2) SETELAH KOREKSI	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	Koreksi	NILAI WAJAR TANAH (RP) SETELAH KOREKSI	LOKASI	LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			13	14	15
33	TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD	SAROLANGUN	301.743	3.657.675.075		(5.886)	(74.656.260)	307.629	3.732.331.335			-			-		307.629	3.732.331.335
34	PT. LAPINDO BRANTAS INC.	SIDOARJO	447.275	33.296.382.882				447.275	33.296.382.882			-			-		447.275	33.296.382.882
35	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI	BLOCK TOILI-SULAWESI	343.689	3.274.558.000		(4)	-	343.693	3.274.558.000			-			-		343.693	3.274.558.000
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK	SIAK - PEKANBARU	4.254.516	9.403.683.400				4.254.516	9.403.683.400			-			-		4.254.516	9.403.683.400
37	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	567.485	23.890.286.000				567.485	23.890.286.000			-			-		567.485	23.890.286.000
38	PEARL OIL TUNGKAL LTD	TUNGKAL BLOCK - JAMBI	353.137	1.041.880.133				353.137	1.041.880.133			-			-		353.137	1.041.880.133
39	PT. PETROCHINA INT JABUNG	JABUNG BLOCK - JAMBI	8.449.765	323.833.352.258		1	(0)	8.449.765	323.833.352.258	289.794		289.794	11.528.024.000		11.528.024.000	Tanjung Jabung	8.739.559	335.361.376.258
40	KODECO ENERGY LTD.	GRESIK	39.520	1.068.469.575				39.520	1.068.469.575			-			-		39.520	1.068.469.575
41	HESS INDONESIA PANGKAH	GRESIK	286.675	63.497.000.000				286.675	63.497.000.000			-			-		286.675	63.497.000.000
42	EMP (BENTU) LTD.									53.951		53.951	3.139.414.328		3.139.414.328	Bentu Block	53.951	3.139.414.328
43	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED									2.783.052		2.783.052			-	Bula	2.783.052	-
44	PT SPR LANGGAK									4.407		4.407	66.105.000		66.105.000	Langgak	4.407	66.105.000
	SUBTOTAL		655.904.996	13.788.358.699.984		4.509.059	35.789.012.411	651.395.939	13.752.569.687.573	44.115.255	30.988	44.146.243	830.001.352.051	6.818.315.000	836.819.667.051		695.542.182	14.589.389.354.624
45	PT PERTAMINA EP REGION JAWA BAGIAN BARAT	JAWA BAGIAN BARAT	-	68.597.208.000	Hasil IP 2011			-	68.597.208.000			-			-		-	68.597.208.000
46	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan	11.924.889	475.008.806.000	Hasil IP 2011			11.924.889	475.008.806.000			-			-		11.924.889	475.008.806.000
47	PT PERTAMINA EP Cepu		89.369	30.319.456.000	Hasil IP 2011			89.369	30.319.456.000			-			-		89.369	30.319.456.000
48	HUSKY CNOOC MADURA LTD.									103.345		103.345	25.764.648.200		25.764.648.200	Madura Strait	103.345	25.764.648.200
49	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) PTE. LTD.									92.112		92.112	7.429.387.498		7.429.387.498	Citarum	92.112	7.429.387.498
50	RANHILL JAMBI INC PTE. LTD.									13.770		13.770	806.719.722		806.719.722	Batu Gajah	13.770	806.719.722
	SUBTOTAL		**12.014.258**	**573.925.470.000**				**12.014.258**	**573.925.470.000**	**209.227**	-		**34.000.755.420**	-		-	**12.223.485**	**607.926.225.420**
	T O T A L		**667.919.254**	**14.362.284.169.984**		**4.509.059**	**35.789.012.411**	**663.410.197**	**14.326.495.157.573**	**44.324.482**	**30.988**	**44.146.243**	**864.002.107.471**	**6.818.315.000**	**836.819.667.051**		**707.765.667**	**15.197.315.580.044**

Sumur Tidak Digunakan (Aset KKKS)
Tahun 2013

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BP Berau Ltd.	Berau	1	2.716.113	31.439.004.734
2	BP Muturi Ltd.	Muturi			
3	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
4	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean			
5	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	2	2611557	11813911128
6	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
7	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	11	3720663	11493492728
8	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	125	42.097.286	176.033.168.096
9	Conoco Phillips (Grissik) Ltd.	Corridor	15	2.193.677	6.100.083.943
10	Conoco Phillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	2	374.762	947.188.387
11	Exxon Mobil Indonesia Inc.	Block B	12	10.331.467	36.029.977.761
12	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	11	3.805.010	34.872.916.650
13	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	2	523322	2311117255
14	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	4	1.002.456	1.521.997.115
15	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	15	1.504.467	13.867.595.915
16	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2	329.981	3.157.272.500
17	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	1	96.045	442.817.603
18	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	255	13.653.673	36.903.241.485
19	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	21	13.782.983	60.608.368.588
20	Total E&P Indonesie	Mahakam	131	96.026.008	750.802.929.482
21	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	13	2058840	5877521789
TOTAL ASET			**623**	**196.828.310**	**1.184.222.605.157**

Subsequent Expenditure (Aset KKKS)

Tahun 2013

NO	KKKS	DATA AWAL			Capitalized			Non Capitalized			unverified			Akumulasi Penyusutan Capitalized	Nilai Buku Capitalized
		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)		
1	2	3	4	5											
1	CICo	263	28.194.139	120.452.191.193	244	26.905.686	114.638.066.316	19	1.288.453	5.814.124.876				29.071.528.827	85.566.537.489
2	CML	3	146.166	1.624.895.985	3	146.166	1.624.895.985							356.604.410	1.268.291.575
3	Total Mahakam	1.555	2.869.068.268	19.998.774.266.861	1.548	2.869.827.221	20.012.233.724.490				7	-758953,16	-13459457628	4.216.979.744.270	15.795.253.980.219
4	Total Tengah	3	20.829.854	196.196.396.145	3	20.829.854	196.196.396.145							53.954.008.940	142.242.387.205
5	Vico	133	37.069.898	178.227.862.741	133	37.069.898	178.227.862.741							49.014.170.071	129.213.692.670
6	Energy Epic	2	1.990	10.900.152	2	1.990	10.900.152							10.900.152	-
7	Kangean	88	342.203	3.138.526.334	88	331.622	3.042.693.170							2.523.088.615	519.604.555
8	PHE WMO	27	14.223.847	140.742.033.423	25	14.203.847	140.716.169.395	2	20.000	25.864.028				30.741.000.927	109.975.168.468
9	Lapindo	13	1.862.015	17.055.044.587	13	1.862.015	17.055.044.587							5.660.677.894	11.394.366.693
10	PHE ONWJ	5.036	2.046.606.392	8.586.206.989.619	5.034	2.048.579.145	8.620.901.097.471				2	0	0	2.343.603.356.860	6.277.297.740.611
11	Santos Madura	10	12.199.946	113.459.502.248	10	12.199.946	113.459.502.248							39.710.825.787	73.748.676.461
12	Santos Sampang	1	1.475	16.217.625	1	1.475	16.217.625							9.122.414	7.095.211
13	Kalila Korinci Baru	5	747.131	7.136.577.595	5	747.131	7.136.577.595							1.728.014.481	5.408.563.114
14	COPI (Grissik) Ltd.	209	63.759.728	542.311.928.143	196	63.439.759	540.645.365.576	11	342542	1666562567	2	-22573	0	156.032.553.467	384.612.812.109
15	COPI (South	5	130.870	735.882.869	5	130.870	735.882.869							69.252.740	666.630.129
16	COPI Indonesia	681	1.336.418.730	8.206.056.396.895	636	1.315.642.756	9.101.616.659.707	45	20775974	1,76006E+11	0	0	0	2.817.191.474.899	6.284.425.184.808
17	ExxonMobil	761	144.943.768	599.051.006.339	755	144.826.806	598.844.569.812	6	116961,95	206436527				591.285.679.165	7.558.890.647
18	Mobil Cepu Ltd	3	6.764	41.262.952	3	6.764	41.262.952							21.472.838	19.790.114
19	Mobil Exploration	11	1.213.919	8.191.499.850	11	1.213.919	8.191.499.850							1.668.958.536	6.522.541.314
20	Medco E&P Rimau	9	1.515.128	16.527.649.948	9	1.515.128	16.527.649.948							4.291.871.752	12.235.778.196
21	Pearl Oil (sebuku)	4	6.179	57.124.884	4	6.179	57.124.884							48.408.620	8.716.264
22	JOB Pertamina	86	3.031.300	7.847.750.451	19	1.031.731	4.527.863.925	67	1999569	9731814879				1.225.764.987	3.302.098.938
23	Petrochina	437	41.166.063	145.816.269.059	437	41.166.063	145.816.269.059							30.481.079.503	115.335.189.556
24	JOB Pertamina	4	1.384.838	12.855.330.061	4	1.384.838	12.855.330.061							6.748.685.107	6.106.644.954
25	JOB Pertamina	111	3.772.002	20.828.753.318	85	2.579.709	13.321.984.824	26	1192293	7506768494				4.210.007.976	9.111.976.848
26	Star Energi	6	26.495	27.320.718	6	26.495	27.320.718							11.217.490	16.103.229
27	CNOOC	1.488	582.443.438	1.961.449.898.421	1.457	572.598.968	2.131.573.132.393	30	9840037	40376378255	1	4433	0	281.750.521.967	1.849.822.610.426
28	Premier Oil	162	114.834.929	1.610.055.947.049	162	114.834.929	1.610.055.947.049							256.704.867.703	1.353.351.079.345
29	Citic Seram Ltd.	935	41.668.123	223.138.019.700	932	41.778.072	223.884.838.890				3	-109949	-746819190	56.284.470.644	167.600.368.246
30	Kalrez Petroleum	2	41.155	201.974.467	2	41.155	201.974.467							10.098.723	191.875.744

NO	KKKS	DATA AWAL			Capitalized			Non Capitalized			unverified			Akumulasi Penyusutan Capitalized	Nilai Buku Capitalized
		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)		
1	2	3	4	5											
31	Kondur Petroleum	558	44.034.331	225.539.973.243	558	114.092.707	237.036.704.011				0	0	0	34.928.089.537	202.108.614.474
32	MontD'Or Tungkal	14	243.351	2.374.006.133	13	243.351	2.374.006.133				1			929.861.883	1.444.144.250
33	PetroChina	1.270	148.154.702	1.399.370.950.720	1.270	148.154.702	1.399.423.169.048							581.811.676.314	817.611.492.734
34	Petroselat Ltd.	1	3.790	35.000.650	1	3.790	35.000.650							11.375.211	23.625.439
	Jumlah	**13.896**	**7.560.092.927**	**44.345.555.350.377**	**13.674**	**7.597.424.687**	**45.453.052.704.746**	**206**	**35.575.830**	**241.334.086.870**	**16**	**(887.042)**	**(14.206.276.818)**	**11.599.080.432.709**	**33.853.972.272.037**

Aset KKKS Rusak Berat
Tahun 2013

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB			LHP RB NET TO NERACA			AKUMULASI	NILAI BUKU		LHP RB NET TO CaLK		
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
1	BOB Bumi Siak Pusako	Pekanbaru	979	18.667.081	29.583.750.371	57	628.321	1.370.580.833	370.704.383,75	21.952.834.643,33	999.876.449,58	922	18.038.761	28.213.169.538
2	AED Rombebai	Jakarta	1	977	1.084.954	-	-	-	-		-	1	977	1.084.954
3	BP Tangguh		7	687.823	835.940.459	-	-	-	-		-	7	687.823	835.940.459
4	Camar Resources Canada	Bawean dan Jakarta	26	1.091.276	1.627.215.306	-	-	-	-		-	26	1.091.276	1.627.215.306
5	Chevron Indonesia Company	Jakarta	755	4.156.593	6.038.436.562	8	554.235	816.116.749	34.968.355,18		781.148.394,01	747	3.602.358	5.222.319.812
6		jakarta	11	235.450	343.850.737	11	235.450	343.850.737	132.975.685,16		210.875.052,00	-	-	-
7	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Jakarta	675	2.409.698	3.626.796.689	-	-	-	-		-	675	2.409.698	3.626.796.689
8	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Samarinda	5	3.352.829	17.069.674.977	4	3.094.105	16.674.782.765	4.952.655.707,63		11.722.127.057,38	1	258.724	394.892.212
9	Citic Seram	Eram Non Bula	56	1.004.502	1.413.888.767	-	-	-	-		-	56	1.004.502	1.413.888.767
10	CNOOC	Jakarta	1.164	25.557.144	44.543.717.711	76	17.189.907	33.517.436.001	11.452.965.971,96		22.064.470.029,04	1.088	8.367.237	11.026.281.710
11	ConocoPhilip Grissik	Grissik	26	2.678.951	4.317.686.254	15	478.839	906.974.736	454.910.757,69		452.063.977,89	11	2.200.112	3.410.711.519
12	ConocoPhilip Indonesia Blok B Natuna	Blok B Natuna	1.959	11.276.049	24.324.791.288	364	2.475.992	6.988.388.209	4.839.307.828,45		2.149.080.380,55	1.595	8.800.057	17.336.403.079
13	ConocoPhilip South Jambi	South Jambi	1	1.295	1.663.298	-		-	-		-	1	1.295	1.663.298
14	Energi Equiti Epic Sengkang	Jakarta	69	995.107	1.520.561.964	1	819.043	1.194.497.529	238.899.505,80		955.598.023,20	68	176.064	326.064.435
15	ENI Ambalat	Ambalat	2	4.310	5.255.989	-	-	-	-		-	2	4.310	5.255.989
16	ENI Bukat	Bukat	11	137.432	165.413.966	-	-	-	-		-	11	137.432	165.413.966
17	ENI Krueng Mane	Krueng Mane	46	245.635	299.866.658	-	-	-	-		-	46	245.635	299.866.658
18	Exxon Mobil Indonesia	Aceh dan Jakarta	1.836	96.516.405	147.786.370.455	1.647	95.046.119	145.746.521.412	137.645.242.355,43		8.101.279.056,81	189	1.470.286	2.039.849.042
19	Husky Oil North Sumbawa	Jakarta	2	2.562	24.586.781	-	-	-	-		-	2	2.562	24.586.781
20	Inpex Masela	Jakarta	4	3.835	25.647.537	-	-	-	-		-	4	3.835	25.647.537
21	Irian Petroleum Ecousse	Jakarta	18	23.633	215.740.729	-	-	-	-		-	18	23.633	215.740.729
22	JOB Pertamina Golden Spike		10	1.107.629	10.252.883.251	9	1.107.629	10.252.883.251	2.573.924.049,01		7.678.959.201,99	1	-	-
23	JOB Pertamina Costa Internasional	North Gebang	3	4.404	7.795.000	-	-	-	-		-	3	4.404	7.795.000
24	JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering)	Ogan Komering	313	2.336.403	3.388.078.156	7	352.645	522.057.397	333.352.391,72		188.705.005,28	306	1.983.758	2.866.020.759
25	JOB Pertamina Talisman (Jambi Merang)	Jambi Merang	31	29.093	272.586.687	-	-	-	-		-	31	29.093	272.586.687
26	JOB Pertamina Petrochina East java	Tuban	232	723.431	1.272.693.074	4	3.743	5.184.152	4.614.629,06		569.522,62	228	719.688	1.267.508.922
27	JOB Pertamina Salawati	Salawati	101	3.274.604	13.949.906.189	2	5.031	11.857.618	5.928.809,00		5.928.809,00	99	3.269.573	13.938.048.571
28	Kalrez Petroleum	Bula	524	2.356.035	5.336.633.287	31	414.873	2.741.731.802	1.745.202.259,16		996.529.542,84	493	1.941.162	2.594.901.485
29	Kalila Korinci Baru	Pekanbaru	1	1.145	1.978.000	-	-	-	-		-	1	1.145	1.978.000
30	Kangean Energy Indonesia	Kangean	98	1.682.082	2.039.641.273	7	56.556	359.295.812	314.883.586,49		44.412.225,55	91	1.625.526	1.680.345.461
31	Kondur Petroleum	Kondur	54	308.736	1.470.408.642	27	176.389	1.263.561.029	982.390.039,03		281.170.990,41	27	132.348	206.847.613

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB			LHP RB NET TO NERACA			AKUMULASI	NILAI BUKU		LHP RB NET TO CaLK		
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
32	Lapindo Brantas	Surabaya	20	111.186	182.741.529	-	-	-	-		-	20	111.186	182.741.529
33	PT Medco EP Indonesia	Lirik dan SSE	283	952.462	1.381.652.019	4	15.517	24.806.850	4.382.767,52		20.424.082,48	279	936.945	1.356.845.169
34	PT Medco EP Lematang	Lematang	6	2.336.571	3.506.379.367	6	2.336.571	3.506.379.367	892.073.814,50		2.614.305.552,50	-	-	-
35	PT Medco EP Malaka	Malaka	46	363.366	344.621.000	3	96.240	83.369.000	76.421.583,33		6.947.416,67	43	267.126	261.252.000
36	PT Medco EP Rimau	Rimau	178	3.960.450	7.131.641.551	14	339.392	1.804.431.767	349.762.950,39		1.454.668.816,61	164	3.621.058	5.327.209.784
37	PT Chevron pacific Indonesia (Rokan)	Rokan	9.046	199.048.041	339.964.862.903	7.044	174.229.264	302.813.985.381	119.908.414.719,34		182.905.570.661,95	2.002	24.818.777	37.150.877.521
38	Petrochina Internasional Jabung	Jabung	456	3.674.564	8.007.919.882	23	241.470	821.507.527	522.744.234,27		298.763.292,73	433	3.433.094	7.186.412.355
39	Pearl Oil Sebuku	Jakarta	1	2.275	20.083.700	-	-	-	-		-	1	2.275	20.083.700
40	VICO Indonesia Company	Sanga-sanga	858	58.832.439	111.929.946.792	218	50.118.539	95.465.611.311	54.790.357.426,42	21.952.834.643,33	40.675.253.884,24	640	8.713.900	16.464.335.481
41	RB_Triangle Pase_2010-2011		17	9.876.713	18.410.547.185	4	5.164.812	7.641.378.185	2.780.112.976,67		4.861.265.208,33	13	4.711.901	10.769.169.000
42	RB_Transworld Seruway_2010-2011	Jakarta	1	552	6.008.154	1	552	6.008.154	3.004.076,80	3.004.076,80	3.004.076,80	-	-	-
43	Total E&P Indonesie	Mahakam	312	22.443.423	73.756.730.463	134	18.450.927	67.036.226.699	23.316.629.313,51	43.719.597.385,68	43.719.597.385,68	178	3.992.497	6.720.503.764
44	Star Energi (KAKAP) Ltd.		221	910.478	1.756.675.853	7	50.432	63.281.644	31.640.822,00		31.640.822,00	214	860.046	1.693.394.209
45	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	13	1.741.120	2.631.649.862	13	1.741.120	2.631.649.862	406.892.703,05		2.224.757.158,95	-	-	-
46	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Natuna	89	373.497	276.558.568	-	-	-	-		-	89	373.497	276.558.568
47	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	85	29.940.371	130.715.256.190	-	-	-	-		-	85	29.940.371	130.715.256.190
48	Pertamina Hulu Energy	ONWJ	5	143.308.095	217.176.723.296	1	142.182.519	215.871.204.047	80.951.701.517,63		134.919.502.529,38	4	1.125.576	1.305.519.249
49	PT Pertamina EP		217	6.858.099	40.706.601.783	21	2.293.594	9.987.273.621	1.934.499.865,37		8.052.773.755,52	196	4.564.505	30.719.328.162
50	Mobil Exploration Indonesia Inc.	North Sumatra Offshore	14	37.711.325	57.381.460.538	14	37.711.325	57.381.460.538	11.020.988.109,73		46.360.472.428,44	-	-	-
51	Mobil Cepu Ltd.	Cepu dan Jakarta	37	264.432	438.698.838	37	264.432	438.698.838	229.227.691,50		209.471.146,50	-	-	-
52	PT Medco E&P	Tarakan	39	395.357	878.498.152	14	215.077	539.898.730	300.595.931,91		239.302.798,55	25	180.280	338.599.422
53	Petroselat	Pekanbaru	65	118.537	142.878.748	-	-	-	-		-	65	118.537	142.878.748
54	Petrochina International	Bermuda	619	4.164.023	7.136.416.368	-	-	-	-		-	619	4.164.023	7.136.416.368
TOTAL			**21.648**	**708.259.525**	**1.345.649.097.750**	**9.828**	**558.090.657**	**988.832.891.554**	**463.602.376.818**	**87.628.270.749**	**525.230.514.735**	**11.820**	**150.168.868**	**356.816.206.196**

RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Aset	Saldo Per 31 Desember 2013		Mutasi Semester II 2013		Saldo Per 30 Juni 2013		Mutasi Semester I 2013		Saldo Per 31 Desember 2012	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai rupiah	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2009)	75	419.376.318.000,00	(39)	(198.782.424.000,00)	114	618.158.742.000,00			114	618.158.742.000,00
2	Settlement (Verifikasi 2009)	1	15.756.569.000,00	(22)	(45.545.378.000,00)	23	61.301.947.000,00			23	61.301.947.000,00
3	BJDA (Verifikasi 2011)	271	278.227.861.539,00	(43)	(568.633.778.268,00)	314	846.861.639.807,00			314	846.861.639.807,00
4	Temuan BPK	356	759.976.631.500,00	(537)	(98.648.088.000,00)	893	858.624.719.500,00	(24)	(85.176.908.700)	917	943.801.628.200,00
5	Griya Potensa	2	295.000.000,00	(130)	(23.472.000.000,00)	132	23.767.000.000,00			132	23.767.000.000,00
6	Apartemen Paladian	0	0,00	(143)	(34.069.110.000,00)	143	34.069.110.000,00			143	34.069.110.000,00
7	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00	0	0,00	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
Total		**747**	**1.612.840.780.039,00**	**(914)**	**(969.150.778.268,00)**	**1.661**	**2.581.991.558.307,00**	**(24)**	**(85.176.908.700,00)**	**1.685**	**2.667.168.467.007,00**

Rincian Mutasi Tahun 2013

No.	Uraian	Unit	Nilai
1	**Lelang**	262	631.621.078.268,00
2	**Kesalahan data**	3	
3	**koreksi PKPS 2012**	85	329.504.710.700,00
4	**PKPS 2013**	588	93.201.898.000,00
Total		**938**	**1.054.327.686.968,00**

ASET SAHAM EKS BPPN

a. Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	Jumlah Lembar	Nominal	Nilai Pasar Per 31 Desember 2013	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Per 30 Juni 2013	Nilai per 31 Desember 2012	Bidang Usaha	Keterangan
1	Apac Citra Center	32.137.300	83,00	2.667.395.900,00	28 Februari 2007	2.667.935.900,00	2.667.935.900,00	-	Tidak beroperasi
2	Apac Citra Centertex	37.459.700	83,00	3.109.155.100,00	28 Februari 2007	3.109.155.100,00	3.109.155.100,00	-	Tidak beroperasi
3	Aster Dharma Ind.	40.000	850,00	34.000.000,00	30 Desember 2013	760.000,00	760.000,00	-	Aktif
4	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	46.250	75,00	3.468.750,00	28 Februari 2007	3.468.750,00	3.468.750,00	-	Tidak beroperasi
5	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	363	75,00	27.225,00	28 Februari 2007	27.225,00	27.225,00	-	Tidak beroperasi
6	Bank Ficorinvest	400	50,00	20.000,00	28 Februari 2007	20.000,00	20.000,00	-	Tidak beroperasi
7	Bank PDFCI	250	350,00	87.500,00	28 April 2006	87.500,00	87.500,00	-	Tidak beroperasi
8	Bank Surya	800	300,00	240.000,00	29 September 2006	240.000,00	240.000,00	-	Tidak beroperasi
9	Citatah Industri M	11.304.425	64,00	723.483.200,00	30 Desember 2013	836.572.450,00	836.572.450,00	-	Aktif
10	Citatah Industri M	41.421.439	64,00	2.650.972.096,00	30 Desember 2013	3.065.186.486,00	3.065.186.486,00	-	Aktif
11	Gajah Tunggal	200	540,00	108.000,00	28 Februari 2007	108.000,00	108.000,00	-	Tidak beroperasi
12	Holcim Indonesia Tbk, Pt	13.898.500	1.750,00	24.322.375.000,00	28 Desember 2007	24.322.375.000,00	24.322.375.000,00	-	Tidak beroperasi
13	Langgeng Makmur	57.901.002	215,00	12.448.715.430,00	30 Desember 2013	17.659.805.610,00	17.659.805.610,00	-	Aktif
14	Lippo E-Net	100	140,00	14.000,00	28 Februari 2007	14.000,00	14.000,00	-	Tidak beroperasi
15	Merck, Tbk.	100	40.000,00	4.000.000,00	30 Nopember 2006	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Tidak beroperasi
16	Mulia Industrindo	50.000.000	185,00	9.250.000.000,00	29 September 2006	9.250.000.000,00	9.250.000.000,00	-	Tidak beroperasi
17	Multi Sarana R. Agung	94.600	675,00	63.855.000,00	30 Nopember 2006	63.855.000,00	63.855.000,00	-	Tidak beroperasi
18	Perdana Inti Investama	49.251.500	50,00	2.462.575.000,00	28 Februari 2007	2.462.575.000,00	2.462.575.000,00	-	Tidak beroperasi
19	Prima Alloy Steel	2.500	75,00	187.500,00	30 Nopember 2006	187.500,00	187.500,00	-	Tidak beroperasi
20	PT Sierad Produce	19.188.650	50,00	959.432.500,00	30 Desember 2013	1.535.092.000,00	1.535.092.000,00	-	Aktif
21	Sucaco	700	1.450,00	1.015.000,00	28 Desember 2007	1.015.000,00	1.015.000,00	-	Tidak beroperasi
22	Sucaco	348.000	5.700,00	1.531.200.000,00	30 Desember 2013	783.000.000,00	783.000.000,00	-	Aktif
23	Trias Sentosa	100	174,00	17.400,00	28 Desember 2007	17.400,00	17.400,00	-	Tidak beroperasi
24	Unit Link Reksadana Perdana	80.000.000	280,00	22.400.000.000,00	28 Februari 2007	22.404.107.500,00	22.404.107.500,00	-	Tidak beroperasi
Total				**82.632.344.601,00**		**88.169.605.421,00**	**88.169.605.421,00**		

b. Aset Saham Yang Dikelola Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	Persentase	Jumlah	Modal Saham Disetor	Nilai per 31 Desember	Nilai Per 30 Juni 2013	Bidang Usaha
1	PT Karabha Digdaya	100,00%	10.000	418.734.567.643,00	418.734.567.643,00	418.734.567.643,00	Real Estate dan Pengelolaan
2	PT Aqua Golden Misisipi	0,0024%	312	312.000,00	312.000,00	312.000,00	Makanan dan Minuman
3	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	13.87%	57	1.425.000.000	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	Real Estate dan Pengelolaan
4	PT Kabelindo Murni	-	1	20.389.779.189,00	20.389.779.189,00	20.389.779.189,00	Manufaktur Kabel dan Kawat
Total				**440.549.658.832,00**	**440.549.658.832,00**	**440.549.658.832,00**	
Total (a+b)				**523.182.003.433,00**	**528.719.264.253,00**	**528.719.264.253,00**	

ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(dalam Rp)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)	31 Desember 2013 (*Audited*)
			BRUTO	BRUTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.209.200	36.844.200
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	15.228.714.853	26.772.590.656
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.338.874.674	20.742.811.168
4	005	MAHKAMAH AGUNG	41.126.463.784	39.304.602.239
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	19.551.118.151	15.752.248.289
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	241.317.195.616	1.966.644.881.972
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	72.723.315.760	
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	441.332.676.618	98.118.807.399
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.135.505.015	139.199.578.914
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2.820.584.318.295	3.723.067.557.798
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	84.276.630.562	64.318.557.468
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	467.500.264.865	379.512.337.729
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	2.559.644.240	38.742.000
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	180.626.064.463	290.804.071.696
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	562.587.647	47.481.765
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	5.589.449.504	13.929.819.697
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	759.873.853	197.304.192
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.340.159.086.004	1.345.105.299.094
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.000.823.341.710	2.142.196.518.442
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.143.062.801	1.009.825.900
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.003.335.863.051	14.137.027.496.322
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.607.671.120	46.404.100.710
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.514.979.295.795	9.072.903.497.017
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	77.814.274.970	66.109.501.512
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	64.367.249.603	66.651.129.597
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	15.564.290.323	10.704.019.400
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	295.651.222.071	3.057.318.419.569
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		139.136.000
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	15.199.260.895	23.593.457.063
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	63.355.151.573	52.646.176.261
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	123.876.306.353	98.751.209.153
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	901.194.840.686	590.641.764.292
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.230.755.000	2.335.627.675
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1.345.801.570	
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	193.627.750	1.411.426.095
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	43.617.576.757	8.794.108.241
37	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.842.411.785	5.451.789.510
38	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	33.881.210.070	34.313.194.790
39	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	12.876.731.996	5.174.866.915
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	55.486.434.048	59.008.181.711
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	25.909.000	25.909.000
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.382.915.737	1.018.447.308
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	903.738.680	373.688.861
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.338.264.326	482.212.000
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	78.627.892.000	113.458.224.100
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	26.689.214.280	33.486.652.486
47	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	61.697.684.029	61.828.874.529
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	52.357.384.787	41.457.371.204
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	117.697.969.796	709.713.110
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	293.145.769.129	284.410.074.101
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.937.849.000	12.937.849.000
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	327.778.053.293	252.189.434.163
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.984.033.215	
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	11.936.346.714	6.947.984.321
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	941.030.000	1.538.519.680
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	76.615.089	76.615.072

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2013 (*Audited*)	31 Desember 2013 (*Audited*)
			BRUTO	BRUTO
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	44.330.461.139	58.860.698.533
58	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	18.575.893.216	17.907.541.150
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.354.214.272	7.747.216.065
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	128.280.250	
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	32.140.615.493	18.975.675.618
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	30.257.621.624	23.724.944.099
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.157.558.867	3.565.519.467
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	127.142.620	831.293.429
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	4.826.133.058	11.512.513.177
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.607.820.106	11.354.168.104
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	84.349.141.368	9.335.606.268
68	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	7.259.368.324	4.448.910.924
69	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	15.692.402.961	7.939.828.321
70	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL		681.042.662
71	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	337.502.399	253.498.257
72	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	472.749.438	371.030.000
73	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.926.534.965	1.667.951.716
74	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	287.444.199	287.444.199
75	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.069.116.780	3.402.454.643
76	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.741.610.085	2.941.957.890
77	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	100.240.988.745	232.827.451.844
78	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	100.208.050.965	539.318.215.316
79	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	155.779.804.699	163.326.368.442
80	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	604.024.396	1.161.224.396
81	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS		516.936.124.188
82	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	24.903.450	97.378.500
83	100	KOMISI YUDISIAL		302.408.735
84	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.155.407.470.502	511.741.762.685
85	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	5.094.913.930	392.815.650
86	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	722.070.884	410.354.480
87	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		66.473.000
88	107	BADAN SAR NASIONAL	79.916.956.540	62.062.835.853
89	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA		324.193.843
90	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	579.829.504	
91	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	45.392.139.987	51.360.154.112
92	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	107.112.144.102	12.422.072.015
93	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.110.076.293	2.877.832.400
94	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	13.234.602.981	42.346.855.319
95	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	21.720.308.915.133	19.719.281.153.339
96	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	47.686.685.456.304	43.080.717.197.935
TOTAL			**98.608.345.001.685**	**103.540.902.717.961**

ASET SAHAM YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA

No	Emiten	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2013 (unaudited)	Harga Realisasi Penjualan	Nilai Per 30 Juni 2013		Nilai Per 31 Desember 2012 (audited)		31-Des-11		Keterangan
					Jml	Nilai	Jml lembar saham	Nilai	Jml	Nilai	
1	PT Bank Panin	0,0054%	-	343.478.819	-	-	396.528	287.482.800	1	490.505.136,00	Telah Dijual
2	PT Bank Permata	0,22%	-	31.470.711.177	-	-	19.994.027	24.672.629.000	1	35.949.260.546,00	Telah Dijual
3	PT Sejahtera Eka Graha	96,53%	22.470.000.000	-	1	22.470.000.000	278.000	22.470.000.000	1	22.470.000.000,00	Aktif
4	PT Tugu Reasuransi Indonesia	25,04%	-	52.000.000.000	-	-	19.994.027	34.680.531.082	1	28.415.673.000,00	Telah Dijual
5	PT Asia Natural Resources	0,97%	1.210.357.500	-	1	1.210.357.500	22.006.500	1.210.357.500	1	1.210.357.500,00	Aktif
6	PT Jemblo Cable Company	0,43%	431.315.500	-	1	431.315.500	654.500	431.315.500	1	406.746.000,00	Aktif
7	PT Bina Prima Perdana	100,00%	-	-	1	-	-	-		-	Aktif
8	PT Tuban Petrochemical	100,00%	8.750.000	-	1	8.750.000	-	8.750.000		-	Aktif
Jumlah			**24.120.423.000**	**83.814.189.996**	**5**	**24.120.423.000,00**		**83.761.065.882**	**4**	**52.502.776.500,00**	

SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Aset	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2013	Nilai Aset Per 31 Desember 2012
1.	Dharmala Intiutama	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00
2.	Ometraco Multi Artha	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00
3.	Ongko Intl Fin	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00
4.	Ongko Intl Fin CO BV	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00
5.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00
6.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00
Total			**16.657.242.209,00**	**16.657.242.209,00**

SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2013 (unaudited)	Nilai per 31 Desember 2012 (*Audited*)	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	n/a	223.500,00	223.500,00	N/A
2	PT Bunas Multifinance	15,00%	75.000.000,00	75.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006
3	PT Danaloka Pratama	14,29%	141.550.000,00	141.550.000,00	N/A
4	PT Pama Indonesia Ltd	15,00%	28.310.000,00	28.310.000,00	N/A
5	PT Pama Ventura Indonesia	20,00%	234.871,00	234.871,00	N/A
6	PT Servitia Finance	99,00%	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Dicabut ijin usahanya Tahun 2006
7	PT Aplikanusa Lintasarta	n/a	125.015.692,00	125.015.692,00	N/A
8	PT Bhakti Sarana Ventura	5,43%	385.154.000,00	385.154.000,00	N/A
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	-	-	Likuidasi Tahun 2012
10	PT Sarana Jambi Ventura	2,28%	124.823.000,00	124.823.000,00	Aktif
11	PT Sarana Kalbar Ventura	3,67%	498.260.000,00	193.544.000,00	Aktif
12	PT Sarana Kalsel Ventura	1,04%	357.365.166,00	77.950.000,00	Aktif
13	PT Sarana Maluku Ventura	1,41%	31.286.000,00	31.286.000,00	Aktif
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	21,07%	30.162.644.152,00	8.819.163.000,00	Aktif
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	1,23%	1,00	1,00	Aktif
16	PT Asuransi Putra Mandiri	25,71%	335.020.000,00	335.020.000,00	N/A
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	13,30%	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	N/A
18	PT Sarana Sulut Ventura	1,44%	61.000.000,00	61.000.000,00	Aktif
19	PT Sarana Sumbar Ventura	3,84%	861.465.000,00	275.625.000,00	Aktif
20	PT Sarana Irian Ventura	1,41%	66.150.000,00	66.150.000,00	Aktif
21	PT SMBC Indonesia Finance	15,00%	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2010
Total			**44.503.501.382,00**	**21.990.049.064,00**	

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	105.070.150	126.831.868	25.515.000	86.751.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	36.271.895.529	1.122.258.712	930.999.168	773.655.004
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	38.221.722.471	35.331.449.393	290.270.212	169.368.266
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12.988.801.114	269.099.975.148	468.382.966	309.260.111
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	52.252.185.216	11.986.441.141	103.246.394	214.061.690
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	78.374.884.895	93.904.514.134	1.113.315.648	50.627.476
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	33.716.859.581	49.497.775.823	953.225.856	1.419.063.688
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	28.588.414.737	6.873.378.890		134.087.731
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10.877.779.430.111	5.546.502.560.030		
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	53.078.687.737	53.795.140.417	63.865.505.500	
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	72.908.198.523	39.060.216.445	31.151.192.876	4.367.814.771
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17.508.121.641	171.647.290.347	239.816.722	659.365.245
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	5.616.798.897	963.336.597	2.301.751.756	6.040.207.934
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.389.263.340	2.427.083.259	350.259.116	99.884.602
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	427.063.813.222	103.357.423.491	22.241.989.715	19.802.839.526
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.884.315.468.239	955.716.455.141	636.112.629.193	434.691.143.607
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.451.060.960.415	1.004.941.446.608	56.280.204.888	24.893.173.943
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.610.743.507.023	1.891.674.557.774	10.859.197.990	9.214.660.077
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.227.305.437	687.757.769	487.387.135	246.512.196
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	9.215.171.063	757.165.652		
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	87.559.297.906	7.378.565.495		
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	81.959.123.499	41.862.991.794	319.144.315	281.560.000
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	356.692.821.371	10.189.555.693	410.733.917	186.931.450
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	61.013.918	141.022.199	70.833.333	90.833.333
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	123.895.338	42.169.490		
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.857.849.339	70.869.061		
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	12.673.706.153	12.924.138.691	443.250.000	138.000.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	171.451.800		2.138.458.893	311.838.667
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.029.302.948	5.116.828.459	262.878.585	205.645.344
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	21.026.734.835	879.908.257	6.000.000	76.600.000
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.693.252.298	3.095.961.959	9.258.873.219	10.474.672.148
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.240.900.878	2.850.090.666		
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	91.186.848	154.497.108		
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA		2.003.361.402		
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA		516.892.448		
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.681.671.962	3.721.781.542	43.733.333	
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	7.394.960.781	35.485.301		
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.857.861.735	11.423.683.792	4.088.741.150	29.432.450.447
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	42.775.800		25.500.000	
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	62.258.200.224	4.447.078.101	7.429.642.965.800	6.168.415.488.349
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	166.861.043.184	268.652.578.034	128.270.765.624	4.702.701.056
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	8.581.122.450	69.558.806.730	38.101.690.000	14.666.560
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		2.684.794.099		
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	374.898.593	307.258.671	232.311.688	610.863.660
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	538.065.660	56.109.259.090		
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	3.165.155.360	14.057.177.400		
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	738.923.724	144.198.073	423.040.333	
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	441.299.617	134.900.972		
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	67.289.194.425	2.004.752.106		
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	702.985.554	557.722.122		
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	435.243.587	377.155.405		
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		14.983.078	3.118.862	10.604.141
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.616.742.972	10.431.755.820	54.283.937	6.914.271
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2.834.302.668	11.933.130.260	167.428.584	203.388.250
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.512.661.448	8.310.180.650		196.250.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	779.231.555	594.569.452	3.967.792	3.967.792
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4.938.545.859	11.987.625	61.009.714	720.066.192
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	245.587.136	418.622.600		
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.624.822.408	1.362.287.357	602.150.000	728.950.000
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.023.912.700	2.020.211.749		
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.083.875.398	850.735.555	21.139.334	86.451.000
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.152.129.176	1.076.608.864	159.400.976	439.178.505
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	25.847.671.544	173.988.345	207.709.951	355.750.739
65	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT		977.776.254.227		
66	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.051.845.000	540.792.328	35.200.000	142.450.000
67	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	5.535.057.237	3.171.908.147		

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*	31 Desember 2013 *Audited*	31 Desember 2012 *Audited*
68	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	414.088.383	337.347.888		
69	100	KOMISI YUDISIAL	16.161.480	11.203.459	72.900.667	
70	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.638.806.099	1.476.602.706		
71	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	414.078.288	543.924.482	203.816.495	411.837.430
72	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	31.723.728	39.357.679		
73	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	396.000.000	130.961.136		
74	107	BADAN SAR NASIONAL	502.119.504	2.458.823.721	261.319.667	247.553.000
75	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	23.121.289	233.049.151		
76	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA		105.900.646		
77	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	121.100.000	28.545.197		
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	487.231.350.813	497.250.059.265		
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME		25.465.390		
80	114	SEKRETARIAT KABINET	3.266.883.940	664.661.283		
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	66.799.851.017	48.765.000		
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	110.642.930	7.549.030.897		
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	66.463.957.603	101.271.821.106	10.939.344.577	
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	11.122.157.614			
85	999.05	TRANSFER KE DAERAH	24.619.657.177.709	16.039.742.327.165		
86	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	49.746.677.557	186.675.433.374		
87	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	6.290.662.724.766			
88	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	1.120.325.736.883	1.119.941.138.161		
TOTAL			**55.380.161.243.832**	**29.738.138.976.562**	**8.454.306.600.881**	**6.721.668.089.201**

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**707.391.203.000.000**		**15.418.502.075.720**
1	FR0026	15/10/2014	13.029.479.000.000	11,00000%	307.117.849.509
2	FR0027	15/06/2015	19.154.000.000.000	9,50000%	84.986.298.000
3	FR0028	15/07/2017	13.963.744.000.000	10,00000%	645.069.117.824
4	FR0030	15/05/2016	10.431.000.000.000	10,75000%	145.585.467.000
5	FR0031	15/11/2020	17.890.000.000.000	11,00000%	255.504.980.000
6	FR0032	15/07/2018	978.492.000.000	15,00000%	67.802.646.156
7	FR0034	15/06/2021	16.286.400.000.000	12,80000%	97.360.099.200
8	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.418.093.750
9	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	368.324.269.500
10	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
11	FR0038	15/08/2018	2.704.862.000.000	11,60000%	118.513.528.530
12	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
13	FR0040	15/09/2025	26.002.090.000.000	11,00000%	853.336.589.620
14	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
15	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
16	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	537.429.676.000
17	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
18	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
19	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	787.168.480.000
20	FR0048	15/09/2018	5.468.570.000.000	9,00000%	146.836.573.070
21	FR0050	15/07/2038	15.661.000.000.000	10,50000%	759.636.805.000
22	FR0051	15/05/2014	2.279.123.000.000	11,25000%	33.288.870.538
23	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
24	FR0053	15/07/2021	19.083.793.000.000	8,25000%	727.302.435.023
25	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	1.189.135.056.000
26	FR0055	15/09/2016	14.229.300.000.000	7,37500%	313.087.287.900
27	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	428.859.704.000
28	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	167.125.700.000
29	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	164.900.694.000
30	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	242.013.440.000
31	FR0060	15/04/2017	11.255.000.000.000	6,25000%	150.738.215.000
32	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	269.913.600.000
33	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	163.932.000.000
34	FR0063	15/05/2023	33.516.000.000.000	5,62500%	244.767.348.000
35	FR0064	15/05/2028	29.895.000.000.000	6,12500%	237.725.040.000
36	FR0065	15/05/2033	47.850.000.000.000	6,62500%	411.605.700.000
37	FR0066	15/05/2018	19.041.000.000.000	5,25000%	129.783.456.000
38	FR0067	15/02/2044	3.750.000.000.000	8,75000%	123.937.500.000
39	FR0068	15/03/2034	16.300.000.000.000	8,37500%	407.271.800.000
40	FR0069	15/04/2019	10.450.000.000.000	7,87500%	176.343.750.000
41	FR0070	15/03/2024	26.150.000.000.000	8,37500%	653.383.900.000
42	FR0071	15/03/2029	19.900.000.000.000	9,00000%	534.334.900.000
ORI			**43.882.000.000.000**		**151.377.994.140**

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
1	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	36.696.000.000
2	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	36.204.783.720
3	ORI010	15/10/2016	20.205.255.000.000	8,50000%	78.477.210.420
VARIABLE RATE BOND			**122.754.933.000.000**		**765.632.174.544**
1	VR0019	25/12/2014	9.411.226.000.000	5,54250%	10.145.301.628
2	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	5,15750%	87.332.986.710
3	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	5,87542%	43.926.389.496
4	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	5,54250%	9.720.055.422
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	5,15750%	82.454.093.680
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	5,87542%	58.534.235.100
7	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	5,54250%	3.459.625.400
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	5,15750%	51.863.613.260
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	5,15750%	51.863.613.260
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	5,87542%	41.549.802.558
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	5,87542%	72.138.174.240
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	5,54250%	11.322.250.170
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	5,15750%	241.322.033.620
SU DAN SRBI			**234.869.538.205.703**		**79.692.411.446**
1	SU002	01/04/2025	17.301.016.878.917	0,10000%	4.360.804.254
2	SU004	01/12/2025	46.959.389.978.801	0,10000%	4.245.643.478
3	SU007	01/08/2025	44.879.533.762.779	0,10000%	18.812.516.892
4	SRBI01	01/08/2043	125.729.597.585.206	0,10000%	52.273.446.822
SBSN			**110.073.790.000.000**		**1.304.713.380.110**
1	IFR001	15/08/2015	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.635.304.000
4	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	48.685.496.000
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.511.500.000
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	73.251.997.000
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.616.008.000
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	155.242.920.000
9	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	12.993.105.000
10	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	461.664.000
11	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	9.584.000.000
12	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	26.586.000.000
13	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	560.000.000
14	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	676.000.000
15	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	3.052.000.000
16	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	815.000.000
17	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	4.845.000.000
18	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	1.167.000.000
19	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	667.000.000
20	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	9.032.000.000
21	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	8.661.000.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
22	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	5.841.816.000
23	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	14.477.260.520
24	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	25.158.311.640
25	SR-005	27/02/2016	14.968.875.000.000	6,00000%	12.064.913.250
26	PBS001	15/02/2018	6.725.000.000.000	4,45000%	113.033.800.000
27	PBS002	15/01/2022	1.218.000.000.000	5,45000%	30.665.586.000
28	PBS003	15/01/2027	2.932.000.000.000	6,00000%	81.266.244.000
29	PBS004	15/02/2037	10.149.000.000.000	6,10000%	233.843.109.000
30	PBS005	15/04/2043	4.679.000.000.000	6,75000%	67.677.056.000
31	PBS006	15/09/2020	327.000.000.000	8,25000%	8.048.451.000
INTERNATIONAL BOND			**399.400.160.000.000**		**7.235.193.242.237**
1	RI0014	10/03/2014	15.845.700.000.000	6,75000%	329.788.631.250
2	RI0015	20/04/2015	12.189.000.000.000	7,25000%	174.285.770.820
3	RI0016	15/01/2016	10.970.100.000.000	7,50000%	379.382.625.000
4	RI0017	09/03/2017	12.189.000.000.000	6,87500%	260.709.166.680
5	RI0018	17/01/2018	23.159.100.000.000	6,87500%	725.330.145.779
6	RI0035	12/10/2035	19.502.400.000.000	8,50000%	363.773.933.402
7	RI0037	17/02/2037	18.283.500.000.000	6,62500%	450.866.031.209
8	RI0038	17/01/2038	24.378.000.000.000	7,75000%	860.678.833.442
9	RI00140504	04/05/2014	12.189.000.000.000	10,37500%	200.229.718.709
10	RI00190304	04/03/2019	24.378.000.000.000	11,62500%	921.031.312.500
11	RI0320	13/03/2010	24.378.000.000.000	5,87500%	429.662.250.000
12	RI0521	05/05/2021	30.472.500.000.000	4,87500%	231.083.124.959
13	RI0142	17/01/2042	27.425.250.000.000	5,25000%	655.920.562.500
14	RI0422	25/04/2022	24.378.000.000.000	3,75000%	167.598.750.000
15	RI0423	15/04/2023	18.283.500.000.000	3,37500%	130.269.937.500
16	RI0443	15/04/2043	18.283.500.000.000	4,62500%	178.518.062.459
17	RI1023	17/10/2023	12.189.000.000.000	5,37500%	134.671.520.820
18	USDFR	15/05/2017	2.315.910.000.000	3,50000%	10.514.231.400
19	SNI14	23/04/2014	7.922.850.000.000	8,80000%	131.695.373.279
20	SNI-18	21/11/2018	12.189.000.000.000	4,00000%	54.173.333.279
21	SNI22	21/11/2022	12.189.000.000.000	3,30000%	44.693.000.041
22	SNI19	15/03/2019	18.283.500.000.000	6,12500%	329.737.843.709
23	RIJPY0719	29/07/2019	4.065.950.000.000	2,73000%	46.866.850.295
24	RIJPY1120	12/11/2020	6.970.200.000.000	1,60000%	15.179.546.705
25	RIJPY1122	22/11/2022	6.970.200.000.000	1,13000%	8.532.686.500
TOTAL			**1.618.371.624.205.700**		**24.955.111.278.197**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp116.17

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp12.189

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
A. BAGIAN LANCAR SUN JANGKA PANJANG						
FIXED RATE BOND			**15.308.602.000.000**		**(49.526.863.000)**	**15.259.075.137.000**
1	FR0051	15-May-14	2.279.123.000.000	11,25000%	(6.124.192.000)	2.272.998.808.000
2	FR0026	15-Oct-14	13.029.479.000.000	11,00000%	(43.402.671.000)	12.986.076.329.000
ORI			**11.000.000.000.000**		-	**11.000.000.000.000**
1	ORI008	15-Oct-14	11.000.000.000.000	7,30000%	-	11.000.000.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**5.815.606.883.492**		-	**5.815.606.883.492**
1	SU002	1-Apr-14	417.591.563.444	0,10000%	-	417.591.563.444
2	SU002	1-Oct-14	438.471.141.617	0,10000%	-	438.471.141.617
3	SU004	30-May-14	1.055.219.791.620	0,10000%	-	1.055.219.791.620
4	SU004	1-Dec-14	1.107.980.781.201	0,10000%	-	1.107.980.781.201
5	SU007	30-Jan-14	1.008.483.549.010	0,10000%	-	1.008.483.549.010
6	SU007	25-Jul-14	1.058.907.726.461	0,10000%	-	1.058.907.726.461
7	SRBI-01	1-Feb-14	355.586.502.507	0,10000%	-	355.586.502.507
8	SRBI-01	1-Aug-14	373.365.827.632	0,10000%	-	373.365.827.632
VARIABLE RATE BOND			**9.411.226.000.000**		-	**9.411.226.000.000**
1	VR0019	25-Dec-14	9.411.226.000.000	14,11000%	-	9.411.226.000.000
JUMLAH BAGIAN LANCAR SUN JANGKA PANJANG			**41.535.434.883.492**		**(49.526.863.000)**	**41.485.908.020.492**
B. SUN JANGKA PENDEK						
SPN			**34.050.000.000.000**		**(899.286.491.000)**	**33.150.713.509.000**
1	SPN03140109	9-Jan-14	1.000.000.000.000	-	(1.281.768.000)	998.718.232.000
2	SPN12140116	16-Jan-14	2.000.000.000.000	-	(3.640.027.000)	1.996.359.973.000
3	SPN03140207	7-Feb-14	1.000.000.000.000	-	(5.504.592.000)	994.495.408.000
4	SPN12140217	17-Feb-14	2.000.000.000.000	-	(10.564.228.000)	1.989.435.772.000
5	SPN12140314	14-Mar-14	2.000.000.000.000	-	(15.737.968.000)	1.984.262.032.000
6	SPN12140410	10-Apr-14	2.000.000.000.000	-	(21.801.561.000)	1.978.198.439.000
7	SPN12140507	7-May-14	2.350.000.000.000	-	(32.550.001.000)	2.317.449.999.000
8	SPN12140604	4-Jun-14	650.000.000.000	-	(13.341.451.000)	636.658.549.000
9	SPN12140703	3-Jul-14	9.350.000.000.000	-	(300.396.977.000)	9.049.603.023.000
10	SPN-12140731	31-Jul-14	4.550.000.000.000	-	(171.193.229.000)	4.378.806.771.000
11	SPN12140911	11-Sep-14	4.000.000.000.000	-	(176.491.187.000)	3.823.508.813.000
12	SPN12141009	9-Oct-14	2.000.000.000.000	-	(87.524.235.000)	1.912.475.765.000
13	SPN12141107	7-Nov-14	1.150.000.000.000	-	(59.259.267.000)	1.090.740.733.000
JUMLAH SUN JANGKA PENDEK (b)			**34.050.000.000.000**		**(899.286.491.000)**	**33.150.713.509.000**
C. BAGIAN LANCAR SURAT BERHARGA SYARIAH						
SBSN			**7.341.410.000.000**		-	**7.341.410.000.000**
1	SR003	23-Feb-14	7.341.410.000.000	8,1500%	-	7.341.410.000.000
SDHI			**11.191.000.000.000**		-	**11.191.000.000.000**
1	SDHI 2014D	11-Feb-14	6.000.000.000.000	7,8500%	-	6.000.000.000.000
2	SDHI 2014A	9-Aug-14	2.855.000.000.000	7,3600%	-	2.855.000.000.000
3	SDHI 2014B	25-Aug-14	336.000.000.000	7,3000%	-	336.000.000.000
4	SDHI 2014C	7-Oct-14	2.000.000.000.000	7,1300%	-	2.000.000.000.000
JUMLAH BAGIAN LANCAR SBSN (c)			**18.532.410.000.000**		-	**18.532.410.000.000**
D. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA JANGKA PENDEK						
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH			**8.633.000.000.000**		**(61.527.553.000)**	**8.571.472.447.000**
1	SPN-S 10012014	10-Jan-14	395.000.000.000	-	(704.425.000)	394.295.575.000
2	SPN-S 24012014	24-Jan-14	5.235.000.000.000	-	(22.454.632.000)	5.212.545.368.000
3	SPN-S 21022014	21-Feb-14	900.000.000.000		(8.371.574.000)	891.628.426.000
4	SPN-S 04032014	4-Mar-14	700.000.000.000	-	(7.854.455.000)	692.145.545.000
5	SPN-S 18032014	18-Mar-14	748.000.000.000	-	(9.580.354.000)	738.419.646.000
6	SPN-S 02042014	2-Apr-14	400.000.000.000	-	(6.082.255.000)	393.917.745.000
7	SPN-S 27052014	7-May-14	255.000.000.000	-	(6.479.858.000)	248.520.142.000
JUMLAH SBSN JANGKA PENDEK (d)			**8.633.000.000.000**		**(69.899.127.000)**	**8.571.472.447.000**
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			**102.750.844.883.492**		**(1.018.712.481.000)**	**101.740.503.976.492**

BAGIAN LANCAR SURAT BERHARGA NEGARA DALAM VALAS
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SUN VALAS (USD)			**Rp23.355.165.221.750**		**(Rp4.679.534.778.250)**	**Rp28.034.700.000.000**	**-Rp5.278.018.000**	**Rp28.029.421.982.000**
1	RI0014	10-Mar-14	Rp11.330.165.221.750	6,75000%	-Rp4.515.534.778.250	Rp15.845.700.000.000	(971.449.000)	15.844.728.551.000
2	RI 140504	4-May-14	Rp12.025.000.000.000	10,37500%	-Rp164.000.000.000	Rp12.189.000.000.000	(4.306.569.000)	12.184.693.431.000
SBSN VALAS (USD)			**Rp7.031.748.227.903**		**-Rp891.101.772.097**	**Rp7.922.850.000.000**	**Rp0**	**Rp7.922.850.000.000**
3	SNI14	23-Apr-14	Rp7.031.748.227.903	8,80000%	-Rp891.101.772.097	Rp7.922.850.000.000	-	7.922.850.000.000
TOTAL			**Rp30.386.913.449.653**		**-Rp5.570.636.550.347**	**Rp35.957.550.000.000**	**-Rp5.278.018.000**	**Rp35.952.271.982.000**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp116,17

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp12.189

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SPN			**34.050.000.000.000**		**(899.286.491.000)**	**33.150.713.509.000**
1	SPN03140109	9-Jan-14	1.000.000.000.000	-	(1.281.768.000)	998.718.232.000
2	SPN12140116	16-Jan-14	2.000.000.000.000	-	(3.640.027.000)	1.996.359.973.000
3	SPN03140207	7-Feb-14	1.000.000.000.000	-	(5.504.592.000)	994.495.408.000
4	SPN12140217	17-Feb-14	2.000.000.000.000	-	(10.564.228.000)	1.989.435.772.000
5	SPN12140314	14-Mar-14	2.000.000.000.000	-	(15.737.968.000)	1.984.262.032.000
6	SPN12140410	10-Apr-14	2.000.000.000.000	-	(21.801.561.000)	1.978.198.439.000
7	SPN12140507	7-May-14	2.350.000.000.000	-	(32.550.001.000)	2.317.449.999.000
8	SPN12140604	4-Jun-14	650.000.000.000	-	(13.341.451.000)	636.658.549.000
9	SPN12140703	3-Jul-14	9.350.000.000.000	-	(300.396.977.000)	9.049.603.023.000
10	SPN-12140731	31-Jul-14	4.550.000.000.000	-	(171.193.229.000)	4.378.806.771.000
11	SPN12140911	11-Sep-14	4.000.000.000.000	-	(176.491.187.000)	3.823.508.813.000
12	SPN12141009	9-Oct-14	2.000.000.000.000	-	(87.524.235.000)	1.912.475.765.000
13	SPN12141107	7-Nov-14	1.150.000.000.000	-	(59.259.267.000)	1.090.740.733.000
JUMLAH SUN JANGKA PENDEK			**34.050.000.000.000**		**(899.286.491.000)**	**33.150.713.509.000**
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA JANGKA PENDEK						
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYAI			**8.633.000.000.000**		**(61.527.553.000)**	**8.571.472.447.000**
1	SPN-S 10012014	10-Jan-14	395.000.000.000	-	(704.425.000)	394.295.575.000
2	SPN-S 24012014	24-Jan-14	5.235.000.000.000	-	(22.454.632.000)	5.212.545.368.000
3	SPN-S 21022014	21-Feb-14	900.000.000.000		(8.371.574.000)	891.628.426.000
4	SPN-S 04032014	4-Mar-14	700.000.000.000	-	(7.854.455.000)	692.145.545.000
5	SPN-S 18032014	18-Mar-14	748.000.000.000	-	(9.580.354.000)	738.419.646.000
6	SPN-S 02042014	2-Apr-14	400.000.000.000	-	(6.082.255.000)	393.917.745.000
7	SPN-S 27052014	7-May-14	255.000.000.000	-	(6.479.858.000)	248.520.142.000
JUMLAH SBSN JANGKA PENDEK (d)			**8.633.000.000.000**		**(69.899.127.000)**	**8.571.472.447.000**
						41.722.185.956.000

SURAT BERHARGA NEGARA JANGKA PANJANG RUPIAH
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
A. SUN JANGKA PANJANG						
FIXED RATE BOND			**692.082.601.000.000**		**3.908.833.189.000**	**695.991.434.189.000**
1	FR0027	15/06/2015	19.154.000.000.000	9,50000%	30.550.043.000	19.184.550.043.000
2	FR0028	15/07/2017	13.963.744.000.000	10,00000%	174.896.165.000	14.138.640.165.000
3	FR0030	15/05/2016	10.431.000.000.000	10,75000%	(89.893.735.000)	10.341.106.265.000
4	FR0031	15/11/2020	17.890.000.000.000	11,00000%	(298.153.971.000)	17.591.846.029.000
5	FR0032	15/07/2018	978.492.000.000	15,00000%	(18.043.006.000)	960.448.994.000
6	FR0034	15/06/2021	16.286.400.000.000	12,80000%	156.448.864.000	16.442.848.864.000
7	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	(18.006.721.000)	11.005.743.279.000
8	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	(2.930.157.000)	10.732.569.843.000
9	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(100.154.533.000)	2.349.845.467.000
10	FR0038	15/08/2018	2.704.862.000.000	11,60000%	(11.169.245.000)	2.693.692.755.000
11	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(34.254.822.000)	4.140.745.178.000
12	FR0040	15/09/2025	26.002.090.000.000	11,00000%	1.043.043.618.000	27.045.133.618.000
13	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	(94.142.922.000)	14.679.957.078.000
14	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	(82.712.698.000)	14.334.287.302.000
15	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.136.651.342.000)	16.877.348.658.000
16	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(22.410.470.000)	6.377.589.530.000
17	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(1.676.966.130.000)	15.178.033.870.000
18	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	(1.278.050.766.000)	19.561.949.234.000
19	FR0048	15/09/2018	5.468.570.000.000	9,00000%	(183.523.749.000)	5.285.046.251.000
20	FR0050	15/07/2038	15.661.000.000.000	10,50000%	(411.422.461.000)	15.249.577.539.000
21	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	(265.672.003.000)	23.234.327.997.000
22	FR0053	15/07/2021	19.083.793.000.000	8,25000%	531.400.481.000	19.615.193.481.000
23	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	15.342.022.000	27.111.342.022.000
24	FR0055	15/09/2016	14.229.300.000.000	7,37500%	(17.593.290.000)	14.211.706.710.000
25	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	(318.731.023.000)	16.845.268.977.000
26	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	566.440.935.000	14.116.440.935.000
27	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	5.368.161.700.000	48.166.161.700.000
28	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	935.808.481.000	27.565.808.481.000
29	FR0060	15/04/2017	11.255.000.000.000	6,25000%	236.746.723.000	11.491.746.723.000
30	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	1.588.758.894.000	31.288.758.894.000
31	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	(21.025.940.000)	11.978.974.060.000
32	FR0063	15/05/2023	33.516.000.000.000	5,62500%	(923.643.694.000)	32.592.356.306.000
33	FR0064	15/05/2028	29.895.000.000.000	6,12500%	(437.954.893.000)	29.457.045.107.000
34	FR0065	15/05/2033	47.850.000.000.000	6,62500%	162.577.697.000	48.012.577.697.000
35	FR0066	15/05/2018	19.041.000.000.000	5,25000%	70.888.940.000	19.111.888.940.000
36	FR0067	15/02/2044	3.750.000.000.000	8,75000%	2.712.654.000	3.752.712.654.000
37	FR0068	15/03/2034	16.300.000.000.000	8,37500%	(753.659.202.000)	15.546.340.798.000
38	FR0069	15/04/2019	10.450.000.000.000	7,87500%	174.163.554.000	10.624.163.554.000
39	FR0070	15/03/2024	26.150.000.000.000	8,37500%	160.657.810.000	26.310.657.810.000
40	FR0071	15/03/2029	19.900.000.000.000	9,00000%	602.971.739.000	20.502.971.739.000
ORI			**32.882.000.000.000**		-	**32.882.000.000.000**
1	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	-	12.676.745.000.000
2	ORI010	15/10/2016	20.205.255.000.000	8,50000%	-	20.205.255.000.000
VARIABLE RATE BOND			**113.343.707.000.000**		-	**113.343.707.000.000**
1	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	5,15750%	-	9.164.007.000.000
2	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	5,87542%	-	7.436.328.000.000

SURAT BERHARGA NEGARA JANGKA PANJANG RUPIAH
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
3	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	5,54250%	-	9.016.749.000.000
4	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	5,15750%	-	8.652.056.000.000
5	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	5,87542%	-	9.909.300.000.000
6	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	5,54250%	-	3.209.300.000.000
7	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	5,15750%	-	5.442.142.000.000
8	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	5,15750%	-	5.442.142.000.000
9	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	5,87542%	-	7.033.994.000.000
10	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	5,87542%	-	12.212.320.000.000
11	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	5,54250%	-	10.503.015.000.000
12	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	5,15750%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**229.053.931.322.211**		-	**229.053.931.322.211**
1	SU002	01/04/2025	16.444.954.173.856	0,10000%	-	16.444.954.173.856
2	SU004	01/12/2025	44.796.189.405.980	0,10000%	-	44.796.189.405.980
3	SU007	01/08/2025	42.812.142.487.308	0,10000%	-	42.812.142.487.308
4	SRBI01	01/08/2043	125.000.645.255.067	0,10000%	-	125.000.645.255.067
Total SUN Jangka Panjang (a)			**1.067.362.239.322.210**		**3.908.833.189.000**	**1.071.271.072.511.210**
B. SBSN JANGKA PANJANG						
SBSN			**91.541.380.000.000**		**(1.217.940.133.000)**	**90.323.439.867.000**
1	IFR001	15/08/2015	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	19.805.384.000	2.651.805.384.000
4	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	22.747.399.000	1.193.747.399.000
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	13.324.842.000	2.188.324.842.000
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	3.712.306.000	1.550.712.306.000
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(203.105.000)	251.796.895.000
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	325.051.558.000	4.435.051.558.000
9	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%		1.000.000.000.000
10	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%		1.000.000.000.000
11	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%		2.000.000.000.000
12	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	-	2.500.000.000.000
13	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	-	3.000.000.000.000
14	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	-	1.500.000.000.000
15	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	-	1.000.000.000.000
16	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	-	2.000.000.000.000
17	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	-	3.000.000.000.000
18	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	-	3.342.000.000.000
19	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	-	13.613.805.000.000
20	SR-005	27/02/2016	14.968.875.000.000	6,00000%	-	14.968.875.000.000
21	PBS001	15/02/2018	6.725.000.000.000	4,45000%	(269.661.909.000)	6.455.338.091.000
22	PBS002	15/01/2022	1.218.000.000.000	5,45000%	(33.790.760.000)	1.184.209.240.000
23	PBS003	15/01/2027	2.932.000.000.000	6,00000%	(104.993.288.000)	2.827.006.712.000
24	PBS004	15/02/2037	10.149.000.000.000	6,10000%	(589.624.904.000)	9.559.375.096.000
25	PBS005	15/04/2043	4.679.000.000.000	6,75000%	(603.060.432.000)	4.075.939.568.000
26	PBS006	15/09/2020	327.000.000.000	8,25000%	(1.247.224.000)	325.752.776.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			**91.541.380.000.000**		**(1.217.940.133.000)**	**90.323.439.867.000**
TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)			**1.158.903.619.322.210**		**2.690.893.056.000**	**1.161.594.512.378.210**

SURAT BERHARGA NEGARA JANGKA PANJANG VALAS
Per 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SUN VALAS (USD)			**Rp238.170.024.866.745**		**-Rp64.604.735.133.255**	**Rp302.774.760.000.000**	**(Rp1.002.257.954.000)**	**Rp301.772.502.046.000**
1	RI0015	20-Apr-15	Rp9.613.000.000.000	7,25000%	-Rp2.576.000.000.000	Rp12.189.000.000.000	(10.146.493.000)	12.178.853.507.000
2	RI0016	15-Jan-16	Rp9.099.000.000.000	7,50000%	-Rp1.871.100.000.000	Rp10.970.100.000.000	(13.844.602.000)	10.956.255.398.000
3	RI0017	9-Mar-17	Rp9.370.000.000.000	6,87500%	-Rp2.819.000.000.000	Rp12.189.000.000.000	(23.866.945.000)	12.165.133.055.000
4	RI0018	17-Jan-18	Rp17.804.549.364.750	6,87500%	-Rp5.354.550.635.250	Rp23.159.100.000.000	(116.931.292.000)	23.042.168.708.000
5	RI0035	12-Oct-35	Rp15.436.000.000.000	8,50000%	-Rp4.066.400.000.000	Rp19.502.400.000.000	828.390.864.000	20.330.790.864.000
6	RI0037	17-Feb-37	Rp13.575.648.587.500	6,62500%	-Rp4.707.851.412.500	Rp18.283.500.000.000	(167.885.430.000)	18.115.614.570.000
7	RI0038	17-Jan-38	Rp18.729.115.845.000	7,75000%	-Rp5.648.884.155.000	Rp24.378.000.000.000	(337.188.634.000)	24.040.811.366.000
8	RI0320	13-Mar-20	Rp18.550.000.000.000	5,87500%	-Rp5.828.000.000.000	Rp24.378.000.000.000	(108.336.004.000)	24.269.663.996.000
9	RI 190304	4-Mar-19	Rp24.050.000.000.000	11,62500%	-Rp328.000.000.000	Rp24.378.000.000.000	(90.064.748.000)	24.287.935.252.000
10	RI0521	5-May-21	Rp21.441.986.560.150	4,87500%	-Rp9.030.513.439.850	Rp30.472.500.000.000	(274.518.375.000)	30.197.981.625.000
11	RI0142	17-Jan-42	Rp20.626.661.099.520	5,25000%	-Rp6.798.588.900.480	Rp27.425.250.000.000	(77.954.411.000)	27.347.295.589.000
12	RI0422	25-Apr-22	Rp18.380.000.000.000	3,75000%	-Rp5.998.000.000.000	Rp24.378.000.000.000	(126.001.504.000)	24.251.998.496.000
13	RI0423	15-Apr-23	Rp14.584.181.704.913	3,37500%	-Rp3.699.318.295.088	Rp18.283.500.000.000	(141.638.802.000)	18.141.861.198.000
14	RI0443	15-Apr-43	Rp14.584.181.704.913	4,62500%	-Rp3.699.318.295.088	Rp18.283.500.000.000	(282.681.380.000)	18.000.818.620.000
15	RI1023	17-Oct-23	Rp10.059.000.000.000	5,37500%	-Rp2.130.000.000.000	Rp12.189.000.000.000	(58.416.308.000)	12.130.583.692.000
16	USDFR	15-May-17	Rp2.266.700.000.000	3,50000%	-Rp49.210.000.000	Rp2.315.910.000.000	(1.173.890.000)	2.314.736.110.000
SBSN VALAS (USD)			**Rp35.911.979.162.000**		**-Rp6.749.520.838.000**	**Rp42.661.500.000.000**	**Rp0**	**Rp42.661.500.000.000**
1	SNI18	21-Nov-18	Rp9.035.050.295.000	4,00000%	-Rp3.153.949.705.000	Rp12.189.000.000.000	-	12.189.000.000.000
2	SNI19	15-Mar-19	Rp9.639.006.152.000	6,12500%	-Rp2.549.993.848.000	Rp12.189.000.000.000	-	12.189.000.000.000
3	SNI22	21-Nov-22	Rp17.237.922.715.000	3,30000%	-Rp1.045.577.285.000	Rp18.283.500.000.000	-	18.283.500.000.000
SUN VALAS (JPY)			**17.198.408.000.000**		**-Rp807.942.000.000**	**18.006.350.000.000**	**Rp0**	**18.006.350.000.000**
17	RIJPY0719	29-Jul-19	3.695.300.000.000	2,73000%	-Rp370.650.000.000	Rp4.065.950.000.000	-	4.065.950.000.000
18	RIJPY1120	12-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60000%	-Rp479.400.000.000	Rp6.970.200.000.000	-	6.970.200.000.000
19	RIJPY1122	22-Nov-22	7.012.308.000.000	1,13000%	Rp42.108.000.000	Rp6.970.200.000.000	-	6.970.200.000.000
Jumlah SBSN Valas			**35.911.979.162.000**		**(6.749.520.838.000)**	**42.661.500.000.000**	-	**42.661.500.000.000**
Jumlah SUN Valas			**255.368.432.866.745**		**(65.412.677.133.255)**	**Rp320.781.110.000.000**	**-1.002.257.954.000**	**Rp319.778.852.046.000**
TOTAL			**291.280.412.028.745**		**(72.162.197.971.255)**	**363.442.610.000.000**	**(1.002.257.954.000)**	**362.440.352.046.000**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp116,17
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2013) adalah Rp12.189

IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2013

(rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOREKSI SATGAS	KOREKSI K/L	SELISIH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	40.757.932.306	40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	286.109.778.878	286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	543.831.559.292	543.831.559.292	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.970.004.669.554	2.969.951.230.758	53.438.796
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.914.585.329.072	2.914.585.329.072	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.725.929.155.982	8.725.929.155.982	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.118.781.815.634	2.102.601.608.787	16.180.206.847
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	12.172.100.783.749	12.172.094.967.753	5.815.996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.075.796.507.334	102.075.796.507.334	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.189.864.612.087	10.190.340.621.272	(476.009.185)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13.249.400.523.623	13.249.429.156.619	(28.632.995)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.875.329.191.147	7.873.675.305.565	1.653.885.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.641.341.601.296	1.641.341.601.296	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	949.328.841.566	949.328.841.566	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	16.554.117.154.617	16.555.010.101.226	(892.946.609)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.043.777.865.974	46.027.561.923.110	16.215.942.864
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	11.695.430.394.670	11.695.430.394.670	-
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.776.237.443.382	13.776.151.350.781	86.092.601
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	778.423.960.183	778.423.960.183	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.211.097.760.823	3.212.126.278.755	(1.028.517.932)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.350.286.446.800	2.350.286.446.800	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.174.339.355.601	1.175.486.139.822	(1.146.784.221)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	22.351.109.591.886	22.374.972.514.248	(23.862.922.362)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	(881.857.911)	(881.857.911)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.809.100.210.346	1.808.421.999.231	678.211.115
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	(8.924.581.782)	(8.924.581.782)	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.052.620.811.653	2.052.620.811.653	-
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	(5.948.553.910)	(5.948.553.910)	-
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	824.955.290.882	824.955.290.882	-
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	(2.742.261.681)	(2.742.261.681)	-
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	(6.577.861.751)	(6.577.863.502)	1.751
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	722.179.567.356	722.179.567.356	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	36.929.127.943	36.929.127.943	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	(1.020.104.341)	(1.020.104.341)	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	502.116.711.427	502.116.711.427	-
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	322.205.984.837	322.205.984.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.270.589.689.300	1.270.565.500.564	24.188.736
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	297.922.263.776	297.922.263.776	-
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	311.680.341.771	311.680.341.771	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	23.612.527.267.869	23.612.543.196.988	(15.929.119)
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.720.230.913	5.720.230.913	-
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(12.381.528.148)	(12.381.528.148)	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	330.239.133.274	330.239.133.274	-
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)	-
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	(4.133.861.756)	(4.133.861.756)	-
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	421.352.220.173	421.347.572.119	4.648.054
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	(341.407.813)	(341.407.813)	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	720.727.674.800	720.721.342.312	6.332.488
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	64.204.050.470	64.169.085.000	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	(6.621.927.918)	(6.621.927.918)	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.090.187.544	66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.078.270.200.964	6.078.270.200.964	-
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.785.168.758.442	1.785.168.758.442	-

No	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOREKSI SATGAS	KOREKSI K/L	SELISIH
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	698.296.450.360	698.327.005.260	(30.554.900)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	337.438.406.169	337.438.406.169	-
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	(2.519.772.253)	(2.519.772.253)	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	(16.701.815.248)	(16.701.815.248)	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	344.222.513.258	344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	228.549.103.080	228.549.103.080	-
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	359.937.786.533	359.937.786.533	-
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.188.766.767.231	1.188.766.767.231	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	378.060.913.009	378.088.228.289	(27.315.280)
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	65.575.084.826	65.575.084.826	-
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	(6.497.923.875)	(6.497.923.875)	-
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	5.890.200.085.755	5.890.200.085.755	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	16.748.000	16.748.000	-
72	103	BNPB	(2.104.777.963)	(2.104.777.963)	-
73	104	BNP2TKI	-	-	-
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-
75	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
76	107	BADAN SAR	(21.706.053.903)	(21.930.560.802)	224.506.899
77	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-
TOTAL			**334.164.899.677.294**	**334.157.241.052.698**	**7.658.624.596**

PENYESUAIAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN MENURUT PMK 90/PKK.06/2014 DAN KMK 145/KM.6/2014

Bagan Akun Standar		Nilai per 1 Januari 2013 Sebelum dilakukan Normalisasi	Normalisasi	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Normalisasi	MUTASI		Nilai per 31 Desember 2013	Penyusutan Pertama Kali (PMK 01/2013 dan KMK 94/2013)	Penyesuaian	Penyusutan Pertama Kali (PMK 90/2014 dan KMK 145/2014)	Penyusutan Transaksional	Penyusutan Reguler	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Penyusutan
Kode	Uraian				TAMBAH	KURANG							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) - (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14) = (8) - (11) - (12) - (13)
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	478.202.969.446	-	478.202.969.446	18.329.173.132	10.910.623.046	485.621.519.532	135.945.949.162	(44.435.797.475)	91.510.151.687	369.497.052	15.801.219.896	**377.940.650.897**
002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.685.076.763.533	(147.000.000)	1.684.929.763.533	395.453.511.902	6.196.075.265	2.074.187.200.170	705.796.804.151	(224.058.381.545)	481.738.422.606	(1.499.093.725)	102.880.922.999	**1.491.066.948.290**
004	Badan Pemeriksa Keuangan	4.653.133.947.297	(7.939.187.290)	4.645.194.760.007	1.203.618.705.129	775.497.379.676	5.073.316.085.460	956.335.265.118	(182.185.341.571)	774.149.923.547	(28.698.975.061)	279.616.608.655	**4.048.248.528.319**
005	Mahkamah Agung	11.260.754.853.949	(165.974.055.907)	11.094.780.798.042	2.352.636.444.663	1.362.009.553.847	12.085.407.688.858	2.383.474.441.731	(728.691.779.622)	1.654.782.662.109	59.184.358.873	386.987.762.672	**9.984.452.905.204**
006	Kejaksaan Agung	7.958.667.555.496	(14.519.576.943)	7.944.147.978.553	1.209.262.626.059	745.810.708.884	8.407.599.895.728	1.765.084.983.025	(495.377.755.984)	1.269.707.227.041	(42.793.538.134)	377.086.919.186	**6.803.599.287.635**
007	Kementerian Sekretariat Negara	94.883.251.113.961	(1.666.415.601.455)	93.216.835.512.506	3.803.892.653.608	2.303.664.407.563	94.717.063.758.551	2.746.405.871.197	(324.770.626.608)	2.421.635.244.589	42.341.084.026	324.068.859.234	**91.929.018.570.702**
010	Kementerian Dalam Negeri	8.042.182.370.446	(4.570.250.449)	8.037.612.119.997	2.408.458.548.684	1.523.031.041.100	8.923.039.627.581	1.574.205.052.114	(179.273.120.364)	1.394.931.931.750	(12.198.394.217)	520.549.765.421	**7.019.756.324.627**
011	Kementerian Luar Negeri	17.236.569.208.996	(115.142.278.477)	17.121.426.930.519	702.190.772.447	408.732.994.499	17.414.884.708.467	4.591.931.977.042	(2.266.407.225.625)	2.325.524.751.417	10.903.807.628	415.009.924.091	**14.663.446.225.331**
012	Kementerian Pertahanan	380.331.837.180.183	(24.977.351.841)	380.306.859.828.342	66.191.255.903.878	33.781.798.477.118	412.716.317.255.102	58.192.252.509.033	(984.343.352.355)	57.207.909.156.678	9.415.422.499.351	6.788.733.600.326	**339.304.251.998.747**
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20.735.340.994.658	(51.621.066.947)	20.683.719.927.711	4.319.883.973.530	2.322.695.738.370	22.680.908.162.871	3.267.922.668.194	(819.823.023.862)	2.448.099.644.332	214.074.078.323	555.890.450.216	**19.462.843.990.000**
015	Kementerian Keuangan	39.677.922.604.048	(50.912.824.263)	39.627.009.779.785	7.439.526.653.415	5.071.259.700.135	41.995.276.733.065	9.418.381.337.348	(1.683.358.498.851)	7.735.022.838.497	(39.140.090.250)	1.334.382.445.410	**32.965.011.539.408**
018	Kementerian Pertanian	16.981.198.033.024	(54.690.005.553)	16.926.508.027.471	4.736.634.134.174	1.601.157.633.405	20.061.984.528.240	3.319.110.118.359	(480.926.079.067)	2.838.184.039.292	(34.324.798.565)	561.538.195.854	**16.696.587.091.659**
019	Kementerian Perindustrian	5.632.120.734.525	(23.104.049.973)	5.609.016.684.552	1.346.746.733.004	826.974.868.375	6.128.788.549.181	1.526.152.776.016	(225.102.658.725)	1.301.050.117.291	(46.608.110.516)	350.798.577.257	**4.523.547.965.149**
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	26.482.946.848.203	(3.462.235.610)	26.479.484.612.593	16.664.399.165.309	19.622.993.723.888	23.520.890.054.014	2.803.258.565.175	(314.807.788.117)	2.488.450.777.058	(9.096.475.091)	517.953.896.526	**20.523.581.855.521**
022	Kementerian Perhubungan	157.229.149.305.301	3.537.855.958.917	160.767.005.264.218	71.355.769.684.106	42.823.522.248.766	189.299.252.699.558	40.810.875.165.666	(2.164.166.287.509)	38.646.708.878.157	(1.529.964.263.532)	5.367.740.855.391	**146.814.767.229.542**
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	102.879.909.050.152	(136.905.773.565)	102.743.003.276.587	20.299.921.148.650	11.292.288.171.061	111.750.636.254.176	15.707.481.959.615	(3.575.153.270.641)	12.132.328.688.974	568.148.690.510	3.022.506.755.112	**96.027.652.119.580**
024	Kementerian Kesehatan	50.482.510.338.476	(115.149.861.341)	50.367.360.477.135	17.768.509.026.696	8.848.286.768.660	59.287.582.735.171	15.644.536.852.967	(1.279.741.241.395)	14.364.795.611.572	807.567.081.609	3.781.400.347.444	**40.333.819.694.546**
025	Kementerian Agama	32.105.077.277.039	(5.209.557.721)	32.099.867.719.318	5.314.946.016.487	2.489.922.376.287	34.924.891.359.518	6.209.164.815.872	(2.135.231.549.334)	4.073.933.266.538	13.581.632.753	1.058.410.743.890	**29.778.965.716.337**
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.368.616.798.221	(40.218.253.424)	7.328.398.544.797	2.244.050.938.742	1.247.806.170.039	8.324.643.313.500	1.516.965.015.878	(172.897.404.956)	1.344.067.610.922	25.740.898.868	395.697.097.873	**6.559.137.705.837**
027	Kementerian Sosial	5.221.235.949.668	(1.262.534.355)	5.219.973.415.313	348.003.245.775	182.224.896.964	5.385.751.764.124	873.980.457.564	(145.603.264.106)	728.377.193.458	(10.279.592.503)	132.563.070.304	**4.535.091.092.865**
029	Kementerian Kehutanan	5.807.146.206.652	(19.716.972.520)	5.787.429.234.132	1.139.033.205.236	479.051.218.342	6.447.411.221.026	1.497.849.406.624	(234.521.754.665)	1.263.327.651.959	230.748.161	313.556.319.948	**4.870.296.500.958**
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10.128.262.078.481	(13.399.349.810)	10.114.862.728.671	2.695.880.578.739	1.732.749.746.558	11.077.993.560.852	2.825.858.772.892	(285.962.518.714)	2.539.896.254.178	(36.545.585.341)	557.591.414.791	**8.017.051.477.224**
033	Kementerian Pekerjaan Umum	729.856.981.242.773	(6.144.288.232.356)	723.712.693.010.417	233.684.540.682.857	147.578.017.027.202	809.819.216.666.072	111.789.228.670.306	(20.670.886.417.612)	91.118.342.252.694	1.440.091.479.911	24.424.288.846.908	**692.836.494.086.559**
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum	660.625.706.263	-	660.625.706.263	286.351.080.515	142.586.918.775	804.389.868.003	236.669.711.906	49.523.287	236.719.235.193	(7.862.249.533)	61.139.049.343	**514.393.833.000**
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	70.009.592.677	-	70.009.592.677	7.721.161.957	4.157.347.844	73.573.406.790	34.648.919.699	(75)	34.648.919.624	(1.402.940.871)	6.725.769.631	**33.601.658.406**
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	193.145.409.102	1.016.287.450	194.161.696.552	247.070.579.108	207.140.529.564	234.091.746.096	25.332.756.319	(3.857.693)	25.328.898.626	(1.309.554.857)	7.986.700.929	**202.085.701.398**
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.205.803.273.724	(58.926.001.016)	4.146.877.272.708	278.990.606.030	1.732.223.931.611	2.693.643.947.127	483.475.446.427	(99.285.617.485)	384.189.828.942	(136.039.172.031)	69.144.782.010	**2.376.348.508.206**
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	555.266.596.350	15.363.000	555.281.959.350	16.442.463.789	12.952.629.436	558.771.793.703	101.782.686.122	(16.070.748)	101.766.615.374	(7.130.017.411)	12.614.722.868	**451.520.472.872**
042	Kementerian Riset dan Teknologi	2.715.852.792.782	(953.912.000)	2.714.898.880.782	357.928.123.578	92.116.180.638	2.980.710.823.722	441.516.303.237	(87.391.362.061)	354.124.941.176	6.880.128.866	53.842.357.848	**2.565.863.395.832**
043	Kementerian Lingkungan Hidup	387.484.346.934	(560.014.000)	386.924.332.934	53.555.281.962	33.950.835.025	406.528.779.871	207.973.635.798	(10.194.390.269)	197.779.245.529	(2.085.601.110)	27.247.954.063	**183.587.181.389**
044	Kementerian Koperasi dan UKM	2.078.057.438.439	(17.330.000)	2.078.040.108.439	434.707.631.592	266.001.333.702	2.246.746.406.329	265.315.915.609	(49.528.939.238)	215.786.976.371	(4.426.261.436)	65.794.881.348	**1.969.590.810.046**
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.044.888.200	-	32.044.888.200	60.283.607.445	2.459.903.101	89.868.592.544	26.539.545.912	(112.740.290)	26.426.805.622	(911.217.308)	2.167.459.869	**62.185.544.361**
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	80.312.021.182	-	80.312.021.182	23.499.329.707	4.964.645.643	98.846.705.246	42.209.989.842	(1.834.692.481)	40.375.297.361	447.731.243	5.513.860.425	**52.509.816.217**
050	Badan Intelijen Negara	3.619.215.494.136	(20.718.600)	3.619.194.775.536	1.134.662.187.076	738.704.619.326	4.015.152.343.286	1.575.541.620.944	(63.125.719.543)	1.512.415.901.401	(479.984.000)	231.497.580.988	**2.271.718.844.897**
051	Lembaga Sandi Negara	6.032.635.919.309	(89.972.203)	6.032.545.947.106	2.542.276.926.107	1.207.434.838.417	7.367.388.034.796	3.741.099.175.560	(20.799.470.593)	3.720.299.704.967	(34.652.720.533)	751.721.893.404	**2.930.019.156.958**
052	Dewan Ketahanan Nasional	19.387.711.414	-	19.387.711.414	2.409.021.350	-	21.796.732.764	14.083.770.816	(21)	14.083.770.795	-	1.988.275.183	**5.724.686.786**
054	Badan Pusat Statistik	2.779.912.336.540	(2.334.706.857)	2.777.577.629.683	1.047.041.872.020	638.010.891.422	3.186.608.610.281	830.777.584.330	(186.107.694.849)	644.669.889.481	(43.986.733.837)	217.680.373.536	**2.368.245.081.101**
055	Kementerian PPN/Bappenas	602.019.403.130	(60.311.158.454)	541.708.244.676	192.794.678.646	238.700.700.041	495.802.223.281	120.471.857.904	(30.702.417.328)	89.769.440.576	(8.004.868.306)	19.190.830.845	**394.846.820.166**
056	Badan Pertanahan Nasional	4.542.409.212.117	(12.284.612.159)	4.530.124.599.958	1.212.576.930.455	655.438.551.457	5.087.262.978.956	1.024.540.343.930	(177.323.897.644)	847.216.446.286	(18.972.252.312)	213.027.609.051	**4.045.991.175.931**
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	905.539.858.376	(233.445.524)	905.306.412.852	174.002.249.183	152.945.661.030	926.363.001.005	196.210.591.148	(41.402.770.168)	154.807.820.980	(324.592.228)	24.154.008.581	**747.725.763.672**
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.259.816.714.658	499.146.565	3.260.315.861.223	1.120.681.961.259	929.438.281.984	3.451.559.540.498	943.648.122.824	(48.125.243.811)	895.522.879.013	132.352.770.895	179.461.629.442	**2.244.222.261.148**
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	74.957.302.295.028	2.589.110.977.808	77.546.413.272.836	20.703.325.272.974	10.100.451.141.075	88.149.287.404.735	18.129.589.315.934	(2.495.461.919.032)	15.634.127.396.902	46.978.707.242	3.729.099.828.973	**68.739.081.471.618**
063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.160.901.912.232	(2.304.336.212)	2.158.597.576.020	1.013.159.868.636	745.945.904.583	2.425.811.540.073	550.095.321.814	(23.586.073.517)	526.509.248.297	27.729.260.871	161.774.083.803	**1.709.798.947.102**
064	Lembaga Ketahanan Nasional	352.378.638.595	470.000	352.379.108.595	181.260.234.156	122.538.131.504	411.101.211.247	83.501.922.732	(1.130.357.248)	82.371.565.484	(1.266.784.927)	18.525.769.653	**311.470.661.037**
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	745.100.939.590	12.202.404	745.113.141.994	161.513.026.172	120.491.764.588	786.134.403.578	177.406.263.517	(34.627.588.903)	142.778.674.614	(2.826.456.964)	29.446.309.702	**616.735.876.226**
066	Badan Narkotika Nasional	1.302.354.615.667	(15.803.035.768)	1.286.551.579.899	485.641.662.192	213.052.866.820	1.559.140.375.271	313.396.605.944	225.957.109	313.622.563.053	899.256.850	99.458.158.359	**1.145.160.397.009**
067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	65.693.136.057	29.150.000	65.722.286.057	56.771.197.526	35.986.139.022	86.507.344.561	33.070.897.917	3.616.514.781	36.687.412.698	(6.899.200)	3.995.102.466	**45.831.728.597**

PENYESUAIAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN MENURUT PMK 90/PKK.06/2014 DAN KMK 145/KM.6/2014

Bagan Akun Standar		Nilai per 1 Januari 2013 Sebelum dilakukan Normalisasi	Normalisasi	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Normalisasi	MUTASI		Nilai per 31 Desember 2013	Penyusutan Pertama Kali (PMK 01/2013 dan KMK 94/2013)	Penyesuaian	Penyusutan Pertama Kali (PMK 90/2014 dan KMK 145/2014)	Penyusutan Transaksional	Penyusutan Reguler	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Penyusutan
Kode	Uraian				TAMBAH	KURANG							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) - (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14) = (8) - (11) - (12) - (13)
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	953.905.102.201	(1.384.508.209)	952.520.593.992	104.055.689.343	33.454.077.159	1.023.122.206.176	334.412.242.516	(91.414.789.149)	242.997.453.367	(1.846.868.704)	46.889.514.191	**735.082.107.322**
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	32.837.178.870	(116.286.500)	32.720.892.370	8.795.106.100	299.032.750	41.216.965.720	10.833.573.514	99.284	10.833.672.798	271.478.920	2.066.094.333	**28.045.719.669**
075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4.011.972.015.406	(2.412.137.720)	4.009.559.877.686	1.165.628.351.891	646.529.209.994	4.528.659.019.583	1.207.220.476.525	(91.057.485.447)	1.116.162.991.078	(7.808.694.162)	319.517.179.598	**3.100.787.543.069**
076	Komisi Pemilihan Umum	979.731.057.556	(964.632.740)	978.766.424.816	264.453.691.650	105.425.001.951	1.137.795.114.515	323.069.277.110	(8.302.346.498)	314.766.930.612	(1.970.651.243)	84.254.156.757	**740.744.678.389**
077	Mahkamah Konstitusi	554.095.940.921	(41.943.100)	554.053.997.821	70.602.035.083	42.924.448.713	581.731.584.191	184.161.515.016	145.587.261	184.307.102.277	(2.785.109.656)	24.234.306.667	**375.975.284.903**
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	199.370.295.186	(848.914.300)	198.521.380.886	11.631.746.882	4.750.573.898	205.402.553.870	42.537.428.254	(55	42.537.428.199	(86.754.631)	8.986.078.280	**153.965.802.022**
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	7.944.235.932.241	269.000	7.944.236.201.241	452.715.891.027	253.754.529.794	8.143.197.562.474	765.064.394.397	(72.416.902.776)	692.647.491.621	(12.841.559.519)	99.382.258.040	**7.364.009.372.332**
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	2.925.430.303.987	(904.666.824)	2.924.525.637.163	191.230.756.443	216.469.025.781	2.899.287.367.825	489.875.490.526	(169.599.872.393)	320.275.618.133	(9.255.867.264)	72.095.989.169	**2.516.171.627.787**
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3.064.483.384.616	(591.969.191)	3.063.891.415.425	574.732.012.966	119.235.417.890	3.519.388.010.501	978.880.119.660	(171.885.873.918)	806.994.245.742	(3.697.072.090)	201.127.206.628	**2.514.963.630.221**
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.081.714.673.802	(336.353.383)	1.081.378.320.419	338.023.195.368	162.522.764.909	1.256.878.750.878	336.301.872.872	(54.135.236.659)	282.166.636.213	3.830.607.593	83.628.951.559	**887.252.555.513**
083	Badan Informasi Geospasial	386.139.811.856	54.953.615	386.194.765.471	80.240.854.978	16.385.891.502	450.049.728.947	245.339.604.708	(25.656.066.174)	219.683.538.534	4.914.816.807	30.739.385.028	**194.711.988.578**
084	Badan Standarisasi Nasional	27.230.343.273	-	27.230.343.273	4.516.105.566	1.130.085.566	30.616.363.273	16.158.157.657	(314)	16.158.157.343	(109.747.000)	2.632.356.972	**11.935.595.958**
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	96.797.586.743	-	96.797.586.743	66.552.248.613	30.591.019.145	132.758.816.211	42.198.841.153	(903.963.228)	41.294.877.925	(4.436.902.029)	8.866.496.108	**87.034.344.207**
086	Lembaga Administrasi Negara	1.057.135.146.442	(3.160.062)	1.057.131.986.380	42.940.147.108	15.024.648.100	1.085.047.485.388	171.259.919.838	(36.537.476.585)	134.722.443.253	156.386.738	22.831.150.151	**927.337.505.246**
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	570.227.533.985	-	570.227.533.985	50.067.047.931	20.214.739.788	600.079.842.128	182.240.399.338	(43.096.529.165)	139.143.870.173	1.407.718.886	20.057.020.229	**439.471.232.840**
088	Badan Kepegawaian Negara	1.199.703.689.131	(3.992.014.433)	1.195.711.674.698	378.071.907.156	243.907.206.431	1.329.876.375.423	319.731.113.572	(80.360.254.372)	239.370.859.200	97.033.473	53.111.492.562	**1.037.296.990.188**
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.975.315.103.325	-	1.975.315.103.325	133.235.791.741	94.303.576.248	2.014.247.318.818	405.558.527.132	(131.656.872.959)	273.901.654.173	(5.187.640.237)	40.031.261.778	**1.705.502.043.104**
090	Kementerian Perdagangan	4.119.511.090.688	1.064.616.299	4.120.575.706.987	1.956.917.147.731	1.380.918.421.210	4.696.574.433.508	643.964.299.487	(39.519.654.815)	604.444.644.672	154.295.649	138.288.782.738	**3.953.686.710.449**
091	Kementerian Perumahan Rakyat	4.200.838.380.594	(539.288.824)	4.200.299.091.770	3.575.370.319.159	3.303.551.782.104	4.472.117.628.825	389.095.573.086	(157)	389.095.572.929	(261.411.316.379)	131.674.061.038	**4.212.759.311.237**
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.354.743.614.975	(812.762.950)	1.353.930.852.025	402.971.602.061	55.026.321.824	1.701.876.132.262	257.632.668.871	(289.602.035)	257.343.066.836	(14.703.528.082)	81.824.783.874	**1.377.411.809.634**
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	435.199.466.400	-	435.199.466.400	86.359.046.758	678.519.605	520.879.993.553	159.213.324.040	(168.437.902)	159.044.886.138	(536.427.380)	23.357.214.643	**339.014.320.152**
095	Dewan Perwakilan Daerah RI	140.858.096.033	-	140.858.096.033	6.498.853.069	365.436.950	146.991.512.152	61.690.159.045	7.424.675	61.697.583.720	(146.368.697)	13.254.773.681	**72.185.523.448**
100	Komisi Yudisial	153.605.764.119	-	153.605.764.119	4.707.610.783	303.660.932	158.009.713.970	29.000.716.607	(184)	29.000.716.423	(300.248.255)	7.305.938.278	**122.003.307.524**
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	864.312.358.317	(76.786.927)	864.235.571.390	1.864.498.025.238	917.257.512.038	1.811.476.084.590	227.945.183.427	1.211	227.945.184.638	89.422.019.717	232.447.911.133	**1.261.660.969.102**
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	162.968.855.550	(5.100.000)	162.963.755.550	60.466.842.388	22.092.029.058	201.338.568.880	46.673.752.152	(399)	46.673.751.753	(489.607.103)	20.403.726.302	**134.750.697.928**
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	2.916.145.639.524	341.495.000	2.916.487.134.524	2.193.461.258.440	533.654.754.760	4.576.293.638.204	80.479.833.832	(37	80.479.833.795	479.898.736	78.344.619.170	**4.416.989.286.503**
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	162.488.696.635	-	162.488.696.635	44.875.977.632	1.794.859.000	205.569.815.267	23.197.298.617	(145)	23.197.298.472	(253.723.808)	7.312.816.361	**175.313.424.242**
107	Badan SAR Nasional	2.624.506.151.305	135.730.678	2.624.641.881.983	4.010.499.288.838	2.766.296.010.294	3.868.845.160.527	684.850.159.459	(18.643.026.997)	666.207.132.462	(11.761.651.629)	398.306.555.883	**2.816.093.123.811**
108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	25.513.827.489	-	25.513.827.489	7.969.686.285	7.362.475.274	26.121.038.500	16.879.278.291	(1.589.148)	16.877.689.143	(2.371.340.883)	2.569.979.318	**9.044.710.922**
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	64.718.830.857	-	64.718.830.857	47.486.774.094	21.374.908.812	90.830.696.139	4.634.511.024	-	4.634.511.024	804.340.975	5.550.485.402	**79.841.358.738**
110	Ombudsman Republik Indonesia	12.878.417.810	-	12.878.417.810	11.256.995.063	294.683.104	23.840.729.769	2.137.129.682	-	2.137.129.682	3.675.255.145	3.455.959.991	**14.572.384.951**
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	196.710.368.635	-	196.710.368.635	136.011.163.589	87.324.261.228	245.397.270.996	22.297.536.533	-	22.297.536.533	(1.474.710.390)	21.248.431.258	**203.326.013.595**
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	14.774.696.468.106	(75.790.591.965)	14.698.905.876.141	611.023.621.041	244.824.956.014	15.065.104.541.168	4.665.066.340.929	-	4.665.066.340.929	6.362.677.929	180.110.529.976	**10.213.564.992.334**
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	6.264.347.412	-	6.264.347.412	486.548.427.873	315.419.335.962	177.393.439.323	285.394.885	-	285.394.885	5.006.354.556	6.996.174.699	**165.105.515.183**
114	Sekretariat Kabinet	3.783.051.544	-	3.783.051.544	46.566.087.596	-	50.349.139.140	462.037.647	-	462.037.647	25.670.221.302	4.407.299.499	**19.809.580.692**
115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	22.243.853.366	-	22.243.853.366	70.634.398.223	5.847.367.219	87.030.884.370	2.908.630.876	-	2.908.630.876	3.664.600.105	9.106.478.262	**71.351.175.127**
116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	4.502.330.538.096	499.917.435	4.502.830.455.531	437.773.816.953	276.152.433.403	4.664.451.839.081	1.022.158.175.379	-	1.022.158.175.379	(953.751.979)	102.185.802.825	**3.541.061.612.856**
117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik	4.764.548.317.459	(161.371.649.827)	4.603.176.667.632	492.829.090.215	364.159.834.420	4.731.845.923.427	1.154.706.660.923	-	1.154.706.660.923	(110.970.564)	60.207.274.494	**3.517.042.958.574**
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.050.440.903.832	-	2.050.440.903.832	342.659.461.023	122.237.051.867	2.270.863.312.988	58.634.454.084	-	58.634.454.084	31.927.000	25.622.633.490	**2.186.574.298.414**
199	Otorita Asahan	447.433.201	-	447.433.201	-	-	447.433.201	329.180.011	-	329.180.011	-	2.212.469	**116.040.721**
999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	771.997.606.479	-	771.997.606.479	942.735.625.336	322.842.592.380	1.391.890.639.435	689.404.791	-	689.404.791	2.065.331.556	21.400.580.252	**1.367.735.322.836**
TOTAL		**1.920.833.440.855.000**	**(2.933.021.491.377)**	**1.917.900.419.363.620**	**521.215.224.178.891**	**318.190.995.752.735**	**2.120.924.647.789.780**	**335.470.872.398.700**	**(44.020.086.835.603)**	**291.450.785.563.097**	**10.553.580.942.636**	**60.274.089.514.810**	**1.758.646.191.769.230**

PENYESUAIAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN MENURUT PMK 90/PKK.06/2014 DAN KMK 145/KM.6/2014

Bagan Akun Standar		Nilai per 1 Januari 2013 Sebelum dilakukan Normalisasi	Normalisasi	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Normalisasi	MUTASI		Nilai per 31 Desember 2013	Penyusutan Pertama Kali (PMK 01/2013 dan KMK 94/2013)	Penyesuaian	Penyusutan Pertama Kali (PMK 90/2014 dan KMK 145/2014)	Penyusutan Transaksional	Penyusutan Reguler	Nilai per 1 Januari 2013 Setelah dilakukan Penyusutan
Kode	Uraian				TAMBAH	KURANG							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) - (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14) = (8) - (11) - (12) - (13)
131111	TANAH	1.002.113.273.169.070	(5.436.101.480.768)	996.677.171.688.299	93.181.124.277.846	48.773.358.819.890	1.041.084.937.146.250	-	-	-	-	-	**1.041.084.937.146.250**
132111	PERALATAN DAN MESIN	234.259.425.649.157	2.852.590.937.030	237.112.016.586.187	92.388.956.468.315	46.560.740.736.508	282.940.232.317.994	124.678.441.830.899	3.347.390.213.717	128.025.832.044.616	7.767.207.049.505	26.408.478.938.815	**120.738.714.285.058**
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	170.367.889.474.478	862.915.518.276	171.230.804.992.754	36.803.511.447.214	16.836.914.888.198	191.197.401.551.770	49.061.998.222.742	(24.570.439.752.869)	24.491.558.469.873	834.836.348.161	5.065.752.781.064	**160.805.253.952.672**
134111	JALAN DAN JEMBATAN	260.854.847.285.620	16.115.846.196	260.870.963.131.816	83.911.104.363.147	63.285.629.115.102	281.496.438.379.861	110.449.234.584.304	(7.394.245.697.889)	103.054.988.886.415	1.158.054.102.865	20.846.104.745.299	**156.437.290.645.282**
134112	IRIGASI	95.394.761.267.056	178.302.781.132	95.573.064.048.188	21.741.096.970.891	6.936.109.707.946	110.378.051.311.133	35.939.799.613.894	(13.747.962.292.649)	22.191.837.321.245	319.373.477.155	4.802.526.745.266	**83.064.313.767.467**
134113	JARINGAN	23.049.735.141.366	358.391.027.878	23.408.126.169.244	19.974.055.370.981	11.900.490.837.385	31.481.690.702.840	3.600.367.080.078	(308.577.013.815)	3.291.790.066.263	(70.238.523.673)	1.085.787.461.087	**27.174.351.699.163**
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI	7.526.178.134.019	(1.701.605.354)	7.524.476.528.665	27.810.708.593.905	4.269.722.351.997	31.065.462.770.573	-	-	-	(339.019.947.067)	637.380.193.316	**30.767.102.524.324**
135121	ASET TETAP LAINNYA	6.688.886.975.199	142.634.342.255	6.831.521.317.454	1.815.772.058.383	1.031.533.544.137	7.615.759.831.700	127.566.560.976	449.885.608.623	577.452.169.599	3.191.216.231	19.142.241.279	**7.015.974.204.591**
136111	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	96.130.447.170.637	-	96.130.447.170.637	135.577.229.335.689	112.434.066.420.606	119.273.610.085.720	-	-	-	-	-	**119.273.610.085.720**
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	24.447.996.588.398	(1.906.168.858.022)	22.541.827.730.376	8.011.665.292.520	6.162.429.330.966	24.391.063.691.930	11.613.464.505.807	(1.798.275.030.403)	9.815.189.475.404	880.177.219.459	1.408.916.408.684	**12.286.780.588.383**
TOTAL		**1.920.833.440.855.000**	**(2.933.021.491.377)**	**1.917.900.419.363.620**	**521.215.224.178.891**	**318.190.995.752.735**	**2.120.924.647.789.780**	**335.470.872.398.700**	**(44.022.223.965.285)**	**291.448.648.433.415**	**10.553.580.942.636**	**60.274.089.514.810**	**1.758.648.328.898.910**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2013

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	ASET							KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka	Kewajiban Jangka	JUMLAH KEWAJIBAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
1	Penyediaan Barang dan/atau Jasa	**KEMENTERIAN KESEHATAN (024)**	**2.962.563.079.162**	-	**24.789.453.480.837**	**6.375.460.661.338**	**18.413.992.819.499**	**53.851.390.830**	**21.430.407.289.491**	**671.499.644.898**	-	**822.912.244.898**	**20.607.495.044.593**	**21.430.407.289.491**
	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	344.438.734.247	-	2.634.515.798.221	682.497.482.632	1.952.018.315.589	1.318.078.698	2.297.775.128.534	16.823.659.170	-	168.236.259.170	2.129.538.869.364	2.297.775.128.534
	2	RSUP Fatmawati, Jakarta	108.222.448.805	-	1.770.780.295.375	232.338.748.232	1.538.441.547.143	6.783.257.028	1.653.447.252.976	23.249.392.265		23.249.392.265	1.630.197.860.711	1.653.447.252.976
	3	RSUP Persahabatan, Jakarta	122.993.536.889		1.023.432.725.749	159.498.633.816	863.934.091.933	1.293.930	986.928.922.752	46.012.834.684		46.012.834.684	940.916.088.068	986.928.922.752
	4	RSUP Dr.Hasan Sadikin, Bandung	169.792.774.562		1.248.053.530.693	394.779.390.484	853.274.140.209	2.635.923.434	1.025.702.838.205	20.518.292.277		20.518.292.277	1.005.184.545.928	1.025.702.838.205
	5	RSUP H.Adam Malik, Medan	202.914.124.661		729.869.766.439	262.728.438.991	467.141.327.448	1.376.931.649	671.432.383.758	130.705.431.196		130.705.431.196	540.726.952.562	671.432.383.758
	6	RSUP Dr.Kariadi, Semarang	231.976.704.676		1.472.064.020.721	364.171.599.997	1.107.892.420.724	27.630.746	1.339.896.756.146	3.684.665.642		3.684.665.642	1.336.212.090.504	1.339.896.756.146
	7	RSUP Dr.Sardjito, Yogyakarta	225.610.709.886		830.349.814.702	469.596.478.932	360.753.335.770	2.270.599.853	588.634.645.509	84.939.252.790		84.939.252.790	503.695.392.719	588.634.645.509
	8	RSUP Sanglah, Denpasar	79.655.510.805		784.877.467.415	283.834.459.482	501.043.007.933	369.708.546	581.068.227.284	59.850.993.625		59.850.993.625	521.217.233.659	581.068.227.284
	9	RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo, Makassar	198.578.009.063	-	722.820.797.160	280.908.704.307	441.912.092.853	1.207.314.855	641.697.416.771	46.466.855.475		46.466.855.475	595.230.561.296	641.697.416.771
	10	RSUP Dr.M.Djamil, Padang	56.469.313.519		727.574.005.130	264.200.564.661	463.373.440.469	1.806.101.225	521.648.855.213	42.895.855.977		42.895.855.977	478.752.999.236	521.648.855.213
	11	RSUP Dr.Mohammad Hoesin, Palembang	70.428.939.242		1.241.647.692.348	245.248.505.560	996.399.186.788	339.767.635	1.067.167.893.665	44.468.653.918		44.468.653.918	1.022.699.239.747	1.067.167.893.665
	12	RSUP Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	53.150.795.223		778.348.008.583	134.383.920.122	643.964.088.461	1.190.218.500	698.305.102.184	32.527.774.756		32.527.774.756	665.777.327.428	698.305.102.184
	13	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	91.314.184.123		301.910.536.039	121.139.016.023	180.771.520.016	214.888.064	272.300.592.203	5.431.475.863		5.431.475.863	266.869.116.340	272.300.592.203
	14	RSAB Harapan Kita	60.719.972.308		1.348.752.736.358	202.818.273.505	1.145.934.462.853	932.070.500	1.207.586.505.661	9.691.040.688		9.691.040.688	1.197.895.464.973	1.207.586.505.661
	15	RSJPD Harapan Kita	197.235.400.436		579.533.420.824	377.931.718.112	201.601.702.712	10.790.806.650	409.627.909.798	30.379.733.671		30.379.733.671	379.248.176.127	409.627.909.798
	16	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	11.920.923.072		141.039.770.933	42.140.421.678	98.899.349.255	1.831.338.118	112.651.610.445	61.291.059		61.291.059	112.590.319.386	112.651.610.445
	17	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu	18.918.640.138		245.582.093.345	35.656.170.701	209.925.922.644	46.348.340	228.890.911.122	531.403.229		531.403.229	228.359.507.893	228.890.911.122
	18	RS Paru Dr.M.Goenawan P. Cisarua	18.035.879.728		114.243.160.152	43.857.393.296	70.385.766.856	362.618.382	88.784.264.966	499.842.928		499.842.928	88.284.422.038	88.784.264.966
	19	RSJ DR.Radjiman W. Lawang	41.983.897.810		208.189.387.116	88.415.603.996	119.773.783.120	155.844.350	161.913.525.280	230.086.657		230.086.657	161.683.438.623	161.913.525.280
	20	RSJ Dr.Soeharto Herdjan	36.753.717.506		393.119.162.498	39.989.452.320	353.129.710.178	370.153.500	390.253.581.184	1.336.955.352		1.336.955.352	388.916.625.832	390.253.581.184
	21	RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang	30.547.080.502		690.892.842.248	42.772.101.339	648.120.740.909	923.908.084	679.591.729.495	1.855.190.724		1.855.190.724	677.736.538.771	679.591.729.495
	22	RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makasar	3.317.765.997		142.240.009.273	29.866.118.239	112.373.891.034	226.530.000	115.918.187.031	618.674.434		618.674.434	115.299.512.597	115.918.187.031
	23	RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	21.287.223.857		226.929.381.431	110.622.214.274	116.307.167.157	438.432.688	138.032.823.702	2.350.728.855		2.350.728.855	135.682.094.847	138.032.823.702
	24	RS Mata Cicendo Bandung	59.469.395.190		225.557.033.506	88.226.430.900	137.330.602.606	0	196.799.997.796	117.008.266		117.008.266	196.682.989.530	196.799.997.796
	25	RS Stroke Nasional Bukittinggi	8.359.791.376		163.317.648.143	41.615.380.281	121.702.267.862	1.098.952.419	131.161.011.657	178.703.346		178.703.346	130.982.308.311	131.161.011.657
	26	RS Kusta Dr. Sitanala	28.236.793.687		441.001.884.835	46.271.986.353	394.729.898.482	477.449.577	423.444.141.746	520.688.226		520.688.226	422.923.453.520	423.444.141.746
	27	RS Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso	87.482.398.333		446.946.550.177	110.992.305.475	335.954.244.702	186.306.456	423.622.949.491	2.014.704.149		2.014.704.149	421.608.245.342	423.622.949.491
	28	RS Kanker Dharmais	95.308.854.173		1.195.349.531.811	229.884.216.149	965.465.315.662	41.836.689	1.060.816.006.524	36.612.258.776		36.612.258.776	1.024.203.747.748	1.060.816.006.524
	29	RS Kusta Palembang	12.921.104.381		57.539.047.250	25.632.259.348	31.906.787.902	1.136.818.339	45.964.710.622	18.516.859		18.516.859	45.946.193.763	45.964.710.622
	30	RS Ketergantungan Obat Jakarta	7.233.820.300		60.027.406.721	31.695.681.155	28.331.725.566	72.600.000	35.638.145.866	60.366.109		60.366.109	35.577.779.757	35.638.145.866
	31	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	38.329.430.845		531.984.251.897	64.797.039.061	467.187.212.836	331.701.808	505.848.345.489	318.653.181		318.653.181	505.529.692.308	505.848.345.489
	32	Politeknik Kesehatan Jakarta III	4.625.288.877		268.435.724.498	78.664.167.285	189.771.557.213	374.320.000	194.771.166.090	2.012.953.560		2.012.953.560	192.758.212.530	194.771.166.090
	33	Politeknik Kesehatan Bandung	25.044.039.569		426.058.665.275	79.735.298.072	346.323.367.203	360.468.402	371.727.875.174	1.333.948.540		1.333.948.540	370.393.926.634	371.727.875.174
	34	Politeknik Kesehatan Medan	7.406.886.284		131.782.612.858	47.076.133.279	84.706.479.579		92.113.365.863	1.460.010.000		1.460.010.000	90.653.355.863	92.113.365.863
	35	Politeknik Kesehatan Semarang	35.653.150.601		420.848.861.630	157.035.604.676	263.813.256.954	2.903.705.407	302.370.112.962	3.173.489.355		3.173.489.355	299.196.623.607	302.370.112.962
	36	Politeknik Kesehatan Makassar	20.670.221.730		271.425.395.354	69.556.574.808	201.868.820.546	176.213.777	222.715.256.053	1.438.099.407		1.438.099.407	221.277.156.646	222.715.256.053
	37	Politeknik Kesehatan Jakarta II	7.987.255.439		115.679.694.650	47.871.609.178	67.808.085.472	140.316.540	75.935.657.451	184.997.000		184.997.000	75.750.660.451	75.935.657.451
	38	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	14.506.669.101		105.175.562.653	33.727.077.777	71.448.484.876	221.240.053	86.176.394.030	1.585.410.463		1.585.410.463	84.590.983.567	86.176.394.030
	39	Politeknik Kesehatan Surakarta	24.708.504.762		273.289.250.315	39.688.645.961	233.600.604.354	2.007.772.190	260.316.881.306	3.174.886.856		3.174.886.856	257.141.994.450	260.316.881.306
	40	Politeknik Kesehatan Malang	21.514.983.703		98.703.784.427	30.001.007.399	68.702.777.028	342.074.694	90.559.835.425	2.920.023.398		2.920.023.398	87.639.812.027	90.559.835.425
	41	Politeknik Kesehatan Surabaya	15.564.587.571		509.964.392.198	53.467.042.468	456.497.349.730	1.847.947.977	473.909.885.278	3.404.220.697		3.404.220.697	470.505.664.581	473.909.885.278
	42	Politeknik Kesehatan Pontianak	6.368.796.727		107.207.387.582	22.174.111.441	85.033.276.141	449.413.500	91.851.486.368	1.523.583.318		1.523.583.318	90.327.903.050	91.851.486.368
	43	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	2.734.932.441		158.524.188.403	41.283.857.738	117.240.330.665	98.835.000	120.074.098.106	1.164.836.600		1.164.836.600	118.909.261.506	120.074.098.106
	44	Politeknik Kesehatan Bengkulu	10.792.817.382		118.552.912.917	27.667.317.323	90.885.595.594	818.185.535	102.496.598.511	2.753.990.000		2.753.990.000	99.742.608.511	102.496.598.511
	45	Balai Besar Labkes Palembang	1.962.436.387		23.983.072.939	12.589.354.055	11.393.718.884	-	13.356.155.271	943.125		943.125	13.355.212.146	13.356.155.271
	46	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	1.144.466.721		27.500.752.351	12.565.435.415	14.935.316.936	-	16.079.783.657	39.007.789		39.007.789	16.040.775.868	16.079.783.657
	47	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	2.916.084.321		35.325.430.130	12.448.848.247	22.876.581.883		25.792.666.204	34.029.446		34.029.446	25.758.636.758	25.792.666.204
	48	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	5.584.300.372		27.243.100.864	16.680.976.600	10.562.124.264	977.651.393	17.124.076.029			-	17.124.076.029	17.124.076.029
	49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	6.801.916.713		53.617.013.587	14.247.901.491	39.369.112.096	5.020.739	46.176.049.548	40.553.723		40.553.723	46.135.495.825	46.176.049.548
	50	Balai Besar Kesehatan Mata Masy Makasar	4.943.149.640		23.541.892.751	9.103.621.532	14.438.271.219	3.335.326.455	22.716.747.314	-		-	22.716.747.314	22.716.747.314
	51	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	6.454.821.426		59.194.338.379	10.721.728.232	48.472.610.147	826.259.105	55.753.690.678	215.054.950		215.054.950	55.538.635.728	55.753.690.678
	52	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	1.569.894.055		54.909.669.983	10.643.638.940	44.266.031.043	1.210.000	45.837.135.098	68.622.524		68.622.524	45.768.512.574	45.837.135.098
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	**40.806.043.147**	-	**835.055.844.500**	**83.726.475.223**	**751.329.369.277**	**2.559.644.241**	**794.695.056.665**	**2.769.518.471**	-	**2.769.518.471**	**791.925.538.194**	**794.695.056.665**
	1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	40.806.043.147		835.055.844.500	83.726.475.223	751.329.369.277	2.559.644.241	794.695.056.665	2.769.518.471		2.769.518.471	791.925.538.194	794.695.056.665
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	**43.966.605.122**	-	**756.359.760.413**	**62.669.823.596**	**693.689.936.817**	**693.181.397**	**738.349.723.336**	**168.938.424**	-	**168.938.424**	**738.180.784.912**	**738.349.723.336**
	1	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	5.596.574.509		681.359.117.051	44.979.529.738	636.379.587.313	522.021.887	642.498.183.709	149.208.159		149.208.159	642.348.975.550	642.498.183.709
	2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang	38.370.030.613		75.000.643.362	17.690.293.858	57.310.349.504	171.159.510	95.851.539.627	19.730.265		19.730.265	95.831.809.362	95.851.539.627
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	**51.827.506.791**	-	**451.021.365.673**	**178.315.016.785**	**272.706.348.888**	**472.912.293**	**325.006.767.972**	**1.226.454.736**	-	**1.226.454.736**	**323.780.313.236**	**325.006.767.972**
	1	Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	6.212.758.130		67.364.259.799	19.506.562.260	47.857.697.539	180.193.000	54.250.648.669	58.984.902		58.984.902	54.191.663.767	54.250.648.669
	2	Balai Besar Industri Agro	21.275.114.394		116.522.724.454	40.379.007.914	76.143.716.540		97.418.830.934	619.782.691		619.782.691	96.799.048.243	97.418.830.934
	3	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	20.063.655.954		195.934.225.725	92.352.131.359	103.582.094.366	243.805.643	123.889.555.963	374.194.267		374.194.267	123.515.361.696	123.889.555.963
	4	Balai Riset dan Standardisasi Bandar Lampung	1.268.848.149		24.162.896.456	11.128.005.344	13.034.891.112		14.303.539.261			-	14.303.539.261	14.303.539.261
	5	Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri	3.007.330.164		47.037.259.239	14.949.309.908	32.087.949.331	48.913.650	35.144.193.145	173.492.876		173.492.876	34.970.700.269	35.144.193.145
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	**7.995.073.525.177**	**93.408.396.060**	**67.280.210.147.461**	**8.660.393.838.007**	**58.619.816.309.454**	**725.402.566.460**	**67.433.700.797.151**	**1.148.208.617.418**	**241.731.045.441**	**1.389.939.662.859**	**66.043.761.134.292**	**67.433.700.797.151**

1	Universitas Diponegoro Semarang	343.622.162.101		2.876.502.951.461	482.455.175.369	2.394.047.776.092	1.258.099.424	2.738.928.037.617	33.568.279.669		33.568.279.669	2.705.359.757.948	2.738.928.037.617
2	Universitas Padjadjaran Bandung	208.503.625.020		2.657.513.255.400	526.045.579.886	2.131.467.675.514	7.997.185.377	2.347.968.485.911	62.409.759.329		62.409.759.329	2.285.558.726.582	2.347.968.485.911
3	Universitas Negeri Malang	220.964.311.382		913.022.962.785	191.532.759.659	721.490.203.126	443.508.424	942.898.022.932	67.904.307.958		67.904.307.958	874.993.714.974	942.898.022.932
4	Universitas Hasanuddin	121.145.592.987		3.593.698.778.951	412.780.148.564	3.180.918.630.387	40.963.689.325	3.343.027.912.699	46.585.401.012	5.126.284.066	51.711.685.078	3.291.316.227.621	3.343.027.912.699
5	Universitas Brawijaya Malang	139.033.854.090		3.890.676.764.044	449.785.775.491	3.440.890.988.553	8.257.293.723	3.588.182.136.366	88.111.186.942		88.111.186.942	3.500.070.949.424	3.588.182.136.366
6	Universitas Negeri Semarang	114.893.004.376		1.160.699.509.754	165.627.505.581	995.072.004.173	2.325.672.277	1.112.290.680.826	529.293.241		529.293.241	1.111.761.387.585	1.112.290.680.826
7	Universitas Negeri Surabaya	112.548.864.764		2.159.946.163.278	272.672.704.059	1.887.273.459.219	30.282.436.552	2.030.104.760.535	52.820.117.490		52.820.117.490	1.977.284.643.045	2.030.104.760.535
8	Universitas Mulawarman Samarinda	131.756.977.633		924.149.237.186	210.743.250.504	713.405.986.682	2.058.704.900	847.221.669.215	67.752.747.678		67.752.747.678	779.468.921.537	847.221.669.215
9	Universitas Sebelas Maret Surakarta	131.640.647.095		2.664.879.799.152	303.830.744.394	2.361.049.054.758	968.026.500	2.493.657.728.353	28.957.629.324		28.957.629.324	2.464.700.099.029	2.493.657.728.353
10	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	125.222.368.932		2.419.876.237.600	343.515.628.544	2.076.360.609.056	6.026.789.623	2.207.609.767.611	64.216.022.733		64.216.022.733	2.143.393.744.878	2.207.609.767.611
11	Universitas Lampung	61.180.074.098		878.207.417.920	46.764.357.599	831.443.060.321	1.834.074.170	894.457.208.589	14.897.526.544		14.897.526.544	879.559.682.045	894.457.208.589
12	Universitas Negeri Yogyakarta	87.946.385.997		2.086.304.801.459	157.118.456.176	1.929.186.345.283	1.960.581.200	2.019.093.312.480	44.731.436.310		44.731.436.310	1.974.361.876.170	2.019.093.312.480
13	Universitas Negeri Gorontalo	4.763.964.277		632.429.476.500	140.044.817.521	492.384.658.979	18.955.037.200	516.103.660.456	3.067.628.061		3.067.628.061	513.036.032.395	516.103.660.456
14	Universitas Bengkulu					-		-			-	-	-
15	Universitas Sriwijaya	187.019.038.856		2.794.238.057.282	409.334.759.814	2.384.903.297.468	5.688.259.552	2.577.610.595.876	51.864.731.775		51.864.731.775	2.525.745.864.101	2.577.610.595.876
16	Universitas Negeri Jakarta	90.320.218.036		2.111.996.357.419	200.379.026.274	1.911.617.331.145	15.725.024.164	2.017.662.573.345	3.519.710.102		3.519.710.102	2.014.142.863.243	2.017.662.573.345
17	Universitas Andalas	87.972.763.414		1.722.357.880.847		1.722.357.880.847	217.074.723.921	2.027.405.368.182	30.868.367.520	8.546.003.225	39.414.370.745	1.987.990.997.437	2.027.405.368.182
18	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	84.572.188.686		2.045.697.728.214	209.188.258.889	1.836.509.469.325	6.451.399.132	1.927.533.057.143	27.086.059.359		27.086.059.359	1.900.446.997.784	1.927.533.057.143
19	Universitas Halueleo	13.201.397.309		1.026.450.513.971	251.475.210.158	774.975.303.813	1554789495	789.731.490.617	250.367.958		250.367.958	789.481.122.659	789.731.490.617
20	Universitas Riau	22.233.069.138		989.375.137.273	144.587.924.473	844.787.212.800	1.384.445.900	868.404.727.838	20.112.209.518		20.112.209.518	848.292.518.320	868.404.727.838
21	Universitas Terbuka	1.159.859.317.755		1.321.563.939.847	367.349.417.585	954.214.522.262	6.279.758.018	2.120.353.598.035	21.077.830.258		21.077.830.258	2.099.275.767.777	2.120.353.598.035
22	Universitas Udayana	41.571.958.588		2.341.451.227.537	273.944.439.153	2.067.506.788.384	8.445.892.888	2.117.524.639.860	26.838.989.938		26.838.989.938	2.090.685.649.922	2.117.524.639.860
23	Universitas Gajah Mada	1.197.176.972.548	3.181.888.939	8.111.301.241.982	12.068.385.437	8.099.232.856.545	937.179.428	9.300.528.897.460	139.196.537.664	73.472.774.217	212.669.311.881	9.087.859.585.579	9.300.528.897.460
24	Universitas Pendidikan Indonesia	100.093.595.917	6.518.536.641	676.518.900.793		676.518.900.793	537.315.800.000	1.320.446.833.351	12.386.440.622	109.872.970	12.496.313.592	1.307.950.519.759	1.320.446.833.351
25	Universitas Airlangga	149.658.706.555	10.599.830.791	1.392.723.413.503	182.780.638.350	1.209.942.775.153	247.788.379.157	1.617.989.691.656	-	40.541.954.784	40.541.954.784	1.577.447.736.872	1.617.989.691.656
26	Universitas Indonesia	1.722.011.210.555	12.104.883.973	7.816.490.635.266	768.492.363.404	7.047.998.271.862	41.097.974.252	8.823.212.340.642	52.005.825.401	72.071.401.236	124.077.226.637	8.699.135.114.005	8.823.212.340.642
27	Universitas Sumatera Utara	441.936.025.854		3.158.084.317.922	331.671.912.517	2.826.412.405.405	1.934.441.195	3.270.282.872.454	25.190.919.402		25.190.919.402	3.245.091.953.052	3.270.282.872.454
28	Institut Teknologi Bandung	596.159.263.929	39.163.230.652	1.430.503.017.912	608.044.314.638	822.458.703.274	25.414.861.095	1.483.196.058.950	52.628.867.132	8.791.882.081	61.420.749.213	1.421.775.309.737	1.483.196.058.950
29	Institut Pertanian Bogor	267.767.591.097	28.358.561.705	1.314.953.605.241	580.126.878.989	734.826.726.252	638.563.230	1.031.591.442.284	74.983.264.054	33.180.745.832	108.164.009.886	923.427.432.398	1.031.591.442.284
30	Universitas Mataram	45.832.430.931		906.646.008.261	178.910.461.888	727.735.546.373	5.090.355.748	778.658.333.052	17.539.055.143,00		17.539.055.143	761.119.277.909,00	778.658.333.052
31	Universitas Tadulako	38.575.240.399		1.020.562.693.978	240.146.429.114	780.416.264.864	14.412.151.500	833.403.656.763	19.344.630.009,00		19.344.630.009	814.059.026.754,00	833.403.656.763
32	Politeknik Negeri Malang	23.889.128.600		731.682.357.665	135.383.554.167	596.298.803.498	1.184.283.590	621.372.215.688	184.563		184.563	621.372.031.125	621.372.215.688
33	Universitas SAT Banten	22.095.170.175	-	186.224.657.851	63.592.959.810	122.631.698.041	968.985.500	145.695.853.716	10.149.731.331		10.149.731.331	135.546.122.385	145.695.853.716
KEMENTERIAN AGAMA (025)		**411.778.209.692**	**1.465.698.724**	**8.026.157.967.556**	**1.345.918.474.340**	**6.680.239.493.216**	**19.022.936.406**	**7.112.506.338.038**	**42.120.267.735**	-	**42.120.267.735**	**7.070.386.070.303**	**7.112.506.338.038**
1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	38.546.271.403		1.083.816.704.975	193.193.060.157	890.623.644.818	6.033.779.400	935.203.695.621	7.528.777.368		7.528.777.368	927.674.918.253	935.203.695.621
2	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	109.167.166.737		1.482.260.255.467	250.813.142.583	1.231.447.112.884	5.515.259.535	1.346.129.539.156	15.609.819.079		15.609.819.079	1.330.519.720.077	1.346.129.539.156
3	UIN Malang	41.560.256.821		19.872.350.438	12.169.920.415	7.702.430.023	-	49.262.686.844	-		-	49.262.686.844	49.262.686.844
4	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	27.644.840.174		507.221.753.890	40.872.901.371	466.348.852.519	15.587.500	494.009.280.193	9.695.412.624		9.695.412.624	484.313.867.569	494.009.280.193
5	UIN Alauddin, Makassar	21.771.142.227		1.201.962.706.459	341.292.090.937	860.670.615.522	2.422.667.300	884.864.425.049	15.444.494		15.444.494	884.848.980.555	884.864.425.049
6	IAIN Sumatera Utara	10.776.689.742	1.465.698.724	345.746.592.066	63.721.848.846	282.024.743.220	-	294.267.131.686	227.137.534		227.137.534	294.039.994.152	294.267.131.686
7	IAIN Walisongo Semarang	20.735.254.069		383.754.230.653	52.265.126.010	331.489.104.643	249.638.552	352.473.997.264	-		-	352.473.997.264	352.473.997.264
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	45.993.703.829		743.660.747.629	124.793.962.012	618.866.785.617	917.822.665	665.778.312.111	1.254.425.033		1.254.425.033	664.523.887.078	665.778.312.111
9	IAIN Sulthan Thoha Saifudin	2.874.953.593		167.910.418.583	40.019.273.964	127.891.144.619	-	130.766.098.212	285.078.081		285.078.081	130.481.020.131	130.766.098.212
10	IAIN Sunan Ampel	25.409.398.477		619.734.351.920	39.959.011.227	579.775.340.693	325.000.000	605.509.739.170	133.736.634		133.736.634	605.376.002.536	605.509.739.170
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	16.796.796.648		197.082.233.749	30.324.579.060	166.757.654.689	870.279.212	184.424.730.549	40.882.166		40.882.166	184.383.848.383	184.424.730.549
9	IAIN Raden Intan Lampung	14.569.475.949		324.804.194.943	39.629.309.966	285.174.884.977	32.070.000	299.776.430.926	41.806.590		41.806.590	299.734.624.336	299.776.430.926
13	IAIN Raden Fatah Palembang	11.237.381.879		298.613.571.760	48.894.386.095	249.719.185.665	52.175.760	261.008.743.304	790.892.200		790.892.200	260.217.851.104	261.008.743.304
14	IAIN Mataram	12.867.172.431		144.339.245.167	23.754.005.256	120.585.239.911	208.313.075	133.660.725.417	3.312.653.420		3.312.653.420	130.348.071.997	133.660.725.417
15	IAIN Ar Raniry Banda Aceh	11.827.705.713		505.378.609.857	44.215.856.441	461.162.753.416	2.380.343.407	475.370.802.536	3.184.202.512		3.184.202.512	472.186.600.024	475.370.802.536
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	-	-	-	-	-	-
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam Negeri, Bandung					-		-			-		-
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi					-		-			-		-
3	Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang					-		-			-		-
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)		**1.311.976.926**	-	**13.044.342.269**	**7.423.377.479**	**5.620.964.790**	**69.217.500**	**7.002.159.216**	**128.328.388**	-	**128.328.388**	**6.873.830.828**	**7.002.159.216**
1	PP IPTEK	1.311.976.926		13.044.342.269	7.423.377.479	5.620.964.790	69.217.500	7.002.159.216	128.328.388		128.328.388	6.873.830.828	7.002.159.216
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)		**37.588.113.959**	-	**639.433.960.174**	**107.024.393.190**	**532.409.566.984**	**9.232.744.761**	**579.230.425.704**	**11.579.273.738**	-	**11.579.273.738**	**567.651.151.966**	**579.230.425.704**
1	Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta	37.588.113.959		639.433.960.174	107.024.393.190	532.409.566.984	9.232.744.761	579.230.425.704	11.579.273.738		11.579.273.738	567.651.151.966	579.230.425.704
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI		**27.146.909.547**	-	**6.504.812.425**	**2.253.587.820**	**4.251.224.605**	**7.259.368.324**	**38.657.502.476**	**10.617.961.444**	-	**10.617.961.444**	**28.039.541.032**	**38.657.502.476**
1	BPPT Enjiniring	27.146.909.547		6.504.812.425	2.253.587.820	4.251.224.605	7.259.368.324	38.657.502.476	10.617.961.444		10.617.961.444	28.039.541.032	38.657.502.476
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)		**108.293.705.979**	-	**505.247.110.613**	**241.204.809.438**	**264.042.301.175**	**852.632.168**	**373.188.639.322**	**14.689.004.797**	-	**14.689.004.797**	**358.499.634.525**	**373.188.639.322**
1	RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta	34.410.865.780		142.562.565.224	86.661.952.931	55.900.612.293	-	90.311.478.073	3.327.759.129		3.327.759.129	86.983.718.944	90.311.478.073
2	RS Bhayangkara Tk.III Kediri	20.438.745.926		40.793.718.475	22.335.108.943	18.458.609.532	126.705.270	39.024.060.728	2.568.156.939	-	2.568.156.939	36.455.903.789	39.024.060.728
3	RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri, Mertojoso,	13.136.230.256		43.880.393.426	40.642.587.534	3.237.805.892	240.839.900	16.614.876.048	2.291.283.914	-	2.291.283.914	14.323.592.134	16.614.876.048
4	RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang, Makassar	9.853.781.984		79.462.192.421	20.685.813.913	58.776.378.508	297.448.600	68.927.609.092	3.376.820.333	-	3.376.820.333	65.550.788.759	68.927.609.092
5	RS Bhayangkara, Semarang	10.405.422.860		34.445.765.248	16.109.466.789	18.336.298.459	82.359.615	28.824.080.934	945.701.699		945.701.699	27.878.379.235	28.824.080.934
6	RS Bhayangkara Tk.III, Palembang	3.740.583.969		47.657.935.392	12.031.395.294	35.626.540.098	64.330.658	39.431.454.725	162.953.180		162.953.180	39.268.501.545	39.431.454.725
7	RS Bhayangkara Bandung	6.169.665.549		69.797.773.363	25.202.494.796	44.595.278.567	-	50.764.944.116	845.100.039		845.100.039	49.919.844.077	50.764.944.116
8	RS Bhayangkara / Lemdikpol STUKPA Sukabumi	2.705.734.959		14.621.889.948	6.810.104.817	7.811.785.131	37.978.125	10.555.498.215	559.240.537		559.240.537	9.996.257.678	10.555.498.215
9	RS Bhayangkara Tk.III, Trijata Polda Bali	3.254.055.947		24.175.158.137	7.538.915.401	16.636.242.736	-	19.890.298.683	124.122.225		124.122.225	19.766.176.458	19.890.298.683
10	RS Bhayangkara Tk.IV, Porong	4.178.618.749		7.849.718.979	3.186.969.020	4.662.749.959	2.970.000	8.844.338.708	487.866.802		487.866.802	8.356.471.906	8.844.338.708
LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)		**2.657.591.169**	-	**1.104.775.214**	-	**1.104.775.214**	**922.155**	**3.763.288.538**	**26.688.539**	-	**26.688.539**	**3.736.599.999**	**3.763.288.538**
1	Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara (FATEKGAN)	2.657.591.169		1.104.775.214		1.104.775.214	922.155	3.763.288.538	26.688.539		26.688.539	3.736.599.999	3.763.288.538

		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	**228.946.251.455**	-	**3.634.879.042.517**	**693.402.257.243**	**2.941.476.785.274**	**70.669.318.398**	**3.241.092.355.127**	**23.740.025.031**	-	**23.740.025.031**	**3.217.352.330.096**	**3.241.092.355.127**
		1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran & Peningkatan Ilmu	82.646.242.681		188.079.754.676	49.016.204.413	139.063.550.263	10.318.068.327	232.027.861.271	15.569.450.000		15.569.450.000	216.458.411.271	232.027.861.271
		2 Politeknik Pelayaran Surabaya	26.343.576.012		622.873.016.318	112.035.488.079	510.837.528.240	790.741.243	537.971.845.495	109.442.524		109.442.524	537.862.402.971	537.971.845.495
		3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	62.238.914.838		944.856.134.992	166.787.491.383	778.068.643.609	39.740.472.288	880.048.030.735	977.241.000		977.241.000	879.070.789.735	880.048.030.735
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	22.447.739.496		515.324.936.483	67.867.843.345	447.457.093.138	17.529.344.990	487.434.177.624	5.220.737.051		5.220.737.051	482.213.440.573	487.434.177.624
		5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	18.765.977.369		630.071.087.060	151.772.676.922	478.298.410.138	462.880.000	497.527.267.507	853.645.456		853.645.456	496.673.622.051	497.527.267.507
		6 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	10.022.843.869		535.079.539.880	101.196.668.155	433.882.871.725		443.905.715.594	988.909.000		988.909.000	442.916.806.594	443.905.715.594
	55	7 Politeknik Keselamatan Tranportasi Jalar	6.480.957.190		198.594.573.107	44.725.884.946	153.868.688.161	1.827.811.550	162.177.456.901	20.600.000		20.600.000	162.156.856.901	162.177.456.901
		KEMENTERIAN ESDM	**47.459.875.475**	-	**2.035.241.719.993**	**1.272.671.262.929**	**762.570.457.064**	**2.432.113.499**	**812.462.446.038**	**(240.865.100)**	-	**(240.865.100)**		**812.462.446.038**
		1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi "LEMIGAS"	47.459.875.475		2.035.241.719.993	1.272.671.262.929	762.570.457.064	2.432.113.499	812.462.446.038	(240.865.100)		(240.865.100)	812.703.311.138	812.462.446.038
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)	**492.125.597.602**	**11.176.289.092.043**	**2.880.865.700**	**1.841.139.354**	**1.039.726.346**	**996.918.456.902**	**12.666.372.872.893**	**991.836.226**	-	**991.836.226**	**12.665.381.036.667**	**12.666.372.872.893**
		1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	492.125.597.602	11.176.289.092.043	2.880.865.700	1.841.139.354	1.039.726.346	996.918.456.902	12.666.372.872.893	991.836.226		991.836.226	12.665.381.036.667	12.666.372.872.893
		TOTAL PER DEPARTEMEN												
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	40.806.043.147	-	835.055.844.500	83.726.475.223	751.329.369.277	2.559.644.241	794.695.056.665	2.769.518.471	-	2.769.518.471	791.925.538.194	794.695.056.665
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	43.966.605.122	-	756.359.760.413	62.669.823.596	693.689.936.817	693.181.397	738.349.723.336	168.938.424	-	168.938.424	738.180.784.912	738.349.723.336
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	51.827.506.791	-	451.021.365.673	178.315.016.785	272.706.348.888	472.912.293	325.006.767.972	1.226.454.736	-	1.226.454.736	323.780.313.236	325.006.767.972
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	2.962.563.079.162	-	24.789.453.480.837	6.375.460.661.338	18.413.992.819.499	53.851.390.830	21.430.407.289.491	671.499.644.898	-	822.912.244.898	20.607.495.044.593	21.430.407.289.491
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	8.095.167.121.094	99.926.932.701	67.956.729.048.254	8.660.393.838.007	59.296.335.210.247	1.262.718.366.460	68.754.147.630.502	1.160.595.058.040	241.840.918.411	1.402.435.976.451	67.351.711.654.051	68.754.147.630.502
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	411.778.209.692	1.465.698.724	8.026.157.967.556	1.345.918.474.340	6.680.239.493.216	19.022.936.406	7.112.506.338.038	42.120.267.735	-	42.120.267.735		7.112.506.338.038
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	1.311.976.926	-	13.044.342.269	7.423.377.479	5.620.964.790	69.217.500	7.002.159.216	128.328.388	-	128.328.388	6.873.830.828	7.002.159.216
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	37.588.113.959	-	639.433.960.174	107.024.393.190	532.409.566.984	9.232.744.761	579.230.425.704	11.579.273.738	-	11.579.273.738	567.651.151.966	579.230.425.704
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	108.293.705.979	-	505.247.110.613	241.204.809.438	264.042.301.175	852.632.168	373.188.639.322	14.689.004.797	-	14.689.004.797	358.499.634.525	373.188.639.322
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	27.146.909.547	-	6.504.812.425	2.253.587.820	4.251.224.605	7.259.368.324	38.657.502.476	10.617.961.444	-	10.617.961.444	28.039.541.032	38.657.502.476
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	2.657.591.169	-	1.104.775.214	-	1.104.775.214	922.155	3.763.288.538	26.688.539	-	26.688.539	3.736.599.999	3.763.288.538
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	228.946.251.455	-	3.634.879.042.517	693.402.257.243	2.941.476.785.274	70.669.318.398	3.241.092.355.127	23.740.025.031	-	23.740.025.031	3.217.352.330.096	3.241.092.355.127
		KEMENTERIAN ESDM	47.459.875.475	0	2.035.241.719.993	1.272.671.262.929	762.570.457.064	2.432.113.499	812.462.446.038	(240.865.100)	-	(240.865.100)	812.703.311.138	812.462.446.038
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	492.125.597.602	11.176.289.092.043	2.880.865.700	1.841.139.354	1.039.726.346	996.918.456.902	12.666.372.872.893	991.836.226	-	991.836.226	12.665.381.036.667	12.666.372.872.893
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN	**12.551.638.587.120**	**11.277.681.723.468**	**109.653.114.096.138**	**19.032.305.116.742**	**90.620.808.979.396**	**2.426.753.205.334**	**116.876.882.495.318**	**1.939.912.135.367**	**241.840.918.411**	**2.333.165.653.778**	**107.473.330.771.237**	**116.876.882.495.318**
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	**SEKRETARIAT NEGARA (007)**	**899.722.550.484**	**6.637.194.500**	**74.755.804.276.718**	**391.986.424.070**	**74.363.817.852.648**	**6.879.115.250**	**75.277.056.712.882**	**110.294.648.114**	-	**110.294.648.114**	**75.166.762.064.768**	**75.277.056.712.882**
		1 Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta	172.228.257.645	6.637.194.500	50.208.425.353.620	257.148.408.438	49.951.276.945.182	6.595.978.750	50.136.738.376.077	49.366.937.581		49.366.937.581	50.087.371.438.496	50.136.738.376.077
		2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	727.494.292.839		24.547.378.923.098	134.838.015.632	24.412.540.907.466	283.136.500	25.140.318.336.805	60.927.710.533		60.927.710.533	25.079.390.626.272	25.140.318.336.805
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	**1.098.363.085.189**	**0**	**15.053.939.147.802**	**4.849.581.152.573**	**10.204.357.995.229**	**26.557.799.924**	**11.329.278.880.342**	**104.458.728.153**	**385.284.961.596**	**489.743.689.749**	**10.839.535.190.593**	**1,13293E+13**
		1 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.098.363.085.189		15.053.939.147.802	4.849.581.152.573	10.204.357.995.229	26.557.799.924	11.329.278.880.342	104.458.728.153	385.284.961.596	489.743.689.749	10.839.535.190.593	11.329.278.880.342
		Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang							-			-		-
		TOTAL PER DEPARTEMEN												
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	899.722.550.484	6.637.194.500	74.755.804.276.718	391.986.424.070	74.363.817.852.648	6.879.115.250	75.277.056.712.882	110.294.648.114	-	110.294.648.114	75.166.762.064.768	75.277.056.712.882
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas	1.098.363.085.189	-	15.053.939.147.802	4.849.581.152.573	10.204.357.995.229	26.557.799.924	11.329.278.880.342	104.458.728.153	385.284.961.596	489.743.689.749	10.839.535.190.593	11.329.278.880.342
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH /	**1.998.085.635.673**	**6.637.194.500**	**89.809.743.424.520**	**5.241.567.576.643**	**84.568.175.847.877**	**33.436.915.174**	**86.606.335.593.224**	**214.753.376.267**	**385.284.961.596**	**600.038.337.863**	**86.006.297.255.361**	**86.606.335.593.224**
3	Pengelolaan Dana Khusus	**KEMENTERIAN KEUANGAN (015)**	**13.029.761.218.171**	**8.106.030.184.366**	**21.175.876.110**	**7.634.875.307**	**13.541.000.803**	**15.618.205.608.350**	**36.767.538.011.690**	**90.791.912**	-	**90.791.912**	**36.767.447.219.778**	**36.767.538.011.690**
		1 Pusat Investasi Pemerintah	11.758.367.953.876	8.106.030.184.366	12.735.418.215	6.508.529.341	6.226.888.874	505.608.350	19.871.130.635.466	90.791.912		90.791.912	19.871.039.843.554	19.871.130.635.466
		2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP	1.271.393.264.295	-	8.440.457.895	1.126.345.966	7.314.111.929	15.617.700.000.000	16.896.407.376.224			-	16.896.407.376.224	16.896.407.376.224
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	2.230.328.653.429	-	4.028.938.350	1.587.884.927	2.441.053.423		2.232.979.987.767			2.432.959		2.232.979.987.767
		1 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutar	2.230.328.653.429	-	4.028.938.350	1.587.884.927	2.441.053.423	210.280.915	2.232.979.987.767	2.432.959		2.432.959	2.232.977.554.808	2.232.979.987.767
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	**1.093.181.010.976**	-	**4.318.303.132**	**1.571.015.105**	**2.747.288.027**	**7.050.552.741.634**	**8.146.481.040.637**	-	-	-	**8.146.481.040.637**	**8.146.481.040.637**
		1 BID. PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR	1.093.181.010.976		4.318.303.132	1.571.015.105	2.747.288.027	7.050.552.741.634	8.146.481.040.637			-	8.146.481.040.637	8.146.481.040.637
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	**5.007.730.065.190**	**827.616.346.565**	**52.412.431.556**	**26.049.518.049**	**26.362.913.507**	**790.583.750**	**5.862.499.909.012**	**23.626.230.032**	-	**23.626.230.032**	**5.838.873.678.980**	**5.862.499.909.012**
		1 BP3TI	5.007.730.065.190	827.616.346.565	52.412.431.556	26.049.518.049	26.362.913.507	790.583.750	5.862.499.909.012	23.626.230.032		23.626.230.032	5.838.873.678.980	5.862.499.909.012
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	**372.890.358.579**	-	**17.500.400.055**	**8.479.836.522**	**9.020.563.533**	**3.474.071.523.162**	**3.855.982.445.274**	-	-	-	**3.855.982.445.274**	**3.855.982.445.274**
		1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	372.890.358.579		17.500.400.055	8.479.836.522	9.020.563.533	3.474.071.523.162	3.855.982.445.274			-	3.855.982.445.274	3.855.982.445.274
		TOTAL PER DEPARTEMEN												
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	13.029.761.218.171	8.106.030.184.366	21.175.876.110	7.634.875.307	13.541.000.803	15.618.205.608.350	36.767.538.011.690	90.791.912	-	90.791.912	36.767.447.219.778	36.767.538.011.690
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	2.230.328.653.429	0	4028938350	1587884927	2441053423	0	2.232.979.987.767	0	0	2432959	-	2.232.979.987.767
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	1.093.181.010.976	-	4.318.303.132	1.571.015.105	2.747.288.027	7.050.552.741.634	8.146.481.040.637	-	-	-	8.146.481.040.637	8.146.481.040.637
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	372.890.358.579	-	17.500.400.055	8.479.836.522	9.020.563.533	3.474.071.523.162	3.855.982.445.274	-	-	-	3.855.982.445.274	3.855.982.445.274
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	5.007.730.065.190	827.616.346.565	52.412.431.556	26.049.518.049	26.362.913.507	790.583.750	5.862.499.909.012	23.626.230.032	-	23.626.230.032	5.838.873.678.980	5.862.499.909.012
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA	**21.733.891.306.345**	**8.933.646.530.931**	**99.435.949.203**	**45.323.129.910**	**54.112.819.293**	**26.143.620.456.896**	**56.865.481.394.380**	**23.717.021.944**	-	**23.719.454.903**	**54.608.784.384.669**	**56.865.481.394.380**
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	**36.283.615.529.138**	**20.217.965.448.899**	**199.562.293.469.861**	**24.319.195.823.295**	**175.243.097.646.566**	**28.603.810.577.404**	**260.348.699.482.922**	**2.178.382.533.578**	**627.125.880.007**	**2.956.923.446.544**	**248.088.412.411.267**	**260.348.699.482.922**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
UNAUDITED TAHUN 2013
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
1	Penyediaan Barang	**KEMENTERIAN KESEHATAN (024)**													
	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	811.207.778.529	931.209.148	442.199.289.677	31.723.284.623	1.286.061.561.977	1.279.531.007.147	6.530.554.830		6.530.554.830		6.530.554.830		6.530.554.830
	2	RSUP Fatmawati, Jakarta	388.162.544.857	1.049.941.355	162.104.725.082	8.181.156.778	559.498.368.072	513.442.329.483	46.056.038.589		46.056.038.589		46.056.038.589		46.056.038.589
	3	RSUP Persahabatan, Jakarta	212.390.358.803		109.501.963.191	50.774.941.974	372.667.263.968	494.644.479.037	(121.977.215.069)	(2.604.788.828)	(124.582.003.897)		(124.582.003.897)		(124.582.003.897)
	4	RSUP Dr.Hasan Sadikin, Bandung	395.695.061.147		289.125.960.471	12.295.275.852	697.116.297.470	587.841.607.295	109.274.690.175	24.675.167.394	133.949.857.569		133.949.857.569		133.949.857.569
	5	RSUP H.Adam Malik, Medan	609.237.417.614	536.480.000	161.137.064.531	18.850.973.905	789.761.936.050	724.393.347.295	65.368.588.755		65.368.588.755		65.368.588.755		65.368.588.755
	6	RSUP Dr.Kariadi, Semarang	470.322.518.011		151.617.240.886	14.256.358.064	636.196.116.961	577.280.842.416	58.915.274.545		58.915.274.545		58.915.274.545		58.915.274.545
	7	RSUP Dr.Sardjito, Yogyakarta	448.506.810.385	5.366.603.000	178.500.901.536	14.355.039.344	646.729.354.265	556.054.444.969	90.674.909.296		90.674.909.296		90.674.909.296		90.674.909.296
	8	RSUP Sanglah, Denpasar	320.666.320.492		154.195.855.650	22.827.899.534	497.690.075.676	494.721.289.287	2.968.786.389		2.968.786.389		2.968.786.389		2.968.786.389
	9	RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo, Makassar	375.015.062.198	3.449.747.534	157.642.923.373	14.346.092.013	550.453.825.118	557.703.078.733	(7.249.253.615)	(419.354.100)	(7.668.607.715)		(7.668.607.715)		(7.668.607.715)
	10	RSUP Dr.M.Djamil, Padang	170.465.599.534	74.369.942.330	188.992.208.750	6.698.892.292	440.526.642.906	305.158.983.405	135.367.659.501	107.374.967	135.475.034.468		135.475.034.468		135.475.034.468
	11	RSUP Dr.Mohammad Hoesin, Palembang	339.895.495.514		99.611.283.406	5.120.404.299	444.627.183.219	467.629.235.181	(23.002.051.962)	167.605.435	(22.834.446.527)		(22.834.446.527)		(22.834.446.527)
	12	RSUP Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	119.935.633.257		175.323.770.048	2.893.417.175	298.152.820.480	226.912.474.787	71.240.345.693		71.240.345.693		71.240.345.693		71.240.345.693
	13	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	73.518.721.421	199.962.056	65.050.157.395	50.231.576.805	189.000.417.677	180.807.129.762	8.193.287.915		8.193.287.915		8.193.287.915		8.193.287.915
	14	RSAB Harapan Kita	163.380.287.088		98.761.679.846	8.547.382.558	270.689.349.492	341.076.117.480	(70.386.767.988)		(70.386.767.988)		(70.386.767.988)		(70.386.767.988)
	15	RSJPD Harapan Kita	588.757.233.819		82.838.120.640	4.442.870.166	676.038.224.625	697.459.999.768	(21.421.775.143)		(21.421.775.143)		(21.421.775.143)		(21.421.775.143)
	16	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	27.092.710.410		38.038.262.771	622.676.431	65.753.649.612	54.942.699.137	10.810.950.475		10.810.950.475		10.810.950.475		10.810.950.475
	17	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu	22.197.456.055		22.456.207.353	265.474.081	44.919.137.489	46.842.020.147	(1.922.882.658)		(1.922.882.658)		(1.922.882.658)		(1.922.882.658)
	18	RS Paru Dr.M.Goenawan P. Cisarua	33.512.287.823	285.000.000	36.503.793.225	373.211.498	70.674.292.546	67.673.057.968	3.001.234.578		3.001.234.578		3.001.234.578		3.001.234.578
	19	RSJ DR.Radjiman W. Lawang	41.315.664.778	242.985.800	65.866.123.525	1.095.526.921	108.520.281.024	93.049.230.435	15.471.050.589		15.471.050.589		15.471.050.589		15.471.050.589
	20	RSJ Dr.Soeharto Herdjan	31.568.661.966	-	43.414.735.665	1.581.916.081	76.565.313.712	71.043.707.444	5.521.606.268		5.521.606.268		5.521.606.268		5.521.606.268
	21	RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang	54.811.181.422	92.545.600	71.283.877.344	571.411.854	126.759.016.220	102.553.238.888	24.205.777.332		24.205.777.332		24.205.777.332		24.205.777.332
	22	RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makasar	8.281.387.156	878.755.450	57.554.530.182	15.408.337	66.730.081.125	41.550.585.211	25.179.495.914		25.179.495.914		25.179.495.914		25.179.495.914
	23	RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	31.859.983.021		78.222.193.947	3.331.426.798	113.413.603.766	125.458.429.046	(12.044.825.280)		(12.044.825.280)		(12.044.825.280)		(12.044.825.280)
	24	RS Mata Cicendo Bandung	90.728.894.359	650.000.000	39.522.205.088		130.901.099.447	120.239.063.901	10.662.035.546		10.662.035.546		10.662.035.546		10.662.035.546
	25	RS Stroke Nasional Bukittinggi	36.381.738.897	304.750.000	72.236.057.414	462.451.495	109.384.997.806	71.049.726.999	38.335.270.807		38.335.270.807		38.335.270.807		38.335.270.807
	26	RS Kusta Dr. Sitanala	38.601.563.249	-	66.410.359.007	206.738.986	105.218.661.242	85.533.839.654	19.684.821.588		19.684.821.588		19.684.821.588		19.684.821.588
	27	RS Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso	119.865.799.657	1.750.000	53.047.560.954	-	172.915.110.611	149.556.797.475	23.358.313.136		23.358.313.136		23.358.313.136		23.358.313.136
	28	RS Kanker Dharmais	416.164.520.171		103.855.791.369	395.109.494	520.415.421.034	503.869.352.325	16.546.068.709		16.546.068.709		16.546.068.709		16.546.068.709
	29	RS Kusta Palembang	15.378.428.505		28.131.470.010		43.509.898.515	40.905.593.111	2.604.305.404		2.604.305.404		2.604.305.404		2.604.305.404
	30	RS Ketergantungan Obat Jakarta	9.766.212.555		32.419.770.417	251.832.000	42.437.814.972	41.524.447.924	913.367.048		913.367.048		913.367.048		913.367.048
	31	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	85.408.934.293		61.923.917.250	653.807.908	147.986.659.451	136.823.225.457	11.163.433.994		11.163.433.994		11.163.433.994		11.163.433.994
	32	Politeknik Kesehatan Jakarta III	17.049.172.356		50.149.379.590	26.069.405	67.224.621.351	58.477.403.092	8.747.218.259		8.747.218.259		8.747.218.259		8.747.218.259
	33	Politeknik Kesehatan Bandung	20.416.317.181	100.000.000	60.445.213.586	955.668.946	81.917.199.713	119.254.741.376	(37.337.541.663)		(37.337.541.663)		(37.337.541.663)		(37.337.541.663)
	34	Politeknik Kesehatan Medan	19.613.461.667		45.339.493.626	278.175.746	65.231.131.039	89.059.183.287	(23.828.052.248)		(23.828.052.248)		(23.828.052.248)		(23.828.052.248)
	35	Politeknik Kesehatan Semarang	43.045.244.663		96.897.784.928	52.156.388	139.995.185.979	85.585.925.258	54.409.260.721		54.409.260.721		54.409.260.721		54.409.260.721
	36	Politeknik Kesehatan Makassar	16.781.004.000	351.745.500	56.509.549.935	451.211.850	74.093.511.285	101.561.739.947	(27.468.228.662)		(27.468.228.662)		(27.468.228.662)		(27.468.228.662)
	37	Politeknik Kesehatan Jakarta II	13.438.619.963		32.499.331.469	797.244.586	46.735.196.018	53.120.623.951	(6.385.427.933)		(6.385.427.933)		(6.385.427.933)		(6.385.427.933)
	38	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	13.179.113.285		343.840.736.976	616.585.005	357.636.435.266	47.413.174.764	310.223.260.502		310.223.260.502		310.223.260.502		310.223.260.502
	39	Politeknik Kesehatan Surakarta	20.054.177.000		43.671.788.353	873.888.672	84.599.854.025	81.226.662.020	3.373.192.005		3.373.192.005		3.373.192.005		3.373.192.005
	40	Politeknik Kesehatan Malang	24.957.326.002		36.433.154.389	343.742.979	61.734.223.370	77.003.100.649	(15.268.877.279)		(15.268.877.279)		(15.268.877.279)		(15.268.877.279)
	41	Politeknik Kesehatan Surabaya	28.092.540.170		53.198.572.797	2.891.373.984	84.182.486.951	78.605.609.390	5.576.877.561		5.576.877.561		5.576.877.561		5.576.877.561
	42	Politeknik Kesehatan Pontianak	18.734.618.510		39.246.153.401		57.980.771.911	31.607.808.941	26.372.962.970		26.372.962.970		26.372.962.970		26.372.962.970
	43	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	12.017.942.881		39.285.304.400	3.762.660	51.307.009.941	43.967.917.207	7.339.092.734		7.339.092.734		7.339.092.734		7.339.092.734
	44	Politeknik Kesehatan Bengkulu	10.849.001.997		12.590.414.468	467.145.092	23.906.561.557	15.674.661.568	8.231.899.989		8.231.899.989		8.231.899.989		8.231.899.989
	45	Balai Besar Labkes Palembang	5.280.078.304		14.667.008.804	26.069.405	19.973.156.513	20.572.968.483	(599.811.970)	(3.073.456)	(602.885.426)		(602.885.426)		(602.885.426)
	46	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	2.291.846.525		17.443.076.622	-	19.734.923.147	22.009.464.222	(2.274.541.075)	(278.400)	(2.274.819.475)		(2.274.819.475)		(2.274.819.475)
	47	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	2.674.796.040		17.124.031.831	57.078.162	19.855.906.033	12.935.090.708	6.920.815.325		6.920.815.325		6.920.815.325		6.920.815.325
	48	Balai Besar Laboratorium Kesehatan	5.948.470.526		16.266.582.666	-	22.215.053.192	20.447.340.578	1.767.712.614	-	1.767.712.614		1.767.712.614		1.767.712.614
	49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	4.614.498.790	6.282.900	17.859.230.079	561.585.733	23.041.597.502	21.921.565.541	1.120.031.961	(359.315.298)	760.716.663		760.716.663		760.716.663
	50	Balai Besar Kesehatan Mata Masy Makasar	11.523.121.364		16.083.546.497	43.900.149	27.650.568.010	19.303.109.257	8.347.458.753	(5.228.389.900)	3.119.068.853		3.119.068.853		3.119.068.853
	51	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	4.595.850.516		36.242.745.147	48.026.057	40.886.621.720	17.629.241.291	23.257.380.429	2.677.641.685	25.935.022.114		25.935.022.114		25.935.022.114
	52	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	3.585.677.613		23.172.805.709	225.654.037	26.984.137.359	19.452.595.832	7.531.541.527	(566.953.650)	6.964.587.877		6.964.587.877		6.964.587.877
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									-				
	1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),	26.719.723.438	4.696.239.608	76.045.101.100	886.163.288	108.347.227.434	96.246.023.089	12.101.204.345		12.101.204.345		12.101.204.345	(6.415.373.210)	18.516.577.555
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)													
	1	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	8.085.520.623	74.625.000	26.711.872.355	699.409.161	35.571.427.139	46.461.580.411	(10.890.153.272)		(10.890.153.272)		(10.890.153.272)		(10.890.153.272)
	2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	9.352.117.600	74.625.000	20.494.534.038	104.504.870	30.025.781.508	27.689.031.915	2.336.749.593		2.336.749.593		2.336.749.593		2.336.749.593
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)													
	1	Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	7.320.429.808		25.909.989.795	81.934.120	33.312.353.723	17.314.704.553	15.997.649.170		15.997.649.170		15.997.649.170		15.997.649.170
	2	Balai Besar Industri Agro	22.274.924.330		16.232.918.927	411.511.378	38.919.354.635	36.005.694.956	2.913.659.679		2.913.659.679		2.913.659.679		2.913.659.679
	3	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	23.122.724.786		17.477.138.778	48.884.278	40.648.747.842	53.005.995.621	(12.357.247.779)	(44.571.949)	(12.401.819.728)		(12.401.819.728)	10.566.248	(12.412.385.976)
	4	Balai Riset dan Standardisasi Bandar	3.750.048.795		6.505.297.788	14.019.250	10.269.365.833	9.908.694.467	360.671.366	28.482.961	389.154.327		389.154.327	6.053.250	383.101.077
	5	Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran	9.123.352.731		12.474.280.592	45.794.418	21.643.427.741	20.685.427.702	958.000.039		958.000.039		958.000.039	8.155.544	949.844.495
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)													
	1	Universitas Diponegoro Semarang	260.611.160.179	8.326.816.520	330.479.088.385	28.686.895.230	628.103.960.314	711.074.950.265	(82.970.989.951)		(82.970.989.951)		(82.970.989.951)		(82.970.989.951)
	2	Universitas Padjadjaran Bandung	542.617.889.156	88.403.897.806	486.488.432.495	16.779.258.956	1.134.289.478.413	921.481.424.686	212.808.053.727		212.808.053.727		212.808.053.727		212.808.053.727
	3	Universitas Negeri Malang	130.606.853.850		242.887.364.246	207.367.033.463	580.861.251.559	492.726.999.713	88.134.251.846		88.134.251.846		88.134.251.846		88.134.251.846
	4	Universitas Hasanuddin	213.814.418.488	7.477.842.590	446.455.454.403	237.084.253.635	904.831.969.116	1.152.363.616.548	(247.531.647.432)		(247.531.647.432)		(247.531.647.432)		(247.531.647.432)
	5	Universitas Brawijaya Malang	506.589.465.681	564.043.500	426.213.664.324	136.782.137.633	1.070.149.311.138	1.016.559.683.294	53.589.627.844	830.703.636	54.420.331.480		54.420.331.480		54.420.331.480
	6	Universitas Negeri Semarang	131.386.922.372	37.500.000	267.108.746.705	7.440.070.400	405.973.239.477	450.001.107.189	(44.027.867.712)	(1.063.498.263)	(45.091.365.975)		(45.091.365.975)		(45.091.365.975)
	7	Universitas Negeri Surabaya	126.374.578.000		272.178.793.202	54.168.611.754	452.721.982.956	548.443.870.273	(95.721.887.317)	(31.834.959.872)	(127.556.847.189)		(127.556.847.189)		(127.556.847.189)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
		8 Universitas Mulawarman Samarinda	137.908.123.297	30.576.440.547	185.741.868.055	6.556.265.040	360.782.696.939	298.221.883.723	62.560.813.216		62.560.813.216		62.560.813.216		62.560.813.216
		9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	211.696.182.210	3.160.139.525	301.116.449.408	16.733.691.142	532.706.462.285	467.757.614.231	64.948.848.054		64.948.848.054		64.948.848.054		64.948.848.054
		10 Institut Teknologi Sepuluh Nopember	141.978.133.373		228.352.360.117	122.878.627.277	493.209.120.767	495.657.363.858	(2.448.243.091)		(2.448.243.091)		(2.448.243.091)		(2.448.243.091)
		11 Universitas Lampung	107.764.743.464		251.545.427.897	24.665.406.933	383.975.578.294	288.734.423.033	95.241.155.261		95.241.155.261		95.241.155.261		95.241.155.261
		12 Universitas Negeri Yogyakarta	146.419.676.616	816.000.000	222.739.844.856	13.504.854.252	383.480.375.724	375.020.267.126	8.460.108.598		8.460.108.598		8.460.108.598		8.460.108.598
		13 Universitas Negeri Gorontalo	44.972.878.921	827.377.000	161.471.473.430	469.611.809	207.741.341.160	172.931.619.704	34.809.721.456		34.809.721.456		34.809.721.456		34.809.721.456
		14 Universitas Bengkulu					-	-	-		-		-		-
		15 Universitas Sriwijaya	178.296.497.750	4.521.870.000	218.340.886.555	40.079.209.739	441.238.464.044	462.232.336.496	(20.993.872.452)	(30.155.724.200)	(51.149.596.652)		(51.149.596.652)		(51.149.596.652)
		16 Universitas Negeri Jakarta	244.408.327.429	30.047.306.606	276.248.899.446	12.219.950.488	562.924.483.969	643.141.975.823	(80.217.491.854)		(80.217.491.854)		(80.217.491.854)		(80.217.491.854)
		17 Universitas Andalas	146.567.384.207	900.000.000	262.392.313.987	2.717.573.740	412.577.271.934	339.800.206.711	72.777.065.223	570.958.552	73.348.023.775		73.348.023.775		73.348.023.775
		18 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	84.375.319.226	3.209.256.042	267.455.790.683	3.451.423.033	358.491.788.984	378.280.077.538	(19.788.288.554)		(19.788.288.554)		(19.788.288.554)		(19.788.288.554)
		19 Universitas Halueleo	78.969.251.385		256.088.144.428	1.242.072.813	336.299.468.626	386.980.542.542	(50.681.073.916)		(50.681.073.916)		(50.681.073.916)		(50.681.073.916)
		20 Universitas Riau	168.930.282.725	2.750.000.000	202.582.910.347	1.232.641.938	375.495.835.010	453.434.756.860	(77.938.921.850)		(77.938.921.850)		(77.938.921.850)		(77.938.921.850)
		21 Universitas Terbuka	889.312.030.312		213.075.560.412	41.592.745.428	1.143.980.336.152	758.188.171.938	385.792.164.214	345.792.164.214	731.584.328.428		731.584.328.428		731.584.328.428
		22 Universitas Udayana	100.093.595.917	6.518.536.641	676.518.900.793		676.518.900.793	537.315.800.000	1.320.446.833.351	12.386.440.622	109.872.970	12.496.313.592	1.307.950.519.759	1.320.446.833.351	
		23 Universitas Gajah Mada	714.560.589.795	5.455.181.979	579.252.928.979	466.894.679.376	1.766.163.380.129	1.543.587.046.589	222.576.333.540		222.576.333.540		222.576.333.540		222.576.333.540
		24 Universitas Pendidikan Indonesia					-	-	-		-		-		-
		25 Universitas Airlangga	304.547.397.513	45.000.000	365.397.211.601	163.356.682.601	833.346.291.715	1.598.119.814.047	(764.773.522.332)		(764.773.522.332)		(764.773.522.332)		(764.773.522.332)
		26 Universitas Indonesia	1.145.731.377.911	159.615.423.819	547.561.507.265	97.597.102.782	1.950.505.411.777	1.598.119.814.047	352.385.597.730		352.385.597.730		352.385.597.730		352.385.597.730
		27 Universitas Sumatera Utara	408.257.804.579	24.511.614.500	314.410.522.213	33.518.407.095	780.698.348.387	603.030.249.228	177.668.099.159		177.668.099.159		177.668.099.159		177.668.099.159
		28 Institut Teknologi Bandung	291.054.887.000	8.546.937.791	462.820.367.179	193.760.845.006	956.182.836.976	838.112.634.931	118.070.202.045		118.070.202.045		118.070.202.045		118.070.202.045
		29 Institut Pertanian Bogor	263.149.753.579		353.588.712.348	169.914.701.811	786.653.167.738	771.240.584.256	15.412.583.482		15.412.583.482		15.412.583.482		15.412.583.482
		30 Universitas Mataram	83.064.807.265		264.727.623.747		327.792.431.012	385.851.573.232	(58.059.142.220)		(58.059.142.220)		(58.059.142.220)		(58.059.142.220)
		31 Universitas Tadulako	104.874.018.544	7.366.000.000	286.604.977.876	5.494.790.012	404.339.786.432	485.609.199.885	(81.269.413.453)	14.225.057.574	(67.044.355.879)		(67.044.355.879)		(67.044.355.879)
		32 Politeknik Negeri Malang	41.078.421.500		201.519.275.117	3.114.757.452	245.712.454.069	126.507.127.091	119.205.326.978	(177.080.000)	119.028.246.978		119.028.246.978		119.028.246.978
		33 Universitas SAT Banten	45.617.538.187	1.000.000.000	78.308.069.020	2.372.118.160	127.297.725.367	173.205.544.225	(45.907.818.858)		(45.907.818.858)		(45.907.818.858)		(45.907.818.858)
		KEMENTERIAN AGAMA (025)													
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	50.525.407.699		135.082.656.319	17.543.020.356	203.151.084.374	191.982.623.918	11.168.460.456		11.168.460.456		11.168.460.456		11.168.460.456
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	114.235.945.650		291.704.896.172	8.807.139.567	414.747.981.389	372.009.496.600	42.738.484.789		42.738.484.789		42.738.484.789		42.738.484.789
		3 UIN Malang	56.817.835.886		100.370.037.934	-	157.187.873.820	325.337.278.204	(168.149.404.384)	(4.614.617.720)	(172.764.022.104)		(172.764.022.104)		(172.764.022.104)
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	49.199.415.000	12.360.680.000	261.675.287.817	789.151.604	324.024.534.421	214.404.878.208	109.619.656.213	(160.900.000)	109.458.756.213		109.458.756.213		109.458.756.213
		5 UIN Alauddin, Makassar	49.276.218.364		174.096.483.978	3.444.966.301	226.817.668.643	180.097.682.844	46.719.985.799		46.719.985.799		46.719.985.799		46.719.985.799
		6 IAIN Sumatera Utara	21.345.808.000	259.950.000	111.873.365.638	924.139.499	134.403.263.137	107.898.797.968	26.504.465.169	(977.964.000)	25.526.501.169		25.526.501.169		25.526.501.169
		7 IAIN Walisongo Semarang	19.985.482.000	18.407.711.783	133.347.818.255	1.714.225.898	173.455.237.936	186.258.058.661	(12.802.820.725)		(12.802.820.725)		(12.802.820.725)		(12.802.820.725)
		8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	80.563.968.287		155.523.484.731	280.328.498	236.367.781.516	196.844.558.202	39.523.223.314		39.523.223.314		39.523.223.314		39.523.223.314
		9 IAIN Sulthan Thoha Saifudin	14.773.141.547	500.000.000	91.383.550.659	251.970.381	106.908.662.587	82.993.803.722	23.914.858.865		23.914.858.865		23.914.858.865		23.914.858.865
		10 IAIN Sunan Ampel	28.980.190.420		138.565.276.560	1.635.804.818	169.181.271.798	156.859.637.358	12.321.634.440		12.321.634.440		12.321.634.440		12.321.634.440
		11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	20.730.299.084	499.965.000	58.857.837.942	384.197.063	80.472.299.089	75.592.768.561	4.879.530.528		4.879.530.528		4.879.530.528		4.879.530.528
		9 IAIN Raden Intan Lampung	19.719.785.000		89.367.345.725	947.651.007	110.034.781.732	79.775.890.445	30.258.891.287		30.258.891.287		30.258.891.287		30.258.891.287
		13 IAIN Raden Fatah Palembang	20.101.158.700		97.374.043.959	772.943.260	118.248.145.919	111.990.705.007	6.257.440.912		6.257.440.912		6.257.440.912		6.257.440.912
		14 IAIN Mataram	15.145.513.714	370.234.000	70.233.196.176	302.800.674	86.051.744.564	69.387.047.294	16.664.697.270		16.664.697.270		16.664.697.270	1.974.744.014	14.689.953.256
		15 IAIN Ar Raniry Banda Aceh	17.737.040.193	5.252.033.638	129.858.643.121	1.116.440.053	153.964.157.005	155.408.707.932	(1.444.550.927)		(1.444.550.927)		(1.444.550.927)		(1.444.550.927)
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN													
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam Negeri, Bandung					-		-		-		-		-
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bekasi					-		-		-		-		-
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang					-		-		-		-		-
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN													
		1 PP IPTEK	4.375.295.500	83.653.981	7.998.145.466	160.230.993	12.617.325.940	13.461.394.828	(844.068.888)	(313.266.685)	(1.157.335.573)		(1.157.335.573)		(1.157.335.573)
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)													
		1 Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta	315.792.892.024		23.978.120.421	1.537.989.021	341.309.001.466	73.438.268.805	267.870.732.661		267.870.732.661		267.870.732.661		267.870.732.661
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN									-				-
		1. BPPT Enjinering	48.230.421.203		4.993.257.117		53.223.678.320	51.038.392.913	2.185.285.407		2.185.285.407	(667.566.897)	1.517.718.510		1.517.718.510
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)									-				-
		1 RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta	87.616.630.484		44.280.325.924	4.388.331.202	136.285.287.610	222.140.706.861	(85.855.419.251)		(85.855.419.251)		(85.855.419.251)		(85.855.419.251)
		2 RS Bhayangkara Tk.III Kediri	62.811.911.160	184.000.000	10.373.392.815	930.032.161	74.299.336.136	64.415.158.584	9.884.177.552		9.884.177.552		9.884.177.552		9.884.177.552
		3 RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri,	14.942.810.414	225.000.000	12.162.707.656	5.512.724.272	32.843.242.342	73.066.025.616	(40.222.783.274)		(40.222.783.274)		(40.222.783.274)		(40.222.783.274)
		4 RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang,	49.718.217.815	26.054.000	13.338.616.622	2.125.737.888	65.208.626.325	60.521.427.041	4.687.199.284		4.687.199.284		4.687.199.284		4.687.199.284
		5 RS Bhayangkara, Semarang	6.473.941.054	1.934.850.000	7.795.390.527	3.339.768.291	19.543.949.872	26.975.692.682	(7.431.742.810)		(7.431.742.810)		(7.431.742.810)		(7.431.742.810)
		6 RS Bhayangkara Tk.III, Palembang	15.156.537.188		4.689.742.135	460.796.272	20.307.075.595	34.722.369.075	(14.415.293.480)		(14.415.293.480)		(14.415.293.480)		(14.415.293.480)
		7 RS Bhayangkara Bandung	12.180.575.516		8.167.964.412	706.454.642	21.054.994.570	51.185.133.061	(30.130.138.491)		(30.130.138.491)		(30.130.138.491)		(30.130.138.491)
		8 RS Bhayangkara / Lemdikpol STUKPA	5.543.402.070		4.459.031.966	120.253.718	10.122.687.754	18.362.913.471	(8.240.225.717)		(8.240.225.717)		(8.240.225.717)		(8.240.225.717)
		9 RS Bhayangkara Tk.III. Triiata Polda Bali	5.278.109.687		6.669.395.693	31.793.439	11.979.298.819	17.918.558.444	(5.939.259.625)		(5.939.259.625)		(5.939.259.625)		(5.939.259.625)
		10 RS Bhayangkara Tk.IV, Porong	15.243.482.966		3.143.027.541	4.013.088.720	22.399.599.227	23.192.545.493	(792.946.266)		(792.946.266)		(792.946.266)		(792.946.266)
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA													
		1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	5.995.001.316		150.283.799.897	113.648.563	156.392.449.776	6.972.250.043	149.420.199.733		149.420.199.733		149.420.199.733		149.420.199.733
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN													
		1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran &	78.584.821.128		25.129.132.284	1.744.861.020	105.458.614.432	67.880.408.006	37.578.206.426	(681.459.400)	36.896.747.026		36.896.747.026		36.896.747.026
		2 Politeknik Pelayaran Surabaya	35.111.437.944		47.777.441.726	4.795.341.946	87.684.221.616	111.054.405.296	(23.370.183.680)		(23.370.183.680)		(23.370.183.680)		(23.370.183.680)
		3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	69.561.339.200		111.720.032.552	2.156.222.732	183.437.594.484	184.949.266.782	(1.511.672.298)		(1.511.672.298)		(1.511.672.298)		(1.511.672.298)
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	33.723.075.000		116.065.791.596	1.207.286.804	150.996.153.400	4.602.421.478	146.393.731.922		146.393.731.922		146.393.731.922		146.393.731.922
		5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	33.519.395.000		45.324.449.570	538.026.881	79.381.871.451	135.245.796.513	(55.863.925.062)		(55.863.925.062)		(55.863.925.062)		(55.863.925.062)
		6 Akademi Teknik dan Keselamatan	7.774.470.067	1.044.280.000	26.536.541.448	519.928.058	35.875.219.573	766.046.298.439	(730.171.078.866)		(730.171.078.866)		(730.171.078.866)		(730.171.078.866)
		7 Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD)	5.808.508.382		75.180.953.914	1.166.500.378	82.155.962.674	45.063.319.959	37.092.642.715		37.092.642.715		37.092.642.715		37.092.642.715
		KEMENTERIAN ESDM													
		1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi	67.949.583.166		150.283.799.897	638.729.142	218.872.112.205	208.149.441.714	10.722.670.491		10.722.670.491		10.722.670.491		10.722.670.491
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)													
		1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	48.492.633.764			173.833.557.860	222.326.191.624	29744401012	192.581.790.612		192.581.790.612		192.581.790.612		192.581.790.612

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	26.719.723.438	4.696.239.608	76.045.101.100	886.163.288	108.347.227.434	96.246.023.089	12.101.204.345	-	12.101.204.345	-	12.101.204.345	(6.415.373.210)	18.516.577.555
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	17.437.638.223	149.250.000	47.206.406.393	803.914.031	65.597.208.647	74.150.612.326	(8.553.403.679)	-	(8.553.403.679)	-	(8.553.403.679)	-	(8.553.403.679)
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	8.095.167.121.094	99.926.932.701	67.956.729.048.254	8.660.393.838.007	59.296.335.210.247	1.262.718.366.460	68.754.147.630.502	1.160.595.058.040	241.840.918.411	1.402.435.976.451	67.351.711.654.051	68.754.147.630.502	
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	6.848.835.146.339	88.817.680.673	4.456.455.905.276	284.091.896.122	11.678.200.628.410	10.774.101.308.529	904.099.319.881	18.445.635.849	922.544.955.730	-	922.544.955.730	-	922.544.955.730
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	8.026.022.630.024	388.666.429.046	9.266.258.033.442	2.114.317.732.888	19.795.264.825.400	19.360.715.778.188	434.549.047.212	298.187.621.641	732.736.668.853	-	732.736.668.853	-	732.736.668.853
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	579.137.209.544	37.650.574.421	2.039.313.924.986	38.914.778.979	2.695.016.487.930	2.506.841.934.924	188.174.553.006	18.445.635.849	182.421.071.286	-	182.421.071.286	1.974.744.014	180.446.327.272
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	4.375.295.500	83.653.981	7.998.145.466	160.230.993	12.617.325.940	13.461.394.828	(844.068.888)	(313.266.685)	(1.157.335.573)	-	(1.157.335.573)	-	(1.157.335.573)
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	259.722.135.388	2.369.904.000	111.936.567.750	17.615.891.885	391.644.499.023	569.307.984.835	(177.663.485.812)	-	(177.663.485.812)	-	(177.663.485.812)	-	(177.663.485.812)
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	48.230.421.203	-	4.993.257.117	-	53.223.678.320	51.038.392.913	2.185.285.407	-	2.185.285.407	(667.566.897)	1.517.718.510	-	1.517.718.510
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA	5.995.001.316	-	150.283.799.897	113.648.563	156.392.449.776	6.972.250.043	149.420.199.733	-	149.420.199.733	-	149.420.199.733	-	149.420.199.733
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	264.083.046.721	1.044.280.000	447.734.343.090	12.127.967.819	724.989.637.630	1.314.841.916.473	(589.852.278.843)	(681.459.400)	(590.533.738.243)	-	(590.533.738.243)	-	(590.533.738.243)
		KEMENTERIAN ESDM	67.949.583.166	-	150.283.799.897	638.729.142	218.872.112.205	208.149.441.714	10.722.670.491	-	10.722.670.491	-	10.722.670.491	-	10.722.670.491
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	12.551.638.587.120	11.277.681.723.468	109.653.114.096.138	19.032.305.116.742	90.620.808.979.396	2.426.753.205.334	116.876.882.495.318	1.939.912.135.367	241.840.918.411	2.333.165.653.778	107.473.330.771.237	116.876.882.495.318	192.581.790.612
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN	16.262.591.945.076	523.478.011.729	16.837.108.910.294	2.644.106.655.014	36.267.285.522.113	35.142.491.956.173	1.124.793.565.940	334.068.078.266	1.434.662.526.637	(667.566.897)	1.433.994.959.740	(4.415.854.154)	1.438.410.813.894
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	**SEKRETARIAT NEGARA (007)**													
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta	127.578.009.550			17.937.960.489	145.515.970.039	162.020.355.135	(16.504.385.096)		(16.504.385.096)		(16.504.385.096)	21.808.853.548	(38.313.238.844)
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	82.538.559.595			24.143.452.428	106.682.012.023	93.825.398.059,00	12.856.613.964		12.856.613.964		12.856.613.964	36.543.818.906	(23.687.204.942)
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan													
		1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	828.966.894.724		223.594.193.625	118.469.709.608	1.171.030.797.957	776.561.481.884	394.469.316.073	356.988.811	394.826.304.884		394.826.304.884		394.826.304.884
		Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		1 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang							-			-			
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	210.116.569.145	-	-	42.081.412.917	252.197.982.062	255.845.753.194	(3.647.771.132)	-	(3.647.771.132)	-	(3.647.771.132)	58.352.672.454	(62.000.443.586)
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	828.966.894.724	-	223.594.193.625	118.469.709.608	1.171.030.797.957	776.561.481.884	394.469.316.073	356.988.811	394.826.304.884	-	394.826.304.884	-	394.826.304.884
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN	**1.039.083.463.869**	-	**223.594.193.625**	**160.551.122.525**	**1.423.228.780.019**	**1.032.407.235.078**	**390.821.544.941**	**356.988.811**	**391.178.533.752**	-	**391.178.533.752**	**58.352.672.454**	-
3	Pengelolaan	**KEMENTERIAN KEUANGAN (015)**													
		1. Pusat Investasi Pemerintah	448.061.945.795		4.433.966.311	916.574.156.889	1.369.070.068.995	27.587.018.960	1.341.483.050.035		1.341.483.050.035		1.341.483.050.035	18.691.208	1.341.464.358.827
		2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	989.869.262.632	516.000.000		585.925.108	990.971.187.740	137.584.414.225	853.386.773.515		853.386.773.515		853.386.773.515		853.386.773.515
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)													
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan			1.376.117.784	134.371.242.489	135.747.360.273	119.406.069.715	16.341.290.558		16.341.290.558		16.341.290.558		16.341.290.558
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)													
		1. BID. PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN	218.126.951.980			284.261.020.363	502.387.972.343	144.089.620.222	358.298.352.121		358.298.352.121		358.298.352.121		358.298.352.121
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN													
		1. BP3TI	1.702.062.258.286		1.683.383.687	243.223.593.044	1.946.969.235.017	1.441.594.120.745	505.375.114.272		505.375.114.272		505.375.114.272		505.375.114.272
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)													
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	124.805.436.710		7.234.443.766	28.579.321.796	160.619.202.272	84.233.537.675	76.385.664.597		76.385.664.597		76.385.664.597		76.385.664.597
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	1.437.931.208.427	516.000.000	4.433.966.311	917.160.081.997	2.360.041.256.735	165.171.433.185	2.194.869.823.550	-	2.194.869.823.550	-	2.194.869.823.550	18.691.208	2.194.851.132.342
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	0	0	1.376.117.784	134.371.242.489	135.747.360.273	119.406.069.715	16.341.290.558	-	16.341.290.558	-	16.341.290.558	-	16.341.290.558
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	218.126.951.980	-	-	284.261.020.363	502.387.972.343	144.089.620.222	358.298.352.121	-	358.298.352.121	-	358.298.352.121	-	358.298.352.121
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1,70206E+12	0	1.683.383.687	243.223.593.044	1.946.969.235.017	1.441.594.120.745	505.375.114.272	-	505.375.114.272	-	505.375.114.272	-	505.375.114.272
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	1,70206E+12	0	1.683.383.687	243.223.593.044	1.946.969.235.017	1.441.594.120.745	505.375.114.272	-	505.375.114.272	-	505.375.114.272	-	505.375.114.272
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN	36.283.615.529.138	20.217.965.448.899	199.562.293.469.861	24.319.195.823.295	175.243.097.646.566	28.603.810.577.404	260.348.699.482.922	2.178.382.533.578	627.125.880.007	2.956.923.446.544	248.088.412.411.267	260.348.699.482.922	
		TOTAL SATKER	**141**												

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
PER 31 DESEMBER 2013
(dalam Ribuan Rupiah)

No.	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	12.000.000	-	10.561.223	-	-	10.561.223	1.438.777	-	-	TA 2013	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	3.000.000	402.000	2.598.000	-	-	3.000.000	-	28.210.615	67.186.123	TA 2013	APBN/Non APBN	025
3	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.747.403	-	2.747.403	-	-	2.747.403	-	-	-	TA 2013	Bagian satker	050
4	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	37.781.415	4.533.086	25.360.899	3.418.059	-	33.312.044	4.469.371	3.721.279	-	TA 2013	Satker	026
5	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukimar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif	033
5	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	314.815.600	10.397.617	114.562.172	146.012.582	-	270.972.370	43.843.230	493.119.152	-	TA 2013	Satker	034
6	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	1.979.935	234.850	1.698.222	39.765	-	1.972.837	7.098	1.979.935	-	TA 2013	Bagian satker	055
7	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	72.000.000	9.957.611	9.995.738	50.000.000	2.046.651	72.000.000	-	112.971.630	-	TA 2013	Bagian satker	025
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	42.659.559	945.223	39.773.518	474.846	-	41.193.587	1.465.972	19.401.752	-	TA 2013	Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	362.620.000	17.848.208	117.298.089	22.554.486	-	157.700.782	204.919.218	744.385.835	-	TA 2013	Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	2.454.141.693	217.689.052	TA 2013	Bukan Satker	025
11	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.092.638	-	1.790.125	-	-	1.790.125	302.513	3.551.698	-	TA 2013	Bagian satker	033
12	Badan Pengelola KAPET Batui (Palapas) - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.987.960		1.678.966	-	-	1.678.966	308.994	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
13	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.820.290	-	1.637.849	-	-	1.637.849	182.441	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
14	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.213.160	-	2.149.066	-	-	2.149.066	64.094	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
15	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.620.820	-	1.421.395	-	-	1.421.395	199.425	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
16	Badan Pengelola KAPET Bukari (Bangsejahtera) - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.868.070	-	1.863.705	-	-	1.863.705	4.365	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
17	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.860.220	-	1.390.968	-	-	1.390.968	469.252		-	TA 2013	Bagian satker	033
18	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.142.810	-	889.062	-	-	889.062	253.748	461.860	1.200.000	TA 2013	Bagian satker	033
19	Badan Pengelola KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.266.350	-	2.262.270	-	-	2.262.270	4.080	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
20	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.622.115	-	1.441.461	-	-	1.441.461	180.654	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
21	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.874.762	-	1.855.753	-	-	1.855.753	19.009	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
22	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.112.295	-	2.105.236	-	-	2.105.236	7.059	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.058.220		1.936.700	-	-	1.936.700	121.520	-	-	TA 2013	Bagian satker	033
24	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	10.793.155	2.639.000	6.156.508	472.384	-	9.267.892	1.525.263	1.109.558	-	TA 2013	Satker	090
25	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.977.116	226.840	712.595	220.755	772.849	1.933.039	44.077	-	-	TA.2013	Bagian satker	088
26	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif	024
26	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)		-	-	-		-	-			-	Tidak aktif	040
27	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	4.839.837.024	491.599.232	TA 2013	Bukan Satker	091
28	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	3.000.000	1.694.662	1.295.238	10.100	-	3.000.000	-	127.337	34.969	TA 2013	Bukan Satker	025
29	Dewan Buku Nasional (DBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	023
29	Dewan Energi Nasional (DEN)	74.403.252	5.004.985	56.792.239	4.670.571	-	66.467.794	7.935.458	9.217.381	-	TA 2013	Satker	020
30	Dewan Gula Indonesia (DGI)	1.364.800	-	1.182.519	-		1.182.519	182.281	-	-	TA 2013	Bagian satker	018
31	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	51.154.743	-	-	-	43.826.545	43.826.545	7.328.198	38.538.042	-	TA 2013	Satker	999
32	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan										Smt 1 2013	Bagian satker	999
33	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun										Smt 1 2013	Bagian satker	999
32	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	20.246.238	-	19.534.869	400.470	-	19.935.339	310.899	692.793	-	TA 2013	Satker	032
33	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.026.624	-	4.652.238	-	-	4.652.238	374.386	164.304	-	TA 2013	Bagian satker	018
34	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	85.000.000	-	32.776.179	-	-	32.776.179	52.223.821	-	-	TA 2013	Bagian satker	044
35	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	14.000.000	326.718	11.198.913	377.373	-	11.903.003	2.096.997	1.311.159	-	TA 2013	Satker	035
36	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	34.983.227	-	28.890.953	5.005.331	-	33.896.284	1.086.943	11.918.101	14.279.219	TA 2013	Satker	043
37	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI/LAPAN)	459.805	-	420.657		-	420.657	39.148	-	-	TA 2013	Bagian satker	082
38	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Belum Aktif	
38	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	1.961.486		1.722.385			1.722.385	239.101	-	-	TA 2013	Bagian satker	026
39	Dewan Pers	18.358.956	1.703.682	13.010.549	1.294.970	-	16.009.201	2.349.755	2.814.865	-	TA 2013	Satker	059
40	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	2.248.550	-	1.634.571	-	-	1.634.571	613.979	-	-	TA 2013	Bagian satker	010

No.	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	44.489.801	3.403.581	34.583.449	1.913.334	-	39.900.363	4.589.438	4.678.993	-	TA 2013	Satker	007
42	Dewan Riset Nasional (DRN)	4.334.841	-	3.975.210	-	-	3.975.210	359.631	-	-	TA 2013	Bagian satker	042
43	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	8.448.841	147.995	7.328.220	346.375	-	7.822.591	626.250	713.706	-	TA 2013	Satker	033
44	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	2.598.000	-	2.498.632	-	-	2.498.632	99.368	269.575	-	TA 2013	Bagian satker	059
45	Komisi Banding Merek	419.820	-	283.429	-	-	283.429	136.391	-	-	TA 2013	Bagian satker	013
46	Komisi Banding Paten	114.858	-	113.843	-	-	113.843	1.015	-	-	TA 2013	Bagian satker	013
47	Komisi Hukum Nasional (KHN)	13.598.403	829.500	10.107.291	811.042	-	11.747.833	1.850.570	1.629.019	-	TA 2013	Satker	007
48	Komisi Informasi Pusat (KIP)	13.981.623	3.024.302	8.835.372	499.235	-	12.358.909	1.622.714	3.349.987	-	TA 2013	Satker	059
49	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	1.619.364	101.100	1.468.264	50.000	-	1.619.364	-	50.000.000	-	TA 2013	Bagian satker	043
50	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	12.000.000	1.934.725	4.825.136	563.561	-	7.323.422	4.676.578	712.972	-	TA 2013	Bagian satker	034
51	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	21.100.000	1.537.171	9.833.209	5.097.627	-	16.468.006	4.631.994	5.097.627	-	TA 2013	Bagian satker	034
52	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	10.561.286	3.242.400	4.580.600	802.526	-	8.625.526	1.935.760	60.170	10.599.631	TA 2013	Bagian satker	074
53	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	3.873.595	843.000	2.791.285	-	-	3.634.285	239.310	-	-	TA 2013	Bagian satker	027
54	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	25.000.000	-	-	-	21.985.000	21.985.000	3.015.000	-	71.890.381	TA 2013	Bagian satker	036
55	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	025
56	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	41.187.704	4.611.247	29.005.638	5.912.478	-	39.529.363	1.658.341	6.190.638	-	TA 2013	Satker	059
57	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	10.000.000	1.426.500	6.922.698	951.576	-	9.300.774	699.226	1.523.579	-	TA 2013	Satker	047
58	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	7.490.717	-	7.468.030	-	-	7.468.030	22.687	-	-	TA 2013	Bagian satker	084
59	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif	026
60	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	7.000.000	-	4.266.283	-	-	4.266.283	2.733.717	-	-	TA 2013	Bagian satker	035
61	Komite Inovasi Nasional (KIN)	5.547.742	-	5.221.555	85.800	-	5.307.355	240.387	-	-	TA 2013	Bagian satker	042
62	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	5.844.926	-	5.844.926	-	-	5.844.926	-	-	-	TA 2013	Bagian satker	012
63	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2013	Bagian satker	035
64	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	38.696.715	-	26.353.976	6.756.663	-	33.110.639	5.586.076	29.185.816	-	TA 2013	Satker	022
65	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	143.917.070	-	143.917.070	-	-	143.917.070	-	-	-	TA 2013	Bagian satker	092
66	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1.080.000	-	186.000	-	-	186.000	894.000	-	-	TA 2013	Bagian satker	048
67	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	311.400	-	-	-	-	-	311.400	-	-	TA 2013	Bagian satker	041
68	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.439.588		3.245.308	143.167	-	3.388.475	51.113	415.844	-	TA 2013	Satker	015
69	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	411.715	-	306.699	-	-	306.699	105.016	-	-	TA 2013	Bagian satker	084
70	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	38.757.041	-	26.330.875	4.214.400	-	30.545.275	8.211.766	67.537.420	-	TA 2013	Satker	024
71	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.411.493	-	1.233.031	-	-	1.233.031	178.462	-	-	TA 2013	Bagian satker	088
72	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.607.391	-	1.175.415	-	-	1.175.415	431.976	-	-	TA 2013	Bagian satker	026
73	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	148.308.011	1.612.200	48.525.807	54.752.982	-	104.890.989	43.417.022	60.094.835	-	TA 2013	Satker	007
74	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	329.387	-	328.294	-	-	328.294	1.093	-	-	TA 2013	Bagian satker	026
75	Lembaga Sensor Film (LSF)	36.809.160	4.997.103	13.389.215	9.392.805	-	27.779.123	9.030.037	23.043.461	-	TA 2013	Satker	023
76	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif	024
77	Otorita Asahan	1.743.999	-	-	-	1.177.919	1.177.919	566.080	1.194.758.813	183.478.772	TA 2013	APBN/Non APBN	019
78	Sekretariat Pengadilan Pajak	45.820.990	24.317.620	12.774.937	6.158.556	-	43.251.112	2.569.878	9.804.284	-	TA 2013	Satker	015
79	Staf Khusus Presiden	34.092.444		28.265.349	-	-	28.265.349	5.827.095	-	-	TA 2013	Bagian satker	114
80	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	76.940.515	16.669.826	39.877.154	10.913.934	-	67.460.913	9.479.602	21.987.058	-	TA 2013	Satker	007
81	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif	029
81	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	150.000	-	147.124	-	-	147.124	2.876	-	-	TA 2013	Bagian satker	018
82	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	99.543.608	28.661.649	42.047.629	2.635.106	-	73.344.384	26.199.224	3.320.838	-	TA 2013	Satker	007
83	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infratruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2013		033
84	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	95.405	-	4.468	-	-	4.468	90.937	-	-	TA 2013	Bagian satker	078
85	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	19.856.594	-	17.999.164	-	-	17.999.164	1.857.430	-	-	TA 2013	Bagian satker	040
86	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	32.500.000	-	18.255.106	149.494	-	18.404.601	14.095.399	-	-	TA 2013	Bagian satker	035
87	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	6.000.000	-	5.227.233	12.350	-	5.239.583	760.417	170.350	-	TA 2013	Bagian satker	036
88	Dewan Jaminan Sosial Nasional	25.000.000	-	20.533.590	88.220	-	20.621.810	4.378.190	586.178	-	TA 2013	Satker	036
89	SKK MIGAS	-	-	-	-	-	-	-	(639.765.932)	1.830.586.696	TA 2013	Bukan Satker	
	J U M L A H	**2.195.155.621**	**153.274.400**	**1.127.074.745**	**347.202.921**	**69.808.964**	**1.697.361.030**	**497.794.591**	**9.613.041.243**	**2.888.544.076**			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2013

(dalam ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	87.903.217	1.039.585	88.942.802	77.277.750	9.620.853	86.898.603	2.044.199
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.640.286	679.723	5.320.009	3.993.728	752.500	4.746.229	573.780
TOTAL		**92.543.503**	**1.719.308**	**94.262.811**	**81.271.478**	**10.373.353**	**91.644.832**	**2.617.979**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2013

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	NAMA YAYASAN	Kementerian/Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban &	KET
1	2	2a	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Sekretariat Negara	34.279.096	61.730.231	556.485		96.565.812	9.343.144	8.296.645	17.639.789	78.926.023	96.565.812	**TA. 2013**
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Sekretariat Negara	10.991.930	799.961			11.791.891	5.466	-	5.466	11.786.424	11.791.891	**TA. 2013**
TOTAL			**45.271.026**	**62.530.192**	**556.485**	**-**	**108.357.702**	**9.348.610**	**8.296.645**	**17.645.255**	**90.712.447**	**108.357.702**	

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2013

Tim Asistensi Daerah	Barang Milik Negara	Barang Milik Daerah	Barang Milik Negara Sebagian*	Barang Milik Daerah Sebagian**	BMN dan BMD Sebagian***	Dilepaskan Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
I	0	1	0	0	0	0	1
II	2	5	1	0	0	0	8
III	4	2	0	1	0	0	7
IV	0	1	0	0	0	1	2
V	1	0	0	0	0	0	1
VI	0	0	0	1	0	0	1
VII	1	0	0	1	0	0	2
VIII	0	6	0	0	0	0	6
IX	1	2	0	0	1	1	5
X	0	4	0	1	0	0	5
XI	0	11	0	0	0	0	11
XII	2	0	0	0	0	0	2
XIII	0	1	0	0	0	0	1
XIV	1	1	0	0	0	0	2
XV	0	8	0	0	0	0	8
XVI	0	0	0	0	0	0	0
XVII	1	0	0	0	0	0	1
∑	**13**	**42**	**1**	**4**	**1**	**2**	**63**

Keterangan:
* dan **: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 188/PMK.06/2008 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.
***: BMN dan BMD Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMN Sebagian dan BMD dan/atau BMN dan BMD Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 Keputusan Menteri Keuangan.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

Tim Asis-tensi Daerah (TAD)	Barang Milik Negara	Barang Milik Daerah	Barang Milik Negara Sebagian	Barang Milik Daerah Sebagi-an	BMN dan BMD Sebagian	Dilepaskan Kepada Pihak Ketiga	Dikeluarkan dari Lampiran PMK 188/PMK.6/	Jumlah	Temu-an Baru ABMA/C
I	0	3	0	0	1	0	0	4	0
II	9	20	1	0	0	0	0	30	0
III	4	7	0	2	0	0	0	13	0
IV	1	7	0	0	0	2	0	10	0
V	4	3	0	0	0	0	0	7	0
VI	0	1	0	1	0	0	0	2	0
VII	3	4	0	1	0	0	0	8	3
VIII	5	24	0	0	0	0	0	29	0
IX	3	17	0	0	2	1	0	23	1
X	10	28	0	2	1	1	0	42	0
XI	0	21	0	5	0	0	0	26	0
XII	5	2	0	0	0	0	0	7	0
XIII	0	3	0	0	0	0	2	5	0
XIV	6	4	0	0	0	0	0	10	0
XV	0	13	0	1	0	0	0	14	0
XVI	1	5	0	0	0	0	0	6	0
XVII	2	2	0	0	0	0	0	4	0
Σ	**53**	**164**	**1**	**12**	**4**	**4**	**2**	**240**	**4**

DAFTAR 42

MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2012

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
I	**TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTEM**							
1	**Pendapatan dan Hibah**							
1.1	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun	a. Pemerintah belum menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS.	X			1. Pemerintah (yang akan dikoordinasikan oleh DJP) akan segera menyusun SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas, dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS sesuai amanat pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012. 2. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan proses reposisi tugas dan fungsi administrasi PPh Migas dari DJA ke DJP agar pengelolaan PPh migas dapat dilakukan secara lebih fokus dan optimal oleh DJP yang lebih memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya jika proses reposisi tugas dan fungsi administrasi PPh Migas dari DJA ke DJP telah ditetapkan, maka SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas tidak diperlukan lagi.	DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan. Telah diadakan rapat yang terkahir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit, Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNBP DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain: a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA. b. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu	Triwulan III 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 c. Revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut. d. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas. e. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.	
		b. KPP Migas belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas senilai Rp33.026.495.863,89.	X			Pemerintah telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran, selanjutnya Pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut dan identifikasi atas pembayaran yang tidak jelas Wajib Pajak dan masa pajak yang dibayarkan.	Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi.KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke: a. Direktur PNBP, DJA S-4071/WPJ.07/ KP.10/2013 tgl 19-07-13 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:	Triwulan III 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							- Bahwa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas. - Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan januari-Desember secara bulanan ke DJP. - Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN. b. Satu transaksi atas nama Modec Production (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI. c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut: - Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013. - Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							EP masa pajak mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. - Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46. - Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.	
		a. DJP belum menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA)	X			Pemerintah akan menerapkan mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melalui Rekening Departemen Keuangan Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.	a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak	Triwulan III 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Kewajiban PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP Kepada Pemerintah.				000411 pada Bank Indonesia(rekening 600). Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP terkait mekanisme pembayaran tersebut.	2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013. b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut: 1) Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2) DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. 3) Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas. c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013. tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT. Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP. 2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP surat tersebut telah direspon oleh Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut Pertamina EP belum terbentuk. PT Pertamina (Persero) telah menyetujui akan melakukan pembayaran secara angsuran yang dan akan dilunasi pada bulan Desember 2013.	
		e. Penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh			X	Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS untuk melakukan amandemen kontrak	- Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri	Menunggu kesapakatan dengan negara asal KKKS.

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		Migas dan perhitungan bagi hasil migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1.304.458.064.841,30.				bagi hasil migas dengan menambahkan klausal bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan *tax treaty* atau apabila memanfaatkan *tax treaty*, maka bagian pemerintah harus disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah tetap.	Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013. - Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kementerian Keuangan. - Telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas permasalahan tarif pajak, yaitu: 1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran,BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B. Salah satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC. 2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC. 3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada *interim annual trade talks* RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegosiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (*United Kingdom Trade and Investment*) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris. - DJP telah menyampaikan kembali usulan amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013. - Terkait dengan konsep surat Menteri Keuangan kepada	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Menteri ESDM, telah dilakukan pembahasan sbb: - pada tanggal 24 September 2013 telah diadakan pembahasan di Biro Hukum Kementerian Keuangan yang dihadiri perwakilan dari Biro Hukum Kementerian keuangan, BKF, dan DJP. Dalam rapat dimaksud disampaikan bahwa akan dilakukan pembahasan lanjutan oleh Biro Hukum untuk menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM atas permasalahan dimaksud. - Pembahasan lanjutan tanggal 4 Oktober 2013, hasil pembahasan mewacanakan untuk melibatkan Menko Perekonomian.	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2	**Belanja**							
2.1	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja Subsidi EnergiTahun 2012	a. Pemerintah belum menetapkan kriteria dan indikator yang jelas mengenai ketepatan sasaran atas belanja subsidi energi khususnya BBM;			X	1. Pemerintah sedang membahas pengembangan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU.	1. Sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU masih dalam tahap pengembangan.	dalam proses
			X			2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah menetapkan peraturan mengenai harga jual eceran dan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013.	Selesai	Selesai
		b. Pemerintah belum menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan belum menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya;dan	X			3. Pemerintah sedang memproses peraturan mengenai harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya.	Pemerintah (dalam hal ini Kem. Energi dan SDM) telah menetapkan komposisi bahan pembentuk LPG dengan komposisi Propana 48% dan Butana 52% melalui surat Menteri ESDM No. 7219/12/MEM.M/2013, sedangkan mengenai harga patokan, Pemerintah sedang memproses peraturan mengenai harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya.	Desember 2013
		c. Pemerintah dalam menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang disubsidi tidak mengacu kepada tujuan pemberian	X			4. Pemerintah telah melaksanakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen listrik, kecuali golongan R1 450 VA dan 900 VA, sebagai dasar dalam perhitungan subsidi listrik yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013. Pemerintah akan mengupayakan melalui DPR penerapan tarif adjustment, penghapusan	Selesai	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		subsidi.				subsidi listrik dan kenaikan TTL di luar golongan R1 450 VA dan 900 VA.		
2.2	Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp1,31 Triliun Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif	a. Nilai penerbitan DIPA dan realisasi belanja tahun 2012 tertinggi masih terjadi pada akhir tahun.	X			1. Terkait dengan penerbitan DIPA dan realisasi belanja tahun 2012 tertinggi masih terjadi pada akhir tahun, telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-596/MK.05/2012 tanggal 14 Agustus 2012 mengenai Upaya Mengantisipasi Penumpukan Penyerahan SPM ke KPPN Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012.	Selesai	Telah selesai (14 agustus 2012)
		b. Penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai PMK Nomor25/PMK.05/2012 belum diatur.	X			2. Pemerintah telah menetapkan peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2013 tentang Petunjuk teknis revisi anggaran.	selesai	Telah Selesai (8 April 2013)
		c. Kebijakan akuntansi atas klasifikasi dan penilaian aset tetap terkait belanja akhir tahun belum ditetapkan	X			3. Pemerintah akan menetapkan kebijakan akuntansi atas klasifikasi dan penilaian aset tetap terkait belanja akhir tahun.	Kebijakan perlakukan akuntansi terkait transaksi-transaksi realisasi belanja akhir tahun sedang dalam penyusunan dan akan disampaikan kepada K/L dalam rangka penyusunan LK 2013.	November 2013
		d. BUN belum melaporkan pertanggungjawa	X			4. Pemerintah akan mengatur pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank Garansi atas belanja pekerjaan akhir tahun dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang langkah-langkah akhir Tahun Anggaran.	Akan diterbitkan Surat Direktur APK kepada seluruh K/L terkait mengatur pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank Garansi atas belanja pekerjaan akhir tahun.	November 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		ban pengelolaan Bank Garansi atas belanja pekerjaan akhir tahun.	X			5. Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait belanja akhir tahun.	Akan diterbitkan surat kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait belanja akhir tahun, setelah diterbitkannya Perdirjen tentang langkah-langkah akhir tahun.	September 2013
2.3	Pengendalian atas Pelaksanaan Revisi DIPA Belum Memadai Sehingga Terjadi Pagu Minus atas Belanja Non pegawai Minimal Sebesar Rp11,37 Triliun	Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan dalam revisi DIPA yang mengakibatkan nilai pagu lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanjanya (pagu minus). Kelemahan tersebut berupa keterlambatan upload revisi DIPA yang dapat mengubah transaksi-transaksi DIPA sebelumnya sehingga terdapat risiko realisasi belanja yang melebihi pagu DIPA-nya. Selain itu, adanya Revisi DIPA yang tidak memperhatikan belanja yang telah terealisasi	X X X			1. Pemerintah telah memperbaiki aplikasi SP2D sehingga KPPN dapat menolak revisi DIPA yang menyebabkan pagu minus. 2. Telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2087/PB/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Untuk mengatasi pagu minus pada DIPA TA 2013, Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat nomor S-4218/PB/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Revisi DIPA Petikan yang mengakibatkan pagu minus, sehingga tahun 2013 tidak terdapat lagi pagu minus. 3. Kondisi ini merupakan dampak dari pemotongan anggaran dimana pemotongan dilakukan oleh Pusat (K/L) tanpa koordinasi intensif dengan satker sehingga muncul pagu minus. Rencana tindak lanjutnya difasilitasi melalui revisi anggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.	Saat ini dengan aplikasi di KPPN (SP2D) tidak dimungkinkan lagi adanya pagu minus, karena aplikasi dapat langsung menolak apabila penarikan dana berakibat pagu minus, kecuali terhadap Belanja Gaji. selesai - Penyelesaian pagu minus atas belanja non pegawai dilaksanakan melalui revisi DIPA Petikan. Berdasarkan PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran ditetapkan tanggal 11 Oktober 2013 untuk revisi anggaran pada	Telah Selesai

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		mengakibatkan realisasinya melampaui DIPA.					DJA, dan tanggal 18 Oktober 2013 untuk revisi anggaran pada Kanwil DJPBN. Dikarenakan saat ini masih terdapat laporan adanya pagu minus, maka perlu adanya perpanjangan batas waktu penerimaan usulan revisi anggaran khusus untuk pagu minus atas belanja non pegawai. Terkait hal tersebut, saat ini sedang dilakukan pembahasan aturan perpanjangan revisi atas pagu minus dan penyelesaian revisinya berdasarkan kewenangan DJA dan Kanwil DJPBN.	
2.4	Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar	a. Adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat senilai Rp. 12.735.995.062.357 pada 4 K/L b. Belanja bansos sebesar Rp.1.912.209.993.705,08 pada 6 K/L masih mengendap.	X			- Terkait dengan adanya ketidaksesuaian klasifikasi yang tidak sasuai ketentuan, penumpukan Belanja Bansos di akhir tahun, Pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan pertanggungjawaban Belanja Bansos dalam PMK nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. 2. Pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK; Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berkelanjutan

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		c. Belanja Bansos tidak sesuai sasaran sebesar Rp.269.983.953.601 pada 5 K/L. d. Kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos sebesar Rp.16.750.432.375.928,70 pada 8 K/L.	X			terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos.	sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut. b) Terkait Belanja bansosyang masih mengendap, Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya; Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717; Kementerian Kehutanan Telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadapa pelaksanaan program bansos; Kementerian Perumahan Rakyat Telah membuat laporan pelaksanaan BSPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000; Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472; c) Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran, Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait; Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI. d) Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke Kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO; Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera No.6 Tahun 2013	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							tentang pedoman pelaksanaan BSPS; Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos; Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.	
3.	**Pembiayaan**							
3.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri Belum Didukung dengan Dokumen Alokasi Anggaran Sehingga Penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Bisa Dicatat Sebagai Belanja dan Pembiayaan di LRA Tahun 2012	Perbedaan pencatatan penerimaan pembiayaan antara LK BA 999.01 yang dilaksanakan DJPU dan LKPP yang dilaksanakan DJPB sebesar Rp1.936.240.003.919. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan terdapat perbedaan pencatatan antara DJPB dan DJPU atas penarikan Pinjaman	X X			1. Pemerintah akan menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu. 2. Kementerian Keuangan akan meminta satker agar melakukan revisi DIPA 2013 atas pagu yang diperlukan untuk pengesahan SP3 *value date* 2012.	Pemerintah sedang menyusun draft PMK Tata Cara Revisi Anggaran yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu Direktur Jenderal Perbendahraan telah menyampaikan surat nomor S-7177/PB/2013 tanggal 31 Oktober 2013 hal Penerbitan SP3 atas PHLN, yang antara lain meminta K/L untuk segera menyampaikan permintaan dispensasi penerbitan SP3 atas WA yang telah dilakukan pembayaran oleh *lender* sudah diterima oleh pihak ketiga tetapi tidak diterbitkan SP3 karena PHLN	Triwulan III 2013 Triwulan III 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		Luar Negeri sebesar Rp35.413.863.411,88. Pada perkembangannya, hasil rekonsiliasi TA 2012 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tanggal 10 Mei 2013 menunjukan adanya selisih pencatatan penerimaan pembiayaan atas NoD TA 2012 yang belum diterbitkan SP3-nya tahun 2012 sebesar Rp2.I94.876.175.924,77 dan NoD TA 2011 yang belum diterbitkan SP3 tahun 2012 sebesar Rp30.899.532.I55,12, sehingga realisasi penarikan pinjaman yang belum diterbitkan SP3-nya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp2.225.775.708.079,89. Jumlah tersebut termasuk permasalahan	 X	 X		3. SP3 *value date* 2012 satker kementerian pertahanan sebesar 1.506.636.806.910 telah disahkan dengan SP3 nomor 249079Y tanggal 18-07-2013. 4. Perbaikan mekanisme tersebut akan diakomodasi dalam penyusunan PMK Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKAKL mendatang.	terkait sudah *closing date* dan/atau pagu dana DIPA tidak mencukupi. Selesai Pemerintah sedang menyusun draft PMK Tata Cara Revisi Anggaran yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.	 Selesai Berkelanjutan tiap tahun

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		penganggaran pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).						
4.	**Aset**							
4.1	Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga	Terdapat perbedaan data jumlah rekening KL menurut Dit.PKN dengan bank umum. Hal itu dimungkinkan karena tidak adanya kriteria/identifikasi khusus atas rekening pemerintah yang ada di bank umum. Selain itu, pihak bank belum memahami pengelompokan jenis-jenis rekening pemerintah.Lebih lanjut, Dit.PKN belum menindaklanjuti hasil rekonsiliasi rekening milik pemerintah tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan atas LKKL TA 2012 menunjukkan	X			1. Telah dilakukan proses pencocokan data rekening pemerintah pada bank umum antara Dit. PKN, Bank Indonesia, Bank Umum dhi. BRI, Mandiri, BRI dan BTN pada bulan Mei 2013 dan disepakti akan dilakukan rekonsiliasi atas rekening pemerintah pada bank umum tersebut secara periodik dengan 3 pihak (Dit. PKN, BI dan Bank Umum terkait). 2. Pemerintah dalam hal ini Dit. PKN telah memiliki aplikasi/modul data rekening satker dan telah implementatif, Laporan Daftar Rekening Satker untuk Semester I TA 2013 akan dihasilkan dari aplikasi dimaksud. 3. Pemerintah dalam hal ini Dit. PKN telah dan akan terus melakukan rekonsiliasi rekening dengan K/L tiap semester. Sampai dengan saat ini telah dilakukan rekonsiliasi dengan 22 K/L. 4. Pemerintah dalam hal ini Dit. PKN akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bank Umum untuk membuat tatacara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan	Rekonsiliasi atas data rekening pemerintah dengan Bank Umum dan Bank Indonesia akan dilakkukan secara periodik Selesai Rekonsiliasi dengan Kementerian secara periodik akan terus dilakukan Telah dilakukan pembahasan dengan beberapa bank umum terkait penamaan dan pengelompokan rekening	Berkelanjutan *Launching* pada Januari 2013 Berkelanjutan Oktober 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		terdapat rekening KL yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN.				rekening milik pemerintah pada bank umum.	pemerintah	
						5. Pemerintah sedang memperbaiki dan melengkapi regulasi dengan mengusulkan revisi PMK No. 57/PMK.5/2007 tentang Pengelolaan Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan PMK. No. 05/PMK.05/2010, termasuk di dalamnya pengaturan tentang penamaan rekening pemerintah.	Dit. PKN telah menyampaikan draft revisi PMK 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja kepada beberapa Direktorat terkait untuk memperoleh tanggapan atas draft dimaksud.	November 2013
						6. Atas temuan pada LKKL TA 2012 dimana K/L belum mendapat persetujuan rekening, Dit. PKN akan bersurat keseluruh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengingatkan kembali agar seluruh rekening pemerintah yang dimiliki untuk dilakukan pengecekan, penertiban dan apakah sudah ada surat ijin dari Menteri Keuangan. Selain itu juga akan ditelusuri dan diklasifikasi apakah jenis rekeningnya dan ijin rekeningnya untuk K/L tersebut.	Dit. PKN telah menyampaikan surat nomor S-5372/PB/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal tindak lanjut atas Temuan BPK terkait penertiban Rekening kepada seluruh Kementerian/Lembaga (selesai)	Agustus 2013
						7. Pemerintah melalui surat Direktur PKN nomor S-2764/PB.3/2013 tanggal 16 April 2013 meminta agar KPPN seluruh Indonesia melakukan verifikasi setiap rekening satker, serta melalui surat Direktur PKN nomor S-4487/PB.3/2013 tanggal 28 Juni 2013 agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pemantauan rekening pemerintah milik satker pada KPPN-KPPN di wilayah kerjanya.	selesai	16 April 2013
						8. Pemerintah akan senantiasa memberikan sosialisasi, pemahaman atas pengelolaan	Sosialisasi tentang pengelolaan rekekning pada K/L telah dan akan	Berkelanjutan

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						rekening pada K/L agar pengelolaan rekening pemerintah semakin tertib dan patuh. 9. Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada K/L yang meminta agar dilakukan penertiban rekening dan mengenakan sanksi kepada pejabat/staf yang mengelola rekening tidak sesuai ketentuan.	terus dilakukan. Dit. PKN telah menyampaikan surat nomor S-5372/PB/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal tindak lanjut atas Temuan BPK terkait penertiban Rekening kepada seluruh Kementerian/Lembaga. (selesai)	Berkelanjutan
4.2	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL	a. Selisih nilai koreksi hasil IP pada DJKN dengan SIMAK BMN KL sebesar absolut Rp1.535.138.215.162,00 yang terjadi pada tahun 2011 belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. b. Terdapat Aset Tetap pada tiga KL dengan nilai perolehan sebesar Rp2.571.214.871.909,00 belum dilakukan IP.	X			Terhadap selisih nilai koreksi hasil IP DJKN: a. Melaksanakan proses rekonsiliasi, verifikasi dan validasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan atas selisih nilai tersebut dengan 24 KL terkait; b. Melakukan pembinaan dan asistensi pada 24 KL terkait; c. Melakukan monitoring koreksi hasil IP ke dalam laporan Barang Pengguna; d. Melakukan *update* koreksi hasil IP ke dalam Laporan Barang Milik Negara.	Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 20 Maret 2014 adalah sebesar Rp7,66 milar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 milar Telah dilakukan pembinaan terhadap 24 K/L tersebut dan akan terus dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. untuk progress tindak lanjut rencana tindak poin c dan d: Telah dilakukan koreksi hasil IP ke dalam Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Milik Negara sampai dengan pelaporan semester I tahun 2013.	Pelaporan BMN Tahun 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		c. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 14 KL sebesar Rp371.338.573.083. d. Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada 14 KL sebesar Rp904.287.127.849,01. e. Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL sebesar Rp37.327.884.669.193	X			Terhadap Aset Tetap pada tiga KL yang belum dilakukan IP, rencana tindaknya adalah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan K/L yang menjadi temuan BPK RI untuk memastikan nama satker dan BMN yang menjadi temuan. b. Melakukan konsultasi dengan BPK RI agar pelaksanaan tindak lanjut dapat berjalan dengan baik. c. Melakukan perencanaan pelaksanaan penilaian yang meliputi verifikasi data awal, melakukan pemetaan permasalahan, dan pemetaan target pelaksanaan berdasarkan wilayah kerja KPKNL/Kanwil. d. Melakukan koordinasi/perintah pelaksanaan penilaian kepada KPKNL/Kanwil.	Telah dilakukan koordinasi dengan KL terkait maupun BPK, disamping dengan persuratan juga telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi tanggal 2 Juli 2013 dan 24 Juli 2013. Konsultasi telah dilakukan untuk temuan pada Kementerian Perhubungan yaitu mengenai perbendaan temuan data LKKL dan LKPP. Dari konsultasi tersebut telah diperoleh klarifikasi dan telah dilaksanakan tindak lanjut secara tuntas. Untuk rencana tindak poin c dan d Perencanaan pelaksanaan penilaian telah dilakukan dan telah disampaikan kepada KPKNL/Kanwil dalam bentuk daftar satker yang menjadi target pelaksanaan IP. Target tersebut telah disampaikan melalui surat nomor: S-918/KN/2013 tanggal 2 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti oleh KPKNL/Kanwil dengan pelaksanaan IP. Telah dilakukan pemantauan berupa monitoring dan evaluasi melalui persuratan secara berkala.	Oktober 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						e. Memantau dan mengevaluasi penilaian yang dilakukan oleh KPKNL/Kanwil. f. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penilaian dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.	Laporan pelaksanaan penilaian telah disusun secara berkala. Pelaksanaan IP Aset Tetap sampai saat (18 November 2013) telah menyelesaikan 278 satker atau 95,56% dari target sebanyak 293 satker. 15 Satker sisanya, saat ini dalam proses pelaksanaan IP. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menghambat penyelesaian antara lain: - Satker belum selesai mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan. - Satker kesulitan memberikan pendamping. - Aset Tetap yang menjadi temuan berjumlah cukup banyak dan letaknya tersebar pada wilayah yang luas. Laporan pelaksanaan penilaian tersebut telah disampaikan kepada Dirjen Kekayaan Negara secara berkala.	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			Terhadap Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya: a. Menteri Keuangan telah menerbitkan surat S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 14 K/L untuk menindaklanjuti temuan atas barang yand tidak diketahui keberadaanya;	Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut: - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan; - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada	Minggu I Juli 2013 (selesai) Agustus 2013 September - Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011.	
						b. Melakukan koordinasi teknis dengan masing-masing K/L terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing K/L;	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan *progress* tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.	
						c. Monitoring tindak lanjut temuan BPK atas barang yang tidak diketahui keberadaannya dan penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam PMK No. 96/PMK.06/2007 dan KMK No. 271/KMK.06/2011.	Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 20 Maret 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp Rp311,98 miliar (84,01% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			Terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga: a. Menteri Keuangan telah menerbitkan surat No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 14 K/L untuk menindaklanjuti temuan atas barang yand dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga;	Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut: - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata kepengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; - Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yangmenguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan	Minggu I Juli 2013 (selesai)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; - Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan *progress* tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;	
						b. Berkoordinasi dengan K/L terkait tindak lanjut dengan mengacu pada PMK No. 96/PMK.06/2007 dan KMK No. 271/KMK.06/2011;	Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 20 Maret 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).	Agustus 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						c. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi BMN berdasarkan pihak yang menguasai BMN dan menyusun strategi penyelesaiannya bersama dengan K/L; d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan PMK No. 96/PMK.06/2007 dan KMK No. 271/KMK.06/2011 terkait BMN yang digunakan/dikuasai tidak sesuai ketentuan.		Agustus 2013 Berkelanjutan
			X		X	Terhadap Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan: a. Menyusun surat No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 17 K/L untuk menindaklanjuti temuan aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan;	Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut: - Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan	Minggu I Juli 2013 (selesai) 2013 - 2015 (kecuali tanah dalam sengketa)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.	
						b. Berkoordinasi terus menerus dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertipikasi atas BMN berupa tanah.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							oleh masing-masing KL. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan: - Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/ PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah; - Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertipikasi BMN sebagai *'new initiative'* dalam APBN (on Top di DIPA BPN); - Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah. Untuk percepatan sertipikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertipikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah; Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							pensertipikatan; Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah	
			X			Terkait dengan penyusutan, Pemerintah telah menerapkan penyusutan aset tetap mulai pelaporan semester I tahun 2013 melalui PMK 01/PMK.06/2013.	selesai	Pelaporan Semester I tahun 2013
4.3	Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8,79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar	a. Inventarisasi dan perhitungan atas Aset Eks BPPN telah selesai dilaksanakan, namun pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan tidak menggunakan data/catatan Aset Eks BPPN yang dimiliki DJKN seperti SAPB dan Daftar Nominatif Properti sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN.	X			1. Pemerintah sedang melakukan penelusuran atas pemetaan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh dokumen pendukung untuk menggambarkan aset-aset yang telah dikelola setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sampai dengan pelaksanaan pengelolaan langsung oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008.	Terkait dengan penelusuran dan pemetaan aset Eks BPPN: - Pemerintah (d.h.i. Direktorat PKNSI, DJKN) dengan surat nomor S-944/KN.5/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Plt. Direktur PKNSI dengan surat nomor S-1641/KN.5/2013 tanggal 9 September 2013 telah menyampaikan hasil penelusuran dokumen sumber selisih data sebagaimana dikemukakan BPK RI terkait selisih atas data SAPB dan Daftar Nominatif aset properti. - Ketua Sub Tim BPK RI dengan surat nomor 02/BPPN-BDL/09/2013 tanggal 25 September 2013 telah pula menyampaikan draft hasil pemeriksaan tahap I atas pengelolaan aset eks BPPN dimana antara lain	Desember 2013 Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		b. Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) sebanyak 1.900 unit senilai Rp1.121.998.958.113,00 belum disajikan sesuai nilai wajar. c. Terdapat aset properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp1.070.152.309.824,00 yang belum dapat dijelaskan. d. Kementerian Keuangan dhi. DJKN tidak melakukan monitoring atas status saham dan surat berharga.					menyatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan oleh Dit. PKNSI selisih data aset kredit yang masih perlu dijelaskan keberadaannya dari semula Rp7.726.261.668.803,40 menjadi Rp5.834.434.864.938,67. - Dit. PKNSI, DJKN dengan surat nomor S-1859/KN.5/2013 tanggal 5 Oktober 2013 telah kembali menyampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Atas Aset Eks BPPN & BDL hasil penelitian lebih lanjut diperoleh dokumen pendukung pengurang senilai Rp.255.884.160.388,86. - Dengan data dan dokumentasi pendukung tersebut semakin menunjukkan bahwa selisih data sebagaimana disampaikan BPK dalam LHP atas LKPP T.A. 2012 merupakan pengelolaan aset eks BPPN yang telah selesai dilaksanakan sebelum aset-aset tersebut berada pengelolaan langsung oleh unit-unit teknis di lingkungan	Desember 2013 Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		e. DJKN belum mengadministrasikan jaminan aset kredit eks BPPN secara tertib.					Kementerian Keuangan pada tahun 2009.	
						2. Pemerintah akan menyajikan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA berdasarkan laporan penilaian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam Calk.	Pemerintah telah selesai melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA	Berkelanjutan
						3. Pemerintah akan menatausahakan barang jaminan aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara.	Telah selesai dilakukan oleh PUPN sesuai dengan PMK 128/PMK.06/2007.	
						4. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan aset Eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI).	Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI) yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia dan perwakilan dari DJKN.	
						5. Pemerintah telah melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*.	Penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus free and clear akan terus dilaksanakan.	
4.4	BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BRR NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan Penutup per tanggal akhir tugas 16 April 2009. Koreksi Nilai Aset senilai Rp839.307.413.926,00 oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat	X			1. BRR NAD-Nias telah membuat Laporan Keuangan Penutup per 16 April 2009, dan disampaikan melalui surat nomot S-013/TL-BRR/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Penutup BRR NAD Nias per tanggal 16 April 2009 dan Laporan Proforma Satker BRR NAD Nias dalam Likuidasi. 2. DJKN akan menyampaikan surat kepada Kanwil DJKN Aceh terkait penelusuran atas koreksi	RPMK tentang Pengelolaan BMN eks BRR NAD-NIAS telah diharmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan dan menunggu penetapan dari Menteri Keuangan.	Selesai Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		diyakini kewajarannya. Aset Japan International Cooperation System (JICS) sebesar Rp276.216.129.314 ,00 belum diinventarisasi oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias.				nilai aset senilai Rp839,31 miliar. 3. Terkait aset Japan International Cooperation System (JICS) sebesar Rp.276.216.129.314,- dalam neraca penutup BRR NAD-Nias telah dilakukan koreksi (mutasi kurang) dari neraca, karena aset tersebut berasal dari pendanaan *on budget off treasury* yang penerima (*beneficiaries*) dananya adalah BRR NAD-Nias sedangkan pengadaan dan konstruksinya dilaksanakan sendiri oleh JICS dan langsung diserahterimakan kepada penerima (instansi Pemerintah Pusat/Daerah atau instansi lainnya). 4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Dirjen Perbendaharaan dengan Surat Nomor S-3282/PB/2013 tanggal 10 Mei 2013 telah meminta Reviu Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal tersebut diperlukan mengingat BPK akan melakukan audit setelah LK Penutup BRR NAD-Nias April tahun 2009 direviu oleh Tim Reviu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.		Desember 2013 Desember 2013
5.	**Ekuitas**							
5.1	Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun,	a. Perhitungan dan rincian saldo selisih kurs yang belum terealisasi tidak dapat diyakini kewajarannya b. Mekanisme penghitungan	X			1. Pemerintah akan melakukan revisi atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN untuk mengakomodir rekomendasi BPK.	Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara untuk menggantikan Perdirjen Nomor 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar	proporsi akumulasi saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi menjadi Selisih Kurs Terealisasi hanya memperhitungkan saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi pada rekening terakhir sumber dana. c. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi pada saat konversi mata uang dari Rekening Khusus (Reksus) ke Rekening KUN Rupiah d. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi atas perbedaan value date pada Note				2. Terkait pengelolaan Reksus, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan aturan dan sistem perhitungan selisih kurs. Perbaikan sistem untuk pembukan dan perhitungan selisih kurs di Reksus akan dilakukan sejalan dengan penerapan SPAN. 3. Pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan formula perhitungan selisih kurs sesuai PER-44/PB/2012 pada Reksus tertentu untuk melihat kesesuaian hasilnya dengan perhitungan selisih kurs yang dilakukan oleh BI.	Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2012. Menyesuaikan dengan tahapan pelaksanaan SPAN Ujicoba dilakukan sebagai salah satu langkah dalam penyusunan kebijakan selisih kurs yang baru yang sedang diproses DJPB	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		of Disbursement (NoD) dengan Penerimaan Kas. e. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi atas pelepasan valas ke luar rekening pemerintah.						
5.2	Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda Sebesar Rp8,15 Miliar, Penambahan Fisik SAL Sebesar Rp33,49 Miliar Belum Dapat Dijelaskan, dan Koreksi Pencatatan SiLPA Sebesar Rp30,89 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	a. Rekonsiliasi belanja antara pencatatan di KL (SAI) dengan pencatatan Bendahara Umum Negara (SAU) belum efektif sehingga masih terdapat selisih antara belanja yang dicatat sebagai suspen sebesar Rp206.913.823.419,00 (neto) dan Rp2.296.777.211.946,00 (absolut) b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	X			1. Pemerintah telah dan akan terus melaksanankan serta meningkatkan kualitas rekonsiliasi antara SAI dan SAU sehingga dapat memperkecil suspen. 2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat PKN melakukan rekonsiliasi secara intensif setiap triwulan atas transaksi pemindahbukuan antara Direktorat PKN dan KPPN.	Pemerintah telah melakukan rekonsiliasi baik di tingkat satker, wilayah,eselon I, dan tingkat K/L untuk periode sampai dengan dan triwulan III 2013, serta akan terus melaksanankan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi dimaksud. Terkait dengan permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran: Dit. PKN telah menyampaikan S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Monitoring dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP, dimana dari hasil surat tersebut terlihat kemajuan besar atas perbaikan saldo kas di BP pada semua KPPN. Selain itu Dit. PKN juga telah menyampaikan beberapa surat petunjuk penyelesaian masalah saldo kas di BP antara lain S-5300/PB.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal Perlakuan Akuntansi atas Permasalahan yang	Berkelanjutan Berkelanjutan

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		berdasarkan catatan BUN tidak dapat digunakan sebagai monitoring atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh KL. c. Transaksi Kiriman Uang sebesar Rp87.679.005.218,00 tidak dapat ditelusuri.				3. Pemerintah akan melakukan pembinaan secara intensif kepada KPPN dalam rangka perbaikan pencatatan kiriman uang di KPPN dan melakukan monitoring atas transaksi koreksi pembukuan yang dibukukan oleh KPPN. 4. Terkait dengan Transaksi Kiriman Uang yang tidak dapat ditelusuri, Pemerintah akan melakukan koreksi saldo SAL (Saldo Anggaran Lebih) pada LKPP Tahun 2013 sebesar Rp33,49 miliar, akibat pemerintah hanya melaporkan pengeluaran KU pada LKPP Tahun 2012 dan tanpa melaporkan penerimaan KU nya, sehingga menimbulkan selisih dalam kas transito. 5. Pemerintah akan melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN di Indonesia tentang pelaksanaan Perdirjen nomor 5/PB/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran pada Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN.	terjadi pada Satker SPRIPIM Polda Makassar dan S-6045/PB.3/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penyelesaian Saldo Kas di BP Karena Perubahan Kode Satker. Pemerintah telah dan terus melakukan pembinaan secara intensif kepada KPPN. Terkait dengan permasalahan kiriman uang: 1. Ditjen Perbendaharaan saat ini telah merumuskan formula perhitungan SAL dan langkah-langkah penyelesaian selisih fisik dengan catatan SAL 2. Dit. PKN melaksanakan rekonsiliasi secara rutin antara Kantor Pusat dengan KPPN untuk transaksi kiriman uang. Pemerintah telah dan akan terus melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN terkait penyelesaian saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran.	berkelanjutan Desember 2013 September 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
II	**TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**							
1	**Pendapatan dan Hibah**							
1.1	Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara	a. Hibah langsung berupa uang pada sembilan KL diterima sebesar Rp228.358.390.997,00 dan telah dibelanjakan sebesar Rp221.675.084.063,00; b. Hibah langsung berupa jasa pada satu KL telah diterima sebesar Rp5.049.860.784,00.	X			Pemerintah akan merevisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, yang antara lain memberikan kewenangan bagi Pimpinan K/L untuk memberikan sanksi kepada satker yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.	DJPU telah menyampaian usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan *one gate policy* pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan antara lain: - Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung. - Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap K/L yang tidak melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan. - Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah.	2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2.	**Belanja**							
2.1	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar	a. Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp624.928.430.807,71 pada 41 KL . b. Kelebihan pembayaran sebesarRp273.400.771.112,26. c. Pemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234.691.649.599,52 terjadi pada 18 KL. d. Realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatannya (indikasi fiktif) sebesar Rp7.555.079.812,50 terjadi	X			1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh K/L agar menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal, melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara. 2. Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai pada saat pembahasan anggaran antara Kementerian Keuangan dengan K/L. 3. Pemerintah akan melaksanakan sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran	Pemerintah telah telah menyampaikan surat kepada seluruh K/L terkait penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran Pemerintah telah mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan pada pembahasan RKA K/L TA 2014. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah melaksanakan sosialisasi PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 20 Desember 2012 untuk para pejabat pengelola keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan tanggal 10 Januari 2013 untuk para pejabat di bidang pengawasan internal Kementerian/ Lembaga, serta aparat penegak hukum. Terkait dengan temuan pada K/L terkait penganggaran dan	2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		pada 13 KL. e. Denda sebesar Rp75.894.920.602,81 belum dipungut atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pada 44 KL. f. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan Belanja Perjalanan Dinas seluruhnya sebesar Rp30.359.514.679,08 dengan rincian Rp30.266.947.762,75, USD8,480.00 ekuivalen g. Terdapat realisasi Belanja Barang yang bukti pertanggungjawabannya tidak				Kementerian Negara/Lembaga.	penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial: - K/L yang telah menyetorkan ke Kas Negara semua jumlah kerugian negara dan denda yang menjadi temuan pemeriksaan BPK adalah Sekretariat Negara (Rp61.852.368) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Rp331.100), DPR RI (Rp24.079.300), Kemenko Kesra (Rp104.597.300), Badan Intelijen Negara (Rp136.301.164), Lembaga Ketahanan Nasional (Rp276.520.000), KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (Rp635.177.111), Mahkamah Konstitusi (Rp256.990.703), BPPT (Rp77.754.653), dan Sekretariat Kabinet (Rp18.115.500). - K/L yang menyetorkan sebagian kerugian negara dan denda yang menjadi temuan pemeriksaan BPK antara lain:Kementerian Dalam Negeri (Rp18.307.748.530), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp15.552.660.054), Kemendikbud (Rp14.391.988.068), Kemenkop UKM (Rp11.092.839.678),Kemente	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		ada/tidak lengkap /tidak akuntabel sebesar Rp176.853.865.170,73 pada 15 KL.					rian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp3.273.164.622), Kementerian Kesehatan (Rp3.145.840.417),Kementerian Perhubungan (Rp2.462.867.735), Kementerian Keuangan (Rp2.290.320.508), Kejaksaan Agung (Rp2.053.498.543), Badan Informasi Geospasial (Rp1.090.733.306), Kementerian Pekerjaan Umum (1.032.598.511), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp953.841.356), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI(Rp921.481.311), Badan Narkotika Nasional (Rp857.795.409), Kementerian Kehutanan (Rp647.377.266), Badan Standarisasi Nasional (Rp498.585.794), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Rp442.961.838),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Rp408.328.133)	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp367.563.021), Kemenko Perekonomian (Rp343.361.405), BKKBN (Rp339.718.628), Badan Pengawas Pemilu (Rp132.044.959), Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Rp.107.147.300), Kementerian Perindustrian (Rp92.222.682),	
3.	**Aset**							
3.1	Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun	a. BPMIGAS Tidak Melaksanakan Ketentuan Prosedur Penunjukan Langsung PT TPPI Sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara. b. Mekanisme Pembayaran Tidak Langsung oleh PT TPPI yang Disetujui oleh Menteri Keuangan Sulit untuk Dilaksanakan. c. BPMIGAS Tidak	X			1. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan piutang negara kepada PT TPPI telah dilakukan negosiasi oleh para kreditur PT TPPI yaitu SKK Migas, Pertamina, dan PT PPA dengan menandatangani Kesepakatan Bersama yang intinya antara lain menyepakati: - Pengalihan hak dan kewajiban SKK Migas kepada PT Pertamina (Persero) atas pengelolaan, pengawasan maupun pengaturan piutang negara yang berasal dari tagihan SKK Migas kepada PT TPPI. - SKK Migas akan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai penjual Kondensat bagian negara dengan harga *Free On Board* (FOB) sesuai ICP, dan selanjutnya PT Pertamina (Persero) akan memasok kondensate untuk PT TTPI dengan harga ICP+alpha. - Pencabutan upaya hukum kasasi SKK	Memonitor pembayaran piutang Pemerintah kepada PT TPPI dengan melakukan monitoring atas progress persetujuan Menteri Keuangan atas Kesepakatan Bersama (KB) mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT. TPPI Proses monitoring telah dilakukan di antaranya: - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 0423/SKK00000/2013/S4 tanggal 7 Juni 13 perihal Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		Mengelola Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Sesuai Kontrak. d. Penyelesaian Piutang kepada PT TPPI Berlarut-larut dan Berpotensi Tidak Tertagih.				Migas dan melakukan penyelesaian melalui *out of court setlement.* - Percepatan penyelesaian waktu pembayaran piutang negara yang telah dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) menjadi ± 8 tahun (semula 15 tahun).	kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan kronologi singkat permasalahan TPPI beserta penyelesaiannya serta permohonan dukungan dari Menteri Keuangan atas KB yang telah ditandatangani oleh SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset. - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 00829/SKK00000/2013/S4 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan status terkini dari proses penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI baik melalui mekanisme Perjanjian Perdamaian TPPI maupun melalui mekanisme KB. SKK Migas juga mengharapkan adanya arahan dari Menteri Keuangan perihal status KB tersebut dan/atau dukungan persetujuan Menteri	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Keuangan atas KB dimaksud. - SKK Migas menerbitkan Surat Nomor 1776/SKKC2000/2013/54 tanggal 28 Oktober 2013 tentang *Reminder Outstanding* per 30 September 2013 kepada TPPI agar segera menyelesaikan *outstanding* kewajiban TPPI. Progress tindak lanjut untuk rencana tindak point 2 dan 3: Dalam rangka menyampaikan dukungan atas kesepakatan dimaksud, telah diadakan beberapa kali rapat, yang terakhir tanggal 14 Agustus 2013 di DJKN yang dihadiri oleh beberapa unit internal DJKN, DJA, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum dan PT PPA. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada PT PPA	
						2. Penyelesaian melalui kesepakatan bersama tersebut diketahui dan telah dimintakan dukungan kepada Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan.	DJA dan DJKN telah menyusun dan menyampaikan nota dinas bersama kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan September 2013, guna menyampaikan konsep surat kepada PT PPA dimaksud.	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						3. Dengan kesepakatan bersama dan dukungan 3 Kementerian tersebut, dapat diyakini bahwa piutang negara sebesar Rp1,35 triliun akan dapat tertagih.		
4.	**Investasi**							
4.1	Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya	APBN Tahun 2012 dan 2013 belum menganggarkan pembiayaan untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota tersebut. Sedangkan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 belum ditetapkan. Hal ini berarti sumber pendanaan pembayaran kenaikan kuota belum jelas dan apabila sewaktu-waktu persyaratan pembayaran kuota berlaku efektif, maka Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran karena jatuh tempo pembayarannya hanya 30 hari sejak tanggal efektif. Permasalahan	X			Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BI saat ini sedang melakukan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Ijin prakarsa atas pelaksanaan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012.	Proses pembahasan revisi PP 1 Tahun 1967 antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan telah mendekati tahap finalisasi dengan tahap akhir reviu konten draf PP antara ahli hukum Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan instansi terkait dalam penyiapan PP pada bulan November atau Desember 2013. Revisi PP diharapkan selesai pada bulan kedua tahun 2014.	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		tersebut disebabkan: a. Penyusunan revisi atas PP Nomor 1 Tahun 1967 berlarut-larut; dan b. Pemerintah dalam menerbitkan LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan ratifikasi amandemen AoA reformasi *Executive Board* kepada IMF belum berpedoman pada UUD 1945 dan perubahannya.						
4.2	Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme	Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SKSP maupun SKK Migas tidak berbeda dari BPMIGAS, dimana biaya operasional berasal dari jumlah tertentu setiap	X			1. Pemerintah akan menetapkan status hukum pengelolaan keuangan SKK Migas melalui Peraturan Presiden. Saat ini, sedang disusun konsep pengelolaan status keuangan dan mekanisme penganggaran biaya operasional SKK Migas yang paling sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha hulu migas.	SKK migas telah menyampaikan usulan mekanisme dan sumber anggaran SKK Migas kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan melalui surat No. 0460/SKK0000/2013/S$ tanggal 27 Juni 2013.	Desember 2013

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	APBN	kegiatan usaha hulu migas dari rekening 600 (bukan rekening Kas Umum Negara) atau tidak melalui BUN. Selain itu penetapan penganggarannya diusulkan oleh Menteri ESDM dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau tidak melalui mekanisme APBN. Sehubungan dengan perubahan status hukum BPMIGAS menjadi SKK Migas, Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas sampai dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 berakhir.	X				Merujuk surat tersebut, SKK Migas menyampaikan Tanggapan atas LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 melalui surat No.0530/SKK00000/2013/S4 tanggal 23 Juli 2013 kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat berjalan terus secara berkelanjutan dalam rangka mendukung target penerimaan Negara, SKK Migas mengusulkan penganggaran biaya operasional SKK Migas agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sesuai Peraturan Presiden No.9 Tahun 2013, sampai dengan ditetapkannya Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang baru. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan SDM No S-628/MK.02/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai rencana pendanaan SKK Migas TA 2014 melalui mekanisme APBN yang meminta Menteri ESDM agar dapat menyampaikan usulan pagu anggaran SKK Migas tahun 2014 agar dapat diusulkan kepada DPR untuk ditampung dalam RAPBN 2014.	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	*PROGRESS REPORT*	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Disamping itu, dalam rangka memberikan payung hukum pendanaan kegiatan SKK Migas tahun 2014 melalui mekanisme APBN, Menteri Keuangan juga meminta Menteri ESDM agar dapat mengkoordinasikan langkah-langkah perumusan Revisi Perpres No. 9 Tahun 2013 Mengingat revisi atas Perpres No. 9 Tahun 2013 belum diterbitkan, maka dasar hukum pendanaan SKK Migas untuk tahun 2014 masih berupa biaya operasional yang bersumber dari penerimaan migas yang ditampung dalam Rekening Migas. Dengan demikian pendanaan SKK Migas TA 2014 masih menggunakan pola mekanisme APBN dengan asas netto.	
						2. Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR-RI untuk membahas kelanjutan RUU di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diinisiasi oleh DPR; yang antara lain mengatur ketentuan tentang tugas dan fungsi SKK Migas, sumber serta mekanisme pendanaan kegiatan SKK Migas.		

Keterangan:

Klasifikasi 1: Temuan Pemeriksan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan;
Klasifikasi 2: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya;
Klasifikasi 3: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara.Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2013 dan berakhir 31 Desember 2013, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pengelolaan utang selain terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan, dalam jangka panjang juga berperan dalam pengelolaan portofolio yang mendukung kesinambungan fiskal. Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara adalah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;

b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);

c. Mengelola portofolio utang Negara.

Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN disediakan dalam APBN.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal
   Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi
   SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan
   Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*).Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.Sedangkan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

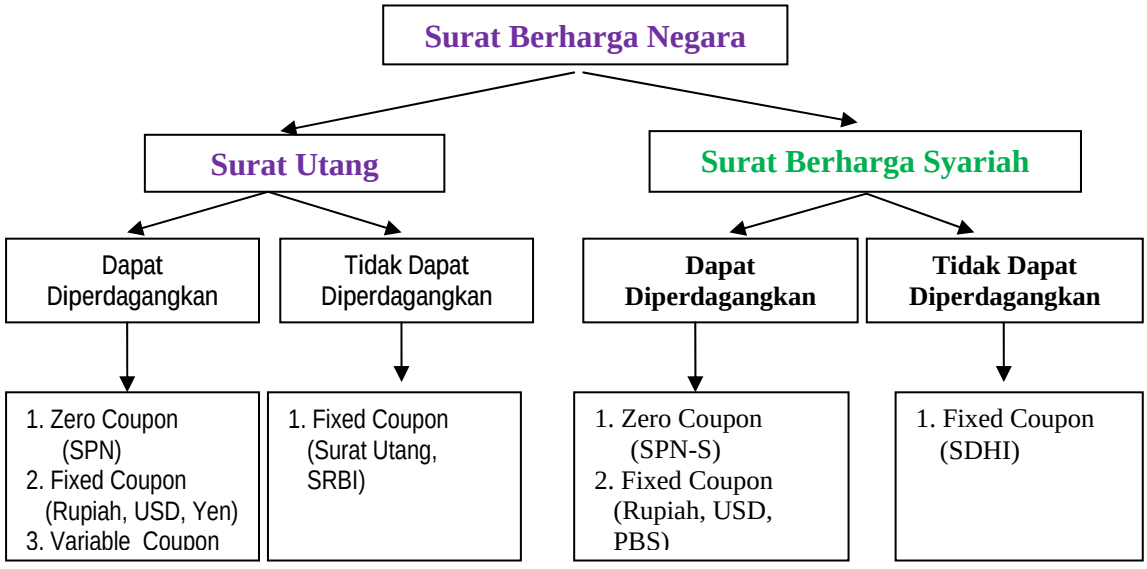
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi, adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis.Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (***registry***)dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer / pasar perdana.Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri.Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (***over the counter/*** OTC).SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah.Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN.Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN.Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum.PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2013 dapat digambarkan pada gambarberikut.



Struktur Surat Berharga Negara

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2013

Target pembiayaan APBN-Perubahan tahun 2013 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp231.800.000.000.000 Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo *(buyback).*

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2013 dilelang sebanyak 27 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2013 .

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di tahun 2013, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1,01 kali sampai 9.16 kali. Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2013 adalah sebesar R185.655.255.000.000, dengan rincian:

a. ON dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp165.450.000.000.000;

b. Obligasi Negara Ritel (ORI) yang ditawarkan dengan metode *book building* diterbitkan sebanyak 1 kali penerbitan sebesar Rp20.205.255.000.000.

Penjualan ORI yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan, yaitu ORI010, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2013 , Pemerintah menerbitkan33 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp42.400.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value (Rp)
1	SPN03130416	15-Jan-13	16-Apr-13	-	800.000.000.000
2	SPN12140116	15-Jan-13	16-Jan-14	-	1.000.000.000.000
3	SPN12140116	29-Jan-13	16-Jan-14	-	1.000.000.000.000
4	SPN03130517	14-Feb-13	17-May-13	-	1.000.000.000.000
5	SPN12140217	14-Feb-13	17-Feb-14	-	1.000.000.000.000
6	SPN12140217	26-Feb-13	17-Feb-14	-	1.000.000.000.000
7	SPN03130614	13-Mar-13	14-Jun-13	-	1.000.000.000.000
8	SPN12140314	13-Mar-13	14-Mar-14	-	1.000.000.000.000
9	SPN12140314	26-Mar-13	14-Mar-14	-	1.000.000.000.000
10	SPN03130710	9-Apr-13	10-Jul-13	-	1.000.000.000.000
11	SPN12140410	9-Apr-13	10-Apr-14	-	1.000.000.000.000
12	SPN12140410	23-Apr-13	10-Apr-14	-	1.000.000.000.000
13	SPN03130807	6-May-13	7-Aug-13	-	1.000.000.000.000
14	SPN12140507	6-May-13	7-May-14	-	1.350.000.000.000
15	SPN12140507	21-May-13	7-May-14	-	1.000.000.000.000
16	SPN03130904	3-Jun-13	4-Sep-13	-	550.000.000.000
17	SPN12140604	3-Jun-13	4-Jun-14	-	250.000.000.000
18	SPN12140604	18-Jun-13	4-Jun-14	-	400.000.000.000
19	SPN03131003	2-Jul-13	3-Oct-13	-	1.000.000.000.000
20	SPN12140703	2-Jul-13	3-Jul-14	-	2.000.000.000.000
21	SPN12140703	16-Jul-13	3-Jul-14	-	7.350.000.000.000
22	SPN03131031	30-Jul-13	31-Oct-13	-	1.000.000.000.000
23	SPN12140731	30-Jul-13	31-Jul-14	-	1.500.000.000.000
24	SPN12140731	27-Aug-13	31-Jul-14	-	3.050.000.000.000

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value (Rp)
25	SPN03131211	10-Sep-13	11-Dec-13	-	1.000.000.000.000
26	SPN12140911	10-Sep-13	11-Sep-14	-	2.000.000.000.000
27	SPN12140911	24-Sep-13	11-Sep-14	-	2.000.000.000.000
28	SPN03140109	8-Oct-13	9-Jan-14	-	1.000.000.000.000
29	SPN12141009	8-Oct-13	9-Oct-14	-	1.000.000.000.000
30	SPN12141009	22-Oct-13	9-Oct-14	-	1.000.000.000.000
31	SPN03140207	6-Nov-13	7-Feb-14	-	1.000.000.000.000
32	SPN12141107	6-Nov-13	7-Nov-14	-	450.000.000.000
33	SPN12141107	19-Nov-13	7-Nov-14	-	700.000.000.000
	Jumlah				**42.400.000.000.000**

Tabel 15. Seri SPN yang diterbitkan tahun 2013

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan SUN dalam Valuta Asing

Total penerbitan SUN Valas dalam tahun 2013 adalah sebesar US$4.190.000.000 atau setara dengan Rp41.494.700.000.000 yang terdiri atas:

a. *International Bonds* sebesar US$4.000.000.000 atau setara dengan Rp39.228.000.000.000;

b. SUN domestik valas sebesar US$190.000.000 atau setara dengan Rp2.266.700.000.000.

Pada tahun 2013 dilaksanakan 2 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan April 2013 yaitu seri RI0423 dengan tingkat yield 3.375% dan seri RI0443 dengan tingkat yield 4.625%, serta pada bulan Juli 2013 yaitu seri RI1023 dengan tingkat yield 5,375%. Selain itu, pada tahun 2013 diterbitkan pula SUN domestik valas pada bulan November 2013 yaitu seri USDFR0001 dengan tingkat yield 3.500%.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada tahun 2013, disajikan dalam tabel 16

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh tempo	Kupon	Face Value	
					Valas	Rupiah
1	RI0423	8-Apr-13	25-Apr-23	3.375%	$ 1,500,000,000.00	14.584.500.000.000
2	RI0443	8-Apr-13	25-Apr-43	4.625%	$ 1,500,000,000.00	14.584.500.000.000
3	RI1023	10-Jul-13	17-Oct-23	5.375%	$ 1,000,000,000.00	10.059.000.000.000
4	USDFR0001	25-Nov-13	15-May-17	3.500%	$ 190,000,000.00	2.266.700.000.000
	JUMLAH				**$ 4,190,000,000.00**	**41.494.700.000.000**

Tabel 16. Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2013

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp1.976.000.000.000 sebagaimana disajikan dalam tabel 17 berikut.

No.	Tanggal *Debtswitch*	Penawaran (Rp)	Dimenangkan (Rp)
1	22-Jan-13	1.868.000.000.000	616.000.000.000
2	17-Apr-13	3.410.000.000.000	519.000.000.000
3	23-May-13	350.000.000.000	291.000.000.000
4	5-Sep-13	847.000.000.000	-
5	28-Nov-13	747.000.000.000	550.000.000.000
	TOTAL 2013	**7.222.000.000.000**	**1.976.000.000.000**

Tabel 17. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2013

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2013 disajikan dalam tabel 18 sebagai berikut.

Tanggal	Dari				Menjadi		
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal (Rp)	Seri	Jatuh Tempo	Kupon
22-Jan-13	FR0033	15-03-2013	12,50000%	-			
	FR0019	15-06-2013	14,25000%	255.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0049	15-09-2013	9,00000%	-			
	FR0020	15-12-2013	14,27500%	-			
	FR0051	15-05-2014	11,25000%	-			
	FR0026	15-10-2014	11,00000%	30.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0027	15-06-2015	9,50000%	100.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0030	15-05-2016	10,75000%	21.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0055	15-09-2016	7,37500%	37.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0028	15-07-2017	10,00000%	-			
	FR0032	15-07-2018	15,00000%	-			
	FR0038	15-08-2018	11,60000%	133.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
	FR0048	15-09-2018	9,00000%	40.000.000.000	FR0063	15 Mei 2023	5,62500%
				616.000.000.000			
17-Apr-13	FR0060	15-04-2017	6,25000%	-			
	FR0032	15-07-2018	15,00000%	-			
	FR0038	15-08-2018	11,60000%	-			
	FR0048	15-09-2018	9,00000%	-			
	FR0036	15-09-2019	11,50000%	-			
	FR0031	15-11-2020	11,00000%	9.000.000.000	FR0064	15-05-2028	6,12500%
	FR0034	15-06-2021	12,80000%	470.000.000.000	FR0064	15-05-2028	6,12500%
	FR0053	15-07-2021	8,25000%	40.000.000.000	FR0064	15-05-2028	6,12500%
	FR0035	15-06-2022	12,90000%	-			
	FR0043	15-07-2022	10,25000%	-			
				519.000.000.000			
23-May-13	FR0049	15-09-2013	9,00000%	10.000.000.000	FR0066	15-05-2018	5,25000%
	FR0026	15-10-2014	11,00000%	67.000.000.000	FR0066	15-05-2018	5,25000%
	FR0027	15-06-2015	9,50000%	50.000.000.000	FR0066	15-05-2018	5,25000%
	FR0030	15-05-2016	10,75000%	39.000.000.000	FR0066	15-05-2018	5,25000%
	FR0055	15-09-2016	7,37500%	125.000.000.000	FR0066	15-05-2018	5,25000%
	FR0032	15-07-2018	15,00000%	-			
	FR0048	15-09-2018	9,00000%	-			
				291.000.000.000			
5-Sep-13	ORI005	15-09-2013	11,45000%	-	FR0070	15-03-2024	8,37500%
	FR0020	15-12-2013	14,27500%	-			
	FR0051	15-05-2014	11,25000%	-			
	FR0026	15-10-2014	11,00000%	-			
	ORI008	15-10-2014	7,30000%	-			
	FR0027	15-06-2015	9,50000%	-			
	FR0030	15-05-2016	10,75000%	-			
	FR0055	15-09-2016	7,37500%	-			
	FR0060	15-04-2017	6,25000%	-			
	FR0032	15-07-2018	15,00000%	-			
	FR0038	15-08-2018	11,60000%	-			

Tanggal	Dari				Menjadi		
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal (Rp)	Seri	Jatuh Tempo	Kupon
	FR0048	15-09-2018	9,00000%	-			
				-			
28-Nov-13	FR0051	15-05-2014	11,25000%	3.000.000.000	FR0070	15-03-2024	8,37500%
	FR0026	15-10-2014	11,00000%	-			
	FR0027	15-06-2015	9,50000%	-			
	FR0030	15-05-2016	10,75000%	-			
	FR0055	15-09-2016	7,37500%	26.000.000.000	FR0070	15-03-2024	8,37500%
	FR0060	15-04-2017	6,25000%	-			
	FR0028	15-07-2017	10,00000%	-			
	FR0032	15-07-2018	15,00000%	450.000.000.000	FR0070	15-03-2024	8,37500%
	FR0038	15-08-2018	11,60000%	71.000.000.000	FR0070	15-03-2024	8,37500%
	FR0048	15-09-2018	9,00000%	-			
				550.000.000.000			
Jumlah				**1.976.000.000.000**			

Tabel 18. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2013

Di samping *debtswitch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder.

Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

Pada tahun 2013 telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPU sebanyak 5 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp1.551.385.000.000 dengan perincian sebagaimana disajikan dalam tabel 20 berikut.

No.	Date	Series	Jatuh Tempo	Volume	Nominal	Harga Tertimbang
1	20-Mar-13	FR0028	15-Jul-17	37.572	37.572.000.000	120.36
	Sub total			**37.572**	**37.572.000.000**	
2	28-May-13	FR0032	15-Jul-18	5.508	5.508.000.000	143.80
		FR0038	15-Aug-18	11.895	11.895.000.000	129.05
	Sub total			**17.403**	**17.403.000.000**	
3	10-Jun-13	FR0040	15-Sep-25	471.910	471.910.000.000	136.28
		FR0050	15-Jul-38	25.000	25.000.000.000	140.10
	Sub total			**496.910**	**496.910.000.000**	
4	13-Jun-13	FR0048	15-Sep-18	144.500	144.500.000.000	114.70
		FR0028	15-Jul-17	50.000	50.000.000.000	115.90
		FR0060	15-Apr-17	160.000	160.000.000.000	102.20
		FR0055	15-Sep-16	145.000	145.000.000.000	105.00
	Sub total			**499.500**	**499.500.000.000**	
5	20-Jun-13	FR0048	15-Sep-18	22.900	22.900.000.000	112.75
		FR0028	15-Jul-17	4.400	4.400.000.000	114.00
		FR0060	15-Apr-17	185.000	185.000.000.000	100.70
		FR0055	15-Sep-16	287.700	287.700.000.000	103.50
	Sub total			**500.000**	**500.000.000.000**	
TOTAL 2013				**1.551.385**	**1.551.385.000.000**	

Tabel 19. Transaksi *Buyback* tahun 2013

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2013

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 7 Mei 2008 telah disahkan dan menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.

b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.

c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).

d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;

e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

Pada tahun anggaran 2013, pemerintah Indonesia mulai melakukan penerbitan SBSN PBS *Project Financing* di mana hasil penerbitan secara langsung digunakan untuk membiayai suatu proyek tertentu (*earmark*). Hasil penerbitan SBSN *Project Financing* pada tahun 2013 digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya. Nominal penerbitan SBSN PBS *Project Financing* pada tahun 2013 adalah sebesar Rp777,8 miliar, sesuai realisasi pelaksanaan proyek oleh Kementerian Perhubungan. Atas penerbitan SBSN untuk *project financing* tersebut telah dilakukan pembukuan dengan cara reklasifikasi atas akun "Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang" ke dalam akun "Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek melalui SBSN PBS". Seri SBSN yang digunakan untuk *Project Financing* pada tahun 2013 ini adalah seri PBS-005 yang akan jatuh tempo pada 15 April 2043.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp53.175.875.000.000 yang terdiri dari 4 jenis instrumen yakni SR, PBS, SPN-S dan SNI, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 20.

Seri	Tanggal Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Jumlah	Metode Penerbitan
SPN-S				**11,653,000,000,000**	Lelang
SPN-S06082013	7-Feb-13	6-Aug-13		700,000,000,000	
SPN-S06092013	7-Mar-13	6-Sep-13		720,000,000,000	
SPN-S17102013	18-Apr-13	17-Oct-13		400,000,000,000	
SPN-S15112013	16-May-13	15-Nov-13		210,000,000,000	
SPN-S26122013	27-Jun-13	26-Dec-13		990,000,000,000	
SPN-S10012014	11-Jul-13	10-Jan-14		395,000,000,000	
SPN-S24012014	25-Jul-13	24-Jan-14		5,235,000,000,000	
SPN-S21022014	22-Aug-13	21-Feb-14		900,000,000,000	
SPN-S04032014	4-Sep-13	4-Mar-14		700,000,000,000	
SPN-S18032014	19-Sep-13	18-Mar-14		748,000,000,000	
SPN-S02042014	3-Oct-13	2-Apr-14		400,000,000,000	
SPN-S27052014	28-Nov-13	27-May-14		255,000,000,000	
Sukuk Ritel				**14,968,875,000,000**	Bookbuilding
SR005	27-Feb-13	27-Feb-16	6.00%	14,968,875,000,000	
PBS				**9,316,000,000,000**	Lelang
PBS001	16-Feb-12	15-Feb-18	4.45%	805,000,000,000	
PBS002	2-Feb-12	15-Jan-22	5.45%	10,000,000,000	
PBS003	2-Feb-12	15-Jan-27	6.00%	85,000,000,000	
PBS004	16-Feb-12	15-Feb-37	6.10%	3,410,000,000,000	
PBS005	2-May-13	15-Apr-43	6.75%	4,679,000,000,000	
PBS006	19-Sep-13	15-Sep-20	8.25%	327,000,000,000	
Sukuk Valas				**$ 1,500,000,000**	Bookbuilding
SNI-19	17-Sep-13	15-Mar-19	6.125%	$ 1,500,000,000	
Jumlah				**53,175,875,000,000**	

*) Kurs Setelmen SNI-19 = Rp11.492/US$

Tabel 20. Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2013

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2013

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

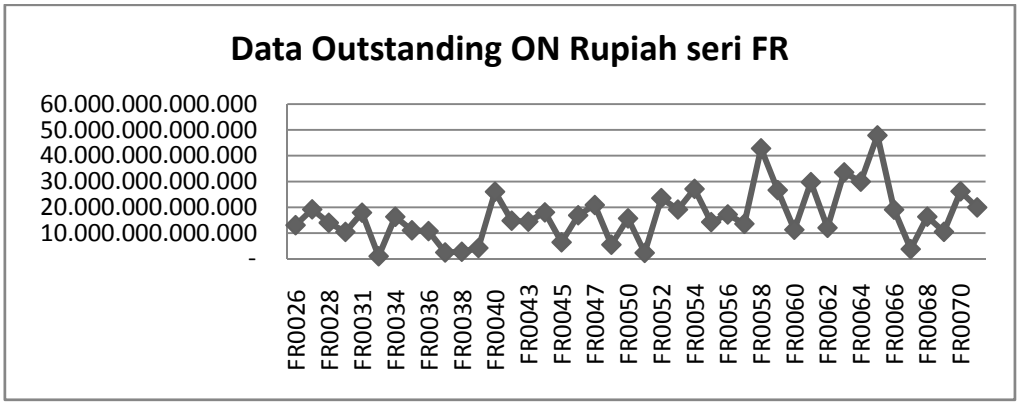
a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Berdasarkan posisi akhir tahun 2013, terdapat 42 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25 % sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2044. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* sampai dengan Desember 2013 disajikan dalam tabel 21 berikut.

No.	Seri	First Issued Date	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	FR0026	26-Aug-04	10/15/2014	13.029.479.000.000	11,00000%
2	FR0027	27-Jan-05	6/15/2015	19.154.000.000.000	9,50000%
3	FR0028	24-Feb-05	7/15/2017	13.963.744.000.000	10,00000%
4	FR0030	19-May-05	5/15/2016	10.431.000.000.000	10,75000%
5	FR0031	16-Jun-05	11/15/2020	17.890.000.000.000	11,00000%
6	FR0032	1-Sep-05	7/15/2018	978.492.000.000	15,00000%
7	FR0034	26-Jan-06	6/15/2021	16.286.400.000.000	12,80000%
8	FR0035	16-Feb-06	6/15/2022	11.023.750.000.000	12,90000%
9	FR0036	20-Apr-06	9/15/2019	10.735.500.000.000	11,50000%

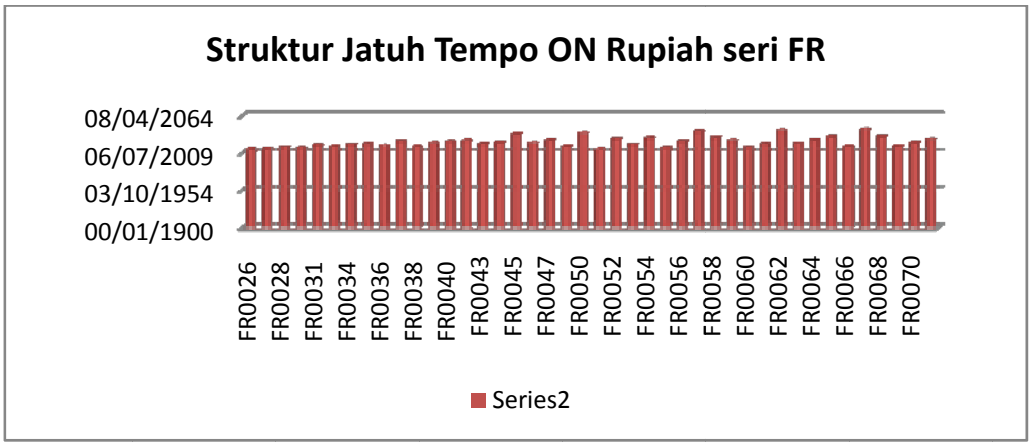
No.	Seri	First Issued Date	Maturity Date	Principle	Rate (%)
10	FR0037	18-May-06	9/15/2026	2.450.000.000.000	12,00000%
11	FR0038	24-Aug-06	8/15/2018	2.704.862.000.000	11,60000%
12	FR0039	24-Aug-06	8/15/2023	4.175.000.000.000	11,75000%
13	FR0040	21-Sep-06	9/15/2025	26.002.090.000.000	11,00000%
14	FR0042	25-Jan-07	7/15/2027	14.774.100.000.000	10,25000%
15	FR0043	22-Feb-07	7/15/2022	14.417.000.000.000	10,25000%
16	FR0044	19-Apr-07	9/15/2024	18.014.000.000.000	10,00000%
17	FR0045	24-May-07	5/15/2037	6.400.000.000.000	9,75000%
18	FR0046	19-Jul-07	7/15/2023	16.855.000.000.000	9,50000%
19	FR0047	30-Aug-07	2/15/2028	20.840.000.000.000	10,00000%
20	FR0048	27-Sep-07	9/15/2018	5.468.570.000.000	9,00000%
21	FR0050	24-Jan-08	7/15/2038	15.661.000.000.000	10,50000%
22	FR0051	15-Jan-09	5/15/2014	2.279.123.000.000	11,25000%
23	FR0052	20-Aug-09	8/15/2030	23.500.000.000.000	10,50000%
24	FR0053	8-Jul-10	7/15/2021	19.083.793.000.000	8,25000%
25	FR0054	22-Jul-10	7/15/2031	27.096.000.000.000	9,50000%
26	FR0055	23-Sep-10	9/15/2016	14.229.300.000.000	7,37500%
27	FR0056	23-Sep-10	9/15/2026	17.164.000.000.000	8,37500%
28	FR0057	21-Apr-11	5/15/2041	13.550.000.000.000	9,50000%
29	FR0058	21-Jul-11	6/15/2032	42.798.000.000.000	8,25000%
30	FR0059	15-Sep-11	5/15/2027	26.630.000.000.000	7,00000%
31	FR0060	6-Oct-11	4/15/2017	11.255.000.000.000	6,25000%
32	FR0061	6-Oct-11	5/15/2022	29.700.000.000.000	7,00000%
33	FR0062	9-Feb-12	4/15/2042	12.000.000.000.000	6,37500%
34	FR0063	13-Aug-12	5/15/2023	33.516.000.000.000	5,62500%
35	FR0064	13-Aug-12	5/15/2028	29.895.000.000.000	6,12500%
36	FR0065	30-Aug-12	5/15/2033	47.850.000.000.000	6,62500%
37	FR0066	25-Oct-12	5/15/2018	19.041.000.000.000	5,25000%
38	FR0067	17-Jul-13	2/15/2044	3.750.000.000.000	8,75000%
39	FR0068	31-Jul-13	3/15/2034	16.300.000.000.000	8,37500%
40	FR0069	28-Aug-13	4/15/2019	10.450.000.000.000	7,87500%
41	FR0070	28-Aug-13	3/15/2024	26.150.000.000.000	8,37500%
42	FR0071	11-Sept-13	3/15/2029	19.900.000.000.000	9,00000%

Tabel 21. Outstanding SBN seri *Fixed Rate* (FR) per 31 Desember 2013



Grafik 44. Data *Outstanding* ON Rupiah seri Fixed Rate tgl 31 Desember 2013

Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 45 berikut.



Grafik 45. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

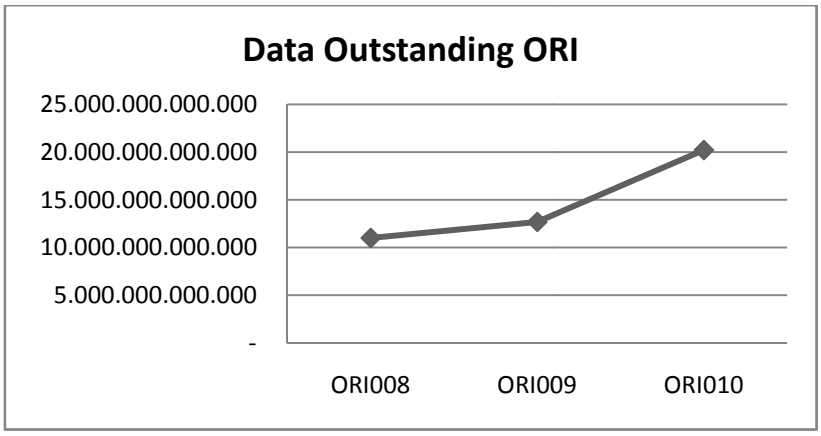
Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2013 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI010 dengan tingkat kupon 8,50% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp20.205.255.000.000 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2013 menunjukkan ada tiga seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 22 berikut.

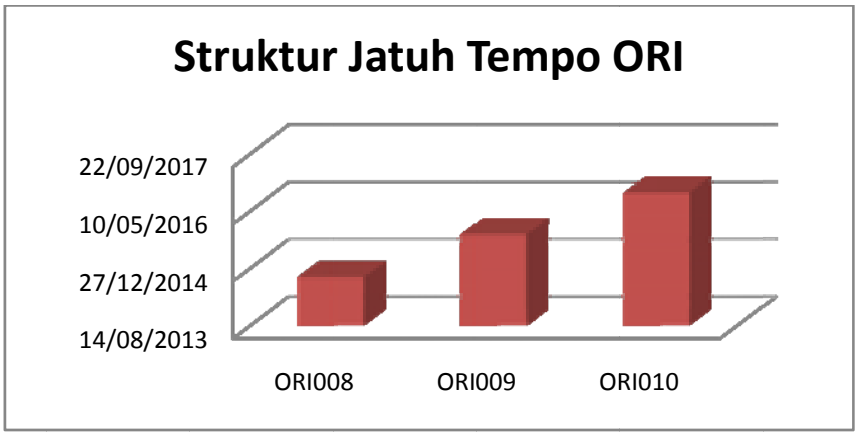
No.	Seri	Issued Date	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	ORI008	10/26/2011	10/15/2014	11.000.000.000.000	7,30000%
2	ORI009	10/10/2012	10/15/2015	12.676.745.000.000	6,25000%
3	ORI010	10/8/2013	10/15/2016	20.205.255.000.000	8,50000%

Tabel 22. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2013



Grafik 46. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2013

Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 47 berikut.



Grafik 47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2013

c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005, sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi berbunga mengambang *(Variable Rate Bonds – VR)*

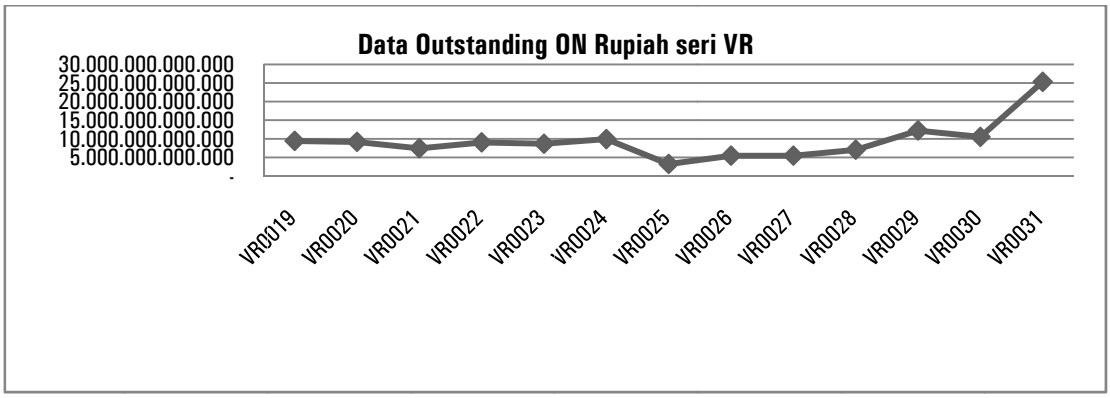
Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir tahun 2013, terdapat 13 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp3,20 T sampai dengan Rp25 T dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2014 sampai dengan 2020.

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	VR0019	12/25/2014	9.411.226.000.000	5,54250%
2	VR0020	4/25/2015	9.164.007.000.000	5,15750%
3	VR0021	11/25/2015	7.436.328.000.000	5,87542%
4	VR0022	3/25/2016	9.016.749.000.000	5,54250%
5	VR0023	10/25/2016	8.652.056.000.000	5,15750%
6	VR0024	2/25/2017	9.909.300.000.000	5,87542%

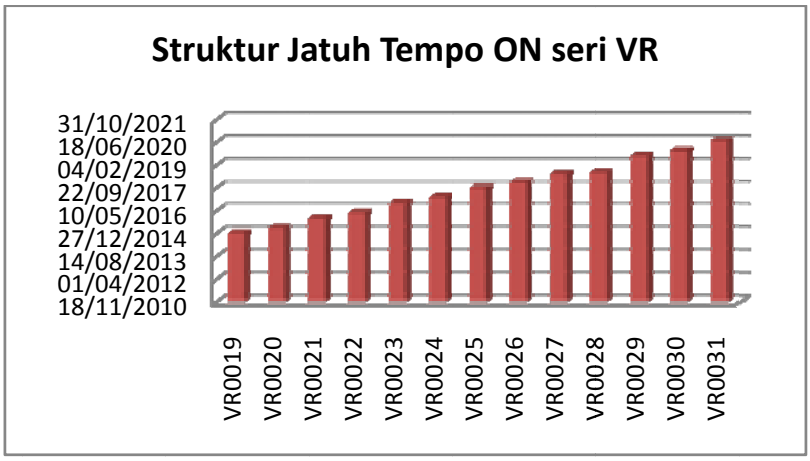
7	VR0025	9/25/2017	3.209.300.000.000	5,54250%
8	VR0026	1/25/2018	5.442.142.000.000	5,15750%
9	VR0027	7/25/2018	5.442.142.000.000	5,15750%
10	VR0028	8/25/2018	7.033.994.000.000	5,87542%
11	VR0029	8/25/2019	12.212.320.000.000	5,87542%
12	VR0030	12/25/2019	10.503.015.000.000	5,54250%
13	VR0031	7/25/2020	25.322.354.000.000	5,15750%

Tabel 23. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri *Variable Rate* (VR) per 31 Desember 2013



Grafik 48. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2013

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 49 berikut.



Grafik 49. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2013

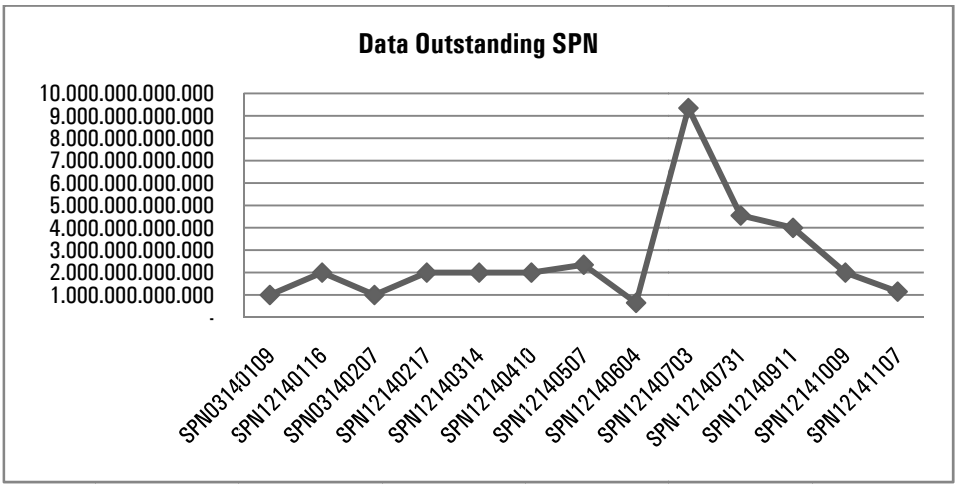
e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2013, terdapat 13 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar Rp650 M dan Rp9,35 T yang akan jatuh tempo pada tahun 2014.

No.	Seri	Maturity	Principle
1	SPN03140109	09/01/2014	1.000.000.000.000
2	SPN12140116	16/01/2014	2.000.000.000.000
3	SPN03140207	07/02/2014	1.000.000.000.000
4	SPN12140217	17/02/2014	2.000.000.000.000
5	SPN12140314	14/03/2014	2.000.000.000.000
6	SPN12140410	10/04/2014	2.000.000.000.000
7	SPN12140507	07/05/2014	2.350.000.000.000
8	SPN12140604	04/06/2014	650.000.000.000
9	SPN12140703	03/07/2014	9.350.000.000.000

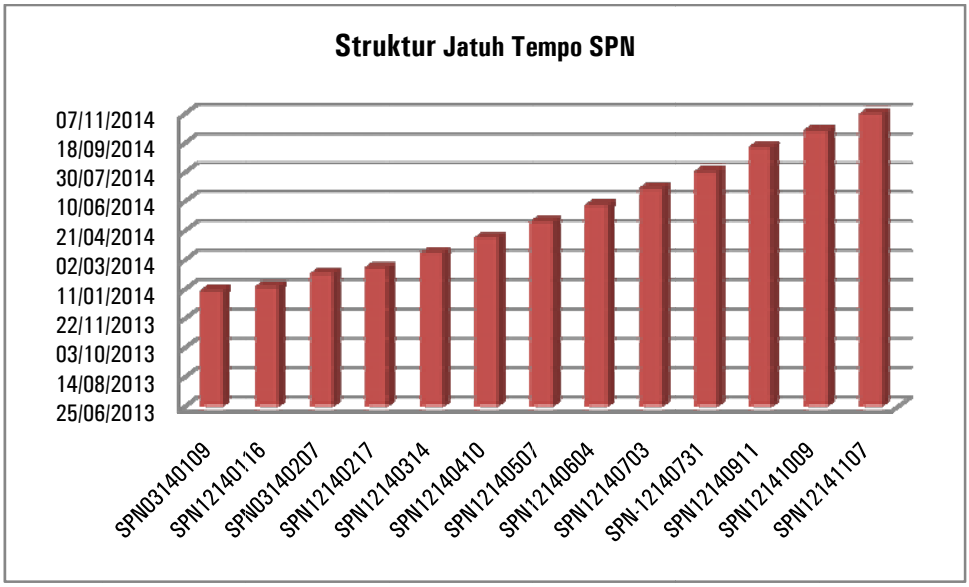
10	SPN-12140731	31/07/2014	4.550.000.000.000
11	SPN12140911	11/09/2014	4.000.000.000.000
12	SPN12141009	09/10/2014	2.000.000.000.000
13	SPN12141107	07/11/2014	1.150.000.000.000

Tabel 24. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2013



Grafik 50. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2013

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 51 berikut.



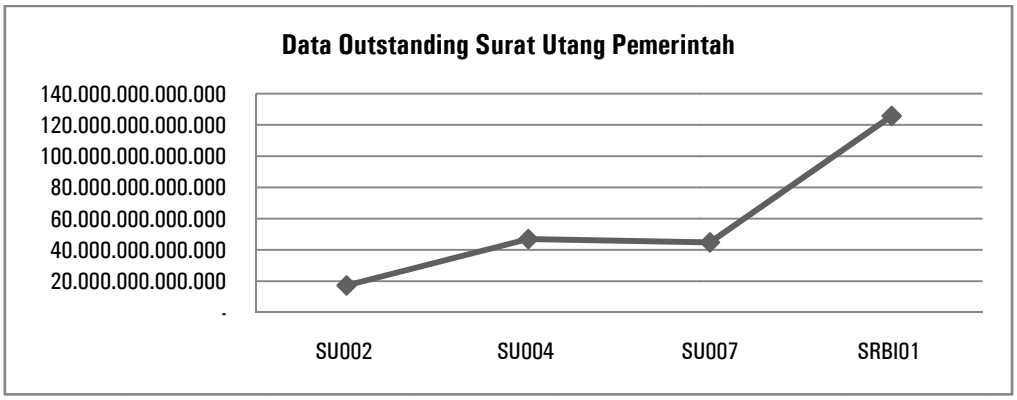
Grafik 51. Struktur Jatuh TempoSPN per 31 Desember 2013

f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data outstanding SUP disajikan pada tabel 25 berikut.

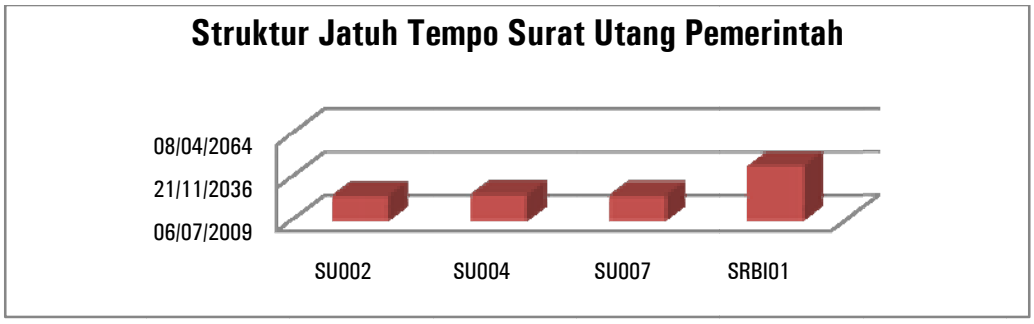
No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SU002	4/1/2025	17.301.016.878.917	0.10000%
2	SU004	12/1/2025	46.959.389.978.801	0.10000%
3	SU007	8/1/2025	44.879.533.762.779	0.10000%
4	SRBI01	8/1/2043	125.729.597.585.206	0.10000%

Tabel 25. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013



Grafik 52. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 9 berikut.



Grafik 53. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013

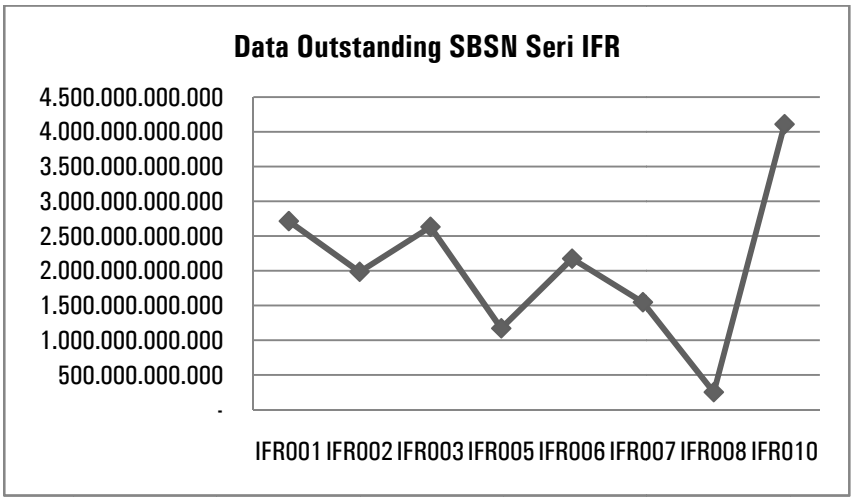
g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR *(Fixed Rate)* dibayarkan setiap enam bulan sekali *(semi-annually)*. SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

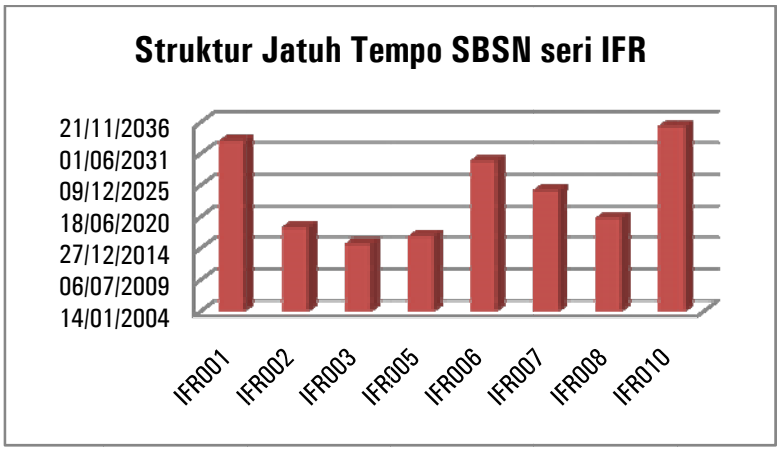
Pada akhir tahun 2013, terdapat 8 seri SBSN jenis IFR yang masih beredardengan masa jatuh tempo antara tahun 2015 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,80% sampai dengan 11,95% yang disajikan dalam tabel 26 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%
4	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%

Tabel 26. Struktur *Outstanding*SBSN seri IFR per 31 Desember 2013



Grafik 54. Struktur *Outstanding*SBSN seri IFR per 31 Desember 2013



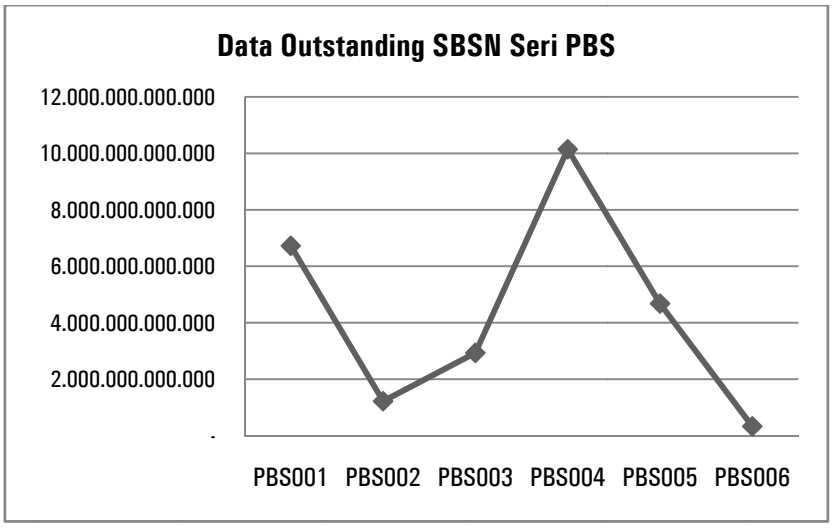
Grafik 55. Struktur Jatuh TempoSBSN seri IFR per 31 Desember 2013

h. *Project Based Sukuk (PBS)*

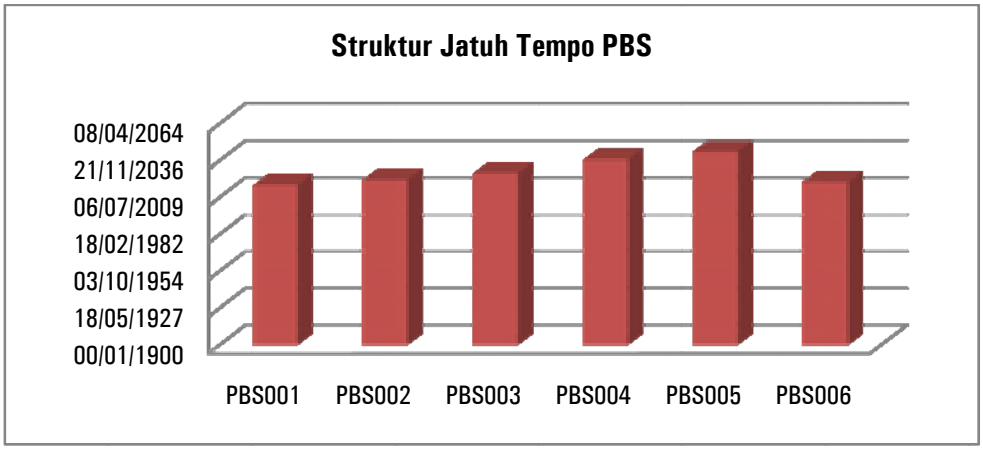
Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir tahun 2013 terdapat 6 seri PBS yang beredar sebagaimana disajikan dalam tabel 27 berikut.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding (Rp)	Rate (%)
1	PBS001	15/02/2018	6.725.000.000.000	4,45000%
2	PBS002	15/01/2022	1.218.000.000.000	5,45000%
3	PBS003	15/01/2027	2.932.000.000.000	6,00000%
4	PBS004	15/02/2037	10.149.000.000.000	6,10000%
5	PBS005	15/04/2043	4.679.000.000.000	6,75000%
6	PBS006	15/09/2020	327.000.000.000	8,25000%

Tabel 27. Struktur *Outstanding*SBSN seri PBS per 31 Desember 2013



Grafik 56. Struktur *Outstanding*SBSN seri PBS per 31 Desember 2013



Grafik 57. Struktur Jatuh TempoSBSN seri PBS per 31 Desember 2013

i. Sukuk Ritel (SR)

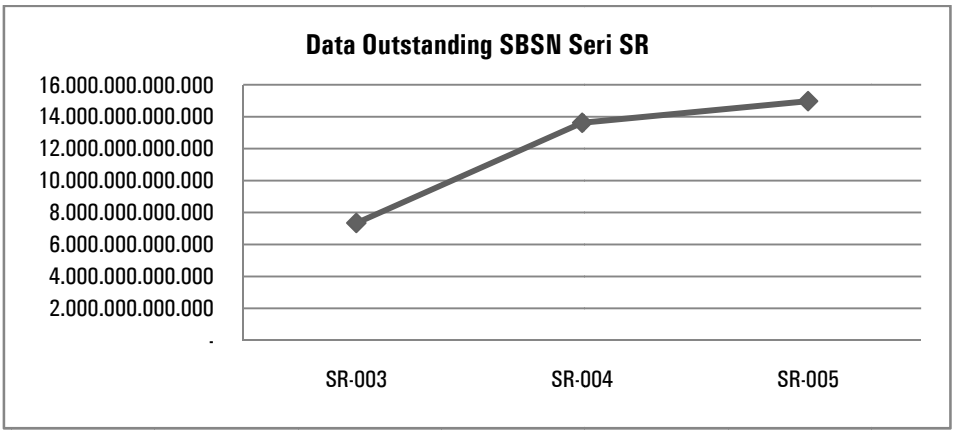
Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

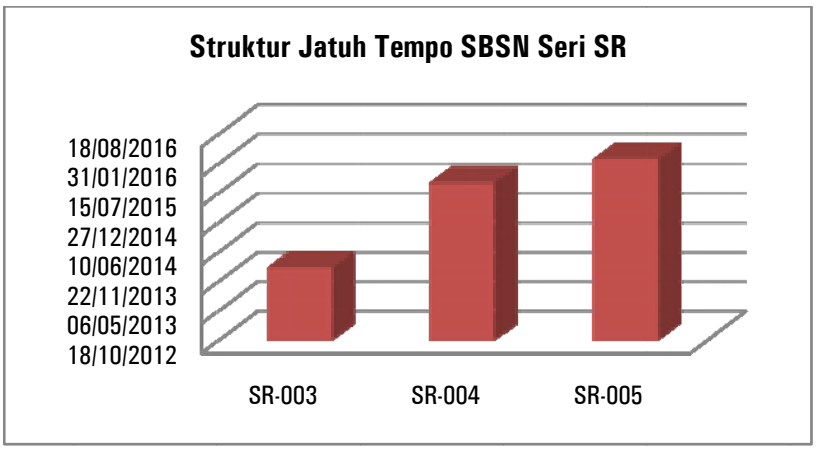
Tahun 2013, pemerintah menerbitkan satu seri SR yaitu SR005 dengan tingkat imbal hasil 6,00% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp14.968.875.000.000sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2013 menunjukkan ada 3 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang disajikan pada tabel 28.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SR-003			
2	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%
3	SR-005	27/02/2016	14.968.875.000.000	6,00000%
Jumlah			**35.924.090.000.000**	

Tabel 28. Struktur *Outstanding*SBSN seri SR per 31 Desember 2013



Grafik 58. Struktur *Outstanding*SBSN seri SR per 31 Desember 2013



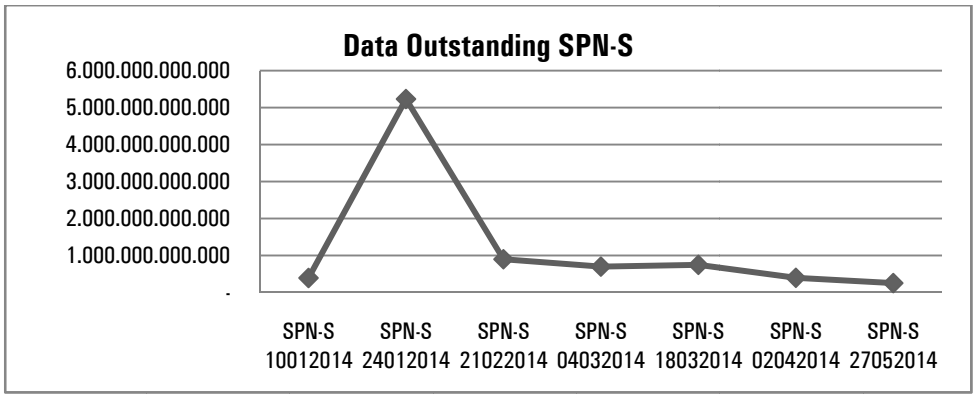
Grafik 59. Struktur Jatuh TempoSBSN seri SR per 31 Desember 2013

j. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

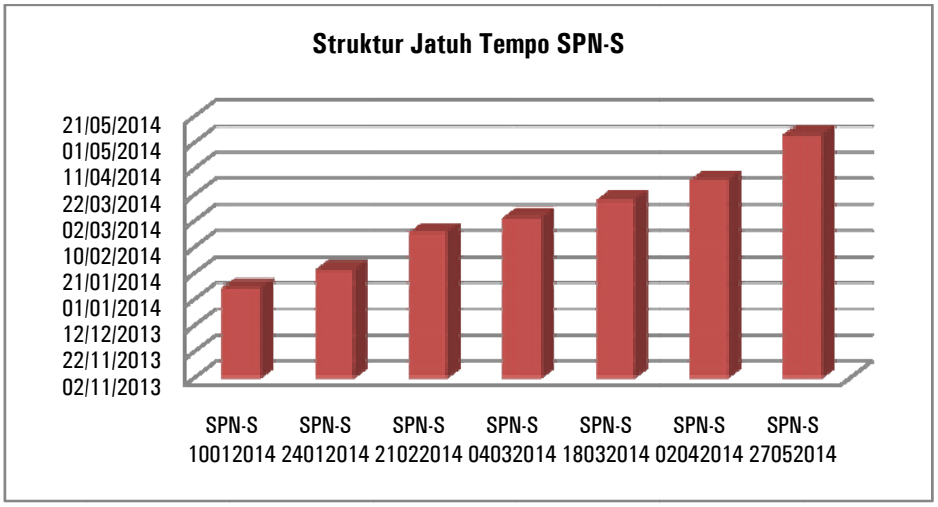
SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2013 , terdapat 7 seri SPN-S yang beredar dengan *outstanding* berkisar Rp255 M dan Rp5,23 T yang akan jatuh tempo pada tahun 2014.

No.	Seri	Maturity	Principle
1	SPN-S 10012014	10/01/2014	395.000.000.000
2	SPN-S 24012014	24/01/2014	5.235.000.000.000
3	SPN-S 21022014	21/02/2014	900.000.000.000
4	SPN-S 04032014	04/03/2014	700.000.000.000
5	SPN-S 18032014	18/03/2014	748.000.000.000
6	SPN-S 02042014	02/04/2014	400.000.000.000
7	SPN-S 27052014	07/05/2014	255.000.000.000
JUMLAH			**8.633.000.000.000**

Tabel 29. Struktur *Outstanding*SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013



Grafik 60. Struktur *Outstanding*SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013



Grafik 61. Struktur Jatuh TempoSBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013

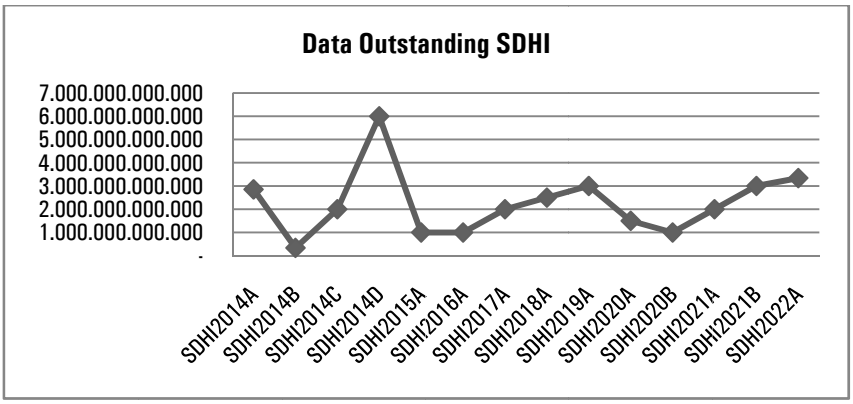
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan.

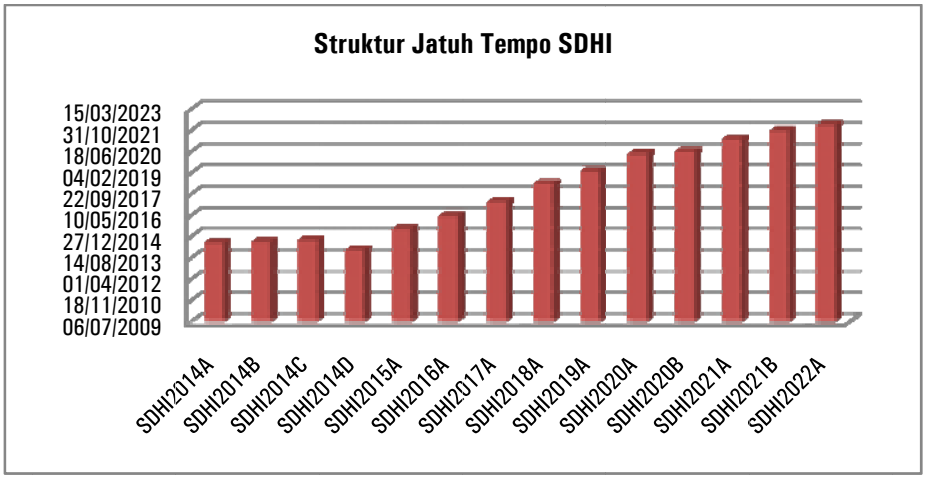
Pada akhir tahun 2013, terdapat 14 seri SDHI dengan nilai outstanding Rp31, 53 T.

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%
2	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%
3	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%
4	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%
5	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%
6	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%
7	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%
8	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%
9	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%
10	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%
11	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%
12	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%
13	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%
14	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%
Jumlah			**31.533.000.000.000**	

Tabel 30. Struktur *Outstanding*SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013



Grafik 62 Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013



Grafik 63. Struktur Jatuh TempoSBSN seri SDHI per 31 Desember 2013

C. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

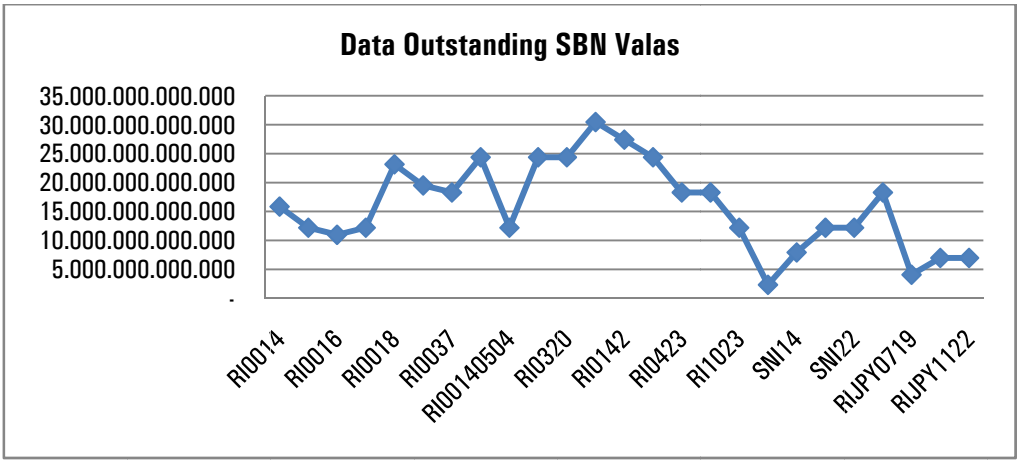
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2013 , terdapat 21 seri SUN valas dengan 18 seri memiliki denominasi USD (termasuk SUN domestik yang berdenominasi valas) dan 3 seri dengan denominasi JP¥. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,13% sampai dengan 11,625% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2038. Selain itu terdapat 4 seri SBSN valas tingkat imbalan mulai dari 3,30% sampai dengan 8,80%. Data *outstanding* SBN valas disajikan dalam tabel 31 berikut

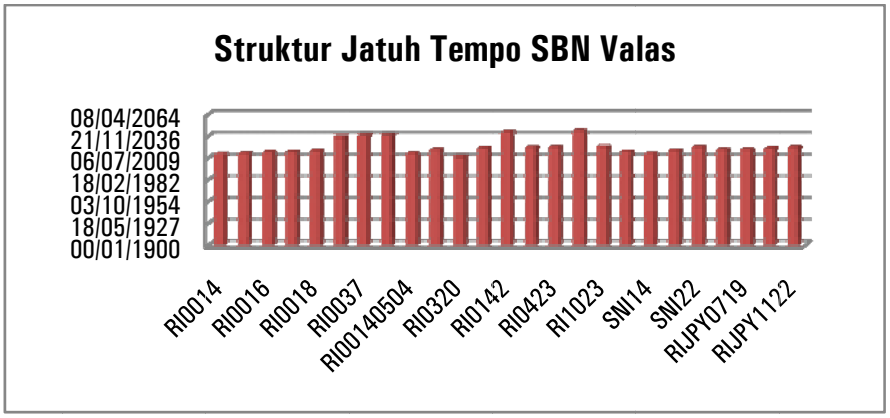
No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
1	RI0014	10/03/2014	15.845.700.000.000	6,75000%
2	RI0015	20/04/2015	12.189.000.000.000	7,25000%
3	RI0016	15/01/2016	10.970.100.000.000	7,50000%
4	RI0017	09/03/2017	12.189.000.000.000	6,87500%
5	RI0018	17/01/2018	23.159.100.000.000	6,87500%
6	RI0035	12/10/2035	19.502.400.000.000	8,50000%
7	RI0037	17/02/2037	18.283.500.000.000	6,62500%

No.	Seri	Maturity Date	Outstanding	Rate (%)
8	RI0038	17/01/2038	24.378.000.000.000	7,75000%
9	RI00140504	04/05/2014	12.189.000.000.000	10,37500%
10	RI00190304	04/03/2019	24.378.000.000.000	11,62500%
11	RI0320	13/03/2010	24.378.000.000.000	5,87500%
12	RI0521	05/05/2021	30.472.500.000.000	4,87500%
13	RI0142	17/01/2042	27.425.250.000.000	5,25000%
14	RI0422	25/04/2022	24.378.000.000.000	3,75000%
15	RI0423	15/04/2023	18.283.500.000.000	3,37500%
16	RI0443	15/04/2043	18.283.500.000.000	4,62500%
17	RI1023	17/10/2023	12.189.000.000.000	5,37500%
18	USDFR	15/05/2017	2.315.910.000.000	3,50000%
19	SNI14	23/04/2014	7.922.850.000.000	8,80000%
20	SNI-18	21/11/2018	12.189.000.000.000	4,00000%
21	SNI22	21/11/2022	12.189.000.000.000	3,30000%
22	SNI19	15/03/2019	18.283.500.000.000	6,12500%
23	RIJPY0719	29/07/2019	4.065.950.000.000	2,73000%
24	RIJPY1120	12/11/2020	6.970.200.000.000	1,60000%
25	RIJPY1122	22/11/2022	6.970.200.000.000	1,13000%
Jumlah			**399.400.160.000.000**	

Tabel 31. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013

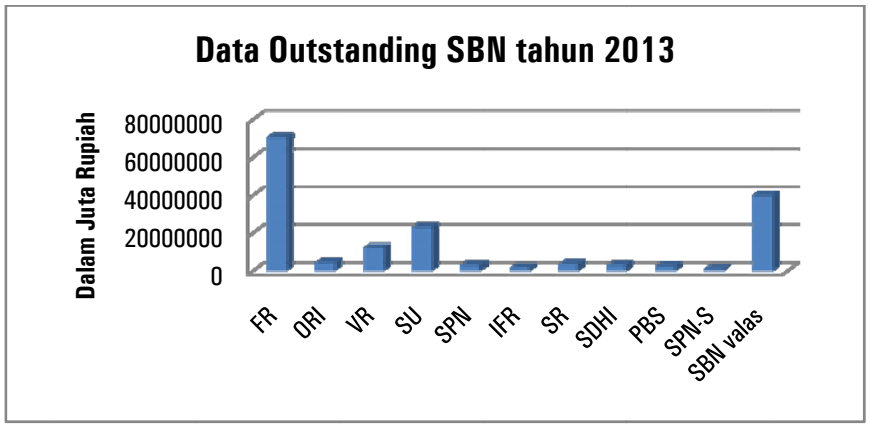


Grafik 64. Struktur OutstandingSBN Valas per 31 Desember 2013 (dalam rupiah)



Grafik 65: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013

Secara umum, struktur outstanding SBN pada akhir tahun 2013, dapat digambarkan pada grafik 22 berikut.



Grafik 66: Struktur Outstanding SBN per 31 Desember 2013

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2013

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya.Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2013 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 32 berikut.

Mata Uang	Saldo awal Th 2013	Saldo Awal 2013 (Rupiah)	Mutasi 2013	Saldo Akhir tahun 2013	Saldo Akhir 2013 (Rupiah)
a	b	c	d	e	f
IDR	1.096.193.554.084.150	1.096.193.554.084.150	265.969.130.000.000	1.362.162.684.084.150	1.261.654.464.205.700
USD	$ 25,600,000,000.00	247,552,000,000,000	$ 5,690,000,000.00	31.290.000.000	381.393.810.000.000
JPY	¥ 155,000,000,000.00	17,355,350,000,000	¥ -	155.000.000.000	18.006.350.000.000
Jumlah		**1,361,100,904,084,150**			**1.661.054.624.205.700**

Tabel 32. Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2013

Kurs tengah BI tgl 28 Desember 2012 USD = 9.670, JPY = 111.97
Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2013 USD = 12.189, JPY = 116.17

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2013

Target APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN + SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2013, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp98.145.890.000.000 sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp98.147.282.638.824 sehingga terdapat pagu minus sebesar Rp1.392.630.824. Hal ini terjadi karena kurs valas yang melebihi proyeksi.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali.

Untuk tahun 2013, target SBN neto adalah sebesar Rp231.800.000.000.000dengan realisasi sebesar Rp224.640.971.513.583. Adapun rincian sebagaimana disajikan pada tabel 33 berikut.

No.	Akun	Uraian	Jumlah
Penerimaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	42.400.000.000.000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	187.631.255.000.000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	2.904.598.200.000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjulan SBSN - Jangka Panjang	23.507.074.053.640
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	107.679.673.000
6	711461	Penerimaan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	777.800.946.360
7	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	41.493.925.823.035
8	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	11.653.000.000.000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	2.856.042.000
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	17.237.922.715.000
Total Penerimaan			**327.716.112.453.035**
Pengeluaran			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	31.170.000.000.000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	49.761.974.878.452
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali	3.527.385.000.000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	2.444.191.774.000
5	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	122.729.287.000
6	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	0
7	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	12.833.860.000.000
8	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	3.215.000.000.000
Total Pengeluaran			**103.075.140.939.452**
SBN Neto			**224.640.971.513.583**

Tabel 33. SBN Neto tahun 2013

Keterangan: Realisasi SBN Neto dengan Penerimaan dan Pembayaran Utang Bunga.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat
Telp / Fax (021) 5720954
www.bpk.go.id